

PEMANFAATAN UAV UNTUK Mendukung Pertahanan Udara IKN Nusantara Sebagai Center Of Gravity

Oleh :

Andi Fathurrachman Batara Sulo¹⁾, Romie Oktovianus Bura²⁾, Sovian Aritonang³⁾

^{1,2,3}Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: faturoyal6@gmail.com

²email: sbli1@yahoo.com

³email: soviaan.aritonang@idu.ac.id

Abstrak

Pemindahan ibu kota mengantarkan era geostrategis baru. Namun demikian, letak IKN yang strategis tidak lepas dari ancaman gangguan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh aktor negara, aktor non-negara, dan hibrida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemanfaatan UAV Mendukung Pertahanan Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sebagai Center Of Gravity. Metode penelitian kualitatif dengan studi literatur digunakan dalam artikel ini. Hasil kajian mengungkapkan bahwa dalam ranpttagka mengamankan ibu kota negara, unit pertahanan udara harus ditambahkan ke lokasi-lokasi vital. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pangkalan udara setiap provinsi yang perlu dimobilisasi dengan pasukan darat dan penyebaran kekuatan pesawat tempur, dan UAV. Keamanan wilayah udara yang maksimal diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah udara, karena tanpanya kedaulatan akan terancam oleh serangan penerbangan dari pihak ketiga. Di sisi lain, para pemangku kepentingan juga diharapkan siap, termasuk pemerintah, para ahli, dan media, yang memiliki peranan vital dalam membentuk persepsi dan persepsi publik tentang potensi ancaman berdasarkan karakteristik daerah. Selain itu, mengingat masyarakat adalah aktor yang sangat berperan pada pertahanan dan keamanan negara, maka dikenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata).

Kata kunci: pertahanan udara, UAV, IKN, sishankamrata

1. PENDAHULUAN

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dianggap sebagai penghubung semua kegiatan di negara ini. Pusat pemerintahan, pemerintahan pusat, pusat perdagangan, jasa, keuangan, rekreasi, pendidikan dan kesehatan, semuanya dapat ditemukan di Jakarta. Dengan segala kerumitannya, Jakarta menimbulkan lingkungan yang tercemar akibat pencemaran udara, air, dan tanah; kemacetan lalu lintas, banjir, banyaknya permukiman kumuh, kemiskinan, dan kriminalitas menjadi ciri kehidupan di ibu kota, sehingga idealnya sebuah ibukota dapat menyokong proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang berkelanjutan dan kondusif. (Kapiarsa, 2020)

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada dua alasan utama mengapa langkah pemindahan ibukota harus segera dilakukan. Pertama, akan mendorong pembangunan di luar pulau Jawa, sehingga mengurangi ketimpangan regional yang terus berlanjut antara Jawa dan pulau lainnya. Tidak bisa dipungkiri jika Jawa merupakan rumah bagi hampir 150 juta orang atau 56% dari total penduduk Indonesia. Jawa juga memberikan kontribusi pangsa ekonomi terbesar yaitu 58,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kontribusi Wilayah Metropolitan Jakarta sendiri terhadap PDB nasional adalah 20,8%. Meskipun kebijakan masa lalu untuk redistribusi penduduk dan kegiatan ekonomi ke pulau-pulau lain, seperti transmigrasi, desentralisasi, dan zona ekonomi khusus, Jawa tetap sangat

dominan dalam hal populasi dan sumber daya ekonomi. (Salim & Negara, 2019)

Di sisi lain, Pemindahan ibu kota mengantarkan era geostrategis baru. Namun demikian, letak IKN yang strategis tidak lepas dari ancaman gangguan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh aktor negara, aktor non-negara, dan hibrida. Hal ini tidak lain karena ibukota Nusantara IKN terletak di dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sekaligus sebagai *choke point* atau titik tersempit dunia. Sementara itu, IKN dekat dengan Flight Information Region (FIR) negara tetangga, antara lain Singapura, Kinabalu, Malaysia, Manila dan Filipina. (Anam, 2021)

Berbagai pelanggaran teritorial sering terjadi selama penyelenggaraan keamanan dan pertahanan dirgantara. Pelanggaran kedirgantaraan dapat terjadi ketika pesawat tempur, pesawat nonkomersial, sarana transportasi udara, dan pesawat luar angkasa lainnya digunakan. Untuk mengusut masalah pelanggaran udara, salah satu pemicu pelanggaran tersebut adalah kemampuan deterrent Indonesia yang masih terbatas. (Zalia, 2018) Meski pesawat asing yang melanggar wilayah udara suatu negara bukanlah isu baru di dunia penerbangan, namun tetap menjadi headline di media lokal bahkan internasional. Hal ini dikarenakan dapat berimplikasi terhadap politik, buruknya hubungan kedua Negara, serta merenggangnya hubungan Indonesia dengan negara lain.

Pertahanan ideal negara Indonesia masih sulit dipahami, karena negara-negara tetangga meningkatkan kekuatan militernya, yang berpotensi menimbulkan ancaman militer. (Widodo, 2015) Oleh karena itu, penggunaan sistem *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* pada hakikatnya merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, seiring dengan respon terhadap dampak kemajuan teknologi yang pesat dan seiring dengan pelaksanaan *Revolution in Military Affairs (RMA)* yang bertujuan untuk mencapai kemampuan Jaringan *Network Centric Warfare* atau Operasi Terpusat. Sistem kendaraan udara tak berawak muatan, sumber daya manusia, sistem kontrol, jaringan data, dan bagian pendukung membentuk UAV. Manusia tidak ada dan sistem dikendalikan dari jarak jauh, baik secara manual maupun otomatis. (Pasaribu et al., 2017)

Teknologi drone adalah contoh teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasi militer sebagai alat bantu maupun sebagai senjata. Drone dilengkapi dengan berbagai komponen teknologi militer untuk mengunggulkan kemampuan pengawasan dan penyerangan mereka. Drone militer adalah teknologi paling modern untuk digunakan dalam peperangan dan mereka telah meningkatkan efektivitas pertempuran dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan teknologi drone dalam peperangan di sisi lain membutuhkan ekosistem produk yang terintegrasi dan saling menguntungkan. (Lesmana et al., 2021)

Berdasarkan urgensi dan relevansi pada pendahuluan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemanfaatan UAV Untuk Mendukung Pertahanan Udara IKN Nusantara Sebagai Center Of Gravity.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penyelidikan yang bertujuan untuk memahami kebermaknaan data, angka, serta peristiwa dan fenomena yang terjadi. (Herdiansyah, 2010) Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literature dari berbagai sumber jurnal nasional maupun internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena Pindahan Ibu Kota Negara

Pengalihan, pengembangan dan restrukturisasi tata kelola ibukota Negara adalah fenomena umum yang diadopsi banyak negara. Selama satu abad terakhir lebih dari 31 negara telah berhasil memindahkan ibu kota mereka. Lebih dari 35 negara di berbagai kawasan secara aktif membahas rencana pemindahan ibu kota negaranya. Menurut sejarah, ibu kota negara dipindahkan setiap 2-3 tahun. Tahun ini tidak terkecuali. Bahkan itu hanya terjadi setiap dua tahun belakangan ini. (Kementerian PPN/Bappenas, 2020)

Pemindahan ibu kota negara mayoritas dilatarbelakangi oleh persoalan di ibu kota sebelumnya. Isu-isu tersebut dapat berupa kemacetan lalu lintas, banjir, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Motivasi lain pemindahan ibu kota antara lain upaya pemerataan pembangunan nasional, penguatan jati diri bangsa, dan isu/perlawanan sosial politik. Secara lebih mendalam, kita akan membahas best practice negara-negara yang telah berhasil merelokasi ibu kota negaranya serta pembelajaran dari pemindahan ibu kota negara Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa relokasi Ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur akan membantu meringankan beban Jakarta yang terkenal padat dan sering banjir. Parlemen Indonesia menyetujui relokasi ibu kota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan yang dikenal sebagai 'Nusantara'. Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia pada tahun 2019, dalam upaya untuk mengurangi tantangan lingkungan yang besar di kota ini dan mendistribusikan kembali kekayaan. Ibukota baru Nusantara yang berarti "kepulauan" dalam bahasa Jawa akan dibangun di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal dengan hutan dan populasi orangutannya. Kalimantan Timur yang kaya mineral hanya berpenduduk 3,7 juta orang. Menurut pejabat 256.142 hektar tanah telah disisihkan untuk proyek yang akan berlangsung pada "semester pertama" 2024. Rencana awal untuk ibu kota baru menggambarkan desain utopis yang bertujuan untuk menciptakan *smart city* yang ramah lingkungan. (Firstpost, 2022)

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa rincian wilayah kepentingan pertahanan dan keamanan yang ada, serta rencana pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mendukung pertahanan IKN, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tabel kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan Kaltim

Kawasan Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Lokasi Kabupaten/Kota
Komando Daerah Militer (Kodam)	Balikpapan
Komando Resort Militer (Korem)	Samarinda
Yonif 600/ Raider	Balikpapan
Yonif 611/ Awang Long	Samarinda
Yon Armed 18-105 MM/Tarik	Berau
Den Kavser 1	Balikpapan
Den Arhanud Rudal 002	Bontang
Rai Armed 105/Trk	Tenggarong
Den Zipur 7	Balikpapan
Komando Distrik Militer (Kodim)	Tersebar
Pangkalan TNI AL (Lanal)	Balikpapan
Pangkalan TNI AL (Lanal)	Sangatta
Batalyon TNI AL (Lanal)	Sangatta
Pangkalan TNI AU	Balikpapan

Sumber: (Kapiarsa, 2020)

Geografi pertahanan didefinisikan sebagai salah satu metode yang digunakan untuk lebih

mendalami karakteristik geografis suatu wilayah, kondisi sosial dan budaya masyarakat dan ancaman pertahanan guna menyiapkan pertahanan suatu wilayah. Berdasarkan penelitian yang dikaji oleh (Kapiarsa, 2020), dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam rangka membangun IKN maka perlu menguatkan pertahanan dan keamanan yang terintegrasi tidak hanya di wilayah Kalimantan Timur akan tetapi dengan wilayah di sekitarnya seperti Kalimantan Utara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Jika perlu, pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Filipina juga melalui diplomasi pertahanan dan kerja sama trilateral. Selain itu, kerjasama dengan provinsi lain di pulau Kalimantan dan Sulawesi diperlukan untuk memerangi ancaman perbatasan tanah air khususnya di Kalimantan Barat.

3.2 Ancaman Kedaulatan Udara

Kompleksitas ancaman yang ada saat ini terlihat dari semakin berkurangnya peningkatan perang asimetris melibatkan tindakan lintas batas nasional dan Internasional serta intensifikasi operasi militer tradisional seperti invasi dan konflik langsung. Agresi, kegiatan intelijen, blokade, pencurian asset, sumber daya alam, penularan penyakit, dan bahaya lainnya adalah contoh dari ancaman ini. (Pasaribu et al, 2017) Pelanggaran wilayah udara (*aerial intrusion*) terjadi ketika pesawat asing (baik sipil maupun militer) memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin. Kejadian itu bisa disengaja (misalnya penerbangan gelap / penerbangan hitam dengan tujuan tertentu) atau tidak disengaja (misalnya, pesawat tersesat / pesawat dalam kesulitan). (Savitri & Prabandari, 2020)

Karena pentingnya hal tersebut, negara harus memiliki strategi pengelolaan perbatasan yang komprehensif untuk menghindari dan memitigasi berbagai bahaya yang berasal dari daerah perbatasan negara. Operasi pesawat tanpa awak (UAV) menjadi skala prioritas dalam menjalankan misi untuk meningkatkan kemampuan pengawasan termasuk di daerah perbatasan dalam rangka menjawab kebutuhan keamanan khususnya di daerah perbatasan. Lebih lanjut, dengan penggunaan pesawat UAV dalam menjalankan tugasnya pihak-pihak yang sering melanggar hukum pada akhirnya akan mengetahuinya. Namun hal ini dapat menimbulkan dampak positif dengan mempersempit peluang atau bahkan membuat rencana tersebut semakin sulit untuk dilaksanakan. Terakhir penggunaan kendaraan udara tak berawak (UAV) ditujukan untuk menguatkan jaringan keamanan di kawasan perbatasan. (Pasaribu et al., 2017)

Dalam menghadapi ancaman keamanan di udara, TNI Angkatan Udara berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah udara NKRI. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas TNI Angkatan Udara antara lain melaksanakan tugas TNI di angkatan udara di bidang pertahanan, penegakan

hukum, pemeliharaan keamanan, yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas TNI dalam pembinaan angkatan udara, dan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. TNI Angkatan Udara wajib berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi wilayah udara yang aman. Hal tersebut dapat diwujudkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut dalam kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No.1 Tahun 2009, dalam kasus pelanggaran wilayah udara, diperlukan kekuatan nyata TNI Angkatan Udara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran di wilayah udara. (Savitri & Prabandari, 2020)

3.3 Konsep pertahanan Udara

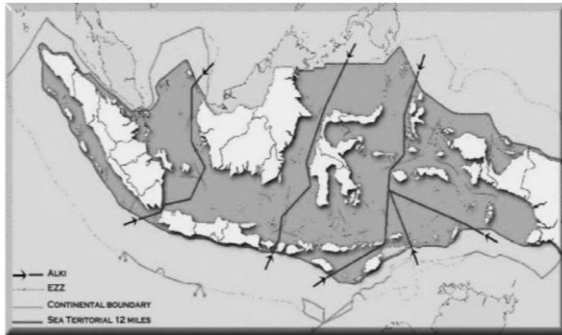
Komponen utama pertahanan dikembangkan dengan pendekatan berbasis kapabilitas, yang meliputi pengembangan kekuatan yang berorientasi modernisasi bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta pematapan bagi TNI Angkatan Darat. Kerangka tersebut memungkinkan penerapan pertahanan berbasis kapabilitas, diantaranya: (Bimantoro, 2019)

1. mempunyai kekuatan esensial minimum (*Minimum Essential Forces*);
2. Menghadapi pelaksanaan tugas yang nyata dan mendesak, serta membangun kekuatan deterrence;
3. Beradaptasi dengan perkembangan dunia militer modern (*Revolution Military Affairs*);
4. Membangun kekuatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keuangan negara; dan
5. Mengutamakan pemanfaatan Industri Nasional

Pengakuan internasional atas wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberi Indonesia secara keseluruhan banyak kredibilitas. Wilayah udara di atas daratan dan lautan suatu negara disebut sebagai wilayah udara. Wilayah suatu negara umumnya dibagi menjadi tiga dimensi: darat, air, dan ruang udara. Namun, tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut) dan beberapa negara seperti Laos, Kamboja, Nepal, Kazakhstan, Swiss, Austria, Irak, Kongo, Nigeria, dan lain-lain, diklasifikasikan sebagai negara yang terkurung daratan menurut hukum internasional. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, China, Korea, Jepang, dan negara-negara lain memiliki ketiga dimensi tersebut. (Setiani et al., 2017)

Ketika negara-negara mengembangkan teknologi pesawat, wilayah udara memperoleh nilai ekonomi dan strategis. Indonesia juga memperoleh keuntungan ekonomi dan strategis ketika mulai menggunakan teknologi dirgantara untuk keperluan transportasi, pertahanan dan keamanan nasional. (Zalia, 2018) Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat termasuk pemerintah, peradilan dan media harus waspada dan antisipatif untuk mencapai tingkat persepsi dan kesadaran yang diinginkan masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat umum merupakan aktor penting dalam pertahanan dan keamanan negara, yang juga disebut sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). (Saputra et al., 2021)



Gambar 1. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sumber: PP No 37/2022

Menurut jalur ALKI, rezim hukum laut diberikan hak untuk terbang "bebas" untuk pesawat milik kelompok armada laut. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang berlakunya hukum udara internasional yang tidak mengenal jalur bebas karena kedaulatan negara bersifat total dan eksklusif berdasarkan Konvensi Chicago. Selanjutnya lintasan terbang di atas ALKI telah digunakan untuk pesawat yang bukan bagian dari kelompok armada tetapi dipekerjakan sebagai "airways" dan bukan bagian dari kelompok armada. Perbedaan persepsi ini menjadi pekerjaan rumah untuk dapat segera menyelesaikan multipersepsi UNCLOS 1982, yang di satu sisi tidak memberikan pengakuan internasional terhadap keberadaan negara kepulauan dan di sisi lain memberikan pengakuan internasional terhadap keberadaan negara kepulauan, sebuah negara kepulauan. (Risdiarto, 2019)

Untuk menjaga kedaulatan di wilayah udara, keamanan wilayah udara yang maksimal adalah suatu keharusan karena tanpa itu kedaulatan akan terancam oleh serangan penerbangan dari pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencapai keamanan wilayah udara nasional yang maksimal TNI Angkatan Udara sebagai pelaksana tanggung jawab menjaga kedaulatan wilayah udara nasional dan penegakan hukum harus terakomodasi dalam segala kepentingannya. (Savitri & Prabandari, 2020)

3.4 Pemanfaatan UAV Untuk mendukung Pertahanan Udara IKN

Kendaraan udara tak berawak (UAV) juga dikenal sebagai "drone" dianggap sebagai bagian dari teknologi mutakhir dan multifaset saat ini. Teknologi ini masih ada pada tahap awal adopsi dan percobaan secara luas. *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) merupakan teknologi mutakhir yang dapat digunakan untuk keperluan militer, publik, dan sipil. UAV telah digunakan di militer selama lebih dari 25 tahun terutama untuk pengawasan perbatasan, pengintaian dan serangan. Medan perang kemungkinan akan sangat dinamis hari ini dan di masa depan,

memerlukan integrasi sensor, penembak, *Post Strike Damage Assessment* (PSDA) dan kemampuan serangan ulang pada platform jaringan tunggal. Ini akan memperpendek loop *Observe-Orient-Decide-Act* (OODA) dan memberi komandan keuntungan yang menentukan dalam operasi. (Lesmana et al., 2021)

Pada masa kini, drone terutama melakukan fungsi intelijen, pengawasan, akuisisi target dan pengintaian. Sehingga memerlukan pengumpulan berita tentang area yang ditargetkan kondisi lokal dan target potensial termasuk individu menggunakan berbagai sensor seperti inframerah, radar, frekuensi radio, termografi, dan suara. *Drone Medium Altitude Long Endurance* (MALE) dan *drone High Altitude Long Endurance* (HALE) adalah dua jenis sistem drone yang digunakan untuk periode pengawasan yang lebih lama. Sistem drone MALE biasanya terbang pada ketinggian mulai dari 25.000 hingga 50.000 kaki dan dapat bertahan di udara hingga 24 jam. Sistem HALE seperti namanya, dapat terbang di ketinggian hingga 60.000 kaki hingga 32 jam. (Zwijnenburg & Postma, 2018)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan berkembang pesat terutama di era Internet of Things (IoT). Kecerdasan buatan dan drone adalah mitra yang keren dalam teknologi. Kecerdasan buatan (AI) pada drone adalah program komputer yang dapat membuat fungsi mesin seperti kecerdasan manusia misalnya membuat keputusan, memecahkan masalah dan membuat prediksi. Penambahan kecerdasan buatan pada drone membuat fungsi drone lebih kompleks sehingga dapat membantu manusia melakukan pekerjaan yang sulit. (Marshal, 2020)

Menurut Dario Azzelini, penggunaan teknologi drone sebagai senjata tempur menunjukkan perubahan paradigma baru dalam peperangan. Indikator lainnya adalah munculnya "pemain baru" dalam perang terbukti dengan munculnya organisasi militer swasta yang tidak hanya menyediakan senjata tempur tetapi juga orang-orang tempur yang siap berperang di garis depan mengusir personel militer tradisional. (Ardhiansyah, 2022) Penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) untuk berbagai keperluan yang dinilai murah dari segi operasional memberikan kesan bahwa negara-negara berlomba-lomba dalam pembangunan, termasuk Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk negara dengan wilayah daratan dan perairan yang luas seperti Indonesia, penggunaan teknologi drone khususnya untuk keamanan kawasan sangat ideal terutama dalam hal sulitnya menjangkau lapangan di darat dan di laut serta menyelamatkan nyawa. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Ardhiansyah, 2022)

Kebutuhan militer Indonesia akan drone saat ini menjadi salah satu yang paling mendesak, Karena kehadiran drone militer berbagai jenis misi akan dapat diselesaikan dengan teknologi mumpuni. Alhasil, Indonesia kini harus menambah jumlah

drone UAV-nya, terutama yang berkualitas HALE dan MALE. HALE adalah jenis UAV yang dapat terbang untuk waktu yang lama. Dengan keunggulan tersebut HALE dapat menjalankan misi pengawasan secara efisien. Kendaraan HALE juga dirancang untuk berkomunikasi dengan satelit operasional memungkinkan data yang dikumpulkan selama pengamatan berkelanjutan untuk ditransfer ke pengamat di Bumi. Di bidang militer dan untuk keperluan alutsista HALE dapat digunakan untuk menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut. Ketinggian terbang HALE yang lebih tinggi dari pesawat komersial memungkinkannya untuk mengamati pesawat yang secara ilegal memasuki wilayah udara Republik Indonesia. (Nathan et al., 2019)



Gambar 2. Drone Tempur HALE
Sumber: (Indomiliter, 2019)

4. KESIMPULAN

Permasalahan di ibukota sebelumnya mendorong perlunya ibu kota negara melakukan relokasi di Kalimantan Timur. Kemacetan lalu lintas, banjir, kepadatan penduduk dan tantangan lainnya adalah penyebab dari masalah ini. Pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu mengurangi sebagian beban Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengamankan ibu kota negara, unit pertahanan udara harus ditambahkan ke lokasi-lokasi vital. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pangkalan udara setiap provinsi yang perlu dimobilisasi dengan pasukan darat dan penyebaran kekuatan pesawat tempur dan drone. Keamanan wilayah udara yang maksimal diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah udara, karena tanpanya kedaulatan akan terancam oleh serangan penerbangan dari pihak ketiga.

Selain itu, pemangku kepentingan seperti pemerintah, pakar dan media juga diharapkan siap karena mereka membentuk sikap dan persepsi publik tentang potensi bahaya berdasarkan kekhasan wilayah. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pemain kunci dalam pertahanan dan keamanan negara, yang biasa disebut dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata).

5. 5. DAFTAR PUSTAKA

Anam, K. (2021). *Duh! Ternyata Banyak Ancaman Pertahanan di Ibu Kota Baru*. CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211228171002-4-302753/duh-ternyata-banyak-ancaman-pertahanan-di-ibu-kota-baru>

- Ardhiansyah, A. (2022). URGENSI PENGATURAN UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE (UAV) SEBAGAI SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 150–179. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Bimantoro, G. B. (2019). Analisis Strategi Personal Selling Marketing Communication Di PT . Infoglobal. *Manajemen Bisnis*, 22(1), 43–63. [file:///C:/Users/Jennifer/Oktavia/Downloads/158-Article Text-278-1-10-20200424.pdf](file:///C:/Users/Jennifer/Oktavia/Downloads/158-Article%20Text-278-1-10-20200424.pdf)
- Firstpost. (2022). *Explained: Why Indonesia is moving its capital from Jakarta to Nusantara*. First Post. <https://www.firstpost.com/world/explained-why-indonesia-is-moving-its-capital-from-jakarta-to-nusantara-10299131.html>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika.
- Indomiliter. (2019). *Akinci UCAV: Drone Tempur HALE Dengan Dua Mesin Propeller*. Indomiliter. <https://www.indomiliter.com/akinci-ucav-drone-tempur-hale-dengan-dua-mesin-propeller/>
- Kapiarsa, A. B. (2020). Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru Indonesia Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(2), 16. <http://139.255.245.7/index.php/MP/article/view/627>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>
- Lesmana, D., Permana, Y., Santoso, B., & Infantono, A. (2021). Aplikasi Drone Militer Dengan Produk Alutsista Indonesia untuk Over the Horizon Operations. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3(November), 1–10. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.149>
- Marshal, D. (2020). Application of Drone Using Artificial Intelligence for Industry in Indonesia. *President University, 023201905005*, 1–13.

- Nathan, Santoso, E. A., & Jenie, Y. I. (2019). Riset Pesawat Udara Nir Awak di FTMD ITB: Pengembangan, Hasil, dan Lessons Learned. *Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU)*, 1(1), 261–268.
- Pasaribu, F., Anwar, S., & Bonar, T. (2017). PENGGUNAAN SISTEM UNMANNED AERIAL VEHICLE DALAM PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI INTEROPERABILITAS SKADRON UDARA 51 TNI AU DAN DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI AD). *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara*, 3(2), 115–139.
- Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 277. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>
- Salim, W., & Negara, S. D. (2019). Shifting the Capital from Jakarta: Reasons and Challenges. *Perspective*, 2019(79), 1–9.
- Saputra, S. D., J, T. G., Halkis, M., Studi, P., Pertahanan, E., Pertahanan, F. M., & Pertahanan, U. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation of the Capital C. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192–220.
- Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 236–245. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.236-245>
- Setiani, B., Hukum, F., Azzahra, U., Melayu, K., & Timur, J. (2017). *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing State Sovereignty over the Airspace*. 2.
- Widodo, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Udara. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 9(2), 163–183. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v9i2.345>
- Zalia, H. (2018). AIR DEFENCE OPERATION DEFENCE IN DEPTH STRATEGY TO PROTECT THE AEROSPACE SOVEREIGNTY OF CROSSRIGHT VIOLATIONS BY FOREIGN MILITARY AIRCRAFT IN 2012-2017. *JOM FISIP*, 110265, 110493.
- Zwijnenburg, W., & Postma, F. (2018). Unmanned Ambitions Security implications of growing proliferation in emerging military drone markets. *PAX*.

DISHARMONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENIMBULKAN GANGGUAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH

Oleh:

M. Ichsan Syirait Ramadhan¹⁾, I Gede Sumertha²⁾, Eri R Hidayat³⁾

^{1,2,3}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email:ichsansyirait@gmail.com

²email:gedesu16@yahoo.com

³email:eri_hidayat@yahoo.com

Abstrak

Tulisan yang berjudul “Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Menimbulkan Gangguan Stabilitas Keamanan Daerah” ini menganalisis tentang persoalan kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan keinginan dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Hal ini tentu melahirkan berbagai konflik sebagai bentuk kritis masyarakat sehingga gangguan keamanan di berbagai wilayah menjadi terganggu. Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pusat kadang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah sebagai akibat menggeneralisir kebijakan secara keseluruhan wilayah sehingga menimbulkan pemborosan anggaran negara. Sementara permasalahan di daerah cukup kompleks dan berbeda-beda. Terlebih lagi keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah menuntut mereka harus mengoptimalkan kebijakan pembangunan yang ada. Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kebijakan dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebijakan pembangunan yang dicanangkan perlu ada komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah secara intensif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mencanangkan kebijakan pembangunan serta struktur birokrasi tidak berbelit-belit terhadap usulan kebijakan pembangunan daerah ke pusat. Ditopang keaktifan pemerintah daerah untuk melihat persoalan masyarakat di setiap wilayah sesuai dengan urgensi kriteria yang harus segera diakomodir dan bermanfaat untuk jangka panjang perlu dilakukan. Sehingga potensi timbulnya gangguan keamanan dari kebijakan pembangunan bisa dicegah dan menjawab tantangan persoalan di daerah yang ada.

Kata Kunci: Disharmonisasi, kebijakan pembangunan, keamanan daerah.

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam interaksi sosial. Di negara Indonesia sendiri menunjukkan angka kriminalitas semakin bertambah tiap tahunnya [1]. Kriminalitas yang terjadi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Faktor tersebut disebabkan salah satunya karena terhimpit masalah ekonomi oleh orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia sangatlah kompleks dan dinamis, antara lain kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi hingga kesempatan kerja makin sempit sementara jumlah penduduk yang terus meningkat. Walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan persentase penduduk miskin di Indonesia telah turun 0,43 % menjadi 9,71% , jumlah penduduk miskin yang turun tersebut ialah pada Bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta orang turun 1,04 juta orang dari jumlah pada Bulan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang, posisi angka tersebut tentunya masih terbilang cukup tinggi [2].

Berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah berpikir keras untuk melakukan berbagai upaya beragam guna

mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya ialah melalui implementasi kebijakan pembangunan. Tentunya kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak serta merta dibuat tanpa mempertimbangkan berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat serta bermanfaat secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan normatif dalam menyusun kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah [3]. Tujuan pembangunan Nasional dibuat guna melaksanakan tujuan nasional sendiri yang jelas termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke –IV diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah harus mampu mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ini pasti melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa, baik itu aspek ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan pemerintah sudah cukup baik, namun dalam prosesnya kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah tersebut kadang

tidak tepat sasaran dan menjawab keinginan masyarakat sebab beberapa kebijakan pembangunan pusat menggeneralisir secara nasional tapi tak menjawab permasalahan yang ada di daerah. Apalagi kita ketahui Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari berbagai gugus kepulauan dan kondisi geografis yang berbeda-beda serta ditunjang dengan karakter masyarakatnya yang majemuk dalam mengkritisi berbagai kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tentunya harus berbasis kondisi geografi, kearifan lokal serta permasalahan daerah setempat. Kenyataan yang terjadi dalam merumuskan arah pembangunan nasional dilakukan dengan mekanisme generalisirkeseluruhan daerah oleh pemerintah pusat sehingga bentuk pembangunan di daerah menjadi seragam tidak berlandas atas situasi kondisi yang ada di suatu daerah. Sementara pemerintah daerah sudah berusaha melakukan upaya dengan mengusul berbagai usulan kebijakan pembangunan yang berlandas atas keinginan dan kebutuhan yang ada didaerahnya. Bentuk disharmonisasi inilah yang memicu terjadinya kritisasi dari masyarakat yang bermuara pada tindakan anarkisme. Kritisasi kebijakan pembangunan yang dilakukan masyarakat berangkat dari sistem perencanaan pembangunan kita secara *bottom-up* dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dari level terbawah yaitu masyarakat pedesaan ataupun kelurahan. Usulan-usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang memfasilitasi kebutuhan mereka [4]. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi adalah ketika pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait pembangunan yang diinginkan masyarakat sebagai akibat ketidakmampuan anggaran daerah untuk mengakomodir berbagai usulan tersebut justru yang terealisasi adalah berbeda dengan keinginan mereka. Disharmonisasi antara usulan dan pelaksanaan inilah yang memicu terjadi perselisihan berujung konflik yang membuat stabilitas keamanan di daerah menjadi terganggu. Banyaknya kebijakan pembangunan pusat yang disharmonisasi dengan arah pembangunan yang didaerah tentu akan menimbulkan permasalahan kedepannya.

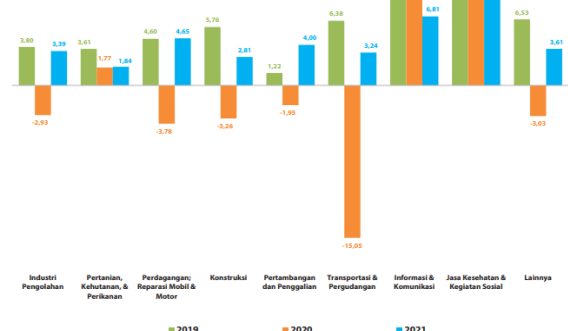
2. METODE PENELITIAN

Dari persoalan tersebut, kajian mengenai gangguan stabilitas keamanan daerah sebagai akibat disharmonisasi kebijakan pembangunan masih belum dibahas. Hal ini membuat penulis berkeinginan mengkaji serta menganalisis guna menemukan penyebab dan solusi terganggunya stabilitasi keamanan daerah akibat disharmonisasi kebijakan pembangunan. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan seluruhnya menggunakan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, studi literatur maupun sumber-sumber lainnya. Menurut Miles dan Huberman memberi penjelasan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan objek sesuai yang ada dilapangan pada saat proses penelitian [5]. Dengan melalui pendekatan studi literatur mendeskripsikan bahwa menurut Zed studi literatur ialah bentuk serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian [6]. Selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk kemudian dituangkan dalam Tulisan ini berjudul “Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan gangguan stabilitas keamanan daerah”. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan pendekatan teori implementasi kebijakan. Teori tersebut mengukur faktor penghambat dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, yang melihat faktor penghambat dan keberhasilan implementasi kebijakan dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap atau perilaku dan struktur Birokrasi [7].

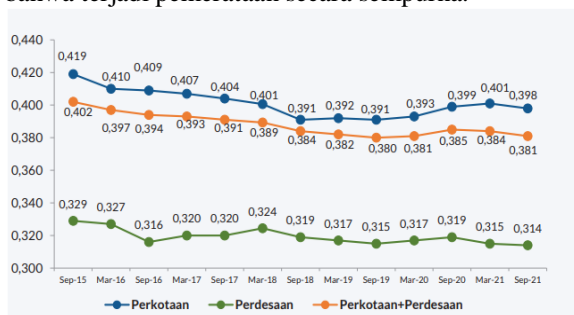
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Nasional pada prinsipnya dilaksanakan guna peningkatan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang satu rangkaian tak terlepas dari suatu sistem penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan nasional. Aspek yang dimaksud ialah mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, politik hingga pertahanan keamanan secara terencana dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional menjadi dorongan atas pelaksanaan tujuan negara agar mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Pembangunan nasional tidak serta merta dilakukan tanpa memperhatikan atau melihat situasi masalah yang ada di Indonesia baik itu persoalan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, hingga bahkan pendapatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia yang di tunjukan pada gambar 1.



Gambar 1. Produk domestik bruto terhadap pertumbuhan lapangan usaha di berbagai sektor

Produk domestik bruto merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur jalannya perekonomian suatu negara, utamanya kaitannya secara makro. Secara sederhana, Produk domestik bruto didefinisikan akan total nilai produksi serta jasa yang dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan dalam suatu negara, baik itu nilai tambah, dalam kurun waktu tertentu, atau biasanya selama setahun [8]. Berdasarkan gambar 1 di tunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan domestik bruto pada berbagai sektor. Sektor terbesar yang mengalami kontraksi adalah sektor transportasi dan perdagangan tahun 2020. Hal ini tentu terjadi pada masa pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Dari angka yang ada tersebut kemudian di tahun 2021 kembali menunjukkan tren positif pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, perekonomian masih didominasi dari sektor Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen, hingga pertambangan sebesar 8,98 persen sehingga dari persentasi berbagai sektor lapangan usaha tertinggi dari Usaha Industri, pertanian, konstruksi dan perdagangan besar mencapai 64,92 persen [9]. Hal tersebut berkesinambungan dengan gini ratio yang juga mengalami penurunan dan penguatan. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan bentuk indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh [10]. Apabila Gini Ratio mendekati angka 1 itu berarti ada indikasi ketimpangan semakin tinggi atau dikatakan ketimpangan yang sempurna bila mencapai nilai tersebut namun bila mendekati 0 menunjukkan bahwa terjadi pemerataan secara sempurna.



Gambar 2. Angka GiniRatio Perkotaan dan Pedesaan (BPS, 2022)

Terlihat pada gambar 2 menunjukkan angka GiniRatio antara Perkotaan, Pedesaan dan Rata-Rata perkotaan serta pedesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa negara Indonesia masih memiliki tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Sehingga perlu dilakukan berbagai kebijakan guna mengatasi hal tersebut. Salah satunya melalui kebijakan pembangunan nasional yang merata.

Pembangunan nasional tentunya dapat tepat sasaran apabila didukung kerja sama berbagai pihak,

baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah serta komponen masyarakat yang ada didalamnya. Mekanisme pembangunan nasional diatur melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan diantaranya mampu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kelompok masyarakat sebagai objek sasaran dari pembangunan itu sendiri mendukung pembangunan melalui keterlibatan partisipatifnya dalam memberi masukan terhadap pemerintah akan berbagai rencana pembangunan yang akan dibuat. Selanjutnya peran aktif pemerintah daerah dalam melihat situasi daerahnya kemudian dielaborasi dengan dukungan anggaran daerah menjadi hal yang sangat penting. Sebab itu akan menjadi masukan dalam memprioritaskan kebijakan pembangunan tepat sasaran yang akan dilaksanakan kedepannya. Intervensi pemerintah pusat dalam kebijakan pemerintah daerah juga sangat membantu daerah dalam mendukung pembangunan di daerah baik itu dukungan anggaran ataupun dukungan sumber daya hingga sarana dan prasarana operasional kegiatan di daerah. Apalagi kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan sumber daya manusia melimpah dengan penduduk sekitar 200 juta lebih yang menjadi modal potensi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi di dalam mekanisme perjalanannya, banyak dukungan pusat yang justru tidak terlalu menjadi prioritas di daerah tersebut, sebab beberapa kebijakan pemerintah pusat justru melihat dari sisi kepentingan nasional tanpa melihat nilai-nilai kultur budaya, kearifan lokal hingga kondisi geografis wilayah tersebut padahal pemerintah daerah telah mengusulkan berbagai permintaan dukungan ke pemerintah pusat guna membantu pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan. Disharmonisasi inilah yang memicu konflik di lapangan karena keinginan masyarakat tak terpenuhi namun justru dijawab dalam kebijakan pembangunan yang berbeda. Kekhawatiran inilah yang menimbulkan stabilitas keamanan daerah menjadi terganggu dan terjadi secara terus menerus

Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam mengoperasionalkan serta menajamkan analisis terhadap persoalan yang ada, maka penulis menggunakan teori George C. Edwards III, untuk menjawab dan melihat faktor apa yang menyebabkan disharmonisasi kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Faktor tersebut bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain guna membantu maupun menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut ialah komunikasi, sumber-sumber,

sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Faktor pertama ialah komunikasi. Geografi di Indonesia menunjukkan cakupan yang sangat luas serta terdiri dari berbagai pulau yang belum memiliki sarana komunikasi hingga pengangkutan belum maksimal. Dalam dinamika implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia, komunikasi yang digunakan ialah melalui komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif yang dilakukan ini mencermati bahwa pembangunan saat ini masih terlalu berfokus pada hal-hal fisik dan terukur [11]. Sementara kebijakan pembangunan fisik tanpa penguatan keterampilan sumber daya manusia masih sangat kurang. Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional salah satunya dengan pola metode *bottom-up*. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan pembangunan di Indonesia masih memiliki keterampilan yang sangat rendah dalam memanfaatkan peluang usaha baik bersumber dari sumber daya alam maupun hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan. Sebab rakyat memiliki peran dalam memberikan penerangan dan penyuluhan masih memiliki kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih cenderung rendah. Masyarakat selalu menganggap bahwa pembangunan infrastuktur dengan datangnya investor untuk berinvestasi di daerahnya dari luar akan yang akan membuka lapangan kerja masih diharapkan oleh masyarakat. Kemudian peran serta pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat melalui program penguatan sumber daya untuk menjadi lebih mandiri masih kurang difasilitasi, pemerintah daerah masih memfokuskan pada sifatnya infrastuktur fisik. Salah satu persoalan komunikasi pembangunan daerah di Indonesia, yaitu Maluku, dalam menangkap ikan hanya menggunakan alat yang sangat tradisional, sementara di Irian Jaya sebagai daerah yang belum maju secara teknologi juga selaras dibuat aturan bahwa jika penduduk suatu suku ingin menangkap ikan di perairan yang menjadi wilayah suku lain, maka teknologi yang digunakan harus sama [12]. Hal inilah yang memicu masyarakat dari daerah lain datang dengan menggunakan alat tangkap bersifat modern sehingga memicu terjadinya konflik antara nelayan akibat penggunaan teknologi yang berbeda. Pentingnya komunikasi pembangunan antar daerah dengan pemerintah pusat sebagai *leader* juga belum mampu mendudukkan permasalahan ini, baik program transfer *knowledge* dan teknologi antar daerah masih belum optimal dilakukan.

Faktor kedua yaitu sumber daya. Agar tercapainya implementasi kebijakan yang efektif, maka sumber daya merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar tentu memiliki modal sumber daya manusia yang besar dalam menyukseskan pembangunan. Kenyataan yang terjadi ialah

pemerintah pusat selalu mencoba mendatangkan tenaga ahli dari luar. Akibatnya sumber daya alam yang ada di daerah dikelola melalui mekanisme bagi hasil dengan perusahaan luar negeri sehingga menyebabkan masyarakat merasa dirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Padahal secara prinsip masyarakat tentu masih memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya tersebut. Unsur sumber daya itu ialah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pembangunan dengan memiliki keahlian yang mumpuni guna melaksanakan tugas-tugas mereka dalam pelayanan publik. Namun tentunya motivasi kerja sumber daya tersebut akan tercipta bilamana kebutuhan personal mereka terpenuhi sehingga meningkatkan etos kerja aparatur tersebut. Tak luput juga bentuk peningkatan kualitas sumber daya akan kemajuan globalisasi juga sangat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pembangunan.

Berangkat dari hal tersebut, dinamika yang terjadi beberapa daerah di Indonesia justru berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Aparatur pemerintahan daerah sebagai pelaksana dan fasilitator kebijakan pembangunan justru banyak tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Hal tersebut dilatar belakangi dengan munculnya otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Akan tetapi aparatur pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemerintah justru mengabaikan usulan aspirasi dari masyarakat. Sehingga membuat usulan yang seharusnya diteruskan secara berjenjang hingga pemerintah pusat menjadi multitafsir yang membuat kebijakan pembangunan yang direalisasikan berbeda dengan keinginan masyarakat. Pemicunya diakibatkan salah satunya ialah karena adanya kesenjangan kesejahteraan yang diperoleh antar daerah karena pendapatan aparatur yang mereka peroleh disesuaikan dengan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sementara beban kerja seluruh daerah di Indonesia sistem dan polanya sama. Hal itu terpenjara ditambah dengan akan diberlakukannya rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengharuskan pemberian belanja pegawai di daerah baik itu tunjangan serta gaji pokok sebagai insentif pegawai pada pembebanan keuangan daerah diharuskan tidak melebihi dari 30% dari pendapatan asli daerah (PAD). Kesenjangan itu terlihat dari kesejahteraan pegawai yang lebih dominan di Pulau Jawa karena sebagian besar investor lebih tertarik berinvestasi di daerah Jawa yang bermuara kepada naiknya pendapatan dalam daerah dan mampu mendongkrak intensif penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini membuktikan peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dalam menjembatani investor untuk masuk di Indonesia masih kurang dalam mempromosikan akan potensi sumber daya yang dimiliki di daerah

lain. Permasalahan inilah yang membuat beberapa daerah aparaturnya pemerintahannya menjadi acuh tak acuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena mereka menganggap bahwa semua daerah digeneralisir melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. Resiko yang terjadi membuat pemerintah pusat sulit menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan direalisasikan di daerah tersebut sebab usulan-usulan pembangunan daerah yang bersumber dari informasi aparaturnya pemerintah daerah tidak menjawab keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, kedepannya membuat daerah yang bersangkutan menjadi sulit mengembangkan potensi dan kemajuan daerahnya.

Faktor ketiga ialah sikap atau berbagai macam kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan pembangunan merupakan salah satu faktor pada implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan yang terjadi dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia syarat akan kepentingan penguasa. Hal ini menyebabkan suara-suara kebutuhan masyarakat yang ada di daerah menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi kita ketahui Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Hal inilah yang membuat sikap pemerintah pusat yang terkadang memiliki egoisme tinggi terhadap pemerintah daerah sehingga berakibat disharmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah. Terkadang pemerintah pusat tidak melihat nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah dalam pembangunan sehingga memicu polemik yang masih sering terjadi hingga saat ini.

Faktor terakhir ialah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi penyelenggara kebijakan pemerintahan. Lahirnya birokrasi sebagai wujud dalam memecahkan berbagai masalah sosial dalam kehidupan modern saat ini. Oleh karenanya sistem birokrasi menjadi hal yang paling fundamental dalam mengkaji suatu implementasi kebijakan. Adapun faktor yang menghambat jalannya suatu struktur birokrasi bisa disebabkan faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berasal dari prosedur-prosedur kerja (SOP) dan faktor eksternal yaitu fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, komite dalam legislatif, *interestgroup* hingga pejabat eksekutif ataupun faktor eksternal lainnya.

Kehidupan nyata yang terjadi dalam birokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Bentuk-bentuk disharmonisasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah masih sering terjadi. Berbagai bentuk disharmonisasi dalam birokrasi salah satunya dalam inefektivitas dan inefisiensi pembangunan. Banyaknya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah masih dilakukan secara serampangan atau masih dalam bentuk *copy* dan *paste* dari tahun sebelumnya serta tidak berfokus pada outcome yang diharapkan dari kebijakan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk disharmonisasi yang menjadikan organisasi pemerintah cenderung masih melebar kemana-kemana tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata, tersedianya sumber daya yang mumpuni, serta dipengaruhi pembentukan organisasi masih terjadi tumpang tindih uraian tugas pokok dan fungsinya belum *inline* atau saling mendukung. Ini terjadi salah satu bentuknya ialah mengenai kementerian lembaga sebagai *leading* dalam mengarahkan kebijakan pembangunan di daerah. Banyaknya perintah dan arahan yang diberikan kementerian lembaga sebagai pemerintah pusat terhadap daerah akhirnya menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan indikator keberhasilan capaian pembangunannya sebab masing-masing kementerian lembaga memiliki masing-masing indikator capaian keberhasilannya. Apalagi ditambah dengan proporsi anggaran daerah yang sangat terbatas dalam mengakomodir berbagai arahan dari pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi pemerintah daerah tidak mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dari masyarakat guna mensejahterakan kehidupannya.

Bentuk Gangguan Stabilitas Keamanan dari Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangatlah berperan penting dalam menyuarakan suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan masukan ataupun evaluasi dalam menentukan sebuah kebijakan. Akan tetapi dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap perkembangan politik belum mampu mengimbangi dinamika demokrasi di Indonesia karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang timbul dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga akhirnya memicu terjadinya konflik. Selain itu kesenjangan sosial yang terjadi dari Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 rata-rata 0,381 membenarkan bahwa kesenjangan di Indonesia masih terjadi, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan memancing terjadinya konflik sosial. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan dalam negeri terkhusus masing-masing daerah di Indonesia sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan lahir dari berbagai faktor kebijakan yang diukur berdasarkan komunikasi, sumber daya, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintah, dan struktur birokrasi yang setiap variabelnya tidak selaras menjadikan pembangunan nasional menjadi tidak tepat sasaran. Hal itu tentu disebabkan karena disharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kemudian

didalam UUD 1945 termaktub bahwa kekuasaan pemerintahan menjadi wewenang Presiden. Kekuasaan ini selanjutnya di jabarkan arahnya melalui kementerian dan lembaga yang ada dibawah presiden sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Guna membantu kementerian dan lembaga tersebut maka pemerintah daerah diberi sebagian wewenang pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat akan isi otonomi daerah. Acuan inilah yang dijadikan pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depannya.

Namun, berbagai dampak yang dianalisis dari faktor-faktor tersebut justru merupakan akar dari persoalan kebijakan pembangunan yang membuat gangguan terhadap stabilitas keamanan daerah. Banyaknya pembangunan nasional yang tidak melihat kondisi geografis dan kearifan masyarakat lokal daerah melahirkan potensi konflik yang berujung terhadap gangguan stabilitas keamanan. Sebab tujuan daripada pembangunan itu sendiri ialah kemampuan peningkatan ekonomi yang berujung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Disharmonisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi akar akan terciptanya suatu persoalan dan masalah yang ada di daerah sebagai bentuk egosentris antara keduanya. Pemerintah pusat yang menganggap dirinya sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan nasional ditambah kondisi pemerintah daerah yang acuh tak acuh terhadap perumusan kebijakan yang berbelit tanpa perhatian pemerintah pusat memadai membuatnya semakin meningkatnya disharmonisasi hubungan ini.

Disharmonisasi hubungan keduanya tentu sangat berakibat fatal dalam menyerap dan memikirkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang harus segera diakomodir apalagi situasi dinamis akan kemajuan global membutuhkan respnsif cepat dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan. Akar persoalan berujung konflik di kelompok masyarakat yang terus menerus timbul tersebutlah membuat kebijakan pembangunan akan menjadi tidak tepat sasaran tanpa hasil yang diinginkan. Bentuk protes dengan kiritik anarkis dari masyarakat terus akan terjadi di Indonesia tanpa sebelumnya memecahkan akar persoalan tersebut terlebih dahulu.

4. KESIMPULAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu bagian dalam mencapai tujuan nasional yang ada di Indonesia sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut perlu adanya hubungan yang baik antara pemrintah pusat dan daerah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Namun dalam kenyataannya ada

berbagai disharmonisasi yang terjadi diantar keduanya. Disharmonisasi ini terjadi dalam berbagai bentuk oleh berbagai faktor diantaranya ;

1. Komunikasi yang dijalin antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya terjalin dengan baik dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat masih belum memperhatikan aspek geografis dan kearifan lokal suatu daera. Sehingga membuat masyarakat kebutuhannya terasa belum terpenuhi dan menimbulkan kritisasi anarkis yang berujung pada gangguan keamanan daerah
2. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan pusat masih cenderung rendah. Kompetensi sumber daya di berbagai daerah membuat perumusan kebijakan pembangunan tidak tepat sasaran sebagai akibat dari pemerataan kesejahteraan penyelenggara pemerintah daerah yang belum merata yang menimbulkan tindakan acuh tak acuh terhadap akomodisasi aspirasi masyarakat sementara beban kerja penyelenggara pemerintah daerah di Indonesia seluruhnya sama.
3. Sikap egosentris pemerintah pusat yang memaksakan pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah menjadi bekerja tidak maksimal, melahirkankecenderungan kebijakan pembangunan nasional sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
4. Struktur birokrasi yang berbelit-belit menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Berbagai indikator penilaian yang berbeda-beda oleh pemerintah pusat pada setiap kementerian dan lembaga menjadikan pembangunan yang seharusnya cepat terlaksanakan menjadi terhambat sebab banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan.

Faktor-faktor tersebutlah yang membuat kebijakan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran karena bentuk disharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga memicu timbulnya konflik dan kritik dari masyarakat dari pembangunan yang terlaksana tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Bentuk krikitik yang dilakukan kadang bersifat anarkis dan berkelanjutan hingga kebutuhan mereka diakomodirole pemerintah. Hal ini berakibat terhadap terganggunya situasi keamanan berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu cara paling efektif dilakukan ialah perlunya keaktifan pemerintah pusat dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek geografis, kearifan lokal serta kondisi internal penyelenggara

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan serta dukungan pemerintah daerah yang aktif melihat situasi daerahnya secara dinamis. Sehingga kebijakan pembangunan nasional yang diinginkan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan masyarakat di daerah dalam peningkatan kesejahteraannya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., Fawzi, A. M., Islam, M., & Said, J. (2021). Impactsof COVID-19 pandemiconnationalsecurityissues: Indonesia as a case study. *SecurityJournal*, 1-20.
- Kuncoro, M., Widoyono, S. B., NURSETYOHADI, D., Agb, M., WURANTI, H., SRININGSIH, S., ... &Dev, M. E. (2021). Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi. Penerbit Andi.
- Anggraini, Yesi, Armen Yasir, and Zulkarnain Ridlwan. "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).
- Sigalingging, Angelius Henry, andWarjioWarjio. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)." *Jurnal Administrasi Publik: PublicAdministrationJournal* 4.2 (2014): 116-145.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Zed, Mestika. Metode peneletian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30.2 (2020): 129-153.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. Prenada Media, 2017.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*.
- REZA, Muhammad; JAMAL, Abd; ZULHAM, T. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Distribusi Pendapatan Wilayah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2019, 6.1: 17-32.
- Heriyanti, Heriyanti. "Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat pesisir (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta)." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank* 2015. StikubankUniversity, 2015.
- Nikijuluw, Victor PH. "Small-scalefisheriesmanagement in Indonesia." *Interactivemechanismsforsmall-scalefisheriesmanagement* 42 (2002).

RESPON PENGGUNAAN MULSA PLASTIK HITAM PERAK TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI MERAH (*Capsicum annuum.L*) DI PERKEBUNAN AFDELING 2 KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU

Oleh :

Galang Diki Trenaldi¹⁾, Yusmaidar Sepriani²⁾, Dini Hariyati Adam³⁾, Ika Ayu Putri Septyani⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas sains dan teknologi Universitas Labuhanbatu

¹email: galangdiki883@gmail.com

²email: seprie87@gmail.com

³email: ikaayuputriseptyani@gmail.com

Abstrak

Cabai merah (*Capsicum annum L.*) merupakan sayuran yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bumbu masak di dapur. Penelitian ini telah dilakukan di Lahan Penelitian di perkebunan afdeling.2 Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai april 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon penggunaan berbagai jenis mulsa terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah, untuk mengetahui jenis mulsa yang terbaik terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. Metode Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 taraf perlakuan yaitu menggunakan mulsa plastik hitam perak, mulsa plastik hitam dan tanpa mulsa plastik yang diulang sebanyak 5 kali di setiap perlakuan. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package For The Social Science) versi 20 dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Hipotesis dan Uji Lanjut LSD Dan Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mulsa plastik hitam perak berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun cabai merah dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada Uji Hipotesis dan Uji Lanjut Duncan.

Kata Kunci: Hortikultura, Cabai merah, Mulsa Plastik

1. PENDAHULUAN

Cabai merah (*Capsicum annum L.*) merupakan sayuran yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bumbu masak di dapur. Cabai merah memiliki rasa yang tidak terlalu pedas di bandingkan dengan cabai rawit, cabai merah banyak mengandung vitamin C. Cabai merah juga banyak digunakan untuk industri makanan kaleng, Saus dan industri obat-obatan. Produksi cabai besar segar dengan tangkai pada tahun 2014 mencapai 147.810 ton. Dibandingkan dengan tahun 2013, telah terjadi penurunan terhadap produksi cabai besar segar dengan tangkai yaitu sebesar 14.123 ton (8,72%). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas panen sebesar 1.946 hektar (11,34%), meskipun produktivitas meningkat sebesar 0,28 ton per hektar (2,95%) dibandingkan tahun 2013 (Bps, 2015). Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, luas areal dan produksi tanaman cabai merah di Labuhanbatu akan semakin meningkat.

Cabai atau lombok termasuk dalam suku terong-terongan (*Solanaceae*) dan merupakan

tanaman yang mudah ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta mengandung minyak atsiri capsaicin, yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah (bumbu dapur). Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar (Wahyudi, 2019).

Tanaman cabai merah besar juga memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk mendapatkan pertumbuhan baik dan hasil yang optimal. Penggunaan mulsa plastik hitam dan perak merupakan salah satu cara untuk mempertahankan produktivitas dan hasil yang optimal dari pengaruh lingkungan yang tidak mendukung selain menggunakan varietas unggul dan pemupukan yang baik. Penggunaan mulsa plastik hitam dan perak ini dapat menjaga wujud tekstur tanah agar tidak cepat kering selalu lembab, serta mencegah tumbuhan liar atau gulma yang dapat mengganggu tumbuhan cabai.

Pemakaian mulsa dapat melindungi tanaman cabai merah dari gangguan hama pengganggu tanaman, dengan pengaplikasian mulsa plastik hitam dan perak diharap untuk hasil panen bakal menjadi meningkat (Susanti, 2020).

Pada musim kemarau, meningkatnya suhu menyebabkan suhu tanah tinggi, kelembaban tanah rendah dan dapat mengakibatkan tanah kehilangan air melalui penguapan. Sehingga, pertumbuhan tanaman cabai merah kurang optimal. Salah satu teknik budidaya yang dapat meningkatkan produksi cabai merah, yaitu dengan memodifikasi iklim mikro di sekitar tanaman dengan menggunakan mulsa (Telaumbanua, 2018)

Mulsa adalah bahan yang digunakan untuk menutupi permukaan tanah dalam meningkatkan produksi dengan tujuan untuk mengurangi penguapan, mencegah tembusnya gulma berlebihan, menghindari terjadinya erosi tanah akibat air hujan, mengurangi pencucian hara yang dapat memperbaiki teknik budidaya. Pemulsaan yang sesuai dapat merubah iklim mikro tanah sehingga dapat meningkatkan kadar air tanah dan menekan pertumbuhan gulma dan mulsa yang telah umum digunakan dalam budidaya pertanian, dapat berupa mulsa sintetik dan mulsa organik (Kamasari et al., 2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon penggunaan mulsa hitam perak, sehingga bisa dilihat penggunaan mulsa hitam perak memberikan respon yang positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (*Capsicum annum*L.).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Penelitian di Perkebunan Afdeling 2 Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober 2021 sampai april 2022. Di Perkebunan afdeling 2. Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tempat penelitian ini merupakan salah satu tempat dimana petani menerapkan penggunaan mulsa plastik hitam perak pada media tanam cabai merah.

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai merah varietas lokal medan sebagai bahan tanam, tanah/lahan pasca perumahan sebagai media tanam, mulsa plastik sebagai perlakuan mulsa, pupuk NPK 16-16-16 dan pupuk dolomite sebagai bahan pemupukan, ajir bambu untuk menopang tanaman, gubuk sebagai naungan lahan penelitian, Fungisida dan insektisida sebagai

pengendali organisme pengganggu tanaman, air untuk menyiram tanaman dan bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul sebagai alat untuk membuat plot/bedengan/gulutan, parang untuk membersihkan lahan, pisau tajam untuk memotong pucuk tanaman, mesin air sebagai penyedot air untuk menyiram tanaman cabai, meteran untuk mengukur luas lahan dan tinggi tanaman, kaleng oli untuk melubangi mulsa, timbangan untuk menimbang pupuk, kalkulator untuk menghitung data, alat tulis, kamera sebagai alat dokumentasi dan alat-alat lainnya yang mendukung berjalannya pelaksanaan penelitian ini.

Rancangan Penelitian

Rancangan yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dengan 3 taraf perlakuan yang diulang sebanyak 5 kali, sehingga terdapat 15 unit percobaan. Susunan 3 taraf perlakuan yaitu :

P0 = Tanaman cabai merah tanpa mulsa plastik.

P1 = Tanaman cabai merah menggunakan mulsa plastik hitam.

P2 = Tanaman cabai merah menggunakan mulsa plastik hitam perak.

Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package For The Social Science*) versi 20 dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Hipotesis dan Uji Lanjut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh normal atau tidak (Hanief dan Himawanto, 2017:68). Uji normalitas ini menggunakan Kolmogorof Smirnov. Kenormalan data dapat dilihat dari nilai $Asymp > 0,05$. Jika nilai $Asymp < 0,05$ maka data tidak tersistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Data dinyatakan homogen apabila nilai $Asymp > 0,05$ dan tidak homogen jika $Asymp < 0,05$.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dapat dianalisis dengan menggunakan Anova, yang memberikan indikasi tentang ada tidaknya beda antar rata-rata dari seluruh perlakuan.

Dengan kriteria:

- Jika nilai $Asymp > 0,05$ = tidak signifikan
- Jika nilai $Asymp < 0,05$ = signifikan
- Jika nilai F hitung $> F$ tabel = variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent

- Jika nilai F hitung < F tabel = variabel independent secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

4. Uji Lanjut

Untuk mengetahui varian homogen maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji LSD (*Least Significance Different*) dan Duncan untuk perbandingan nilai rata-rata perlakuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman cabai merah (*Capsicum annum. L*).

a. Uji Normalitas

Tabel .1

Hasil Uji Normalitas Tinggi Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi .20

		respon penggunaan berbagai jenis mulsa plastik
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,00
	Std. Deviation	,845
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-.215
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,492

Sumber : spss 2020

Hasil dari uji normalitas Kolmogorof-Smirnov menggunakan spss versi. 20 yakni Asymp 0,492 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Tabel .2

Hasil Uji Homogenitas Tinggi Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,172	2	12	,844

Sumber: spss 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp 0,844. Jika disesuaikan dengan ketentuan dari kehomogenitasan nilai Asymp harus > 0,05 maka variansi pada tinggi tanaman cabai merah bersifat homogen. Dimana Asymp 0,844 > 0,05.

c. Uji Hipotesis

Tabel .3

Hasil Uji Hipotesis Tinggi Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	923,200	2	461,600	6,601	,012
Within Groups	839,200	12	69,933		
Total	1762,400	14			

Sumber: spss 2020

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa *Fhitung* dengan nilai 6,601 dan nilai *Asymp* 0,012.

Sesuai dengan ketentuan hipotesis bahwa *Fhitung* > *Ftabel* dan dikatakan signifikan apabila hasil *Asymp* < 0,05. Jadi *Fhitung* yang bernilai 6,601 > *Ftabel* 3,89 serta nilai *Asymp* 0,012 < 0,05 dan bersifat signifikan, Bisa dilihat dari tabel statistik F df v1 = 2 (horizontal) dan df v2 = 12 (vertikal) maka di dapat *Ftabel* sebesar 3,89 dan cara mencari nilai *Ftabel* menggunakan Ms.Exel yaitu ketik =FINV(0,05;2;12) di formula bar maka akan muncul nilai *Ftabel* sebesar 3,89. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi penggunaan mulsa plastik berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai merah (*Capsicumannuum L*).

d. Uji Lanjut

- **LSD (*Least Significance Different*)**

Tabel .4

Hasil Uji LSD Tinggi Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

(I) respon penggunaan berbagai jenis mulsa plastik	(J) respon penggunaan berbagai jenis mulsa plastik	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
LSD tanpa mulsa	mulsa hitam perak	-18,40000 ^a	5,28898	,005	-29,9237	-6,8763
	mulsa hitam	-4,40000	5,28898	,422	-15,9237	7,1237
mulsa hitam perak	tanpa mulsa	18,40000 ^a	5,28898	,005	6,8763	29,9237
	mulsa hitam	14,00000 ^a	5,28898	,021	2,4763	25,5237
mulsa hitam	tanpa mulsa	4,40000	5,28898	,422	-7,1237	15,9237
	mulsa hitam perak	-14,00000 ^a	5,28898	,021	-25,5237	-2,4763

Berdasarkan Tabel 4 uji LSD di atas menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata dari setiap perlakuan. Hal ini dapat dilihat dari setiap nilai signifikansinya.

• **Duncan**

Tabel .5

Hasil Uji Duncan Tinggi Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

respon penggunaan berbagai jenis mulsa plastik	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Duncan ^a tanpa mulsa	5	20,2000	
mulsa hitam	5	24,6000	
mulsa hitam perak	5		38,6000
Sig.		,422	1,000

Sumber: spss 2020

Dari tabel 5 hasil uji duncan di atas terlihat bahwa antar perlakuan berbeda nyata dan yang lebih berpengaruh pada tinggi tanaman cabai merah ditunjukkan oleh mulsa plastik hitam perak.

Jumlah Daun Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum.L*).

a. Uji Normalitas

Tabel .6

Hasil Uji Normalitas Jumlah Daun Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

		respon penggunaan mulsa plastik
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,00
	Std. Deviation	,845
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-.215
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,492

Sumber: spss 2020

Berdasarkan hasil dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa data yang telah diperoleh terdistribusi secara normal. Dapat dilihat dari hasil Asymp Kolmogoroh-Smirnov yakni $0,492 > 0,05$.

b. Uji Homogenitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh bersifat homogen atau tidak. Jadi berdasarkan uji homogenitas ini, peneliti memperoleh data yang bersifat homogen. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp $0,056 > 0,05$ pada tabel 7 di bawah ini

Tabel .7

Hasil Uji Homogenitas Jumlah Daun Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3,712	2	12	,056

Sumber: spss 2020

c. Uji Hipotesis

Tabel .8

Hasil Uji Homogenitas Jumlah Daun Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1672,133	2	836,067	5,065	,025
Within Groups	1980,800	12	165,067		
Total	3652,933	14			

Sumber: spss 2020

Berdasarkan tabel 8 hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp $0,025 < 0,05$. Serta diperoleh nilai Fhitung $5,065 > F_{tabel} 3,89$. Jadi penggunaan mulsa plastik berpengaruh terhadap pertumbuhan Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annuum.L*).

d. Uji lanjut

- **LSD (Least Significance Different)**

Tabel .9

Hasil Uji LSD Jumlah Daun Tanaman Cabai Menggunakan Spss Versi. 20

(i) respon penggunaan mulsa plastik	(j) respon penggunaan mulsa plastik	Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
LSD tanpa mulsa	mulsa hitam perak	-24,20000 ^a	8,12568	,012	-41,9043	-6,4957
	mulsa hitam	-4,20000	8,12568	,615	-21,9043	13,5043
mulsa hitam perak	tanpa mulsa	24,20000 ^a	8,12568	,012	6,4957	41,9043
	mulsa hitam	20,00000 ^a	8,12568	,030	2,2957	37,7043
mulsa hitam	tanpa mulsa	4,20000	8,12568	,615	-13,5043	21,9043
	mulsa hitam perak	-20,00000 ^a	8,12568	,030	-37,7043	-2,2957

Sumber: spss 2020

Berdasarkan Tabel uji LSD di atas menunjukkan pengaruh perbedaan yang nyata disetiap perlakuan. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil signifikan yang berbeda pada tabel di atas.

• **Duncan**

Tabel .10

Hasil Uji Duncan Jumlah Daun Tanaman Cabai Merah Menggunakan Spss Versi. 20

respon penggunaan mulsa plastik	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Duncan ^a tanpa mulsa	5	10,8000	
mulsa hitam	5	15,0000	
mulsa hitam perak	5		35,0000
Sig.		,615	1,000

Sumber: spss 2020

Dari tabel 10 di atas terlihat bahwa antar perlakuan berbeda nyata dan yang lebih berpengaruh pada jumlah daun tanaman cabai merah ditunjukkan oleh mulsa hitam perak.

4. PEMBAHASAN

Cabai merah (*Capsicum annuum L.*) merupakan tanaman sayuran buah yang bernilai ekonomis dan juga dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat sebagai bumbu dapur. Berkeriteria sebagai tanaman yang ekonomis maka cabai merah membutuhkan penggunaan berbagai mulsa plastik yang mampu mempengaruhi masing masing pertumbuhannya. Penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menanam cabai merah pada bedengan/guludan yang menggunakan berbagai mulsa plastik yaitu mulsa plastik hitam perak, mulsa plastik hitam dan tanpa mulsa menunjukkan pengaruh yang nyata pada pertumbuhan masing masing tanaman cabai merah. Hal ini dapat diketahui dari setiap hasil analisis data. Berikut ini akan dibahas apa saja yang dipengaruhi oleh penggunaan mulsa plastik terhadap tanaman cabai merah.

Tinggi Tanaman

Pengaruh dari berbagai penggunaan mulsa plastik terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah adalah pada pertumbuhan tinggi tanamannya. Pengukuran pada tinggi tanaman cabai merah yang dilakukan peneliti setiap minggu dengan alat ukur penggaris menunjukkan pertumbuhan cabai merah yang ditanam menggunakan mulsa plastik hitam perak lebih cepat. Karena, Penggunaan mulsa plastik hitam perak lebih baik untuk pertumbuhan tanaman, karena warna perak pada permukaan bagian atas dapat memantulkan kembali radiasi matahari yang datang sehingga dapat meningkatkan fotosintesis, sedangkan warna hitam dari mulsa tersebut akan menyebabkan radiasi matahari yang diteruskan ke dalam tanah menjadi kecil bahkan menjadi nol. Hal inilah yang menyebabkan suhu tanah tetap rendah

sehingga memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan tanaman (Aditya et al., 2013)

Warna perak pada mulsa akan memantulkan sinar matahari sehingga air tanah menguap lebih sedikit dan dapat mencegah gangguan hama daun (aphid, tungau, thrips, ulat, dan jamur/cendawan) karena silau. Sedangkan warna hitam pada mulsa dapat menjaga kelembaban tanah dan menghambat peluang tumbuhnya gulma.

Jumlah Daun

Daun adalah bagian dari tanaman cabai merah. Cabai merah yang telah ditanam pada bedengan dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak menunjukkan pertumbuhan jumlah daun yang sangat pesat. Hal ini didasarkan karena unsur hara yang terjaga di bawah mulsa plastik merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cabai merah pada pertumbuhan jumlah helai daunnya. Hal ini dikarenakan salah satu unsur yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun adalah unsur N.

Hal ini diduga bahwa mulsa dapat menghambat pertumbuhan gulma dan meningkatkan menjaga suhu tanah. mulsa mempengaruhi iklim mikro melalui penerusan dan pemantulan cahaya matahari, suhu dan kelembaban di bawah dan di atas mulsa, serta kadar lengas tanah sehingga laju asimilasi netto dan laju pertumbuhan tanaman yang menggunakan mulsa lebih baik dibanding tanpa mulsa (Sahrain et al., 2018).

4. KESIMPULAN

Perlakuan jenis mulsa berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai merah meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun. Mulsa plastik hitam perak merupakan jenis mulsa terbaik dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman cabai merah. Hal ini di karenakan warna perak pada permukaan bagian atas dapat memantulkan kembali radiasi matahari yang datang sehingga dapat meningkatkan fotosintesis, sedangkan warna hitam pada mulsa dapat menjaga kelembaban tanah dan menghambat peluang tumbuhnya gulma

5. DAFTAR PUSTAKA

Aditya, A., Hendarto, K., Pangaribuan, D., & Hidayat, K. F. (2013). Pengaruh Penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak Dan Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum L.*) Di Dataran Tinggi. *Jurnal Agrotek Tropika*, 1(2),147–152.

- <https://doi.org/10.23960/jat.v1i2.1986>
- Bps. (2015). *Produksi Cabai Besar, Cabai Rawit, dan Bawang Merah Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Kamasari, A. P., Pertanian, F., & Jember, U. M. (2016). *Efektivitas Penggunaan Jenis Mulsa Dan Kerapatan Tanaman Terhadap Produksi Buncis Varietas Blue Lake*.
- Sahrain, Z., Musa, N., & Pembengo, W. (2018). Respon tanaman cabai merah (*Capsicum annum L.*) berdasarkan aplikasi mulsa jerami padi, cangkang telur dan mulsa plastik hitam perak. *Jatt*, 7(3), 343–350.
- Susanti, A. S. (2020). *Pengaruh Penggunaan Mulsa Plastik dan Produksi Tanaman Cabai Merah Besar (Capsicum annum L.)*.
- Telaumbanua, S. F. (2018). Respons Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai (*Capsicum annum L.*) Terhadap Pemangkasan Pucuk Dan Pemberian Berbagai Jenis Mulsa. *Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara*, 44–48.
- Wahyudi, I. (2019). Penerapan Teknologi Mulsa Plastik Hitam Perak Pada Peningkatan Produksi Tanaman Cabai Merah Besar Di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uleere Kabupaten Bantaeng. In *Skripsi*.

TINGKAT LITERASI LINGKUNGAN DI KALANGAN GURU ECO SCHOOL YOGYAKARTA DI INDONESIA

Oleh

Galih Istiningsih¹⁾, Dwitya Sobat Ady Dharma²⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Magelang

²⁾Center for Studies on Inclusive Education (CSIE)

¹⁾email: galih@ummgl.ac.id

²⁾email:sobat.al.fikri@gmail.com

Abstrak

Literasi lingkungan berpedoman pada pengetahuan tentang bagaimana lingkungan alam bekerja dan peran manusia untuk menjaga alam secara berkelanjutan. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dapat dilihat dari interaksi kehidupan bersama komponennya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya literasi lingkungan bagi setiap individu untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan. Literasi lingkungan guru mempengaruhi literasi lingkungan siswa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis literasi lingkungan guru di Eco Schools Yogyakarta. Literasi lingkungan terdiri dari beberapa komponen pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penelitian dikembangkan dengan kuantitatif untuk memperoleh data dengan observasi dan kuesioner berdasarkan literasi lingkungan kepada 109 guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Eco Schools Yogyakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) literasi lingkungan kepada Guru di Sekolah Dasar Tumbuh terdiri dari pengetahuan, sikap dan perilaku lingkungan. Data yang diperoleh dari instrument adalah (66,45) untuk pengetahuan, (67,61) untuk sikap, (68) untuk perilaku. Hasil menunjukkan bahwa guru eco school memiliki sikap positif terhadap lingkungan, tingkat pengetahuan lingkungan yang sedang sementara partisipasi mereka dalam tindakan lingkungan terbatas, terutama tindakan kolektif. Analisis statistik juga menyoroti bahwa Literasi Lingkungan bergantung pada jenis guru di Eco School dan tempat tinggal. Temuan-temuan ini dibahas lebih lanjut.

Kata Kunci: Literasi Lingkungan Guru, Pengetahuan, Keterampilan, Perilaku, Eco Schools

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan laju penduduk dan standar kehidupan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam karena saling berhubungan (Kayihan & Tönük, 2012; Nurhafni et al., 2019). Hubungan timbal balik yang tidak seimbang akan memunculkan berbagai bencana karena aktivitas manusia berlebihan tidak sesuai dengan nilai agama, gaya hidup dan budaya (Warju et al., 2017; Siswanto et al., 2019; Goulgouti et al., 2019). Merespons hal ini, pendidikan berkelanjutan dipandang sebagai solusi untuk krisis lingkungan (Rickinson, 2001); (Pérez, 2018)(Boca & Saraçlı, 2019);(Kopnina & Kopnina, 2020). Pendidikan berkelanjutan ini dikembangkan untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih seimbang. Perubahan ini berdampak pada kurikulum, hasil belajar, dan infrastruktur sekolah dengan adanya sertifikasi sekolah ramah lingkungan. Sistem sertifikasi sekolah ramah lingkungan biasanya dibentuk untuk memfasilitasi perubahan (Affolter & Varga, 2018);(Mogensen & Mayer, 2005) yang mencakup aplikasi kurikulum dan perubahan kehidupan sehari-hari untuk mendukung perilaku pro-lingkungan (Kurland & Zell, 2011).

Pendidikan berkelanjutan menjadi kunci mempromosikan nilai, sikap, perilaku mendukung keberlanjutan pada masyarakat umum, termasuk anak-anak dan remaja (Gough, 2011);(UNESCO, 2013) yang dapat diimplementasikan dalam program

eco-schools. Eco-schools mendorong inisiatif kaum muda untuk aktif terlibat pada lingkungan dan melestarikan. Tujuan eco-schools untuk peningkatan keanekaragaman hayati di sekolah, pencegahan limbah melalui daur ulang, lebih mengedepankan hemat energi, peningkatan sikap peduli lingkungan, keterampilan pengambilan keputusan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan motivasi untuk berinovasi (FEE, 2011);(Filho, 2019)

(Boeve-de Pauw & Van Petegem, 2018) melaporkan bahwa sekitar 50 negara mengimplementasikan eco-schools dengan cara yang berbeda-beda. Kajian program eco schools di Belgia, Inggris, Ceko Turki, Swedia, Korea, India, Hongaria sembilan topik, yaitu: energi, air, keanekaragaman hayati, alasan sekolah hidup sehat, transportasi, sampah, limbah dan kewarganegaraan global, aspek lingkungan (literasi lingkungan), pedagogi lingkungan, pendekatan dengan ESD, hemat penggunaan energi dan manajemen sumber daya, serta sekolah dievaluasi pada keterlibatan siswa dalam proyek berkelanjutan yang berkontribusi kesadaran lingkungan di masyarakat. Program eco schools diberbagai negara terdiri dari aspek lingkungan ekologi, bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang hidup berdampingan dengan penghematan alam, energi dan sumber daya serta daur ulang. Kedua, aspek pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang

menyenangkan, menciptakan sekolah sebagai sumber daya untuk Pendidikan lingkungan serta dikelola pada Lembaga lingkungan di negara tersebut (Chatzifotiou, 2019); (Cincera et al., 2017); (Korkmaz & Guler Yildiz, 2017); (Mogren & Gericke, 2017); (Park et al., 2011); (Roberts, 2009).

Penerapan eco-schools di Inggris, China, Amerika Serikat menurut (Brouse et al., 2009); (Cusick et al., 2010);(Wang & Côté, 2011) mampu meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang optimal apabila mendapat dukungan dari pemerintah. Penerapan Pendidikan lingkungan di Indonesia menurut (Parker et al., 2018); (Tanu & Parker, 2018);(Prabawa-Sear, 2018) melalui program eco-schools yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran lingkungan dan memiliki sikap warga yang peduli dengan lingkungan baik di dalam Pendidikan formal dan non formal.

Tujuan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga mampu membuat warga sekolah memiliki literasi lingkungan (UNESCO, 2013). Literasi lingkungan adalah mekanisme kerja lingkungan alami terhadap peran manusia dalam melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini senada dengan komitmen agenda 21 yang berupaya mewujudkan pembangunan Pendidikan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*). Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) merupakan hasil dari perumusan agenda 21 KTT Bumi di Brazil pada tahun 1992 yang bertujuan untuk memperkuat Pendidikan lingkungan dengan literasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan telah menetapkan literasi lingkungan sebagai tujuan mengatasi dan melestarikan lingkungan (FEE, 2011). Sejalan dengan tujuan ini, Konferensi Internasional menyampaikan pentingnya mengubah gaya hidup masyarakat dan menemukan pilihan cara mempersiapkan pemuda terlibat dalam inisiasi lingkungan dan membentuk literasi lingkungan (UNESCO, 2013);(United Nations, 2015). Guru harus melakukan tugas mengembangkan literasi lingkungan kepada siswa karena menjadi pionir untuk membuat perlindungan lingkungan (Liarakou et al., 2011). Hal ini dilakukan karena literasi lingkungan guru mempengaruhi literasi lingkungan siswa (Yavetz et al., 2014).

Hasil penelitian (Desfandi et al., 2017) menunjukkan bahwa program eco-schools meliputi kebijakan ramah lingkungan, implementasi kurikulum berbasis lingkungan, lingkungan berbasis partisipatif, dan manajemen fasilitas pendukung ramah lingkungan terbukti efektif meningkatkan literasi lingkungan (literasi ekologis). Selain itu, pengembangan eco-schools dapat meningkatkan kesadaran siswa melalui dukungan orang tua, meningkatkan kerja sama, dan meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa peduli lingkungan

(Nurhafni et al., 2019). Program eco-schools menurut (Warju et al., 2017); (Siswanto et al., 2019) memiliki implikasi terhadap ranah kognitif dengan siswa mampu memahami aspek pendidikan lingkungan, ranah afektif dapat menunjukkan sikap dan perilaku budaya, ranah psikomotorik siswa dapat mengembangkan keterampilan, kreativitas dan produktivitas siswa. Dalam skala global, hasil studi oleh (Ozsoy et al., 2012) menunjukkan bahwa Program eco-school efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan kepedulian siswa terhadap lingkungan, tetapi dalam studi (Spinola, 2015);(Krnel & Naglic, 2009);(de Pauw & van Petegem, 2011) menunjukkan bahwa program Eco School kurang efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Berdasarkan studi di atas ada berbagai hasil mengenai keberhasilan pelaksanaan program eco-schools . Menurut (Tönük & Kayihan, 2013) ini adalah hal yang normal, karena setiap sekolah dan wilayah geografis memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda.

Sekolah memperkenalkan Pendidikan untuk berkelanjutan (EE/ESD) ke dalam kurikulum sekolah dan universitas (Plakitsi, 2020); (UNESCO, 2013). Guru harus memahami Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan karena mereka pondasi mengembangkan sikap positif siswa sejak usia dini (Plakitsi, 2020); (Hsu & Roth, 1998). Penelitian dari (D Saribas, 2015);(Tuncer et al., 2009);(Yavetz et al., 2009) menemukan bahwa siswa lebih cenderung melek lingkungan jika guru mereka memiliki pengetahuan lingkungan yang lebih besar, perhatian dan sikap positif dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Meskipun pentingnya EL survei internasional menunjukkan bahwa guru masa depan memiliki literasi lingkungan sedang atau rendah, namun sikap mereka terhadap lingkungan adalah positif (Goldman et al., 2014);(Gwekwerere, 2015);(Pe'er et al., 2007);(Deniz Saribas et al., 2014) (Tuncer et al., 2009);(Yavetz et al., 2009). Secara indikatif, dalam survei, Deniz Saribas et al., 2014 menyatakan bahwa calon guru di sekolah dasar tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu lingkungan, meskipun mereka memiliki sikap lingkungan positif yang kuat dan keprihatinan yang kuat. Pada saat yang sama, (Tuncer et al., 2009) menyoroiti rendahnya tingkat pengetahuan guru pra-jabatan, tetapi sikap positif terhadap lingkungan. Baru-baru ini, (Gavrilakis et al., 2018) menemukan bahwa guru pra-jabatan

sekolah dasar memiliki tingkat pengetahuan lingkungan yang sedang namun juga memiliki sikap positif terhadap lingkungan. Demikian juga, (Maidou. Plakitsi, 2018) mendukung bahwa guru pra-layanan pendidikan anak usia dini di Yunani memiliki kesadaran yang relatif baik tentang masalah lingkungan tetapi skor lebih rendah pada masalah Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Mereka mendapat informasi tentang fenomena sehari-hari yang terkait dengan perpindahan panas dan energi, tetapi mereka mengalami kesulitan memahami bagaimana struktur dapat mengurangi konsumsi energi. Temuan serupa telah muncul dari survei lain (Boubonari et al., 2013); (Goldman et al., 2014);(Gwekwerere, 2015);(Ikonomidis et al., 2012);(Liu et al., 2015);(Maidou. Plakitsi, 2018); (Pe'er et al., 2007);(Deniz Saribas et al., 2014);(Tuncer Teksoz et al., 2014);(Tuncer et al., 2009).

Secara bersamaan, penelitian tentang EL guru masa depan menyoroiti kesalahpahaman yang mereka miliki tentang masalah lingkungan seperti efek rumah kaca, hujan asam dan lubang ozon (Boubonari et al., 2013); (Ikonomidis et al., 2012); (Maidou. Plakitsi, 2018);(Spiropoulou et al., 2007). Secara indikasi, (Boubonari et al., 2013) menemukan bahwa guru pre-service memegang beberapa kesalahpahaman tentang polusi air. Demikian pula (Ikonomidis et al., 2012), menemukan bahwa calon guru dalam pendidikan dasar memegang kesalahpahaman serius tentang konsep lingkungan terutama mengenai efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Sejalan dengan hal di atas, penelitian yang dipimpin oleh menemukan (Spiropoulou et al., 2007) bahwa guru masa depan memiliki kesalahpahaman tentang keberlanjutan dan energi terbarukan, sementara survei yang lebih baru dilakukan oleh (Maidou. Plakitsi, 2018) menunjukkan bahwa guru-guru pra-sekolah dan sekolah dasar di masa yang akan datang memiliki informasi yang memadai tentang isu-isu yang berkaitan dengan EL tetapi kurang mengenai masalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan karena mereka memiliki kesalahpahaman tentang perpindahan panas.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengevaluasi Literasi Lingkungan guru masa depan untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk kurikulum di semua tingkat pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti EL guru eco schools Yogyakarta Indonesia. Program eco-schools dapat tercapai apabila tim eco-schools termasuk guru memiliki kompetensi dan manajemen literasi lingkungan yang berfokus pada pemberdayaan sikap dan kompetensi literasi lingkungan siswa (Jensen & Schnack, 2006);(Suwandi et al., 2020). Secara khusus, itu meneliti kinerja guru pada literasi lingkungan dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku. Perbedaan antara sikap, perilaku, pengetahuan dengan types of teacher-education dan tempat tinggal juga diperiksa.

2. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur (Cohen, Manion, & Morrison, 2007) dipilih dalam metode penelitian kuantitatif. Secara khusus, dua instrument digunakan. Kuesioner yang diadopsi dari (Yavetz et al.,

2014);(Goulgouti et al., 2019);(Hunter & Jordan, 2019), instrument disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Literasi Lingkungan

Nomor	Dimensi	Aspek
1.	Pengetahuan	a. Pengetahuan ekologis
	(McBride et al., 2013);(FEE, 2011);(Tuncer Teksoz et al., 2014); (Yavetz et al., 2014)	b. Pengetahuan politik sosio c. Pegetahuan tentang isu lingkungan
2.	Sikap	a. Sensivitas lingkungan
	(Dunlap et al., 2000);(Erdogan & Marcinkowski, 2015);(Ajzen, 2011);(Hunter & Jordan, 2019)	b. Self efficacy
3.	Keterampilan	a. Rencana penyelidikan isu.
		b. Analisis isu
	(McBride et al., 2013);(Goulgouti et al., 2019); (Yavetz et al., 2014)	c. Komitmen nyata
	d. Tindakan pro lingkungan	

Responden dalam penelitian ini adalah 109 guru di eco schools Yogyakarta, Indonesia. Karakteristik dasar demografi guru dalam sampel yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status kepegawaian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Demografi Guru Eco Schools

Variabel	Kategori	N	M	SD	%
Agama	Moslem	30			27,5
	Hindu	20			18,3
	Katolik	36			33,0
	Kristen Protestan	23			21,1
	total	109	2,48	1,111	100
Gender	Male	53			48,6
	Female	56			51,4
	total	109	2,83	1,085	100
Kelompok usia	21-25	12			11,0
	26-30	11			10,1
	31-35	42			38,5
	36-40	38			34,9
	above 40	6			5,5
	total	109	3,14	1,049	100
Tingkat pendidikan	S1	77			70,6
	S2	32			29,4
	total	109	2,67	1,401	100
Pengalaman kerja	1-3 th	40			36,7
	4-6th	13			11,9
	7-9th	21			19,3
	10-12th	22			20,2
	13-15th	13			11,9
	total	109	2,59	1,454	100
tempat tinggal	pedesaan	39			35,8
	urban	32			29,4
	suburban	38			34,9
	total	109	1,99	0,844	100
Jenis guru	SD	68			62,4
	SMP	20			18,3
	SMA	21			19,3
	total	109	1,57	0,798	100

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Survei Keseluruhan

Ringkasan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk guru eco school disajikan pada Tabel 3. Hasil survey pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, secara keseluruhan tingkat literasi lingkungan dari sampel guru sekolah dasar ini adalah sedang hingga rendah, khususnya berkenaan dengan kinerja mereka pada pertanyaan sikap. Lebih khusus, persentase rata-rata jawaban benar dari guru eco schools pada pertanyaan pengetahuan, sikap dan pengetahuan

adalah 66,45; 67,61;68. Tingkat kesulitan pengetahuan mencapai 40 %. Perilaku lingkungan cenderung positif ($M= 71,16$) dan lebih tinggi dari pengetahuan dan sikap lingkungan. Keandalan instrument dapat diterima dari mulai 0,68 hingga 0,92.

Tabel 3. Overall survey results

Data	Pengetahuan	Sikap	Perilaku
N	109	109	109
Mean \pm SD	66,45 \pm 10	67,61 \pm 9,6	68 \pm 9,7
Reliabilitas	0,68	0,837	0,921

Pengetahuan Lingkungan

Dari table 4 Pada awalnya, Guru diminta untuk menjawab pertanyaan yang menilai pengetahuan mereka tentang konsep lingkungan, seperti keanekaragaman hayati, energi, dll. Jawaban guru menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan mereka sedang hingga rendah, mengingat bahwa dari semua pertanyaan sekitar setengahnya responden menjawab dengan benar sekitar setengah dari pertanyaan. Persentase mereka yang menjawab dengan benar tertinggi adalah tentang konsep energi dan pentingnya hujan tropis, contoh sumber daya terbarukan dengan persentase 80% (Tabel 4). Kategori sedang 65% sampai dengan 80 % adalah konsep dampak manusia pada siklus karbon, ekologi, pentingnya hutan hujan tropis. Konsep pembangunan berkelanjutan efek rumah kaca, tergolong rendah dengan persentase benar 64%. Demikian pula, (Gavrilakis et al., 2018) juga menemukan bahwa pengetahuan lingkungan guru adalah sedang.

Sikap Lingkungan

Tanggapan guru eco school, meskipun tidak terlalu tinggi, memang jauh lebih baik daripada yang ada pada dimensi pengetahuan (Tabel 5), yang menunjukkan bahwa guru umumnya mengakui adanya masalah lingkungan dan menerima kebutuhan untuk melindungi lingkungan. Khususnya, guru eco schools mengungkapkan sikap yang sangat positif tentang pentingnya Pendidikan Lingkungan untuk EL, karena mayoritas setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagai contoh, responden percaya bahwa itu adalah tanggung jawab setiap guru untuk memasukkan masalah dan nilai-nilai lingkungan dalam pengajarannya, dan 75% menganggap sangat penting untuk mengatur kegiatan sekolah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti kunjungan, pameran, dll. Guru ragu-ragu dalam berpendapat terhadap kursus guru selama di sekolah untuk mengembangkan eco schools dikarenakan selama ini belum ada pelatihan yang mendukung, dengan persentase 83%.

Selain itu, lebih dari setengah responden percaya bahwa kekhawatiran para ilmuwan tentang masalah lingkungan adalah berlebihan, sementara banyak 50 % mendukung bahwa manusia memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil studi penelitian lain tentang sikap lingkungan yang positif (Goldman et al., 2014);(Liu et al., 2015);(Pe'er et al., 2007); (Tuncer et al., 2009);(Tuncer Teksoz et al., 2014);(D Saribas, 2015);(Yavetz et al., 2014). Secara khusus, Pe'er et al., (2007) yang menemukan bahwa sikap guru pre-service keseluruhan terhadap lingkungan adalah positif. Liu et al., (2015) menemukan bahwa guru in-service memiliki tingkat pengetahuan dan sikap lingkungan yang memuaskan. Demikian pula, (Tuncer Teksoz et al., 2014) juga menemukan bahwa guru pre-service memiliki sikap positif.

Perilaku Lingkungan

Tanggapan guru pada dimensi perilaku lebih tinggi dibandingkan sikap lingkungan. Meskipun guru menunjukkan mereka bersedia melakukan lebih banyak, tanggapan mereka pada dimensi perilaku umumnya tidak mencerminkan sikap positif mereka (Tabel 6). Secara khusus, hampir semua guru (69%) melaporkan bahwa mereka mematikan lampu ketika mereka meninggalkan ruangan, dan 59% dari mereka sering mematikan perangkat elektronik atau selalu ketika mereka tidak menggunakannya. Demikian pula, 51% dari mereka mengatakan mereka menghemat air di rumah. Sejalan dengan hal di atas, 59% guru eco schools menggunakan kembali kertas sebagai konsep dan lebih dari setengah menggunakan kembali kantong plastik dan kertas sangat sering atau selalu. Selain itu, lebih dari setengah guru di masa depan bersedia untuk mendaur ulang baterai (52%).

Sebaliknya, sebagian besar guru (75%) menyatakan bahwa mereka tidak menyampaikan atau jarang menyampaikan laporan kepada pihak berwenang atau media massa tentang masalah lingkungan. Demikian pula, 77% dari mereka tidak berpartisipasi atau jarang berpartisipasi dalam organisasi lingkungan (Greenpeace, WWF, dll.) Dan sekitar 32% tidak berpartisipasi atau jarang berpartisipasi dalam aksi (kampanye, demonstrasi, protes) yang ditujukan untuk mencegah bencana lingkungan. Hasil serupa memiliki penelitian lain yang menunjukkan tingkat partisipasi sedang atau rendah dalam aksi lingkungan (Boubonari et al., 2013);(Gavrilakis et al., 2018); (Goldman et al., 2014);(Liu et al., 2015);(Pe'er et al., 2007). Misalnya, (Gavrilakis et al., 2018) merujuk pada rendahnya partisipasi dalam tindakan atau tindakan lingkungan (kampanye, demonstrasi, protes). Demikian pula, (Goldman et al., 2014) menemukan partisipasi terbatas dalam aktivisme lingkungan dan tindakan kewarganegaraan dan (Boubonari et al., 2013) menyatakan bahwa guru pra-jabatan mendapat skor cukup tinggi pada tindakan individu dan rendah pada tindakan kolektif. Demikian pula, Liu et al., (2015) merujuk bahwa guru masa depan disajikan tingkat partisipasi yang rendah dalam

tindakan lingkungan meskipun sikap positif mereka terhadap lingkungan.

Hubungan Antara Pengetahuan Lingkungan, Sikap Dan Perilaku Faktor Latar Belakang Jenis guru

Perbedaan yang signifikan dalam literasi lingkungan berdasar jenis guru yang berbeda, MANOVA satu arah statistic perbedaan yang signifikan literasi lingkungan berdasarkan jenis guru (Wilks $\lambda = 0,832$, $F(8,206) = 2,48$, $P < 0,05$). Kesimpulannya Karena p value (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan literasi lingkungan (pengetahuan, sikap, perilaku dan overall environment literacy) antara jenis guru (guru SD, SMP dan SMA).

Selanjutnya dari Tabel 4 Tests of Between-Subjects Effects, menunjukkan bahwa hubungan antara jenis guru dengan pengetahuan, sikap, perilaku dan overall environment literacy memiliki tingkat signifikansi $p < 0,05$. hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perbedaan literasi lingkungan (pengetahuan, sikap, perilaku dan overall environment literacy) yang diakibatkan jenis guru (guru SD, SMP dan SMA).

Tabel 4. Tests of Between-Subjects Effects jenis guru

Dimensi	Type III Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Pengetahuan	780,819	390,409	4,142	0,019
Sikap	1361,796	680,898	8,300	0,000
Perilaku	1378,542	689,271	8,441	0,000
overall environment literacy	1136,093	568,047	6,949	0,001

Tabel 5 menunjukkan bahwa perbedaan pengetahuan lingkungan berdasarkan jenis guru, yang memiliki perbedaan adalah teacher primary dan teacher senior high. Antara teacher primary dengan teacher senior high dan teacher primary dengan secondary memiliki nilai Mean Difference 6,57; 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan secondary. Sedangkan nilai mean difference teacher senior high dengan teacher secondary adalah -2,69 berarti teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high.

Perbedaan sikap lingkungan berdasarkan jenis guru, yang memiliki perbedaan adalah teacher primary dengan teacher secondary dan teacher secondary dengan teacher senior high. Antara teacher primary dengan teacher senior high dan teacher primary dengan secondary memiliki nilai Mean Difference 5,8; 8,34. Hal ini menunjukkan bahwa sikap lingkungan teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan secondary. Sedangkan nilai mean difference teacher senior high dengan teacher secondary adalah -2,5 berarti teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high.

Perbedaan perilaku lingkungan jenis guru, yang memiliki perbedaan adalah teacher primary dengan teacher secondary dan teacher secondary dengan teacher senior high. Antara teacher primary dengan teacher senior high dan teacher primary

dengan secondary memiliki nilai Mean Difference 5,86; 8,4. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku lingkungan teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan secondary. Sedangkan nilai mean difference teacher senior high dengan teacher secondary adalah -2,55 berarti teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high.

Perbedaan overall environment literacy berdasarkan jenis guru, yang memiliki perbedaan adalah teacher primary dengan teacher secondary dan teacher secondary dengan teacher senior high. Antara teacher primary dengan teacher senior high dan teacher primary dengan secondary memiliki nilai Mean Difference 5,16; 7,71. Hal ini menunjukkan bahwa overall environment literacy teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan secondary. Sedangkan nilai mean difference teacher senior high dengan teacher secondary adalah -2,55 berarti teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high.

Tabel 5. Analisis Tanggapan Guru berdasarkan jenis guru

Dimensi	Jenis guru	Sig	Mean Difference	
kognitif	teacher primary	teacher secondary	0,221	3,88
	teacher primary	teacher senior high	0,009	6,57*
		teacher secondary	0,221	-3,88
	teacher secondary	teacher primary	0,543	2,69
		teacher senior high	0,009	-6,57*
	teacher senior high	teacher secondary	0,543	-2,69
afektif		teacher primary	teacher secondary	0,003
	teacher primary	teacher senior high	0,000	8,34*
		teacher secondary	0,003	-5,84*
	teacher secondary	teacher senior high	0,382	2,50
		teacher senior high	0,000	-8,34*
	teacher senior high	teacher secondary	0,382	-2,50
psikomotorik		teacher primary	teacher secondary	0,003
	teacher primary	teacher senior high	0,000	8,40*
		teacher secondary	0,003	-5,86*
	teacher secondary	teacher senior high	0,371	2,55
		teacher senior high	0,000	-8,40*
	teacher senior high	teacher primary	0,371	-2,55
overall environment literacy		teacher primary	teacher secondary	0,014
	teacher primary	teacher senior high	0,001	7,71*
		teacher secondary	0,014	-5,16*
	teacher secondary	teacher senior high	0,401	2,55
		teacher senior high	0,001	-7,71*
	teacher senior high	teacher primary	0,401	-2,55

Tempat tinggal

Perbedaan yang signifikan dalam literasi lingkungan berdasar tempat tinggal diukur dengan MANOVA satu arah statistic perbedaan yang signifikan literasi lingkungan berdasarkan tempat tinggal (Wilks $\lambda = 0,677$, $F(8,206) = 5,549$, $P < 0,05$). Kesimpulannya Karena p value (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan literasi lingkungan (pengetahuan, sikap, perilaku dan overall environment literacy) antara tempat tinggal (pedesaan, urban dan suburban).

Selanjutnya dari Tabel 7 Tests of Between-Subjects Effects, menunjukkan bahwa hubungan antara tempat tinggal dengan pengetahuan, sikap, perilaku dan overall environment literacy memiliki tingkat signifikansi $p < 0,05$. hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perbedaan literasi lingkungan (pengetahuan, sikap, perilaku dan overall

environment literacy) yang diakibatkan tempat tinggal (pedesaan, urban dan suburban).

Tabel 6. Tests of Between-Subjects Effects tempat tinggal

Dimensi	Type III Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
pengetahuan	1316,187	658,094	7,376	0,001
keterampilan	2596,265	1298,133	18,501	0,000
sikap	2574,878	1287,439	18,237	0,000
overall environment literacy	2102,148	1051,074	14,471	0,000

Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan pengetahuan lingkungan berdasarkan tempat tinggal, yang memiliki perbedaan adalah guru yang memiliki tempat tinggal pedesaan dengan urban, pedesaan dengan suburban. Antara pedesaan dengan urban dan pedesaan dengan suburban memiliki nilai Mean Difference 10,72;9,65. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan guru di pedesaan lebih baik daripada yang berasal dari urban dan suburban. Serta nilai mean difference urban dan suburban adalah (-1,07) hal ini menunjukkan bahwa suburban lebih baik daripada pedesaan.

Perbedaan sikap lingkungan berdasarkan tempat tinggal, memiliki perbedaan adalah guru yang memiliki tempat tinggal pedesaan dengan urban, pedesaan dengan suburban. Antara pedesaan dengan urban dan pedesaan dengan suburban memiliki nilai Mean Difference 10,72;9,65. Hal ini menunjukkan bahwa sikap lingkungan guru di pedesaan lebih baik daripada yang berasal dari urban dan suburban. Serta nilai mean difference urban dan suburban adalah (-1,07) hal ini menunjukkan bahwa suburban lebih baik daripada pedesaan.

Perbedaan perilaku lingkungan tempat tinggal, yang memiliki perbedaan adalah guru yang memiliki tempat tinggal pedesaan dengan urban, pedesaan dengan suburban. Antara pedesaan dengan urban dan pedesaan dengan suburban memiliki nilai Mean Difference 10,67;9,63. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku lingkungan guru di pedesaan lebih baik daripada yang berasal dari urban dan suburban. Serta nilai mean difference urban dan suburban adalah (-1,04) hal ini menunjukkan bahwa suburban lebih baik daripada pedesaan.

Perbedaan overall environment literacy berdasarkan tempat tinggal, yang memiliki perbedaan adalah guru yang memiliki tempat tinggal pedesaan dengan urban, pedesaan dengan suburban. Antara pedesaan dengan urban dan pedesaan dengan suburban memiliki nilai Mean Difference 9,76;8,55. Hal ini menunjukkan bahwa overall environment literacy di pedesaan lebih baik daripada yang berasal dari urban dan suburban. Serta nilai mean difference urban dan suburban adalah (-1,21) hal ini menunjukkan bahwa suburban lebih baik daripada pedesaan.

Tabel 7. Analisis Tanggapan Guru berdasarkan Tempat tinggal

Dimensi	Tempat tinggal	Sig	Mean Difference
pengetahuan lingkungan	pedesaan	urban	0,002 7,99*
		suburban	0,011 6,39*
	urban	pedesaan	0,002 -7,99*
		suburban	1,000 -1,60
	suburban	pedesaan	0,011 -6,39*
		urban	1,60 1,60
sikap lingkungan	pedesaan	urban	0,000 10,72*
		suburban	0,000 9,65*
	urban	pedesaan	0,000 -10,72*
		suburban	1,000 -1,07
	suburban	pedesaan	0,000 -9,65*
		urban	1,000 1,07
perilaku lingkungan	pedesaan	urban	0,000 10,67*
		suburban	0,000 9,63*
	urban	pedesaan	0,000 -10,67*
		suburban	1,000 -1,04
	suburban	pedesaan	0,000 -9,63*
		urban	1,000 1,04
overall environment	pedesaan	urban	0,000 9,76*
		suburban	0,000 8,55*
	urban	pedesaan	0,000 -9,76*
		suburban	1,000 -1,21
	suburban	pedesaan	0,000 -8,55*
		urban	1,000 1,21

4. KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk mengukur Literasi Lingkungan guru eco schools (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas) dalam kinerja mereka pada kognisi, sikap dan perilaku karena itu mengeksplorasi hubungan antara dimensi dan faktor latar belakang, seperti, Jenis guru dan tempat tinggal. Hasilnya menyoroti bahwa guru eco schools memiliki sikap positif terhadap lingkungan, tingkat pengetahuan lingkungan yang sedang dan partisipasi mereka dalam tindakan lingkungan terbatas, terutama yang berkaitan dengan tindakan kolektif.

Kesimpulan menarik tentang literasi lingkungan guru eco schools muncul dari penelitian ini. Lebih khusus lagi, berkenaan dengan pengetahuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan guru sedang. Selain itu, penelitian ini menyoroti kesalahpahaman yang dipegang oleh guru tentang konsep pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, sumber daya terbarukan, efek rumah kaca, tergolong rendah. Temuan ini membuat kita berpikir tentang konsep-konsep terkait lingkungan yang perlu diintegrasikan dengan kurikulum di eco schools. Mengenai sikap guru eco schools terhadap lingkungan, mereka memang memiliki sikap positif, terutama mengenai pentingnya Pendidikan Lingkungan untuk EL. Mereka juga mengakui adanya masalah lingkungan dan menerima kebutuhan untuk melindungi lingkungan.

Sehubungan dengan domain perilaku, partisipasi guru dalam aksi lingkungan relatif terbatas dan terutama berfokus pada tindakan individu daripada tindakan kolektif. Beberapa kegiatan pengajaran yang terkait dengan pengalaman hidup guru seperti mendorong mereka untuk mengamati alam dan memahami kebutuhan akan

keanekaragaman hayati, ikut serta dalam kampanye pencegahan kerusakan lingkungan atau inisiatif yang melibatkan pembersihan dan perawatan ruang publik. Selain itu, metode pengajaran dan pembelajaran partisipatif seperti pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran pengalaman dan kompetensi tindakan dianggap penting untuk memotivasi dan memberdayakan peserta didik.

Selain itu, dalam penelitian ini, faktor-faktor seperti jenis guru, tempat tinggal dan dampaknya terhadap EL diperiksa. Pertama, mengenai faktor jenis guru, perbedaan antara Literasi Lingkungan guru SD, SMP dan SMA signifikan. Analisis Pengetahuan lingkungan teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high. Sikap, perilaku dan Overall environment teacher primary lebih baik daripada teacher senior high dan teacher secondary lebih baik daripada teacher senior high. Artinya diperlukan evaluasi terutama pelaksanaan program pembelajaran di senior high schools.

Kedua, mengenai faktor tempat tinggal, perbedaan antara Literasi Lingkungan guru di pedesaan, urban dan suburban signifikan. Analisis pengetahuan, sikap, perilaku dan 1 overall environment literacy guru di pedesaan lebih baik daripada yang berasal dari urban dan suburban dan suburban lebih baik daripada pedesaan

Hasil penelitian ini menekankan perlunya peningkatan program pendidikan lingkungan di sekolah dasar, menengah dan atas dengan cakupan topik yang lebih luas terkait dengan cara kita dapat melindungi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain belajar dari kurikulum resmi, penting untuk mempromosikan Literasi Lingkungan melalui kurikulum sekolah dan universitas informal dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, penilaian nilai dan tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan. Pendidikan harus mengadopsi cara untuk mendorong siswa mengeksplorasi topik terkait lingkungan melalui kegiatan kurikuler, kunjungan lapangan pendidikan dan partisipasi dalam tindakan kolektif untuk perlindungan lingkungan. Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap lingkungan tidak cukup jelas dan harus diselidiki lebih lanjut di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Affolter, C., & Varga, A. (2018). *Environment and School Initiatives: Lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future*.
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Boca, G. D., & Saraçlı, S. (2019). *Environmental Education and Student 's Perception , for Sustainability*. 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11061553>
- Boeve-de Pauw, J., & Van Petegem, P. (2018). Eco-school evaluation beyond labels: the impact of environmental policy, didactics and nature at school on student outcomes. *Environmental Education Research*, 24(9), 1250–1267. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1307327>
- Boubonari, T., Markos, A., & Kevrekidis, T. (2013). Greek pre-service teachers' knowledge, attitudes, and environmental behavior toward marine pollution. *Journal of Environmental Education*, 44(4), 232–251. <https://doi.org/10.1080/00958964.2013.785381>
- Brouse, C. H., Wolf, R. L., & Basch, C. E. (2009). School food service directors' perceptions of barriers to and strategies for improving the school food environment in the United States. *International Journal of Health Promotion and Education*, 47(3), 88–93. <https://doi.org/10.1080/14635240.2009.10708165>
- Chatzifotou, A. (2019). Beneficial or detrimental? The relationship between sustainability, Eco-schools and Ofsted reports. *Education 3-13*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1704814>
- Cincera, J., Kroufek, R., Simonova, P., Broukalova, L., Broukal, V., & Skalík, J. (2017). Eco-School in kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. *Environmental Education Research*, 23(7), 919–936. <https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1076768>
- Cusick, J., Monroe, C., MacLeod, S., & Barker, N. H. (2010). Sustainability education and public diplomacy: A case study of the United States institute on the environment. *Environmental Practice*, 12(1), 8–17. <https://doi.org/10.1017/S1466046610000013>
- de Pauw, J. B., & van Petegem, P. (2011). The effect of Flemish eco-schools on student environmental knowledge, attitudes, and affect. *International Journal of Science Education*, 33(11), 1513–1538. <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.540725>
- Desfandi, M., Maryani, E., & Disman. (2017). Building Ecoliteracy Through Adiwiyata Program (Study at Adiwiyata School in Banda Aceh). *Indonesian Journal of Geography*, 49(1), 51–56. <https://doi.org/10.22146/ijg.11230>
- Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). New Trends in

- Measuring Environmental Attitudes: Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale. *Journal of Social Issues*, 56(3), 425–442. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00176>
- Erdogan, M., & Marcinkowski, T. (2015). Development and validation of children's environmental affect (attitude, sensitivity and willingness to take action) scale. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 11(3), 577–588. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1347a>
- FEE. (2011). *Eco-schools programme*. A DGU-run programme. Hamburg
- Filho, W. L. (2019). Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. In *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2>
- Gavrilakis, C., Stylos, G., Kotsis, K. T., & Goulgouti, A. (2018). *Environmental literacy assessment of Greek university pre - service teachers*. May, 49–71.
- Goldman, D., Yavetz, B., & Pe'er, S. (2014). Student teachers' attainment of environmental literacy in relation to their disciplinary major during undergraduate studies. *International Journal of Environmental and Science Education*, 9(4), 369–383. <https://doi.org/10.12973/ijese.2014.222a>
- Gough, A. (2011). The Australian-ness of curriculum Jigsaws: Where does environmental education fit? *Australian Journal of Environmental Education*, 27(1), 9–23. <https://doi.org/10.1017/S0814062600000045>
- Goulgouti, A., Plakitsi, A., & Stylos, G. (2019). Environmental Literacy: Evaluating Knowledge, Affect, and Behavior of Pre-service Teachers in Greece. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.29333/ijese/6287>
- Gwekwerere, Y. (2015). Pre-service teachers' knowledge, participation and perceptions about environmental education in schools. *Australian Journal of Environmental Education*, 30(2), 198–214. <https://doi.org/10.1017/ae.2015.15>
- Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1998). An assessment of environmental literacy and analysis of predictors of responsible environmental behaviour held by secondary teachers in the Hualien area of Taiwan. *Environmental Education Research*, 4(3), 229–249. <https://doi.org/10.1080/1350462980040301>
- Hunter, R. H., & Jordan, R. C. (2019). The TELA: A New Tool for Assessing Educator Environmental Literacy. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.29333/ijese/6286>
- Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., & Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic "Greenhouse Effect": Greek Prospective Primary Teachers' Ideas About Causes, Consequences and Cures. *Journal of Science Education and Technology*, 21(6), 768–779. <https://doi.org/10.1007/s10956-012-9365-0>
- Jensen, B. B., & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental education: Reprinted from *Environmental Education Research* (1997) 3(2), pp. 163–178. *Environmental Education Research*, 12(3–4), 471–486. <https://doi.org/10.1080/13504620600943053>
- Kayihan, K. S., & Tönük, S. (2012). A study of litter and waste management policies at (primary) Eco-Schools in Istanbul. *Waste Management and Research*, 30(1), 80–88. <https://doi.org/10.1177/0734242X10389106>
- Kopnina, H., & Kopnina, H. (2020). Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals sustainable development goals. *The Journal of Environmental Education*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1710444>
- Korkmaz, A., & Guler Yildiz, T. (2017). Assessing preschools using the Eco-Schools program in terms of educating for sustainable development in early childhood education. *European Early Childhood Education Research Journal*, 25(4), 595–611. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1331074>
- Krnel, D., & Naglic, S. (2009). Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. *Science Education International*, 20(1), 5–24.
- Kurland, N. B., & Zell, D. (2011). Green management. Principles and examples. *Organizational Dynamics*, 40(1), 49–56. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2010.10.004>
- Liarakou, G., Kostelou, E., & Gavrilakis, C. (2011). Environmental volunteers: Factors influencing their involvement in environmental action. *Environmental Education Research*, 17(5), 651–673. <https://doi.org/10.1080/13504622.2011.572159>
- Liu, S. Y., Yeh, S. C., Liang, S. W., Fang, W. T., & Tsai, H. M. (2015). A national investigation of teachers environmental literacy as a reference for promoting environmental education in Taiwan. *Journal of Environmental Education*, 46(2), 114–132. <https://doi.org/10.1080/00958964.2014.999742>
- Maidou. Plakitsi, P. (2018). Perceptions and

- Attitudes of Healthcare Students Towards Marijuana. *Environment, Health and Outdoor Science Education*, 370–381.
- McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? *Ecosphere*, 4(5).
<https://doi.org/10.1890/ES13-00075.1>
- Mogensen, F., & Mayer, M. (2005). *Eco-schools: trends and divergences* (Vol. 09, Issue 8). <http://www.ensi.org/global/downloads/Publications/173/ComparativeStudy1.pdf>
- Mogren, A., & Gericke, N. (2017). ESD implementation at the school organisation level, part 1—investigating the quality criteria guiding school leaders' work at recognized ESD schools. *Environmental Education Research*, 23(7), 972–992.
<https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1226265>
- Nurhafni, N., Syahza, A., Auzar, A., & Nofrizal, N. (2019). The Strategy of Environmental School through the Program of National Adiwiyata School in Pekanbaru (High School Level). *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 15(1), 1–11.
<https://doi.org/10.29333/ijese/6289>
- Ozsoy, S., Ertepinar, H., & Saglam, N. (2012). Can eco-schools improve elementary school students' environmental literacy levels? *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 13(2), 1–25.
- Park, J. C., Chung, M. H., & Rhee, E. K. (2011). Field survey on the indoor environment of elementary schools for planning of environment friendly school facilities. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 10(2), 461–468.
<https://doi.org/10.3130/jaabe.10.461>
- Parker, L., Prabawa-Sear, K., & Kustiningsih, W. (2018). How young people in Indonesia see themselves as environmentalists: Identity, behaviour, perceptions and responsibility. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 263–282.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1496630>
- Pe'er, S., Goldman, D., & Yavetz, B. (2007). Environmental literacy in teacher training: Attitudes, knowledge, and environmental behavior off beginning students. *Journal of Environmental Education*, 39(1), 45–59.
<https://doi.org/10.3200/JOEE.39.1.45-59>
- Pérez, A. V. (2018). Sustainable Development Seen from Environmental Training in University Linkage. *International Journal of Life Sciences (IJLS)*, 2(1), 12–20.
<https://doi.org/10.29332/ijls.v2n1.75>
- Plakitsi, K. (2020). *1. Activity Theory in Formal and Informal*. 2013, 1–15.
- Prabawa-Sear, K. (2018). Winning beats learning: Environmental education in Indonesian senior high schools. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 283–302.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1496631>
- Rickinson, M. (2001). Learners and learning in environmental education: a critical review of the evidence. In *Environmental Education Research* (Vol. 7, Issue 3).
<https://doi.org/10.1080/13504620120065230>
- Roberts, N. S. (2009). Impacts of the National Green Corps Program (Eco-Clubs) on students in India and their participation in environmental education activities. *Environmental Education Research*, 15(4), 443–464.
<https://doi.org/10.1080/13504620902994127>
- Saribas, D. (2015). Investigating the Relationship between Pre-Service Teachers' Scientific Literacy, Environmental Literacy and Life-Long Learning Tendency. *Science Education International*, 26(1), 80–100.
- Saribas, Deniz, Teksoz, G., & Ertepinar, H. (2014). The Relationship between Environmental Literacy and Self-efficacy Beliefs toward Environmental Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116(June 2015), 3664–3668.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.820>
- Siswanto, Karimullah, Prasetyawati, R., & Nurhayati. (2019). Environmental cultured education and its implication on the student's competencies in an adiwiyata school. *Cakrawala Pendidikan*, 38(3), 552–564.
<https://doi.org/10.21831/cp.v38i3.23154>
- Spinola, H. (2015). Environmental literacy comparison between students taught in Eco-schools and ordinary schools in the Madeira Island region of Portugal. *Science Education International*, 26(3), 392–413.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074869.pdf>
- Spiropoulou, D., Antonakaki, T., Kontaxaki, S., & Bouras, S. (2007). Primary teachers' literacy and attitudes on education for sustainable development. *Journal of Science Education and Technology*, 16(5), 443–450.
<https://doi.org/10.1007/s10956-007-9061-7>
- Suwandi, S., Yunus, A., Drajadi, N. A., Santoso, N. P., Language, I., Program, D., Program, A. D., Education, E., Program, M., Language, I., Program, M., & Maret, U. S. (2020). *ECOLITERACY: INTEGRATING ECOLOGY AND LANGUAGE EDUCATION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS*. 29(6), 1147–1155.
- Tanu, D., & Parker, L. (2018). Fun, 'family', and

- friends: Developing pro-environmental behaviour among high school students in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 303–324. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1518015>
- Töntük, S., & Kayihan, K. S. (2013). A study on sustainable use of school sites at (primary) eco-schools in Istanbul. *Journal of Environmental Planning and Management*, 56(7), 919–933. <https://doi.org/10.1080/09640568.2012.709179>
- Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J., Ertepinar, H., & Kaplowitz, M. (2009). Assessing pre-service teachers' environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. *International Journal of Educational Development*, 29(4), 426–436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.10.003>
- Tuncer Teksoz, G., Boone, J. W., Tuzun, O. Y., & Oztekin, C. (2014). An evaluation of the environmental literacy of preservice teachers in Turkey through Rasch analysis. *Environmental Education Research*, 20(2), 202–227. <https://doi.org/10.1080/13504622.2013.768604>
- UNESCO. (2013). Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development (Report). *Journal of Education for Sustainable Development*, 7(1), 135–136. <https://doi.org/10.1177/0973408213495614e>
- United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report. *United Nations*, 72. <https://doi.org/978-92-1-101320-7>
- Wang, G., & Côté, R. (2011). Integrating eco-efficiency and eco-effectiveness into the design of sustainable industrial systems in China. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 18(1), 65–77. <https://doi.org/10.1080/13504509.2010.527459>
- Warju, Hartoa, S. P., Soenartoa, & Hartmann, M. D. (2017). Evaluating the implementation of green school (adiwiyata) program: Evidence from Indonesia. *International Journal of Environmental and Science Education*, 12(6), 1483–1501. <http://www.ijese.net/makale/1914>
- Yavetz, B., Goldman, D., & Pe'er, S. (2009). Environmental literacy of pre-service teachers in Israel: a comparison between students at the onset and end of their studies. *Environmental Education Research*, 15(4), 393–415. <https://doi.org/10.1080/13504622.2013.803038>
- Yavetz, B., Goldman, D., & Pe'er, S. (2014). How do preservice teachers perceive “environment” and its relevance to their area of teaching? *Environmental Education Research*, 20(3), 354–371. <https://doi.org/10.1080/13504622.2013.803038>

PENGARUH PENGGUNAAN AJIR TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF TANAMAN CABAI MERAH KERITING (*capsicum annuum L.*) DI PERKEBUNAN AFDELING II KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU

Oleh :

Gita Juang Mega Syahputra¹⁾, Yusmaidar Sepriani²⁾, Fitra Syawal Hararap³⁾, Ika Ayu Putri Septyani⁴⁾

^{1,2,3,4)}Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara, Indonesia

¹email : gitajuangnew10@gmail.com

²email : seprie87@gmail.com

³email : fitrasyawalhararap@gmail.com

⁴email: ikaayuputriseptyani@gmail.com

Abstrak

Cabai merah keriting merupakan tanaman musiman yang berkayu, tumbuh di daerah dengan iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang biak didataran tinggi maupun dataran rendah. Pengajiran bertujuan agar tanaman mendapatkan sinar matahari secara maksimal dengan cara menopang tanaman sedemikian rupa sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan ajir bambu terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah keriting di perkebunan afdeling II kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Waktu penelitian dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 sampai april 2022. Di perkebunan afdeling 2 kec. Bilah Barat kab. Labuhanbatu Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan yang dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 taraf perlakuan ajir tunggal, ajir tunggal miring, tanpa ajir. Dan diulang sebanyak 5 kali. Sehingga didapat 15 unit percobaan. Penggunaan ajir sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman cabai merah, perlakuan dengan menggunakan ajir tunggal sangat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah dibandingkan dengan tanpa ajir dan ajir tunggal miring karena ajir tunggal penopang tanaman agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk fotosintesi dan membantu pertumbuhannya secara cepat.

Kata Kunci: Cabai merah, ajir, hortikultura

1. PENDAHULUAN

Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annuum L.*) merupakan tanaman perdu dengan rasa buah pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Secara umum cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C.

Tahun 2008 sampai saat ini produksi cabai di Indonesia diperkirakan mencapai 1,311 juta ton (meningkat 26,14 % dibandingkan tahun 2007), terdiri dari jenis cabai merah besar 798,32 ribu ton (60,90 %) dan cabai rawit 512,67 ribu ton (39,10 %). Daerah sentra produksi utama cabai merah antara lain Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung); Jawa Tengah (Brebes, Magelang, dan Temanggung); Jawa Timur (Malang, Banyuwangi). Sentra utama cabai keriting adalah Bandung, Brebes, Rembang, Tuban, Rejanglebong, Solok, Tanah Datar, Karo, Simalungun, Banyuasin, Pagar Alam. (Piay et al., 2010)

Cabai Merah Keriting (*Capsicum annuum L.*) merupakan tanaman perdu dari family terong-terongan. Cabai berasal dari benua Amerika tepatnya daerah Peru dan menyebar ke negara-negara benua Amerika, Eropa dan Asia termasuk Indonesia (A Buchari, 2018).

Cabai merah keriting merupakan tanaman musiman yang berkayu, tumbuh di daerah dengan iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang biak didataran tinggi maupun dataran rendah. Hampir semua jenis tanah yang cocok untuk budidaya tanaman pertanian, cocok pula bagi tanaman cabai merah keriting. Untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hasil yang tinggi, cabai merah keriting cocok dengan tanah yang subur, gembur, kaya akan organik, tidak mudah becek (menggenang), bebas cacing (nematoda) dan penyakit tular tanah. Kisaran pH tanah yang ideal adalah 5,5 – 6,8 (Noviansyah & Chalimah, 2015).

Pengajiran tanaman adalah penopangan tanaman agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Pengajiran bertujuan agar tanaman mendapatkan sinar matahari secara maksimal dengan cara menopang tanaman sedemikian rupa sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Hampir semua tanaman sayuran daun memiliki postur tubuh batang yang rendah sehingga tidak perlu diajir. Hanya ada beberapa tanaman yang perlu diajir seperti tanaman melinjo pada saat penanamannya agar dapat tegak lurus juga katuk dan tanaman labu siam yang diambil pucuk daunnya (Kencana, 2022).

Pemakaian ajir pada tanaman cabai merah kriting juga merupakan upaya dalam optimalisasi fotosintesis. Daun tanaman cabai merah yang saling berdekatan dan menutupi menyebabkan cahaya matahari tidak sampai pada permukaan daun secara maksimal dan mengganggu sirkulasi CO₂ dan proses fotosintesis. Pada daun bagian bawah tanaman akan membusuk dan serangan hama serta penyakit akan meningkat karena kelembaban di dalam tajuk tinggi sehingga tanaman akan mati. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan ajir untuk menopang tanaman cabai merah kriting dengan cara mengikat batang atau cabang pada ajir sehingga tanaman bias tumbuh secara vertical sesuai arsitektur tanaman aslinya dan luas permukaan daun akan lebih luas. Hal ini mengakibatkan penerimaan cahaya matahari lebih optimum dan meningkatkan efisiensi fotosintesis (Wildan Nugraha et al., 2014)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan ajir bambu terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah kriting di perkebunan afdeling II kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lahan penelitian di perkebunan afdeling 2 Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Waktu penelitian dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 sampai april 2022. Di perkebunan afdeling 2 kec. Bilah Barat kab. Labuhanbatu tempat penelitian ini merupakan salah satu tempat dimana di lokasi penelitian menerapkan penggunaan ajir bambu pada media tanam cabai.

Bahan dan Alat.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai merah kriting dengan varietas cabai merah kriting lokal medan sebagai bahan tanam, tanah/lahan sebagai media tanam, ajir dari bambu sebagai perlakuan, pupuk NPK 16-16-16, pupuk dolomite, pupuk TSP dsb, Sebagai bahan pemupukan, ajir untuk menopang tanaman, gubuk sebagai naungan lahan penelitian, Fungisida dan insektisida sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman, air untuk menyiram tanaman dan bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul sebagai alat untuk membuat bedengan/gulutan, parang untuk membersihkan lahan, pisau/gunting tajam untuk memotong pucuk tanaman, mesin air untuk menyedot air di dalam sumur, meteran untuk mengukur luas lahan dan tinggi tanaman, kaleng oli untuk melubangi mulsa, alat tulis, kamera sebagai alat dokumentasi dan alat-alat lain yang mendukung berjalannya pelaksanaan penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan yang dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial.

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 taraf perlakuan ajir tunggal, ajir tunggal miring, tanpa ajir. Dan diulang sebanyak 5 kali. Sehingga didapat 15 unit percobaan.

Populasi adalah keseluruhan aspek-aspek yang diteliti dan hendak dijadikan sasaran pengumpulan data. Oleh karena itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah cabai merah kriting (*Capsicum annum L*). Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 150 tanaman cabai merah kriting. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diduga dapat menggambarkan keseluruhan ciri karakteristik populasi. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh.

Metode Analisis

Data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi Spss (*Statistical Package For The Social Science*) version. 20. Dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis dan uji lanjut Duncan (*Duncan's Multiple Range Test*) dengan tingkat signifikan 5%

Dengan kriteria

Uji Normalitas

- Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05
- Data berdistribusi tidak normal, jika sig (signifikansi) < 0,05

Perbandingan nilai F hitung dengan F tabel

- Jika nilai F hitung > F tabel, maka hipotesis di terima. Maka artinya perlakuan ajir berpengaruh terhadap tanaman cabai merah
- Jika nilai F hitung < F tabel, maka hipotesis di tolak. Maka artinya perlakuan ajir tidak berpengaruh terhadap tanaman cabai merah.

Deskripsi data pengamatan penelitian

Penelitian yang diamati setiap minggu pada tanaman cabai merah (*Capsicum annum L*) dari setiap perlakuan ajir yang berbeda, pengamatan penelitian mendapatkan hasil data pengukuran pada tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun cabai merah. Hal ini dapat dilihat dari dari setiap rata-rata pertumbuhan tanaman cabai merah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penjabaran dari hasil data pengamatan yang diperoleh setiap minggu yang di olah menggunakan aplikasi Spss versi. 20.

Tinggi tanaman cabai merah (*Capsicum annum L*)

a. Uji normalitas

Tabel 1.1

Hasil Uji Normalitas pada tinggi tanaman cabai merah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		perlakuan
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,00
	Std. Deviation	,845
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-,215
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,492

Sumber : Spss Versi. 20

Hasil dari Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu Signifikansi > 0,05 dengan 0,492 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Tabel 1.2

Hasil Uji Homogenitas pada tanaman cabai merah.

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	Sum of Squares	Spss Versi. 20 df1	df2	Sig.
2,082		2	12	,167

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat nilai signifikansi 0,167. Jika disesuaikan dengan ketentuan kehomogenitasan nilai signifikansi harus > 0,05 maka variansi data pada tinggi tanaman cabai merah bersifat homogen. Dimana sig 0,167 > 0,05.

c. Uji Hipotesis

Tabel 1.3

Hasil Uji Hipotesis pada tanaman cabai merah.

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1071,252	2	535,626	4,319	,039
Within Groups	1488,364	12	124,030		
Total	2559,616	14			

Sumber : Spss Versi. 20

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa Fhitung dengan nilai 4,319 dan nilai sig. 0,039. Sesuai dengan kriteria perbandingan nilai F hitung dengan F tabel bahwa Fhitung > Ftabel maka hipotesis di terima. Jadi dari data di atas bisa dilihat Fhitung dengan nilai 4,319 > Ftabel 3,89. Serta nilai sig. 0,039 < 0,05 dan bersifat signifikan. Maka hipotesis diterima, jadi penggunaan ajir berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (*Capsicum annum L*).

d. Uji Lanjut DMRT (Duncan's Multiple Range Test)

Tabel 1.4

Hasil Uji Duncan pada tanaman cabai merah

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
tanpa ajir	5	20,1200	
ajir tunggal miring	5	21,0200	
ajir tunggal	5		38,4800
Sig.		,900	1,000

Sumber : Spss Versi. 20

Dari hasil tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa antar perlakuan ajir berbeda nyata dan yang lebih berpengaruh pada tinggi tanaman cabai merah ditunjukkan pada perlakuan ajir tunggal.

Diameter Batang Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum L*)

e. Uji Normalitas

Tabel 2.1

Hasil Uji Normalitas pada Diameter Batang cabai merah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		perlakuan
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,00
	Std. Deviation	,845
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-,215
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,492

Sumber : Spss Versi. 20

Berdasarkan hasil dari Uji Normalitas pada tabel 2.1 menunjukkan data terdistribusi normal karena nilai sig. 0,492 > 0,05.

f. Uji Homogenitas

Tabel 2.2

Hasil Uji Homogenitas Pada Diameter Batang Cabai Merah

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2,076	2	12	,168

Sumber : Spss Versi. 20

Hasil Uji Homogenitas menunjukkan nilai Sig. 0,168 > 0,05. Variansi data pada diameter batang tanaman cabai merah bersifat homogen.

g. Uji Hipotesis

Tabel 2.3

Hasil Uji Hipotesis Pada Diameter Batang Cabai Merah

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3,197	2	1,599	5,373	,022
Within Groups	3,570	12	,298		
Total	6,768	14			

Sumber : Spss Versi. 20

Dari hasil uji hipotesis di atas penggunaan ajir bambu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai merah. Bisa dilihat Fhitung dengan nilai 5,373 > Ftabel 3,89. Serta nilai sig. 0,022 < 0,05 dan bersifat signifikan maka hipotesis diterima. Dengan df1 horizontal = 2 dan df2 vertical = 12 didapatkan nilai F tabel = 3,89.

h. Uji Lanjut DMRT (Duncan's Multiple Range Test)

Tabel 2.4
Hasil Uji Duncan Pada Diameter Batang Cabai Merah

Duncan ^a			
perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
tanpa ajir	5	,6560	
ajir tunggal miring	5	,8280	
ajir tunggal	5		1,7100
Sig.		,627	1,000

Sumber : Spss Versi. 20

Dari hasil tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa antar perlakuan ajir berbeda nyata dan yang lebih berpengaruh pada Diameter Batang cabai merah ditunjukkan pada perlakuan ajir tunggal.

Jumlah Daun

a. Uji Normalitas

Tabel 3.1
Uji Normalitas Jumlah Daun Pada Cabai Merah
Sumber : Spss Versi. 20

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		penggunaan ajir bambu
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,00
	Std. Deviation	,845
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-,215
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,492

Hasil dari Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov jumlah daun yaitu Signifikansi > 0,05 dengan 0,492 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal

b. Uji Homogenitas

Tabel 3.2
Hasil Uji Homogenitas Jumlah Daun Pada Cabai Merah
Test of Homogeneity of Variances

JD			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3,218	2	12	,076

Sumber : Spss Versi. 20

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat nilai signifikansi 0,076. Jika disesuaikan dengan ketentuan kehomogenitasan nilai signifikansi harus > 0,05 maka variansi data pada tinggi tanaman cabai merah bersifat homogen. Dimana sig 0,076 > 0,05.

c. Uji Hipotesis

Tabel 3.3
Hasil Uji Hipotesis Jumlah Daun Pada Tanaman Cabai Merah

ANOVA					
JD					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1530,133	2	765,067	4,879	,028
Within Groups	1881,600	12	156,800		
Total	3411,733	14			

Sumber : Spss Versi. 20

Berdasarkan tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa Fhitung dengan nilai 4,879 dan nilai sig. 0,028. Sesuai dengan kriteria perbandingan nilai F hitung dengan F tabel bahwa Fhitung > Ftabel maka hipotesis di terima. Jadi dari data di atas bisa dilihat Fhitung dengan nilai 4,879 > Ftabel 3,89. Serta nilai sig. 0,028 < 0,05 dan bersifat signifikan. Maka hipotesis diterima, jadi penggunaan ajir berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (*Capsicum annum L.*).

d. Uji Lanjut DMRT (Duncan's Multiple Range Test)

Tabel 2.4
Hasil Uji Duncan Jumlah Daun Pada Cabai Merah

Duncan ^a			
penggunaan ajir bambu	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
tanpa ajir	5	14,8000	
ajir tunggal miring	5	16,0000	
ajir tunggal	5		36,8000
Sig.		,882	1,000

Sumber : Spss Versi. 20

Dari hasil tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa antar perlakuan ajir berbeda nyata dan yang lebih berpengaruh pada jumlah daun tanaman cabai merah ditunjukkan pada perlakuan ajir tunggal.

PEMBAHASAN

Ajir adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu atau tongkat bilahan bambu berfungsi sebagai penyangga batang, tempat bersandar pohon atau merambatnya untuk tanaman perdu dan sejenisnya, dapat di pasang setelah selesai membuat pembubunan dan selesai mensterilkan kebun bisa juga berfungsi sebagai penanda, misalnya: batas petak, baris tanaman. Ajir juga dipasang sesudah bibit ditanam, dan bibit sudah mengeluarkan sulur-sulurnya kira-kira tingginya adalah 50 cm.

Pengajiran tanaman adalah penopangan tanaman agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Pengajiran bertujuan agar tanaman mendapatkan sinar matahari secara maksimal dengan cara menopang tanaman sedemikian rupa sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Hampir semua tanaman sayuran daun memiliki postur tubuh batang yang rendah sehingga tidak perlu diajir. Hanya ada beberapa tanaman yang perlu diajir seperti tanaman melinjo pada saat penanamannya agar dapat tegak lurus juga katuk dan tanaman labu siam yang diambil pucuk daunnya. Ajir harus dipasang sedini mungkin yaitu

dimulai pada saat tanam, pemasangan ajir yang terlambat akan mengakibatkan akar tanaman rusak, ajir dipasang 4 cm dimuka tajuk tanaman terluar. Karena perannya yang begitu penting, maka tidak bisa sembarangan dalam membuat Ajir. Ada cara khusus, supaya Ajir yang kita buat berfungsi dengan maksimal dalam kebun budidaya. Pertama-tama, Ajir harus kuat dan epektif saat di gunakan, tujuannya supaya Ajir bisa menompang beberapa beban buah yang di dihasilkan tanaman, minimalnya ajir bisa menompang kurang lebih 2–3 kg. Oleh karena itu, biasanya Ajir terbuat dari bahan bambu dan kayu yang sering digunakan oleh para petani. Meski kedua bahan ini memiliki kekurangan yaitu mudah diserang rayap dan tidak dapat digunakan berkali-kali. Sehingga muncullah bahan Ajir dari plastik, yang terbuat dari pipa baja yang dilapisi plastik poliolefin sehingga membentuk seperti pipa yang kedua ujungnya ditutup oleh cap. Jenis Ajir plastik ini bersifat anti UV, anti korosi dan tahan lama sehingga ajir ini sangat awet dan dapat digunakan berkali-kali hingga 10 tahun lebih

Dari hasil pengumpulan data dan analisis data menggunakan aplikasi Spss Versi. 20 menunjukkan penggunaan ajir sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman cabai merah, perlakuan dengan menggunakan ajir tunggal sangat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah dibandingkan dengan tanpa ajir dan ajir tunggal miring karena ajir tunggal penopang tanaman agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk fotosintesi dan membantu pertumbuhannya secara cepat.

4. KESIMPULAN

Penggunaan ajir tunggal sebagai penopang tanaman cabai mempengaruhi pertambahan jumlah daun ,pertambahan tinggi tanaman , dan diameter batanag cabai merah, dibandingkan pada penggunaan tanpa ajir dan ajir tunggal miring . Hal ini dikarenakan ajir tunggal dapat menopang tanaman tumbuh secara vertical ke atas dan sinar matahari mengenai tanaman cabai secara maksimal.

5. REFERENSI

- a Buchari. (2018). *Respon Varietas Cabai Besar (Capsicum Annuum L.) Terhadap Pengayaan Trichoderma Pada Media Tanam Dan Pemupukan Boron.*
- Kencana, I. P. S. (2022). *Manfaat Penggunaan Ajir Bagi Tanaman.* Materi Lokalita.[Http://Cybex.Pertanian.Go.Id/Artikel/100394/Manfaat-Penggunaan-Ajir-Bagi-Tanaman/](http://Cybex.Pertanian.Go.Id/Artikel/100394/Manfaat-Penggunaan-Ajir-Bagi-Tanaman/)
- Noviansyah, B., & Chalimah, S. (2015). *Aplikasi Pupuk Organik Dari Campuran Limbah Cangkah Telur Dan Vetsin Dengan Penambahan Rendaman Kulit Bawang Merah Terhadap Pertumbuhan Tanaman*

Cabai Merah Keriting (*Capsicum Annum L. Var. Longum*). *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 1(1), 43–48.

- Piay, S. S., Tyasdjaja, A., Ermawati, Y., & Hantoro, F. R. P. (2010). *Budidaya Dan Pascapanen Cabai Merah. In Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (Issue 01).*
- Wildan Nugraha, M., Sumarni, T., Agus, D., Jurusan, S., Pertanian, B., & Pertanian, F. (2014). *Penggunaan Ajir Dan Mulsa Untuk Meningkatkan Produksi Kentang (Solanum Tuberosum L.) Varietas Granola The Use Of Bamboo Stick And Mulch To Increase Production Of Potato (Solanum Tuberosum L.) Granola Variety. Jurnal Produksi Tanaman*, 2(8), 640–648.

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG TERHADAP PEMBELI (KONSUMEN) SATUAN RUMAH SUSUN(APARTEMEN)

Oleh:

Christiana Derita Risquanty

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
cristianaderita@gmail.com

Abstrak

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan PPJB sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses *levering*. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah susun. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU, UUPK, serta KUHPerdota belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahan tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Kata kunci: Kepailitan, Pengembang (Developer), Pembeli (Konsumen)

1. PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa (Hutagalung, 2007), oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut banyak aktivitas bisnis yang berbentuk badan hukum memberikan penawaran pembangunan rumah kepada individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan hunian atau tempat tinggal dengan harga yang bervariasi. Perusahaan badan hukum yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dapat disebut sebagai pengembang property atau *property developer*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, perusahaan pembangun perumahan (pengembang) adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dan dalam jumlah yang besar, di atas suatu areal tanah yang merupakan kesatuan lingkungan pemukiman, yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya. Pengembang dalam melakukan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan rusun dapat melakukan kegiatan antara lain yaitu kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan,

pengendalian, kelembagaan, serta pendanaan dan sistem pembiayaan (Saputri et al, 2019).

Memasuki era saat ini, pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kebutuhan akan tempat tinggal, namun meningkatnya jumlah penduduk dengan jumlah persediaan tanah jumlahnya tidak sebanding. Semakin padatnya penduduk tentu kebutuhan terkait akan tempat tinggal juga mengalami peningkatan, sayangnya kebutuhan akan tanah persediannya semakin terbatas. Guna mengatasi permasalahan tersebut banyak pengembang melakukan pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai bentuk solusi yang diambil guna menangani permasalahan tersebut (Santoso, 2016). Rumah susun/apartemen adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal, serta merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian yang sama, benda bersama, dan tanah bersama (Eddy, 2010).

Di balik maraknya pertumbuhan rumah susun dapat kita temukan beberapa hal yang menjadi latar belakang tingginya minat dan kebutuhan masyarakat akan rumah susun yang membuat masyarakat bahkan bersedia membeli dan melakukan pembayaran di awal meski bangunan belum rampung. Pembelian satuan rumah susun atau satuan unit apartemen dengan cara demikian pada umumnya

dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dasar hukum terkait dengan PPJB yaitu Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang berbunyi : “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”.

Perjanjian jual beli yang dianut KUHPPerdata tersebut juga dikatakan bersifat obligatoir, karena perjanjian itu belum memindahkan hak milik (Subekti, 1996). Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan (*levering*), dengan demikian maka dalam sistem KUHPPerdata tersebut *levering* merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (“transfer of ownership”) (Subekti, 1996). *Levering* atau *transfer of ownership* ini mengikuti perjanjian obligatoir, sebab berdasarkan ketentuan KUHPPerdata, perjanjian obligatoir itu baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik, supaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya (Muhammad, 1990). Penyerahan yuridis bisa diamati pada barang tidak bergerak, sebab tata caranya diatur dalam Undang-Undang (Muhammad, 1990). Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat bahwa jual beli rumah susun atau apartemen antara developer dengan konsumen adalah suatu perjanjian yang mengikat salah satu pihak untuk menyerahkan apartemen dan mengikat pihak lain untuk membayar harga satuan apartemen sesuai kesepakatan.

Berjalannya waktu, pembangunan apartemen yang dilakukan oleh pengembang berjalan dengan baik dan lancar, namun tidak sedikit pula beberapa pengembang mendapati kendala yang menghambat proses pengerjaan pembangunan, salah satunya karena faktor keuangan atau tidak dapat membayar utangnya sebelum menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut. Berdasarkan berbagai faktor, salah satu penyebab utamanya adalah adanya hambatan dalam pemutaran keuangan (baik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun adanya itikad tidak baik dalam melakukan keuangan tersebut) atau mungkin perusahaan mengalami kemunduran yang mengakibatkan perusahaan pengembang tidak dapat membayar tagihan-tagihan perusahaan yang sudah jatuh tempo (adanya pinjaman kepada bank, jasa konstruksi, pekerja, dan lain-lain) (Saputri et al, 2019). Salah satu bentuk solusi yang dapat diambil guna mengatasi permasalahan di atas yaitu berupa proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau bahkan mencapai pailit. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur (dalam hal ini pengembang) tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran

terhadap utang-utang dari para kreditornya (konsumen unit apartemen) (Subhan, 2015).

Seakan menjadi jalan keluar yang sangat mudah untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo tersebut, kepailitan menjadi sebuah pilihan yang diajukan oleh pengembang. Upaya ini menawarkan sebuah penyelesaian masalah utang piutang yang adil, terbuka, cepat, dan efektif. Melalui kepailitan diharapkan tidak terjadi sebuah perebutan harta debitur, kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan lebih memperhatikan nasib kreditur lain; serta kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh debitur maupun kreditur dapat dihindari. Akibat kepailitan tersebut, tentu akan berdampak bagi pembeli (konsumen) yang sebelumnya telah membayar lunas bangunan tanpa adanya proses *levering* terlebih dahulu yang pada pokoknya kesepakatan jual beli hanya diikat dalam bentuk PPJB. Para pembeli (konsumen) Apartemen yang telah melunasi pembayarannya kepada pengembang tentu akan menuntut haknya dan kepastian status hukum mereka atas kepemilikannya. Berdasarkan isu hukum di atas, maka penulis bertujuan untuk menganalisa terkait akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli satuan rumah susun atau apartemen.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PENGEMBANG TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN (APARTEMEN)

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebutkan definisi daripada kepailitan yaitu : “Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa suatu pernyataan pailit dapat diajukan, apabila telah memenuhi syarat-syarat kepailitan berikut ini :

1. Debitor tersebut mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor (*concursum creditorum*), hal tersebut merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Urutan pelunasan dalam kepailitan dimulai dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan yang paling terakhir adalah kreditor konkuren (Saputri et al, 2019). Apabila pada saat pembagian pembayaran utang kreditor separatis dan kreditor preferen sudah dibayarkan, barulah utang kreditor konkuren dibayarkan itupun kalau ada sisa pembayaran (Saputri et al, 2019).

Para pembeli satuan rumah susun atau apartemen berkapasitas sebagai kreditor dan pengembang sebagai debitor. Hal tersebut didasarkan pada hubungan jual beli satuan rumah susun yang selanjutnya dibingkai dalam PPJB yang dilakukan oleh Pengembang dan Pembeli (Konsumen) atas dasar kesepakatan bersama. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, bahwasanya pengertian utang adalah sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa utang bukan hanya sebab adanya hubungan utang-piutang, melainkan juga kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan hukum antara pembeli satuan rumah susun dapat dikatakan sebagai kreditor dan pengembang sebagai debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Pembeli (konsumen) satuan rumah susun atau apartemen belum ada penjelasan atau aturan secara eksplisit yang memberikan kualifikasi mengenai kedudukan pembeli satuan rumah susun selaku kreditor, apakah ia tergolong kreditor preferen atau kreditor konkuren. Apabila mengacu pada pendapat kurator pailit yaitu Bernard Nainggolan yang diwawancari oleh Febryna Maringga Damanik (2010) menjelaskan bahwa status pembeli satuan rumah susun atau apartemen adalah kreditor konkuren, sebab pemohon tidak memegang hak jaminan kebendaan apapun, selain itu setiap unit satuan rumah susun yang telah dilunasi oleh pembeli dengan PPJB masuk ke dalam *boedel* pailit, dan selama proses pencocokan utang, kurator tidak menemukan hak jaminan apapun yang membebani di atas unit-unit satuan rumah susun milik pengembang, termasuk halnya hak tanggungan.

Permasalahan di atas tentu menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukum adanya PPJB antara pembeli dan pengembang. Adanya jual beli yang kemudian diikat ke dalam PPJB belum memindahkan hak milik atas satuan rumah susun atau apartemen dari pengembang kepada konsumen (Damanik, 2010). Pasal 1459 KUHPperdata mensyaratkan, hak milik atas barang yang dijual baru akan berpindah kepada pembeli setelah penyerahan dilakukan dengan cara balik nama (*Overschrijving*). Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), menentukan jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembeli satuan rumah susun atau apartemen tidak mempunyai hak milik atas satuan rumah susun ataupun apartemen.

Syarat pailit yang terpenuhi oleh pengembang merupakan solusi bagi pengembang, akan tetapi bukan merupakan solusi bagi konsumen. Kepailitan menempatkan konsumen yang membeli unit apartemen menjadi kreditor konkuren atau kreditor yang paling akhir urutannya apabila terjadi pelunasan, hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen menduduki posisi yang lemah dan rentan mengalami kerugian. Apabila pengembang dinyatakan pailit, maka harta kekayaan menjadi jaminan bersama untuk para kreditor tersebut dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional. Pembagian secara proposional terkesan adil, namun perbuatan pengembang yang tidak beritikad baik tersebut telah merugikan konsumen dalam jumlah yang besar dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Guna memberikan perlindungan atau jaminan hukum bagi pembeli (konsumen) satuan rumah susun atau apartemen, maka dapat bersandar pada KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila mengkaji dari segi KUHPperdata,

maka hal tersebut berkaitan dengan PPJB yang mengikat para pihak yaitu pengembang dan pembeli, meskipun dilihat dari sudut pandang hukum agraria PPJB masih lemah, akan tetapi PPJB tetap merupakan perikatan yang mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka pelaksanaannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dipaksakan. Hal tersebut tetap dapat diupayakan dengan melihat besarnya harta pailit. Pembangunan bisa saja tetap dilanjutkan apabila harta pailit dapat melunasi piutangnya dan masih terdapat sisa dana guna melanjutkan pembangunan, namun jika tidak terdapat sisa dana sebagaimana dinyatakan oleh kurator, maka pembeli akan menerima pembayaran secara proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing setelah harta dikurangi hak kreditor separatis dan preferen. Artinya, pembeli akan menerima pelunasan secara *pari prorata parte* sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yang berbunyi : “Harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama bagi seluruh kreditor, hasil penjualan harta kekayaan dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor kecuali apabila di antara kreditor tersebut terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor lainnya” (Subekti & Tjitrosudibjo, 1984).

Sedangkan UUPK merupakan peraturan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan untuk menciptakan sebuah perlindungan kepada konsumen atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pengembang dikemudian hari sebagai penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun atau apartemen dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK yang mengatur tentang salah satu hak konsumen yaitu mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut menurut Pasal 19 ayat (3) UUPK, pemberian ganti rugi harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPK tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 60 UUPK). Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UUPK, maka konsumen secara implisit dinyatakan sebagai kreditor preferen karena harus mendapatkan ganti kerugian dengan segera yaitu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Permasalahannya adalah UUPK tidak mengatur lebih lanjut yang dimaksud dengan “tanggal transaksi” tersebut. Berkaitan dengan tanggal transaksi ini, berkembang pendapat bahwa tanggal tersebut sama dengan sejak kegagalan menjalankan kewajibannya (Baillie, 1998).

Berkaitan dengan subtransi hukum, terlihat ada kelemahan dari aturan yang membahas mengenai kedudukan konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepailitan dan UU Perlindungan Konsumentidak mengatur secara detail dan jelas terkait kedudukan konsumen dalam kepailitan. Hanya Pasal 52 UU Perasuransian yang mengatur secara tegas kedudukan konsumen dalam kepailitan, yaitu sebagai kreditor preferen (Saputri et al, 2019). Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Kepailitan yang mengatur mengenai konsumen sebagai kreditor konkuren. Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pembeli satuan rumah susun atau apartemen tetap pada posisi yang sulit meskipun telah disepakati dalam PPJB sebelumnya, sebab pengembang yang telah dinyatakan pailit tentu seluruh unit satuan rumah susun besar kemungkinan akan dimasukkan ke dalam harta pailit yang dilanjutnya oleh kurator dipakai untuk melunasi utang-utang seluruh kreditor. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai pelunasan piutang, maka pembeli (konsumen) satuan rumah susun tetap harus menunggu perhitungan kurator atas harta, utang dan atas pelunasan terhadap kreditor yang diutamakan.

4. SIMPULAN

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan PPJB sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses *levering*. Kepailitan pengembang menjadikan pembeli hanya sebagai kreditor konkuren yang pelunasannya paling akhir setelah mendahulukan kreditor separatis dan preferen, sedangkan PPJB hanya sebatas perjanjian yang bukan merupakan tanda bukti hak milik terkait dengan satuan rumah susun atau apartemen, sehingga unit satuan rumah susun yang digarap oleh pengembang tetap akan masuk ke dalam boedel pailit. UU Kepailitan dan PKPU, UUPK, serta KUHPerdara belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahan tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baillie, James L. 1998. "Business and Commercial Law: Bunkruptcy Under Scrutiny", *Journal Best of ABA Sections*, 2
- Damanik, F.M. 2010. Akibat Putusan Pemailitan Perusahaan Pengembang Terhadap PPJB Atas SRS (Studi Kaus Putusan No. 73/Pailit/PN.NiagaJkt.Pst. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Eddy, Richard. 2010. *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Hutagalung, Arie S. 2007. *Condominium dan Permasalahannya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Santoso, Urip. 2016. *Hukum Perumahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Saputri, E.M.; Waspiyah; & Arifin, R. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 2 No. 2
- Shubhan, M. Hadi. 2015. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Subekti, R., Tjitrosudibjo. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita

EVALUASI POSTUR KERJA BAGIAN ANGGKAT BAL PAKAIAN UNTUK PENCEGAHAN *MUSCULOSKELETAL DISORDER*

Oleh:

Yusnia Sinambela

Prodi TekniK Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif

Email : belasinambela@gmail.com

Abstrak

Pusat Perbelanjaan yang berada di Olimpia Medan, merupakan pasar khusus dalam penjualan bakaian grosir. Dalam pengamatan peneliti ditemukan banyaknya pekerja pengangkatan bal pakaian. Kondisi gedung pasar terdiri dari 4 lantai. Para pekerja pakaian mengangkat beban yang berat dari lantai dasar ke lantai berikutnya. Berat beban rata-rata bal pakaian 50-80 Kg/bal. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa ada alat bantu angkat, kemungkinan akan mengakibatkan cedera pada otot dan tulang. Berdasarkan pengamatan tersebut penulis menganalisis dan mengevaluasi postur kerja para pekerja angkat bal tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis postur kerja diantaranya adalah *The Ovoko Working Posture Analysis System (OWAS)*, *Rapid Upper Limb Assessment (RULA)* dan *Rapid Entire Body Assessment (REBA)*. Metode REBA adalah metode untuk menilai secara cepat postur leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki seorang pekerja. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa maka pekerja angkat bal pakaian dalam kondisi tingkat resiko yang tinggi yaitu 12, oleh karena itu diperlukan Tindakan perlu saat ini dalam upaya mengurangi cedera *Musculoskeletal Disorder*

Key word : Postur Kerja, REBA, *Musculoskeletal Disorder*

1. PENDAHULUAN

Postur kerja adalah suatu tindakan yang diambil pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Postur kerja sangat erat kaitannya dengan keilmuan ergonomi, dimana ilmu ergonomi mempelajari bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera akibat postur kerja yang salah dan penyakit akibat kerja serta menurunkan beban kerja fisik dan mental. Postur kerja yang baik harus dilakukan penelitian-penelitian serta memiliki pengetahuan di bidang keilmuan ergonomi, supaya dapat menganalisis dan mengevaluasi postur kerja yang salah. Bila postur kerja yang digunakan pekerja salah atau tidak ergonomis, pekerja akan cepat lelah, konsentrasi dan tingkat ketelitiannya menurun, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, menyebabkan beberapa gangguan otot seperti musculoskeletal disorder (MSDs) dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu proses kerja. (Musyarofah et al., 2019)

Pusat Pasar yang berada di Olimpia Medan, merupakan pasar khusus dalam penjualan bakaian grosir. Dalam pengamatan peneliti ditemukan banyaknya pekerja pengangkatan bal pakaian. Kondisi gedung pasar terdiri dari 4 lantai. Para pekerja pakaian mengangkat beban yang berat dari lantai dasar ke lantai berikutnya. Berat beban rata-rata bal pakaian 50-80 Kg/bal. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa ada alat bantu angkat, kemungkinan akan mengakibatkan cedera pada otot dan tulang. Berdasarkan pengamatan tersebut penulis menganalisis dan mengevaluasi postur kerja para pekerja angkat bal tersebut. Ada beberapa metode

yang digunakan untuk menganalisis postur kerja diantaranya adalah *The Ovoko Working Posture Analysis System (OWAS)*, *Rapid Upper Limb Assessment (RULA)* dan *Rapid Entire Body Assessment (REBA)*. Metode REBA adalah metode untuk menilai secara cepat postur leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki seorang pekerja (Yuslistyari & Setianah, 2018)

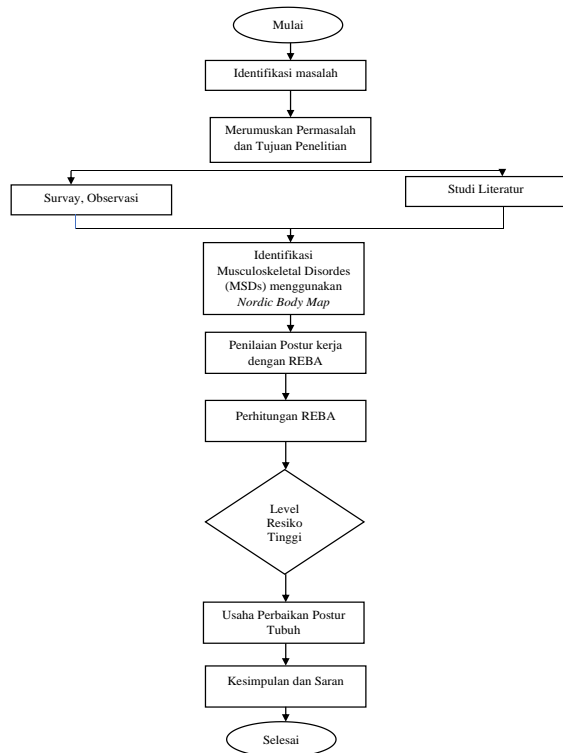
Metode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu metode REBA, karena metode ini menilai risiko pada seluruh bagian tubuh. Selain itu metode REBA merupakan metode yang dikembangkan dari metode OWAS dan RULA, sehingga yang ada di metode OWAS dan metode RULA sudah tercakup di dalam metode REBA. (Siswanto et al., 2021) Penilaian REBA terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama adalah pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto, tahap kedua adalah penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja, tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang diangkat, penentuan genggam dan penentuan aktivitas pekerja. Tahap keempat adalah perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan, dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level risiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kerja. (Nur et al., 2016)

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi postur kerja dengan menggunakan metode REBA
2. Merekomendasi tindakan perbaikan postur kerja

2. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

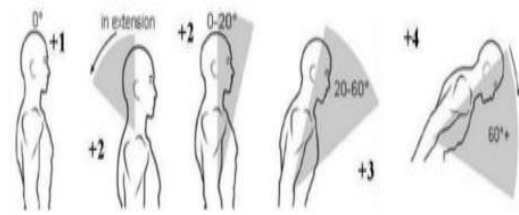
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan dan pengumpulan data mengenai postur kerja tiap kegiatan menggunakan foto pada pekerjapengasahan batu akik dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015. Untuk menentukan sudut-sudut pada postur tubuh sikap kerja yang dilakukan oleh pekerjapengasahan batu akik meliputi foto postur kerja. Berikut ini foto atau gambar postur kerja saat melakukan aktivitas kerja dapat dilihat pada Gambar 1.



Penilaian Postur Tubuh REBA Group A

1. Postur tubuh group A terdiri dari *trunk*, neck dan *legs*
 - a. Batang Tubuh (*Trunk*) (Restuputri, 2017)

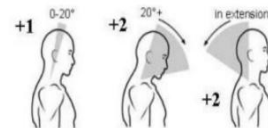


Gambar 2. Postur Tubuh Bagian Belakang (*Trunk*)
Skor penilaian bagian batang tubuh (*Trunk*) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor penilaian bagian batang tubuh (*Trunk*)

Pergerakan	Skor	Perubahan Skor
Tegak Alamiah	1	+1 Jika memutar atau miring ke samping
0 - 20° fleksion	2	
0 - 20° estension	3	
0 - 60° fleksion		
> 20° estension	4	
> 60° fleksion		

- b. Leher (*Neck*)

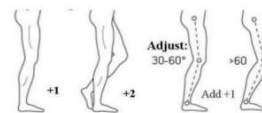


Gambar 3. Postur Tubuh Bagian Leher (*Neck*)

Tabel 2. Skor penilaian Bagian Leher (*Neck*)

Pergerakan	Skor	Perubahan Skor
0 - 20° fleksion	1	+1 Jika memutar atau miring ke samping
> 20° estension		

- c. Kaki (*Legs*)



Gambar 4. Postur Tubuh bagian Kaki (*Legs*)

Skor penilaian untuk kaki dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor penilaian untuk kaki

Pergerakan	Skor	Perubahan Skor
Kaki tertopang bobot tersebar merata, jalan atau duduk	1	+1 Jika lutut antara 30° dan 60° fleksion
Kaki tidak tertopang, bobot tidak tersebar merata/postur tidak stabil	2	+2 Jika lutut lebih dari 60° fleksion (Tidak Ketika duduk).

Nilai dari Group A dimasukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Skor Group A

Tabel A	Neck											
	1				2				3			
Legs	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4	1	2	3	5	3	3	5	6
	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
	3	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
	4	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
	5	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

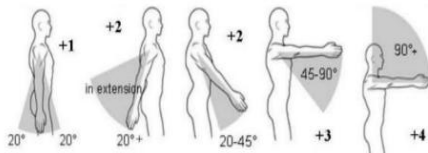
Skor tabel A

- Ditambah 0 (nol) apabila berat beban atau besarnya gaya dinilai < 5 Kg
- Ditambah 1 (satu) bila berat beban atau besarnya gaya antara kisaran 5-10 Kg
- Ditambah 2 (dua) bila berat beban atau besarnya gaya dinilai > 10 Kg
- Pertimbangan mengenai tugas atau pekerjaan kritis dari pekerja, bila terdapat gerakan perputaran (*twisting*) hasil skor berat beban ditambah 1 (satu). Berdasarkan ketentuan tersebut maka skor Group A adalah 8 + 2 = 10

2. Penilaian Postur Tubuh Group B

Postur Tubuh Group B adalah terdiri dari lengan atas (*Upper Arm*), lengan bawah (*lower Arm*) dan pergelangan tangan (*Wrist*) (Tiogana & Hartono, 2020)

a. Lengan Atas (*Upper Arm*)



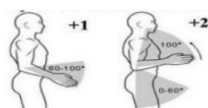
Gambar 5. Postur Tubuh Bagian Lengan Atas (*Upper Arm*)

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian Lengan Atas

Tabel 5. Skor penilaian untuk postur tubuh bagian Lengan Atas

Pergerakan	Skor	Perubahan Skor
20° estension - 20° flekxion	1	+1 Jika posisi lengan Abduced Rotated
> 20° estension - 20° - 45° flekxion	2	+1 Jika bahu ditinggikan
45° - 90° estension	3	+1 Jika bersandar, bobot lengan ditopang atau sesuai gravitasi.
> 90° flekxion	4	

b. Lengan Bawah (*Lower Arm*)

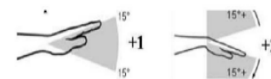


Gambar 6. Postur Tubuh Bagian Lengan Atas (*Upper Arm*)

Tabel 6. Skor Penilaian Bagian Lengan Atas

Pergerakan	Skor
60° - 100°	1
0° - 60° dan > 100°	2

c. Pergelangan Tangan



Gambar 7. Postur Tubuh Bagian Pergelangan Tangan (*Wrist*)

Tabel 7. Skor Pergelangan Tangan

Pergerakan	Skor	Perubahan Skor
0° - 15° fleksion/extension	1	+1 Jika pergelangan tangan menyimpang atau berputar
> 15° fleksion/extension	2	

d. Nilai dari Group B dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Nilai dari Group B

Tabel B	Lower Arm						
	Wrist	1			2		
Upper Arm Score	1	1	2	2	1	2	3
	2	1	2	3	2	3	4
	3	3	4	5	4	5	5
	4	4	5	5	5	6	7
	5	6	7	8	7	8	8
	6	7	8	8	8	9	9

Penambahan Skor Pegangan untuk Group B dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Skor Pegangan

Kategori	Pergerakan	Skor
Good	Pegangan pas & kuat ditengah, gengaman kuat	0
Fair	Pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal atau coupling lebih sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh	1
Poor	Pegangan tangan tidak bisa diterima walaupun memungkinkan	2
Unacceptable	Dipaksakan, gengaman yang tidak aman, tanpa pegangan, coupling tidak sesuai digunakan oleh tubuh	3

3. Tabel C

Langkah Selanjutnya adalah masukkan skor akhir Tabel A dan Tabel B ke Tabel C.

Skor Tabel A	Tabel C											
1	Skor Tabel B											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	1	1	1	1
7	7	7	7	8	9	9	9	9	0	1	1	1
8	8	8	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skor Aktivitas

Langkah terakhir, skor yang didapatkan di Tabel C ditambahkan dengan dengan skor aktivitas terlebih dahulu. Skor akhir REBA dapat dilihat pada Tabel

Keterangan	Nilai
------------	-------

SKOR A	8
SKOR B	7
SKOR C	10
Nilai Aktivitas	2
Skor Akhir REBA	12
Tingkat Resiko	Sangat Tinggi
Action	Perlu saat ini juga

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan postur kerja dengan menggunakan metode REBA maka pekerja angkat bal pakaian dalam kondisi tingkat resiko yang tinggi yaitu 12, oleh karena itu diperlukan Tindakan perlu saat ini dalam upaya mengurangi cedera otot. Jika dibiarkan terus menerus tanpa dilakukan Tindakan akan sangat beresiko kepada pekerja.

5. REFERENSI

- Musyarafah, S., Setiorini, A., Mushidah, M., & Widjasena, B. (2019). Analisis Postur Kerja Dengan Metode Reba Dan Gambaran Keluhan Subjektif Musculoskeletal Disorders (Msds) (Pada Pekerja Sentra Industri Tas Kendal TahuN 2017). *Jurnal Kesehatan*, 7621(1), 24–32. <https://doi.org/10.23917/jk.v0i1.7669>
- Nur, R. F., Lestari, E. R., & Mustaniroh, S. A. (2016). Analisis Postur Kerja pada Stasiun Pemanenan Tebu dengan Metode OWAS dan REBA, Studi Kasus di PG Kebon Agung, Malang. *Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 5(1), 39–45.
- Restuputri, D. P. (2017). Metode REBA Untuk Pencegahan Musculoskeletal Disorder Tenaga Kerja. *Jurnal Teknik Industri*, 18(1), 19. <https://doi.org/10.22219/jtiumm.voll8.no1.19-28>
- Siswanto, S., Pusporini, P., & Ismiyah, E. (2021). Analisis Postur Kerja Operator Sablon Karung Dengan Metode Rula Dan Wera. *JUSTI (Jurnal Sistem Dan Teknik Industri)*, 1(4), 591. <https://doi.org/10.30587/justicb.v1i4.2835>
- Tiogana, V., & Hartono, N. (2020). Analisis Postur Kerja dengan Menggunakan REBA dan RULA di PT X. *Journal of Integrated System*, 3(1), 9–25. <https://doi.org/10.28932/jis.v3i1.2463>
- Yuslistyari, E. I., & Setianah, P. (2018). Analisis Perbaikan Postur Kerja Dengan Pendekatan Ergonomi Pada Home Industry Jks Snack & Catering Di Serang-Banten. *Journal Industrial Manufacturing*, 3(1), 51–56. <https://doi.org/10.31000/jim.v3i1.620>

PENGEMBANGAN MODUL ZAT ADITIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGOLAHAN MAKANAN MASYARAKAT DESA KARIMUNTING

Oleh:

Neni Haryani¹⁾, Masriani²⁾, Lukman Hadi³⁾, Hairida⁴⁾, Rahmat Rasmawan⁵⁾
^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura Pontianak

¹email : neniharyani22@gmail.com

²email : masriani@fkip.untan.ac.id

³email : allongsambas@gmail.com

⁴email : hairida_fkipuntan@yahoo.co.id

⁵email : rahmatfkip@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul pembelajaran IPA pada materi zat aditif berbasis kearifan lokal yang layak digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan model 4-D dari Thiagaradjan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data yaitu lembar evaluasi kelayakan. Kelayakan modul dilihat dari tiga aspek yaitu isi, bahasa serta kegrafikan. Setiap aspek dinilai oleh masing-masing dua orang ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting sangat layak digunakan dalam pelajaran IPA dengan persentase skor pada aspek isi dan penyajian 88,5%, bahasa 81,3%, dan kegrafikan 92,3%.

Kata Kunci: Pengembangan dan penelitian, modul, zat aditif, kearifan lokal.

1. PENDAHULUAN

Desa Karimunting adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini terkenal sebagai kawasan pusat oleh-oleh hasil laut. Karena berada di pesisir pantai, sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Di sepanjang jalan kawasan tersebut banyak ditemui warung-warung yang menjual olahan hasil laut diantaranya, aneka kerupuk berbahan dasar ikan, kerupuk udang, berbagai macam ikan asin, olahan ikan yang difermentasi (peda'), olahan udang kecil yang difermentasi (cincalok), terasi, sotong kering, dan ikan teri. Makanan-makanan tersebut pada proses pembuatannya tentunya tidak lepas dari penggunaan zat aditif.

Zat aditif adalah senyawa atau campuran berbagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan atau penyimpanan serta bukan merupakan bahan utama (Indra, 2003). Berdasarkan kegunaannya, zat aditif yang boleh digunakan untuk makanan terdiri dari pemberi aroma, penyedap rasa, pengembang, pemutih, pematang tepung, zat pemucat, zat pengasam, antioksidan, pengawet, pemanis, dan pewarna (Padmaningrum, Regina Tutik, 2009). Masyarakat di kawasan pusat oleh-oleh hasil laut Desa Karimunting menambahkan zat aditif pada produk-produk yang dijual di kawasan pusat oleh-oleh hasil laut tersebut. Zat aditif yang digunakan mulai dari zat aditif alami hingga buatan. Masyarakat Desa Karimunting khususnya pedagang di kawasan pusat oleh-oleh hasil

laut telah memanfaatkan tumbuhan atau rempah sebagai penyedap rasa alami pada olahan kerupuk. Tumbuhan rempah yang digunakan sebagai penyedap adalah bawang putih, bawang merah dan merica. Garam digunakan sebagai pengawet alami untuk mengawetkan berbagai macam ikan, terasi, peda' dan cincalok. Selain itu, pedagang juga menambahkan zat aditif buatan pada produk yang dijual, seperti pada kerupuk dan cincalok. Tujuannya adalah untuk membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. Selain itu pedagang juga menambahkan bleng, soda kue dan pewarna buatan pada proses pembuatan kerupuk ikan dan udang.

Salah satu upaya untuk mengenalkan kearifan lokal kepada peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal khususnya pada bidang pengolahan makanan. Hal ini bertujuan agar peserta didik mengenal dan ikut melestarikan produk lokal di daerahnya.

Penggunaan modul berbasis kearifan lokal di dalam pembelajaran terbukti memperoleh respon yang positif dari guru dan peserta didik seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Anwar, dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Kearifan Lokal di Taman Nasional Gunung Merapi untuk SMA/MA Kelas X Materi Keanekaragaman Hayati. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rafika Nurahmi, dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta Tema Pendidikan untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar. Bahan ajar IPA berbasis kearifan lokal terbukti sangat efektif digunakan dalam meningkatkan hasil belajar dan

aktivitas peserta didik seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Kumala dan Prihatin Sulistyowati dengan judul Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Kearifan Lokal. Hasil validasi dari segi grafika, bahasa dan materi, memperoleh presentase rata-rata dengan kriteria sangat tinggi yaitu masing-masing sebesar, 87,5%, 91,7%, dan 81,25%.

Salah satu Sekolah Menengah Pertama yang berada sangat dekat dengan Kawasan Pusat Oleh-oleh Hasil Laut Desa Karimunting yaitu SMP N 2 Sungai Raya Kepulauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA dan siswa di SMP tersebut ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran seperti yang tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Wawancara

Kendala Dalam Proses Pembelajaran IPA	
Bagi Siswa	Bagi Guru
Keterbatasan sumber belajar	Rendahnya minat baca siswa
Kurangnya peran guru dalam menjelaskan materi	Keterbatasan sumber belajar
Buku yang sulit dipahami tanpa bantuan guru	Terbatasnya tenaga pengajar khususnya mata pelajaran IPA
Kesulitan memahami dan menghafal	

Kurangnya sumber bacaan, serta aturan sekolah yang melarang siswa membawa *handphone* ke sekolah sehingga membatasi siswa untuk mencari informasi tambahan dari internet menjadi kendala yang dihadapi siswa dalam memperoleh informasi seputar materi yang dipelajari. Sehingga untuk materi zat aditif yang cukup mudah masih banyak siswa yang nilai ulangannya tidak mencapai KKM. Permasalahan lain yang dihadapi siswa yaitu kurangnya peran guru dalam menjelaskan materi, guru hanya memberikan tugas sementara sumber informasi untuk mempelajari materi terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dikembangkannya sumber bacaan pendamping yang memuat banyak informasi, serta dapat dipelajari siswa secara mandiri, mengingat terbatasnya proses belajar mengajar di sekolah dan jumlah tenaga pengajar khususnya pada mata pelajaran IPA, maka kemandirian belajar dianggap perlu dimiliki oleh setiap siswa. Kemandirian belajar peserta didik adalah sejauh mana siswa dapat ikut menentukan tujuan, bahan, dan pengalaman belajar serta evaluasi dalam proses pembelajarannya (Moore dalam Rusman, 2014). Dengan adanya kemandirian belajar siswa dapat turut andil dan bertanggung jawab dalam proses belajarnya dan berupaya sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

Untuk mendukung kemandirian belajar siswa diperlukan suatu bahan ajar pendukung yang dapat mengarahkan siswa mempelajari materi tanpa bantuan guru atau dengan bantuan guru yang seminimal mungkin. Memperhatikan masalah yang ditemukan di lapangan serta potensi yang dimiliki di sekitar tempat tinggal siswa, peneliti akhirnya memutuskan untuk mengembangkan bahan ajar berupa modul untuk mendukung kemandirian belajar

siswa. Modul Zat Aditif Berbasis Kearifan Lokal Pengolahan Makanan Masyarakat Karimunting diharapkan dapat menjadi bahan ajar pendamping siswa khususnya pada materi zat aditif. Modul dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat baca siswa sekaligus mengenalkan kearifan lokal daerah setempat khususnya dalam bidang pengolahan makanan lokal.

2. METODE PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang dikenal dengan istilah *Research and Development (R&D)*. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4-D dari Shivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974). Model pengembangan 4-D tahap-tahapannya terdiri dari *define, design, develop and disseminate*. Tetapi, pada penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap pengembangan (*develop*).

Berikut penjelasan hasil penelitian serta pembahasan setiap tahap yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini.

Tahap Pendefinisian

Tujuan dari tahap pendefinisian ini untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperoleh, fakta, harapan, alternatif dalam memilih bahan ajar yang akan dikembangkan. Terdapat 5 langkah pokok pada tahap pendefinisian (*define*) yaitu :

- Analisis awal akhir
- Analisis peserta didik
- Analisis Konsep
- Analisis Tugas
- Merumuskan Tujuan Pembelajaran

Tahap Perancangan

Tahap ini terdiri dari beberapa tahapan diantaranya:

- Penyusunan standar uji/tes
- Pemilihan Media
- Pemilihan Format

Tahap Pengembangan

Tahap ini dilakukan melalui dua langkah, yaitu penilaian ahli dan uji coba lapangan. Tetapi pada penelitian ini hanya sampai pada tahap penilaian oleh para ahli. Penilaian modul oleh para ahli ditinjau dari 3 aspek kelayakan, yaitu kelayakan bahasa, kelayakan isi dan penyajian, dan kelayakan grafika. Setiap aspek dinilai oleh masing-masing dua orang ahli. Tujuan dari penilaian ini untuk menilai tingkat kelayakan produk awal yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang diberikan.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik komunikasi langsung dan tidak langsung. Teknik komunikasi langsung dilakukan melalui wawancara terhadap guru dan siswa, sedangkan teknik komunikasi tidak langsung

dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian kelayakan.

Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar wawancara untuk siswa dan guru mata pelajaran IPA, serta lembar penilaian kelayakan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu isi dan penyajian, Bahasa, dan kegrafikan. Lembar penilaian kelayakan yang digunakan merupakan modifikasi dari kriteria kelayakan buku ajar menurut BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Tahun 2008.

Teknik Pengolahan Data

Berikut langkah-langkah pengolahan data pada lembar penilaian kelayakan:

1. Menghitung banyaknya skor penilaian tiap-tiap pertanyaan
2. Menghitung skor keseluruhan dari tiap-tiap pertanyaan
3. Menghitung persentase perolehan skor tiap pertanyaan dengan rumus :

$$P = \frac{\sum X}{\sum Xi} \times 100\%$$

Dengan :

P = persentase perolehan skor

$\sum X$ = jumlah perolehan skor

$\sum Xi$ = jumlah skor ideal/tertinggi

4. Menghitung persentase rata-rata kelayakan modul secara keseluruhan menggunakan rumus :

$$V = \frac{\sum P}{n}$$

Dengan :

V = persentase rata-rata kevalidan

$\sum P$ = jumlah rata-rata persentase skor tiap aspek

n = jumlah aspek yang dinilai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan pengembangan bahan ajar berupa Modul Zat Aditif Berbasis Kearifan Lokal Pengolahan Makanan Masyarakat Desa Karimunting. Model pengembangan 4-D yang diterapkan pada penelitian ini terdiri dari 4 tahapan yaitu, pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan.

Tahap Pendefinisian

Tujuan dari tahap pendefinisian ini adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperoleh, fakta, harapan, alternatif dalam memilih bahan ajar yang akan dikembangkan. Pada tahap pendefinisian (*define*) terdapat 5 langkah pokok yaitu :

a. Analisis awal-akhir

Analisis awal akhir bertujuan untuk menentukan masalah dasar yang ada dalam pembelajaran, sehingga dapat ditentukan bahan ajar yang akan dikembangkan untuk membantu peserta didik. Pada tahap ini instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan pada satu orang guru mata pelajaran IPA dan 6 orang siswa.

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan di SMP tersebut, diperoleh informasi bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut adalah kurikulum 2013, sumber belajar yang digunakan siswa pada mata pelajaran IPA hanya Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang disusun oleh pemerintah. Buku tersebut dipinjamkan kepada peserta didik dan dikembalikan di akhir semester. Guru juga tidak pernah menggunakan modul atau buku pendamping lain dalam pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran IPA guru tidak pernah melakukan praktikum, jarang menerapkan model-model pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi selanjutnya siswa diminta mengerjakan soal latihan yang ada di buku. Selain itu, guru juga jarang menghubungkan materi dengan fenomena di kehidupan sehari-hari yang sering ditemui siswa. Siswa juga mengungkapkan bahwa buku yang mereka gunakan cukup menarik hanya saja sulit dipahami jika tanpa bantuan guru. Guru mengungkapkan bahwa perlu dikembangkan bahan ajar pendamping yang materinya dikaitkan dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan siswa.

b. Analisis Peserta Didik

Pada tahap ini instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara analisis peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 4 dari 6 responden menganggap pelajaran IPA sulit karena siswa harus memahami dan menghafal. Rata-rata responden tidak suka mencatat penjelasan guru, beberapa hanya mencatat apa yang dicatat guru di papan tulis. Siswa juga mengungkapkan bahwa mereka menyukai pelajaran IPA yang dilengkapi dengan praktikum.

c. Analisis Konsep

Analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan. Konsep tersebut kemudian disusun dalam bentuk peta konsep. Berikut peta konsep yang terdapat pada modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting.

d. Analisis Tugas

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang akan dilakukan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Daftar tugas yang terdapat pada modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting diantaranya, tes formatif, soal uji pemahaman (esai), tugas diskusi kelompok, praktikum sederhana.

e. Merumuskan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting ini yaitu peserta didik secara mandiri diharapkan mampu :

1. Mengidentifikasi zat aditif yang ditambahkan kedalam makanan atau minuman.
2. Mengidentifikasi zat aditif alami di dalam makanan atau minuman

3. Mengidentifikasi zat aditif buatan di dalam makanan atau minuman
4. Mengidentifikasi dampak zat aditif terhadap kesehatan
5. Mengecek kelayakan suatu makanan atau minuman berdasarkan kandungan zat aditif di dalamnya.

Tahap Perancangan

Pada tahap perancangan, terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu:

a. Penyusunan standar tes

Berdasarkan tujuan pembelajaran dan analisis siswa, maka disusun standar tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Pada modul ini tes yang diberikan berupa tes formatif sebanyak 10 soal, soal essay sebanyak 5 soal, Tugas diskusi kelompok (Aktivitas 1) sebanyak 3 soal dan praktikum sederhana. Selain itu disusun juga instrumen penilaian kelayakan modul dari segi isi dan penyajian, bahasa, dan kegrafikan

b. Pemilihan Media

Berdasarkan hasil wawancara pada analisis awal-akhir, tujuan pembelajaran dan materi maka modul dipilih sebagai media yang akan dikembangkan, selain sebagai sumber informasi tambahan juga mempermudah siswa mempelajari materi secara mandiri. Modul yang dikembangkan merupakan modul untuk materi zat aditif yang dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat dalam bidang pengolahan makanan-makanan khas di Desa Karimunting

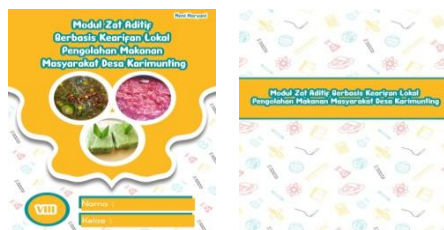
c. Pemilihan Format

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan struktur produk berdasarkan format modul yang telah disusun sebelumnya. Mengacu pada komponen-komponen modul yang dikemukakan oleh sungkono (2003) format modul yang dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Halaman Judul (Cover)

Halaman judul dibuat menarik dengan warna yang mencolok yaitu perpaduan warna kuning, biru dan putih dilengkapi dengan gambar. Hal ini bertujuan untuk menarik minat siswa untuk membaca dan mempelajari modul tersebut. Pada halaman judul, terdapat nama penulis, judul bahan ajar, kolom nama dan kelas siswa, serta gambar tiga jenis makanan lokal masyarakat Desa Karimunting.



Gambar 1. Sampul Depan dan Sampul Belakang Modul

b. Kata Pengantar

Bagian ini memuat ucapan syukur penulis karena telah menyelesaikan modul zat aditif berbasis kearifan lokal masyarakat Desa Karimunting serta ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian modul.

c. Daftar Isi

Bagian ini memuat urutan topik beserta halamannya, tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam mencari topik tertentu.

d. Deskripsi Singkat

Bagian ini berisi deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari di dalam modul.



Gambar 2. Deskripsi Singkat

e. Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan Tujuan Pembelajaran.

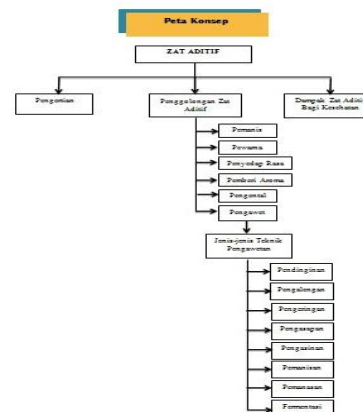
f. Manfaat

Bagian ini menjelaskan manfaat modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting bagi siswa dan guru.

g. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul berisi panduan teknis dalam mempelajari modul agar memperoleh hasil yang maksimal. Berikut petunjuk penggunaan modul yang terdapat pada modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting.

h. Peta Konsep



Gambar 3. Peta Konsep

2. Kegiatan Belajar

Bagian ini terdiri dari pendahuluan, uraian materi, soal diskusi, praktikum serta soal uji pemahaman siswa.

a. Pendahuluan

Pendahuluan berisi informasi seputar Desa Karimunting, khususnya kawasan pusat oleh-oleh hasil laut yang berada di sepanjang jalan Desa Karimunting. Informasi yang erat kaitannya dengan kehidupan siswa dan sering ditemui sehari-hari diharapkan dapat membuat siswa tertarik untuk mempelajari materi lebih lanjut.



Gambar 4. Informasi Seputar Desa Karimunting

b. Uraian Materi

Ruang lingkup materi yang terdapat di dalam modul pembelajaran ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian zat aditif
2. Penggolongan zat aditif
3. Jenis-jenis zat aditif alami dan buatan beserta contoh makanan
4. Jenis-jenis teknik pengawetan makanan
5. Dampak zat aditif terhadap kesehatan

Modul tersebut juga dilengkapi dengan beberapa informasi seputar makanan lokal setempat, cara pengolahannya serta zat aditif yang digunakan.



Gambar 5. Kolom Informasi Seputar Makanan Lokal

c. Penugasan

Pada modul ini terdapat 4 jenis uji kompetensi yang diberikan diantaranya

1. Tugas diskusi kelompok (aktivitas 1) yang terdiri dari 3 soal.
2. Tugas praktikum sederhana
3. Soal uji pemahaman berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal.

4. Soal essay yang terdiri dari 5 soal.



Gambar 6. Kolom Aktivitas 1

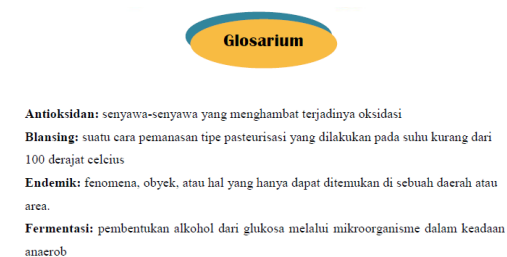
Selain itu terdapat kolom aktivitas 2 yang berisi praktikum sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri, karena bahan-bahan yang digunakan sering ditemui siswa di kehidupan sehari-hari.



Gambar 7. Kolom Aktivitas 2

3. Penutup

Bagian penutup terdiri dari glosarium yang berisi daftar pengertian beberapa istilah penting dan istilah asing, kunci jawaban serta daftar pustaka.



Gambar 8. Glosarium

Tahap Pengembangan

Modul yang telah dirancang selanjutnya dinilai kelayakannya oleh para ahli. Penilaian kelayakan ditinjau dari 3 aspek yaitu kelayakan isi dan penyajian, Bahasa, dan kegrafikan. Setiap aspek dinilai oleh masing-masing dua orang ahli. Tujuan dari penilaian ini untuk menilai tingkat kelayakan produk awal yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang diberikan.

Validasi Kelayakan Isi dan Penyajian

Validasi kelayakan isi dilakukan oleh dua orang ahli yang terdiri dari dua orang guru IPA SMP. Penilaian kelayakan isi terdiri dari tiga indikator penilaian yaitu kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD), keakuratan serta kemutakhiran materi. Penilaian kelayakan penyajian juga terdiri dari tiga indikator yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan pendukung penyajian. Penilaian pada aspek isi dan penyajian memperoleh rata-rata sebesar 88,5% dengan kriteria sangat tinggi

Tabel 2. Hasil Penilaian Kelayakan Isi dan Penyajian

Indikator Penilaian	Pernyataan	Skor				Kriteria	
		V1	V2	$\sum X$	$\sum Xi$ P(%)		
KELAYAKAN ISI							
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar	Kesesuaian materi dengan KD	3	3	6	8	75	Tinggi
	Kesesuaian materi dengan Indikator	3	3	6	8	75	Tinggi
	Kedalaman materi	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
Keakuratan materi	Keakuratan konsep dan definisi	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Keakuratan informasi/fakta dan data	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Keakuratan contoh	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Keakuratan ilustrasi	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Keakuratan istilah	3	3	6	8	75	Tinggi
	Hubungan antara materi zat aditif dengan kearifan lokal di masyarakat	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
Kemutakhiran materi	Kesesuaian latihan soal dan contoh yang di dalam modul dengan indikator	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Menggunakan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	KELAYAKAN PENYAJIAN						
Teknik Penyajian	Konsistensi sistematika sajian dalam aktivitas belajar	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Keteraturan konsep	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
Penyajian Pembelajaran	Keterlibatan peserta didik	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
Pendukung Penyajian	Tugas dalam kegiatan belajar	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Pengantar	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Daftar Isi	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Daftar pustaka	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Rangkuman	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
	Glosarium	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
Rata-rata = 88,5							

Pada butir penilaian kesembilan pada kelayakan isi yaitu hubungan antara materi zat aditif dengan kearifan lokal di masyarakat memperoleh skor 4 dari masing-masing ahli isi modul sangat

menunjukkan hubungan antara materi dengan kearifan lokal di masyarakat. Hal ini juga didukung oleh perolehan skor pada butir penilaian nomor 11 dan 12 yang masing masing memperoleh skor 4 dari para ahli, hal ini menunjukkan bahwa ilustrasi dan contoh yang ditampilkan di dalam modul sangat sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan saran dari kedua validator, maka dilakukan beberapa perbaikan diantaranya adalah memperjelas informasi tempat pada bagian latar belakang, perbaikan kalimat pada petunjuk penggunaan modul, perbaikan pada soal di bagian aktivitas 1 dan penambahan keterangan pada alat yang digunakan pada bagian percobaan sederhana.

Tabel 3. Perbaikan Pada Aspek Isi dan Penyajian

Halaman dan Keterangan	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1	Desa Karimunting terkenal sebagai kawasan pusat oleh-oleh hasil laut yang menjual berbagai produk olahan berbahan dasar ikan, udang, dan lain-lain.	Desa Karimunting yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, terkenal sebagai kawasan pusat oleh-oleh hasil laut yang menjual berbagai produk olahan berbahan dasar ikan, udang, dan lain-lain.
4	Mengganti simbol dengan angka	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum mulai mempelajari materi, bacalah tujuan pembelajaran agar kalian mengetahui apa yang akan dicapai setelah mempelajari modul ini. Perhatikan peta konsep secara seksama agar kalian mengetahui alur antar kosep di dalam modul. Bacalah dan pahami uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar.
14	Penambahan keterangan pada alat yang digunakan untuk praktikum	<p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gelas Kimia Gelas ukur Benang wol Pemanas Bunsen Kaki tiga Kawat kasa Sabun cuci <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gelas Kimia atau wadah lain yang tahan panas Gelas ukur Pipet tetes Benang wol warna putih Pemanas Bunsen atau kompor Kaki tiga Kawat kasa Sabun cuci Penjepit gelas kimia atau sarung tangan anti panas
14	Perbaikan soal nomor 3 pada aktivitas 1	<p>Bagaimana cara mengidentifikasi adanya Rhodamin B pada makanan.</p> <p>Carilah bagaimana cara mengidentifikasi adanya Rhodamin B pada makanan.</p>

Validasi Kelayakan Bahasa

Validasi kelayakan bahasa dilakukan oleh dua orang ahli yang merupakan guru Bahasa Indonesia. Penilaian kelayakan bahasa terdiri dari 5 indikator penilaian yaitu komunikatif, lugas, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan kaidah serta kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Kedua ahli memberikan beberapa saran perbaikan untuk aspek kebahasaan. Perbaikan yang dilakukan terhadap saran dari validator diantaranya, perbaikan pada penggunaan judul pada daftar isi dan daftar gambar, mengganti poin-poin yang menggunakan simbol dengan huruf atau angka, perbaikan pada penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benar, serta perbaikan pada kalimat yang menggunakan kata hubung di awal kalimat.

Berdasarkan tabel penilaian pada aspek bahasa di bawah ini dapat dilihat bahwa indikator penilaian komunikatif memperoleh skor tertinggi dengan perolehan skor sebesar 100 persen hal ini menunjukkan bahwa modul zat aditif ini sangat mudah dipahami. Sementara itu pada indikator penilaian terakhir yaitu pada butir penilaian ketepatan ejaan memperoleh skor sebesar 62,5 persen, paling rendah dibandingkan dengan butir penilaian yang lain, hal ini menunjukkan masih banyak ejaan-ejaan yang dianggap kurang tepat oleh para ahli.

Tabel 4. Hasil Penilaian Kelayakan Bahasa





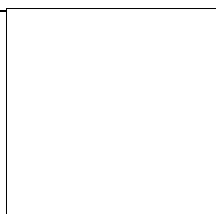
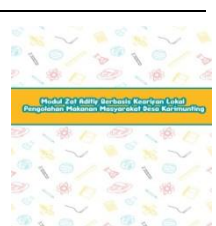
Indikator Penilaian	Butir Penilaian	Skor				Kriteria	
		V1	V2	$\sum \frac{X}{X}$	$P(\frac{\sum X}{X} \%)$		
Lugas	Ketepatan bentuk kalimat	3	4	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Keefektifan kalimat	3	3	6	8	75	Tinggi
	Kebakuan istilah	4	3	7	8	87,5	Sangat Tinggi
Komunikatif	Pemahaman terhadap informasi	4	4	8	8	100	Sangat Tinggi
Interaktif dan Dialogis	Kemampuan memotivasi peserta didik	3	3	6	8	75	Tinggi
Kesesuaian dengan Perkembangan siswa	Kesesuaian dengan perkembangan intelektual siswa	3	4	7	8	87,5	Sangat Tinggi
	Kesesuaian dengan Kaidah	Ketepatan tata bahasa	3	3	6	8	75
	Ketepatan ejaan	2	3	5	8	62,5	Tinggi
Rata-rata=						81,25	

Validasi Kelayakan Keagrafikan

Validator untuk aspek keagrafikan dari modul ini terdiri dari dua orang yaitu satu orang guru mata pelajaran IPA SMP dan satu orang guru mata pelajaran Kimia SMA. Penilaian kelayakan grafika terdiri dari 2 indikator penilaian yaitu ukuran modul dan desain sampul, kedua indikator terbagi lagi menjadi 12 butir penilaian. Penilaian kelayakan keagrafikan modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting memperoleh rata-rata persentase sebesar 92,3% dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek keagrafikan modul ini sangat menarik dan layak diuji cobakan. Selain memberikan

penilaian, setiap validator juga memberikan masukan dan saran perbaikan. Perbaikan dilakukan pada bagian sampul modul yaitu pada nama penulis, sebelum dilakukan revisi warna yang digunakan adalah kombinasi antara warna kuning dan putih, menurut validator kombinasi warna tersebut kurang pas karena kontras dengan warna background sampul depan modul, sebaiknya diganti dengan warna yang lebih gelap agar tulisan nama penulis lebih jelas dan mencolok, hal yang sama juga dilakukan pada tulisan judul yang terletak di bagian bawah *background* modul. Selain pada sampul modul bagian depan, perbaikan juga dilakukan pada sampul belakang modul yang sebelumnya hanya berupa sampul polos berwarna putih diganti dengan sampul dengan desain yang lebih menarik. Isi modul yang sebelumnya sebagian besar menggunakan jenis huruf *times new roman* diganti dengan kombinasi beberapa jenis huruf lain agar tidak terlalu kaku dan lebih menarik. Selain itu, juga dilakukan perbaikan spasi pada beberapa sub judul yang tidak konsisten.

Tabel 5. Perbaikan pada aspek keagrafikan

Halaman	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Cover :		
ganti kombinasi warna putih dan kuning pada nama penulis dengan warna yang lebih gelap.		
Isi :		
ganti kombinasi warna pada judul yang terletak di bagian bawah modul		
Sampul Belakang :		
Membuat desain untuk sampul belakang modul		

(cover putih polos)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting sangat layak digunakan dalam pembelajaran dibuktikan dengan perolehan persentase kelayakan isi, bahasa dan keagrafikan berturut-turut sebesar 88,5%, 81,3% dan 92,3% dengan kriteria sangat tinggi.

Saran

Modul zat aditif berbasis kearifan lokal pengolahan makanan masyarakat Desa Karimunting

dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan mengenai respon peserta didik serta efektifitas penggunaan modul yang dikembangkan dalam pembelajaran.

5. REFERENSI

- Andriyani, P., Masriani, & Muharini, R.2018. Pengembangan Modul Zat Aditif Makanan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Rasau Jaya Umum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(12):1-12
- Aswan Zain, Syaiful Bahri Djamarah. 2010 . *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizahwati, et.al., 2015. Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika SMA Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Prosiding Pertemuan Ilmiah XXIX HFI Jateng & DIY*, ISSN : 0853- 0823 Hal 70-73.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indra Chahaya S. 2003. Bahan Tambahan Makanan, Manfaat dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. *Info Kesehatan*, Maret 2003
- Karunia, Finisa B. 2013. Kajian Penggunaan Zat Adiktif Makanan (Pemanis dan Pewarna) pada Kudapan Bahan Pangan Lokal di Pasar Kota Semarang. *Food Science and Culinary Education Journal*, 2(2):72-78, ISSN 2252-6587
- Oktaria, Yuyun. 2016. *Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis inkuiri terbimbing pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas X SMA*. [skripsi] : Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
- Padmaningrum, Regina Tutik. 2009. *Bahan Aditif Dalam Makanan*. Makalah. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan
- Riduwan. 2012. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Ridwan, Rini Astuti Nur. 2013. *Analisis Kandungan Rhodamin B Pada Minuman Dingin Yang Dijajakan Dalam Gerobak Di Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo Kota Makassar Dengan Metode Spektrofotometer Uv-Vis*. [skripsi]. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Rosa, Friska Octavia. 2015. Pengembangan Modul Pembelajaran IPA SMP Pada Materi Tekanan Berbasis Keterampilan Proses Sains. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 3(1) : 49-63, ISSN: 2337-5973 e-ISSN: 2442-4838
- Rosyidah, A. N., Sudarmin, & Kusoro, S. 2013. *Pengembangan Modul Ipa Berbasis Etnosains Zat Aditif Dalam Bahan Makanan Untuk Kelas VIII SMP Negeri 1 Pegandon Kendal*. *Jurnal USEJ*, 2 (1): 133-139,ISSN 2252-6609
- Rusman. 2014. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Somantri, Dani Wardani. 2015. *Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Media Modul Di Sekolah Dasar Negeri 8 Banjar Kota Banjar Patroman*. [skripsi]. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sungkono. 2003. *Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Ajar Modul Dalam Proses Pembelajaran*. Makalah. Yogyakarta: FIP UNY
- Syamsiatun, Siti & Nihayatul Wafiroh. 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Geneva: Globethics
- Trianto, 2010. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

MANAJEMEN PEMBELAJARAN DARING MASA PANDEMI COVID 19 DI SMA NEGERI 3 PONTIANAK

Oleh:

Usman Radiana¹⁾, Rizky P'malia Sari²⁾, Ridha Sabda Utami³⁾, Hermawan⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

Email: usmanradiana@gmail.com

rzkyimalia@gmail.com

ridhasabdautami0907@gmail.com

gmarwan774@gmail.com

Abstrak

Untuk menjawab permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID19 saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan pembelajaran agar kegiatan pendidikan tetap berjalan. Yaitu dengan menggunakan pembelajaran online. Kenyataan di lapangan banyak permasalahan yang muncul dalam pembelajaran online. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembelajaran daring di masa pandemi COVID 19 melalui prinsip-prinsip manajemen; 1) pengorganisasian; 2) pembiayaan; dan 3) pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana manajemen pembelajaran online pada masa pandemi COVID 19 di SMA Negeri 3 Pontianak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pembelajaran online sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perubahan kurikulum yang berlaku. Alokasi biaya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran online dan kebutuhan sekolah seperti fasilitas pembelajaran, protokol kesehatan, sarana dan prasarana lainnya. Pengawasan selama pembelajaran online dilakukan dengan membuat jurnal pembelajaran melalui *google form*. Jurnal tersebut mencatat peserta didik yang mengalami kendala dalam pembelajaran online, sehingga kendala selama pembelajaran online dapat diatasi.

Kata Kunci: *Manajemen; Pembelajaran Daring; Pengorganisasian; Pembiayaan; Pengawasan*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan bertujuan mengoptimalkan perkembangan kemampuan individu di berbagai aspek, agar dikemudian hari dapat menjalankan peranan dengan tepat dalam kondisi apapun. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran yang tepat agar pengetahuan dapat sampai dengan baik dan bermakna bagi peserta didik. Menurut Hamalik (dalam Rukajat, 2018) pembelajaran merupakan kombinasi dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas dan prosedur yang memengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran (h. 5). Yang mana pembelajaran mesti memperhatikan kesesuaian antara materi pembelajaran, media pembelajaran, serta perlengkapan pembelajaran. Sehingga manajemen pembelajaran merupakan kemampuan mendayagunakan sumber daya melalui kegiatan membangun dan mengembangkan kerja sama antar unsur sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengetahuan, kemampuan dan kreativitas untuk mengelola pembelajaran sangat dibutuhkan. Terlebih pada masa pandemi COVID 19 saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan pembelajaran agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung.

Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan bagi lembaga pendidikan untuk mengurangi kegiatan yang

mengakibatkan kerumunan massa. Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan jarak jauh dan kegiatan belajar di rumah masing-masing. Sehingga, pembelajaran daring merupakan salah satu alternatif agar pembelajaran tetap berlangsung. Pemanfaatan digital sangat dibutuhkan dalam mendukung pembelajaran daring. Menurut Firman (2020) pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan akses dan koneksi jaringan internet secara fleksibel serta kemampuan untuk memunculkan berbagai cara untuk mendukung pembelajaran (h. 82). Sedangkan menurut Saide dan Sheng (2020) *in this pandemi, all of class learning has ben cancelled and moved to online learning. It makes education process can practice of teaching-learning aims at the transmission of knowledge, information, skill, and attitudes, behaviour, and other values* (p. 3). Dimana pada masa pandemi ini, dengan pembelajaran online atau daring, dapat melatih kemampuan, sikap dan perilaku guru. Pembelajaran daring mampu menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik.

Kurikulum pembelajaran dalam masa pandemi COVID 19 ini tidak terlepas dari SKB 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID 19, serta surat edaran dari menteri pendidikan dan kebudayaan nomor: 36962/MPK.AHK/2020 mengenai pembelajaran

secara daring dan bekerja dari rumah sebagai upaya pencegahan pencemaran COVID 19. Upaya tersebut di antaranya, sebagai berikut: a) memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi peserta didik dan mahasiswa; b) pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberikan kuliah dari rumah melalui *video conference*, *digital documents* dan sarana daring lainnya. Untuk itu dalam upaya melaksanakan intruksi tersebut, kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan berbagai macam media komunikasi dan aplikasi secara online.

Pembelajaran daring memiliki tantangan tersendiri. Peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi pengetahuannya. Sehingga pembelajaran daring sifatnya lebih berorientasi kepada peserta didik atau *student centered*. Terdapat beberapa jenis pembelajaran daring sebagaimana menurut Jariyah dan Tyastirin (2020), di antaranya: a) *knowledge base*, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran yang diterbitkan di situs web dan memiliki instruksi umum pembelajaran yang harus diikuti peserta didik; b) *online support*, yaitu versi modifikasi dari *knowledge base* dimana dukungan tersedia sehingga seperti papan diskusi, forum web atau cara komunikasi lain yang tersedia sebagai fitur pendukung pembelajaran; c) pelatihan asinkron, yaitu pelatihan yang tidak dilakukan secara *real-time*, dimana peserta didik diberikan pelatihan konten secara teratur. Instruktur ditugaskan untuk memberi dukungan melalui email atau platform komunikasi lainnya; d) pelatihan sinkron, yaitu pelatihan yang dilakukan secara *real-time* dengan instruktur langsung dan moderator opsional. Ada waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk masuk ke lingkungan pendidikan online dan peserta didik dapat berkomunikasi langsung dengan anggota kelompok lainnya; e) pelatihan gabungan, yaitu pelatihan kombinasi interaksi online dan tatap muka (h. 184).

Namun, kenyataan di lapangan banyak ditemukan permasalahan yang timbul akibat pembelajaran secara daring. Baik pada masalah keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi digital, tidak adanya data seluler/kuota internet yang memadai, gangguan jaringan, alat pendukung yang terbatas, serta kurang responsifnya anak dan orang tua dalam pembelajaran daring. Sehingga ada peserta didik yang sering tidak ikut pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain.

Problematika pembelajaran daring ini juga pernah dilakukan oleh Asmuni (2020) di SMA N 1 Selong Kabupaten Lombok Timur. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID 19 memiliki beragam problematika. Baik bagi pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua. Beragam permasalahan tersebut dapat diatasi dengan

meningkatkan kompetensi penguasaan IT, pengawasan intensif dengan melibatkan peran orang tua, dan memberikan penugasan secara semi manual.

SMA Negeri 3 Pontianak adalah sekolah unggulan yang berada dipusat kota Pontianak. Sebagai sekolah berakreditasi A. SMA Negeri 3 Pontianak juga ditunjuk oleh LPMP Provinsi Kalimantan Barat sebagai penerapan sekolah model berdasarkan SK Nomor: 1354/D7.19/Kep/2018, yang saat ini juga melaksanakan pembelajaran secara daring. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembelajaran daring masa COVID 19 melalui prinsip-prinsip manajemen, yaitu: 1) pengorganisasian; 2) pembiayaan; dan 3) pengawasan di SMA N 3 Pontianak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dalam pengumpulan data. Sehingga analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian bertujuan untuk memahami makna, memahami keunikan dan mengkonstruksi fenomena (h. 9-10). Untuk itu, berdasarkan fokus masalah, tujuan penelitian, subjek penelitian dan karakteristik data yang dikumpulkan, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan melakukan penelitian secara eksploratif yang bersifat mendalam dengan menganalisis dan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi di balik fakta atau kasus. Dimana penulis terlibat secara langsung sebagai partisipan penelitian (*human instrument*). Adapun fakta atau kasus dalam penelitian ini adalah mengungkapkan dan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran daring di masa pandemi COVID 19 di SMA Negeri 3 Pontianak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari; 1) kepala sekolah; 2) wakil kepala sekolah bagian kurikulum; 3) bendahara; 4) beberapa guru; dan 5) beberapa peserta didik. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini berupa paparan deskripsi mengenai fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID 19 di SMA Negeri 3 Pontianak

Pengorganisasian dalam manajemen pembelajaran menduduki posisi penting karena

menjadi petunjuk bagi elemen sekolah dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pendidikan. Menurut Saajidah (2018) pengorganisasian merupakan proses menghubungkan dan membagi sumber daya manusia yang dimiliki dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi (h. 203). Menurut Umam, dll (2019) pengorganisasian merupakan struktur yang diintegrasikan untuk membagi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menciptakan relasi yang kuat antar unsur dalam organisasi untuk mencapai tujuan (h. 46). Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan sekelompok individu yang saling bekerja sama untuk menjalankan kewajiban dan tugas sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Pengorganisasian pembelajaran bertujuan untuk menentukan tugas pokok dan fungsi masing-masing elemen sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, berdasarkan peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pengorganisasian pembelajaran menjadi tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar arah dan tujuannya jelas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian pembelajaran daring di antaranya, dengan: a) Memahami tujuan utama sekolah dan tujuan utama pembelajaran; b) Menetapkan dan menentukan program atau kegiatan pembelajaran; c) Mengklasifikasi program atau kegiatan pembelajaran; d) Mengintruksikan hak, tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada guru; e) Pengendalian; e) Menekankan peranan personal. Hal ini menuntut peran dan kedudukan kepala sekolah sebagai manajer dalam mengatur kegiatan pembelajaran, serta tugas dan fungsi guru dalam memilih dan mendesain kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu, kurikulum, materi media, dan segala komponen pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di masapandemi COVID 19. Pengorganisasian pembelajaran yang diterapkan di SMA Negeri 3 Pontianak tetap mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 telah disesuaikan dengan keadaan sekolah di masa pandemi COVID 19, namun hanya materi-materi esensial saja yang lebih ditekankan dalam proses pembelajaran.

Pihak sekolah bekerja sama dengan pihak luar dalam mempersiapkan pembelajaran daring yaitu dengan pembelian *e-learning*, yaitu aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru merupakan sebuah aplikasi belajar untuk mendukung pembelajaran daring. Namun aplikasi ini dianggap kurang efektif karena aplikasi ini masih terbilang baru sehingga para guru belum familiar dalam menggunakan aplikasi belajar tersebut. Selain pelatihan dan kerjasama dengan pihak luar, pihak sekolah juga memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran daring, yaitu bagi guru diberikan obat-obatan, masker, vitamin serta kuota internet. Sedangkan bagi peserta didik diberikan kuota internet dan gadget untuk dipinjamkan kepada peserta didik yang kurang mampu dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Proses pembelajaran di SMAN 3 Pontianak memanfaatkan banyak akses untuk melakukan pembelajaran daring. Salah satunya menggunakan aplikasi whatsapp sebagai forum diskusi keseharian antara guru dan peserta didik. Selebihnya, guru memanfaatkan aplikasi zoom meeting, google classroom dan google form.

Para guru diberikan hak untuk bebas merancang pembelajaran daring yang dianggap efektif dengan metode apa saja, asalkan tetap sesuai dengan materi pembelajaran dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Para guru juga dihimbau untuk minimal satu kali dalam sebulan bertemu secara virtual dengan para peserta didik dan untuk mengecek keadaan para peserta didik terutama kerapian rambut para peserta didik serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. Untuk evaluasi semua proses belajar-mengajar para guru setiap hari melakukan diskusi bersama rekan kerja untuk membahas apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang harus diambil.

Sebagaimana menurut Jannah & Marwiyah (2020) terdapat empat manfaat tujuan manajemen pembelajaran di antaranya; (a) Memudahkan guru dalam mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri; (b) Memudahkan guru dalam mengkondisikan penyusunan dan penyampaian materi pembelajaran; (c) Memudahkan guru untuk menentukan dan memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan materi pembelajaran; (d) Membantu guru dalam menilai proses pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik.

Dengan demikian, yang menjadi tujuan utama manajemen pembelajaran yaitu mencetak kepribadian peserta didik yang sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. Secara rinci tujuan manajemen pembelajaran meliputi hal-hal berikut, yaitu: Pertama; tewujudnya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kedua; terciptanya peserta didik aktif mengembangkan minat dan bakatnya dalam rangka meraih kedalaman spiritual keagamaan, kompetensi professional memiliki kecakapan dan kecerdasan.

Berdasarkan penjelasan di atas SMAN 3 Pontianak telah mengacu pada tujuan manajemen pembelajaran terutama dalam pengorganisasian pembelajaran di masa pandemi COVID 19 yaitu pengorganisasian pembelajaran oleh para guru dalam mempersiapkan pembelajaran daring. Jika pengorganisasian pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal, maka pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan optimal pula sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Manfaat dibentuknya pengorganisasian pembelajaran daring adalah memudahkan guru.

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SMA NEGERI 3 PONTIANAK

Manajemen pembiayaan sangat penting untuk mengalokasikan biaya seefisien mungkin. Dalam menentukan biaya, perlu menimbang efisiensi serta efektivitas waktu, fungsi dan harga untuk mendukung sistem pembelajaran. Selama masa COVID 19, sistem pembelajaran dialihkan menjadi daring guna menghindari kerumunan dan persebaran virus. Dalam melaksanakan pembelajaran daring, SMA 3 Negeri Pontianak melakukan sedikit perubahan pada kurikulum sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi tersebut. Namun, kurikulum esensial masih digunakan sebagaimana mestinya hanya untuk materi-materi pokok. Untuk itu, kebutuhan pembelajaran daring pun sedikit berubah, sehingga pembiayaan yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran daring.

Fungsi dasar pembiayaan meliputi; perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen pembiayaan pembelajaran daring, di antaranya: a) Menyiapkan dan memahami rencana yang akan dilaksanakan; b) Menyusun rencana pembiayaan berdasarkan skala prioritas; c) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana; d) Menentukan rincian pembiayaan untuk pendukung pembelajaran daring; e) Menghitung dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan.

Manajemen pembiayaan dimulai dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan skala prioritas, meliputi manajemen sekolah dan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran masa COVID 19. Sebagaimana menurut Imron (2016) mengenai konsep pembiayaan pembelajaran dimulai dari menyusun anggaran, pembukuan sampai pemeriksaan/*auditing* (h. 73). Setelah menyusun rencana pembiayaan yang dibutuhkan, barulah menghitung dan mengalokasikan biaya yang dibutuhkan. Begitu pula pembiayaan yang dilakukan SMA 3 Pontianak selama pembelajaran daring.

Menurut Abidin (2017) sumber pembiayaan pada sebuah lembaga pendidikan secara garis besar berasal dari pemerintah, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat (h. 89). Sebagaimana APBN dan APBD telah membagi dana pendidikan sebanyak 20%, kemudian dari sumbangan, SPP, uang pembangunan dan sebagainya. Untuk itu perencanaan pembiayaan sangat penting untuk mengalokasikan biaya seefisien mungkin. Dalam menentukan biaya, perlu menimbang efektivitas waktu, fungsi dan harga. Adapun Sumber pembiayaan SMA Negeri 3 Pontianak berasal dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dari dan tersebut setidaknya sebesar ¼% dialokasikan untuk mendukung pembelajaran daring. Alokasi pembiayaan dimulai dari pendaftaran di situs *e-learning*. SMA 3 Pontianak juga turut memanfaatkan program-program pembelajaran

online yang tersedia, seperti Ruang Guru. Tak hanya itu, guru-guru juga diberikan pelatihan dan arahan mengenai bagaimana sistem pembelajaran online untuk pembelajaran daring. Selanjutnya lokasi pembiayaan untuk penyediaan kuota bagi guru dan peserta didik, penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta didik kurang mampu, penyediaan obat-obatan dan lain-lain untuk meningkatkan imunitas guru dan karyawan. Untuk memenuhi aturan dari SATGAS COVID, SMA 3 Pontianak juga mengalokasikan pembiayaan untuk penyediaan masker, penyediaan pembersih tangan seperti sabun dan *hand sanitizer*, pengadaan wastafel di seluruh setiap sudut sekolah, dan lain-lain.

Sejauh ini, alokasi pembiayaan dalam mendukung pembelajaran daring sudah sesuai. Selain itu, dana yang ada juga dialokasikan untuk pembenahan fasilitas sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana, belanja fasilitas protokol kesehatan, dan lain-lain. Sehingga seluruh dana dari BOS dan BOSDA dapat dinyatakan telah dimanfaatkan dan disalurkan secara efektif dan efisien.

PENGAWASAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SMA NEGERI 3 PONTIANAK

Pengawasan dibutuhkan agar pelaksanaan pengorganisasian dan pembiayaan pembelajaran dengan benar dan sesuai. Sebab, pengorganisasian pembelajaran bukan sekedar mengatur struktur tugas dan membagi peranan personal, namun juga memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan optimal. Begitu pula pembiayaan yang bukan hanya sekedar memperoleh dana dan mengalokasikannya, tapi juga mengatur agar penggunaannya tepat sasaran. Untuk itu, pengawasan sangat penting untuk menilai dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pembelajaran daring.

Pengawasan merupakan kegiatan memeriksa, mengawasi, memperhatikan, dan mengontrol. Menurut Saajidah (2018) pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengadakan koreksi dan penilaian terhadap kinerja untuk memberikan arahan kepada anggota organisasi (h. 203-204). Fungsi pengawasan pada manajemen pembelajaran daring berkaitan dengan fungsi lain manajemen, seperti *directing* dan *guiding* dalam mengoreksi kinerja guru. Di samping memperbaiki kesalahan, memecahkan dan mencegah masalah, *directing* dan *guiding* mengembangkan kinerja guru untuk lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalitas. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu guru dalam mengatasi kesulitan, bukan semata menilai dan mengoreksi. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang dilakukan kepala sekolah dalam menjalankan sistem manajerial sekolah. Menurut Meriza (2018) pengawasan dalam manajemen sekolah merupakan strategi dalam mencegah kesalahan yang mungkin terjadi (h. 38).

Terdapat beberapa aspek yang harus diawasi dalam pembelajaran daring, di antaranya; a) hasil belajar secara kualitas dan kuantitas; b) perubahan

sikap guru dan peserta didik; c) kinerja guru; d) pembiayaan; e) pemanfaatan fasilitas sarana-prasarana; f) waktu operasional; g) metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran daring; h) efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring. Dimana semua itu semata untuk melakukan fungsi pengawasan dalam mengarahkan dan membimbing.

Menurut Maharani (2018) terdapat beberapa tujuan dari pengawasan dalam pembelajaran daring, yaitu: a) mencegah atau menghilangkan kesalahan, hambatan, pemborosan, dan penyimpangan yang mungkin terjadi; b) menemukan solusi untuk melakukan perbaikan atas masalah agar lebih baik atau mempertahankan yang sudah baik; c) menciptakan iklim yang terbuka, partisipatif dan akuntabel; d) meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembelajaran; e) meningkatkan kualitas kinerja guru; (f) Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik (h. 117).

Di SMA Negeri 3 Pontianak, pengawasan pembelajaran dilakukan dengan membuat jurnal mengajar melalui *Google Form*. Dari jurnal tersebut juga mendata peserta didik yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Koordinasi dilakukan dengan melakukan komunikasi melalui *Whatsapp Group*, yaitu dengan menginfokan kepada peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran harian, penugasan, penilaian, dan lain-lain. Pengawas juga memerhatikan terlaksananya perumusan standar pembelajaran daring agar tetap sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD).

Pengawas juga memerhatikan hal-hal yang dapat menjadi pendukung serta penghambat dalam pembelajaran daring. Hal tersebut sering kali berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan saat pembelajaran daring. Untuk mendukung pembelajaran daring, fasilitas yang diberikan berupa pembagian kota data internet untuk guru dan peserta didik, pemberian vitamin dan madu untuk guru setiap bulannya, serta peminjaman HP untuk pembelajaran daring bagi peserta didik yang bermasalah dengan HP atau tidak punya HP. pemanfaatan fasilitas sudah dilakukan semaksimal mungkin. Upaya dalam pemanfaatan pun sudah dilakukan dengan pendataan yang tepat.

Kendala lain yang dihadapi oleh pembelajaran daring masa pandemi COVID 19 adalah peserta didik yang merasa jenuh belajar daring. Sehingga kurangnya motivasi belajar dari peserta didik. Untuk itu guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran, sehingga peserta didik lebih bersemangat saat pembelajaran. Adapun solusi yang dilakukan SMA Negeri 3 Pontianak dalam menghadapi kendala tersebut, di antaranya memanggil peserta didik setiap awal pekan pertama dan pekan ketiga untuk melakukan pembinaan di sekolah, pemberian kota data untuk peserta didik dan guru, memberikan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi Ruang Guru dan *Google Classroom* bagi guru sehingga guru sudah

mulai terbiasa menggunakan aplikasi Ruang Guru, *Google Classroom* dan *Google Form* untuk memudahkan dalam pembelajaran. Di awal-awal penyesuaian pembelajaran daring memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun, sekarang guru dan peserta didik sudah mulai terbiasa dan bisa menyesuaikan dengan situasi tersebut

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan manajemen pembelajaran daring masa pandemi COVID 19 di SMA Negeri 3 Pontianak dengan sumber data dan instrumen yang telah ditentukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pontianak telah berjalan baik. Pengorganisasian pembelajaran daring sudah dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Pembiayaan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Pengalokasian biaya telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran daring dan kebutuhan sekolah dengan tepat. Dimulai dari pengadaan fasilitas pembelajaran, fasilitas protokol kesehatan serta pengadaan sarana dan prasarana lainnya. Sehingga pembiayaan dalam mendukung pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pontianak masa pandemi COVID 19 dapat dikatakan memadai.
3. Pengawasan di SMA Negeri 3 Pontianak pada saat pembelajaran daring dilakukan dengan pembuatan jurnal belajar melalui *google form*, dari jurnal tersebut juga mendata peserta didik yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Pengawasan telah dilakukan dengan tepat sehingga hambatan selama pembelajaran daring dapat diatasi.

Sehingga diharapkan; 1) guru diharapkan tetap membangun kerja sama tim dan melaksanakan tugas mengajar yang mengacu pada kurikulum dan kompetensi yang melekat pada diri guru; 2) guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran. Sehingga peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran yang dilaksanakan; 3) orang tua peserta didik diharapkan lebih kooperatif, komunikatif, dan aktif dalam pendampingan pembelajaran daring di masa pandemic COVID-19 baik dengan pihak sekolah maupun dengan anak sendiri.

5. REFERENSI

- Abidin, A A. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87-99, <http://dx.doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
- Asmuni. 2020. Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Penelitian dan*

- Pengembangan Pendidikan*. Vol. 7 No. 4. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941>.
- Faijin. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di MTS Maslakul Huda Sluke). Tesis. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Tersedia di: <http://repository.iainkudus.ac.id/916/>.
- Firman. 2020. Pembelajaran Onlie di Tengah Pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Education Science (IJES)*, 2(2), 81-89, <https://doi.org/10.31605/ijes.v2i2.659>.
- Gemnafle, M., dan Batlolona, J R. 2021. Manajemen Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Indonesia*, 1(1), 28-42, <https://doi.org/10.30598/jppgivo11issue1page28-42>.
- Guba, E.G & Lincoln Y.S. 1981. *Effektif Evaluation. Improving the Usefulness Of Evaluations Result Through Responsive And Naturalistic Approaches*. Jasey-Bass Inc. Publisher. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.261>.
- Imron, M J. 2016. Manajemen Pembiayaan Sekolah. Al Ibrah *Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 1(1), 69-93, <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/14>.
- Indrawati, B. 2020. Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 39-48
- Iriantara, Y., dan M. Syukri. 2017. *Komunikasi Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jannah, N & Marwiyah, S. 2020. Model Pengembangan Kurikulum Adaptif pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusif. *Jurnal Auladuna*. <http://ejournal.inafas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/300/239>.
- Jariyah, I A., Tyastirin, E. 2020. Proses dan Kendala Pembelajaran Biologi di Masa Pandemi Covid-19: Analisis Respon Mahasiswa. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 183-196, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1767823&val=16101&title=PROSES%20DAN%20KENDALA%20PEMBELAJARAN%20BIOLOGI%20DI%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19%20ANALISIS%20RESPON%20MAHASISWA>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES). 2020. Daring: 4 Maret. Tersedia di: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>.
- Maharani, D. 2018. Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. *eCo-Buss Emerging Industies*, 1(2), 116-123, <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.44>.
- Meriza, I. 2018. Pengawasan (Controlling) dalam Institusi Pendidikan. At-Ta'dib *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37-46. Tersedia di: <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/113>.
- Priyono. 2014. *Pengantar Manajemen*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Rukajat, A. 2018. *Manajemen Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saajidah, L. 2018. Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kurikulum. *Islamic Educational Mangement*, 3(2), 201-108, <https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5012>.
- Saide., and Sheng, M L. 2020. Knowledge Exploration-Exploitation and Information Technology: Crisis Management of Teaching-Learning Scenario in the CPVOD 19 Outbreak. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1-16, <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1854714>.
- Satori, D., dan Komariah, A. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jogjakarta: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, I., dkk. 2019. Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Markaz Bhasa Arab Darul Lughah Waddirasat Islamiyah. An Nabighoh *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab*, 21(1), 43-60, <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v21i01.1376>.
- World Health Organization (WHO). Daring. Tersedia di: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN GURU SD

Oleh :

Enis Sumiati¹⁾, Yayat Ruhiat²⁾, Suherman³⁾

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Jln Pakupatan Blok DD5 No.8

¹enissumiati@gmail.com

²yruhiat@untirta.ac.id,

³suherman@untirta.ac.id

Abstrak

Supervisi Akademi kepala sekolah dan kompetensi profesional merupakan hal penting yang perlu ditingkatkan untuk mutu pembelajaran guru di Gugus 2 Kecamatan Serang.. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang pengaruh Supervisi Akademi Kepala Sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru. Dalam mencapai tujuan penelitian digunakan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan pada guru SD Negeri di gugus 2 Kecamatan Serang dengan sampel 41 guru dari 63 populasi. Selain itu, untuk menganalisis pengaruh antar variabel digunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif regresi linier berganda. Hasil penelitian (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran berdasarkan hasil uji t sebesar $3,247 > 2,023$. (2) Ada pengaruh kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran dari hasil uji t $3,159 > 2,023$. Secara simultan terdapat pengaruh supervisi akademik dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran dengan nilai R Square sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh simultan sebesar 58,3%. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dan kompetensi profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran guru SDN di gugus 2 Kecamatan Serang.

Kata Kunci: *Supervisi akademik kepala sekolah, kompetensi profesional, mutu pembelajaran*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan Proses pembelajaran yang akan direncanakan harus sesuai dengan prosedur yang ada dan mempersiapkan materi apa yang akan diajarkan kepada siswa, dengan harapan dan tujuan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang guru (Rosni 2021). Dengan demikian mutu pembelajaran akan terlihat jelas dengan meningkatnya pencapaian nilai siswa. Mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh guru yang akan membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Mutu pembelajaran guru SDN di Gugus 2 Kecamatan Serang belum terlihat jelas hasilnya dikarenakan kelengkapan instrumen penilaian dan penggunaan media serta model pembelajaran yang kurang variatif sehingga kegiatan pembelajaran berjalan tanpa semangat dan mempengaruhi tujuan yang diharapkan. Mutu pembelajaran diartikan sebagai mutu kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dan mutu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini guru dan lingkungan berperan penting dalam proses pembelajaran (Dewi 2018).

Oleh karena itu, Mutu pembelajaran guru tidak terbatas pada aspek formal yang berkaitan langsung dengan pembelajaran, tetapi juga mencakup beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Dalam hal ini untuk meningkatkan mutu dipengaruhi oleh proses yang

dilakukan di dalamnya. Proses peningkatan mutu dimulai dari ruang kelas kemudian guru dan tenaga kependidikan yang harus memiliki kualifikasi akademik profesional minimal sarjana (S1) di bidang pendidikan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dalam pedoman kompetensi profesional telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada (Undang-Undang Republik Indonesia 2005). Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru. Rendahnya mutu pembelajaran dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi guru dalam mencintai profesinya, kurangnya bimbingan dan pelatihan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan guru.

Kompetensi profesional mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan belajar siswa (Hatta 2018). Kompetensi profesional dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, sikap dan keterampilan guru untuk memahami bagaimana siswa belajar dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya dalam belajar. Kompetensi profesional merupakan komponen pertama yang memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap pencapaian hasil belajar siswa (Jannah 2021). Kompetensi profesional guru akan berkembang jika kepala sekolah mampu membangun akademik yang

baik. Salah satu pihak yang berperan penting dalam pengembangan akademik adalah kepala sekolah. Ada hubungan yang erat antara kualitas kepala sekolah dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti disiplin sekolah.

Pengertian kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara lebih luas dan mendalam. Termasuk penguasaan materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, serta penguasaan struktur dan metodologi keilmuan (Mardalena, Arafat, and Fitria 2020). Setiap guru yang berkompeten secara profesional akan disupervisi oleh kepala sekolah. Melalui kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu *super* dan *vision*. *Super* berarti di atas dan *vision* berarti melihat, melihat dan mengamati. masih berkaitan dengan pemeriksaan, dan pengawasan, dalam arti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang-orang yang kedudukannya di atas, dalam hal di bawahnya.

Jadi supervisi berarti melihat, mengamati dan mengawasi. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan, tetapi lebih bersifat manusiawi. Kegiatan monitoring tidak mencari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, sehingga kondisi pekerjaan yang diawasi (bukan hanya kesalahan) dapat diketahui sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang perlu perbaikan (Shulhan 2013). Jadi supervisi akademik kepala sekolah adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme guru agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Berdasarkan pengalaman penulis, saat melakukan pembimbingan, segala sesuatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pengolahan hingga penilaian/evaluasi, serta sarana pembelajaran dirancang semenarik mungkin. Namun, keadaannya sangat berbeda jika pembelajaran berlangsung tanpa adanya kegiatan supervisi. Oleh karena itu, kegiatan supervisi harus rutin dilakukan oleh kepala sekolah sebagai salah satu tugas pengawasannya. Jika supervisi kunjungan kelas dilakukan secara berkesinambungan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru binaan, maka supervisi kunjungan kelas dapat meningkatkan kinerja guru. Dalam konteks yang sama, bahwa peran kepala sekolah dalam kegiatan ini akan mampu meningkatkan perilaku peserta didik, perilaku belajar dan mengajar menuju pengajaran yang lebih bermutu.

Dengan kata lain supervisi akademik kepala sekolah yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran guru. Itulah pentingnya seorang kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap pendidik atau guru (Siti Nurhayati. M.Pd 2019). Supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan pengalaman suatu bagian administrasi atau tenaga pengajar dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas demi tercapainya tujuan di

sekolah yang dilakukan dengan berbagai langkah atau teknik yang dilakukan secara terus menerus agar lebih optimal.

Merujuk pada pasal 15 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah, ditetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepala sekolah sebagai pengawas, dalam hal ini guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. (Kemdikbud 2018). Ada hubungan yang erat antara mutu kepala sekolah dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan Variabel Kompetensi Profesional (X2) dengan variabel mutu pembelajaran (Y)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri kelompok 2 Kecamatan Serang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Pendidikan Dasar Kabupaten Serang (DAPODIK), diketahui bahwa jumlah guru di Kecamatan Serang kelompok 2 adalah 63 guru, kemudian 41 guru akan diambil sampelnya secara acak. Waktu pelaksanaan penelitian antara bulan April 2022 sampai Mei 2022. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis deskriptif regresi linier berganda, pengaruh variabel yang ditunjukkan dengan angka. Jenis ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru SD. Penelitian dilakukan pada guru SD Negeri di gugus 2 Kecamatan Serang. Dengan sampel 41 orang guru dari total populasi (63 orang guru). Variabel judul penelitian ini adalah Supervisi Akademik kepala sekolah (X1), Kompetensi Profesionalisme (X2) Mutu Pembelajaran (Y). Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X₁ dan variabel X₂ dengan variabel Y dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y = Variabel dependen (terikat)

X₁ = Variabel independen (bebas 1)

X₂ = Variabel independen (bebas 2)

a = Nilai konstanta

b₁ = Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif).

b₂ = Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif).

e = tingkat kesalahan (error)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik dan kompetensi profesional kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran guru SDN di gugus 2 Kecamatan Serang. Langkah-langkah yang dilakukan analisis adalah uji-t

Pengujian Dengan Uji t
Tabel 1 hasil uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	6.878	7.872		.874	.388
	X	.507	.156	.431	3.247	.002
	XX	.413	.131	.419	3.159	.003

a. Dependent Variable: Y

Diketahui nilai Signifikan untuk pengaruh X₁ terhadap Y adalah sebesar 0.002 < 0,05 dan nilai t hitung 3,247 > t tabel 2.023 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yang berarti terdapat pengaruh X₁ terhadap Y. Diketahui nilai Signifikan untuk pengaruh X₂ terhadap Y adalah sebesar 0.003 < 0,05 dan nilai t hitung 3,159 > tabel 2.023 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yang berarti terdapat pengaruh X₂ terhadap Y

Perumusan Hipotesis

- H₁ = Terdapat pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X₁) terhadap Mutu Pembelajaran Guru SD (Y).
- H₂ = Terdapat pengaruh Kompetensi Profesional Guru (X₂) terhadap Mutu Pembelajaran (Y)

Pengujian Dengan Uji F
Tabel II Hasil uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	978.632	2	489.316	26.550	.000 ^b
	Residual	700.344	38	18.430		
	Total	1678.976	40			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), XX, X

Berdasarkan Output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X₁ dan X₂ secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0.000 < 0,05 dan nilai F hitung 26,550 > 3,245 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan X₁ dan X₂ secara simultan terhadap Y

Koefisien Determinasi

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,583 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X₁ dan X₂ secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 58,3 %.

Tabel III hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.762 ^a	.583	.561	4.193	.583	26.550	2	38	.000

a. Predictors: (Constant), XX, X

Analisis terhadap hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru sebesar 58,3 %.

Hal ini mengimplikasikan bahwa apabila seorang pemimpin di sekolah mengaktualisasikan keterampilan supervisi dengan jelas dan objektif dalam mengelola aktivitas di sekolah yang dipimpinnya. Akan mendapatkan aktivitas guru berlangsung dengan baik (Erni Agustina Suwartin Pendidikan 2017)..

Supervisi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan guru dalam mengajar. Hal ini dikarenakan supervisi yang proporsional akan meningkatkan mutu guru dalam pendidikan. Melalui supervisi yang efektif diharapkan mutu pembelajaran guru dapat meningkat ke arah yang positif.

Pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru disimpulkan dalam penelitian ini bahwa supervisi akademik kepala sekolah dapat digunakan sebagai peningkatan kompetensi profesional guru di sekolah disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran guru

Hasil analisis data pada penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru SDN di gugus 2 yang terdapat di Kecamatan Serang. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa pelaksanaan supervisi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran guru demikian juga sebaliknya. Dilain pihak kompetensi profesional juga berdampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran guru. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh yang positif satu sama lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran guru sekolah dasar di gugus 2 kecamatan Serang. Artinya semakin baik supervisi akademik kepala sekolah maka semakin baik pula mutu pembelajaran guru; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru SD negeri di gugus 2 Kecamatan Serang. Artinya untuk meningkatkan mutu pembelajaran guru harus dipastikan guru yang berkompeten karena mutu pembelajaran guru sangat dipengaruhi oleh kompetensi profesional; (3) Secara bersamaan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran guru sekolah dasar di gugus 2 Kecamatan Serang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi guru SDN di Kecamatan Serang kelompok 2 untuk melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah atau memaksimalkan pelaksanaan supervisi akademik dan membuat program bagi guru yang berada di lingkungan SDN di gugus 2 Kecamatan Serang, dan dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi guru SDN Gugus 2 Kecamatan Serang.

5. REFERENSI

- Dewi, Philip Fatma. 2018. "Pengaruh Guru Profesional Dan Iklim Sekolah Terhadap Mutu Pembelajaran SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo." *Muslim Heritage* .
- Erni Agustina Suwartin Pendidikan, D A N Mutu. 2017. "Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan* .
- Hadi. Susonno.,Tukiran, Yuwono, Budi. 2009. . "Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Guru Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal." *Jurnal Khazanah Pendidikan* .
- Hatta, Muhammad. 2018. *Empat Komptensi Untuk Membangun Profesionalisme Guru*.
- Jannah, Roudathul. 2021. "Strategi Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Tsaqafatuna* .
- Kemdikbud. 2018. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah." *Kemdikbud*.
- Mardalena, Mardalena, Yasir Arafat, and Happy Fitria. 2020. "Pengaruh Supervisi Akademik Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* .
- Rosni, Rosni. 2021. "Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* .
- Shulhan, Muwahid. 2013. "Supervisi Pendidikan (Teori Dan Praktek Dalam Mengembangkan SDM Guru)." *Acima Publishing* .
- Siti Nurhayati. M.Pd. 2019. *Supervisi Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2005. "Nomor 14 Tahun 2005." *tentang Guru dan Dosen 2005*.

PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN

Oleh:

Jordy Renaldi Budiman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama
jordyrenaldibudiman@gmail.com

Abstrak

UU Rumah Susun tidak secara khusus mengatur tentang peralihan hak milik atas satuan rumah susun. Pada Pasal 43 UU Rumah Susun “memang disebutkan adanya proses jual beli saat sebelum pembangunan rumah susun dibangun, sedangkan pada Pasal 44 UU Rumah Susun mengatur mengenai proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun. Keadaan yang bersifat parsial inilah sesekali dapat menimbulkan sengketa, karena pemegang hak milik atas rumah susun tidak seluruhnya memahami mekanisme peralihan hak atas satuan rumah susun. Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kepemilikan rumah susun dapat diperoleh salah satunya dengan membuat PPJB terlebih dahulu, selanjutnya diikuti AJB apabila pembangunan rumah susun telah rampung/selesai. Prosedur pembelian sarusun melalui PPJB dapat melihat ketentuan Pasal 42 dan 43 UU Rumah Susun. Bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan satuan rumah susun baik karena faktor *force majeure* maupun adanya wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dapat dilakukan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UU Rumah Susun.”

Kata Kunci : Rumah Susun, PPJB, Bentuk Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Kehadiran hukum memberikan peran penting dalam mengintegrasikan segala kepentingan yang bertentangan dimasyarakat. Hukum mempunyai peran sebagai peraturan yang menyangkut tingkah laku setiap orang dalam masyarakat, yaitu peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi secara tegas kepada setiap orang atau masyarakat yang melanggarnya. Tujuan hukum salah satunya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pada tatapergaulan masyarakat terdapat suatu hubungan hukum yang ditimbulkan karena adanya kepentingan masyarakat itu sendiri.”

Sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, oleh R. Subekti (2003), mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan (Subekti, 2003). Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”. “Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang di beri kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia (Subekti, 2003).”

Selanjutnya Purnadi dan Soejono Soekanto, berpendapat tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Demikian pula Van Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari perbuatan pihak lain yang merugikan (Murhaini, 2021).”

Berdasarkan uraian pendapat tentang tujuan hukum yang dipaparkan para ahli tersebut diatas, esensi yang dapat disampaikan ialah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta menciptakan suasana damai di masyarakat, sedangkan esensi keadilan yaitu setiap orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.”

Teori keadilan komutatif ditekankan pada objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang, yaitu berkenaan dengan hubungan antar individu/antar orang sehingga terpenuhinya kontra prestasi yang sama dalam hubungan keperdataan. Pada hubungan kontraktual diantara para pihak didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada perjanjian jual beli Rumah Susun, terdapat hubungan kontraktual antara pengembang dan pembeli secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Selanjutnya disingkat UU Rumah Susun) yang mengatur kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi oleh Pengembang. Pada

tahap ini dikatakan sebagai tahap *pra kontraktual* sebagai tahap awal dari suatu kondisi terjadinya penawaran dan penerimaan. Setelah syarat dalam Pasal 42 UU Rumah Susun terpenuhi maka selanjutnya menuju tahap *kontraktual* yang digunakan untuk menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta yang didalamnya memuat keseluruhan hubungan hukum yang telah disepakati dan pada tahap akhir yaitu *post kontraktual* sebagai tahap pelaksanaan kontrak yang telah disepakati mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum (Murhaini, 2021).”

Pada saat seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya sampai pada pelaksanaan kontrak, maka konsekuensinya para pihak menyerahkan miliknya dan mendapatkan imbalan atas penyerahan tersebut, namun keadaan tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan. Ketika seseorang mengingkari hal yang menjadi kewajibannya dan seseorang lainnya tidak mendapatkan hak-haknya maka mulailah muncul disinkronisasi kepentingan didalamnya yang menimbulkan suatu sengketa.”

Pengikatan jual beli hak milik atas satuan rumah susun bertujuan agar kedua belah pihak antara pihak pengembang selaku kreditur dan pihak pembeli selaku debitur mengikatkan diri untuk dalam perjanjian jual beli tersebut pembayarannya dilakukan bertahap hingga selesainya pembangunan dan pengalihan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sampai dibuatnya perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan Notaris.”

Persoalan dalam hubungan pembelian satuan rumah susun lahir dikarenakan adanya disinkronisasi diantara para pihak khususnya pada sengketa perdata, yaitu telah terjadi wanprestasi pada perjanjian. UU Rumah Susun tidak secara khusus mengatur tentang peralihan hak milik atas satuan rumah susun. Pada Pasal 43 UU Rumah Susun memang disebutkan adanya proses jual beli yang sebelum pembangunan rumah susun dibangun, sedangkan Pasal 44 mengatur mengenai proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun. Keadaan yang bersifat parsial inilah sesekali dapat menimbulkan sengketa, karena pemegang hak milik atas rumah susun tidak seluruhnya memahami mekanisme peralihan hak atas satuan rumah susun.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisis penulisan ini dengan judul “Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Prespektif UU Rumah Susun”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai problematika dan penyelesaian sengketa pemilikan satuan rumah susun ditinjau dari prespektif uu rumah susun. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif

yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2011).”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).”

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, “kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPerdara dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Prespektif Uu Rumah Susun

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa tempat tinggal. Jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan tanah persediaannya semakin terbatas, sehingga mengharuskan pemerintah maupun pengembang membuat terobosan guna tetap dapat memberikan hunian kepada penduduk ataupun masyarakat.”

Bentuk solusi saat ini yang seringkali digunakan yaitu dengan cara optimalisasi penggunaan tanah secara vertikal sampai beberapa tingkat, sebab penggunaan tanah tersebut dianggap lebih efektif daripada optimalisasi tanah secara horizontal (Santoso, 2019). Sebidang tanah dapat digunakan secara optimal untuk menjadi tempat tinggal bertingkat yang dapat menampung sebanyak mungkin orang melalui pembangunan rumah susun. Pembangunan perumahan atau hunian berbentuk rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka lebih lega (Santoso, 2019).”

Definisi rumah susun ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Rumah Susun ialah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”

Kepemilikan rumah susun memiliki sifat khusus dan berbeda dengan kepemilikan rumah atau perumahan pada umumnya. Rumah susun merupakan bagian-bagian yang sifatnya perorangan dan terpisah, dikelola sendiri oleh pemilik satuan Rumah Susun yang bersangkutan, sedangkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dikelola secara bersama oleh Pengembang/Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS).”

Agar mempunyai kepemilikan pada bangunan rumah susun, maka dapat dilakukan transaksi jual beli. Proses jual beli dapat di awal meski bangunan belum rampung. “Pembelian satuan rumah susun dengan cara demikian pada umumnya dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).”

PPJB adalah perjanjian antara calon pembeli dengan calon penjual objek tanah/bangunan yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB), karena ada alasan-alasan tertentu yang tidak dapat langsung dibuat akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)” sebagai salah satu bentuk dari perjanjian tak bernama. Dalam Pasal 1319 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Alinea kedua tidak berlaku berdasarkan S.1938-276”. Meskipun tidak dikenal dalam KUH Perdata akan tetapi harus tunduk pada ketentuannya.

Menurut R.Subekti (1987) dalam bukunya mengatakan “Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian antar unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga”, sedangkan menurut Herlien Budiono, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli ialah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas” (Budiono, 2004)

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan PPJB dalam UU Rumah Susun terdapat dalam Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 UU Rumah Susun menyatakan bahwa :”

1. Pelaku “pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan Rumah Susun dilaksanakan;”
2. Dalam hal pemasaran “dilakukan sebelumnya pembangunan Rumah Susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki :”
 - a. Kepastian peruntukan ruang;
 - b. Kepastian hak atas tanah;

- c. Kepastian status penguasaan Rumah Susun;
 - d. Perizinan pembangunan Rumah Susun;
 - e. Jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari lembaga penjamin.
3. Dalam “hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.”
- Selanjutnya dalam Pasal 43 UU Rumah Susun ditentukan bahwa :
1. Proses “jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat dihadapan Notaris;”
 2. PPJB “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas :”
 - a. Status kepemilikan tanah;
 - b. Kepemilikan IMB;
 - c. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - e. Hal yang diperjanjikan.

Disamping syarat-syarat yang harus terpenuhi juga memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan PPJB, yaitu subjek dalam PPJB meliputi pembeli dan developer, objek PBB berupa Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, sedangkan bentuk PPJB dalam UU Rumah Susun Pasal 43 ayat (1), PPJB dibuat dihadapan Notaris tetapi dalam prakteknya juga dapat dibuat dibawah tangan (dibuat oleh developer atau pengembang) dengan demikian ada dua bentuk PPJB yaitu otentik dan dibawah tangan, tentu saja keduanya memiliki kekuatan hukum yang berbeda.”

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna yaitu pertama , dari sisi pembuktian lahiriah, formal dan materiil, kedua, kebenaran yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dengan bantuan alat bukti lainnya dan dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sedangkan akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya kurang sempurna karena harus dibuktikan dengan pengakuan para pihak bahwa telah terjadi pembuatan akta.”

Peralihan satuan rumah susun melalui jual beli pada mulanya dilakukan dengan perjanjian jual beli yang dikenal dengan PPJB. PPJB ini sebagai perjanjian pendahuluan yang dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu atas sarusun. Perjanjian pengikatan jual beli ini berfungsi sebagai ikatan jual beli dikarenakan bangunan rumah susun yang dijual masih dalam tahap penyelesaian, sehingga nantinya akan dialihkan melalui Akta Jual Beli. Pembayaran atas harga jual beli dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan sampai dinyatakan lunas, baru kemudian dilakukan penyerahan unit sarusun kepada pembelinya jika telah selesai dibangun.”

Jika bangunan Rumah Susun tersebut mengalami kerusakan dan roboh maka akibat hukumnya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan hapus (Murhaini, 2021). Kerusakan dan robohnya bangunan Rumah Susun yang disebabkan *force majeure* membebaskan pihak pengembang untuk bertanggung jawab. Hal ini akan membawa akibat seluruh hak-hak yang melekat atau tertumpang atau menumpang di atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun turut pula berakhir dan hapus.”

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan “prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan tidak terduga tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk (*vide* pasal 1244 KUH Perdata). Jika terjadi hal seperti itu, suatu yang merupakan *force majeure* tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan terlebih dahulu diantara para pihak pada saat pembuatan kontrak.”

Sengketa dalam “hubungan pembelian satuan rumah susun biasanya lahir dikarenakan adanya disinkronisasi diantara para pihak khususnya pada sengketa perdata yaitu telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian. Sengketa perdata merupakan perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berkepentingan didalamnya. Umumnya terjadipelanggaran hak oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain yang dapat diselesaikan dengan cara damai diluar pengadilan dan diselesaikan dipengadilan.”

Ketentuan penyelesaian sengketa dibidang rumah susun telah diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 UU Rumah Susun. Pertama, penyelesaian sengketa dibidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai maka pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkup peradilan umum. Menurut pasal 106 UU Rumah Susun” gugatan di pengadilan dalam penyelesaian rumah susun dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan hukum, masyarakat atau pemerintah/instansi terkait.

Kedua, “penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVIII (Pasal 109-117) UU Rumah Susun.”

4. SIMPULAN

Kepemilikan rumah susun dapat diperoleh salah satunya dengan membuat PPJB terlebih dahulu, selanjutnya diikuti AJB apabila pembangunan rumah susun telah rampung/selesai. Prosedur pembelian sarusun melalui PPJB dapat melihat ketentuan Pasal 42 dan 43 UU Rumah Susun. Dalam proses berlangsungnya PPJB tentu tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan pembeli, terdapat keadaan *force majeure* bahkan adanya wanprestasi dalam perjanjian berkaitan dengan hak dan kewajiban pembeli maupun pengembang. Guna menyelesaikan problematika di atas, UU Rumah Susun telah memberikan Pola Penyelesaian yaitu dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam pasal 105 UU Rumah Susun yaitu jalur nonlitigasi dan pasal 106 UU Rumah Susun yaitu jalur litigasi. Kesemuanya upaya penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan tipe dan karakteristik penyelesaian sengketa tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien. 2004. *Artikel Pengikatan Jual beli Dan Kuasa Mutlak, Majalah Renvoi*, edisi tahun I, No.10
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Murhaini, Suriansyah. 2021. *Hukum Apartemen (Rumah Susun)*. Yogyakarta : Laksbang Justitia
- Santoso, Urip. 2021. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Subekti. 2003. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Bina Cipta Bandung

HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DENGAN TINGKAT KEDISIPLINAN SISWA SLTA DI PURBALINGGA

Oleh:

Rakhma Nugraheni¹⁾, Nanang Martono²⁾, Elis Puspitasari³⁾

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

¹email : rakhma.nugraheni@mhs.unsoed.ac.id

²email : nanang.martono@unsoed.ac.id

³email : elis.puspitasari@unsoed.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan hubungan status sosial ekonomi keluarga dan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga Jawa Tengah. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga. Penelitian ini dilakukan di SMA dan SMK di Purbalingga menggunakan metode survei dengan teknik sampel acak sederhana sejumlah 271 responden. Metode pengolahan data menggunakan uji korelasi tau kendal. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat hubungan negatif status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan dengan nilai korelasi sebesar -0,007 dan nilai signifikansi 0,912. Artinya, tingkat kedisiplinan siswa dari kelas atas cenderung lebih rendah daripada siswa dari kelas bawah. Nilai hubungan antarvariabel yang sangat rendah (0,007) menunjukkan bahwa status sosial ekonomi keluarga tidak menjadi faktor utama penentu kedisiplinan siswa. Ada banyak faktor lain yang menentukan kedisiplinan siswa, seperti: teman sebaya, motivasi diri, dan lingkungan sekolah. Teman sebaya menjadi salah satu agen sosialisasi di luar keluarga yang dapat memengaruhi seseorang untuk bertindak. Selain itu motivasi yang datang dari diri sendiri juga dapat memengaruhi bagaimana kedisiplinan individu tersebut apakah memiliki motivasi diri untuk disiplin atau justru tidak memiliki motivasi dan cenderung malas. Lingkungan sekolah sebagai agen sosialisasi selain keluarga juga turut membentuk kedisiplinan siswa melalui peraturan yang ada.

Kata kunci : kedisiplinan, status sosial, siswa, lingkungan sekolah, keluarga

1. PENDAHULUAN

Kedisiplinan masih menjadi salah satu masalah krusial di Indonesia. Tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia masih cenderung rendah sehingga disiplin pernah menjadi ikon gerakan nasional, yaitu GDN (Gerakan Disiplin Nasional). Secara sederhana, ketidakdisiplinan tersebut dapat terlihat dari kebiasaan masyarakat sehari-hari, misalnya: membuang sampah tidak pada tempatnya dan membiarkan sampah tersebut menggunung (Bara, Lasut, & Goni, 2018); (Helvetia et al., 2018), budaya *ngaret* (tidak disiplin waktu), pelanggaran aturan lalu lintas di banyak tempat, dan lainnya. Oleh karena itu kedisiplinan menjadi hal yang harus diperhatikan dan terus ditingkatkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah, 2020) yang berjudul Hubungan Antara Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kedisiplinan Belajar, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh teman sebaya dengan kedisiplinan belajar. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yang berbeda dengan penelitian ini yaitu teman sebaya, sedangkan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel status sosial ekonomi. Pada penelitian tersebut yang ditekankan adalah kedisiplinan belajar. Selain itu terdapat penelitian lain dari (Indarti, 2018) yang berjudul Hubungan Status Sosial Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar dan Disiplin Belajar Siswa

SMA N 2 Boyolali dengan hasil tidak terdapat hubungan antara variabel status sosial ekonomi dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa SMA N 2 Boyolali. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena pada penelitian tersebut yang ditekankan adalah kedisiplinan belajar, selain itu juga metode analisis data yang digunakan adalah korelasi spearman. Pada penelitian ini, yang ditekankan adalah kedisiplinan secara umum baik itu kedisiplinan belajar, kedisiplinan ketika di sekolah maupun kedisiplinan di rumah sebagai variabel terikat dan status sosial ekonomi orang tua sebagai variabel bebasnya. Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga.

Kedisiplinan sendiri tidak terbentuk secara alami, akan tetapi dapat dibentuk melalui sosialisasi dalam lingkungan sosial (keluarga, sekolah, maupun masyarakat) (Khalida, Hasmunir, & Abdi, 2018). Perilaku disiplin dapat dibentuk dari lingkungan keluarga melalui pendidikan yang dilakukan orang tua.

Salah satu faktor dari luar individu yang dapat memengaruhi kedisiplinan adalah status sosial keluarga. (Astuti, 2016) berpendapat bahwa status sosial keluarga adalah kedudukan keluarga atau orang tua yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan, atau fasilitas serta jenis pekerjaan. Status sosial sering kali

disandingkan dengan status ekonomi. (Suciningrum & Rahayu, 2015) mendefinisikan status ekonomi keluarga adalah posisi keluarga dalam suatu kelompok sosial masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi. Jadi, dapat diartikan bahwa status sosial ekonomi adalah kondisi latar belakang keluarga yang diukur dengan tingkat perekonomiannya. Untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang maka dapat dilihat melalui pendidikan, pekerjaan dan penghasilan seorang individu tersebut.

Menurut (Khadijah, Suarman, & Indrawati, 2015) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan orang tua juga berperan dalam peningkatan prestasi belajar anak. Dengan tingkat pendidikan orang tua yang tinggi, mereka dapat menciptakan sikap disiplin pada anak melalui pendidikan dalam keluarga. Selain menanamkan perilaku disiplin pada anak dan cara belajar yang ditanamkan sejak dini, orang tua juga berperan dalam pemenuhan sarana belajar anaknya (Prasetyo & Susanto, 2015).

Masa pandemi menyebabkan seluruh kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar bagi orang tua dan anak, karena orang tua harus menggantikan peran guru. Siswa juga cenderung mengalami penurunan kedisiplinan. Menurut (Ni'mah & Setyawan, 2021) penurunan kedisiplinan dapat dipengaruhi beberapa hal, yaitu karena penurunan motivasi siswa, ketiadaan gawai sebagai fasilitas belajar, minimnya waktu orang tua dalam mengawasi pembelajaran anak di rumah, dan penggunaan gawai yang berlebihan.

Sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah juga menerapkan pembelajaran daring bagi seluruh derajat pendidikan, mulai dari PAUD (Pendidikan Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Penurunan kedisiplinan juga kemungkinan dapat terjadi pada peserta didik karena pembelajaran daring. Namun selain dampak pandemi covid 19, status sosial orang tua dan jenis kelamin peserta didik juga mungkin dapat berhubungan dengan tingkat kedisiplinan peserta didik. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMAN 2 Purbalingga dan SMKN 1 Purbalingga dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi keluarga, ditemui sebuah kemungkinan keterkaitan atau hubungan perbedaan latar belakang sosial dengan tingkat kedisiplinan siswa ketika belajar di rumah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan di SMA Negeri 2 Purbalingga dan SMK Negeri 1 Purbalingga. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini teknik acak sederhana dengan tingkat kesalahan 10% dan 20%. Jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 271 siswa yang terdiri atas 128 siswa SMA dan 143 siswa SMK. Untuk mendukung data yang diambil melalui kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara dengan 8 responden sebagai sumber data sekunder.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *pearson*. Hasil uji validitas data menunjukkan semua item pertanyaan adalah valid pada taraf signifikansi 0,001.

Hasil uji reliabilitas menggunakan metode alpha cronbach menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0,757 (variabel status sosial) dan 0,683 (variabel tingkat kedisiplinan), yang artinya instrumen adalah reliabel.

Metode analisis data menggunakan korelasi tau kendal, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel berskala ordinal (Martono, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedisiplinan adalah suatu sikap bersedia untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap aturan, norma-norma (norma agama maupun kesusilaan) baik norma itu tertulis ataupun tidak tertulis, serta norma itu didalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat, menjadi acuan untuk melatih serta membentuk individu melakukan hal yang lebih baik lagi (Wirantasa, 2017). Kedisiplinan merupakan hal yang perlu terus dilatih dan ditingkatkan bagi siswa siswi di berbagai jenjang pendidikan. Hal tersebut karena kedisiplinan juga berpengaruh terhadap bagaimana seorang individu mencapai tujuan seperti prestasi di sekolah atau pencapaian karirnya. Kedisiplinan menjadi hal penting agar semua tujuan yang diharapkan dapat terwujud.

Namun tingkat kedisiplinan masing-masing siswa berbeda. Hal tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor yang ada pada masing-masing siswa itu sendiri atau faktor internal dan terdapat faktor dari luar atau faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan tersebut adalah tingkat status sosial ekonomi keluarga. Menurut (Rowi, 2019) dan (Rahayu, 2011) yang dapat memengaruhi kondisi status sosial ekonomi seseorang yaitu pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Dari faktor-faktor tersebut, pendidikan menjadi hal yang dapat menggambarkan tingkat status sosial ekonomi orang tua. Hal tersebut karena tingkat pendidikan orang tua memberikan pengaruh terhadap penanaman pola pikir dan cara mendidik anak. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anak (Alam, 2020), termasuk di dalamnya adalah mendidik anak dalam hal kedisiplinan. Pendidikan dilingkungan keluarga yang dilakukan orang tua kemudian dipertajam kembali pada lingkungan sekolah.

Untuk melihat hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan siswa berikut adalah persentase hubungan status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga.

Untuk mengukur status sosial ekonomi keluarga responden diperlukan beberapa indikator,

salah satunya yaitu pendidikan orang tua. Berikut adalah tabel pendidikan terakhir orang tua responden.

Tabel 1. Pendidikan Ayah Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tidak Sekolah	2	.7
SD	63	23.2
SMP	68	25.1
SMA	109	40.2
Diploma	7	2.6
S1	22	8.1
Jumlah	271	100.0

Tabel 2. Pendidikan Ibu Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tidak Sekolah	2	.7
SD	72	26.6
SMP	79	29.2
SMA	86	31.7
Diploma	12	4.4
S1	19	7.0
S2/S3	1	.4
Jumlah	271	100.0

Tabel 1 dan 2 menampilkan pendidikan terakhir orang tua responden. Pendidikan menjadi salah satu alat ukur status sosial ekonomi pada penelitian ini. Berdasarkan kedua tabel tersebut sebagian besar orang tua responden (ayah dan ibu) berpendidikan SMA. Jumlah orang tua responden yang berpendidikan diploma dan sarjana tidak lebih dari 10%. Dengan demikian, jika dilihat dari data tersebut, sebagian besar responden berasal dari kelas sosial menengah ke bawah.

Selanjutnya terdapat indikator pekerjaan orang tua responden sebagai berikut.

Tabel 3. Pekerjaan Ayah Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
Meninggal dunia	12	4.4
Pengangguran	1	.4
Buruh, petani, sopir	106	39.1
Wiraswasta, penjahit, pedagang	81	29.9
Karyawan swasta, security, perawat, guru swasta	45	16.6
Pensiunan	5	1.8
PNS, TNI, polisi	21	7.7
Jumlah	271	100.0

Tabel 4. Pekerjaan Ibu Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
Meninggal Dunia	10	3.7
Pengangguran, Ibu Rumah Tangga	168	62.0
Buruh, Petani, Asisten Rumah Tangga,	14	5.2
Karyawan Swasta, Perawat swasta, Karyawan BUMD, Guru swasta	25	9.2
Pedagang, wiraswasta	43	15.9
PNS	11	4.1
Jumlah	271	100.0

Tabel 3 dan 4 menyajikan persentase persebaran jenis pekerjaan dari ayah dan ibu responden. Untuk tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian ayah responden bekerja sebagai buruh dan petani dengan persentase 39.1% atau sebanyak 106 orang, sedangkan ibu responden sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja yaitu sebanyak 62% atau 168 orang.

Indikator selanjutnya yaitu penghasilan orang tua, berikut adalah tabel rentang rata-rata penghasilan orang tua selama satu bulan.

Tabel 5. Penghasilan orang tua responden

Jumlah Penghasilan	Jumlah	%
0-<1.000.000	46	17.0
1.000.000-<2.000.000	91	33.6
2.000.000-<3.000.000	67	24.7
3.000.000-<4.000.000	34	12.5
>=4.000.000	33	12.2
Jumlah	271	100.0

Tabel 5 merupakan tabel penghasilan orang tua yaitu gabungan dari penghasilan ayah dan ibu selama 1 bulan. Pada tabel 5 penghasilan orang tua yang paling banyak persebarannya yaitu pada kisaran Rp1.000.000-<Rp2.000.000 yaitu sebanyak 33.6% atau 91 orang, untuk penghasilan orang tua responden >Rp 4.000.000 memiliki persebaran paling sedikit yaitu sebanyak 12.2% atau 33 orang.

Penghasilan juga menjadi indikator status sosial ekonomi, yaitu jumlah pendapatan yang dihasilkan diperoleh kedua orang tua dan dari berbagai sumber yang diuangkan dalam kurun waktu satu bulan.

Indikator selanjutnya adalah harta benda yang dimiliki orang tua responden.

Tabel 6 Harta Benda Yang Dimiliki Orang Tua

Harta Benda Yang dimiliki	Jumlah	%
Motor/rumah kontrakan	16	5.9
Motor dan fasilitas lain (wifi, laptop, rumah, sawah, lainnya)	231	85.2
Mobil dan fasilitas lainnya (motor, wifi, laptop, sawah, rumah, lainnya)	24	8.9
Jumlah	271	100.0

Berdasarkan tabel 6 benda yang dimiliki kelas bawah yaitu berupa motor dan rumah yang sifatnya adalah sewa atau mengontrak dengan jumlah jawaban responden sebanyak 5.9%. Untuk yang memiliki motor dan fasilitas seperti wifi, laptop, rumah, sawah dan lainnya sebanyak 85.2%. Jika dilihat dari harta benda yang dimiliki berdasarkan tabel 6 maka sebagian responden berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah.

Tabel 7 Tingkat status sosial ekonomi orang tua responden

Tingkat Status Sosial Ekonomi	Jumlah	%
Rendah	186	68.6
Tinggi	85	31.4
Jumlah	271	100.0

Tabel 7 mengungkapkan sebagian besar orang tua responden berstatus sosial rendah dengan persentase 68.6% sedangkan orang tua responden yang berstatus sosial rendah sebanyak 31.4%

Selain status sosial ekonomi orang tua responden, selanjutnya terdapat tabel variabel tingkat kedisiplinan siswa yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu disiplin waktu, disiplin terhadap aturan dan disiplin di rumah.

Tabel 8 ketepatan waktu berangkat sekolah responden

Ketepatan waktu berangkat sekolah	Jumlah	%
kadang-kadang	27	10.0
Sering	40	14.8
Selalu	204	75.3
Jumlah	271	100.0

Tabel 9 ketepatan pengumpulan tugas

Ketepatan pengumpulan tugas	Jumlah	%
Kadang-kadang	104	38.4
Sering	75	27.7
Selalu	92	33.9
Jumlah	271	100.0

Berdasarkan tabel 8, sebagian besar responden menjawab selalu tepat waktu ketika berangkat sekolah yaitu sebanyak 75.3%, sedangkan pada tabel 9 yaitu mengenai ketepatan waktu untuk mengumpulkan tugas sebagai responden menjawab kadang-kadang tepat waktu ketika mengumpulkan tugas yaitu sebanyak 38.4%.

Tabel 10 penggunaan atribut sekolah sesuai aturan sekolah

Penggunaan atribut sekolah sesuai aturan	Jumlah	%
Sering	177	65.3
Kadang-kadang	93	34.3
Tidak Pernah	1	.4
Jumlah	271	100.0

Penggunaan atribut sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah responden yang seharusnya menggunakan dasi, kaos kaki, topi, sabuk, dan atribut lain yang tertulis dalam peraturan dan wajib ditaati. Berdasarkan tabel 10 sebanyak 65.3% responden menjawab sering menggunakan atribut yang sesuai dengan aturan sekolah dan hanya terdapat 0.4% responden yang menjawab tidak pernah menggunakan atribut yang sesuai dengan aturan.

Tabel 11 Memotong rambut/menggunakan riasan sesuai aturan

Memotong rambut/menggunakan riasan sesuai aturan	Jumlah	%
Sering	183	67.5
Kadang-kadang	83	30.6
Tidak pernah	5	1.8
Jumlah	271	100.0

Tabel 11 menjelaskan bahwa terdapat 67.5% responden yang menjawab sering memotong rambut dan menggunakan riasan sesuai dengan aturan, sedangkan terdapat 1.8% responden yang menjawab tidak pernah menaati peraturan tersebut.

Tabel 12 menyontek ketika ulangan

Menyontek ketika ulangan	Jumlah	%
Selalu	11	4.1
Kadang-kadang	187	69.0
Tidak pernah	73	26.9
Jumlah	271	100.0

Berdasarkan tabel 12 mayoritas responden menjawab kadang-kadang menyontek dengan jawaban sebanyak 69% responden, sedangkan responden yang menjawab selalu menyontek sebanyak 4.1% responden.

Kedisiplinan di rumah

Tabel 13 bangun tidur tepat waktu

Bangun tidur tepat waktu	Jumlah	%
Tidak pernah	3	1.1
Kadang-kadang	83	30.6
Sering	185	68.3
Jumlah	271	100.0

Tabel 13 menampilkan bahwa sebanyak responden yang menyatakan "sering" bangun tidur tepat waktu yaitu sebanyak 68.3% responden, sedangkan yang tidak pernah bangun tepat waktu

yaitu sebanyak 1.1% responden. Berdasarkan tabel 13 tersebut responden memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi karena sebagian besar responden bangun tepat waktu.

Tabel 14 mengerjakan PR

Mengerjakan PR	Jumlah	%
tidak pernah	2	.7
Kadang-kadang	88	32.5
Sering	105	38.7
Selalu	76	28.0
Jumlah	271	100.0

Berdasarkan tabel 14 responden yang sering mengerjakan PR di rumah sebelum dikumpulkan sebanyak 38.7% responden, sedangkan yang tidak pernah mengerjakan PR di rumah sebelum dikumpulkan sebanyak 0.7% responden.

Tabel 15 belajar di rumah

Belajar di rumah	Jumlah	%
Tidak pernah	11	4.1
Kadang-kadang	194	71.6
Sering	45	16.6
Selalu	21	7.7
Total	271	100.0

Dari tabel 15 responden yang menjawab terkadang belajar di rumah yaitu sebanyak 71.6% responden, sedangkan untuk yang tidak pernah belajar di rumah sebanyak 4.1% responden.

Tabel 16 pembagian kerja di rumah

Pembagian kerja di rumah	Jumlah	%
Tidak pernah	5	1.8
Kadang-kadang	94	34.7
Sering	163	60.1
Selalu	9	3.3
Jumlah	271	100.0

Pembagian kerja di rumah yang dimaksud tabel 16 yaitu pekerjaan yang diberikan sesuai kesepakatan dengan anggota keluarga dengan pelaksanaan yang telah dijadwalkan seperti menyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju, mengepel dan pekerjaan lainnya. Berdasarkan tabel 16 responden yang menjawab tidak pernah melakukan pekerjaan rumah sebanyak 1.8% sedangkan yang menjawab sering melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan aturan rumah sebanyak 60.1% responden.

Tingkat Kedisiplinan

Tabel 17. tingkat kedisiplinan responden

Tingkat Kedisiplinan	Jumlah	%
rendah	123	45.4
tinggi	148	54.6
Jumlah	271	100.0

Tabel 17 menunjukkan tingkat kedisiplinan responden yang diukur melalui beberapa indikator seperti kedisiplinan waktu yang terdiri dari ketepatan waktu berangkat sekolah, ketepatan waktu ketika mengumpulkan tugas, dan bangun tidur. Selain itu juga terdapat indikator kedisiplinan menggunakan seragam dan mematuhi aturan baik di sekolah mau pun di rumah yang terdiri dari aturan dilarang berkelahi di lingkungan sekolah, dilarang menyontek ketika mengerjakan ujian, ulangan, atau tugas, sedangkan untuk peraturan di rumah seperti terdapat aturan jam malam, pembagian tugas seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lainnya.

Tabel 17 tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki kedisiplinan rendah berjumlah 45.4% atau sebanyak 123 orang sedangkan yang memiliki kedisiplinan tinggi berjumlah 54.6% atau sebanyak 148 orang.

Kedisiplinan memang harus diawali dengan motivasi yang datang dari diri sendiri, namun selain itu juga dapat dipengaruhi faktor dari luar seperti dari lingkungan keluarga atau pun dari lingkungan sekolah. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa responden menjelaskan bahwa ketika dirinya telat masuk sekolah, mereka hanya dikenakan hukuman berupa poin. Selain itu salah satu responden juga mengungkapkan ketika dirinya melanggar peraturan yaitu tidak memotong rambut sesuai aturan dan hal tersebut diketahui oleh pihak BK (Bimbingan Konseling) dan STP2K (Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan) hanya sekedar ditegur tanpa adanya hukuman.

Responden lainnya mengungkapkan bahwa siswa harus masuk kelas sebelum pukul 06.45 WIB untuk mengikuti literasi pagi. Apabila hal tersebut dilanggar maka siswa tersebut dikenakan poin hukuman sebesar 5 poin (apabila poin hukuman tersebut sudah mencapai 100 poin maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa yang bersangkutan), diharuskan melaksanakan upacara bendera secara singkat di halaman sekolah, membersihkan lobi, atau mencabut rumput di halaman sekolah, lalu melaksanakan bimbingan konseling tanpa diperbolehkan memasuki kelas selama 1 jam pertama pelajaran. Selain itu, siswa yang telat tersebut juga diharuskan meminta surat persetujuan guru piket untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Responden lainnya juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah melanggar peraturan berupa tidak memotong rambut sesuai aturan, kemudian dari pihak STP2K (Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan) langsung memotong rambut anak tersebut di depan kelas.

Hukuman tersebut menyebabkan responden yang telah melanggar aturan menjadi jera dan berusaha untuk tetap melaksanakan peraturan yang diterapkan di sekolah. Namun berbeda dengan kondisi kedisiplinan siswa ketika pandemi. Dari 8 responden yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka merasakan kedisiplinannya berkurang. Penurunan kedisiplinan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tugas-tugas kelompok yang tidak dikumpulkan tepat waktu karena terdapat anggota kelompok yang sulit untuk dihubungi, siswa yang merasa kesulitan menerima materi melalui daring, guru yang tidak melaksanakan pembelajaran daring melalui *google meet* atau sejenisnya, hanya membagikan tugas dan ringkasan materi melalui *power point* menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami secara mendalam sehingga tugas yang diberikan tidak terselesaikan dengan baik bahkan pengumpulannya seringkali melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Namun hal tersebut juga kurang

menjadi perhatian guru, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa responden menyatakan bahwa ketika mereka mengumpulkan tugas tidak tepat waktu ada guru yang tidak memberikan hukuman, bahkan terdapat guru yang tidak memberikan tenggat waktu hingga responden juga tidak mengumpulkan tugas tersebut.

Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Kedisiplinan Siswa

Status sosial ekonomi adalah suatu kondisi masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Status sosial ekonomi setiap orang berbeda-beda, namun status sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Status sosial ekonomi tersebut dapat berhubungan terhadap tingkat kedisiplinan seseorang. Untuk melihat hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan siswa berikut adalah tabel hubungan status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga.

Tabel 18 Tabel Korelasi Status Sosial Ekonomi Keluarga dengan Tingkat Kedisiplinan Responden

Correlations				
			kode skor kedisiplinan	kode skor sse
kendall's tau_b	kode skor kedisiplinan	Correlation Coefficient	1.000	-.007
		Sig. (2-tailed)	.	.912
		N	271	271
kode skor sse		Correlation Coefficient	-.007	1.000
		Sig. (2-tailed)	.912	.
		N	271	271

Tabel 18 menunjukkan nilai atau besarnya hubungan antara variabel status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat kedisiplinan responden. Dari tabel tersebut diketahui nilai Sig (2-tailed) antara variabel status sosial ekonomi dengan tingkat kedisiplinan responden adalah sebesar 0.912 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara variabel status sosial ekonomi dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga karena nilai Sig (2-tailed) > dari 0.05.

Untuk keamatan hubungan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi antara variabel status sosial ekonomi dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga yaitu -0.007 yang berarti keamatan hubungannya sangat lemah. Berdasarkan tabel 18 arah hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat kedisiplinan yaitu dapat terlihat pada angka koefisien korelasi yang hasilnya negatif yaitu sebesar -0.007. Dari nilai tersebut berarti hubungan variabel status sosial ekonomi tidak searah dengan tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga. Semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua tidak diikuti kenaikan tingkat kedisiplinan siswa sehingga arah hubungan kedua variabel tersebut adalah negatif.

Dari tabel 18 tersebut hipotesis dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan tidak terbukti.

Status sosial ekonomi orang tua menjadi salah satu faktor dari luar yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. Namun faktanya pada penelitian yang dilakukan di 2 sekolah di Purbalingga Jateng menunjukkan bahwa responden yang status sosial ekonomi orang tuanya tergolong tinggi memiliki kedisiplinan yang rendah dan sebaliknya, responden yang orang tuanya memiliki status sosial ekonomi rendah tingkat kedisiplinannya tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena responden yang status sosial ekonomi orang tuanya tinggi jauh lebih dimanjakan dengan fasilitas dan teknologi yang sudah ada. Dari fasilitas dan teknologi tersebut responden jadi kurang bekerja keras dan cenderung dimanjakan. Menurut (Margani, Martono, & Puspitasari, 2021) siswa dari keluarga kaya dapat memiliki sifat malas karena semua kebutuhan pendidikannya sudah ada dan disediakan oleh orang tuanya sehingga mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Faktor lain yang menyebabkan terdapat hubungan negative antara variabel status sosial ekonomi orang tua dan kedisiplinan adalah motivasi diri. Responden dengan status sosial ekonomi rendah memiliki motivasi diri yang lebih tinggi daripada responden yang berada pada status sosial ekonomi tinggi karena responden dari kelas bawah memiliki keinginan untuk merubah kondisi keluarganya dan mencapai cita-citanya. Menurut (Harianti & Amin, 2016) Individu yang mempunyai motivasi tinggi, akan memiliki daya juang yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita dan tidak mudah putus asa ketika menyelesaikan masalah. Motivasi tersebut juga datang dari orang tua kelas sosial ekonomi rendah yang memiliki keinginan atau itikad untuk mendidik dan mengajarkan anaknya bekerja keras dalam mencapai sesuatu termasuk dalam hal pendidikan. Orang tua kelas sosial rendah berkeinginan agar anaknya dapat mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik, dengan keterbatasan ekonomi maka anaknya harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas pendidikan seperti untuk mendapatkan bantuan pendidikan atau beasiswa.

Dengan adanya motivasi diri yang kuat maka akan tercipta pula kedisiplinan yang kuat dari dalam diri responden. Menurut (Yanti & Marimin, 2017) motivasi disiplin yang datangnya dari diri sendiri maka akan jauh bertahan lama. Hal tersebut juga diungkapkan oleh responden yang melakukan wawancara dengan peneliti, salah satu responden mengatakan bahwa untuk melaksanakan pembagian tugas rumah ia tidak perlu diperintah dan diberikan jadwal, tetapi ia memiliki kesadaran diri untuk melakukan pekerjaan dan tugas tersebut. Selain itu responden lain juga mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa untuk bertindak disiplin terutama dalam hal pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu, mengepel dan pekerjaan lain tanpa harus diperintah. Apabila ia tidak melakukan hal tersebut ketika masih duduk di bangku SMP ia akan diberi teguran oleh orang tuanya, sehingga sampai saat SMA ia sudah

terbiasa melakukan pekerjaan rumah tersebut. Selain motivasi diri yang dibentuk melalui lingkungan keluarga, terdapat faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa SLTA di Purbalingga, yaitu faktor lingkungan sekolah.

Menurut Muhibbin dalam (Sulfemi, 2018) dan (Ardiyansyah, Prima, Hermuttaqien, & Bomans Wadu, 2019) lingkungan sekolah yaitu keadaan sekolah tempat belajar yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar dan terkait dengan metode yang digunakan guru dalam mengajar, kurikulum, relasi warga sekolah, dan disiplin sekolah. masing-masing lingkungan sekolah memiliki cara tersendiri untuk menegakkan kedisiplinan siswanya. Pada penelitian ini kedua sekolah juga memiliki cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya. Contohnya adalah adanya hukuman poin. Namun hukuman poin tersebut tidak cukup memberi efek jera pada siswa yang melanggar peraturan karena poin hanya hukuman tertulis saja sehingga oleh siswa tidak terasa efeknya. Selain itu, berdasarkan penelitian ini masih terdapat banyak responden yang menyontek baik ketika ulangan maupun ujian. Hal tersebut juga memperlihatkan masih lemahnya penerapan peraturan sekolah. Pihak sekolah seharusnya dapat memberikan peringatan yang jauh lebih memberikan efek jera seperti dengan siswa yang melanggar peraturan sekolah dapat langsung berkonsultasi dengan bimbingan konseling mengungkapkan alasan mengapa dirinya melanggar peraturan sekolah. Selain itu dapat dilakukan juga dengan membersihkan lingkungan sekitar sekolah atau jika pelanggaran tersebut berlangsung secara berkelanjutan dapat bimbingan konseling dapat bekerjasama dengan STP2K menindak dengan tegas seperti siswa yang melanggar aturan potong rambut dapat langsung dipotong rambut ditempat ketika razia ketertiban dilaksanakan, siswa yang menggunakan make up berlebihan dapat diberikan peringatan untuk menghapus make up tersebut. Dengan adanya hukuman yang tegas maka dapat menjadi pengingat siswa untuk terus memiliki kedisiplinan.

Hal tersebut juga sejalan dengan teori dari Homans yaitu teori proposisi nilai yang menjelaskan bahwa terdapat dua konsep yaitu hadiah dan hukuman. Untuk konsep hadiah, semakin tinggi nilai hadiah maka semakin tinggi pula orang tersebut melakukan hal yang diinginkan, dan konsep hukuman berarti semakin tinggi nilai hukuman maka semakin rendah kemungkinan seseorang bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari teori tersebut dapat berkaitan antara hukuman yang diberi oleh pihak sekolah pada siswa dapat menimbulkan efek jera. Meskipun hal tersebut juga bukanlah solusi yang terbaik untuk menerapkan kedisiplinan karena tidak semua siswa dapat menerima hukuman yang diterapkan oleh sekolah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa yaitu teman sebaya. Teman sebaya

yang dimaksud adalah teman satu lingkungan sekolah. hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden yang menyebutkan bahwa dirinya pernah telat mengumpulkan tugas karena teman-teman satu kelasnya juga telat mengumpulkan tugas, ketika dirinya mengumpulkan tugas tersebut ternyata dialah siswa pertama yang mengumpulkan. Teman sebaya menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kedisiplinan karena mereka memiliki kesamaan umur, situasi, keakraban, dan ukuran kelompok (Fitriani & Karim, 2017). Seperti pada pertanyaan kuesioner yang harus diisi oleh responden mengungkapkan bahwa terdapat 4 responden yang mengungkapkan alasan membolos sekolah karena ajakan temannya.

Selain itu faktor lain yang memengaruhi tingkat kedisiplinan siswa adalah faktor situasi pandemi. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 12 yang berarti ia sudah pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran luring selama satu tahun dan selebihnya secara daring. Dari pengalaman tersebut dapat dibedakan tingkat kedisiplinannya dari sebelum adanya pandemi dan setelah terjadi pandemi. Pada saat sebelum pandemi, kedua sekolah yang menjadi sasaran penelitian ini menerapkan kegiatan literasi pagi selama 15 menit yang diisi dengan pembacaan Al-Qur'an bersama atau kegiatan membaca buku lalu menceritakan isi buku tersebut pada teman sekelas, selain itu terdapat kegiatan jumat sehat dan jumat bersih. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka baca di Indonesia, selain itu melatih kedisiplinan siswa untuk berangkat sebelum bel masuk berbunyi. Untuk siswa SMA N 2 Purbalingga peraturan jam masuk yaitu sebelum pukul 06.45 WIB, sedangkan di SMK N 1 Purbalingga yaitu sebelum pukul 07.00 WIB. Namun kondisi tersebut berubah ketika terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pembelajaran semua tingkatan sekolah dilaksanakan secara daring. Dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan berbagai pihak baik guru maupun siswa kurang siap akan pembelajaran daring. Semenjak pembelajaran daring dilaksanakan, terdapat siswa yang kedisiplinannya menurun, seperti tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mengikuti pembelajaran daring, menyontek ketika ujian dan lainnya.

Jadi hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa di SMA sifatnya negatif karena muncul faktor lain yang mungkin jauh lebih berpengaruh daripada variabel status sosial ekonomi orang tua.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara variabel status sosial ekonomi orang tua dengan tingkat kedisiplinan SLTA di Purbalingga. Hal tersebut karena masih terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan

siswa SLTA di Purbalingga seperti faktor motivasi diri, teman sebaya, lingkungan sekolah dan perubahan situasi seperti pada saat pandemi.

Saran untuk pihak sekolah yaitu sebaiknya peraturan yang telah dibuat dapat ditaati bersama-sama antara siswa dan warga sekolah lainnya. Selain itu untuk siswa yang melanggar peraturan dan masih belum memiliki sikap disiplin tinggi dapat dibimbing melalui konseling BK atau disisipkan pada setiap penyampaian materi pembelajaran. Hukuman memang menjadi salah satu upaya agar siswa lebih taat dan disiplin dengan peraturan sekolah tetapi hal tersebut juga bukan sesuatu hal terbaik untuk menumbuhkan sikap disiplin terhadap siswa.

5. REFERENSI

- Alam, F. A. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Di Smp Negeri 3 Barru. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 1–11. Retrieved from <https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/bkmb/article/view/48>
- Ardiyansyah, H., Prima, B., Hermuttaqien, F., & Bomans Wadu, L. (2019). Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.21067/jmk>
- Astuti, W. Y. (2016). PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA SMK YPKK 3 SLEMAN. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Bara, D., Lasut, J. J., & Goni, S. Y. V. I. (2018). PERAN DISIPLIN MASYARAKAT DALAM MENJAGA BUDAYA HIDUP BERSIH TERHADAP LINGKUNGAN (Suatu Studi di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Talaud). *HOLISTIK*, XI(21).
- Fitriani, & Karim, A. (2017). PENGARUH KELOMPOK TEMAN SEBAYA DAN RELASI SISWA DALAM KELUARGA TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA DI SMPN 4 RUMBIO JAYA. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntans*, 5(1), 96–104.
- Hamzah, F. (2020). *THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INFLUENCE OF PEOPLE ' S PEOPLE ON LEARNING DISCIPLIN*. (1983). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v8i3.109568>
- Harianti, R., & Amin, S. (2016). Pola asuh orang tua dan lingkungan pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. *Curricula*, 1(2), 20–29.
- Helvetia, K., Helvetia, M., Alfikri, N., Hidayat, W., Girsang, V. I., Studi, P., ... Indonesia, M. (2018). MEMBUANG SAMPAH DI

- LINGKUNGAN IV KELURAHAN HELVETIA KECAMATAN MEDAN HELVETIA TAHUN 2017. *Jurnal Riset Hesti Medan*, 3(1), 10–20.
- Indarti, T. (2018). Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar dan Disiplin Belajar Siswa SMA Negeri 2 Boyolali.
- Khadijah, S., Suarman, & Indrawati, H. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 1–12.
- Khalida, C., Hasmunir, & Abdi, A. W. (2018). HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DAN DISIPLIN BELAJAR SISWA DENGAN PRESTASI BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP IT LUQMANUL HAKIM KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah*, 3, 291–298.
- Margani, S., Martono, N., & Puspitasari, E. (2021). POTRET SI FAHMI: SISWA KAYA YANG GAGAL BERPRESTASI FAHMI'S POTRAIT: A RICH STUDENT FAILING HIS SCHOOL Sintia Margani 1 , Nanang Martono 2 , Elis Puspitasari 3. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 17–36.
- Ni'mah, 'Umdatun, & Setyawan, D. A. (2021). ONLINE LEARNING : ANALISIS FAKTOR PENURUNAN DISIPLIN PESERTA DIDIK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 'Umdatun Ni ' mah Institut Agama Islam Negeri Kudus David Ari Setyawan Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 telah menjadi pandemi. *Jurnal Paedagogia*, 10(1), 33–48. Retrieved from <http://jurnalpaedagogia.com/index.php/pdg/article/view/134/65>
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial Terori dan Aplikasi Program SPSS* . Yogyakarta: Gava Media.
- Prasetyo, H., & Susanto, A. (2015). PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PENGAPIAN SISWA KELAS X SMK. *Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo*, 06(01), 89–94.
- Rahayu, W. (2011). Analisis Intensitas Pendidikan oleh Orang Tua dalam Kegiatan Belajar Anak, Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 18(1), 65–71.
- Rowi, M. (2019). Pengaruh status Sosial Ekonomi Keluarga dan Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Ke Tingkat SLTA di MTs se Kecamatan Kwanyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 7(1), 18–25. <https://doi.org/10.26740/jupe.v7n1.p18-25>
- Suciningrum, N. P., & Rahayu, E. S. (2015). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Kelas Xi Di Sma Pusaka 1 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPBE)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21009/jpeb.003.1.1>
- Sulfemi, W. B. (2018). Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, Dan Intelegensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16(2), 166–178. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.474>
- Wirantasa, U. (2017). Pengaruh Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 7(1), 83–95. <https://doi.org/10.30998/formatif.v7i1.1272>
- Yanti, Y., & Marimin. (2017). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Keluarga, Dan Teman Sebaya Terhadap kedisiplinan Siswa. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2), 329–338.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU PARA PENGHADAP

Oleh :

Alvian Dharmawan¹⁾, Dwiky Akbar Nugroho²⁾, Azis Akbar Ramadhan³⁾

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

alviandharmawan37@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Mengingat pentingnya akta notaris dalam hukum pembuktian, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya sengketa atau konflik di kemudian hari berkaitan dengan akta yang notaris buat. Pada kenyataannya tidak semua konflik yang timbul bersumber dari Notaris, melainkan banyak ditemukan pada para pihak karena telah memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kekuatan hukum akta yang di kemudian hari dapat menjadi bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang tanggung jawab notaris terkait akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para penghadap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Keterangan Palsu Para Penghadap

1. PENDAHULUAN

“Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di negara Republik Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Notaris turut berperan dalam menciptakan kepastian hukum keperdataan bagi masyarakat terkait dengan pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Notaris berperan dalam ranah pencegahan (*preventif*) guna meminimalisir adanya permasalahan hukum di kemudian hari dengan adanya akta autentik yang merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa.”

“Keberadaan notaris saat ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa : “Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJN ataupun undang-undang lainnya”, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”

Berdasarkan ketentuan mengenai akta autentik yang ditentukan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa : “Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta Notaris merupakan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, dan juga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, “seperti pada beberapa hubungan bisnis, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik salah satunya diwujudkan dalam bentuk akta notaris. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa” (Lumban Tobing, 1982).

“Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta autentik dibagi menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu akta *relaas* merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan akta *partij* merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*)Notaris (Lumban Tobing, 1982). Akta *relaas* atau Akta Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian tentang semua peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri dan kemudian atas permintaan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Akta *partij* ialah akta yang berisi tentang hal-hal yang dikehendaki para pihak untuk dimuat dalam bentuk perjanjian, dimana para pihak tersebut datang menghadap kepada Notaris” (Mulyoto, 2010). “Berdasarkan kedua bentuk akta di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris membuat akta tidak berdasarkan keinginan diri pribadi, melainkan berdasarkan atas kehendak bebas dari para pihak yang memiliki kepentingan. Notaris ditugaskan untuk mengkonstatir semua keterangan dan pernyataan yang diberikan kepadanya terkait dengan hal dihendaki dan diinginkan para pihak yang bersangkutan. Akta yang dibuat mencakup hal-hal terkait semua perbuatan atau perjanjian yang ditugaskan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

“Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum, sedangkan kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna,” namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.

“Mengingat pentingnya akta notaris dalam hukum pembuktian, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Guna mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi, oleh karena itu dalam praktiknya notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan, prinsip kehati-hatian serta peraturan perundang-undangan. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga dituntut wajib mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tak memandang status sosial atau derajat seseorang

dan memiliki kebebasan karena berdiri sendiri” (*unpartiality and Independency*).

“Pada praktik banyak ditemukan, apabila terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Adjie, 2008). Padahal Notaris sendiri tidak mengetahui bahwa keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh para pihak (penghadap) merupakan keterangan atau pernyataan yang palsu. Notaris hanya bertugas menuangkan keterangan atau pernyataan para penghadap yang kemudia diformulasikan ke dalam bentuk akta notaris. Secara yuridis, Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN,” tugas seorang notaris adalah sebatas menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut mengenai kebenaran data tersebut, “karena Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap).”

“Apabila notaris terbukti melakukan kekeliruan hingga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas jabatan salah satunya turut serta atau mengetahui atas data atau dokumen palsu yang diberikan oleh para penghadap sebagai dasar pembuatan akta notaris, maka tentu saja Notaris dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus mengenai seorang Notaris di Lhoksumawe yang bernama Immran Zubir Daoed, S.H, menuliskan keterangan data palsu pada akta autentik yang dibuatnya. Kasus ini diputus Pengadilan Negeri Lhoksumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, 29 April 2013. Amar putusan PN Lhoksumawe ini menyebutkan Notaris terbukti bersalah secara resmi karena melanggar tindak pidana pemalsuan, selanjutnya PN Lhoksumawe memberikan hukuman pidana penjara 2 bulan. Berdasarkan contoh kasus di atas, hal di atas sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum (Kelsen, 2007), akan tetapi pada kenyataannya tidak semua kasus yang ada dilakukan secara sengaja oleh Notaris, yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan pula adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta (Prananda & Anand, 2018).” Hal tersebut tentu akan berdampak pada akta yang dibuatnya yang di kemudian hari menjadi bermasalah, “sehingga melahirkan persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta autentik yang data dan informasinya

dipalsukan oleh para pihak.” Berdasarkan isu hukum di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai keabsahan dari akta notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para penghadap.

2. METODE PENELITIAN

“Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang kewajibannotarismenjagakerahasianaktadalamketerlibatannyadiperadilan.”

“Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).”

“Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis”bahan hukum menggunakan “metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

“Secara teoritis terdapat 2 istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility* (Khoidin, 2020). Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata (Nisa, 2021).”

“Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (*onderhands acte*), dapat menyebabkan notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut (Anand dan Hernoko, 2016). Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan

tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.”Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak atau penghadap, “maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, “karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta (Nisa, 2021).” Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak (Mamminanga, 2008). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat Notaris fungsinya hanya mencatatkan dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan notaris tersebut (Nisa, 2021).“Apabila dalam pembuatan akta otentik tersebut para pihak menunjukkan dokumen pendukung,maka Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil dokumen dan hal-hal yang dikemukakan para penghadap (Nisa, 2021). Putusan tersebut pada intinya menerangkan bahwa tugas notaris adalah menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut dan notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran” materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya (Nisa, 2021).”

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006, MA juga berpendapat bahwa terdakwa selaku notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati (Nisa, 2021). Kenyataan tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, tanggung pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa (Notaris), sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan terdakwa (notaris) tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan (Nisa, 2021).”

“Andi Hamzah selaku Guru Besar dalam lingkup hukum pidana menjelaskan bahwa notaris tidak dipidana jika membuat akta yang isinya tidak benar yang diajukan oleh para pihak/saksi, karena dia hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak/saksi (Nisa, 2021). Profesi Notaris hanya menuliskan apa yang disepakati atau apa yang menjadi keinginan oleh para pihak secara formil dan tidak masuk pada hal-hal materiil.”“Tanggung Jawab Notaris didasarkan pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa baik Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang

menyimpan Protokol Notaris. Kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membawa akibat hukum lahirnya kewajiban Notaris untuk membayar biaya (*kosten*), rugi (*shaden*), dan bunga (*interessen*) kepada pihak yang dirugikan (Khoidin, 2020). Biaya dan kerugian menunjukkan suatu kerugian yang secara nyata bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winstderiving*) (Prodjodikoro, 2000).”

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak ataupun penegak hukum apabila dokumen-dokumen ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris merupakan keterangan atau dokumen palsu. Akan tetapi, pertanggungjawaban dapat saja dibebankan kepada notaris apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatan terdapat kekeliruan ataupun kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga. Pertanggungjawaban terkait hal di atas, masuk ke dalam ranah perdata, yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. “Hubungan Notaris dan Para Penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan dan akta notaris cacat dalam bentuknya (Adjie, 2021).”

“Selain bentuk pertanggungjawaban dalam hal tanggung gugat sebagaimana dijelaskan di atas, notaris juga dapat dikenai pertanggung jawaban pidana (Nisa, 2021). “Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya” (Nisa, 2021). Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada notaris apabila notaris membantu pihak (-pihak) “mencarikan jalan keluar atau solusi dalam membuat akta-akta yang kelihatannya tidak melanggar, dengan membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Prajitno, 2018). Perilaku seperti ini dapat” disebut sebagai “*Dader intelektual*” atau “*Idea Guide*” (Prajitno, 2018).”

Bagi notaris yang dengan sengaja ikut serta merekayasa terjadinya akta tersebut di atas dapat dituntut ganti rugi (Prajitno, 2018). Apabila Notaris dapat dibuktikan ikut sebagai “*Dader Intelektual*” atau “*Idea Guide*” dapat diancam pidana, Pasal 55 KUH Pidana, sebagai berikut :”

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana :
Ke -1, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
Ke -2, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar

atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

“Apabila notaris dalam memberi saran tetap mematuhi ketentuan undang-undang, maka Notaris tetap berada di luar para pihak, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata (Adjie, 2021).”

“Selain tanggung jawab tersebut di atas, notaris juga mempunyai tanggung jawab secara administratif. Tanggung jawab ini muncul apabila notaris diketahui dan dapat dibuktikan telah melanggar kewajiban dan larangan notaris serta beberapa ketentuan yang diatur di dalam UUJN/UUJNP. UUJNP menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu:”

- a. “Peringatan lisan;”
- b. “Peringatan tertulis;”
- c. “Pemberhentian sementara;”
- d. “Pemberhentian dengan hormat; dan”
- e. “Pemberhentian dengan tidak hormat.””

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas “terhadap anggota (notaris) yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.””

4. KESIMPULAN

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik. Akta notaris dibuat berdasarkan keterangan-keterangan dan atau dokumen-dokumen yang diutarakan serta diserahkan para pihak kepada notaris sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 15 UUJN.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan akta yang ia buat. Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administratif apabila notaris telah melakukan kesalahan atau kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Akan tetapi, notaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab apabila kekeliruan atau kesalahan ada pada para pihak dalam akta seperti halnya memberikan keterangan palsu atau dokumen palsu. Pada hakekatnya tugas notaris hanya sebatas mencatatkan apa saja yang diutarakan para pihak dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengecek kebenaran materiil terkait hal-hal yang disampaikan oleh para pihak dalam akta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama

- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Anand, Ghansham dan Hernoko, Agus Yudha. 2016. "Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis", *XVI Perspektif Hukum*
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Soemardi*. Jakarta : BEE Media Indonesia
- Khoidin, M. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Laksbang Justitia
- Lumban Tobing, G.H.S. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Marzuki, Peter Mahmud. 201. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mulyoto. 2010. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala
- Nisa, Naili Zahrotun. 2021. *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij Acte)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Caetakan ke-5. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Prananda, V.O. & Anand, G. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol.1 No. 2
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju

PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, GAYA KEPEMIMPINAN, STRES KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN

Oleh:

Chairul Anam¹⁾, Arie Pradana²⁾, Mokhammad Wahyudi³⁾

^{1,2,3}STIE Al Anwar Mojokerto

¹Email : ch.anam65@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of locus of control, leadership style, work stress and workload on employee performance. This research was conducted at PT. (HFI) Home Faucets Indonesia in Mojokerto with a sample of 34 production employees. The sampling technique was carried out on the basis of the theory from Arikunto where because the population was below 100 people, the entire population could be used as a research sample. Data were obtained from distributing questionnaires with an assessment based on the linkert scale. This type of research is quantitative using multiple linear regression analysis research methods and performs instrument testing, classical assumption testing and hypothesis testing with the SPSS version 25 application. The results of this study explain that the locus of control, leadership style, and workload variables have a significant positive effect and the work stress variable has a significant negative effect on employee performance because t-count is greater than t-table and the significance value is not greater. from 0.05, with a large t-table is 2.045 and for t-count and the results of the significance of the locus of control variable are 3.346 and 0.002, the leadership style variable is 2.881 and 0.007, the work stress variable is -3.048 and 0.002, the workload variable of 3.099 and 0.004. Based on the results of the F test, it can be concluded that there is a simultaneous influence of locus of control, leadership style, work stress and workload on employee performance with the f-count result greater than f-table ($8.035 > 2.69$) with a significance value of 0.000 and not to exceed 0.005. Then for the most dominant variable in this study is the locus of control.

Keywords: Locus Of Control, Leadership Style, Work Stress, Workload And Employee Performance.

1. PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan berbagai sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara adan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. (Sule, et al. 2018). Dalam menjalankan perusahaan disamping sistem organisasi yang berkualitas dari segi tata kelola perusahaan sampai tanggung jawab sosial perusahaan, selain itu masing-masing individu dari sumber daya manusia perusahaan yang berkompeten juga sangat membantu keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan sistem yang dijalankan. Menurut Priyono (2008 : 4-8) menjelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Priyono menambahkan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia
2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisas
3. Penilaian kinerja
4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja
5. Pencapaian efektifitas hubungan kerja

Menurut Dewi et al. (2019 : 2) bahwa Pengelolaan sumber daya manusia harus memperlakukan karyawan sesuai dengan norma-norma yang berlaku akan memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan yang manusiawi akan memberikan motivasi yang kuat kepada karyawan untuk memajukan perusahaan. Rasa memiliki perusahaan juga meningkat sehingga dengan motivasi yang kuat akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Perlakuan juga diberikan dalam hal kesejahteraan dengan memberikan kompensasi, karier dan lingkungan kerja yang profesional.

Yuniarti et al. (2021 : 1) mengatakan bahwa perusahaan yang berkembang merupakan keinginan setiap individu yang ada dalam perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kinerja karyawan.

Kinerja karyawan adalah prestasi yang dicapai seseorang atau kelompok berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya selaras dengan tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada individu dari setiap perusahaan beberapa diantaranya adalah *locus of control*, gaya kepemimpinan, stres kerja dan beban kerja, dimana antara empat variabel tersebut saling ada keterkaitan antara satu sama lain.

Subroto melaporkan, berdasarkan hasil dari penelitian Sunyoto dan Burhanudin menyatakan bahwa *locus of control* menunjukkan tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku memengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Dan *locus of control* itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu : *locus of control* internal, dimana individu percaya bahwa dirinya mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang memengaruhi kehidupan mereka sedangkan *locus of control* eksternal, dimana individu yang percaya bahwa prestasi mereka merupakan hasil dari keadaan di luar kendali mereka. (Subroto dalam Sunyoto dan Burhanudin, 2015).

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah bagaimana cara seorang pemimpin yang kompeten. Efendi mengatakan berdasarkan penelitian dari Fuchrud bahwa kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, menggunakan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu usaha atau tujuan-tujuan tertentu. (Efendi dalam Fuchrudi, 2004).

Selain dari faktor internal karyawan, pimpinan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada bawahan akan bisa mempengaruhi stres kerja dan beban kerja dari individu karyawan. Menurut Safitri (2020 : 176-177) stres kerja adalah respon individu terhadap pekerjaannya yang tidak mampu dilakukan karyawan sehingga merasa tidak nyaman dan tidak senang dengan pekerjaannya. Sementara itu beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan atau kelompok jabatan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan dilaksanakan dalam kondisi normal. Salah satu faktor stres kerja adalah tuntutan tugas yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa beban kerja kerjanya menjadi lebih banyak. Beban kerja yang terlalu berlebihan dapat membuat seseorang merasa stres menghadapi pekerjaannya yang nantinya akan menimbulkan stres kerja pada karyawan.

PT. HFI (HOME FAUCETS INDONESIA) yang bertempat di Ngoro Industri Persada Blok I/Ib NgoroKec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini telah berusia 25 tahun yang bergerak dibidang produksi kran air dan semacamnya. Motto dari perusahaan PT. Home Faucets Indonesia adalah “*high quality*”, dengan mengutamakan kualitas dari produk baik dari segi visual maupun kegunaan barang tersebut, dari itu perlu sinergitas yang baik antara perusahaan dan karyawan perusahaan untuk

menjamin kualitas produksi barang agar tetap menjadi sejalan dengan motto perusahaan. Kinerja karyawan yang baik akan berdampak positif bagi perusahaan begitu pula sebaliknya kinerja karyawan yang buruk akan berdampak negatif bagi perusahaan, maka dari itu perlu individu yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya, juga memiliki dedikasi kerja yang tinggi dengan ditunjang seorang pimpinan yang bisa memberikan pengaruh baik, motivasi yang baik bagi seluruh karyawan sehingga bisa mengurangi stres kerja dan beban kerja bagi karyawan demi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : “Pengaruh *Locus of Control*, Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data diperoleh dengan mengukur nilai beberapa variabel pada sampel dalam populasi melalui kuisioner , observasi, wawancara sebagai data primer dan jurnal, perpustakaan sebagai data sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. Home Faucets Indonesia di Mojokerto yang berjumlah 34 karyawan. Sampel ditentukan berdasarkan acuan tabel *sampel random* atau sampel acak yang dikembangkan oleh para ahli, menurut Arikunto (2012 : 134) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, maka dari itu dikarenakan jumlah populasi yang ada relatif kecil, maka semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan cara membuat sejumlah pernyataan berdasarkan indikator dari variabel *locus of control*, gaya kepemimpinan, stress kerja dan beban kerja dengan pengukuran menggunakan skala linkert.

Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut : a)kinerja karyawan merupakan sebuah pencapaian yang diperoleh atau didapatkan karyawan dalam suatu perusahaan yang dapat menguntungkan baik untuk perusahaan maupun untuk individu karyawan atas kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki sehingga dapat menyelesaikan perkerjaan sesuai *jobdesk* secara efektif dan efisien, b)*locus of control* merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh individu dalam mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya baik itu dari diri sendiri (*internal locus of control*) maupun dari luar dirinya (*external locus of control*).c)Gaya Kepemimpinan adalah suatu keahlian untuk mengarahkan anggota dalam melakukan berbagai aktifitas, dalam penerapannya dilapangan banyak terdapat macam-macam model kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang

pemimpin, yang dilakukan demi untuk mensejahterakan anggota maupun karyawan sehingga hasil kinerja yang dapatnya bisa maksimal. d)Stres kerja merupakan suatu kondisi yang dialami oleh individu karyawan yang dapat mempengaruhi emosi, pola pikir dan kondisi seseorang sehingga dapat memberikan tekanan dalam menjalankan pekerjaannya. e)Beban kerja merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja dengan berlebihan tanpa mengenali kapasitas dan faktor-faktor pendukung lain dalam menunjang kinerja karyawan.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$ dimana Y = Kinerja Karyawan; X_1 = *locus of control*; X_2 = Gaya Kepemimpinan; X_3 = Stres Kerja; X_4 = Beban Kerja; a = Konstanta; e = Error; b_1 b_2 b_3 b_4 = Koefisien Regresi. Dengan menggunakan serangkaian uji antara lain : a)Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel atau nilai $p < 0,05$. b)Uji reabilitas dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. c)Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. d)Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. e)Menurut Ghozali (2017:47) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. f)Uji t ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2017:23). g)Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017:22). h)Ghozali (2017: 21) koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3. HASIL

PT. Home Faucets Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang beralamat di Ngoro Industri Persada Blok I 1/b NgoroKec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak pada produksi kran air, aksesoris kran, bath up, kitchen sink dll. Dan telah berdiri selama 25 tahun dan sekarang sudah masuk dalam generasi kedua dalam kepemimpinan direktur perusahaan. Didirikan oleh Mr. Lin Ching Kuei pada tahun 1996 dan saat ini diteruskan oleh putra keduanya yaitu Mr. Lin Chi Chun.

PT. Home Faucets Indonesia memberikan merek dagang “Dupon Building” untuk produk mereka yang mana untuk design dan patent produk sudah terdaftar di Indonesia, China, Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Filipinahal tersebut sesuai dengan yang tertera di sebagian besar kemasan produknya. Perusahaan ini memiliki motto “*High Quality*” dimana untuk kualitas setiap produk sangat menjadi perhatian yang utama dalam proses produksi baik dari segi visual maupun segi kegunaan barang. Bahan baku yang diperoleh untuk proses pembuatan produk selain dari Indonesia akan tetapi juga impor dari beberapa negara tetangga antara lain China dan Taiwan.Sedangkan untuk pemasaran produk, perusahaan lebih mengutamakan untuk menjualdidalam negeri daripada ekspor keluar, meskipun pernahpada tahun 2017 produk diekspor ke taiwan akan tetapi untuk saat ini produk lebih diutamakan untuk dipasarkan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Kediri, Malang, Jakarta, Bandung, Semarang dan beberapa kota lainnya.

Hasil pengujian validitas menyatakan bahwa seluruh item pernyataan dari kuesioner valid berdasarkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada pengujian realibilitas didapat hasil nilai alpha masing-masing variabel adalah sebagai berikut : kinerja karyawan (0,925); *locus of control* (0,901); gaya kepemimpinan (0,835); stres kerja (0,878); dan beban kerja (0,855) dengan hasil nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel penelitian lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan variabel penelitian ini dapat diandalkan atau reliabel dengan tingkat reabilitas tinggi. Pada uji normalitas menyatakan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian Berdasarkan uji Analisis Statistik non-parametrik Uji Kolmogrof-Smirnov (KS) dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,098 yang artinya nilai signifikansi menunjukkan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel penelitian iniberdistribusi normal.

Pada uji multikolinieritas dapat dihasilkan bahwa nilai VIF dari variabel *locus of control* adalah 1,130 dengan nilai tolerance 0,885, nilai VIF dari variabel gaya kepemimpinan adalah 1,149 dengan nilai tolerance 0,870, nilai VIF dari variabel stres kerja adalah 1,043 dengan nilai tolerance 0,959, sedangkan nilai VIF dari variabel beban kerja adalah 1,072 dengan nilai tolerance 0,933. Dari masing-masing variabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF adalah di bawah 10 dengan nilai tolerance berada di atas 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniertias antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dinyatakan bahwa tidak

terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan data diatas termasuk data heterogen.

Pada hasil uji t dengan kriteria jika t hitung > t tabel atau $\alpha < 0,05$ maka : H_0 ditolak H_a diterima, masing-masing variabel mempunyai nilai r hitung sebagai berikut : *locus of control* (3,436); gaya kepemimpinan (2,881); stres kerja (-3,048); dan beban kerja (3,099) dengan nilai r tabel diperoleh sebesar 2,045 menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan masing-masing variabel dibawah 0,05 sebagai berikut : *locus of control* (0,002); gaya kepemimpinan (0,007); stres kerja (0,005); dan beban kerja (0,004). Dengan nilai F-tabel sebesar 2,69 dan F-hitung sebesar 8,035 dengan signifikansi 0,000 ($P < 0,05$) maka nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai dari hasil uji F adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $8,035 > 2,69$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,725. Hal ini berarti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 72,5%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat. Variabel *locus of control* merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Home Faucets Indonesia dibandingkan tiga variabel yang lainnya yakni gaya kepemimpinan, stres kerja dan beban kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,467 lebih besar dari variabel lainnya.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh *Locus of Control* pada Kinerja Karyawan

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai t-hitung 3,436 > t-tabel 2,045 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, dengan ini dapat disimpulkan bahwa *locus of control* berpengaruh secara positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Maka hipotesis pertama dapat diterima, hasil ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Wuryaningsih DL dan Rini Kuswati (2013) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. dengan demikian apabila aspek dari variabel ini ditingkatkan maka akan terjadi peningkatan terhadap kinerja karyawan di PT. Home Faucets Indonesia di Mojokerto. Hal ini disebabkan karena indikator dari *locus of control* sangat mempengaruhi kinerja karyawan seperti yang dikemukakan oleh Rotter (dalam Phares, 1992) indikator tersebut adalah kemampuan, minat, usaha, nasib, keberuntungan dan pengaruh orang lain. Menurut penelitian dari Patten bahwa *locus of*

control merupakan pengaruh pengendalian terhadap manusia bukan hanya sekedar proses sederhana namun tergantung pada pengendalian itu sendiri dan pada apakah individu menerima hubungan sebab akibat antara perilaku yang memerlukan pengendalian.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan pada Kinerja Karyawan

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai t-hitung 2,881 > t-tabel 2,045 dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, dengan ini dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Maka hipotesis kedua dapat diterima, hasil ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Riyanto Efendi Vol 1 No (1) (2020) Riyanto Efendi Vol 1 No (1) (2020) tentang pengaruh gaya kepemimpinan pada kinerja karyawan dengan hasil gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena pribadi seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap bawahannya, bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur dan memahami bawahannya dengan sangat baik maka akan sangat berdampak baik untuk peningkatan kinerja karyawan seperti yang dikemukakan oleh Prayitno (2018) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya dimana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk membimbing serta memotivasi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Pengaruh Stres Kerja pada Kinerja Karyawan

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai t-hitung -3,048 > t-tabel 2,045 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, dengan ini dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan pada kinerja karyawan. Maka hipotesis ketiga dapat diterima, hasil ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Setyowati Subroto Vol 18 No (2) (2017) dengan hasil bahwa stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. apabila aspek dari variabel dapat ini ditingkatkan maka akan terjadi penurunan terhadap kinerja karyawan di PT. Home Faucets Indonesia di Mojokerto begitu pula sebaliknya jika stres kerja dapat diturunkan maka akan terjadi peningkatan pada kinerja karyawan, dikarenakan pengendalian stres kerja dengan baik merupakan hal yang sangat penting bagi individu karyawan agar bisa merasa nyaman dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Hariandja bahwa stres kerja adalah situasi ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat berat dan hambatan - hambatan yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres dalam bekerja terjadi karena terdapatnya tumpang tindih atau tidak jelasnya *job*

description, kurangnya komunikasi sampai pada buruknya kondisi kerja.

Pengaruh Beban Kerja pada Kinerja Karyawan

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai t-hitung $-3,099 > t\text{-tabel } 2,045$ dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, dengan ini dapat disimpulkan bahwa beban kerja berpengaruh secara positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Maka hipotesis keempat dapat diterima, hasil ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Nining Ratna Himawati Vol 12 No (1) (2016) dengan hasil bahwa beban kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. apabila aspek dari variabel ini ditingkatkan maka akan terjadi peningkatan terhadap kinerja karyawan di PT. Home Faucets Indonesia di Mojokerto. Beban kerja merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja dengan berlebihan tanpa mengenali kapasitas dan faktor-faktor pendukung lain dalam menunjang kinerja karyawan, beban kerja yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kapasitas individu akan sangat menguntungkan baik bagi karyawan ataupun perusahaan karena kinerja karyawan akan semakin meningkat seiring dengan distabilkannya beban kerja. Meskipun hasil ini tidak sebanding dengan teori tentang beban kerja menurut beberapa ahli bahwa dapat disimpulkan apabila beban kerja yang diterima karyawan terlalu besar maka akan berpengaruh buruk atau kinerja karyawan akan semakin menurun, akan tetapi kejadian yang ditemui dilapangan bahwa karyawan PT. Home Faucets Indonesia selama ini tidak menerima beban kerja yang melebihi batas wajar sehingga masih bisa dikatakan beban kerja masih sebanding dengan apa yang mereka dapatkan membuat teori tersebut tidak terjadi.

Pengaruh secara Simultan Variabel *Locus of Control*, Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja, Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT.HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto.

Secara simultan dapat dilihat dari hasil uji f yang menghasilkan nilai f-hitung 8,035 dan f-tabel 2,69 ($8,035 > 2,69$) dengan nilai signifikansi 0,000 artinya nilai sig ($0,000 < 0,05$), maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa *locus of control*, gaya kepemimpinan, stres kerja, beban kerja terhadap kinerja karyawan PT.HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto. Sehingga pengujian tersebut menghasilkan pernyataan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka hipotesis kelima yang menyatakan variabel *locus of control*, gaya kepemimpinan, stres kerja, beban kerja terhadap kinerja karyawan PT.HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto diterima atau terbukti.

Variabel yang paling dominan antara *Locus of Control*, Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja, Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan.

Berdasarkan hasil dari uji variabel yang paling dominan menjelaskan bahwa variabel yang paling dominan adalah *locus of control* dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,467 yang artinya variabel

locus of control mempunyai pengaruh sebesar 46,7% terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi 0,002. Sehingga pengujian tersebut menghasilkan pernyataan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan terhadap kinerja karyawan PT. Home Faucets Indonesia di Mojokerto di tolak atau tidak terbukti.

5.KESIMPULAN

Pada penelitian ini dengan judul “Pengaruh *locus of control*, gaya kepemimpinan, stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang didapat dari penyebaran kuesioner atau angket yang diisi oleh karyawan PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di beralamat di Ngoro Industri Persada Blok I 1/b NgoroKec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, studi pustaka dari buku-buku literature dan jurnal penelitian sebelumnya. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa variabel *locus of control* (X1), Gaya Kepemimpinan (X2), Stres Kerja (X3) dan Beban Kerja (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) pada karyawan di PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa H_0 dari pengujian tersebut ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis pertama diterima atau terbukti
- 2) Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa variabel *locus of control*, gaya kepemimpinan, stres kerja dan beban kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) pada karyawan di PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto dengan dilihat dari hasil Uji F yang memiliki nilai F-hitung sebesar 33,933 $> 3,94$ dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 dari pengujian tersebut ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis kedua diterima atau terbukti.
- 3) Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa variabel yang paling dominan merupakan variabel *locus of control* dengan dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,332 dengan tingkat signifikansi 0,001 dan nilai parsial sebesar 0,338. Sehingga hipotesis ketiga gaya kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan pada kinerja karyawan pada karyawan di PT. HFI (Home Faucets Indonesia) di Mojokerto ditolak atau tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja karyawan maka secara dominan dipengaruhi oleh variabel *locus of control*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ajabar, tumiwa, abbas dkk.2021. *Reinventing Human Resources Management : Creativity, Innovation and Dynamics*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Diandra Kreatif/Mirra Buana Media
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bryan Johannes Tampi. 2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan ada PT. Bank Negara Indonesia, tbk (regional sales manado)*. Journal Acta Diurna. 3 (04)
- Budihardjo. 2015. *Penilaian Kinerja Karyawan*. Edisi Pertama. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Dewi, Desilia Purnama dan Harjojo. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Tauynggarang Selatan : UNPAM PRESS
- Efendi, Riyanto. 2017. *Analisis Pengaruh Locus of Control pada Kinerja Karyawan*. Jurnal Economic Edu. 1 (1) : 2746-5004
- Gunawan, indra. *Pengaruh komitmen organisasional dan locus of control terhadap kinerja karyawan pada pt. Nikkatsu electric works bandung*. Universitas Komputer Indonesia
- Guterres, Luis Aparicio dan Supartha, Wayan Gede. 2016. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 5 (3) : 429-454
- Hasibuan, SP. Melayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Himawati, Nining Ratna. 2016. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja, Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Universitas Jember*. Jurnal Ekonomi STIE Mandala. 12 (1) : 414-435
- Jamaludin Agus. 2017. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. KAHU INDAH CITRA GARMENT JAKARTA*. Journal of applied Business and Economics. 3 (3) : 161-169
- Nadirsyah dan Intan Maulida Zuhra. 2009. *Locus of Control, Time Budget Pressure dan Penyimpangan Perilaku dalam Audit*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. 2 (2) : 104-116
- Phares, E. J. (1992). *Clinical Psychology, Concept Methods and Profession* (4th ed). California: Books, Publishing Company
- Prayitno, dedi. 2018. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Madubaru Pg Ps Madukismo*. Skripsi thesis, universitas mercu buana yogyakarta. Priyono dan Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Putra, Achmad Syukriansyah. 2012. *Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Marketing dan Kredit PT. WOM Finance Cabang Depok*. Jurnal Studi Manajemen Indonesia Hal 22
- Safitri, Hety Umriyani. 2020. *Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja*. Jurnal Ilmiah Psikologi Universitas Mulawarman Samarinda. Jurnal Psikoborneo. 8 (2) : 174-179
- Solehah, siti dan Sri Langgeng Ratnasari. 2019. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja, Job Insecurity Terhadap Turnover Intention Karyawan PT. Federal Internasional Finance Cab Batam*. Jurnal Dimensi. 8 (2) : 210-239
- Subroto, Setyowati. 2017. *Analisis Pengaruh Locus Of Control Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. 18 (2) : 129-139
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Erni Tisnawati, dan Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Depok : Prenadamedia Group.
- Unadjaran, Dominikus Dolet. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wuryaningsih, D.L, dan Kuswati, Rini. 2013. *Analisis Pengaruh Locus of Control pada Kinerja Karyawan*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta : 276-281
- Yuniarti, Rina dkk. 2021. *Kinerja Karyawan (Tinjauan Teori dan Praktis)*. Edisi Pertama. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE E-BOOKS ON DIGITAL CIRCUITS TO IMPROVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING LITERACY SKILLS FOR ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION STUDENTS

By:

Nurulita Imansari¹⁾, Pramudya Ardi²⁾, Prabakti Endramawan³⁾
^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun
¹email: imansari@unipma.ac.id
²email: pramudyarobotindo@unipma.ac.id
³email: pr4bakti@unipma.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to develop an interactive e-book for digital circuit courses. The development is carried out using 4D which consists of define, design, development and disseminate. To test the validity of the e-book, validation was carried out by media experts and material experts, while the effectiveness test related to technology and engineering literacy skills was carried out using a questionnaire on 20 students. The results of expert validation show that interactive e-books are in the excellent category so that they are feasible to use. The results of the effectiveness test show that interactive e-books are effective for improving technology and engineering literacy for electrical engineering students.

Keywords: development, interactive e-book, technology and engineering literacy

1. INTRODUCTION

Marking as a century of openness or a century of globalization, human life in the 21st century underwent fundamental changes that are different from the previous century (Wijaya, et al, 2016). Guthrie (2010) stated that the atmosphere of life at work, interactions between people at work, interactions between humans and machines at work, interactions of human groups across units/institutions/work organizations, types and characteristics of work develop into increasingly complex conditions, erratics, contradictories, full of differences and changes. This is where universities are challenged to prepare graduates who are ready to face all challenges, issues, and problems that exist in the working world as a result of global change.

The demands of life needs in the global era are increasingly evolving and complex and follow the dialectics of technological civilization. As an impact on life, one must master knowledge and technology to compete with others (Mukhadis, 2013). To deal with these challenges, one of the skills that students must possess is literacy skills. In the 21st-century, literacy is not only limited to the ability to read, hear, write and speak verbally but more than that, literacy is emphasized on literacy skills that are connected in the digital era as it is today. As claimed by NCREL & Metiri Group, (2003) in enGauge 21st-Century Skills, literacy in the digital era includes several components, including (1) Basic Literacy, (2) Science literacy, (3) Technological literacy, (4) Economic literacy, (5) Visual literacy, (6) Information literacy, (7) Multicultural Literacy, and (8) Global awareness. Specifically in Engineering Education, there is a need for technology and

engineering literacy skills to face the challenges of the 21st-century. Technology and engineering literacy skills are important skills for an engineer because the engineer is an agent of technology design who can change the world (NAEP, 2018).

Efforts to improve technology and engineering literacy skills are carried out through the development of learning resources that meet the needs of the 21st-century. The challenge of the world of Education in the 21st-century is to encourage students to master 21st-century skills that are important and useful to them to be more responsive to change and develop Junanto & Afriani (2016). The 21st-century technological advances have had an extraordinary impact on the world of Education (Dafrizal, 2017). According to Ansari (2013), students throughout the world today cannot be separated from information technology. One form of technology implementation in Education is an interactive e-book. The interactive e-book is suitable as a learning resource in the 21st-century because the interactive e-book is a flexible digital learning resource to facilitate student learning activities that can be accessed classically or independently. The characteristics of an interactive e-book are expected to be more involved (engaging), inspiring (inspire), interesting (excite), and interactive (interactive) for use in lectures. The use of digital technology is believed to increase the retention and persistence of students in learning and can also provide rich content and more suitable for application in 21st-century learning (Mawarni & Muhtadi, 2017).

One of the compulsory subjects that must be taken in the Electrical Engineering study program is the digital circuit. This subject is one of the important

subjects that students must master to design technology. Considering the importance of this course, the existence of appropriate learning resources is needed so that students can compete and face the challenges of the 21st-century. Based on the explanation above, the authors intended to 1) develop interactive e-book as a source of learning in the 21st-century, 2) do validity testing of interactive e-book products developed, and 3) test the effectiveness of interactive e-book to improve technology and engineering literacy skills.

2. METHOD

The development method used in this study was 4D which consisted of 4 stages, namely define, design, develop, and disseminate (Thiagarajan, et al., 1974). The software used in the development of this interactive e-book was Kvisoft Flipbook MakerPro. Following is the flow of interactive e-book development in the digital subjects circuit.

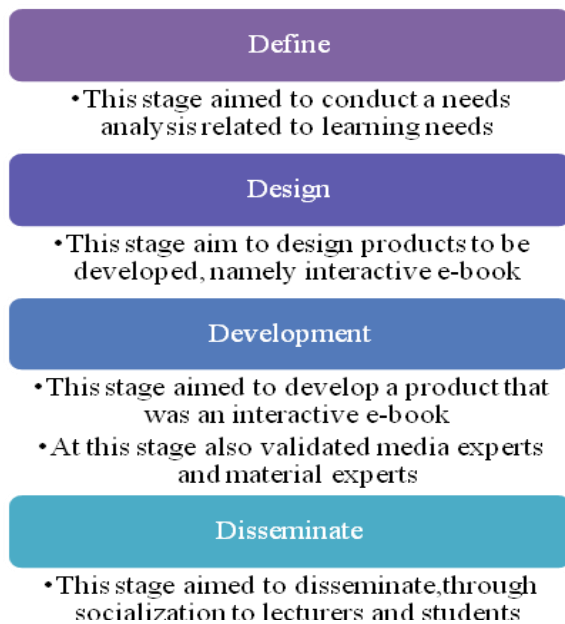


Figure 1. Development Stage with 4D Model

In this study, data collection was carried out using a questionnaire to measure technology and engineering literacy skills. Adapted from NAEP (2018) there are three aspects to assess technology and engineering literacy skills, namely 1) Understanding Technological Principles, 2) Developing Solutions and Achieving Goals and 3) Communicating and Collaborating. The questionnaire used used a Likert scale with a value of 1-5. The interpretation of the assessment is very good, good, moderate, bad and very bad. (Riduwan and Sunarto, 2015). The research was conducted by involving 20 students of Electrical Engineering Education who took Digital Electronics courses. The data analysis used to analyze the validation results is descriptive analysis, while the data analysis used to analyze the improvement technology and engineering

literacy skills is the Gain technique with an experimental design of one group pretest posttest design.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

a. Define stage

The define stage is the stage of establishing and defining what is needed to develop learning media that will be used in the Digital Circuits course. This define stage includes five main steps, namely front end analysis, student analysis, task analysis, concept analysis and formulation of learning objectives. (Thiagarajan, et al., 1974).

b. Design Stage

The design stage aims to design interactive e-book learning media for flip-flop, register and counter material. The steps taken at this stage are as follows:

1) Media selection(media selection)

Media selection is the selection of learning media that is relevant to the material. The media was selected to suit the analysis of the concept, characteristics of the target user and source of creation (Thiagarajan et al., 1974). The selection of media is done to optimize the use of teaching materials in the process of developing teaching materials in classroom learning. The selection of the media used is in the form of interactive e-book learning media where the e-book media does not only contain writing and pictures, but there are evaluation questions that the student data is working on and the scores will immediately appear from the results of working on the questions.

2) Selection format(format selection)

The format chosen is the one that meets the criteria of being attractive, easy and helpful in learning and in this research, the format chosen is the .exe format.

3) Initial design(initial draft)

At this stage, the interactive e-book media will be made. The product that will be produced later is an interactive e-book that is run on a computer using a flash player. In designing an interactive e-book media before the media is used, the steps that need to be taken are as follows:

a) Preparing writing material, the writing material in this study is teaching material about flip-flops, registers and counters. Below is a view of the material in the e-book:

b) Production, in this stage the main activity carried out is designing the cover and layout of the interactive e-book which requires certain software in the process.

The following is a design for the use of interactive e-books in the subject of microprocessor engineering.

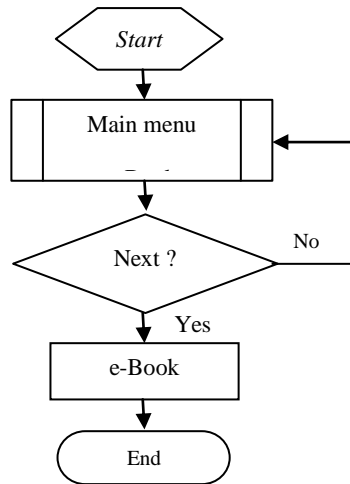


Figure 2. Flowchart of e-Book

c) Development Stage

To get a suitable interactive e-book, after the interactive e-book is completed in the define and design stage, the next stage is the development stage. This development stage aims to produce an interactive e-book that has been validated by media experts and material experts so that it is suitable for use. The following are the results of expert and material expert validation:

Table 1. Validation Results

Aspect	Indicator	Criteria
Theory	a. The suitability of the material with the learning objectives	excellent
	b. Conformity to the needs of the task	excellent
	c. Conformity with students' thinking level	good
Interactive eBook format	a. Systematize presentation	Excellent
	b. Table of contents structure	good
	c. The font used	good
	d. Font size used	good
	e. paragraph order	good
	f. Image display	excellent
	g. Image size compatibility with media	Excellent
	h. The suitability of the background with the material	Excellent
	i. Margin suitability on the material	Excellent
	j. Layout design and colors presented	Excellent
Language	a. Easy to understand language	Excellent
	b. The language used can explain the material presented	Excellent
	c. Language according to the intellectual development of students	good
	d. Language coherence or regularity between chapters, sub-chapters and paragraphs	good
	e. Effective use of subtitles	Excellent
	f. The number of illustrations used is appropriate	Excellent

Based on the validation results above, it can be concluded that the interactive e-book for Digital Circuit courses is very good and feasible to use. The validator also provides the following input:

Table 2. Input Validator

No	Suggestion	Information
1	E-book display should not be made its own way (automatically)	Already repaired
2	Need to add a more detailed table of contents	Already repaired
3	Fontsin the preface is equated with the content font	Already repaired
4	Some spelling (typo) fixed again	Already repaired
5	Fix unclear image quality	Already repaired

The results of developing interactive e-books are as follows:

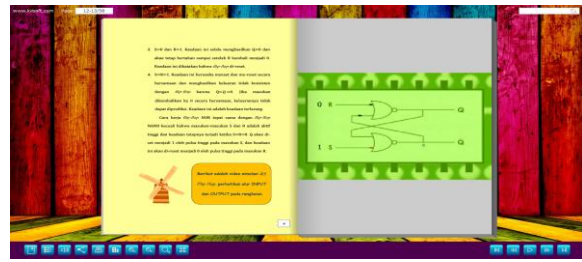
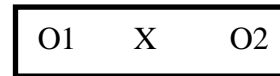


Figure 3. Interactive e-book display

After the interactive e-book is declared suitable for use, then further testing its effectiveness is carried out, namely to measure the improvement technology and engineering literacy skills by using a prepared questionnaire. The trial design used was a one group pretest posttest design, where there was a pretest before treatment and a posttest after being treated. The one group pretest posttest design refers to Hamzah (2019) with the following model:



Information :

X : Treatment

O1 :Pretest

O2 :Posttest

Analysis of improving learning outcomes using N-Gain which can show differences in student learning outcomes before and after being given treatment. The normalized score gain indicates the level of effectiveness of the treatment rather than the score or posttest gain. N-Gain formulated by Hake (1999):

Information :

N-Gain = Gain index

Tpost = Score after treatment

Tpre = Obtained score before treatment

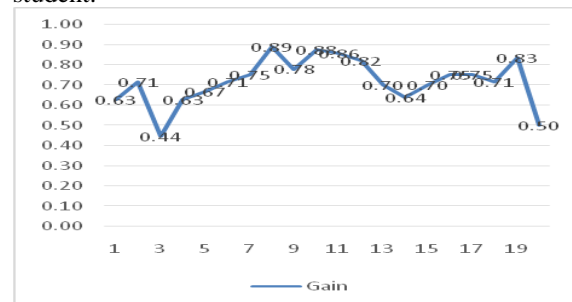
With the scoring criteria can be seen in Table 3

Table 3 N-Gain . scoring criteria

No	N-Gain category gain	Information
1	0.70 > N-Gain	High
2	0.30 N-Gain 0.70	Currently
3	N-Gain < 0.30	Low

Adapted from Hake (1999)

The following is the Gain value data for each student.



Based on the data above, it is known that the results of the effectiveness test conducted on 20

students showed that there was an increase in technology and engineering literacy skills with an average N-Gain of 0.72 and was included in the high category. This shows that the interactive e-book developed is effective in improving technology and engineering literacy skills.

c. Disseminate Stage

Based on the results of the validation and effectiveness testing of the interactive e-book, then the distribution is carried out. Dissemination is done by conducting outreach to lecturers and students.

4. CONCLUSIONS

Based on the results of the development, it can be concluded that: 1) interactive e-books developed empirically are proven to be suitable as a learning resource in the Digital Circuits course, 2) interactive e-books are effective for improving technology and engineering literacy skills. The results of this study can be used as input and as an alternative source of learning for lecturers in Electrical Engineering Education.

5. REFERENCES

- Ansari, P. D. S. U., & Malik, A. P. D. S. K. 2013. Image of an Effective Teacher In 21st Century Classroom. *Journal Of Educational And Instructional Studies In The World*, 3 (4): 61-68
- Dafrizal, J. (2017). Mempersiapkan mahasiswa calon guru generasi digital native dengan teknologi. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 151-180.
- Guthrie, Hugh and Clayton, Berwyn. 2010. *Building capability in vocational education and training providers: The TAFE cut*. Australia: NCVER
- Hake, R.R. 1999. *American Educational Research Association's Division D, Measurement and research Methodology: analyzing Change/Gain Scores*, USA: Woodland Hills
- Junanto, T., & Afriani, R. (2016). Implementasi Digital-Age Literacy Dalam Pendidikan Abad 21 Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains, 2016–2113. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/173402-ID-none.pdf>
- Mawarni, S., & Muhtadi, A. (2017). Pengembangan digital book interaktif mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran interaktif untuk mahasiswa teknologi pendidikan. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 4(1), 84. <http://doi.org/10.21831/jitp.v4i1.10114>
- Mukhadis, A. (2013). Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkarakter dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(2).
- NAEP. 2018. *Technology & Engineering Literacy Framework For The 2018 National*

Assessment Of Educational Progress. National Assessment Governing Board U.S. Department of Education

NCREL & Metiri Group. (2003). *enGauge 21st century skills: digital literacy for digital age*. Napierville, IL and Los Angeles, CA: NCREL and Metiri

Riduwan dan Sunarto. 2015. *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Thiagarajan, dkk. 1974. *Instruction Development For Training Teachers Of Exceptional Children*. Indiana: Indiana University

Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan. *Jurnal Pendidikan*, 1, 263–278.

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh :

Anesti Rohma Wardani¹⁾, Farid Setiawan²⁾, Moh Rifki³⁾, Nazhif Nafi' Dinulloh⁴⁾, Indo Ahya Maulana⁵⁾,
Nur'Aini Zahro⁶⁾, Hafizh Ananda Rizkilla⁷⁾, Nurul Khiyaroh⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

¹email: anesti1900031082@webmail.uad.ac.id

²email: farid.setiawan@pai.uad.ac.id

³email: moh1900031087@webmail.uad.ac.id

⁴email: nazhif1900031089@webmail.uad.ac.id

⁵email: indo1900031092@webmail.uad.ac.id

⁶email: nuraini1900031343@webmail.uad.ac.id

⁷email: hafizh2000031203@webmail.uad.ac.id

⁸email: nurul2000031203@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu bidang yang begitu sangat penting didalam kehidupan manusia. Dimana Pendidikan sangat mendorong dan dapat meningkatkan sebuah kualitas yang terdapat pada manusia baik dalam segi kompetensi, efektif dan juga psikometer. Dalam analisis kebijakan merupakan sebuah penelitian sosial yang dimana dilakukan secara sistematis dan disusun dalam rangka untuk mengetahui sebuah substansi dari suatu kebijakan yang dapat diketahui dengan jelas. Kebijakan menurut istilah dapat diterjemahkan dengan politik program, keputusan aturan, konverensi, ketentuan, rencana strategis, serta pemahaman yang lainnya. Kebijakan merupakan suatu kegiatan politik didalam organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi tersebut sehingga pemikiran analisis kebijakan pendidikan adalah suatu konsep prosedur dalam menghasilkan informasi data-data di pendidikan sebagai suatu pengarahan sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan. Dengan demikian analisis pendidikan ialah ilmu sosial terapan yang dikonsepsi dalam rancangan kerangka substansi kebijakan pendidikan yang bertujuan sebagai penjelas pada masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan suatu masalah yang akan timbul akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Kata Kunci: *Analisi, Kebijakan, Pendidikan*

1. PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai keinginan untuk mewariskan suatu aturan-aturan kepada generasi selanjutnya. Menurut (Imron, 2012) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ciri khas dari seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan.

Pendidikan adalah bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (Timperly, 2012).

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan

faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Fattah, 2012) bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global kebijakannya. (Dunn, 2016) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Stokey & Zekhauser (1978), mengartikan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu proses yang rasional dengan menggunakan metode dan teknik yang juga rasional.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu (Goodwin, 2014). Aktivitas yang para analis lakukan dengan memakai salah satu cara maupun

kombinasi cara agar mendapatkan pertimbangan untuk dijadikan tumpuan saat membangun planning apa yang akan itu bermanfaat serta sinkron mulai dari Visi Misinya dan apa yang direncanakan dalam Pendidikan dibatas waktu yang ditentukan. Sehingga dalam analisis kebijakan ini memiliki beberapa point penting, apa saja? pertama, kegiatan; kedua, analisis; ketiga, salah satu maupun beberapa kombinasi metode; keempat, saran untuk planning yang akan dilakukan. Maka dari itu bisa menghasilkan informasi teknis dari analisis kebijakan Pendidikan itu untuk sebuah masukan bagi formulasi dari sebagian opsi kebijakan yang mendapat dukungan dari keterangan teknis pula, adalah dari bagian bidang Pendidikan, keterangan dari teknis itu adalah sebuah satuan tunggal maklumat akan realitasinduktif, yang disupport melalui realita empiris, sebagai wujudan melalui deretan analisis data. Maka kebijakan analisis Pendidikan memberi pemahaman yang lebih yaitu aktivitas untuk memperoleh fakta kependidikan melalui jalan yang memakai data untuk masukan, agar perumusan dari alternative kebijakan dapat dilakuikan dan ketentuannya itu berwatak politis yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam kependidikan. Sehingga menjalankan analis tidak sembarangan dilakukan oleh analisis kebijakan pendidika pada data maupun hanya informasi. Namun juga teliti dalam mencermati semua aspek yang berkaitan dalam prosedur membuat sebuah kebijakan., sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian analisis dari berbagai sumber buku, internet, artikel, dan jurnal. Hal ini digunakan untuk analisis tanpa mencari data dengan terjun ke lapangan. Di jurnal ini membahas tentang analisis kebijakan pendidikan. Menurut Muhson (2006:1) menyatakan bahwa analisis data adalah sebuah metode dalam suatu proses penelitian yang dilaksanakan setelah semua data yang diperoleh akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Setelah ini akan dibahas menggunakan metode deskriptif yang di mana pengertiannya Menurut Sugiyono (2011:147), metode analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggolongkan data yang telah dikumpulkan sesuai apa adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan baru yang bersifat umum atau mengeneralisasikannya.

Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data sekunder, Menurut Sugiyono dalam Ahdiani (2013) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Ada berbagai jenis bentuk dokumen seperti: (1) gambar; (2) catatan; (3) karya yang semuanya dibuat maupun didokumentasikan oleh seseorang. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data

dengan meneliti untuk mendapatkan data untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi data yang dicari di internet. Menurut Moleong dalam Budiman (2015:68) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah salah satu metode dalam suatu penelitian pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan menganalisis dokumen yang ada dalam penyimpanan yang dibuat oleh seseorang.

Dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis data berupa metode SWOT proses dimulai dengan mengidentifikasi, merumuskan suatu kebijakan, suatu rencana, dan suatu proyek skala besar maupun kecil dengan menilai serta memaparkan faktor dalam dan luar yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Kemudian dipilih faktor mana yang membantu dan mana yang tidak mendukung dalam rencana yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pedoman dasar di analisis SWOT adalah membandingkan kondisi tertentu dengan kondisi yang lainnya yang sama maupun berbeda. (1) *strenght*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kekuatan dan kelebihan; (2) *weakness*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kelemahan dan kekurangan; (3) *opportunity*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa peluang; (4) *threats*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa ancaman. Kemudian dilakukan analisis berbagai data yang telah diperoleh setelah selesai menganalisis lalu menetapkan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Pendidikan

a. Definisi kebijakan

Kebijakan menurut istilah dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konverensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat yang sesuai lainnya. Dalam suatu Kebijakan memiliki istilah-istilah lain dalam gambaran yang berbeda. Kebijakan bisa dapat di istilahkan dengan kecerdasan, keputusan, kemahiran serta kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, juga dapat digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang telah disepakati, serta dapat digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, prinsip sebagai pedoman dalam mencapai harapan yang sesuai tepat sasaran.

Kebijakan merupakan suatu aktivitas kegiatan politik didalam suatu kelompok organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan disetujui dalam organisasi tersebut untuk memberikan pemikiran menjadi terarah dengan baik, pemikiran tersebut bertujuan memutuskan permasalahan sehingga dapat

mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Rismawan 2017). dalam aspek kehidupan memang membutuhkan pemikiran bijak, yang senantiasa dapat diteladani dan menjadikan sebuah pedoman dan panduan didalam aktivitas agar dapat membatasi setiap perilaku dan keputusan secara terarah dengan baik. Kebijakan tersebut juga dapat diterapkan didalam sebuah sistem pendidikan yang dapat disebut kebijakan pendidikan.

b. Analisis kebijakan pendidikan

Analisis suatu kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data dipendidikan sebagai suatu pengarah sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan (Hanisyi 2013). Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternative hingga pada penyampaian alternative terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan. Rumusan alternative pendidikan dibuat melalui pelaksanaan analisis kebijakan tidak serta merta muncul sendiri tanpa adanya analisis kebijakan terlebih dahulu. Setelah rumusan kebijakan pendidikan telah didukung oleh kekuatan kewenangan yang sudah ada, dari dukungan otoriter atau kewenangan tersebut maka alternative kebijakan akan dapat berubah menjadi kebijakan pendidikan. Maka dari itu prosedur dapat menciptakan alternative kebijakan, sehingga proses tersebut menjadi rasional. Berlangsungnya proses kebijakan merupakan suatu bagian yang digunakan dalam proses politik oleh para penguasa yang memiliki otoritas atau kekuasaan.

Kebijakan pendidikan mempunyai sifat yang strategis yang terkait dengan politik, meskipun banyak pihak yang menangkap serta memahami pendidikan harus bebas dari politik. Salah satunya tujuan, nilai-nilai, arah, dan dana pendidikan. Jadi pendidikan nasional semuanya diatur dalam kesepakatan politik. Begitupun realitanya, masih banyak ditemui proses rasional analisis kebijakan pendidikan yang melibatkan politik dan tidak dapat dipisahkan. Proses politik menjadi salahsatu bentuk rasioanal karena proses politik masih ada orientasi hubungan dengan kepentingan masyarakat.

Analisis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu social terapan yang dikonsepsikan dalam sebuah struktur rancangan suatu kerangka substansi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperjelas suatu masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan dan mengantisipasi suatu masalah yang akan terjadi akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelum ditetapkan. Maka dari itu analisis kebijakan di bidang pendidikan sangatlah

penting di era zaman milenial sekarang, sehingga pihak yang berwenang dan pemerintah yang memiliki otoritas secara langsung dibiarkan dalam pengesahan suatu kebijakan jika dalam pengesahan tersebut melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi dan memberikan dampak negative terhadap masyarakat tanpa menganalisis dan menelaah serta di fahami substansi, alasan, dampak terdahulu bagi masyarakat. Artinya kebijakan harus dikritisi dan dikaji sesuai data informasi guna untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pendidikan nasional.

Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Implementasi analisis kebijakan mesti dilakukan, karena mampu mendukung dalam pengambilan kesimpulan guna memperoleh keterangan terkait atas kesimpulan yang akan diambil. Proses analisis kebijakan bisa dilaksanakan dengan observasi, penjelasan serta pemisahan kasus-kasus yang mampu mengetahui ketidaksesuaian antara tujuan dan usaha menghadirkan cara-cara baru, dan mengajukan cara untuk mengungkapkan gagasan pada pembuatan kebijakan. Keterlibatan utama berdasarkan proses implementasi analisis kebijakan yaitu menyampaikan saran atas keputusan dengan menghitung sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditentukan. Analisis kebijakan bukanlah inti dari proses pengambilan kepentingan, tetapi penting karena hal ini merupakan komponen dari prosedur evaluasi kelembagaan. Badjuri dan Yuwono menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama kenapa analisis kebijakan penting: 1) Analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik oleh karena itu kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan 2) analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara. 3) analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif. 4) analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis, oleh karena itu bisa dipakai pada masa mendatang. 5) analisis kebijakan mampu membagikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik). Oleh sebab itu analisis kebijakan publik mampu dijadikan objek yang dipakai untuk mewujudkan impian (Safitri et al., 2021).

Untuk menghindari kebijakan yang diambil dari pertimbangan dengan kekuasaan melaka maka perlunya dilakukan analisis kebijakan. Pertimbangan yang dilaksanakan secara saintifik dengan menggunakan prosedur ilmiah, objektif dan sistematis kadang sulit diketahui. Kondisi ini

disebabkan karena keterkaitan antara pembentukan kebijakan yang menggunakan unsur politik yang berkaitan dengan kebijakan sentral dan daerah. Adanya analisis kebijakan dilaksanakan mampu memberikan fakta dan argumentasi yang utuh sehingga bisa disetujui oleh masyarakat. Hal yang terpenting yang bisa dilakukan pada analisis kebijakan adalah perlunya mengidentifikasi kasus dan tujuan perumusan kebijakan. Tetapi banyak kasus yang terjadi saat pembuat kebijakan mengintruksikan para analisis kebijakan guna melaksanakan analisis tetapi tidak bersama dengan penggunaan keterangan yang asertif, bahkan ada yang memberikan keterangan yang tujuannya berbeda bagi para analisis kebijakan. Walaupun ada maksud yang berbeda mereka mesti didapatkan. Jadi maksud tersebut mampu didapatkan dalam kurun waktu dekat dan maksud tujuan yang didapatkan untuk generasi kedepan. Contoh yang bisa ditemukan yaitu pendidikan. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan tujuan dari pendidikan. Pendidikan tujuannya untuk mengembangkan mutu pengetahuan serta keahlian, mengembangkan kepribadian dan mental masyarakat, dan memperbaiki tatanan sosial kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa perlunya dilakukan analisis kebijakan yaitu untuk memahami bentuk keselarasan dan pembiayaan berdasarkan kebijakan yang diambil dan dianalisis dengan metode ilmiah menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini karena analisis kebijakan di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal.

Kebijakan yang diambil banyak yang bersifat politis dan terburu-buru. Dari uraian yang disajikan, bisa disimpulkan pentingnya analisis kebijakan sebelum mengambil putusan bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan. Tetapi, sangat disayangkan kebijakan yang diambil di Indonesia banyak tidak dianalisa secara menyeluruh. Akibatnya banyak kebijakan non-agresif dan pemecahan masalah yang didapatkan. Proses kebijakan tidak bisa disangkal jika mahal karena banyak kebijakan yang tidak dilaksanakan secara optimal.

Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Sebuah kebijakan dalam organisasi pendidikan akan terlaksana dengan baik dengan adanya faktor yang menentukan perubahan, perkembangan, dan restrukturisasi organisasi pendidikan. Hal ini berupa keputusan-keputusan yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan aturan. Sehingga sumber daya organisasi pendidikan dapat bergerak dan terlaksana dengan maksimal. Kebijakan pendidikan memiliki pedoman untuk pemimpin, staf, dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pedoman ini menggunakan format kebijakan pendidikan yang berbentuk catatan dan tulisan. Analisis kebijakan pendidikan dilakukan sebagai panduan untuk melakukan tindakan dalam memberi arahan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga

pendidikan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai.

Analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan bagi pengambilan keputusan berfungsi sebagai: 1) mencapai ketertiban layanan dalam pendidikan, 2) setiap warga diberi jaminan hak asasi untuk mendapatkan layanan pendidikan, 3) keefektifan program kegiatan layanan pendidikan, 4) pemeran pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) terwujudnya ketertiban administrasi (Arwidayanto et al., 2018). Adapun fungsi lain analisis kebijakan pendidikan yaitu ada tiga fungsi, yang mana apabila tiga fungsi tersebut tidak lengkap atau lebih maka target dalam analisis kebijakan tidak dapat tercapai.

- 1) Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.
- 2) Fungsi inquiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inquiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inquiri ini bersifat komperhensif yang bisa berbentuk kajian metodologi atau kajian substansi.
- 3) Fungsi komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak-pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan (Saifuddin, 2016).

Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Selain itu, dapat kita ketahui bahwasanya diperoleh karakteristik-karakteristik ini dalam analisis kebijakan pendidikan yang perlu kita diketahui artinya, analisis kebijakan pendidikan yang mewujudkan suatu metode, jalan, ataupun aktivitas panduan yang berasal dari beraneka macam sumber berita tentang bantuan dalam pendidikan. Selain itu juga dapat mewujudkan suatu berita yang secara spontan dengan menjadi sumber utama dalam sebuah tinjauan analisis kebijakan dan juga merupakan keluaran. Analisis kebijakan dapat berupa konsultasi teknis standar operasional prosedural (SOP).

Adapun Karakteristik memiliki ciri analisis kebijakan pendidikan berbentuk suatu materi dasar, alur, rangkaian dan sasaran untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan lalu konsumen dari analisis ini merupakan hal yang dapat

diusaikan dalam ketentuan serta anggota dengan memiliki kepentingan tentang politik yang telah ditetapkan. Kajian politik pendidikan ini harus Memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang (Ghazali & Wibawa, 2021).

Metode masalah pendidikan adalah sistem yang bertujuan menginventaris ciri-ciri dalam primer menurut metode ini bukan setara menggunakan enumerasi menurut sepenggal metode, mengenai ciri menurut metode masalah pendidikan merupakan: tidak terdapat perkara pendidikan yang serupa dengan karakteristik dan juga karakter, karakteristik dan konduite setiap masalah pendidikan mengenai dampak di dalam metode sebagai holistik, dengan dampak di dalam holistik metode jangan terkait dalam anggota individu atau sub metode yang berbeda, semua isu dan masalah pada Analisis Kebijakan Pendidikan 43 sub gerombolan yang bahkan mungkin menurut anggota metode memiliki dampak tidak bebas atas metode ini. Maka dari itu perlu adanya analisis kebijakan pendidikan, kemungkinan terjadinya dampak-dampak yang tidak bisa diperkirakan menurut suatu analisis kebijakan pendidikan mengingat sanggup terjadi pemecahan perkara yang sah akan tetapi, di dalam metode yang salah. Jika metode kebijakan bersifat berbelit-belit, dengan hal itu akan muncul ketidaksamaan. Filsafat dengan hal di itu metode bertentangan atas sikap yang dikerjakannya. Adapun pakar ahli yang menandai ciri- ciri analisis kebijakan pendidikan secara utama, yaitu menjadi berikut:

- 1) Mempunyai maksud pendidikan, sebagai hal ini analisis kebijakan pendidikan wajib meyanggah arah yang sudah pasti terarah, tujuan hal ini pasti sudah menaruh manfaat di dalam penyelesaian metode pendidikan yang mendasar.
- 2) Melengkapi aspek normal, analisis kebijakan pendidikan seharusnya perlu bertindak secara cepat dengan memenuhi agar di dalam kebijakan pendidikan bisa dipertimbangkan dan secara normal dengan bertindak dalam suatu kawasan tertentu. Dengan hal itu, kebijakan pendidikan harus melengkapi kondisi secara undang-undang sesuai jenjang strata konstitusi yang berlaku terhadap sebuah Kawasan sampai beliau bisa dinyatakan normal dan resmi berlaku pada semua kawasan yang ditentukan.
- 3) Menyandang rancangan fungsional, analisis kebijakan pendidikan adalah pelatih berwatak awam, maka dari itu wajib memiliki jumlah faedah bagi orang fungsional dan sanggup untuk diaplikasikan. Dengan hal itu, kebijakan pendidikan artinya sebuah macam kewajiban agar dapat menguraikan desain pendapatana arah pendidikan yang dibutuhkan stakeholder. Denganitu maka terjadinya fungsi dukungan pada

pengambilan keputusan termasuk keperluan yang akan di analisis kebijakan pendidikan.

- 4) Disusun oleh pihak yang berwenang kebijakan pendidikan semestinya mempunyai wewenang buat memaksa pihak terkait, buat menghindari resikonya nir hingga menyebabkan dampak hancurnya pendidikan dan daerahnya. Para pemangku (administrator) pendidikan, ahli politik dan analisis kebijakan yang terkait dengan hal itu memakai kebijakan pendidikan merupakan bagian utama penghasil kebijakan pendidikan.
- 5) Bisa dinilai dengan kualitas, analisis kebijakan pendidikan dasar tanggal menurut ahli pakar didalam syarat yang perlu ditindaklanjuti. Apabila mempunyai niat yang baik dan tulus, maka perlu mempertahankan dan juga ditingkatkan, sebaliknya apabila menyandang kekurangan, dengan hal itu wajib bisa memperbaiki. Analisis kebijakan pendidikan memiliki sifat yang mampu di evaluasi secara alamiah, ampuh, dan praktis.
- 6) Mempunyai sistematika, analisis kebijakan pendidikan sebagai sebuah skema, sang karena itu hendaklah mempunyai sistematika yang menonjol dalam agen dengan melibatkan sepenuhnya di dalam segi yangnantinya perlu dikelola oleh sistemnya. Penataan ini juga dimohon dapat memiliki etika yang positif, efektif dan juga ditetapkan yang atas karena analisis kebijakan pendidikan yang dipisahkan asal karakter diskriminatif, pragmatis, dan bentuk yang terdapat dengan dampak banyak sekali macam faktor yang saling bentrokan dengan yang lainnya.

Dengan hal ini, perlu diamati dengan seksama dan teliti. Supaya pengesahan bukan menyebabkan kekurangan atau cacat pada anggaran baik domestik dan juga eksternal. Sedangkan, menurut analisis kebijakan pendidikan sepatutnya bertumpu dengan menggunakan kebijakan yang lain. Contohnya kebijakan penganggaran, kebijakan politik. Dan juga kebetulan dalam kebijakan pendidikan dalam pusat, wilayah dan forum pendidikan sendiri-sendiri (Pamungkas et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Dengan demikian analisis kebijakan pendidikan merupakan sosiologi terapan yang dikonseptualisasikan dalam rencana substansi sistem strategi instruktif yang menunjuk pada klarifikasi masalah yang akan dijawab oleh pendekatan dan masalah yang akan muncul karena pelaksanaannya pengaturan yang telah dibuat.

Kerangka isu persekolahan adalah kerangka kerja yang mengharapakan untuk memperhitungkan kualitas pokok kerangka yang tidak setara dengan jumlah bagian dari sub kerangka, sedangkan atribut kerangka isu pelatihan adalah 1) tidak ada perbedaan. masalah instruktif dalam kualitas dan perilakunya, 2) atribut dan perilaku masing - masing masalah

instruktif akan mempengaruhi kerangka secara keseluruhan, 3) dampaknya semua dalam semua kerangka tidak bergantung juga pada satu bagian atau sub-pengaturan yang lain, 4) semua isu dan isu dalam investigasi strategi persekolahan 43 potensi subkelompok kerangka individu tidak memiliki dampak yang bebas dari keseluruhan kerangka kerja.

Berkenaan dengan para ahli yang berbeda yang mengenali atribut-atribut ujian strategi persekolahan secara eksplisit, khususnya sebagai berikut: memiliki tujuan instruktif, di mana pemeriksaan pengaturan instruktif harus memiliki judul yang jelas, tujuan yang memberikan keuntungan untuk mengurus masalah instruktif penting.

5. REFERENSI

- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Dunn, W. (2016). *Public Policy Analysis (fifth)*. New York: Routledge.
- Fattah, N. &. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Ghazali, Irwan, Zakki Teguh Wibawa, dkk. (2021). *Analisis kebijakan pendidikan*. 05, 67–77.
- Goodwin, A. (2014). *Globalization and the preparation of quality teacher: rethinking knowledge domains for teaching*. *Teaching Education*, 21(1), 19-32. <http://doi.org/10.1080/10476210903466901>.
- Hanisyi, Asmad. 2013. "Konsep Dasar Analisis Kebijakan." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 4: 48–63.
- Imron. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pamungkas, Oktri, M. Yusuf Noor Khizain dkk. (2021). *KONSEP PEMIKIRAN MENGENAI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN*. 1(1), 6.
- Rismawan, Wawan. 2017. "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4: 511–18.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>
- Saifuddin, A. (2016). Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.207-234>
- Timperly, H. W. (2012). *Teacher Profesional Learning and Development: Best Evidence Synthetis Iteration (BES)*. Ministry of Education, 3(1), 130-153. Retrieved from <http://www.oecd.org/edu/school/48727127.pdf>

LEGITIMASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh:

Roihanah¹⁾, Farid Setiawan²⁾, Erwan Setianto³⁾, Istinganah⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

¹E-mail: roihanah1900031085@webmail.uad.ac.id

²E-mail: farid.setiawan@pai.uad.ac.id

³E-mail: erwan1900031086@webmail.uad.ac.id

⁴E-mail: istinganah2000031224@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Kebijakan timbul beriringan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan permunculan masalah kebutuhan hidup masyarakat. Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus diadakan aktivitas legitimasi. Kebijakan perlu dikomunikasikan kepada rakyat agar rakyat dapat menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan sebuah berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas yang terkait.

KataKunci: legitimasi; komunikasi; kebijakan

1. PENDAHULUAN

Kebijakan sering diartikan dengan aturan, kebijakan, program, undang-undang, kesepakatan, regulasi, keputusan strategis, dan regulasi. Kebijakan adalah peraturan tertulis yang merupakan keputusan resmi. Kebijakan dapat mengatur perilaku seseorang dengan tujuan untuk menciptakan tatanan nilai baru dalam masyarakat tempat mereka bertindak. Kebijakan, tidak seperti peraturan dan undang-undang, pada dasarnya bersifat proaktif dan pemecahan masalah. Politik mengatur apa yang boleh bersifat interpretif dan adaptif. Analisis politik sebagai tindakan yang digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan, baik itu kebijakan baru maupun kebijakan hasil dari kebijakan yang sudah ada.

Kebijakan timbul beriringan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan permunculan masalah kebutuhan hidup masyarakat. Perjalanan hidup manusia yang dimulai dengan keberadaan Adam Hawa kini melebihi 2 miliar. Ini bisa menjadi sejarah panjang dalam menghasilkan berbagai prestasi budaya, salah satu prinsip yang ada. Awalnya, pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk melatih pendekatan agar masyarakat dapat terus menyampaikan nilai-nilai sosial di masa depan.

Setelah kebijakan dibuat maka perlu dilegitimasi, karena hasil dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat. Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat, ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Karena bagaimanapun juga, pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Secara umum,

pemerintah atau legislatif memiliki kekuasaan untuk menjalankan legitimasi.

Namun karena hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi terpenting, derajat legitimasi pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan dukungan dari pemerintah, sehingga pengawasan memasuki proses legitimasi. Pemerintah dan apa yang mereka inginkan dari rakyat.

2.METODE PENELITIAN

Kajian yang dipakai dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau Library Research, metode ini merupakan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber Pustaka dan menyatukannya menjadi satu bagian. Langkah kegiatan ini yaitu membaca sumber, menghayati serta memahami pembahasan lalu mencatat hasil tersebut.

Proses pengumpulan sumber penelitian ini biasanya menggunakan berbagai macam literatur, buku, artikel, jurnal, dokumen pribadi, majalah, dan referensi lainnya. Tahap pertama melakukan penelitian ini yaitu memilih tema yang sesuai dengan pembahasan. Kemudian mengeksplor informasi agar dapat focus pada tujuan penelitian. Lalu mengumpulkan berbagai macam sumber data dan membaca secara mendalam dan menggali materi secara aktif dan kritis. Tahap selanjutnya yaitu mencatat, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan artikel. Kemudian mengolah serta menyusun materi yang telah didapatkan. Tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada akhir artikel.

Penelitian dalam artikel yaitu berupa berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitiannya yang tidak menggunakan perhitungan atau sebuah hasil yang didapatkan tidak

menggunakan cara-cara berupa statistic, pada intinya tidak menggunakan cara-cara seperti yang didapatkan dalam metode penelitian kuantitatif yang hasil dari penelitiannya berupa perhitungan menggunakan angka-angka (Moha and sudrajat 2019). Dapat ditarik secara umum pembahasan mengenai penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dalam pelaksanaannya melihat berdasarkan sebuah fakta, fenomena, aktivitas sosial dan lain sebagainya yang terjadi dalam suatu objek penelitian. Yang menjadi salah satu alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah agar penulis dapat langsung bisa meneliti sebuah fakta, fenomena dan aktivitas sosial dalam lapangan tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi mengacu pada prinsip menunjukkan penerimaan publik terhadap kebencian terhadap pemimpin, pemerintah, dan pejabat, berdasarkan persetujuan pemimpin dan administrator yang berkuasa, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditegakkan oleh publik. Jauh, termasuk nilai-nilai politik atau moral. Pada umumnya legitimasi diserahkan kepada yang berkuasa dengan berbagai cara untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang berbeda penyerahan tersebut juga dapat dilihat dari berbagai perspektif masyarakat, yang kebanyakan biasanya bersifat keagamaan atau non-keagamaan. seperti beberapa contoh penyerahan legitimasi dan penyerahan kepada yang berkuasa, yaitu lahirnya kerajaan dan penobatan monarki, pemilihan dan sumpah yang demokratis, dll. Legitimasi juga merupakan bentuk desain yang menciptakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. (Indriani 2011)

Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas atau sempit, dengan legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat dengan institusi politik, sedangkan legitimasi dalam arti sempit adalah dukungan publik untuk memberdayakan pemerintah. Legitimasi antara kekuatan normatif dan kualitas pribadi sangat terkait. Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara dan bernegara di bidang pendidikan.

Legitimasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya terdiri dari bentuk pengambilan keputusan dengan substansi sebagai berikut: tujuan, prinsip, dan aturan. Format yang digunakan dalam legitimasi kebijakan pendidikan biasanya dituliskan dan disahkan untuk sebagai pedoman oleh pemimpin pemegang kekuasaan, staf dan personal organisasi yang terkait serta interaksinya dengan lingkungan eksternal yang masih berkatan.

Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Dengan begitu bisa diartikan bahwa

apakah daerah setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang telah di setujui dan terikat daerah tersebut ataupun tidak. Adapun jika dalam hal tersebut daerah setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang menjadi pengikat daerah setempat, maka pihak yang berwenang berhak mengatur sebagai otentik atau melegitimasi. Dengan ini artinya, keaslian dating dari sebuah pengakuan masyarakat atas dasar keistimewaan para pionir, agar bisa menetapkan dan melakukan pemilihan politik. Secara bahasa etimologi legitimasi bersumber dari bahasa latin, Lex yang mengandung arti sebuah hukum. (MUHLIADI 2013)

Sebuah teori legitimasi sangat penting bagi sebuah organisasi karena setiap prinsip legitimasi dilandasi atas norma yang mengandung nilai dari peraturan sosial, menjadi sebuah organisasi merasakan akan adanya eksistensi dan aktivitas yang telah terlegitimasi. Diindikasikan oleh Silalahi, dikutip oleh Ali Imron, (Farid Setiawan 2007) kata legitimasi berasal dari kata legitimacy yang memiliki arti memberi sebuah kekuasaan atas posisi yang premis, aktivitas sebuah rancangan politik, termasuk siklus penataan, rekomendasi agar bisa menangani sebuah isu dan kasus yang muncul dari ranah politik.

Legitimasi juga berasal dari sebuah kata keaslian yang menunjukkan peredaran tertentu di mana program sebuah pemerintahan disetujui dan dilegitimasi, sehingga cenderung terlihat bahwasanya legitimasi mengandung dua implikasi, yaitu pertama, yang mengatur sebuah posisi untuk memberikan arahan untuk sebuah tindakan, dan seorang yang bertanggung jawab atas program yang diusulkannya. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus diadakan aktivitas legitimasi.

Sebuah kebijakan yang perlu dilegitimasi, karena hasil dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat. Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat, ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Karena bagaimanapun juga, pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya.

Dengan adanya kewenangan inilah, mereka yang memiliki kewenangan harus bisa melaksanakan program juga akan diminta atas pertanggung jawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan kewenangannya. Dari uraian yang telah di jelaskan oleh para pakar ahli di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya legitimasi adalah sebuah pemberian wewenang terhadap Lembaga untuk membuat dan melaksanakan

sebuah keputusan sebagai bentuk pengesahan atas dasar persetujuan masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan sebuah berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlakusetelah mendapatkan [engakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas yang terkait.

B. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang telah dibuat atau diformulasikan, harus disahkan atau di legitimasi terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa dampak yang positif maupun negatif. Tahapan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni:

1. Simbolis yakni dengan mengedepankan kepercayaan pada masyarakat secara simbolik, yaitu berupa simbol-simbol seperti penghormatan nilai-nilai budaya juga tradisi dan kepribadian yang baik. Contoh kegiatannya seperti pementasan wayang dan upacara kenegaraan.
2. Prosedural yakni menjanjikan kemakmuran materi kepada rakyat. Contohnya antara lain menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, menjamin ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjanjikan fasilitas produksi pertanian, telekomunikasi dan transportasi, serta modal yang cukup.
3. Materil yakni untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden perdana menteri, dan yang lainnya dengan mengadakan pemilihan umum.

Menurut Andrain, pengelompokan legitimasi berdasarkan prinsip dukungan dan pengakuan dari masyarakat kepada pemerintah terbagi menjadi lima tipe yakni:

1. Legitimasi tradisional, yakni kesadaran masyarakat untuk memberi dukungan dan pengakuan terhadap pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin ini adalah keturunan dari para pemimpin "Darah Biru" yang dipercaya bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
2. Legitimasi ideologi, yakni masyarakat menaruh dukungan kepada pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin ini dianggap sebagai pelaksana dan penafsir ideologis. Artinya tidak hanya ideologi doktrinal seperti komunisme, tetapi juga ideologi praktis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila.
3. Legitimasi kualitas pribadi, yaitu kesadaran masyarakat dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin memiliki kualitas pribadi yang karismatik dan sikap baik hati serta prestasi yang membanggakan di bidang tertentu.
4. Legitimasi prosedural, yakni pemimpin memiliki kewenangan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang, sehingga masyarakat memberikan persetujuan dan dukungan kepada pemerintah.

5. Legitimasi instrumental, yaitu masyarakat memberikan kesadaran dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjamin atau menjanjikan kesejahteraan materi (instrumental) kepada masyarakat.

Kebijakan yang telah dirumuskan, ada kalanya masih dapat dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat, kemudian rakyat tersebut diminta untuk memberikan dukungan. Akan tetapi ada juga, kebijakan tersebut dimintakan dukungan oleh aktor kebijakan kepada tokoh-tokoh kunci atau non formal yang ada di masyarakat. Dengan tujuan agar tokoh non formal atau kunci tersebut yang kemudian akan mengumpulkan dukungan kepada massa atau rakyat. Tokoh-tokoh kunci atau informal ini ada di sektor profesi, agama, seni, dan budaya, bisnis, pertanian, bahkan bisnis dan jasa. Tokoh informal ini tidak menyanggah status pemerintahan, tetapi umumnya memiliki massa dan menaruh kepercayaan besar kepada mereka. Pada beberapa kasus, tokoh-tokoh kunci yang diusulkan diterima dengan baik.

Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan secara resmi bukanlah hal yang final. Namun, hal tersebut masih dapat direvisi, diperbaiki, dan ditingkatkan. Dan pengesahan ini dilakukan antara lain untuk melengkapinya agar tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Dengan legitimasi ini, orang akan menanggapi keinginan dan harapan mereka dan akan mengungkapkan dukungan mereka. Sementara kegiatan legitimasi membutuhkan dukungan dan kebijakan yang sempurna, titik legitimasi adalah pengembangan kebijakan yang sah dan final. (Dedurro 2012)

C. Problema Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terdapat banyak problema. Pertama yakni adanya kekuatan dari mantan perumus kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Hal itu membuat adanya kehendak bahwa mantan perumus kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang telah ia rumuskan dahulu, masih bisa dipertahankan sampai kini.

Problema yang kedua yakni adanya penentangan dari kalangan konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan. Di sinilah kebijakan yang dibuat berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Hal-hal tradisional umumnya sulit diubah, dan keinginan untuk mengubahnya membutuhkan waktu lama dalam masyarakat konservatif.

Ketiga yakni sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumus kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu pendukungnya. Pengikutnya ini juga umumnya cenderung akan mengikuti gerakan dan langkah pemimpinnya. Hal ini akan menghambat dan mengganggu proses legalisasi atau setidaknya akan memakan waktu yang lebih lama.

Keempat yakni adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki persepsi, visi, dan

kepentingan yang tidak sama dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Kelompok perlawanan seperti ini pada umumnya tidak mudah untuk disingkirkan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, para legitimator berupaya merangkulnya untuk mendukung kebijakan yang telah dirumuskan.

Legitimasi juga dapat mengalami krisis jika seseorang dan lembaga legitimasi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola negara. Dalam hal ini, setelah legitimasi, membutuhkan kapasitas dan kapabilitas untuk menerapkan program-program yang secara langsung menyentuh rakyat. Rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi, kesejahteraan dan keamanannya, menjadi kriteria utama dalam menilai legitimasi kemampuan suatu bangsa. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang sah tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan.

Pada masa transisi, umumnya dapat terjadi krisis legitimasi. Selain itu, terjadi pergeseran dari satu jenjang kualitas pembangunan ke jenjang kualitas pembangunan masyarakat lainnya. Masyarakat seperti ini lebih mengarah untuk mempertanyakan otoritas yang diyakini tidak mencerminkan keinginan hidup dalam masyarakat. (Dedurro 2012)

D. Pengertian Komunikasi

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan. Sebagai manusia sosial, tentunya kita tidak bisa tanpa interaksi dan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang memerlukan partisipasi manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan mencapainya. Dalam kegiatan ini, manusia memiliki kepentingan dan tujuan individu yang bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat. (Ety Nur Inah 2013)

Menurut Onong yang dikutip oleh Irene, pengertian komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari bahasa latin comunicatio, dari kata communis yang berarti sama, dan same dalam pengertian ini berarti sama. (Dr. Irene Silviani 2020) Oleh karena itu, definisi komunikasi yaitu adanya kesamaan makna mengenai apa yang menjadi bahan pembicaraan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan sesuatu yang menjadi milik seseorang sejak semula, orang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih. Berbagai konflik yang muncul di Indonesia bermula dari kurangnya kapasitas untuk mengembangkan konflik yang efektif, yang merupakan salah satu definisi komunikasi Harold D. Lasswell. (Dr. Irene Silviani 2020)

Dalam suatu pertukaran, tidak hanya saling pengertian dan pengertian, tetapi juga tujuan pertukaran, ada empat tujuan pertukaran, yaitu: Pertama, untuk mengubah sikap pemberian informasi kepada publik, tujuannya agar masyarakat mengubah sikapnya. Kedua, perubahan pendapat menyampaikan

suatu informasi kepada masyarakat diharapkan bisa menerima pendapat dan berubah pendapat terhadap apa yang mereka terima dari informasi yang telah disampaikan. Ketiga, perubahan perilaku menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat bisa bertujuan agar masyarakat akan berubah perilakunya. *Keempat*, perubahan sosial memberikan berbagai pesan kepada publik yang tujuan akhirnya adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung tujuan pesan tersebut. Serta mampu menjaga hubungan bawahan yang baik dalam menjalankan organisasi.

Fungsi komunikasi yaitu, agar manusia dapat mengontrol lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, serta melakukan tranformasi warisan sosial kepada generasi yang berikutnya. Dengan demikian, melalui komunikasi yang baik hubungan antara manusia diharapkan dapat dipelihara dengan baik pula. Dengan adanya komunikasi manusia yang hidup sebagai makhluk sosial bisa menambah dan memperbanyak sahabat, rekan, rezeki, serta mampu menjaga hubungan bawahan yang baik dalam menjalankan organisasi. Efek komunikasi selalu memiliki efek pada satu atau lebih orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi. Dalam perilaku komunikatif, ada beberapa konsekuensi, dan efek komunikasi dapat terjadi secara kognitif, emosional, dan perilaku. (Dr. Dra. Poppy Ruliana 2019)

E. Pengertian komunikasi kebijakan Pendidikan

Komunikasi dalam kebijakan pendidikan merupakan pengenalan sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan yang telah dilegitimasi. Sehingga komunikatornya ialah para pemeran yang sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan, sedangkan komunikannya ialah pemeran pembuat kebijakan pendidikan secara bersama-sama rancangan dan publik pada umumnya. Mengenai materi yang dikomunikasikan ialah yang berkaitan dengan rencana-rencana kebijakan tersebut awalnya dari isinya, tercapai beserta penjelasannya. Sebagai itu pemeran kebijakan pendidikan berhubungan dengan perangkatnya menyebarkan melalui rumusan-rumusan kebijakan yang terkandung tersebut kepada publik. Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tidak terkecuali dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karena itu memiliki dua alasan yaitu supaya khalayak memahami lebih dalam serta menghindari kesalahan pemahaman.

F. Model komunikasi kebijakan Pendidikan

Model komunikasi kebijakan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu; komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi multi atau transaksional. Komunikasi bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung bisa secara verbal, non verbal atau dengan secara keduanya. Saat di masyarakat, komunikasi dapat dilakukan dengan bicara, menulis, gerak isyarat informal, gerak isyarat yang sistematis impuls elektrik dan sebagainya. Pada dasarnya apapun model komunikasi dan cara

penyampaiannya, komunikasi memiliki tiga komponen penting yaitu: pengirim, pesan dan penerima.

Pengirim pesan sering disebut komunikator serta penerima pesan disebut komunikan. Pengirim atau komunikator, dalam hal ini yang dimaksud komunikator ialah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Pihak disini bisa seorang diri sendiri, kelompok, organisasi, atau bahkan suatu negara. (Elih Yuliah 2020)Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh komunikator ke komunikan. Pesan bisa berupa simbol verbal maupun non verbal yang bertindak sebagai wakil dalam hal perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari komunikator tersebut. Pesan yang berupa simbol verbal yaitu kata-kata dalam bahasa sedangkan pesan nonverbal yaitu dapat berupa tindakan atau isyarat anggota tubuh juga melalui musik, lukisan dan sebagainya. Penerima komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan baik dalam verbal maupun nonverbal yang memperoleh komunikan hendak diterjemahkan dan ditafsirkan menjadi ide yang bisa dipahami. Akibat setelah penafsiran pesan tersebut bisa saja komunikan merasa akan terhibur, bertambah pengetahuannya, adanya perubahan tingkah laku dan sebagainya.

G. Problematika komunikasi kebijakan Pendidikan

Terdapat 3 sumber yang menyebabkan problema dalam komunikasi kebijakan yaitu:

a. Bersumber melalui komunikator

Problema dari bersumber melalui komunikator kebijakan pendidikan yaitu:

- 1) Komunikator tidak ahli ketika memberikan pesan-pesan kebijakan akhirnya yang seharusnya pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas menjadi tidak jelas akibat tidak tersampaikan dengan jelas.
- 2) Perbedaan sumber acuan antara komunikator dengan komunikan. Keadaan ini bisa menyebabkan tidak tepatnya komunikator dalam menyampaikan kebijakan pendidikan.
- 3) Kurangnya integritas komunikator dimata komunikasi. Kredibilitas komunikator mencakup banyak hal, mulai dari tingkat ketokohnya di masyarakat, karakternya serta kemampuannya.

b. Bersumber dari pesan itu sendiri

Prolema yang bersumber dari pesan itu sendiri yaitu:

- 1) Rumusan kebijakan yang kurang jelas. Rumusan yang tidak jelas mengakibatkan penerima pesan tersebut juga tidak jelas dalam menerima pesan.
- 2) Rumusan kebijakan yang asing. Rumusan kebijakan yang asing hendak memberi peluang penolakan dari masyarakat. Sumber acuan yang telah dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap hal-hal yang baru.
- 3) Kebijakan yang terlalu ideal dan kurang realistik. Hal ini akan mengakibatkan komunikan tidak peduli terhadap pesannya karena hanya dianggap omong kosong yang tidak mungkin dapat dilakukan.

c. Bersumber dari komunikannya

Prolema yang bersumber dari komunikan yaitu:

- 1) Komunikan yang heterogen. Maksud dari heterogenitas ini ialah bisa jadi dalam hal tersebut tingkatan pendidikan, perbedaan etnik, kepercayaan dan agamanya. Heterogenitas ini mengakibatkan kesulitan saat mencari bahasa yang sesuai untuk mereka karena apabila mereka menggunakan bahasa yang tinggi akan sulit dipahami oleh rakyat kebanyakan namun apabila menggunakan bahasa yang rendah akan dianggap tidak berbobot oleh mereka yang tingkatannya tinggi.
- 2) Adanya kesalahan dalam penerimaan pesan oleh komunikan yang mengakibatkan kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.

4.KESIMPULAN

Kebijakan yang telah dibentuk sangat penting untuk disahkan atau di legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan hak moral masyarakat untuk mengatur, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Maklum, legitimasi adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, dan hubungan ini lebih ditentukan oleh yang dipimpin, karena penerimaan dan pengakuan otoritas hanya datang dari yang diperintah. Kebijakan tersebut perlu dukungan dari masyarakat atau rakyat. Apabila kebijakan diterapkan tanpa persetujuan masyarakat akan ada ketakutan terkait penolakan atau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Padahal, kebijakan pendidikan melibatkan seluruh masyarakat atau rakyat dalam kegiatan tersebut.

5.REFERENSI

- Dedurro. 2012. "LEGITIMASI KEIJAKAN PENDIDIKAN DEMA-ROIS." 1-3.
- Dr. Dra. Poppy Ruliana, M. S. 2019. *Teori Komunikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. Irene Silviani, MSP. 2020. *KOMUNIKASI ORGANISASI*. edited by M. Dr. Irene Silviani. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Elih Yuliah. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir* 30. N:4.
- Ety Nur Inah. 2013. "PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN." *Jurnal Al-Ta'dib* 6(177):176-88. doi: 10.1190/segam2013-0137.1.
- Farid Setiawan, Dkk. 2007. "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan." 13(1):13. doi: 10.47435/jpdk.v6i2.625.
- Indriani, Rakhmawati. 2011. "Legitimasi Kebijakan Pendidikan." *Wordpress.Com* 4. Retrieved (wordpress.com/pendidikan/legitimasi-kebijakan-pendidikan/).
- Moha, Iqbal, and Dadang sudrajat. 2019. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif."
- MUHLIADI. 2013."KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK MENURUT IBN

KHALDUN Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial Jurusan Pemikiran Politik Islam Pada Fakultas Ushuluddin , Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar Oleh.”

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENGENAI PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH

Oleh :

Karina Septi Rahayu

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
karinaseptirahayu196@gmail.com

Abstrak

Pejabat “Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik. Namun pada prakteknya, PPAT sering terlibat dengan perkara hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pada proses maupun akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan PPAT itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya, atau bisa juga telah ada kesepakatan antara PPAT dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. “Penelitian ini menguraikan ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab dan akibat hukum PPAT mengenai keaslian tanda tangan para pihak dalam pembuatan akta jual beli tanah. Metode penelitian ini bersifat “normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”

Kata Kunci : Tanggung Jawab, PPAT, Keaslian Tanda Tangan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Hal tersebut tentu juga akan berdampak pada peningkatan di bidang jasa peralihan hak atas tanah yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik (Adjie, 2011).”

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan para pihak atau penghadap yang selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk akta otentik. Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna diantara para pihak dan ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan didalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan, keraguan dan ketidakbenaran akta tersebut (Tamrin, 2011).”

Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut, akan dijadikan dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum yang meliputi : jual beli , tukar menukar, hibah,

pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan (Mulyono, 2014).”

Beberapa tugas yang dilakukan oleh PPAT yaitu melakukan kegiatan seperti pendaftaran tanah dengan membuat akta yang menjadi bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik yang akan dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang ada, Perbuatan hukum disini yaitu Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, Pembagian Hak Bersama, dan Pemberian Hak Tanggungan (Harsono, 1995).”

Fungsi PPAT berperan untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak serta menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap akta otentik hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak/penghadap kedalam akta. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian” sebagaimana yang telah di ucapkan pada sumpah jabatan, yaitu dalam sumpah jabatan Pasal 34 ayat (1) Perkabam nomor 1 Tahun 2006 “bahwa, saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat, dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak”. “PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, sehingga pelaksanaannya melakukan asas

kecermatan atau kehati-hatian wajib dilakukan dalam proses pembuatan Akta yang salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada PPAT.”

Namun pada prakteknya, PPAT sering terlibat dengan perkara hukum, baik sebagai saksi, tergugat, turut tergugat maupun sebagai tersangka (Mulyono, 2014). Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pada proses maupun akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan PPAT itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak ada itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak), bisa juga telah ada kesepakatan antara PPAT dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan isu hukum di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan bentuk tanggung jawab PPAT dalam hal pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para pihak dalam proses pembuatan akta jual beli hak atas tanah.”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudju, 2009), selain itu juga didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Pemindahan hak merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam proses kegiatan peralihan hak atas tanah. Pemindahan hak dalam hal ini artinya dilakukan melalui kegiatan jual beli. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan melalui sebuah proses

pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Istilah jual beli berasal dari kata terjemahan *contract of sale* yang menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksud dengan” jual beli adalah : “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”. Effendi Perangin (1986) menyatakan bahwa : “Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual”.

Jual beli tanah pada umumnya dibuat dalam bentuk akta jual beli yang dibuat oleh PPAT guna proses pemindahan hak dari penjual ke pembeli. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah dilaksanakan oleh PPAT. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan jabatan PPAT yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Angreni & Wairocana, 2018).”

Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli, atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa bagi penjual harus dengan akta notaris, sedangkan surat kuasa bagi pembeli boleh dengan akta dibawah tangan (Saranaung, 2017). Selain penjual dan pembeli, pembuatan akta PPAT juga mengharuskan adanya saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang menurut peraturan perundang-undangan memenuhi syarat sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum. Saksi tersebut memberikan kesaksian terkait kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang diperlihatkan dalam pembuatan akta dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.”

Dokumen yang diserahkan penjual kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini adalah fotokopi “kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga, surat nikah, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (Saranaung, 2017). Dokumen yang diserahkan pembeli kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini adalah fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga, surat nikah (Santoso, 2013).”

PPAT wajib membacakan akta jual beli kepada para pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, prosedur pendaftaran pemindahan haknya. Akta PPAT dibuat sebanyak dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala

kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) diberi salinannya (Sinaga, 2007).”

Selanjutnya PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPAT” dalam rangka pendaftaran pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat adalah (Santoso, 2013):

- 1) Surat “permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak (pembeli) atau kuasanya;”
- 2) Surat “kuasa tertulis dari penerima hak (pembeli) apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak bukan penerima hak (pembeli);”
- 3) Akta jual “beli oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;”
- 4) Bukti “identitas pihak yang mengalihkan hak (penjual);”
- 5) Bukti “identitas pihak yang menerima hak (pembeli);”
- 6) Sertifikat hak atas tanah asli yang dialihkan (dijualbelikan);
- 7) Izin “pemindahan hak bila diperlukan;”
- 8) Bukti “pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dalam hal bea tersebut terutang, dan”
- 9) Bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh), dalam hal pajak tersebut terutang.

“Apabila dokumen-dokumen di atas telah diserahkan kepada kantor pertanahan setempat, maka selanjutnya proses balik nama sertifikat yaitu dari pemegang hak yang lama sebagai penjual menjadi pemegang hak yang baru sebagai pembeli oleh kepala kantor pertanahan kabupaten.kota setempat, selanjutnya diserahkan kembali kepada pemohon. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengenai Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Pada pelaksanaan jual beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari penjual kepada pembeli setelah

adanya pembayaran harga tanah. Pengalihan tanah dari penjual kepada pembeli tersebut harus disertai dengan penyerahan yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang. Pada faktanya kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, seperti disebutkan dalam Pasal 1482 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, berserta surat-surat bukti milik, jika ada, dan penandatanganan akta jual beli yang telah dibuat oleh PPAT.”

Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Dengan demikian, PPAT harus melakukan perbuatan hukum jual beli dengan lengkap dan jelas, sehingga apa yang ingin dibuktikan itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Berdasarkan pada **Pasal 263** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan, PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila ada pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah menyampaikan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT dapat dikenakan sanksi pidana, yakni Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” apabila PPAT mengetahui tentang upaya pemalsuan data tersebut. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar PPAT dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri dan hanya sebatas diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila ada pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah menyampaikan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT dapat dikenakan sanksi pidana,” yakni Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila PPAT mengetahui tentang upaya pemalsuan data tersebut. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam hal ini, PPAT dapat dikenakan pidana apabila turut serta dalam upaya pemalsuan data, PPAT dapat dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, sebagai contoh kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang yang dikatakan turut serta melakukan perbuatan apabila seseorang

tersebut mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan.”

Faktanya, apapun yang terjadi, seorang PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan tanggung jawab dan kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta siap untuk bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya. PPAT harus bertanggung jawab mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum, mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya, dan mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, mengenai sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli. Apabila PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, PPAT dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karenanya para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang dalam pembuatan akta jual beli tanah tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pembuatan akta jual beli tanah yang didasarkan pada itikad buruk yaitu data-data yang disampaikan kepada PPAT palsu, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian dalam pembuatan akta jual beli tanah tetap ada sampai adanya putusan dari Hakim Pengadilan Negeri.”

4. KESIMPULAN

Akta yang dibuat PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT berkewajiban untuk memeriksa persyaratan jual beli tanah untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, semua para penghadap menghadap PPAT secara bersama-sama untuk membubuhkan tanda tanganya di hadapan PPAT secara langsung, guna mengetahui keaslian data yang diberikan kepada PPAT. “Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar PPAT dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri. PPAT tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang disampaikan para pihak atau salah satu pihak dalam jual beli tanah. Apabila PPAT tahu kalau para pihak menyampaikan data-data yang palsu kepadanya. PPAT dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan tidak tertutup kemungkinan dituntut membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan secara perdata. Namun dalam praktiknya, PPAT tidak mau terlibat lebih jauh,

apabila terjadi kasus mengenai akta yang dibuatnya, mereka hanya mau memberikan kesaksian atas akta yang dibuatnya. Akibat hukum dari data-data yang disampaikan kepada PPAT palsu, adalah dapat dibatalkan. Demikian pula sertipikat tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, tentunya tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan.”

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama
- Angreni, N.K.D. & Wairocana, I.G.N. 2018. “Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Mulyono. 2014. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Yogyakarta : Cakrawala Media
- Harsono, Boedi. *Tugas dan Kedudukan PPAT, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia Edisi Desember 1995 No.6 Tahun XXV), Cet. 1, hlm. 478.*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana”
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Santoso, Urip. 2013. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cetakan III. Jakarta : Kencana
- Saranaung, F. M. 2017. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 1
- Sinaga, Sahat HMT. *Jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*. Bekasi : Pustaka Sutra
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA

Oleh :

Agista Yuwandhana

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
agistayuwandhana123@gmail.com

Abstrak

Guna “membangun sistem hukum yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat konstitusi, maka hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik hukum dalam merancang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan hukum merupakan produk politik yaitu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang sangat” ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Mengenai permasalahan terkait peraturan di Indonesia yang juga merupakan akibat daripada pengaruh politik adalah multitafsir, potensi konflik, tumpang tindih kewenangan, tidak taat asas, tidak harmonis/tidak sinkron antara peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal, tidak ada dasar hukumnya dan lain-lain. Penelitian ini menguraikan tentang peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan negara. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Negara

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (Soehino, 1980). Organisasi tersebut merupakan tata kerja dari alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan. Tata kerja tersebut melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing dari alat perlengkapan negara tersebut guna mencapai suatu tujuan tertentu (Soehino, 1980). Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut (Wahyudin et al, 2020). Guna mencapai suatu tujuan negara khususnya negara Indonesia, hal yang paling fundamental adalah bagaimana suatu pemerintahan berjalan sesuai dengan sistem hukum nasional yang didasarkan pada undang-undang sebagai dasar legalitas dalam bertindak (Iswantoro, 2018).”

Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara dan cita hukum yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Inti pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap produk hukum yang dibuat dan diterbitkan serta diberlakukan tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketentuan di atas.”

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) mengedepankan hukum sebagai

panglima tertinggi. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan (Sopiani dan Mubaroq, 2020). Sebagaimana diketahui bahwa hukum di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis didasarkan pada hukum kebiasaan (*customary law*) dan hukum adat, sedangkan hukum tertulis di Indonesia berbentuk peraturan perundang-undangan (Iswantoro, 2018).”

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Terdapat sistem hukum peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu adanya hierarki perundang-undangan sebagai berikut :”

1. “UUD 1945;”
2. “Ketetapan MPR;”
3. “Undang-Undang;”
4. “Peraturan Pemerintah;”
5. “Peraturan Presiden;”
6. “Peraturan Daerah Provinsi; dan”
7. “Peraturan Daerah”

Guna membangun sistem hukum yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat konstitusi, maka hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik hukum dalam merancang peraturan perundang-undangan, karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain

lembaga politik (*politic Body*)” (Marzuki, 2006). Menurut “M. Mahfud MD, *legal policy* dalam hal ini mencakup pada proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun (Moh. Mahfud, 2009). Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Moh. Mahfud, 2009).”

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Proses pembentukan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah suatu proses yang berawal dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para pembentuknya, yang dalam sistem demokrasi modern disebut legislatif (DPR) dan eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas dari pada peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab daripada pembentuknya.”

Pada kenyataannya, kualitas peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari berbagai data pengujian peraturan perundang-undangan di lembaga yudikatif. Setiap tahunnya banyak peraturan perundang-undangan yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah konstitusi (MK) (Iswantoro, 2018). Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Iswantoro, 2018). Moh. Mahfud MD (1999) menegaskan bahwa minimal terdapat 2 (dua) alasan yang menyebabkan sebuah Undang-Undang perlu ditata, yaitu pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat regulasi atas dasar kepentingan mereka atau kelompok yang dominan di dalamnya, kedua, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat berimbas kepada rakyat Indonesia, yang pada akhirnya tujuan negara yang diamanatkan konstitusi tidak tercapai secara utuh dan maksimal.”

BAPPENAS telah mengidentifikasi bahwa permasalahan terkait peraturan di Indonesia antara lain adalah multitafsir, potensi konflik, tumpang tindih kewenangan, tidak taat asas, tidak

harmonis/tidak sinkron antara peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal, tidak ada dasar hukumnya, tidak adanya aturan pelaksanaannya, tidak konsisten, menimbulkan beban yang tidak perlu baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak (Iswantoro, 2018).” Benyamin Akzin menerangkan bahwa “norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, seharusnya dalam pembentukannya dilakukan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, sebab norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan dari masyarakat. Sudah seharusnya suatu produk legislasi dibentuk berdasarkan kepentingan politik kebangsaan, dan disisi yang lain tiap substansi produk hukum juga akan menunjukkan kepentingan-kepentingan dari penguasa (Direktorat, 2010). Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai peranan politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap” penyelenggaraan negara di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk membahas mengenai permasalahan atau isu hukum yang sedang dianalisa oleh penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudju, 2009), selain itu juga didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2014).”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara”

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek* (Syaukani dan Thohari, 1999). Menurut Padmo Wahjono

(1986), politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, dengan demikian politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Hartono, 1991). Lebih lanjut Moh. Mahfud MD (2009) menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan publik yang sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.”

Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka hingga pasca reformasi bangsa Indonesia telah berupaya untuk membenahi sistem hukum nasional sesuai dengan perkembangan negara Indonesia saat ini. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik tersebut, karakter produk hukum juga turut berubah. Terjadinya perubahan tersebut dikarenakan hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah apabila politik yang melahirkannya berubah.”

Tampak jelas dan terbukti bahwa ”hukum sebagai produk politik” sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. “Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Suharto jatuh, maka peraturan hukum juga turut serta diubah, terutama hukum-hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan yakni hukum tata negara. Berikut ini beberapa” contohnya (Moh. Mahfud, 2009):

1. UU tentang “Partai Politik dan Gelangan Karya diganti dengan UU tentang Kepartaian. Jika semula rakyat dipaksa untuk hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial politik tanpa boleh mengajukan alternatif, maka sekarang

rakyat diperbolehkan membentuk partai politik yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui pemilu dengan memberlakukan *electoral theshold dan/atau parliamentary threshold*.”

2. UU tentang “Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Penyelenggara pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri.”
3. UU tentang “Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu. Perubahan atas UU ini sampai tahun 2004 berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota MPR secara lebih terbuka, namun sejak pemilu 2004 perubahan atas UU sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan memasukkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang baru sejalan dengan amandemen atas UUD 1945” yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4. UU tentang Pemerintah “Daerah juga diganti, dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas otonomi luas, dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak UU lain yang di ubah sejalan dengan perubahan politik dari Orde Baru ke Reformasi. Seperti tentang ketentuan Surat Isin Penerbitan Pers (SIUPP) di cabut, Dwifungsi ABRI dihapus, TNI pisah dari POLRI, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PA) dihapus, Kekuasaan kehakiman disatukan, dan masih banyak contoh lainnya.”

Perubahan hukum bukan hanya mengantarkan perubahan berbagai UU seperti yang dikemukakan di atas, melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan UUD 1945. Pada tingkat Tap MPR yang mula-mula ditiadakan adalah Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, tetapi akhirnya Tap MPR sendiri dinyatakan dihapus dari peraturan perundang-undangan” sejalan dengan perubahan atau amandemen atas UUD 1945 (Moh. Mahfud, 2009).

Perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antar lembaga negara dari yang vertikal struktural menjadi horizontal-fungsional sehingga ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara diturunkan derajatnya menjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR, DPD,

Presiden, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. Dengan posisi yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di dalam tata hukum tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai peraturan. Adapun Tap MPR yang sudah terlanjur ada yang jumlahnya mencapai 139 Tap sejak tahun 1960 hingga tahun 2003 tetap berlaku sesuai dengan perintah pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen, MPR mengeluarkan Tap No. I/MPR/2003 merupakan Tap Terakhir yang menutup semua Tap MPR yang bersifat mengatur dalam arti tidak boleh ada lagi setelah itu Tap MPR yang bersifat mengatur. Penghapusan Tap MPR seperti yang telah disinggung di atas sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Perubahan UUD 1945 itu sendiri merupakan produk politik hukum di Indonesia pasca reformasi. Terdapat hal lain yang memperkuat alasan dilakukannya amandemen atau perubahan UUD 1945 yakni alasan konstitusi sebagai *resultante* atau produk kesepakatan politik sebagaimana dikemukakan oleh KC Whese. Sebagai *resultante*, konstitusi merupakan kesepakatan pembuatannya sesuai dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada saat dibuat (Wheare, 1975).”

Secara berturut-turut beberapa lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum tertentu setelah adanya amandemen UUD 1945, sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012.):”

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 ayat (1))
2. Presiden (Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 22 Ayat (1).
3. Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 22 Ayat (2)).
4. Dewan Perwakilan Daerah. (Pasal 22D).

Berdasarkan rumusan Pasal-pasal di atas, kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.”

No	Lembaga	Jenis PPU	Dasar Hukum	Keterangan
1	MPR	UUD	Pasal 3 ayat (1)	Mengubah dan Menetapkan
		Keputusan MPR	Pasal 7 Bayat (7)	Mengambil dan Menyetujui
2	Presiden	Undang-Undang	Pasal 5 ayat (1)	Mengajukan RUU
			Pasal 20 ayat (2)	Membahas dan Menyetujui bersama DPR
		Peraturan Pemerintah	Pasal 20 ayat (4)	Mengesahkan RUU
			Pasal 5 ayat (2)	Menetapkan
3	DPR	Undang-Undang	Pasal 22 ayat (1)	Menetapkan
			Pasal 20 ayat (1)	Membentuk
		Perpu	Pasal 20 ayat (2)	Membahas dan Menyetujui bersama Presiden
4	DPD	Undang-undang	Pasal 22 Dayat (1)	Dapat mengajukan RUU ke DPR terkait Otda
			Pasal 22 ayat (2)	Ikut membahas RUU

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang sangat terbatas jika dibandingkan dengan

DPR, DPD hanya diberikan fungsi untuk mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya. Sementara itu DPR memiliki wewenang merencanakan, menyusun dan membahas RUU, memberikan persetujuan terhadap Perpu.”

Lembaga yang diberikan kewenangan dalam membuat peraturan yang dibuat dalam bentuk RUU sebagaimana disebutkan di atas harus memenuhi apa yang diinginkan masyarakat dalam hal ini di jelaskan di pasal 5 Undang-undang No 15 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (Wahyudi et al, 2020).”

Politik hukum pada dasarnya merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara melalui alat perlengkapan negara (Pemerintah, DPR, dan sebagainya) pada hukum. Campur tangan negara dengan alat perlengkapannya pada hukum, dalam hal; Pertama, penciptaan hukum, yaitu negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban; Kedua, pelaksanaan hukum, yaitu negara berkewajiban mengadakan alat perlengkapan negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara tertentu yang ditentukan oleh negara, antara lain melalui pengadilan, dan Ketiga, perkembangan hukum, yaitu hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Negara berusaha mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat, sehingga negara mempengaruhi perkembangan hukum (Badan Pembinaan, 2012).”

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden, berhak mengajukan RUU kepada DPR, sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undang adalah bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif). Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat Konstitusi. Pada sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”

- 4) UUD 1945;
- 5) Ketetapan MPR;
- 6) Undang-Undang;
- 7) Peraturan Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden;

- 9) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 10) Peraturan Daerah/Kota;

Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki diatas. Tidak satu hukum pun boleh bertentangan dengan hierarki ini. Adapun tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada ataupun materi muatannya yang bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi maka, telah ada mekanisme evaluasi terhadapnya. Untuk peraturan perundang-undangan yang sekiranya bertentangan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 maka mekanisme pengujiannya adalah dengan mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sekiranya bertentangan dengan undang-undang, maka mekanisme pengujiannya pada kekuasaan Mahkamah Agung. Namun perlu diketahui, bahwa kendati bersifat hierarki bukan berarti perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan selalu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada persis diatasnya." Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu semata-mata dalam "rangka mensinkronkan atau menghindari konflik pelaksanaan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut."

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Tujuan dari Prolegnas dan Prolegda ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan adanya Prolegnas dan Prolegda ini tidak berarti tidak dapat membuat suatu Rancangan Undang-Undang atau Raperda di luar Prolegnas dan Prolegda tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam atau keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi nasional atas RUU tersebut. Hal yang sama dengan Raperda, DPRD ataupun Gubernur dapat mengajukan Raperda diluar Prolegda untuk mengatasi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam, akibat adanya kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi daerah atas Raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum Provinsi. Terkait dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut adalah,"

1. Asas pengayoman, "yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat."

2. Asas kemanusiaan, yaitu "bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap penduduk Indonesia secara proporsial."
3. Asas kekeluargaan, yaitu "bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan."
4. Asas kenusantaraan, yaitu "bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sekaligus materi muatan yang peraturan perundang-undangan yang di daerah pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."
5. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu "bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."
6. Asas Keadilan, yaitu "bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara."
7. Asas kesamaan "dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial."
8. Asas ketertiban "dan kepastian hukum, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum."
9. Asas keseimbangan, "keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara."

Selain itu terdapat beberapa asas lainnya yang disesuaikan dengan bidang hukum yang bersangkutan. Sebagaimana dalam hukum Pidana misalnya; asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah." Sedangkan pada hukum perdata khususnya hukum perjanjian seperti, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas tersebut wajib dianut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pembentukannya akan memenuhi seluruh kaidah secara holistik ataupun menyeluruh. Asas-asas tersebutlah yang menjadi pedoman dan pakem bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain asas-asas tersebut, dalam membentuk peraturan

perundang-undangan harus dilakukan dengan dasar adanya.”

- a. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukannya;
- b. Harus dibuat oleh lembaga yang tepat dan memang berwenang;
- c. Materi muatannya harus tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarki;
- d. Efektifitas aplikasinya di dalam masyarakat baik secara sosiologis-filosofis maupun yuridis.
- e. Benar-benar “dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;”
- f. Sistematika, “pilihan kata bahkan istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya;”
- g. Seluruh lapisan “masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan partisipasi masyarakat secara langsung dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan telah dijamin dalam Undang-undang. Jaminan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar/lokakarya/diskusi. Masyarakat yang dimaksud adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undang.

Begitu pula setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana hanya boleh dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemidanaan terkait dengan pembatasan hak asasi masyarakat, sehingga untuk membatasi hak-hak nya perlu pendapat, pertimbangan dan masyarakat yang bersangkutan dilibatkan dalam proses pembentukannya. Karena pada akhirnya, hak-hak masyarakat lah nanti nya yang akan dibatasi.”

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengaturan materi pokok baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya hanya mengatur dari tahapan perencanaan sampai dengan proses pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

ketentuan terbaru dari undang-undang tersebut di atas, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat secara politik hukum ada tiga hal penting dalam perubahan undang-undang ini yakni:”

1. *Carry-over*, “bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.”
2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, kegiatan ini “untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu undang-undang; dan”
3. Pembentukan peraturan “perundang-undangan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Perwujudan ini tentunya mengharapkan ada kesinambungan “antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol. Ini juga merupakan pekerjaan masih perlu diwujudkan secara nasional.”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka hingga pasca reformasi bangsa Indonesia telah berupaya untuk membenahi sistem hukum nasional sesuai dengan perkembangan negara Indonesia saat ini, Perubahan hukum bukan hanya mengantarkan perubahan berbagai UU melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan UUD 1945, Lembaga yang diberikan kewenangan dalam membuat peraturan yang dibuat dalam bentuk RUU yang harus memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, Terkait dengan partisipasi masyarakat secara langsung dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan telah dijamin dalam Undang-undang sebagaimana jaminan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.”

Untuk menentukan arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya hanya mengatur dari tahapan perencanaan sampai dengan proses pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat secara politik hukum ada tiga hal penting dalam perubahan undang-undang ini yakni:”

1. *Carry-over*, “bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.”
2. Pemantauan “dan peninjauan terhadap undang-undang, kegiatan ini untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu undang-undang; dan”
3. Pembentukan “peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Perwujudan ini tentunya mengharapkan ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol sebagaimana peraturan perundang-undangan yang sekiranya bertentangan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 maka mekanisme pengujiannya adalah dengan mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Agung, Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sekiranya bertentangan dengan undang-undang, maka mekanisme pengujiannya pada kekuasaan Mahkamah Agung.”

Maka dengan adanya pengaturan ini merupakan langkah perbaikan produk politik hukum indonesia guna mewujudkan peran pemerintah dalam proses pembentukan peraturan yang lebih eksplisit dan terarah agar tidak terjadinya tumpang tindih dan meminimalisir kepentingan elit politik, sehingga terciptanya peraturan baik dari hulu sampai dengan hilir tidak terdapat permasalahan.”

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2010. *Pedoman Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undang*
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991
- Iswantoro. 2018. “Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Majelis : Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 05/Mei
- Marzuki, HM. Laica. 2006. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 Nomor 1
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana”
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sopiani dan Mubaroq, Zinal. 2020. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 2
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudin, Yoyon M. Darusman, dan Bambang Wiyono. 2020. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Lex Specialist*, Vol. 1 No. 2, 2020
- Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1986
- Wheare, K.C. 1975. *The Modern Constitutions*. 3rd Impression. London-New York-teronto : Oxford University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012.

ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA TOPIK FLUIDA DINAMIS

Oleh:

Siti Nurjanah¹⁾, Tomo Djudin²⁾, Hamdani³⁾

¹²³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

¹email: sn5111838@gmail.com

²email: tomo.djudin@yahoo.com

³email: hamdani@fkip.untan.ac.id

Abstrak

Salah satu kemampuan yang fundamental untuk dimiliki di abad 21 yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Namun, data dari penilaian internasional mengindikasikan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta didik Indonesia dalam bidang fisika masih belum optimal. Untuk itu diperlukan adanya analisis lebih lanjut terkait dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menerapkan teknik *simple random sampling* dalam pemilihan sampel. 54 orang peserta didik SMA Negeri 3 Pontianak di kelas XI IPA dilibatkan sebagai sampel untuk penelitian ini. Perolehan data penelitian dilakukan dengan menerapkan teknik pengukuran berupa tes kemampuan berpikir kritis pada topik fluida dinamis. Tiga soal esai termuat pada tes penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis masih tergolong rendah.

Kata kunci: Fluida Dinamis; Kemampuan Berpikir Kritis

1. PENDAHULUAN

Kemampuan berpikir kritis sebagai tujuan utama pendidikan bahwa seluruh dunia sudah berubah dan terus akan berubah dengan kecepatan yang semakin cepat (Halpern, 1998). Kemampuan berpikir kritis termasuk satu dari syarat-syarat mendasar keterampilan abad 21 (Bao & Koenig, 2019). Peserta didik juga dapat mengatasi masalah non-rutin di dunia modern menggunakan kemampuan berpikir kritis (Kardoyo dkk., 2020). Kemampuan berpikir kritis penting untuk dikuasai oleh peserta didik agar mereka dapat bersaing secara global untuk menghadapi tantangan abad 21 (Živkovic, 2016).

Membelajarkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran berguna untuk menyiapkan peserta didik agar nantinya bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus mandiri sebagai salah satu tujuan pendidikan jangka panjang (Luvia dkk., 2021). Beberapa penelitian menunjukkan korelasi positif antara berpikir kritis dengan variabel esensial pembelajaran lainnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah bagi peserta didik (Susilowati dkk., 2020), serta bisa membantu peserta didik meningkatkan hasil belajar kognitif fisika mereka (Khotimah dkk., 2017; Lumbu'u dkk., 2019; Wulandari, 2018). Maka dari itu, eksistensi dari kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran bersifat fundamental, termasuk pada pembelajaran fisika.

Menurut Martin (dalam Siegel, 1988), pembelajaran fisika (sains) seharusnya menghasilkan orang-orang yang dijiwai dengan semangat fisika (sains), kemudian dengan semangat itu

digunakan dalam konteks umum yang relevan. Peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran fisika (Sains) berhak untuk mempertanyakan, menuntut alasan dan pembenaran, dan menyerahkan refleksi dan konsepsi untuk penilaian independen mereka sendiri (Siegel, 1988). Berpikir kritis menjadi strategi pembelajaran efektif dalam mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan pemikiran peserta didik sekaligus melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran (Dehghayedi & Bagheri, 2018; Dewi dkk., 2019).

Namun, jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, kemampuan berpikir kritis peserta didik Indonesia dalam bidang fisika (sains) masih belum semumpuni negara-negara lain. Berpikir kritis merupakan kegiatan berpikir kompleks atau berpikir tingkat tinggi, dibangun dari kemampuan berpikir lain yang lebih sederhana, serta lebih mudah untuk diperoleh (Gelder, 2005), sehingga tingkat kemampuan berpikir kritis suatu negara dapat diungkap dengan meninjau data penilaian internasional dengan tuntutan penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Indonesia menduduki peringkat delapan terbawah (dari 70 negara) dalam penilaian tes survei *Programme for International Students Assessment*, yang disingkat PISA, pada tahun 2015 untuk materi sains (Tanjung & Dwiana, 2019). Pada tahun 2015, hasil *Trends in International Mathematics and Scientific Study*, dapat disebut juga sebagai TIMSS melaporkan bahwa Indonesia masuk ke dalam salah satu dari 16 negara yang memperoleh rata-rata nilai pencapaian sains lebih rendah dari rata-rata global (500). Indonesia termasuk di antara tiga terbawah dari 53 negara yang ikut serta dalam kompetisi (Abdurrahman dkk.,

2019). Dalam disiplin ilmu fisika, Michael (2013) menyoroti bahwa pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat dua negara terbawah (40 dari 42) dalam hal prestasi fisika saat dinilai dari komponen penalaran (Liana dkk., 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan kemampuan berpikir kritis peserta didik Indonesia dalam bidang fisika masih belum optimal.

Berpikir tingkat tinggi melampaui pengamatan dasar fakta dan menghafal, melibatkan pemecahan masalah dan pembelajaran keterampilan mengevaluasi yang kompleks seperti berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan keterampilan melatih berbagai kapasitas kognitif tingkat rendah dalam keseluruhan yang terintegrasi (Gelder, 2005). Menurut Bradey (dalam Bradey, 2008), berpikir kritis termasuk dalam jenis penalaran kompleks, menuntut secara signifikan adanya penalaran tingkat tinggi (Almeida & Franco, 2011). Kompetensi individu dalam berpikir tingkat tinggi (dalam Brady, 2008) ialah metode pengajaran yang menempatkan peserta didik untuk dapat berpikir kreatif, rasional, metakognitif, reflektif, serta kritis (Syarifah dkk., 2013). Sebagai tambahan, berpikir kritis, menurut Robert Ennis (1989), adalah berpikir rasional dan analitis yang berusaha untuk menentukan apakah sesuatu hal dapat dipercaya atau dilakukan (Fisher, 2009). Seseorang dinyatakan pemikir kritis, dalam pandangan Ennis, jika dia memiliki keterampilan, kemampuan, atau kecakapan yang diperlukan.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Affandy (2019) untuk menggambarkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis di SMA Batik 2 Surakarta. Karena analisis kemampuan berpikir kritis pada peserta didik di topik fluida dinamis belum pernah dibahas secara mendalam, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk topik fluida dinamis, yang akan menyajikan gambaran tentang kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik ini beserta hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam menjawab tes. Selanjutnya, hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi bagi dunia pendidikan dalam mendesain pembelajaran pada topik fluida dinamis yang dapat memfasilitasi kemampuan berpikir kritis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian dengan pendekatan secara deskriptif kuantitatif, dimana karakteristik dari penelitian deskriptif yaitu ini mengumpulkan serta menyajikan data tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiahnya (Arikunto, 2005). Penelitian berlangsung di SMA Negeri 3 Pontianak. Penelitian ini melibatkan 54 orang peserta didik yang duduk di kelas XI IPA pada semester genap tahun ajaran 2021/2022, dimana mereka telah mempelajari materi fluida dinamis sebelum penelitian ini dilaksanakan. Pemilihan sampel

penelitian menerapkan teknik *simple random sampling*.

Teknik pengumpulan data yang yakni teknik pengukuran menggunakan instrumen penelitian. Mengacu pada empat indikator berpikir kritis dari Ennis dan Norris (1989), instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis. Indikator tersebut antara lain memberikan penjelasan sederhana, mengatur strategi dan taktik, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan memberikan kesimpulan. Instrumennya berupa tes dalam bentuk esai. Soal-soal tersebut didasarkan pada tujuan pembelajaran topik fluida dinamis yang tertuang pada kurikulum 2013 revisi, kemudian disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Soal penelitian terdiri atas tiga item. Soal ini telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Validitas isi dinilai oleh tiga orang ahli. Kemudian, dilakukan uji validitas konstruk pada soal penelitian. Validitas konstruk berguna untuk melihat seberapa baik hasil yang diperoleh dalam mengukur dengan teori yang ada (Ghozali, 2013). Uji validitas konstruk dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi *product-moment* menggunakan aplikasi SPSS 25.0 berdasarkan data uji coba soal terhadap 37 orang peserta didik kelas XI IPA yang telah mempelajari materi fluida dinamis. Bertolak dari hasil uji validitas konstruk, dari total 4 item tes terdapat 1 item tidak valid dan 3 item valid. Item tidak valid sifatnya gugur dan tidak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas dimana didapatkan nilai sebesar 0,609, dimana koefisien *Cronbach's Alpha* (α) $\geq 0,60$. Dengan begitu, ini berarti instrumen tes bersifat reliabel dengan konsistensi internal *acceptable*.

Analisis data penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menerapkan statistik deskriptif. Untuk setiap indikator berpikir kritis, analisis kemampuan berpikir kritis peserta didik dinyatakan dalam bentuk persentase. Berikut ini merupakan uraian bagaimana analisis data penelitian dilakukan:

$$P = \frac{S}{S_{max}} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

S = Skor

S_{max} = Skor maksimal

Selanjutnya, data persentase tersebut diklasifikasikan menjadi tingkat penguasaan berdasarkan kategorisasi dari Syah (1999), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategoriberpikirkritis dari Syah (1999)

Tingkat Penguasaan (dalam %)	Kategori
0 – 20	Sangat Rendah (SR)
21 – 40	Rendah (R)
41 – 60	Sedang (S)
61 – 80	Tinggi (T)
81 – 100	Sangat Tinggi (ST)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dilakukan mengacu pada empat indikator berpikir kritis dari Ennis dan Norris (1989). Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi kinerja peserta didik.

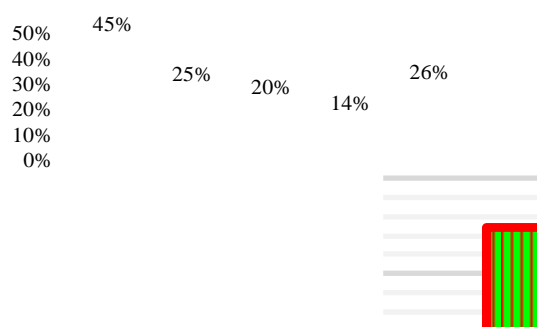
Tabel 2 Rekapitulasi hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik

Statistik	Nilai
Skor ideal	48
Skor minimum	4
Skor maksimum	30
Rata-rata	12,61
Standar deviasi	6,58

Penguasaan berpikir kritis peserta didik secara umum masih rendah. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan dari Affandy (2019) bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida dinamis masih rendah. Kurang optimalnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diakibatkan oleh penerapan pembelajaran yang sifatnya kurang efektif (Nurazizaha, Sinaga, & Jauhari, 2017), serta peserta didik yang tidak terbiasa memaksimalkan potensi berpikirnya melalui pembelajaran aktif (Darmaji, dkk., 2021). Bisa juga disebabkan oleh kurangnya pembiasaan, yang dapat membantu peserta didik memperkuat kemampuan berpikir kritisnya (Nurazizaha dkk., 2017). Peserta didik belum optimal dalam menjawab tes kemampuan berpikir kritis, seperti terdapat beberapa bagian indikator yang tidak diisi atau kurang tepat dalam mengisi bagian indikator. Selama tes, beberapa peserta didik bertanya “Apakah boleh hanya mengisi satu soal saja? Karena menurut saya soalnya sangat sulit.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan berbagai temuan penelitian tentang analisis kemampuan berpikir kritis peserta didik di Indonesia pada berbagai topik fisika yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah (Ardiyanti & Nuroso, 2021; Permata dkk., 2019; Rosyidah dkk., 2020; Umam dkk., 2020).

Grafik 1 menunjukkan persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan soal fluida dinamis pada masing-masing indikator berpikir kritis.



Grafik

1. Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik menurut empat indikator berpikir kritis dari Ennis dan Norris (1989)

Dari grafik 1, tiap-tiap indikator berpikir kritis, menunjukkan besar persentase yang berbeda-beda. Besar persentase menjadi representasi penguasaan kemampuan berpikir kritis oleh peserta didik. Berikut ini merupakan rincian kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk masing-masing indikator.

Indikator pertama: Memberikan penjelasan sederhana

Kemampuan untuk memahami masalah dan memberikan penjelasan sederhana terkait dengan permasalahan, khususnya dengan menuliskan variabel yang diketahui dan variabel yang ditanyakan pada permasalahan, merupakan indikator memberikan penjelasan sederhana. Indikator ini memperoleh tingkat penguasaan dengan kategori sedang. Hambatan yang dialami peserta didik pada indikator ini yakni terdapat beberapa peserta didik menuliskan bagian ditanya dengan kurang lengkap, kurang tepat, atau tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada permasalahan. Namun, indikator ini memiliki penguasaan paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Sebagian besar peserta didik sudah mampu memberikan penjelasan sederhana melalui identifikasi variabel yang diketahui dan tidak diketahui secara lebih baik dibanding indikator lainnya. Karena, peserta didik sudah tidak asing dalam penyelesaian soal dengan cara menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal terlebih dahulu. Maka dari itu, tidak mengherankan jika indikator ini dianggap bagian yang paling mudah. Pada saat berlangsungnya tes, ada peserta didik yang bertanya “Apakah boleh hanya mengisi bagian memberikan penjelasan sederhananya saja?” Bagian diketahui dan ditanya merupakan bagian yang mirip dengan operasionalisasi dari aspek memahami masalah pada metode pemecahan masalah Polya yang merupakan metode pemecahan masalah paling sering digunakan di kelas (Hutama, 2011). Temuan yang diperoleh sejalan dengan temuan oleh Affandy (2019) bahwa dengan memfokuskan hal yang ditanyakan dalam soal, peserta didik sudah mampu memberikan penjelasan sederhana. Temuan dari Sulviana (2021) juga memperoleh hasil yang sejalan bahwa peserta didik sudah baik dalam memberikan penjelasan sederhana.

Indikator kedua: Mengatur strategi dan taktik

Indikator mengatur strategi dan taktik, seperti kemampuan untuk menggambarkan masalah dan mengidentifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya (dalam hal ini berarti konsep, prinsip, atau hukum fisika yang relevan dengan konteks permasalahan). Meskipun bertengger sebagai indikator dengan persentase/penguasaan tertinggi kedua dibandingkan empat indikator yang ada, indikator ini masih tergolong ke dalam tingkat penguasaan rendah. Peserta didik mengalami hambatan dalam mengatur strategi dan taktik, yakni peserta didik belum optimal dalam merepresentasikan permasalahan ke gambar, serta

belum menuliskan prinsip fisika yang akan digunakan secara lengkap dan mendalam. Representasi gambar yang dijawab, sebagian besar hanya menuliskan kembali gambar yang terdapat pada soal, sehingga aktivitas berpikir untuk mengatur strategi dan taktik masih belum optimal. Sebagian kecil peserta didik tidak mengisi bagian representasi masalah ke gambar. Temuan ini sejalan dengan temuan dari (Sari, 2018), dimana peserta didik kesulitan dalam memvisualisasikan masalah ke gambar. Di sisi lain, peserta didik sudah bisa menuliskan prinsip fisika yang digunakan, namun kurang lengkap. Terdapat peserta didik menuliskan prinsip fisika yang akan digunakan secara kurang tepat, seperti hanya menyebutkan nama hukum maupun prinsip yang akan digunakan, bahkan sama sekali tidak menuliskan prinsip fisika yang akan digunakan. Penyebab peserta didik mengalami kesulitan dalam menuliskan prinsip fisika yang digunakan yaitu mereka kurang menguasai konsep (Sari, 2018). Temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Nurazizah (2017) bahwa peserta didik belum bisa memilih kriteria untuk mempertimbangkan solusi yang mungkin dengan baik. Temuan dari Afriana (2021) juga menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis pada indikator ini masih tergolong rendah.

Indikator ketiga: Memberikan penjelasan lanjutan

Indikator memberikan penjelasan lanjutan berkaitan dengan penalaran yang dilakukan untuk menggunakan informasi yang telah didapatkan. Indikator ini dicirikan dengan kemampuan untuk menuliskan hipotesis dan melakukan pengujian hipotesis mengaplikasikan konsep, prinsip, maupun hukum Fisika yang relevan untuk memecahkan masalah sehingga pada akhirnya menghasilkan solusi yang layak. Berdasarkan analisis data, indikator ini tergolong ke dalam tingkat penguasaan sangat rendah. Hambatan yang dialami peserta didik pada indikator ini yakni sebagian kecil peserta didik mengosongkan bagian hipotesis atau menuliskannya secara kurang tepat. Sebagian besar peserta didik masih menerapkan prinsip fisika secara kurang tepat dan analisis yang dilakukan masih kurang dalam atau hanya dituliskan seadanya berupa konsep dasarnya saja. Analisa jawaban peserta didik yang menjawab kurang tepat yakni salah dalam mengaplikasikan nilai luas permukaan untuk mencari debit air sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Terdapat juga beberapa peserta didik yang tidak menuliskan penerapan prinsip fisika, bahkan mengosongkan bagian memberi penjelasan lanjutan. Rendahnya penguasaan indikator ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi, sehingga peserta didik kesulitan dalam menyelesaikannya (Najaah dkk., 2020). Walaupun peserta didik sudah memahami konsep tertentu, mereka masih kesulitan dalam menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan (Najaah dkk., 2020). Temuan ini sejalan dengan hasil yang

diperoleh Ariani (2020) bahwa peserta didik menghadapi kesulitan dalam menguraikan penyelesaian soal dengan melakukan analisa secara mendalam.

Indikator keempat: Memberikan kesimpulan

Indikator memberikan kesimpulan dicirikan dengan kemampuan untuk membandingkan temuan yang diperoleh dengan hipotesis awal sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Berdasarkan analisis data, indikator ini merupakan indikator dengan penguasaan terendah dibanding indikator lainnya, tergolong ke dalam tingkat penguasaan sangat rendah. Hambatan yang dialami peserta didik pada indikator ini yakni peserta didik masih memberikan kesimpulan secara kurang tepat. Bahkan, banyak peserta didik yang mengosongkan bagian memberikan kesimpulan dan hanya menjawab hingga perhitungan akhir di bagian memberikan penjelasan lanjutan. Peserta didik lebih mengutamakan perhitungan dibanding kesimpulan seluruh proses dan temuan yang diperoleh (Wardani dkk., 2021). Temuan ini sejalan dengan temuan dari Ariani (2020) dan Sulviana (2021) bahwa peserta didik menghadapi kesulitan untuk memberikan kesimpulan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penguasaan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPA di SMA Negeri 3 Pontianak pada tiap indikatornya bervariasi. Indikator yang tergolong pada tingkat penguasaan sedang yakni memberikan penjelasan sederhana. Indikator yang tergolong pada tingkat penguasaan rendah yakni mengatur strategi dan taktik. Sedangkan, dua indikator lainnya yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut dan memberikan kesimpulan tergolong pada tingkat penguasaan sangat rendah. Secara umum, hasil analisis data menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik fluida dinamis masih tergolong rendah. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan teknik pengumpulan data berupa wawancara agar data yang diperoleh lebih optimal. Penelitian selanjutnya dapat melakukan upaya untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran fisika, khususnya pada topik fluida dinamis.

5. REFERENSI

- Abdurrahman, A., Setyaningsih, C. A., & Jalmo, T. (2019). Implementating multiple representation-based worksheet to develop critical thinking skills. *Journal of Turkish Science Education*, 16(1), 138–155. <https://doi.org/10.12973/tused.10271a>
- Affandy, H., Aminah, N. S., & Supriyanto, S. (2019). Analisis keterampilan berpikir kritis siswa pada materi fluida dinamis di SMA Batik 2 Surakarta. *Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF)*, 9(1), 25–33. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/jmpf/article/view/31608>

- Afriana, N., Halim, A., & Syukri, M. (2021). Analisis karakteristik keterampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal ujian nasional. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jppipa.v7i2.627>
- Almeida, L. da S., & Franco, A. H. R. (2011). Critical thinking: Its relevance for education in a shifting society. *Revista de Psicología*, 29(1), 175–195.
- Ardiyanti, F., & Nuroso, H. (2021). Analisis tingkat keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI MIPA dalam pembelajaran Fisika. *Karst: Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya*, 4(1), 21–26. <https://doi.org/10.46918/karst.v4i1.945>
- Ariani, T. (2020). Analysis of students' critical thinking skills in physics problems. *Kasuari: Physics Education Journal (KPEJ)*, 3(1), 1–17. Diambil dari <http://jurnal.unipa.ac.id/index.php/kpej>
- Arikunto, S. (2005). *Management penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bao, L., & Koenig, K. (2019). Physics education research for 21st century learning. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s43031-019-0007-8>
- Bonitalia, B., Hatibe, A., & Pasaribu, M. (2019). Effect of critical abilities thinking and logical thinking on student's Physics learning achievement at XII SMAN 2 Palu. *Jurnal Riset Pendidikan MIPA*, 3(2), 54–61. <https://doi.org/10.22487/j25490192.2019.v3.i2.pp54-61>
- Darmaji, Kurniawan, D. A., Astalini, & Dari, R. W. (2021). Description of students critical thinking ability in temperature and calor material. *JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika)*, 6(2), 98–105. <https://doi.org/10.26737/jipf.v6i2.1895>
- Dehghayedi, M., & Bagheri, M. S. (2018). EFL teachers' learning and teaching beliefs: Does critical thinking make a difference? *International Journal of Instruction*, 11(4), 223–240. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.11415a>
- Dewi, N. R., Magfiroh, L., Nurkhalisa, S., & Dwijayanti, I. (2019). The development of contextual-based science digital storytelling teaching materials to improve students' critical thinking on classification theme. *Journal of Turkish Science Education*, 16(3), 364–378. <https://doi.org/10.12973/tused.10288a>
- Fisher, A. (2009). *Berpikir kritis: sebuah pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Gelder, T. (2005). Teaching critical thinking: Some lessons from cognitive science. *College Teaching*, 53(1), 41–48. <https://doi.org/10.3200/CTCH.53.1.41-48>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halpern, D. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skills, structure training, and metacognitive monitoring. *American Psychologist*, 53(4), 449–455. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.4.449>
- Hutama, F. S. (2011). *Penggunaan strategi pemecahan masalah model Polya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pecahan siswa kelas IV SDN Wiwongso 01 Kecamatan Ajung tahun 2010/2011* (Universitas Jember). Universitas Jember. Diambil dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1400>
- Kardoyo, Nurkhin, A., Muhsin, & Pramusinto, H. (2020). Problem-based learning strategy: Its impact on students' critical and creative thinking skills. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1141–1150. <https://doi.org/10.12973/EU-JER.9.3.1141>
- Khotimah, K., Nyeneng, I. D. P., & Sesunan, F. (2017). Pengaruh kemampuan berpikir kritis dan respon bahan ajar multirepresentasi terhadap hasil belajar. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 5(3).
- Liana, N., Suana, W., Sesunan, F., & Abdurrahman. (2018). Pengembangan soal tes berpikir tingkat tinggi materi fluida untuk SMA. *Journal of Komodo Science Education*, 01(01), 66–78. Diambil dari <http://ejournal.stkipsantupaulus.ac.id/index.php/jkse>
- Lombu'u, R., Ali, M. S., & Helmi. (2019). *Pengaruh kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar Fisika peserta didik SMA Negeri 2 Gowa*.
- Luvia Rangi, N., Yokhebed, Ramli, M., & Yuliani, H. (2021). Meta-analysis of the effectiveness of problem-based learning towards critical thinking skills in science learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1842(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1842/1/012071>
- Najaah, L. S., Sunarno, W., & Sukarmin. (2020). *Analysis of students' critical thinking skills on chapter of motion of objects and living things* *Analysis of students' critical thinking skills on chapter of motion of objects and living things*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1511/1/012104>
- Nurazizaha, S., Sinaga, P., & Jauhari, A. (2017). Profil kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi usaha dan energi. *JPPPF - Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 3(2), 197–202. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpppf/article/view/3976>

- Pamungkas, Z. S., Aminah, N. S., & Nurosyid, F. (2019). Analysis of student critical thinking skill in solving fluid static concept based on metacognition level. *9th International Conference on Physics and Its Applications (ICOPIA)*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1153/1/012126>
- Permata, A. R., Muslim, & Suyana, I. (2019). Analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi momentum dan impuls. *Seminar Nasional Fisika 2019*. journal.unj.ac.id. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosidings/article/view/13422>
- Rosyidah, N. D., Kusairi, S., Taufiq, A., & Affriyenn, Y. (2020). Profile of students' critical thinking processes on the topics of Hydrostatic Pressure and Archimedes' principle. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1511/1/012081>
- Sari, G. P., Tandililing, E., & Oktaviany, E. (2018). Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal fisika materi usaha dan energi di SMP. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(10), 1–10. <https://doi.org/10.26418/jppk.v7i10.29371>
- Siegel, H. (1988). *Educating reason: Rationality, critical thinking, and education*. New York: Routledge.
- Sulviana, & Pasaribu, M. (2021). Analisis keterampilan berpikir kritis serta kemandirian belajar siswa SMA pada materi Hukum Newton. *Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako*, 9(1), 63–69. Diambil dari <https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jpft/article/view/791>
- Susilowati, E., Hartini, S., Suyidno, S., Mayasari, T., & Winarno, N. (2020). Hubungan antara kemampuan pemecahan masalah terhadap ketrampilan berpikir kritis pada materi deret. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 5(1), 119–125.
- Syarifah, T. J., Usodo, B., & Riyadi. (2013). Student's critical thinking ability with higher order thinking skills (HOTS) question based on selfefficacy. *Journal of Physics: Conference Series*, (1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1265/1/012013>
- Tanjung, Y. I., & Dwiana, Y. A. (2019). Pengembangan instrumen tes berbasis critical thinking skill pada materi gerak lurus. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Fisika (INPAFI)*, 7(4), 80–86. Diambil dari <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/inpafi>
- Umam, A., Suparmi, A., & Sukarmin, S. (2020). Analysis of critical thinking skill profile on the concept of simple harmonic motion using two tier instrument test. *Journal of Physics: Conference Series*, 1567, 32085. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1567/3/032085>
- Wardani, K. E. K., Djudin, T., & Mursyid, S. (2021). Pengaruh model cooperative problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi tekanan. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Fisika*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.26418/jppf.v2i1.42453>
- Wulandari, A. Y. R. (2018). Correlation between critical thinking and conceptual understanding of student's learning outcome in mechanics concept. *International Conference on Science and Applied Science (ICSAS) 2018, 2014*, 1–8. <https://doi.org/10.1063/1.5054432>
- Živkovic, S. (2016). A model of critical thinking as an important attribute for success in the 21st century. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 232(April), 102–108. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.034>

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) PADA MATERI HIDROKARBON

Oleh :

Ubadilla Mairani¹⁾, Eny Enawaty²⁾, Rody Putra Sartika³⁾, Rini Muharini⁴⁾, Rahmat Rasmawan⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Kimia, Universitas Tanjungpura

¹email: ubadillamairani23@gmail.com

²email: eny.enawaty@fkip.untan.ac.id

³email: rody.putra.sartika@fkip.untan.ac.id

⁴email: rini.muharini@fkip.untan.ac.id

⁵email: rahmat.rasmawan@fkip.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menentukan kelayakan serta respon pendidik dan peserta didik terhadap pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD) berbasis *Problem Based Learning* (PBL) materi hidrokarbon pada kelas XI di SMK PGRI Pontianak. e-LKPD ini menggunakan *liveworksheets*. Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development) dengan menggunakan model ADDIE dengan tahapan analisis, desain, dan pengembangan. Subjek yang terlibat pada penelitian ini yaitu e-LKPD dan responden penelitian dari pendidik dan peserta didik SMK PGRI Pontianak. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar penilaian kelayakan dan angket respon pendidik dan peserta didik yang diukur menggunakan skala likert. Kelayakan e-LKPD dinilai berdasarkan aspek materi, media, dan bahasa oleh tiga ahli untuk setiap aspek. Berdasarkan hasil uji kelayakan memberikan hasil sangat layak dengan perolehan nilai rata-rata 94,64% (materi), 98,81% (media), dan 97% (bahasa). Sedangkan hasil uji respon pendidik dan peserta didik adalah sangat baik dengan hasil uji respon pendidik diperoleh hasil sebesar 90%, uji terbatas diperoleh hasil sebesar 96,91%, dan uji meluas diperoleh hasil sebesar 96,27%. Dengan demikian lembar kerja peserta didik elektronik (e-LKPD) berbasis *Problem Based Learning* (PBL) pada materi hidrokarbon dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran hidrokarbon dengan respon sangat baik.

Kata Kunci: Pengembangan, e-LKPD, PBL

1. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang menuntut peserta didik untuk paham pada materi, aktif, dan memiliki tata krama serta disiplin. Pendekatan saintifik yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan diterapkan dalam Kurikulum 2013 yang mana harus ada pada diri peserta didik. Mengarahkan peserta didik untuk berpartisipasi merupakan peran pendidik sebagai fasilitator (Rahmawati & Suryadi, 2019).

Materi Hidrokarbon adalah materi yang dianggap sulit dalam kimia. Hal ini diketahui karena hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran kimia di kelas X SMK PGRI Pontianak. Kondisi pandemic Covid-19 membuat materi hidrokarbon disampaikan kepada peserta didik tidak memakai LKPD, mereka menggunakan buku paket dan mengerjakan soal-soal mempersingkat proses pembelajaran sehingga pemahaman terhadap materi hidrokarbon berkurang.

Pembelajaran peserta didik dapat ditingkatkan dengan adanya media pembelajaran seperti e-LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (Wati dkk., 2021). Dampak dari pandemic covid-19 saat ini membuat pendidik harus mengajar jarak jauh. Dengan kondisi seperti ini pendidik harus mencari ide untuk metode pembelajaran *online* yang kreatif,

tidak membosankan (Rabuan dkk., 2021). *Liveworksheets* dapat menjadi salah satu pendukung pembelajaran jarak jauh..

Liveworksheets dapat digunakan untuk membuat materi online interaktif dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). *Liveworksheets* bisa menampilkan materi berupa gambar, video, MP3, dan simbol menarik lainnya yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. (Fauzi dkk., 2021).

Wulandari dan Surjono (2013) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah (PBL) merangsang peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada disekitar mereka. Pendidik membekali peserta didik dengan pembelajaran yang menghadirkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan model PBL dalam pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan peserta didik untuk berpikir kritis (Nafiah & Suyanto, 2014).

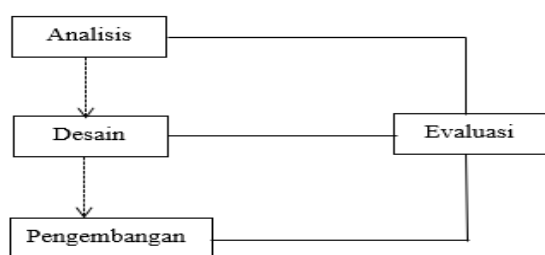
Penelitian berbasis masalah oleh (Surya dan Holiwarni, t.t.) pada materi Hidrokarbon menunjukkan perolehan data yang valid pada aspek kelayakan isi sebesar 92,5%, kebahasaan sebesar 95%, sajian sebesar 90% dan representasi bergambar sebesar 93,75. Dengan demikian LKPD tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD) sebagai salah satu inovasi LKPD menggunakan bantuan *liveworksheets*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dan pengembangan, yaitu metodologi penelitian untuk mengembangkan produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengembangan e-LKPD berbasis masalah ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Namun pengembangan e-LKPD ini dilakukan tahap analisis, desain, dan pengembangan saja karena peneliti mengembangkan e-LKPD untuk melihat kelayakan dan respon peserta didik serta respon pendidik (Aswan dkk., 2021).



Gambar 1. Skema model ADDIE yang dilakukan

Tahap analisis bertujuan untuk mengetahui kondisi di lapangan. Tahap ini berupa analisis kurikulum dan analisis kebutuhan. Analisis kurikulum untuk mengetahui kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut (Lusiana dkk., 2021). Analisis kebutuhan ialah menganalisis kebutuhan sekolah yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran seperti alat/media pembelajaran yang dapat digunakan agar tercapainya tujuan pembelajaran (Palma dkk., 2021).

Tahap desain dilakukan dengan menyiapkan lembar penilaian kelayakan, lembar angket respon, dan pembuatan desain e-LKPD yaitu membuat e-LKPD yang akan dikembangkan, perumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Kompetensi Dasar yang digunakan, menentukan indikator pembelajaran, menyesuaikan e-LKPD dengan tahapan model pembelajaran yang digunakan, penyajian prosedur kerja, dan menghubungkan topik permasalahan dengan materi hidrokarbon. Tahap ini juga dilakukan pembuatan *storyboard* (Sibirian dkk., 2021).

Tahap pengembangan dilakukan validasi terhadap e-LKPD yang dikembangkan. Setelah produk divalidasi dan telah diberi saran serta komentar, maka akan dilakukan revisi produk untuk memperbaiki produk tersebut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan e-LKPD apakah sudah memenuhi tujuan yang diharapkan atau belum. Setelah memvalidasi produk, tahap berikutnya yaitu menguji respon terhadap pendidik dan peserta didik.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa lembar penilaian kelayakan e-LKPD pada

aspek materi, media, dan bahasa, angket respon pendidik dan peserta didik, serta lembar pedoman wawancara. Subjek dalam penelitian adalah e-LKPD yang berbasis *liveworksheet*. Angket respon pendidik dan peserta didik digunakan untuk melihat bagaimana respon terhadap e-LKPD yang dikembangkan. e-LKPD divalidasi oleh 3 orang ahli dibidangnya, yang ditinjau dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. Teknik validasi yang digunakan yaitu dengan memberikan lembar penilaian kelayakan secara langsung kepada validator pada setiap bidang untuk memperoleh nilai kelayakan e-LKPD serta saran dan perbaikan. Kemudian dilakukan tahap uji terbatas di kelas XI TKRO pada 9 orang peserta didik untuk mengetahui kekurangan dari e-LKPD berdasarkan penilaian dari peserta didik, tahap uji meluas terhadap kelas XI TBSM yang berjumlah 21 orang untuk menyempurnakan produk akhir berdasarkan respon peserta didik dan pendidik.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021, bertempat di SMK PGRI Pontianak. Dikarenakan penelitian dilakukan saat pandemi covid-19 sehingga tahap uji kemudahan dan kemenarikan e-LKPD dilakukan mengirim e-LKPD dan angket respon secara daring melalui *Google Form*.

Teknik analisis data untuk lembar penilaian menggunakan Skala Likert yang memiliki skor maksimal 4 dan minimal 1. Persentase skor untuk setiap pernyataan dihitung menggunakan rumus $= \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\%$ (1). Kemudian persentase total rata-rata produk dihitung dengan rumus $= \frac{\sum p}{n}$ (2). Setelah diperoleh persentase keseluruhan, setiap pernyataan diinterpretasikan sebagai kelayakan produk dengan kriteria: (Riduwan, 2015)

Tabel 1. Kriteria Kelayakan e-LKPD

Presentase(%)	Kriteria
0-20	Sangat Tidak Layak
21-40	Tidak Layak
41-60	Cukup Layak
61-80	Layak
81-100	Sangat Layak

Persentase total respon pendidik dan peserta didik dengan rumus $P_{total} = \frac{\sum p}{n}$. Kriteria respon per-item dan interpretasikan dengan kriteria: (Riduwan, 2015)

Tabel 2. Kriteria Uji Respon

Presentase(%)	Kriteria
0-20	Sangat Buruk
21-40	Buruk
41-60	Cukup
61-80	Baik
81-100	Sangat Baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

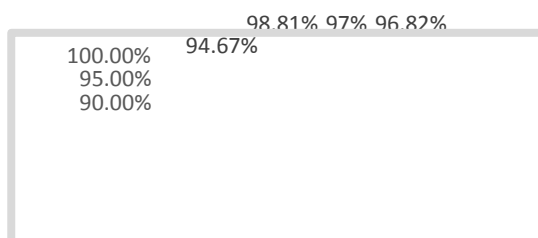
Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan ADDIE yang hanya sampai tahap Pengembangan karena peneliti mengembangkan e-LKPD untuk melihat kelayakan,

respon peserta didik, dan respon pendidik (Sugiyono, 2017). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tahap analisis meliputi analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Tahap analisis kebutuhan peneliti dilakukan wawancara dengan pendidik dan peserta didik didapatkan kegiatan pembelajaran pada kondisi pandemic Covid-19 dilakukan dengan waktu yang terbatas dan media yang digunakan hanya buku paket menyebabkan menurunnya pemahaman terhadap materi hidrokarbon. Oleh karena itu dapat dikembangkan bahan ajar yang lain yang dapat meningkatkan pemahaman dan melatih proses berpikir peserta didik. Pada tahap analisis kurikulum, wawancara dengan pendidik di SMK PGRI Pontianak diperoleh bahwa disekolah tersebut menggunakan Kurikulum 2013. Salah satu kompetensi dasar pada materi hidrokarbon adalah menganalisis sifat senyawa hidrokarbon dan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan serta cara mengatasinya.

Tahap desain dilakukan dengan membuat rancangan e-LKPD yaitu membuat konsep LKPD yang akan dikembangkan, menyesuaikan e-LKPD dengan sintak model pembelajaran berbasis masalah atau *Problem Based Learning*, penyajian prosedur kerja, menghubungkan dengan materi hidrokarbon, dan mendesain e-LKPD yang akan dikembangkan. e-LKPD ini menggunakan *liveworksheets* yang dapat menampilkan materi pembelajaran berupa gambar ataupun video sehingga pembelajaran dapat lebih menarik (Widiyani & Pramudiani, 2021). Kemudian peneliti mencari topik yang sesuai dengan pembakaran hidrokarbon, peneliti memilih topik polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna. Kemudian menyesuaikan topik dengan tahapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (Arends, 2012) yaitu : a) orientasi masalah; b) mengorganisasikan peserta didik untuk membuat kelompok; c) melakukan penyelidikan; d) mempresentasikan karya; e) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Tahap pengembangan (*development*) dilakukan uji kelayakan e-LKPD dinilai dari 3 aspek yaitu materi (isi), media (kegrafikan) dan kebahasaan yang dinilai masing-masing oleh 3 orang ahli yang menggunakan indikator penilaian yang merujuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).



Gambar 1. Hasil Validasi Produk e-LKPD Berbasis *Project Based Learning*

Berdasarkan hasil kelayakan dari para ahli menunjukkan dari segi materi, kebahasaan, dan

media mendapatkan persentase skor rata-rata 96,82% dengan kriteria sangat layak. Sehingga dapat dinyatakan dari segi materi (isi), konsep yang disajikan telah sesuai materi dengan Kompetensi Dasar (KD). Materi yang disajikan akurat dalam menyajikan permasalahan yang kontekstual dalam kehidupan nyata, akurat dalam model pembelajaran dan wacana yang disajikan mendorong rasa ingin tahu. Penilaian dari segi media menunjukkan e-LKPD memiliki grafis dan aksesibilitas *software* yang baik. Sedangkan penilaian dari segi kebahasaan yang terdapat dalam e-LKPD menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Berikut masing-masing uraian hasil validasi terhadap e-LKPD yang dikembangkan:

Kelayakan Materi

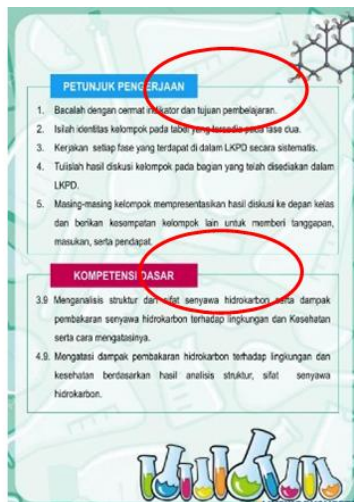
Berdasarkan hasil validasi pada aspek materi dinyatakan sangat layak dengan mendapatkan nilai presentase rata-rata kelayakan sebesar 94,67%. Terdapat saran dan perbaikan dari validator. Bagian yang diperbaiki adalah pada tahap menyajikan hasil karya yang dinilai terlalu membosankan jika hanya diisi dengan membuat *Power Point* (PPT). Sehingga setelah direvisi pada tahap mempresentasikan karya diisi dengan membuat poster kampanye dengan topik polusi udara.

Kelayakan Media

Berdasarkan hasil validasi pada aspek media dinyatakan sangat layak dengan mendapatkan nilai presentase rata-rata kelayakan sebesar 98,81%. Terdapat saran dan perbaikan dari validator yaitu pada bagian yang diperbaiki antara lain: 1) Pada bagian sub judul seperti tulisan “Petunjuk Pengerjaan” dan “Kompetensi Dasar” dimasukkan kedalam *shape* persegi panjang dan menambahkan variasi warna agar terlihat menarik serta tidak monoton;



Gambar 3. Sebelum revisi



Gambar 3. Sesudah revisi

2) Pada sub judul tahapan dari *Problem Based Learning* dimasukkan kedalam *shape* persegi panjang berwarna dan diberi efek bayangan.



Gambar 4. Sebelum revisi



Gambar 5. Sesudah revisi

Kelayakan Bahasa

Berdasarkan hasil validasi pada aspek Bahasa dinyatakan sangat layak dengan mendapatkan nilai presentase rata-rata kelayakan sebesar 97%. Terdapat saran dan perbaikan dari validator yaitu pada penggunaan tanda baca yang tidak tepat.

Penggunaan tanda baca untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Struktur kalimat tidak sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti penggunaan istilah yang tidak tepat sehingga dilakukan perbaikan.

Setelah memvalidasi kelayakan produk, selanjutnya dilakukan uji respon pendidik, uji terbatas dan uji meluas peserta didik kelas XI di SMK PGRI Pontianak.

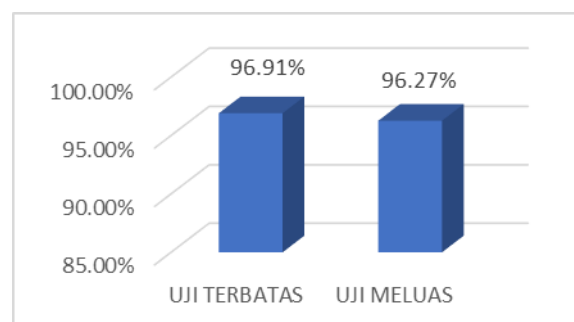
Uji respon pendidik melibatkan satu orang pendidik di SMK PGRI Pontianak, uji respon ini untuk melihat bagaimana respon pendidik mengenai kemudahan dan kemenarikan terhadap e-LKPD berbasis *Problem Based Learning*. Berdasarkan hasil uji respon pendidik peroleh presentase 90% dengan kriteria sangat baik.

Uji Terbatas

Uji terbatas ini melibatkan 9 orang peserta didik di kelas XI TKRO yang bertujuan untuk melihat kekurangan e-LKPD yang dirancang. Uji ini untuk melihat bagaimana respon peserta didik mengenai kemudahan dan kemenarikan terhadap e-LKPD berbasis *Problem Based Learning*. Berdasarkan hasil uji respon pendidik peroleh presentase 96,91% dengan kriteria sangat baik.

Uji Meluas

Uji meluas ini melibatkan seluruh peserta didik di kelas XI TBSM yang bertujuan untuk menyempurnakan e-LKPD berdasarkan respon peserta didik (Aswan dkk., 2021). Uji ini untuk melihat bagaimana respon peserta didik mengenai kemudahan dan kemenarikan terhadap e-LKPD berbasis *Problem Based Learning*. Berdasarkan hasil uji respon pendidik peroleh presentase 96,27% dengan kriteria sangat baik.



Gambar 5. Hasil Uji Respon Peserta Didik terhadap e-LKPD Berbasis *Project Based Learning*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD) berbasis *Problem Based Learning* pada materi hidrokarbon memiliki presentase kelayakan rata-rata 96,82% yang dikriteriakan sangat layak dan respon terhadap Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD) ini sangat baik dimana respon yang diberikan oleh

pendidik dengan rata-rata persentase 90% dan respon peserta didik pada uji terbatas dan uji meluas dengan masing-masing presentase 96,91% dan 96,27%. Saran penelitian ini yaitu produk hasil penelitian layak diujicobakan dan digunakan pada penelitian lanjutan

5. REFERENSI

- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach* (New York). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Aswan, D., Enawaty, E., Lestari, I., Hairida, & Erlina. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA KIT KONFIGURASI ELEKTRON UNTUK PESERTA DIDIK DI SMA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(4), 101–109.
<https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3014>
- Fauzi, A., Rahmatih, A. N., Indraswati, D., & Sobri, M. (2021). Penggunaan Situs Liveworksheets untuk Mengembangkan LKPD Interaktif di Sekolah Dasar. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–240.
<https://doi.org/10.37478/mahajana.v2i3.1277>
- Nafiah, Y. N., & Suyanto, W. (2014). Penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jpv.v4i1.2540>
- Palma, Y., Saputra, R., Ulfah, M., Rasmawan, R., & Sartika, R. P. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA KIT BENTUK MOLEKUL DI KELAS X SMA NEGERI 8 PONTIANAK. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(3), 86–91.
<https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2704>
- Rabuandika, A., Sartika, R. P., & Rasmawan, R. (2021). PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ELEKTRONIK BERBASIS 3D PAGEFLIP PROFESSIONAL PADA PRAKTIKUM DASAR-DASAR KIMIA ANALITIK. *AR-RAZI Jurnal Ilmiah*, 9(1).
<https://doi.org/10.29406/ar-r.v9i1.2512>
- Rahmawati, M., & Suryadi, E. (2019). Guru sebagai fasilitator dan efektivitas belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14954>
- Riduwan. (2015). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Siburian, K., Sahputra, R., & Sartika, R. P. (2021). PENGEMBANGAN E-SUPLEMEN ELEMENTAL CHEMISTRY'S PEDIA BERBASIS MULTIREPRESENTASI UNTUK MAHASISWA PENDIDIKAN KIMIA UNIVERSITAS TANJUNGPURA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(4), 235–246.
<https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.2951>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Alfabeta.
- Surya, W. P., & Holiwarni, B. (t.t.). *DEVELOPMENT OF WORKSHEET BASED PROBLEM BASED LEARNING ON THE TOPIC HYDROCARBON OF SENIOR HIGH SCHOOL*. 12.
- Wati, D. A., Hakim, L., & Lia, L. (2021). DEVELOPMENT OF NEWTON LAW INTERACTIVE E-LKPD BASED ON MOBILE LEARNING USING LIVE WORKSHEETS IN HIGH SCHOOL. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 10(2), 72.
<https://doi.org/10.24114/jpf.v10i2.26567>
- Widiyani, A., & Pramudiani, P. (2021). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Software Liveworksheet pada Materi PPKn. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 5(1), 132.
<https://doi.org/10.20961/jdc.v5i1.53176>
- Wulandari, B., & Surjono, H. D. (2013). Pengaruh problem-based learning terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi belajar PLC di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(2).
<https://doi.org/10.21831/jpv.v3i2.1600>

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN GEOGRAFI PADA PELAKSANAAN TATAP MUKA TERBATAS (TMT) DI SMASE-KECAMATAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT

Oleh:

Fellix Rimba¹⁾, Lili Somantri²⁾, Iwan Satiawan³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

¹email:fellixrimba@upi.edu

²email:l_somantri@ymail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran geografi di masa pandemi dan efektivitas pembelajaran geografi di SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Penelitian ini berlokasi SMA se-Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, yang terdiri 5 sekolah yaitu, SMA N 17 Jakarta Barat, SMA Sentosa Pagi, SMA N 2 Jakarta, SMA Santo Leo dan Sekolah Ricci. Teknik pengumpulan data dipakai dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, studi dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan analisis efektivitas pembelajaran geografi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kelas X IPS SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Yang akan disajikan dalam bentuk persentase, tabel, grafik, gambar dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembelajaran di SMA se-Kecamatan Taman Sari semasa pandemi covid-19 dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan daring dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp group, google classroom dan zoom meeting. (2) efektivitas pembelajaran geografi dimasa tatap muka terbatas dilihat dari mutu pembelajaran tergolong pada kategori cukup efektif dengan skor 76.22%, tingkat pengajaran cukup efektif dengan skor 78.37%, insentif tergolong kategori cukup efektif dengan skor 68.90% dan waktu pembelajaran pada kategori cukup efektif dengan skor 90% Pembelajaran geografi pada tatap muka terbatas menunjukkan hasil yang cukup efektif yaitu sebesar 78.37%.

KataKunci:Efektivitas Pembelajaran, Tatap Muka Terbatas

1. PENDAHULUAN

Kasus pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, menyebabkan hampir seluruh kehidupan di Indonesia terkena dampaknya termasuk di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian mengeluarkan kebijakan dengan adanya pandemi Covid19 yaitu mulai melakukan realokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani penyebaran Covid19 berupa penyediaan informasi, komunikasi dan edukasi yang berkaitan dengan Covid19, membangun kapasitas rumah sakit Pendidikan (RSP), pelaksanaan rapid test, dan membeli bahan habis pakai.

Dampak Covid-19 terhadap pendidikan dan pembelajaran menimbulkan beberapa peraturan baru dalam sistem pendidikan yaitu dengan menutup seluruh akses pendidikan secara tatap muka dan mengganti dengan sistem online (Syaiful, 2021). Berdasarkan Surat Edaran Kemdikbud nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada fase darurat penyebaran penyakit virus corona (Covid19). Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan perlu melakukan pembelajaran online (jaringan).

Dalam pembelajaran online terdapat beberapa pertimbangan yaitu: 1) Kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,

keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di sekolah 2) Tumbuh kembang kondisi psikososial peserta didik juga menjadi prioritas utama untuk pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19 (Ristiyawati, 2020).

Namun, pembelajaran online erat kaitannya dengan masalah yang dihadapi pendidik akibat merebaknya Covid19. Penerapan learning from home memberi pengaruh terhadap keadaan siswa dan guru yang mengajar, namun pembelajaran online menjadi tantangan bagi guru untuk memberikan layanan yang menarik dan efektif. Guru harus mampu merancang dan membentuk pembelajaran online yang efektif dengan menggunakan media yang tepat dan mengikuti materi kelas (Satrianingrum, 2021).

Kebijakan pemerintah tidak menjamin semuanya akan berjalan dengan baik di semua kalangan (Tuwu, 2020). Apalagi bagi satuan pendidikan tingkat SMA dan sekolah desa kekurangan peralatan teknologi untuk pembelajaran online. Proses pembelajaran online tidak seperti yang diharapkan karena kurangnya biaya dan peralatan yang wajar antara guru dan siswa. Masalah lain dalam pembelajaran adalah tidak adanya buku panduan yang dimiliki oleh siswa, dan pemberian soal yang kurang relevan dengan apa yang dipelajari sehingga siswa menggunakan google search dalam setiap pembelajaran. Akibatnya pembelajaran yang

dilakukan menjadi kurang efisien dan siswa semakin sulit memahami apa yang telah diajarkan oleh guru (Onde, 2021)

Terdapat beberapa hal yang dapat mengefektifkan proses pembelajaran online yaitu dengan memanfaatkan teknologi media pembelajaran yang berbentuk platform seperti Google classroom, E-learning, Youtube, WAG, Edmodo, Zoom, Googlemeet dan platform lainnya (Habibah et al.,2020). Namun bukan berarti pelaksanaan pembelajaran online terlaksana dengan baik, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Sebagai mana dari semua literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini berhubungan dengan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Terutama mata pelajaran yang membutuhkan penjelasan secara mendetail dan langkah pemecahan masalah, salah satunya mata pelajaran geografi yang identik dengan pemetaan wilayah, tentu membutuhkan model pembelajaran khusus dan media pembelajaran yang mendukung penyampaian materi secara daring (Dewi, 2020).

Selama pandemi covid19 kualitas pendidikan di Indonesia dinilai mengalami penurunan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu pemerintah mulai mengatur strategi agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka. sehingga muncullah kebijakan baru tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang dibuka mulai juli 2021 dengan ketentuan seluruh tenaga kependidikan telah melakukan vaksinasi dan pembelajaran dilakukan dengan membatasi jam pertemuan, serta penerapan protokol Kesehatan yang ketat. Sehingga dalam hal ini, siswa dibagi kedalam kelompok belajar atau dijadwal berdasarkan shift, dengan tujuan membatasi jumlah siswa dalam satu ruangan (Onde, 2021). Perencanaan pembelajaran tatap muka perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat di lakukan sekolah yaitu dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, meningkatkan imun peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai protokol kesehatan. Sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas, kemdikbud telah menerbitkan buku panduan dan mensosialisasikan pembelajaran masa pandemi (Pattanang, 2021).

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini menerapkan prinsip kehati-hatian karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan warga sekolah, sehingga protokol kesehatan wajib diterapkan secara ketat sesuai dengan aturan pelaksanaan tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan pembatasan jumlah peserta didik dalam satu kelas, sehingga sangat perlu mengatur jumlah dengan sistem rotasi dan kapasitas

50 % dari jumlah siswa pada normalnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat, persetujuan orang tua siswa, tenaga pendidik dan kependidikan telah melakukan vaksinasi, serta sarana dan tersedianya prasarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan (Onde, 2021).

Pelaksanaan tatap muka terbatas berlangsung selama 3 jam pelajaran untuk 1 hari kemudian mengombinasikan dengan PJJ dan PTM dilaksanakan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Setiap peserta didik melakukan PTM sebanyak 6 sampai 9 jam dengan sistem masuk dibuat selang seling dengan jeda beberapa menit, agar tidak terjadi penumpukan antara siswa yang akan pulang dan yang akan memasuki ruang kelas (Onde, 2021).

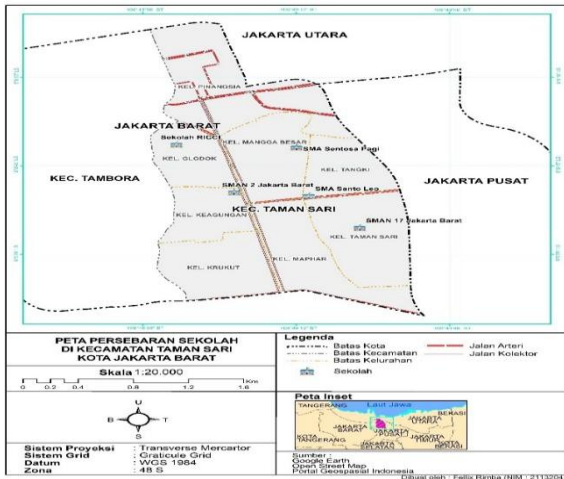
Dalam melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas harus diperhatikan keefektifan dan keberhasilan yang dicapai. Efektivitas program pembelajaran adalah kenyataan bahwa guru memberikan pengalaman belajar guna membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan dan secara aktif melibatkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar (Firman, 1987). Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran, reaksi siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan bersama, siswa dan guru memiliki sarana, prasarana, dan media pembelajaran untuk mencapai semua aspek pertumbuhan siswa (Kodir, 2011).

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pembelajaran Geografi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

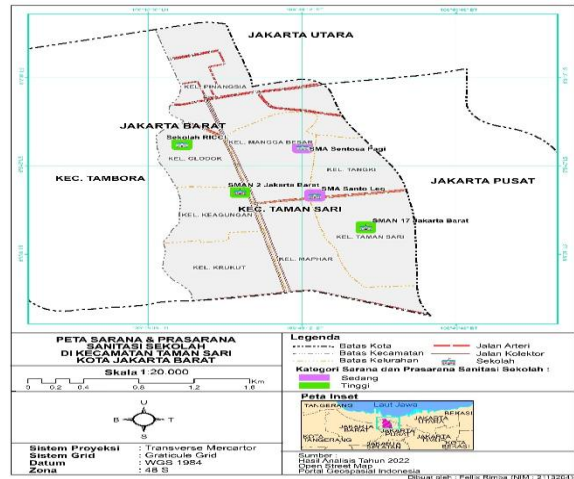
2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

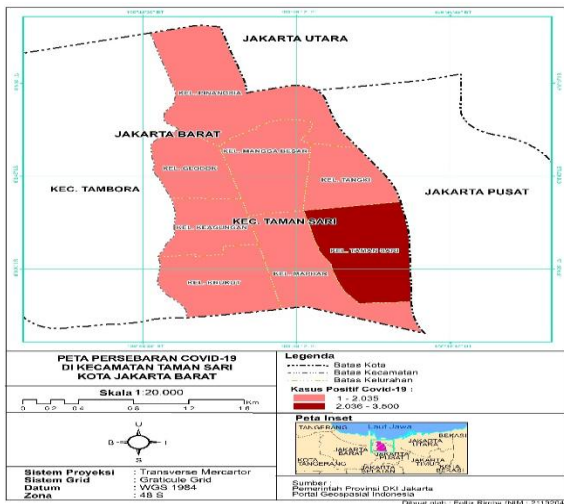
Penelitian ini berlokasi SMA se-Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, yang terdiri 5 sekolah yaitu, SMA N 17 Jakarta Barat, SMA Sentosa Pagi, SMA N 2 Jakarta, SMA Santo Leo dan Sekolah Ricci. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah sekolah sedang menerapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memenuhi syarat : sekolah berada di Wilayah PPKM Level 1-3, tidak ada kasus atau penularan di lingkungan sekolah, sekolah telah mengisi dan memenuhi Daftar Kesiapan Satuan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19, sarana pendukung menunjang PTM di masa COVID-19 yang memadai (alat ukur suhu tubuh, ruang belajar dengan sirkulasi udara yang baik, fasilitas sterilisasi ruangan, sarana pengajaran masing-masing, pintu keluar yang berbeda dengan pintu masuk, ruangganti pakaian untuk siswadengan transportasi umum), terdapat kesepakatan bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, guru dan tenaga pendukung di sekolah diharapkan sudah divaksin dan sekolah telah membentuk Satgas COVID-19



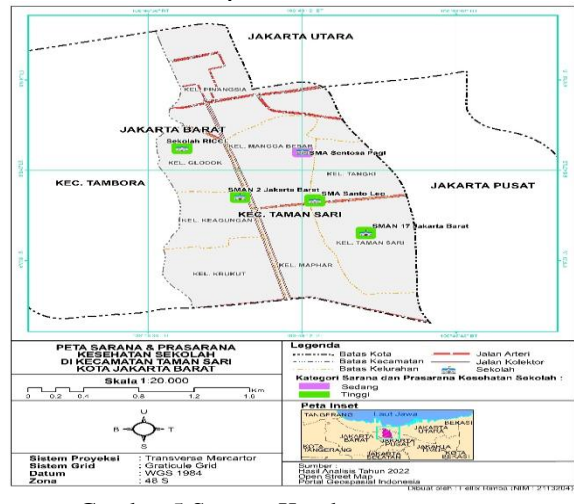
Gambar 1 Lokasi Penelitian



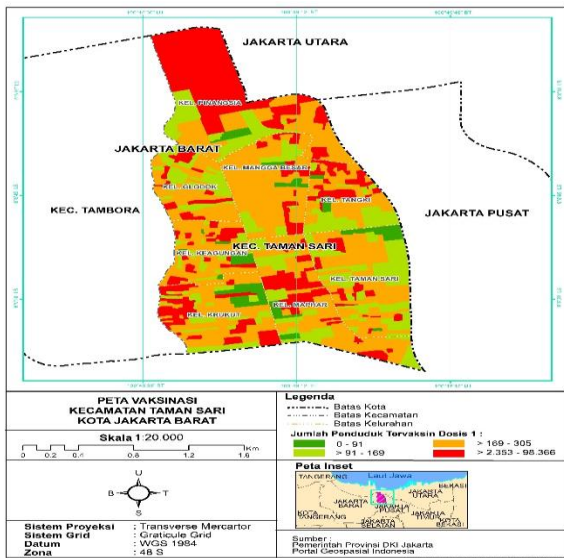
Gambar 4 SarprasSanitasi



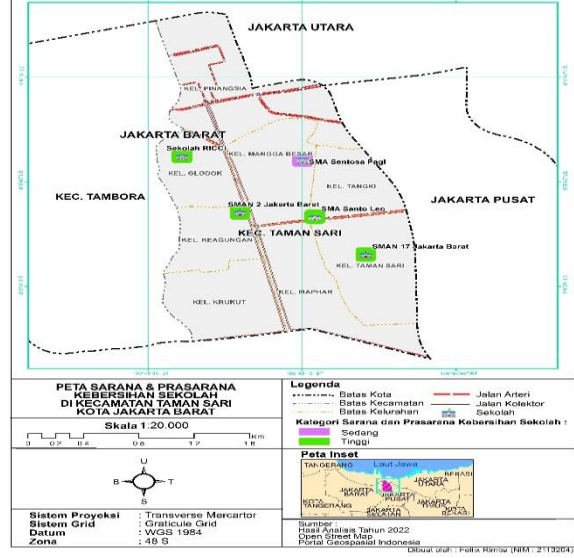
Gambar 2 Persebaran Covid19



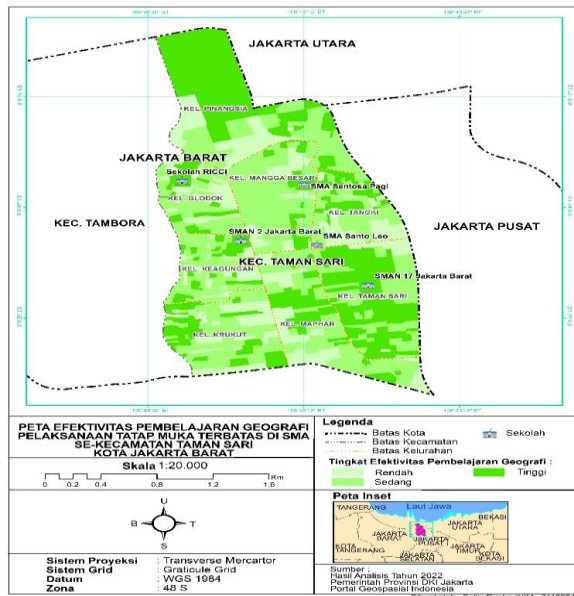
Gambar 5 Sarpras Kesehatan



Gambar 3 Peta Vaksinasi Covid19



Gambar 6 Sarpras Kebersihan



Gambar 7 Pembelajaran TMT

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA se-Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat yang berjumlah 153 orang.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. sampelnya adalah 1 kelas X setiap perwakilan sekolah dengan total 5 rombongan belajar untuk 5 sekolah. Supaya lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengambilan Sampel

No.	Nama sekolah	Kelas	Populasi dan Sampel
1.	SMAN 17 Jakarta Barat	X IPS1	36
2.	SMAN 2 Jakarta Barat	X IPS1	36
3.	Sekolah RICCI	X IPS1	31
4.	SMA Santo Leo	X IPS1	15
5.	SMA Sentosa Pagi	X IPS1	35
Total			153

(Sumber: Tata Usaha 2022)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipakai dalam penelitian ini adalah Teknik observasi untuk melihat efektivitas pembelajaran geografi melalui observasi langsung didalam kelas, Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran dengan mencermati (RPP) dan teknik wawancara, adapun responden yang akan diwawancarai yaitu kepala sekolah dan seorang guru geografi SMA se-Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan analisis efektivitas pembelajaran geografi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kelas X IPS SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Yang akan disajikan dalam bentuk persentase, tabel, grafik, gambar dan lain-lain. Pengolahan data observasi mengikuti kriteria yang disajikan dalam bentuk skala likert sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Likert

No.	Kriteria	Skor
1.	Sangat baik/sangat efektif	5
2.	Baik/efektif	4
3.	Cukup baik/cukup efektif	3
4.	Kurang baik/kurang efektif	2
5.	Tidak baik/tidak efektif	1

(sumber : Sugiyono, 2012)

Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu menghitung persentase. Persentase skor dapat dihitung dengan rumus perhitungan berikut ini:

$$\% \text{Skor} = \frac{\text{jumlah skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan dari hasil data diatas akan menghasilkan angka dalam bentuk persen (%). Kemudian di klasifikasikan dengan skor dalam bentuk persentase. Selanjutnya dikategorikan dengan kalimat kualitatif sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Efektivitas

Persentase Efektivitas < 40	Tingkat Capaian Sangat tidak efektif
>40 – 59,99	Tidak efektif
60 – 79,99	Cukup efektif
>80	Sangat efektif

(Sumber: Budiani, 2009)

Untuk menentukan efektivitas pembelajaran maka persentase seluruh indikator harus di atas 60% atau tingkat capaiannya berada cukup efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran

Pembelajaran geografi di SMA Se-Kecamatan Taman Sari di laksanakan dengan tatap muka terbatas dan memanfaatkan platform pembelajaran secara daring yang memakai jaringan internet di berlakukan semenjak tanggal 3 Januari 2022. Pembelajaran tatap muka terbatas banyak mendapatkan respon positif dan penolakan, sehingga bagi orang tua yang tidak menyetujui TMT dipersilahkan untuk daring. Pihak sekolah sekolah wajib memastikan aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung dengan keliling sekolah memastikan kondisi aman dan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti zoom meeting, google classroom dan whatsapp group meskipun peserta didik berada di rumah masih bisa tetap melaksanakan pembelajaran. Apabila ada siswa yang tidak hadir wajib melaporkan dalam bentuk absensi online seperti JAKI (Jakarta Kini). Guru dituntut untuk merancang media pembelajaran yang kreatif dengan memanfaatkan media daring agar menyesuaikan pembelajaran daring dan tatap muka terbatas. aktivitas pembelajaran melalui laptop atau handphone android yang terhubung menggunakan koneksi jaringan internet.

1. Persiapan Pembelajaran

Persiapan pembelajaran daring berisi rancangan dan kesiapan guru yaitu menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan materi pelajaran. Pada masa pandemi guru harus membuat RPP darurat covid-19 yang di buat dengan

sederhana. Adapun aspek yang dilihat pada RPP darurat covid-19 komponen inti merupakan tujuan pembelajaran, langkah-langkah (aktivitas) pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang harus digunakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran ialah implementasi dari RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) mencakup kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Sejak Januari 2022 pembelajaran di laksanakan secara tatap muka terbatas dan daring. Guru membuat whatsapp group untuk memberikan informasi mengenai pembelajaran, selain itu guru juga menggunakan google classroom dan zoom untuk memberikan materi pembelajaran dan penugasan.

a. Kegiatan pendahuluan

Kegiatan pendahuluan adalah untuk memastikan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kegiatan pendahuluan guru selalu menyiapkan kehadiran siswa dan menanyakan keadaan siswa dengan cara mengabsen dari aplikasi zoom dan langsung kepada siswa yang Tatap muka terbatas disekolah. Dengan guru menyiapkan kehadiran siswa, dan menanyakan keadaan siswa dengan memberikan semangat maka siswa akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang terbagi secara daring dan tatap muka terbatas. Selain itu, Kegiatan pendahuluan mencakup guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Namun, guru tidak pernah memberitahukan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Guru langsung menyampaikan materi dengan cara memberikan video dan power point.

b. Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti guru menjelaskan topik pembelajaran lalu membagikan video ke zoom agar siswa yang daring dan tatap muka terbatas disekolah dapat melihat video pembelajaran. Selain video pembelajaran guru juga membagikan power point terkait materi pembelajaran agar siswa lebih paham mengenai materi yang di ajarkan kemudian guru dan siswa Bersama dalam membahas seperti menghitung angka kelahiran dan membahas dinamika hidrosfer dan litosfer.

Untuk model pembelajaran guru lebih memanfaatkan berbasis masalah dikarenakan untuk menyesuaikan kondisi siswa yang daring dan hadir kesekolah, sehingga pembentukan kelompok dalam situasi pandemic ini sangat banyak pertimbangan.

c. Kegiatan Penutup

Setelah guru memberikan materi pembelajaran baik dengan video pembelajaran maupun power point selanjutnya kegiatan penutup guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengevaluasi aktivitas pembelajaran dan memberitahu rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Guru memberikan tugas dalam bentuk uraian atau essay dengan jumlah yang variatif. Seluruh tugas yang diberikan oleh guru di catat di buku catatan

siswa. Siswa mengerjakan soal tersebut langsung saat pembelajaran, agar mengetahui tingkat pemahaman siswa. Setelah itu guru akan membahas Bersama sebagai bahan refleksi. Kemudian guru memberikan soal lagi sebagai tugas kepada siswa yang dikerjakan dirumah. Prosedur pengirimannya melalui googleclassroom dan dengan sistem batasan waktu. Jika tidak di kumpulkan sesuai dengan ketentuan maka siswa tidak mendapatkan nilai.

4. Tindak Lanjut Pembelajaran

Tindaklanjut pada materi pembelajaran diberikanke padas eluruh siswa yang belum mencapai KKM dalam bentuk remedial. Guru melakukan remedial yaitusiswa di berikan tugas untuk mengerjakan soal yang sama kemudian yang akan di kumpulkansamalahnyadenganmengumpulkantugasnya itumenggunakangoogleclassroom.

5. Efektivitas Pembelajaran

Hasil penelitian efektivitas pembelajaran geografi ini mencakup mutu pembelajaran, tingkat pengajaran yang tepat, insentif dan waktu. Supaya lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas Pembelajaran Geografi

No.	Nama Sekolah	Mutu Pembelajaran (%)	Tingkat Pengajaran yang Tepat (%)	Insentif (%)	Waktu (%)	Rata-rata (%)
1.	SMA Santo Leo	71.6	78	70.7	90	77.57
2.	Sekolah Ricci	81.75	78.33	67.69	90	79.44
3.	SMA N 17 Jakarta Barat	76.65	76.6	75.38	90	79.65
4.	SMA N 2 Jakarta Bara	78.33	79.33	67.69	90	78.83
5.	SMA Sentosa Pagi	72.77	79.66	63.07	90	76.37
	Rata rata	76.22	78.37	68.90	90	78.37

(Sumber: Data Olahan, 2022)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa efektivitas pembelajaran geografi tergolong pada kategori cukup efektif yaitu 78.37%.

a. Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran dilihat dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dinilai dari kemampuan guru melaksanakan pembelajaran. Dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Mutu Pembelajaran

No.	Nama Sekolah	Hasil Proses Pembelajaran (%)	Hasil Belajar siswa (%)	Rata-rata (%)
1.	SMA Santo Leo	76.6	66.6	71.6
2.	Sekolah Ricci	70	93.5	81.75
3.	SMA N 17 Jakarta Barat	81.1	72.2	76.65
4.	SMA N 2 Jakarta Barat	73.33	83.33	78.33
5.	SMA Sentosa Pagi	65.55	80	72.77
	Rata rata	73.31	79.12	76.22

(Sumber: Data Olahan, 2022)

Dapat di lihat bahwa hasil proses pembelajaran adalah 73.31% dan hasil belajar klasikal siswa adalah 79.12%. Maka mutu pembelajaran tergolong pada kategori cukup efektif yaitu 76.22%.

b. Tingkat Pengajaran yang Tepat

Tingkat pengajaran yang tepat dapat di lihat dari kesiapan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan fisik, kesiapan psikis dan kesiapan material. untuk

melihat hal ini peneliti melakukan observasi dan didapatkan hasil seperti tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Tingkat Pengajaran Yang Tepat

No.	Nama Sekolah	Kesiapan Fisik (%)		Kesiapan Psikis (%)		Kesiapan Material (%)		Rata-rata (%)
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SMA Santo Leo	42	58	93	7	100	0	78
2.	Sekolah Ricci	46	54	89	11	100	0	78.33
3.	SMA N 17 Jakarta Barat	41	59	89	11	100	0	76.6
4.	SMA N 2 Jakarta Barat	47	53	91	9	100	0	79.33
5.	SMA Sentosa Pagi	48	52	91	9	100	0	79.66
Rata rata								78.37

(Sumber: Data Olahan, 2022)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa kesiapan fisik siswa, kesiapan psikis siswa dan kesiapan material siswa atau kesiapan siswa pada saat pembelajaran tergolong pada kategori cukup efektif yaitu 78.37%.

c. Insentif

Insentif pembelajaran dilihat dari aktivitas guru dalam memberikan motivasi untuk membangkitkan siswa untuk belajar.

Tabel 7. Insentif Pembelajaran

No.	Nama Sekolah	Skor	Rata-rata (%)
1.	SMA Santo Leo	46	70.7
2.	Sekolah Ricci	39	67.69
3.	SMA N 17 Jakarta Barat	49	75.38
4.	SMA N 2 Jakarta Barat	44	67.69
5.	SMA Sentosa Pagi	41	63.07
Rata rata			68.10

(Sumber: Data Olahan, 2022)

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa intensif pembelajaran atau aktivitas guru dalam memberikan motivasi untuk membangkitkan siswa belajar adalah 68.10% tergolong pada kategori cukup efektif.

d. Waktu

Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari berapa lama waktu guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu didasarkan pada RPP yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran. Waktu fokus pembelajaran dilihat dari guru memanfaatkan waktu dilaksanakannya kegiatan pembelajaran, alokasi waktu mencakup untuk 1 kali pertemuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Waktu Pelaksanaan Pembelajaran

No.	Nama Sekolah	Waktu
1.	SMA Santo Leo	90
2.	Sekolah Ricci	90
3.	SMA N 17 Jakarta Barat	90
4.	SMA N 2 Jakarta Barat	90
5.	SMA Sentosa Pagi	90
Rata rata		90

(Sumber: Data Olahan, 2022)

Waktu fokus yang digunakan oleh guru adalah 90 tergolong pada kategori cukup efektif.

Dengan melihat mutu pembelajaran tergolong pada kategori cukup efektif (76.22%), tingkat pengajaran cukup efektif (78.37%), insentif tergolong kategori cukup efektif (68.90%) dan waktu pembelajaran pada kategori cukup efektif (90) Pembelajaran geografi pada tatap muka terbatas menunjukkan hasil yang cukup efektif yaitu sebesar (78.37%).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran geografi pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dilaksanakan dengan peserta didik luring dikelas dan daring dirumah masing masing dengan memanfaatkan beragam fasilitas yang tersedia dan memperhatikan protokol kesehatan seperti handphone, laptop jaringan internet, microfon dll. Pemanfaatan media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh guru selama melaksanakan kegiatan belajar mulai dari menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan tugas yaitu aplikasi google classroom, group whatsapp, dan zoom dan hal ini juga dimanfaatkan guru sebagai media komunikasi dengan siswa agar tetap belajar. Walaupun terdapat siswa yang belajar dirumah dan diruang kelas tetapi perlakuan yang diberikan harus sama.

Pembelajaran Geografi dalam pembelajaran tatap muka terbatas tergolong cukup efektif dilaksanakan di SMA se-kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Hal ini mengacu pada mutu pembelajaran tergolong pada kategori cukup efektif (76.22%), tingkat pengajaran cukup efektif (78.37%), insentif tergolong kategori cukup efektif (68.90%) dan waktu pembelajaran pada kategori cukup efektif (90). Dengan demikian guru perlu meningkatkan pembelajaran geografi dengan mempersiapkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik saat ini.

5. REFERENSI

- Arifin, Zainal. (2012). Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiani. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur. Jurnal Ekonomi Sosial, 2(1), 130-147.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1): 55–61.
- Faizatun Nissa, Haryanto, Akhmad. (2020). Implementasi Pembelajaran Tatap Mukadi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal IKA. 8(2).
- Firman, Harry. (1987). Ciri-Ciri Efektivitas. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga.
- Gulo. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.

- Hadi, Sutrisno. (2002). Metodologi Reserch. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Habibah, Riasatul Et Al. (2020). Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar, 2(02) 1.
- Kuntarto, E. (2017). Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan tinggi. Journal Indonesian Language Education and Literature, 3(1), 53–65.
- Kodir, Abdul. (2011). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia.
- Onde, Mitra kasih La Ode. , Aswat, Hijrawatil. , Sari, Eka Rosmitha. , Meliza, Nur. (2021). Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (TMT) di masa New Normal terhadap Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(6). DOI: 10.31004/edukatif.v3i6.1449.
- Poerwandari, E.K. (2007). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Pattanang, Emik. , Limbong, Mesta. , Tambunan, Witarsa. (2021). Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Pada Smk Kristen Tagari. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2): 112–20.
- Ristryawati, Aprista. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Ooeh Pemerintah sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law and Governance Journal, 3(2). 240–249.
- Satrianingrum, Arifah Prima. , Prasetyo, Iis. (2021). Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1). DOI: 10.31004/obsesi.v5i1.574.
- Slavin. (2009). Cooperative Learning (Teori, Riset, Praktik). Bandung. Nusa Media.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful, Nurinayati. , Rudiyansyah. , Aslam, Sri Lestari. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mata Pelajaran Sosiologi di SMAN 20 Gowa). Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 9(1), 86-92.
- Tuwu, Darmin. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho, 3(2). DOI:10.35817/jpu.v3i2.12535.
- Wisano Powa, Nevly., Tambunan, Witarsa., Limbong, Mesta. (2021). Analisis Persetujuan Orang Tua Terhadap Rencana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Smk Santa Maria Jakarta. Jurnal Manajemen Pendidikan. 10 (02).
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGARUH EKOLITERASI DAN PENDEKATAN ESD TERHADAP SIKAP PEDULI LINGKUNGAN PESERTA DIDIK

Oleh :

Ahmad Fajar Ramadhan¹⁾, Jun Surjanti²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

¹email: ahmad.18055@mhs.unesa.ac.id

²email: junsurjanti@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada dua pilihan dalam hal kelestarian lingkungan, yaitu menjadi destruktif atau ramah terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah asosiatif kausal. Sampel yang digunakan berjumlah 86 peserta didik dari 109 peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 1 Cerme yang diperoleh melalui perhitungan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui pembagian kuesioner secara online melalui Google Form dan untuk analisis data dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics. Ekoliterasi dan pendekatan ESD merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan sikap peduli lingkungan yang dimiliki peserta didik. Dari hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan.

Kata Kunci: Ekoliterasi, Pendekatan ESD, Sikap Peduli Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari diberi dua pilihan dalam hal kelestarian lingkungan, yaitu menjadi destruktif atau ramah terhadap lingkungan (Surjanti et al., 2020). Melalui lembaga pendidikan, perlu disampaikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merawat lingkungan sekitar agar lingkungan hidup senantiasa terjaga dan tetap asri. Memahami secara komprehensif mengenai sanitasi dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk mengubah perilaku masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar (Marshall et al., 2019). Kepedulian terhadap lingkungan hidup adalah upaya preventif atau pencegahan terhadap perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar dan berupaya memikirkan perbaikan kerusakan alam yang telah terjadi (Surjanti et al., 2020). Sebagai calon generasi masa depan, peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah harus mengembangkan sikap ramah lingkungan sejak dini karena mereka adalah agen aktif perubahan zaman (Walker, 2017). Kebiasaan baik dalam hal menjaga lingkungan agar senantiasa lestari dapat dicapai melalui pembelajaran berwawasan lingkungan.

Ekoliterasi tidak selalu dalam kajian teori yang diinterpretasikan dalam bentuk bacaan, tulisan, dan sebagainya, karena literasi merupakan cara untuk seseorang agar sadar dan peduli terhadap suatu permasalahan (McBride et al., 2013). Pembelajaran pengenalan ekoliterasi atau kesadaran ekologi di sekolah dengan pendekatan Education for Sustainable Development (ESD) merupakan pembelajaran pengenalan peserta didik pada lingkungan secara langsung dan berkelanjutan

(Benavot, 2014). Implementasi pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD dapat dijumpai di MAN 1 Lamongan (Mu'min, 2019). Di MAN 1 Lamongan, peserta didik memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kemudian diimplementasikan dalam praktek pembelajaran mata pelajaran IPA. Kegiatan implementasi praktek pembelajaran IPA di MAN 1 Lamongan antara lain: 1) Mengamati dan mempelajari lingkungan biotik dan abiotik di sekitar sekolah; 2) Menanam tanaman di sekitar lingkungan sekolah; 3) Menghitung jumlah biopori dan mempelajari kegunaan biopori di sekolah; 4) Mengamati dan mempelajari cara merawat tanaman yang berada di Green House; 5) Mengamati dan mempelajari cara merawat satwa yang berada di Mini Zoo. Peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pengenalan secara langsung ekoliterasi dan pendekatan ESD diharapkan dapat mengembangkan rasa cinta terhadap lingkungan (Aisy, 2020). Peserta didik menyadari pentingnya menjaga lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bagi kehidupan secara berkelanjutan.

SMA Negeri 1 Cerme merupakan salah satu sekolah yang meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri 2016. SMA Negeri 1 Cerme juga diakui sebagai Green School atau Sekolah Hijau pada tahun 2010. SMA Negeri 1 Cerme mempelopori dan mencirikan sekolah yang menghadirkan budaya peduli lingkungan sebagai perwujudan terhadap kepedulian lingkungan melalui program sekolah yang mencerminkan visi dan misi sekolah, kegiatan berwawasan lingkungan yang partisipatif, serta pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

yang mendukung. Namun, tingkat kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekolah masih kurang. Hal ini terlihat pada ruang kelas yang berantakan setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selesai, sampah yang dibuang sembarangan, tugas piket kelas tidak dilaksanakan, sampah seringkali ditemukan di laci meja, dan membuang sampah di ruang kelas. Padahal sekolah menyediakan 60 tempat sampah di tempat pembuangan sampah organik/anorganik, 2 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah organik/anorganik, dan 30 toilet untuk siswa. Ada pula masalah lain yaitu pihak kebersihan sekolah sering menjumpai kran air yang tidak dimatikan setelah digunakan. Beberapa masalah lingkungan yang muncul apabila diperhatikan secara saksama diakibatkan dari perilaku negatif manusia itu sendiri. Pola pikir, sikap, serta tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Ekoliterasi merupakan elemen yang berperan penting dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada peserta didik. Berdasarkan penelitian terdahulu diungkapkan bahwa ekoliterasi secara positif berhubungan terhadap sikap peduli lingkungan. Ketika diri seorang individu peserta didik ditanamkan literasi ekologi yang baik, maka akan memiliki pengetahuan lingkungan yang tinggi serta meningkatkan sikap dan perilaku mereka terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Syah et al., 2021); (Kavaz et al., 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa ekoliterasi secara efektif dapat menjadikan peserta didik di sekolah memiliki sikap dan perilaku peduli lingkungan yang tinggi (Meilinda et al., 2017). Penelitian yang turut membuktikan bahwa peserta didik dengan ekoliterasi optimal secara akademis cenderung dapat memahami pengetahuan dasar tentang ekologi dan keberlanjutan manusia dibandingkan peserta didik dengan ekoliterasi kurang optimal (Wolff et al., 2017). Kelompok peserta didik dengan ekoliterasi rendah berdampak pada sikap peduli lingkungan mereka yang lebih rendah, sebaliknya kelompok peserta didik dengan ekoliterasi tinggi berdampak pada sikap peduli lingkungan mereka yang lebih tinggi (Muliana et al., 2018). Ekoliterasi secara signifikan mempunyai korelasi terhadap penerapan sikap peduli lingkungan peserta didik (Boca & Saraçlı, 2019). Hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian lain yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara tingkatan ekoliterasi terhadap implementasi perilaku cinta lingkungan yang dimiliki peserta didik (Goulgouti et al., 2019).

Faktor lainnya yang turut memengaruhi munculnya sikap peduli lingkungan peserta didik adalah pendekatan Education for Sustainable Development (ESD). Berdasarkan penelitian terdahulu dikemukakan bahwa pendidikan adalah sarana yang dapat mengubah persepsi, sikap, dan perilaku manusia. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan secara efektif dapat dicapai melalui pendidikan (Oe et al., 2022). Penelitian lain turut

mengungkapkan bahwa sikap peduli lingkungan akan berdampak pada program pembangunan yang berbasis ekologi secara berkelanjutan (Ardoin et al., 2020). Adapun penelitian yang juga menyatakan adanya signifikansi antara pendekatan ESD dengan sikap peduli lingkungan (Nousheen et al., 2020); (Maurer & Bogner, 2019); (Ali et al., 2022). Pembelajaran dengan pendekatan ESD turut memengaruhi sikap peduli lingkungan peserta didik menjadi lebih baik, dikarenakan peserta didik dengan aplikasi pembelajaran berbasis ESD yang baik mampu meningkatkan sikap peduli lingkungan yang lebih realistis (Olsson et al., 2022). Individu peserta didik dengan pembelajaran pendekatan ESD cenderung memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi (Laurie et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Teni Nurrita, 2018) menyatakan keterkaitan ekoliterasi dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Praktek pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD memiliki tiga aspek yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan gambaran situasi kelas, baik guru maupun peserta didik saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran dengan baik, diperlukan tim ekoliterasi sekolah untuk menyusun program-program kegiatan praktek ekoliterasi. Tujuan pembelajaran yang telah disusun dengan baik, akan diterapkan pada praktek pembelajaran ekoliterasi dengan terstruktur, dan akan mendapatkan hasil pembelajaran yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti timbul ketertarikan untuk menjadikan permasalahan yang telah dipaparkan di atas sebagai penelitian yang berjudul "Pengaruh Ekoliterasi dan Pendekatan Education for Sustainable Development (ESD) Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di waktu sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya menganalisis tentang ekoliterasi berorientasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dalam praktek pembelajaran di sekolah, maka pada penelitian ini yang akan dibahas adalah pengaruh ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik di sekolah. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu: 1) menganalisis terkait pengaruh ekoliterasi terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik; 2) menganalisis terkait pengaruh pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik; 3) menganalisis terkait pengaruh ekoliterasi dan pendekatan ESD secara bersama-sama terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik. Adapun dilaksanakannya penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak sekolah tentang pentingnya ekoliterasi dan pendekatan Education for Sustainable Development (ESD) terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik, sehingga timbul kesadaran

untuk membentuk dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan kepada peserta didik untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

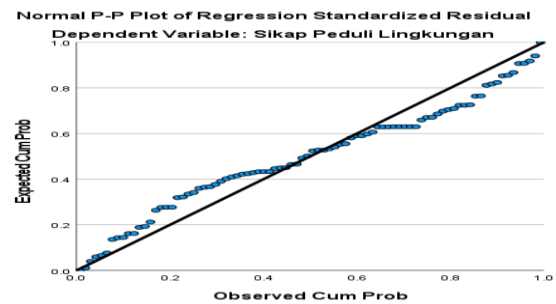
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe asosiatif kausal dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara ekoliterasi (X1) dan pendekatan ESD (X2) terhadap sikap peduli lingkungan (Y). Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme yang berguna terhadap populasi atau sampel tertentu untuk diteliti, pengumpulan dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik menggunakan instrumen penelitian bertujuan untuk memberi gambaran dan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:15). Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI jurusan IPS SMA Negeri 1 Cerme yang berjumlah 109 peserta didik. Sedangkan jumlah sampelnya adalah 85 responden yang diperoleh melalui perhitungan rumus Slovin. Adapun jumlah pembagian sampel setiap kelas adalah sebanyak 28 peserta didik dari kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI IPS 3. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling yaitu penyebaran sampel akan dilakukan secara proporsional di setiap kelas. Adapun pemerolehan data ekoliterasi dan pendekatan ESD di penelitian ini diambil dari kuesioner setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, kemudian disebar ke peserta didik. Sebelum kuesioner disebar, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu terhadap 36 responden. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang disebut skala Likert dengan interval 1-5. Variabel ekoliterasi pada penelitian ini mengadopsi dari kuesioner yang dikembangkan dalam tesisnya (Kurniasari, 2020). Sedangkan untuk variabel pendekatan ESD mengadopsi kuesioner yang dikembangkan dalam skripsinya (Putri, 2021). Adapun data sikap peduli lingkungan peserta didik diperoleh dari kuesioner yang sumber pernyataannya diambil dari data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan Tim Adiwiyata dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Cerme. Pada penelitian ini untuk pengujian hipotesis akan dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis data pada penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji t, uji f, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas, hasil uji normal probability plots terlihat menunjukkan garis diagonal titik 0 diikuti titik-titik, serta pelebaran yang tidak terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan distribusi data dalam penelitian ini normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

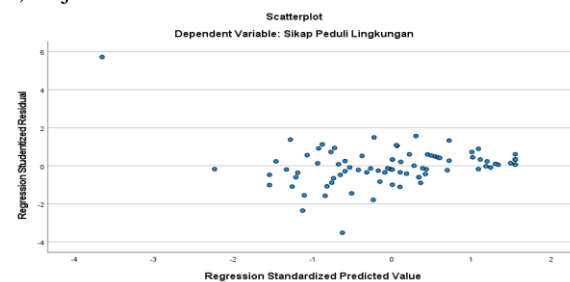
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ekoliterasi	0.428	2.335
Pendekatan ESD	0.428	2.335

a. Dependent Variable: Sikap Peduli Lingkungan

Berdasarkan dari tabel uji multikolinearitas di atas, diketahui nilai Tolerance Ekoliterasi (X1) sebesar $0,428 > 0,1$ dan Pendekatan ESD (X2) sebesar $0,428 > 0,1$. Diketahui pula nilai VIF Ekoliterasi sebesar $2,335 < 10,00$ dan Pendekatan ESD (X2) sebesar $2,335 < 10,00$. Dapat disimpulkan gejala multikolinearitas dalam penelitian ini tidak terjadi.

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas, tidak terdapat pola jelas dan terlihat bahwa titik-titik tersebar, namun juga membentuk beberapa pola (menyebar atau menyempit) di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan heteroskedastisitas dalam penelitian ini tidak terjadi.

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.804	0.000
Ekoliterasi	2.788	0.007
Pendekatan ESD	4.822	0.000

a. Dependent Variable: Sikap Peduli Lingkungan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ekoliterasi

Uji t variabel X1 (Ekoliterasi) terhadap variabel Y (Sikap Peduli Lingkungan) menunjukkan

nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan t hitung $> t$ tabel yaitu $2,788 > 1,66277$. Hal ini berarti H_0 1 ditolak dan H_a 2 diterima. Maka dari itu, disimpulkan ekoliterasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap peduli lingkungan.

b) Pendekatan ESD

Uji t variabel X_2 (Pendekatan ESD) terhadap variabel Y (Sikap Peduli Lingkungan) menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $4,882 > 1,66277$, hal ini berarti H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima. Maka dari itu, disimpulkan pendekatan ESD berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap peduli lingkungan.

4) Uji f

Tabel 3 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1735.678	2	867.839	59.967	<.001 ^b
	Residual	1201.171	83	14.472		
	Total	2936.849	85			

a. Dependent Variable: Sikap Peduli Lingkungan
b. Predictors: (Constant), Pendekatan ESD, Ekoliterasi

Dari tabel di atas, data Adjusted R Square menunjukkan nilai 0,591 atau 59,1%, sehingga dapat diartikan bahwa Ekoliterasi (X_1) dan Pendekatan ESD (X_2) terhadap Sikap Peduli Lingkungan (Y) adalah sebesar 59,1% dan 40,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4 Hasil Uji f

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.769 ^a	.591	.581	3.804	2.044

a. Predictors: (Constant), Pendekatan ESD, Ekoliterasi
b. Dependent Variable: Sikap Peduli Lingkungan

Dari tabel di atas, data Adjusted R Square menunjukkan nilai 0,591 atau 59,1%, sehingga dapat diartikan bahwa Ekoliterasi (X_1) dan Pendekatan ESD (X_2) terhadap Sikap Peduli Lingkungan (Y) adalah sebesar 59,1% dan 40,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan interpretasi data dari hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan penelitian ini membuahkan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan. Temuan penelitian ini berdasarkan analisis hasil penelitian dan observasi di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, metode pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD di SMA Negeri 1 Cerme memiliki kategori yang cukup baik. Hal itu terlihat dari kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dari peserta didik yang sudah baik, namun untuk aspek keterampilan masih kurang baik, karena kurang memerhatikan prinsip keberlanjutan. Penelitian serupa mengemukakan bahwa pembelajaran ekoliterasi akan berjalan dengan baik, jika dalam penetapan tujuan pembelajaran yang jelas untuk meningkatkan aspek kognitif dan psikomotorik yang ada pada peserta didik (Sholihah et al., 2021).

Faktor kedua, pada aspek implementasi dan realisasi, dari hasil penelitian metode pembelajaran

ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap kepedulian lingkungan di SMA Negeri 1 Cerme dengan kategori cukup baik. Hal itu terlihat dari kegiatan peserta didik dalam hal menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan seperti kerja bakti, gotong royong membersihkan kelas dan taman, serta aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi kegiatan yang bersifat merusak lingkungan. Akan tetapi, untuk prinsip keberlanjutan perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, guru harus bisa memikat daya tarik peserta didik dalam hal pendalaman ekoliterasi dan pendekatan ESD untuk menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan pada peserta didik. Hasil penelitian yang serupa menunjukkan bahwa pendekatan ESD membutuhkan pendidikan ekoliterasi untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang pentingnya menjaga lingkungan alam dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, kesadaran serta meningkatkan kemampuannya untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan melakukan tindakan atas nama pelestarian alam, penerapan ekonomi hijau, dan penciptaan dari masyarakat yang adil dan merata (Salimi et al., 2021).

Penelitian terkait penerapan metode pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD di sekolah berpengaruh signifikan terhadap sikap peduli terhadap lingkungan yang dimiliki warga sekolah. Pada strategi pengorganisasian, dapat secara mikro, dan juga secara makro. Hal tersebut tergantung pada kebijakan sekolah untuk pelaksanaan ekoliterasi dan pendekatan ESD di sekolah. Terdapat sekolah yang mengorganisasikan secara mikro melalui pembuatan hidroponik, pembuatan kompos, kegiatan pemungutan sampah di luar jam pembelajaran. Ada juga sekolah yang menerapkan ekoliterasi dan pendekatan ESD dengan diintegrasikan bersama mata pelajaran lain. Banyak juga sekolah yang mengombinasikan pengelolaan pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD dengan cara mikro dan makro. Pada strategi penyampaian, guru bisa menyampaikan ekoliterasi dan pendekatan ESD dengan cara yang berbeda antara guru satu dengan guru lain, misalnya dengan penggunaan media yang berbeda, dan bentuk belajar yang berbeda disesuaikan dengan kondisi guru, peserta didik, dan sekolah. Pencapaian tujuan ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap peningkatan sikap peduli lingkungan merupakan hal yang terpenting. Penelitian yang serupa menunjukkan bahwa dalam praktek pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan pemahaman bagi peserta didik tentang pentingnya kesadaran lingkungan. Guru juga bertugas untuk mendidik peserta didik dalam menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari (Muliana et al., 2018).

Reigeluth (Al Idrus, 2017) menjelaskan bahwa dalam praktek ekoliterasi dan pendekatan ESD

terdapat tiga variabel, yaitu variabel pertama, kondisi pembelajaran. Dalam kondisi pembelajaran terdapat tiga hal, yaitu tujuan pembelajaran, kendala, dan karakter yang ada pada peserta didik. Variabel kedua, metode pembelajaran yang dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Variabel ketiga, hasil pembelajaran yang terdiri dari tiga kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Bersumber dari pendapat Reigulet, maka kualitas praktek pembelajaran bergantung pada pelaksanaan tiga variabel tersebut. Jika ketiga variabel tersebut dapat terlaksana dengan baik artinya praktek ekoliterasi dan pendekatan ESD dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi, apabila salah satu variabel tidak dapat terlaksana dengan baik, maka kualitas praktek ekoliterasi dan pendekatan ESD kurang baik, dan perlu diperbaiki.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Gunansyah, 2020) diketahui bahwa kondisi pembelajaran dalam praktek pembelajaran ekoliterasi dan pendekatan ESD di Sekolah Dasar Negeri Kota Surabaya bagian Barat berkategori kurang baik. Hal itu terlihat bahwa dari indikator kendala pembelajaran masih ada sekolah yang mengalami kendala-kendala saat melakukan praktek pembelajaran ekoliterasi, seperti kendala waktu, biaya, dan personalia. Pembelajaran ekoliterasi akan berjalan dengan baik, jika dalam pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan jelas, baik untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik (Pandikar, 2020).

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Adanya pengaruh yang signifikan pada praktek ekoliterasi terhadap sikap peduli lingkungan yang dimiliki peserta didik; 2) Adanya pengaruh yang signifikan pada penggunaan pendekatan ESD dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah terhadap sikap peduli lingkungan yang dimiliki peserta didik; dan 3) Adanya pengaruh yang signifikan pada ekoliterasi dan pendekatan ESD terhadap sikap peduli lingkungan yang dimiliki peserta didik. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat sikap peduli lingkungan yang ada pada peserta didik akan rendah jika ekoliterasi pada peserta didik juga rendah dan tidak diterapkan secara konsisten atau berkelanjutan. Sebaliknya, tingkat sikap peduli lingkungan yang ada pada peserta didik akan tinggi jika ekoliterasi pada peserta didik juga tinggi dan diterapkan secara konsisten atau berkelanjutan. Maka dari itu, ekoliterasi dan pendekatan ESD menjadi salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan sikap peduli lingkungan pada peserta didik secara berkelanjutan, sehingga praktek ekoliterasi dan pendekatan ESD menjadi salah satu pemahaman dan

pendekatan yang berpengaruh signifikan terhadap sikap peduli lingkungan pada peserta didik.

5. REFERENSI

- Aisy, M. (2020). Praktik Education Sustainable Development : Studi Komparasi Di Sekolah Dasar Kota Surabaya. *Jpgsd*, 8(2), 1–11.
- Al Idrus, S. (2017). Strategi Pembelajaran Kewirausahaan: Aplikasi Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (Amirullah (ed.)). Media Nusa Creative.
- Ali, M., Permasari, A., Hadiapurwa, A., & Lestari, H. (2022). Blended Learning in the Implementation of Environment Dimension of ESD Infused into Junior High School Science.
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. *Biological Conservation*, 241(April 2019), 108224. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224>
- Benavot, A. (2014). Education for Sustainable Development in Primary and Secondary Education. University at Albany State University of New York, October, 43. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1978.9283>
- Boca, G. D., & Saraçlı, S. (2019). Environmental Education and Student's Perception, for Sustainability. *Sustainability*, 11(6), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11061553>
- Goulgouti, A., Plakitsi, A., & Stylos, G. (2019). Environmental Literacy: Evaluating Knowledge, Affect, and Behavior of Pre-service Teachers in Greece. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.29333/ijese/6287>
- Kavaz, T., Kizgut-Eryilmaz, B., Polat, B., Amca-Toklu, D., & Erbay, F. (2021). Investigation of Preschool Children's Perceptions to Protect the Environment Through Drawings. *Theory and Practice in Child Development*, 1(1), 41–55. <https://doi.org/10.46303/tpicd.2021.4>
- Kurniasari, N. D. R. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Kearifan Lokal dan Ekoliterasi Dengan Green Behavior Pada Siswa Sekolah Adiwiyata Bandung Jawa Barat. Universitas Negeri Jakarta.
- Laurie, R., Nonoyama-Tarumi, Y., Mckeown, R., & Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education: A Synthesis of Research. *Journal of Education for Sustainable Development*, 10(2), 226–242. <https://doi.org/10.1177/0973408216661442>
- Marshall, N. A., Thiault, L., Beeden, A., Beeden, R., Benham, C., Curnock, M. I., Diedrich, A., Gurney, G., Jones, L., & Marshall, P. A. (2019). Our environmental value orientations influence how we respond to climate change.

- Frontiers in Psychology, 10(APR), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00938>
- Maurer, M., & Bogner, F. X. (2019). How freshmen perceive environmental education (ee) and education for sustainable development (ESD). *PLoS ONE*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208910>
- McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? *Ecosphere*, 4(5), 1–20. <https://doi.org/10.1890/ES13-00075.1>
- Meilinda, H., Prayitno, B. A., & Karyanto, P. (2017). Student's Environmental Literacy Profile of Adiwiyata Green School in Surakarta, Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 11(3), 299–306.
- Mu'min, A. M. M. (2019). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/38622/>
- Muliana, A., Maryani, E., & Somantri, L. (2018). Ecoliteracy Level of Student Teachers (Study toward Students of Universitas Syiah Kuala Banda Aceh). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 145(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012061>
- Nousheen, A., Yousuf Zai, S. A., Waseem, M., & Khan, S. A. (2020). Education for sustainable development (ESD): Effects of sustainability education on pre-service teachers' attitude towards sustainable development (SD). *Journal of Cleaner Production*, 250, 119537. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.119537>
- Oe, H., Yamaoka, Y., & Ochiai, H. (2022). A Qualitative Assessment of Community Learning Initiatives for Environmental Awareness and Behaviour Change: Applying UNESCO Education for Sustainable Development (ESD) Framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3528. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063528>
- Olsson, D., Gericke, N., & Boeve-de Pauw, J. (2022). The effectiveness of education for sustainable development revisited—a longitudinal study on secondary students' action competence for sustainability. *Environmental Education Research*, 28(3), 405–429. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2033170>
- Pandikar, E. (2020). “Pembelajaran Ips Meningkatkan Kemampuan Ekoliterasi Peserta Didik.” *Jurnal Sandhyakala*, 1(2), 71–82. <https://jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/sandhyakala/article/view/340>
- Putri, N. T. (2021). Implementasi Nilai-nilai Education for Sustainable Development (ESD) di Sekolah Adiwiyata dan Non Adiwiyata. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salimi, M., Dardiri, A., & Sujarwo, S. (2021). The profile of students' eco-literacy at nature primary school. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(4), 1450–1470. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.5999>
- Setyaningrum, T. W., & Gunansyah, G. (2020). Praktik Pembelajaran Ekoliterasi Berorientasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah Dasar Negeri Kota Surabaya Bagian Barat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(2), 375–384. <https://bit.ly/35jit2J>
- Sholihah, N. R., Sapriya, S., Supriatna, N., & Komalasari, K. (2021). Ecoliteracy of Elementary School Students in Social Studies: In Online Learning During the Pandemic of COVID 19. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210222.016>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Surjanti, J., Soejoto, A., Seno, D. N., & Waspo. (2020). Mangrove forest ecotourism: Participatory ecological learning and sustainability of students' behavior through self-efficacy and self-concept. *Social Sciences & Humanities Open*, 2(1), 100009. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2019.100009>
- Syah, N., Hidayat, H., Yuca, V., Ardi, Z., & Magistarina, E. (2021). Examining the Effects of Ecoliteracy on Knowledge, Attitudes, and Behavior through Adiwiyata Environmental Education for Indonesian Students. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 209–230. <https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/3043>
- Teni Nurrita. (2018). Kata Kunci :Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. *Jurnal Misykat*, 03(01), 171. <https://media.neliti.com/media/publications/271164-pengembangan-media-pembelajaran-untuk-me-b2104bd7.pdf>
- Walker, C. (2017). Tomorrow's Leaders and Today's Agents of Change? Children, Sustainability Education and Environmental Governance. *Children & Society*, 31(1), 72–83. <https://doi.org/10.1111/chso.12192>
- Wolff, L. A., Sjöblom, P., Hofman-Bergholm, M., & Palmberg, I. (2017). High Performance Education Fails in Sustainability? A Reflection on Finnish Primary Teacher Education. *Education Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/educsci7010032>

KEANEKARAGAMAN SERANGGA POLINATOR PADA BUNGA KEDELAI DAN KACANG TANAH

Oleh :

Junianto S Batubara

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
juniantobatubara@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Serangga penyerbuk merupakan salah satu layanan jasa ekosistem yang sangat penting bagi manusia maupun lingkungan dan berperan sebesar 35% dalam penyediaan sumber pangan dunia. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui komposisi dan kelimpahan serangga pengunjung bunga kedelai dan kacang tanah. Penelitian ini dilakukan di Kampung Sawah baru, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pengamatan, *Megachile sp.* (Hymenoptera: Megachilidae) merupakan serangga polinator yang paling banyak dijumpai kunjungannya terhadap bunga pertanaman kacang tanah dan kedelai.

Kata Kunci: Serangga polinator, bunga kedelai, kacang tanah

1. PENDAHULUAN

Serangga penyerbuk merupakan salah satu layanan jasa ekosistem yang sangat penting bagi manusia maupun lingkungan dan berperan sebesar 35% dalam penyediaan sumber pangan dunia (Klein *et al.*, 2007). Salah satu kunci keberhasilan produksi pertanian adalah penyerbukan tanaman oleh serangga (Kevan dan Phillips, 2001; Steffan-Dewenter *et al.*, 2005). Lebih kurang 80% tanaman pertanian proses penyerbukannya bergantung pada tingkat kunjungan serangga penyerbuk. Serangga penyerbuk terdiri atas beberapa Ordo yaitu Diptera, Coleoptera, dan Hymenoptera, namun demikian yang perannya sangat penting untuk reproduksi seksual berbagai macam tanaman pertanian adalah Hymenoptera khususnya lebah (Ashman *et al.*, 2004). Lebah dianggap lebih efisien dalam membantu penyerbukan tanaman pertanian, karena mampu meningkatkan stabilitas, kualitas dan jumlah layanan penyerbukan sepanjang waktu dan ruang daripada dengan serangga lain (Winfrey *et al.*, 2006).

Ketertarikan serangga penyerbuk terhadap bunga tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran bunga, warna bunga dan jumlah bunga (Asikainen dan Mutikainen, 2005). Bunga tanaman dikelilingi oleh corolla yang warna, bentuk dan susunannya berbeda antar species, yang ditujukan untuk menarik serangga penyerbuk (Menzel dan Shmida, 1993). Selain itu ketertarikan serangga terhadap bunga juga dipengaruhi oleh ketersediaan nektar dan tepung sari (Winfrey *et al.*, 2008). Ketersediaan tepung sari dan nektar pada bunga merupakan daya tarik yang sangat penting sebagai sumber pakan serangga (Faheem *et al.*, 2004). Bunga menyediakan pakan bagi serangga berupa tepung sari dan nektar dan berada dekat dengan organ seksual bunga. Serangga penyerbuk beradaptasi terhadap sumber pakan pada bunga melalui evolusi dan pengalaman sepanjang hidupnya. Salah satu yang berkembang dengan baik adalah kemampuan

serangga mengenal warna bunga sehingga mampu mengenal lokasi dan membedakan antar bunga (Kevan dan Phillips, 2001). Namun demikian untuk mengunjungi bunga serangga pertama kali tertarik terhadap warna bunga (Campbell *et al.*, 2010) yang membatasi serangga penyerbuk tertentu untuk mengunjungi bunga dan mempengaruhi perilaku secara umum dari serangga penyerbuk. Diantara faktor-faktor tersebut yang pertama kali menentukan kunjungan serangga penyerbuk pada bunga adalah warna bunga (Menzel dan Shmida, 1993).

Tanaman kedelai memiliki bunga berwarna putih dan tanaman kacang tanah memiliki bunga berwarna kuning (Widhiono dan Suidiana, 2015). Tanaman-tanaman tersebut mempunyai warna bunga yang berbeda dan penyerbukannya sangat bergantung pada kehadiran serangga pengunjung bunga. Efektivitas penyerbukan tanaman sangat bergantung pada keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk yang ada sehingga dianggap perlu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui komposisi dan kelimpahan serangga pengunjung bunga kedelai dan kacang tanah.

2. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2019, dimulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00 di Kampung Sawah baru, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah handphone/alat perekam, jaring serangga, stopwatch dan alat tulis.

Prosedur Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu plot pengamatan masing-masing 10 tanaman pada pertanaman kedelai dan kacang tanah. Plot pengamatan berukuran 1 m x

4 baris tanaman. Pengamatan dilakukan pada tiga periode yaitu pukul 07.00-08.00, 09.00-10.00, dan 11.00-12.00 dengan masing-masing periode pengamatan adalah 10 menit. Amati dan hitung berbagai jenis serangga yang berkunjung pada bunga selama 10 menit pengamatan. Kemudian hitung berapa lama serangga hinggap pada bunga tersebut menggunakan *stopwatch*. Hitung berapa jumlah bunga kedelai dan kacang tanah yang mekar pada setiap plot pengamatan.

Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, melakukan analisis data meliputi membandingkan komposisi serangga pengunjung bunga pada bunga kedelai dan kacang tanah, membandingkan kelimpahan serangga pengunjung bunga menurut periode pengamatan, baik pada kedelai maupun kacang tanah serta membandingkan lama kunjungan antar serangga pengunjung bunga, baik pada kedelai maupun kacang tanah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman Serangga Polinator

Serangga polinator secara keseluruhan berkunjung pada tanaman kacang tanah sebanyak 44 individu dan sebanyak 56 individu yang mengunjungi pertanaman kedelai (Tabel 1). *Megachile* sp. (Hymenoptera: Megachilidae) merupakan polinator dominan terhadap 2 jenis tanaman budidaya yang berbeda tersebut, diikuti Halictidae (Hymenoptera), dan Syrphidae (Diptera), serta 2 jenis lainnya yaitu Vespidae (Hymenoptera) dan Chliaria sp. (Lepidoptera: Lycaenidae) yang hanya terdapat pada kedelai. Penemuan 3 dan 5 jenis serangga polinator secara berurutan terhadap kacang tanah dan kedelai menunjukkan jumlah yang kurang menjamin keberhasilan penyerbukan tanaman pada kawasan ini. Jumlah spesies polinator yang rendah kemungkinan disebabkan oleh kurangnya warna bunga yang melimpah. Pada saat praktikum dilaksanakan, diketahui bahwa dalam area pengamatan hanya terdapat 2 warna bunga yaitu bunga warna kuning pada kacang tanah dan bunga warna putih pada kedelai. Banyaknya serangga polinator yang berkunjung pada bunga kacang tanah yang berwarna kuning juga diduga dipengaruhi oleh kesukaan serangga terhadap warna kuning daripada warna putih pada bunga kedelai. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari et al, (2016) bahwa disamping ketersediaan nektar dan serbuk sari, warna kuning pada bunga semangka mampu menarik serangga polinator untuk berkunjung dibandingkan bunga warna putih pada tanaman lainnya.

Tabel 1. Keanekaragaman Serangga polinator

Tanaman	Polinator					Total
	Megachile sp.	Halictidae	syrphidae	Vespidae	Chliaria sp.	
Kacang tanah	38	3	3	0	0	44
Kedelai	47	3	2	3	1	56

Selain itu, kedelai dan kacang tanah juga dikenal berasal dari famili yang sama yaitu Fabaceae pada ordo Leguminosae, sedikitnya variasi dan jenis tanaman dalam hal ini diduga sebagai kurangnya daya tarik terhadap kehadiran serangga polinator. Hal ini didukung oleh Winfree *et al*, (2008) yang berpendapat bahwa kepadatan dan keragaman bunga merupakan faktor yang paling penting dan menentukan keragaman serangga penyerbuk.

Keanekaragaman Serangga Polinator Berdasarkan Waktu

Keanekaragaman serangga polinator ditentukan oleh perbedaan waktu. Hal ini diduga ada pengaruhnya terhadap kebiasaan serangga polinator tersebut mencari pakan pada bunga.

Tabel 2. Keanekaragaman Serangga polinator pada pukul 07.00-08.00 WIB

Tanaman	Polinator					Total
	Megachile sp.	Halictidae	syrphidae	Vespidae	Chliaria sp.	
Kacang tanah	16	2	0	0	0	18
Kedelai	11	0	1	0	0	12

Penemuan serangga polinator yang berkunjung pada waktu yang berbeda menunjukkan bahwa 5 jenis serangga polinator tersebut menyukai atau cenderung mengunjungi bunga pada waktu 07.00-08.00 (Tabel 2), 09.00-10.00 (Tabel 3), kemudian diikuti pada dan 11.00-12.00 (Tabel 4).

Tabel 3. Keanekaragaman Serangga polinator pada pukul 09.00-10.00 WIB

Tanaman	Polinator					Total
	Megachile sp.	Halictidae	syrphidae	Vespidae	Chliaria sp.	
Kacang tanah	17	1	2	0	0	20
Kedelai	19	3	1	2	2	26

Dalam hal ini juga dapat dijadikan informasi bahwa semakin sedikit waktu yang digunakan serangga polinator untuk mengunjungi bunga maka semakin banyak bunga yang dapat dikunjungi serangga tersebut (tabel 5).

Tabel 4. Keanekaragaman Serangga polinator pada pukul 11.00-12.00 WIB

Tanaman	Polinator					Total
	Megachile sp.	Halictidae	syrphidae	Vespidae	Chliaria sp.	
Kacang tanah	5	0	1	0	0	6
Kedelai	17	0	0	1	0	18

Megachile sp. merupakan spesies yang diketahui berkunjung pada bunga kedelai dan kacang tanah pada 3 periode pengamatan yang berbeda namun dengan waktu berkunjung yang singkat setiap bunganya. Hal ini didukung oleh penelitian Hasan *et al*. (2017) yang menyatakan bahwa makin banyak jumlah bunga yang dikunjungi

per satuan waktu maka waktu kunjungan per bunga makin singkat, yaitu pada *Megachile* sp. yang mampu mengunjungi bunga mentimun dengan jumlah kunjungan yang tinggi sebesar 9,63 bunga/menit.

Tabel 5. Rata-rata lama kunjungan serangga polinator

Tanaman	Polinator				
	Megachile sp.	Halictidae	syrphidae	Vespidae	Chliaria sp.
Kacang tanah	2	2,5	2	0	0
Kedelai	3,3	2	3	5	22

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Megachile* sp. (Hymenoptera: Megachilidae) merupakan serangga polinator yang paling banyak dijumpai kunjungannya terhadap bunga pertanaman kacang tanah dan kedelai. *Megachile* sp. Rendahnya keragaman jenis serangga polinator yang berkunjung menunjukkan bahwa rendahnya variasi bunga yang mengundang pakan kehadiran serangga polinator.

5. REFERENSI

- Ashman TI. 2000. Pollinator selectivity and its implications for the evolution of dioecy and sexual dimorphisme. *Ecology* 81: 2577-2591.
- Campbell RD, Bischoff M, Lord LM dan Robertson AW. 2010. Flower color influences insect visitation in Alpine New Zealand. *Ecology* 91(9):2638-2649.
- Faheem M, Aslam M, dan Razaq M. 2004. Pollination ecology with special reference to insects a review. *J Res Sci* 4:395-409.
- Hasan PA, Atmowidi T, dan Kahono S. 2017. Keanekaragaman, perilaku kunjungan, dan efektivitas serangga penyerbuk pada tanaman mentimun (*Cucumis sativus* Linn.). *Jurnal Entomologi Indonesia* 14 (1): 1-9.
- Kevan PG dan Phillips TP. 2001. The economic impacts of pollinator declines: an approach to assessing the consequences. *Conservation Ecol.* 5(1): 8.
- Klein AM, Vaissiere B, Cane J, Steffan-Dewenter I, Cunningham SA, Kremen C, dan Tschanke T. 2007. Importance of crop pollinators in changing landscapes for world's crops. *Proceeding Royal Society London B, Biological Sciences* 274: 303-313.
- Sari R, Dahelmi, dan Mairawita. 2016. Kupu-Kupu Pengunjung pada Bunga Semangka (*Citrullus lanatus*) (Thunb.) Matsum & Nakai Di Katapiang Ujuang dan Karambia Ampek, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *BioCONCETTA* 2 (1): 35-42.

- Steffan-Dewenter I, Potts SG, dan Parker L. 2005. Pollinator diversity and crops pollination services are at risk. *Trends Ecol.* 20: 651-652.
- Winfree, Williams NM, Caines H, Ascher JS dan Kremen C. 2008. Wild bee pollinators provide the majority of crop visitation a cross land-use gradients in New Jersey. *J. App.Ecol.* 45: 793-802.

ANALISIS UJI MISKONSEPSI SISWA DENGAN TWO-TIER MULTIPLE CHOICE MENGGUNAKAN SISTEM HIBRID LEARNING PADA MASA PANDEMI

Oleh :

Agung Suci Dian Sari¹⁾, Ruslimin.A²⁾, Ning Nikma³⁾, Saniatul Kamilah⁴⁾

^{1,3,4} Pendidikan Fisika, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia

² Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

* e-mail: agungsucidiansari@itsnupasuruan.ac.id,

²ruslimin32@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tes miskonsepsi siswa dengan two-tier multiple choice menggunakan sistem pembelajaran hybrid pada masa pandemi. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester gasal tahun pelajaran 2021/2022 dengan materi gerak lurus yang dilaksanakan di SMAN 1 Kejayan pada kelas XMIPA 1 dan XMIPA 3 dengan jumlah siswa 64 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan pengumpulan data melalui tes miskonsepsi dengan two-tier multiple choice dan wawancara guru. Berdasarkan hasil uji miskonsepsi dengan two-tier multiple choice diketahui bahwa siswa mengalami miskonsepsi tentang gerak lurus dengan persentase 42%, memahami konsep 25%, dan tidak memahami konsep 33% dan hasil wawancara guru menyatakan pembelajaran gerak lurus pada masa pandemi ini dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran hybrid dengan 50% siswa offline dan 50% online. Kendala yang dialami selama pembelajaran materi gerak lurus adalah siswa belum memahami konsep secara utuh.

Kata Kunci: Miskonsepsi, two-tier multiple choice, pandemi

1. PENDAHULUAN

Konsep adalah dasar untuk proses pembentukan mental menjadi lebih tinggi agar dapat merumuskan prinsip serta melakukan generalisasi. Menurut Wardhani (2008) konsep merupakan inti pemikiran seseorang. Sedangkan menurut Hudojo (2003) konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan mengklasifikasikan objek dan peristiwa itu termasuk atau tidak kedalam ide abstrak tersebut. Konsep membantu dalam menarik sebuah kesimpulan pada situasi-situasi baru. Selain itu, konsep kadang-kadang memadatkan berbagai macam informasi menjadi informasi tunggal.

Permendiknas 2016 mengungkapkan bahwa, pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran Fisika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar Fisika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep Fisika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Menurut Koestoro (2016) pemahaman konsep diperoleh melalui penemuan dan penghapalan. Penemuan konsep terjadi jika proses asimilasi dan dan akomodasi informasi dalam struktur kognitif, sedangkan penghapalan konsep terjadi bila konsep benar-benar baru dan belum ada dalam struktur kognitif. Kesalahan pemahaman konsep oleh siswa secara konsisten akan mempengaruhi efektivitas proses belajar selanjutnya dari siswa yang bersangkutan. Jika siswa secara terus-menerus memiliki konsep-konsep yang tidak tepat, maka akan

menimbulkan masalah belajar di masa yang akan datang. Masalah yang timbul misalnya terjadinya miskonsepsi pada diri siswa.

Miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Miskonsepsi adalah kepercayaan yang tidak sesuai dengan penjelasan yang sebenarnya dan terbukti sah tentang suatu fenomena atau peristiwa. Penyebab miskonsepsi pada siswa dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kesalahan dari siswa sendiri, kesalahan dari guru ketika menjelaskan pelajaran, kesalahan dari buku teks yang digunakan, kesalahan konteks, dan kesalahan dari metode mengajar yang digunakan oleh guru saat pembelajaran. Cara mengatasi miskonsepsi yang terjadi di kalangan siswa, selain mengetahui penyebab dari miskonsepsi itu sendiri, perlu juga dilakukan diagnosis miskonsepsi-miskonsepsi yang dialami siswa. Diagnosis adalah proses yang kompleks dalam suatu usaha untuk menarik kesimpulan dari hasil-hasil pemeriksaan gejala-gejala, perkiraan penyebab, pengamatan dan penyesuaian dengan kategori secara baik. Dalam dunia pendidikan diagnosis memiliki arti yang luas, meliputi identifikasi mengenai kekuatan dan kelemahan siswa pada suatu konsep. Dalam mendiagnosis miskonsepsi diperlukan suatu alat ukur atau alat diagnostik yang dapat mengidentifikasi miskonsepsi yang ada dikalangan siswa.

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat, jenis kesukaran yang

dihadapi oleh para siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Suwanto (2012) menjelaskan tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan atau miskonsepsi pada topik tertentu dalam pembelajaran sehingga dari hasil tes didapat masukan tentang respon siswa untuk memperbaiki kelemahannya. Tes diagnostik berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa, termasuk kesalahan pemahaman konsep. Dengan diketahuinya letak kesalahan pemahaman konsep pada siswa, guru dengan segera dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui tes diagnostik ini dapat diketahui tentang konsep-konsep yang telah dipahami dan yang belum dipahami oleh siswa.

Miskonsepsi dapat terjadi pada semua bidang sains, seperti: fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Dalam bidang fisika, miskonsepsi dapat terjadi di semua subbidang fisika, seperti mekanika, termodinamika, optika, bunyi, gelombang, listrik, magnet, dan fisika modern. Dari sekian banyaknya penelitian miskonsepsi di bidang fisika, miskonsepsi banyak terjadi pada subbidang mekanika, salah satunya adalah pada materi gerak lurus.

Pada tahun 2020 ini, seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia (Purwanto et al., 2020). Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk sementara menutup sekolah, kampus selama masa pandemi covid-19 berlangsung. Setiap Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 semua negara menerapkan sebuah tindakan salah satunya dengan melakukan gerakan sosial distancing.

Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat yaitu two-tier multiple choice menggunakan sistem hibrid learning pada masa pandemi yang dapat mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi gerak lurus.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan waktu dan tempat penelitian pada semester ganjil tahun ajaran

2021/2022 di SMAN 1 Kejayan kelas XMIPA 1 dan XMIPA 3 dengan jumlah 64 siswa. Prosedur penelitian meliputi:

a. Tahap pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah meminta perizinan dari pihak sekolah dan observasi untuk memperoleh informasi terkait pembelajaran di kelas, Kemudian menganalisis kebutuhan dan persiapan yang diperlukan pada saat penelitian berlangsung.

Pada tahap pendahuluan ada studi kepustakaan mengenai tes diagnostik, miskonsepsi, tes diagnostik two-tier multiple choice, serta materi gerak lurus. Studi kepustakaan tentang tes two-tier multiple choice dilakukan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya baik penelitian dalam negeri maupun luar negeri sebagai dasar pembuatan instrumen tes diagnostik.

b. Tahap persiapan dan pelaksanaan

Tahap persiapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Tahapan tes diagnostik two-tier multiple choice. Jumlah soal yang dikembangkan sebanyak 7 butir soal. Tes pilihan ganda dua tingkat memiliki format pilihan ganda dengan jumlah opsi tiga sebagai tahap pertama dan pada tahap kedua terdapat tiga opsi pernyataan sebagai alasan dari tahap pertama.
- 2) Tahapan wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran fisika SMAN 1 Kejayan kelas XMIPA 1 dan XMIPA 3. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses belajar dan pembelajaran saat pandemi baik secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).

c. Tahap analisis

Tahap analisis yang dilakukan yaitu analisis terhadap jawaban-jawaban siswa dari tes two-tier multiple choice yang sudah dikerjakan oleh siswa.

Data yang didapat dari hasil tes diagnostik two-tier multiple choice dianalisis dan diinterpretasikan miskonsepsi yang terkandung dalam jawaban-jawaban tersebut sehingga menghasilkan poin-poin miskonsepsi siswa pada materi gerak lurus.

- 1) Langkah-langkah analisis data hasil tes diagnostik two-tier multiple choice adalah sebagai berikut:
- 2) Merekapitulasi setiap jawaban responden dan mengubahnya menjadi skor.
- 3) Menginterpretasikan jawaban-jawaban yang tidak tepat yang termasuk kedalam miskonsepsi.
- 4) Menyusun semua miskonsepsi yang didapatkan dari hasil interpretasi.

Tabel 1: Interpretasi Hasil Two-Tier Diagnostik Test

No.	Kriteria	Kriteria Jawaban
1.	Paham Konsep	Pilihan benar-alasan benar
2.	Miskonsepsi	Pilihan benar-alasan salah Pilihan salah-alasan benar
3.	Tidak Paham Konsep	Pilihan salah-alasan benar

d. Langkah Analisis Data wawancara
Langkah-langkah analisis data hasil wawancara adalah sebagai berikut:
1) Mentranskripsikan hasil wawancara
2) Menganalisis hasil wawancara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil penelitian

Hasil penelitian sebagai berikut:

1). Hasil tes tulis uji miskonsepsi

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes *Two-Tier Multiple Choice*. Dalam tes ini, siswa selain memilih jawaban yang dianggap benar, juga harus memilih alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Jumlah butir soal yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) soal.



Gambar 1. Pengambilan tes uji miskonsepsi siswa

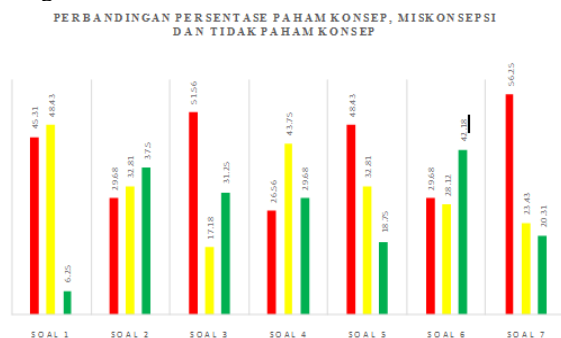
Berikut hasil persentase pemahaman siswa materi gerak lurus pada siswa XMIPA1 dan XMIPA 3 dengan jumlah keseluruhan 64 siswa.



Gambar 2. Hasil persentase pemahaman siswa materi gerak lurus pada siswa XMIPA1 dan XMIPA 3 dengan jumlah keseluruhan 64 siswa.

Berdasarkan gambar tersebut didapat bahwa persentase siswa miskonsepsi sebanyak **41,07%**, persentase siswa tidak paham konsep sebanyak **32,36%**, sedangkan persentase siswa paham konsep yaitu **26,56%**.

Grafik perbandingan paham konsep, miskonsepsi dan tidak paham konsep tiap soal sebagai berikut ini:



Gambar 3. Perbandingan persentase paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa miskonsepsi yang terjadi pada setiap nomor berbeda. Rata-rata persentase miskonsepsi terbesar terjadi pada soal nomor 7 dengan persentase sebanyak 56,25%.

2). Wawancara

Wawancara uji miskonsepsi dilaksanakan pada guru Fisika di SMAN 1 Kejayan kelas XMIPA 1 dan XMIPA 3 .



Gambar 4. Wawancara dengan guru Fisika

Berdasarkan hasil wawancara guru fisika diketahui bahwa di SMAN 1 Kejayan menggunakan kurikulum 2013 Revisi Terbaru dengan KD Pandemi (9 KD). Sistem yang digunakan dalam pembelajaran adalah sistem hybrid learning dengan 50% siswa tatap muka dan 50% daring. Untuk siswa yang melakukan pembelajaran secara daring, SMAN 1 Kejayan menyiapkan komputer didalam kelas agar siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan guru. Kendala yang dialami selama pembelajaran materi gerak lurus adalah siswa belum memahami konsep secara utuh, sehingga siswa seringkali kebingungan dalam mengerjakan beberapa jenis soal. Hal yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut, guru mata pelajaran fisika di SMAN 1 Kejayan dengan sering memberikan beberapa latihan soal.

2.Pembahasan

Data yang diperoleh dari hasil tes diagnostik two-tier multiple choice sangat bervariasi antara persentase siswa yang paham konsep, miskonsepsi dan persentase siswa yang tidak paham konsep. Dari hasil penelitian didapatkan persentase keseluruhan siswa yang paham konsep, miskonsepsi dan tidak paham konsep. Persentase siswa yang paham konsep pada materi gerak lurus sebesar 25%, persentase yang mengalami miskonsepsi sebesar 42% dan persentase siswa yang tidak paham konsep sebesar 33%. Dari gambar 3 persentase paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep berdasarkan nomor soal sangat beragam. Dari 7 butir soal yang diujikan terdapat 1 butir soal yang paling besar persentase paham konsepnya, yaitu pada soal nomor 6, sebesar 42,18% siswa paham konsep pada nomor soal tersebut.

Soal nomor 1, persentase siswa yang paham konsep sebesar 6,25%, siswa yang mengalami miskonsepsi 45,31%, dan siswa sebanyak 48,43% tidak paham konsep. Pada soal nomor 1 ini, siswa diminta untuk mengamati gambar tentang GLB dan GLBB. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat

dilihat bahwa siswa dominan tidak paham konsep tentang ilustrasi *Ticker Timer* GLB dan GLBB.

Soal nomor 2, persentase siswa yang paham konsep sebesar 37,50%, siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 29,68%, serta siswa yang tidak paham konsep sebanyak 32,81%. Pada soal nomor 2 ini, siswa diminta untuk mengamati gambar tentang jarak dan perpindahan. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat dilihat bahwa pada soal nomor 2 sebagian besar siswa sudah paham konsep tentang jarak dan perpindahan.

Soal nomor 3, persentase siswa yang paham konsep sebesar 31,25%, siswa yang mengalami miskonsepsi 51,56%, dan sisanya 17,18% siswa tidak paham konsep. Pada soal nomor 3 ini siswa diminta untuk mencari pernyataan yang benar mengenai perpindahan. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat dilihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi dalam memahami perpindahan secara menyeluruh.

Soal nomor 4, persentase siswa yang paham konsep sebesar 29,68%, siswa yang mengalami miskonsepsi 26,56%, dan siswa sebanyak 43,75% tidak paham konsep. Pada soal nomor 4 ini, siswa diminta untuk mengamati tabel kecepatan untuk menentukan percepatan. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat dilihat bahwa siswa dominan tidak paham konsep tentang hubungan kecepatan dan percepatan.

Soal nomor 5, persentase siswa yang paham konsep sebesar 18,75%, siswa yang mengalami miskonsepsi 48,43%, dan siswa sebanyak 32,81% tidak paham konsep. Pada soal nomor 5 ini, siswa diminta untuk menentukan nilai perpindahan. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa mengalami miskonsepsi tentang menentukan nilai perpindahan.

Pada soal nomor 6 rata-rata siswa yang paham konsep sebanyak 42,18% dan 29,69% siswa mengalami miskonsepsi, serta 28,12% siswa yang tidak paham konsep. Pada soal nomor 6 ini siswa diminta untuk mengamati gambar tentang perpindahan. Dari jawaban dan alasan yang dipilih dapat disimpulkan bahwa, siswa sudah memahami jika perpindahan merupakan selisih titik awal dan titik akhir.

Soal nomor 7, persentase siswa yang paham konsep sebesar 20,31%, siswa yang mengalami miskonsepsi 56,25%, dan siswa sebanyak 23,43% tidak paham konsep. Pada soal nomor 7 ini, siswa diminta untuk mengamati gambar tentang gerak jatuh bebas. Dari jawaban dan alasan yang dipilih, dapat dilihat bahwa siswa dominan mengalami miskonsepsi tentang gerak jatuh bebas.

Berdasarkan gambar 3 tentang persentase paham konsep, miskonsepsi dan tidak paham konsep berdasarkan nomor soal, rata-rata siswa banyak mengalami miskonsepsi terutama pada soal nomor 7 tentang gerak jatuh bebas.

Miskonsepsi terjadi karena banyak hal. Secara garis besar, miskonsepsi pada siswa dapat disebabkan

oleh beberapa hal berikut ini, yaitu kesalahan dari siswa sendiri, kesalahan dari guru ketika menjelaskan pelajaran, kesalahan dari buku teks yang digunakan, kesalahan konteks, dan kesalahan dari metode mengajar yang digunakan oleh guru saat pembelajaran. Miskonsepsi dalam bidang fisika paling banyak berasal dari diri siswa sendiri. Miskonsepsi yang berasal dari siswa dapat dikelompokkan dalam beberapa hal, antara lain: prakonsepsi atau konsep awal siswa, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap/salah, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa, dan minat belajar siswa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, dkk. didapatkan bahwa, pada umumnya siswa mengalami miskonsepsi pada pelajaran fisika disebabkan oleh pemikiran asosiatif rata-rata berkontribusi sebesar 80%, pemikiran humanistik 83%, alasan yang tidak lengkap 12%, intuisi yang salah 86%, tahap perkembangan kognitif 85% dan kemampuan siswa 70% sedangkan minat belajar siswa tidak memberikan kontribusi atau memicu terhadap terjadinya miskonsepsi siswa.

Miskonsepsi yang terjadi tidak dapat dibiarkan terlalu lama, karena akan menghambat siswa dalam mempelajari pelajaran selanjutnya. Setelah diketahui letak miskonsepsi yang terjadi, guru dapat dengan segera memberikan perbaikan untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Guru dapat mengelompokkan siswa yang mengalami kesulitan yang sama dalam satu kelompok untuk diberi perlakuan yang sama pula, sedangkan untuk yang sudah tuntas guru juga dapat memilih perlakuan yang sesuai dengan meneruskan pembelajaran ketingkat selanjutnya. Hal ini sesuai dengan teori Nana Sukmadinata dan Thomas tentang kegiatan perbaikan yang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan perlakuan yang berbeda tergantung dari analisis kesulitan dan perkembangan belajar siswa, antara lain pengajaran konsep ulang, penyederhanaan konsep, studi kasus, atau aplikasi ke tingkat yang lebih tinggi baik dengan cara diskusi kelompok, pemberian PR, atau pemanfaatan media pengajaran lainnya.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari tes uji miskonsepsi *Two – Tier Multiple Choice* untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi gerak lurus terhadap siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 3 SMA Negeri 1 Kejayan dapat disimpulkan bahwa, siswa mengalami miskonsepsi tentang gerak lurus dengan persentase sebesar 42%. Miskonsepsi yang dialami siswa tentang konsep gerak lurus yang paling dominan terdapat pada soal nomor 7 tentang gerak jatuh bebas dengan persentase sebesar 56.25% dan berdasarkan hasil wawancara guru pembelajaran gerak lurus tersebut dilaksanakan menggunakan sistem hibrid learning pada masa pandemi ini.

5.REFERENSI

- Arifin, F. (2017). *Hybrid Learning sebagai Alternatif Model Pembelajaran Fauzan, Fatkhul Arifin*.
<https://www.researchgate.net/publication/344361017>
- Iswanto, Dewi. Di akses pada tanggal 10/01/2022. melalui link :
<http://repository.ump.ac.id/6542/3/DEWI%20AYU%20ISMANTO%20PUTRI%20BAB%20II.pdf>
- Martoredjo, N. T. (n.d.). *Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tentangan bagi Sektor Pendidikan?*
- Oktaviana, Felia. *Pengembangan Test Diagnostik Four-Tier Multiple Choice untuk Mengidentifikasi Kesulitan Pemahaman Konsep Kinematika Gerak Siswa SMA*. Di akses pada tanggal 10/01/2022. Melalui link
<http://lib.unnes.ac.id/41231/1/4201416102.pdf>
- Puspitasari, I. P. (2012). *Analisis Miskonsepsi Gerak Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011*.
<https://doi.org/10.5/JS/JQUERY.DATATABLES.MIN.JS>
- Paul Suparno. (2005). *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam pendidikan Fisika*. Jakarta:Grasindo
- Rahayu, S. (2015). *"Pengembangan Tes Diagnostik Pilihan Ganda Dua Tingkat untuk Mengidentifikasi Miskonsepsi pada Konsep Gerak Dua Dimensi*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26703>
- Sma, D., Paud, J., & Dikmen, D. (n.d.). (2020). *Modul Fisika Kelas X KD 3.4 Gerak Lurus Fisika Kelas X*.

UPAYA GURU PAI DALAM MENERAPKAN SITUASI BELAJAR MENGAJAR DENGAN METODE DEBAT AKTIF DI SEKOLAH SMA NEGERI 1 GONDANG KABUPATEN NGANJUK

Oleh:

Chusnul Chotimah¹⁾, Cyntia Ayu Kusumaning Koeswoyo²⁾, Kholishotul Amaliyah³⁾
^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
²email: ayucynthia64@gmail.com
³email: kholishotul23@gmail.com

Abstrak

Situasi belajar mengajar adalah suatu keadaan yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada saat kegiatan pembelajaran yang didalamnya melibatkan tenaga pendidik serta peran aktif siswa itu sendiri. Untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif membutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Metode merupakan salah satu faktor dalam pendidikan yang tidak kalah penting berperan dalam mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Pemilihan metode belajar mengajar juga didasari tujuan tertentu. Metode debat aktif merupakan metode belajar mengajar yang cocok untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Dan SMAN 1 Gondang Nganjuk merupakan salah satu sekolah yang telah memakai metode debat aktif ini. Penelitian ini dilakukan di kelas IPA dan IPS. Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan guru PAI metode debat aktif ini dapat membantu mengembangkan pikiran murid untuk memecahkan suatu masalah, dan membiasakan murid untuk berani tampil di depan.

Kata Kunci: Situasi belajar mengajar, metode debat aktif, SMAN 1 GONDANG Kabupaten Nganjuk

1. PENDAHULUAN

Adapun pengertian pendidikan dari istilah kita dapat merujuk kepada berbagai sumber yang diberikan para ahli pendidikan seperti Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan, batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak yang diantara satu dan yang lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional (UU RI NO.2 th.1989) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang mendapatkan banyak perhatian dari para ilmuwan. Dalam pendidikan Islam terdapat berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan segera. PAI merupakan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Namun dalam arti yang luas pendidikan agama Islam memiliki pengertian bermacam-macam. Sebagian ada yang mengatakan bahwa PAI merupakan proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang sumber dan pedoman ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan terjabar dalam sunnah Rasulullah.

Fenomena dalam pembelajaran saat ini mengalami penurunan yang drastis karena rendahnya mutu pendidikan di negara ini, sehingga ini menjadi hambatan yang menjadi sebuah tantangan bagi

pengelola pendidikan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sudah 2 tahun negara di dunia dilanda pandemi Covid-19, dan semua kegiatan saat ini di kerjakan dari rumah *Daring*. Bahkan tak hanya sekolah saja yang ditutup melainkan perkantoran, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Di akhir tahun 2021 akhirnya pemerintah menerapkan *new normal*. Yang mana sekolah telah buka khusus untuk guru sedangkan siswa tetap belajar dari rumah. Banyak hambatan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran online, sehingga siswa menjadi kurang dalam berfikir kritis mereka akan asal-asalan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Dengan Debat bisa menjadi satu strategi berharga untuk mendorong pemikiran dan perenungan, terutama jika peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Debat merupakan strategi yang secara aktif melibatkan semua peserta didik di dalam kelas, bukan hanya para pelaku. Dengan menggunakan metode ini guru dapat mengevaluasi setiap peserta didik tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif peserta didik terlibat dalam prosedur debat. Keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam usaha berkolaborasi harus di pandang penting dalam keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok. Keterampilan ini dapat di ajarkan kepada peserta didik dan peran peserta didik dapat ditentukan untuk memfasilitasi proses kelompok

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait juga mengambil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga peneliti dibantu beberapa pihak yang terkait di tempat yang menjadi objek penelitian juga mewawancarai narasumber yang memberikan data yang valid. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Gondang Kabupaten Nganjuk yang terletak di JL. Raya Gondang Nganjuk, campur, kecamatan Gondang, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan harus dilakukan dengan cara yang baik dan serius agar mendapatkan data yang valid dan berkualitas. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari pihak-pihak terkait di SMAN 1 Gondang Kabupaten Nganjuk. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini meliputi para guru, staf dan peserta didik SMAN 1 Gondang Kabupaten Nganjuk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan metode ini berpengaruh terhadap proses belajar siswa dan selama proses metode ini berlangsung berjalan dengan baik dan cukup kondusif, menciptakan situasi yang ramai disebabkan para siswa yang mempertahankan jawabannya argument sesuai pemikirannya dan hasil diskusi dengan kelompoknya.

Penerapan metode Debat Aktif di sekolah SMA tingkat kelas XII di SMAN 1 GONDANG, menurut Muhammad Yasin selaku guru mata pelajaran PAI menganggap metode ini sangat efektif dalam pembelajaran pendidikan agama islam dan memiliki dampak positif yang banyak untuk seorang pelajar yang akan melanjutkan belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi dimana siswa akan berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Metode ini berhasil diterapkan dan berhasil peneliti mengobservasi langsung dalam kelas yang menjadi sampel peneliti, terdapat kelas XII IPA dan XII IPS dan seorang guru PAI yang membuat sebuah konflik yang menarik perhatian dan memancing pikiran siswa untuk mengadu argumennya sesuai

dengan posisi dan kedudukan mereka, mempertahankan jawabannya.

Upaya seorang guru PAI dalam menerapkan metode debat aktif dalam kelas XII yang mana seorang guru menciptakan sebuah konflik yang menarik untuk dibahas dan memancing pikiran siswa untuk mengadukan argumennya kepada lawannya. Dan menjaga terjadinya keributan dalam kelas bahkan kegaduhan agar tidak mengganggu kelas lain belajar. Menurut khomari selaku guru PAI juga mengatakan bahwa sebagai guru PAI dituntut untuk paham dengan karakter setiap siswa mengetahui paham tidaknya seorang siswa dengan materi PAI yang sudah dijelaskan oleh gurunya.

Kekurangan dari menerapkan metode ini ialah yang mana terdapat murid yang mengacuhkan konflik yang sudah dibuat tidak mendapat respon baik. Dan kurangnya kondusifitas dalam penerapannya yang mana terjadinya keributan dalam kelas yang mengakibatkan mengganggu kelas lain yang tengah belajar, banyak murid yang kurang memperhatikan selama diskusi berlangsung.

Kelebihan dari metode ini dapat mengubah pikiran seorang murid menjadi lebih kritis dan berani untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan teman-temannya, menentang jawaban temannya dengan hasil pemikiran sendiri maupun hasil berdiskusi. Tak lebih lagi peneliti telah membuktikan bahwa menggunakan metode ini menjadi strategi pembelajaran yang sangat efektif, dimana kelas menjadi aktif kembali dengan mereka memperdebatkan mempertahankan jawabannya.

Usaha peneliti dalam mengetahui seberapa besar hasil yang didapatkan dalam menerapkan situasi belajar mengajar dengan menggunakan metode debat aktif. Peneliti melakukan beberapa survey untuk mendapatkan data yang valid. Pada survey kali ini peneliti membuat pertanyaan yang akan diajukan untuk siswa khususnya hasil dari menerapkan debat aktif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti menggunakan kuisioner para murid yang memahami masalah dalam mata pelajaran PAI pada kelas XII IPA-1 mencapai 65% murid yang menyampaikan pendapatnya di hadapan kelas, 20% murid yang hanya ikut berdiskusi tidak mengutarakan sendiri, 15% murid yang mengabaikan argumen siapapun. Disisi lain metode debat aktif ditunjukkan juga pada kelas XII IPS-1 mencapai 70% murid yang menyampaikan pendapatnya di hadapan kelas, 15% murid yang hanya ikut berdiskusi tidak mengutarakan sendiri, 15% murid yang mengabaikan argumen siapapun. Dari presentase tersebut dapat peneliti simpulkan banyaknya murid yang aktif mengikuti jalannya debat dalam kelas, dari kelas IPA dan IPS terlihat murid yang aktif, dan murid yang tidak memperhatikan kelas dia asik dengan dunianya sendiri. Dan terdapat juga murid yang masih malu dan kurang percaya diri dengan argumennya sehingga meminta gemanya untuk mengutarakan pendapatnya. Dari hasil penelitian yang

dilakukan peneliti di dalam kelas IPA dan IPS terlihat murid menjadi lebih semangat dalam belajar PAI menjadi lebih aktif dan berfikir secara kritis.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan situasi belajar mengajar dengan menggunakan metode debat aktif ini adalah membutuhkan tempat yang luas agar tidak terdengar oleh kelas lain, atau juga bisa tempat di ruangan kelas seperti di halaman, atau di kantin agar tidak mengganggu pelajaran lain.

4. KESIMPULAN

Selama peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan narasumber terkait ada beberapa poin yang bisa menjadi simpulan yaitu :

1. Upaya guru PAI penerapan situasi belajar mengajar di SMAN 1 GONDANG KABUPATEN NGANJUK sejauh ini sudah cukup baik yang dibuktikan dari para guru ini yang menyiapkan permasalahan yang jelas sumbernya dan menarik sehingga murid terpancing pikirannya untuk mengeluarkan pendapatnya.
2. Kelebihan dari penerapan situasi belajar mengajar di SMAN 1 GONDANG KABUPATEN NGANJUK, ini menjadikan murid lebih kritis, dan semangat dalam belajar pelajaran PAI selain itu menjadikan murid lebih berani dan percaya diri dalam tampil dihadapan teman kelas dengan jawabannya sendiri.
3. Kekurangan dari penerapan situasi belajar mengajar di SMAN 1 GONDANG KABUPATEN NGANJUK, yang akan menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kedepannya. Dari kekurangan yang mana murid sulit untuk diajak kompromi dengan baik kurangnya daya tarik bagi murid yang cenderung malas dan kurangnya rasa ingin tahu.
4. Hasil besarnya yang dicapai dari penerapan situasi belajar mengajar di SMAN 1 GONDANG KABUPATEN NGANJUK ini dapat kita lihat dari perubahan yang ada dalam kelas yang mana mereka kini sudah aktif berpendapat, berpikir kritis dan logis, dan berani tampil di depan teman-teman kelas nya.

5. REFERENSI

- Nata Abuddin, 1998, Metodologi studi islam, Jakarta : Rajawali Press
- Undang-undang Dasar 45, 1989, Jakarta : Sinar Grafika
- Dewantara Ki Hajar, 1962, Bagian Pertama Pendidikan, Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa
- Zuharini Dkk, 1992, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara
- Hamalik Oemar, 2015, Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Bumi Aksara
- Pora Yusro, 2004, Selamat Tinggal Sekolah, Yogyakarta : PT Agromedia Pustaka

- Suherwin Muhammad Zein Iqbal dan Dayanti Herly, 2020, Pembelajaran Debat, Jakarta : Guapenda
- Fathurrohman Muhammad, 2015, Model-Model Strategi Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta : Ar- Ruzz Media
- Hidayat Isnu, 2019, 50 Strategi Pembelajaran, Yogyakarta : DIVA Press
- Hidayat S Ujang, 2016, Model-Model Pembelajaran Efektif, Sukabimu : Yayasan Budhi Mulia.
- Sanajaya Wina, 2009, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta : Prenada Media Group
- Wimala E.Y Dkk, 2021, Debat sebuah Keterampilan dan Seni Berbicara, Jakarta : Guapenda
- Majir Abdul, 2012, Paradgma Baru Manajemen Pendidikn abad 21, Yogyakarta : Deepublish
- Sugiarti Toto, 2021, E-Learning berbasis asachoology Tingkatkan hasil Belajar Fisika, Jakarta : CV.Mine
- Muljiono Pudji dan Djaali, 2021, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan, Jakarta : Grasindo
- Anggito Albi dan Setiawan Johan, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi : CV.Jejak
- Silberman Melvin, 2006, Active Learning 101 Cra Belajar Siswa Aktif, Bandung : Nusa Media
- Moleong J Lexy, 1989, Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA

Oleh:

Frans Hanaekan Rajagukguk¹⁾, Rosmala Dewi²⁾, Yuniarto Mudjisusaty³⁾, Eka Daryanto⁴⁾

¹UPTD SMP Negeri 2 Medang Deras

^{2,3,4} Universitas Negeri Medan

Email ¹frans.rajagukguk53@gmail.com,

²ros_dw@unimed.ac.id,

³yuniarto@unimed.ac.id,

⁴ekadaryanto@unimed.ac.id

Abstrak

Munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa lembaga pendidikan memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara menjadi salah satu sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) selama masa pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di tengah Pandemi, dampak dari pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam metode penelitian kualitatif, sumber data primer diperoleh dari Kepala Sekolah, guru dan siswa SMP Negeri 2 Medang Deras dan sumber data sekunder dari dokumentasi SMP Negeri 2 Medang Deras. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tiga metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras dilaksanakan dengan mengurangi durasi pembelajaran sehingga berdampak pada penambahan kegiatan di luar kelas, namun orang tua diuntungkan karena anaknya tetap menerima pembelajaran dengan aman. Faktor Pendukung pelaksanaan pembelajaran ini adalah lengkapnya protokol kesehatan dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran siswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di sekolah.

Kata Kunci: Evaluasi Pembelajaran, PTMT, Sekolah Menengah Pertama

1. PENDAHULUAN

Dampak Covid-19 terhadap pendidikan dan pembelajaran menimbulkan beberapa peraturan dalam sistem pendidikan yaitu dengan menutup seluruh akses pendidikan secara tatap muka dengan menjalankan prinsip sistem pendidikan dan sistem pembelajaran di sekolah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun prinsip dan kebijakan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di sekolah; (2) Tumbuh kembang seluruh peserta didik serta bagaimana kondisi psikososial juga menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Oleh karena itu seluruh sekolah secara umum di seluruh Indonesia ditutup demi kemaslahatan dan kesehatan serta keselamatan siswa. Maka, setelah munculnya ketetapan pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 tersebut seluruh sistem pembelajaran di seluruh Indonesia dilaksanakan secara Daring/ E-learning. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian bahwa Pembelajaran jarak jauh memberikan

kemudahan dan kesempatan dalam berbagai kondisi (Ananda, 2019). Tidak pernah diprediksi sebelumnya keadaan dunia terkena covid-19. Untuk memotong mata rantai penyebaran, kita tetap dapat melakukan banyak hal positif di rumah tanpa meninggalkan pembelajaran. Akhirnya, baik guru maupun murid semuanya diliburkan selama beberapa pekan bahkan beberapa bulan yang tentunya ini semua akan memberikan efek kesimpangsiuran di dalam metode kegiatan belajar mengajar (KBM). Anjuran *stay at home* dan *physical and social distancing* dari pihak pemerintah harus diikuti dengan perubahan cara belajar dari tatap muka menjadi *online/daring* (Hasan, 2006).

SMP Negeri 2 Medang Deras, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya juga turut meliburkan murid-muridnya sejak tanggal 28 Maret 2020. Setelah melalui berbagai pertimbangan oleh beberapa pihak di Sekolah yaitu Dinas Pendidikan Batubara, Guru dan Musyawarah Orang Tua Murid. Proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan Maklumat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Medang Deras dalam pencegahan virus Covid-19. Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Meminimalkan Waktu Pembelajaran; (2) Melarang Murid dan Guru untuk Ke kantin diluar sekolah; (3) Mengintensifkan pengawasan terhadap kondisi guru, dan seluruh penghuni sekolah dengan melibatkan tenaga kesehatan yang ada di sekitar sekolah; (4) Memberikan penyuluhan terkait kebersihan diri dan lingkungan Sekolah; (5) Menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan alat-alat kesehatan;

Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran, SMP Negeri 2 Medang Deras senantiasa mengusahakan agar pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan di beberapa sudut pondok, senantiasa menghimbau bahkan meminta santri untuk rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menyediakan alat-alat kesehatan berupa masker, *Hand Sanitizer*, *Thermo Gun*, *Face shield*, *Germidical Lamp*, dan Disinfektan. Selain itu, seluruh santri juga diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan di sekitar mereka, dan juga telah dibiasakan untuk membersihkan seluruh area sekolah dua kali dalam sehari.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni mendeskripsikan suatu latar belakang objek atau suatu peristiwa tertentu secara merinci dan mendalam (Creswell, 2002). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi situasi tentang pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Medang Deras di masa pandemi Covid-19. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer (Kepala Sekolah, guru dan siswa SMP Negeri 2 Medang Deras), dan sumber data sekunder (dokumentasi dari SMP Negeri 2 Medang Deras). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas. Observasi, dalam penelitian ini adalah observasi partisipan artinya peneliti berperan langsung di dalam pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 dan dokumentasi berupa dokumen tentang Pembelajaran Tatap Muka di tengah Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras.

Analisis data terdiri dari tiga analisis yang berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara teknik keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Covid-19 mewajibkan seluruh lembaga di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran secara daring (Joharudin, 2020). Belakangan ini beredar isu di dunia maya tentang

pembelajaran wajib dilaksanakan dengan cara daring. Apabila ada lembaga yang diam-diam menjalankan pembelajaran secara tatap muka, maka pemerintah akan mencabut jabatan kepala sekolah dan mencabut izin lembaga tersebut (Khasanan, Uswatun, Pramudibyanto, Widuroyekti, 2020). Bukan hanya itu belakangan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Batu bara juga mengeluarkan surat edaran tentang work from home dan larangan tatap muka. Pembelajaran Tatap Muka di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara selama Pandemi Covid-19 meliputi 3 unsur sebagaimana berikut:

3.1. Perencanaan

Perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara selama masa pandemi covid-19, pada dasarnya berjalan sesuai dengan berlakunya perencanaan pembelajaran sebelum masa adanya Covid-19. Berbeda di masa pandemi Covid-19 seluruh guru tidak leluasa untuk menerima bimbingan langsung secara tatap muka, melainkan guru hanya menumpuk perencanaan pembelajaran di atas meja lalu kemudian dikoreksi oleh pembimbing. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang bukan hanya sebagai pelengkap administrasi namun dirancang sebagai bagian integral dari proses pekerjaan profesional, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran (Magdalena, Mulyani, Fitriyani, Delvia 2020).

Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan suatu keharusan karena didorong oleh kebutuhan agar pelaksanaan pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Majid, 2015). Sebelum masa pandemi Covid-19 seluruh guru dalam SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara membuat perencanaan pembelajaran secara serentak yakni seluruh guru berkumpul di teras pimpinan pondok sambil lalu membuat rencana pembelajaran bersama sesuai dengan silabus yang ada. Akan tetapi sejak adanya wabah Covid-19 sistem pembuatan rencana pembelajaran berubah yang mana biasanya seluruh guru membuat perencanaan pembelajaran tersebut secara bersama serentak di depan rumah pimpinan sementara diubah dengan membuat perencanaan pembelajaran secara mandiri atau secara sendiri-sendiri di kamar masing-masing tanpa mengadakan kumpul atau kerumunan. Akan tetapi kualitas perencanaan pembelajaran tetap sesuai dengan silabus yang ada

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara bahwa selama masa pandemi Covid-19 sistem pembuatan rencana pembelajaran secara mandiri. Akan tetapi tanpa mengurangi kualitas perencanaan pembelajaran itu sendiri yaitu sesuai dengan silabus dan sesuai dengan peraturan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada silabus, yang juga

merupakan bentuk perencanaan proses pembelajaran lainnya. perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar (Mawardi, 2019).

3.2. Pelaksanaan

Mode pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara. Akan tetapi karena adanya masa pandemi Covid-19 maka ada perubahan terhadap sistem pembelajaran yaitu dengan mengurangi waktu pembelajaran di kelas yang mana sebelum masa pandemi Covid-19 ini pembelajaran di kelas selama 40 menit perjam pelajaran dikurangi menjadi 30 menit perjam pelajaran dengan bobot pembelajaran 40% di kelas dan 60% di luar kelas secara berkesinambungan dan fleksibel. Akan tetapi guru tetap menyesuaikan alokasi waktu dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan selama pandemi Covid-19.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara bahwa sistem pembelajaran yang berjalan di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara di masa pandemi masih sama dengan sistem pembelajaran sebelum masa pandemi Covid-19 yakni dengan sistem pembelajaran langsung hanya saja mengurangi waktu pembelajaran yang ada tanpa mengurangi sistem pembelajaran yang telah ada dan menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran, untuk itu dengan pembelajaran durasi 30 menit dengan bobot mata pelajaran sebanyak 40% maka 60% guru melanjutkan pembelajaran di luar kelas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa alokasi waktu merupakan perkiraan berapa lama siswa mempelajari materi pembelajaran (Mularsih dan Hartini, 2019). Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Dengan demikian, alokasi waktu akan diperkirakan rentan waktu yang dibutuhkan untuk setiap materi ajar (Permatasari, 2014).

Selain itu pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 terdapat perubahan yang cukup signifikan di dalam kelas yang mana kelas yang jumlahnya lebih dari 16 akan dipisah menjadi 2 kelas serta mengatur tempat duduk yang awalnya setiap bangku dan meja diduduki 2 orang menjadi 1 orang perbangku dan membatasi jarak antar bangku murid dengan maksimal dalam 1 kelas sebanyak 16 orang. Hal ini sesuai dengan teori menyatakan bahwa untuk menciptakan suasana kondisi yang dapat menumbuhkan minat, semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam pembelajaran yang efektif diperlukan pengorganisasian atau pengelolaan yang memadai, termasuk dalam pengelolaan kelas.

Dengan demikian, pengelolaan kelas menjadi salah satu sara yang menyiapkan kondisi bagi pembelajaran yang efektif. Pengelolaan kelas

mencakup pada pengaturan orang (siswa) dan fasilitas yang meliputi, ventilasi, pencahayaan sampai dengan perancangan program pembelajaran yang tepat (Rifaldi, 2017).

3.3. Evaluasi

Sebuah penelitian menyampaikan bahwa tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi: tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektifitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektifitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektifitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan.

Dampak Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara

Diantara dampaknya adalah bertambahnya kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dilaksanakan dalam bentuk non formal seperti belajar di siang hari di bawah bimbingan para guru. Hal inilah yang cukup memberatkan beberapa guru dan memberikan dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran. Sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya (Ristyawati, 2020). Pelaporan merupakan tahapan terakhir pada sebuah kegiatan. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian belajar dari peserta didik yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan bertujuan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik. Laporan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan (Setiawan dan Komalasari, 2020).

Namun berbeda dengan wali murid yang sangat bersyukur dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Idris yang merupakan salah satu wali murid SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara, beliau menyatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini dengan dijalankan sistem pembelajaran tatap muka atau luring orang tua merasa sangat diuntungkan karena di saat sekolah lain diliburkan anak mereka masih bisa mendapatkan ilmu dan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa khawatir akan pandemi ini.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kegiatan Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19

Faktor pendukung dari pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 adalah seluruh guru dan tendik telah mendapat vaksin dosis 1 dan 2

100 % demikian juga siswa telah memperoleh vaksin dosis 1 dan 2 lebih kurang 87%. Hal tersebut membuka peluang akses siswa dan guru untuk melakukan interaksi di sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh (Yustika dan Wayan, 2019, Yuns dan Rezki, 2020) bahwa di dalam dunia pendidikan, Lingkungan merupakan salah satu unsur yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang. Bagi aliran Empirisme, Lingkungan merupakan unsur yang paling utama dalam mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Sedangkan faktor penghambat yang ada adalah kurangnya kesadaran siswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di sekolah.

5. KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan dimensi dan indikator yang diperlukan dalam evaluasi program PTMT. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara adalah sama seperti sebelumnya yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran langsung akan tetapi terdapat perubahan sistem, yakni perubahan dalam sistem pembuatan rencana pembelajaran dan perubahan durasi waktu perjam pelajaran dari 40 menit menjadi 30 menit dan penataan volume murid dalam kelas.

Meskipun orang tua yang kurang memahami teknologi merasa kesulitan tetapi orang tua tetap mencoba untuk bersikap empati kepada anak-anak. Sebab di saat seperti ini kehadiran orang tua yang mampu membuat anak lebih kuat dan tidak menyerah serta bisa memotivasi anak dalam belajar. Adapun peran orang tua dalam mendampingi belajar anak yaitu, orang tua sebagai pendamping, sebagai motivator, fasilitator, menjadi tempat berdiskusi dan bertanya serta dapat menciptakan tempat yang kondusif dan nyaman untuk belajar. Sehingga peran orang tua khususnya pada sistem pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan belajar anak.

Faktor pendukung dari pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 adalah seluruh guru dan tendik telah mendapat vaksin dosis 1 dan 2 100 % demikian juga siswa telah memperoleh vaksin dosis 1 dan 2 lebih kurang 87%. Sedangkan faktor penghambat yang ada adalah kurangnya kesadaran siswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di sekolah agar PTMT dapat berjalan maksimal. Orang tua murid yang belum vaksinasi maka diharapkan segera vaksin agar anaknya diperkenankan ikut dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), kecuali orang tua murid dimaksud memang tidak boleh mendapatkan vaksinasi (komorbid). Hasil wawancara telah memenuhi kebutuhan dimensi dan indikator minimal, maka upaya pendataan tidak hanya untuk pemerintah, melainkan juga bermanfaat sebagai evaluasi diri sekolah.

6. REFERENSI

- Ananda, Rusydi. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Creswell, John W. (2002). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset." *Mycolological Research* 94, no. 4 (1990): 522.
- Hasan, Nor. (2006). "Fullday Sahoool (Model Alternatif Pembelajaran Bahasa Asing)." *Tadris*.
- Joharudin D, Agus. (2020). "Panic Syndrom Covid-19: Penekanan terhadap Kebijakan yang Diberikan." *Jurnal Perspektif* 4, no. 1: 44–53.
- Magdalena, Ina, Fatimah Mulyani, Nuri Fitriyani, and Awalia Hapsa Delvia. (2020). "Konsep Dasar Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar di SD Negeri Bencongan 1." *PENSA* 2, no.1. 87–98.
- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. 4th ed. (2015). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mawardi. (2019). "Optimalisasi Kompetensi Guru dalam Penyusunan RPP" 20, no. 1: 69–82.
- Mularsih, Heni, and Hartini Hartini. (2019). "Pengelolaan Ruang Kelas dalam Rangka Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran di PKBM Insan Cendikia." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 1: 15–21.
- Permatasari, Arvynda. (2014). "Pengelolaan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik secara Online." *Manajemen Pendidikan* 24, no. 3, 260–265.
- Pondok, Pimpinan. (2020). "Maklumat Pondok Cegah Covid-19." *Sumenep: Sekretaris Pondok Pesantren*.
- Rifaldi, Fahmi. (2017). "Pengaruh Lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di MAN Rejoso Peterongan Jombang." *Jurnal Of Indonesia Islam*: 1–9.
- Ristyawati, Aprista. (2020). "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oeoh Pemerintah sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2, 240–249.
- Setiawan, Rizki, and Eti Komalasari. (2020). "Membangun Efektifitas Pembelajaran Sosiologi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan Dan Sosiologi* 4, no. 8:1–13.
- Sri Yustika, Ni Wayan. (2019). "Pentingnya Sarana Pendidikan dalam Menunjang Kualitas Pendidikan di Sekolah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–1699.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3.

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PROTOTIPE (KEPMENDIKBUDRISTEK NO. 162/M/2021) DI UPTD SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH KABUPATEN BATUBARA DENGAN MODEL CIPP

Oleh:

Tobok Luhut Situmorang¹⁾, Rosmala Dewi²⁾, Yuniarto Mudjisatyo³⁾, Eka Daryanto⁴⁾

¹ UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh

^{2,3,4} Universitas Negeri Medan

email: 1,

²ros_dw@unimed.ac.id,

³yuniarto@unimed.ac.id,

⁴ekadaryanto@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum prototipe di tingkat SMP dan signifikansi hasil evaluasi dari studi ini dapat memberikan masukan yang tepat dalam implementasi kurikulum prototipe. Penelitian ini dilakukan di UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan melibatkan 21 orang guru dan 205 peserta didik dan model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Output*) oleh Stufflebeam. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket yang disusun berdasarkan aspek dan indikator CIPP pada kurikulum prototipe dan data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sarana dan prasarana dianggap baik oleh sebanyak 74,01% guru dan peserta didik. Sedangkan pemahaman guru dan peserta didik serta pelibatan orangtua berada pada kategori kurang baik dengan persentase kurang dari 47%. Selain itu, dari aspek *input*, pengadaan buku mendapat respon sangat baik yakni sebesar 96,40%. Meskipun demikian, kurang dari 43% responden menganggap bahwa *coaching* yang dilakukan kepada guru dalam kategori kurang baik dan aspek *process* memperoleh respon kurang baik dari responden yakni sebesar kurang dari 49%. Sebanyak 69,37% responden memberikan tanggapan dengan kategori baik aspek *product*. Implementasi kurikulum prototipe perlu memperhatikan kesiapan dan kualitas guru, sekolah, serta aspek-aspek lainnya. Selain itu, tingkatan kelas pada kurikulum prototipe sebaiknya diganti dengan istilah "Fase" sebab capaian pembelajaran berada pada level fase dan bukan pada tingkatan kelas. Pelatih ahli sebaiknya dihadirkan langsung ke sekolah dan penekanan perbaikan pada aspek *process* dapat dilakukan dengan menentukan *role* atau peran yang jelas dalam kebijakan.

Kata Kunci: Kurikulum Prototipe, Implementasi Kurikulum, Evaluasi, CIPP

1. PENDAHULUAN

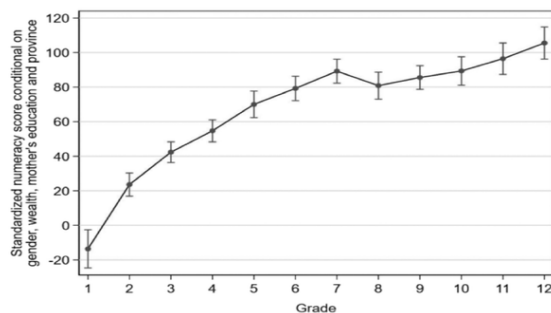
Dalam kurun waktu 10 terakhir anggaran untuk pendidikan telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. Pada 2020, anggaran pendidikan sebesar Rp549,5 triliun dan Rp550 triliun pada 2021. Namun demikian, berbagai indikator capaian belajar siswa belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hasil PISA 2018 masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah negara-negara OECD. Kesenjangan kualitas pendidikan berdasarkan wilayah maupun kondisi sosial ekonomi siswa masih membayangi potret pendidikan di Indonesia. Analisis mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan salah satunya karena kurikulum yang terlalu padat sehingga membebani siswa. Materi kurikulum yang terlalu sulit bagi siswa menjadi salah satu sebab ketertinggalan kualitas pendidikan di negara berkembang, sementara guru hanya berfokus pada upaya mengejar ketuntasan kurikulum (Pritchett & Beatty, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun selama pandemi, berbagai perubahan

dalam pendidikan justru mengakibatkan turunnya capaian belajar siswa. Di masa-masa sulit ini, tujuan utama pendidikan bukan hanya ketuntasan kurikulum, tapi juga menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh elemen pendidikan (Novianti, 2020; Hasim, 2020; Sanjaya & Rastini, 2020). Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak negatif yang mengarah pada *learning loss* (Kisno, et al., 2021; Kisno, Anggraeni, Siregar, & Nainggolan, 2021). Siswa kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya, dan dalam hal ini hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Menurut data Lembaga Survei Indonesia di awal bulan September 2021, kebanyakan siswa dinilai sudah mulai bosan menjalani PJJ, dilihat dari semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan, 23,8% guru menilai siswa tidak memiliki motivasi belajar. Data ini menjadi salah satu bukti turunnya kualitas pendidikan, di mana siswa tidak memiliki ketertarikan untuk belajar, termasuk mengikuti pembelajaran dan memahami materi.

Selain itu, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak mengalami peningkatan kemampuan

berhitung yang signifikan pada jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun, tren peningkatan tersebut melambat dan menjadi cenderung datar setelah memasuki jenjang kelas 7 ke atas. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemampuan anak tidak mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan ketika dia beranjak remaja dan belajar di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) (Beatty, Berkhout, Bima, Pradhan, & Suryadarma, 2021) seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tren Kemampuan Berhitung Anak Indonesia

Penanganan krisis pembelajaran di Indonesia membutuhkan upaya penanganan yang holistik dan terintegrasi. Sebagai salah satu upaya tersebut, khususnya dalam menangani beban kurikulum yang terlalu padat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengembangkan kurikulum terbaru bernama Kurikulum Prototipe, yang diatur dalam Keputusan Mendikbud-Ristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak. Pengembangan kurikulum ini diawali dari penerapan kurikulum darurat di masa pandemi, yaitu melalui penyederhanaan kurikulum yang mengarahkan siswa untuk fokus pada kompetensi esensial. Hasil evaluasi menunjukkan penggunaan kurikulum darurat mampu mengurangi indikasi *learning loss* secara signifikan selama pandemi, baik untuk capaian literasi maupun numerasi (Puslitjak & INOVASI, 2021). Berdasarkan implementasi kurikulum di masa Pandemi COVID-19, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya (Anggraena, et al., 2022). Pada pengembangan berikutnya, kurikulum prototipe juga berfokus pada pencapaian pembelajaran kontekstual yang menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan siswa. Saat ini, kurikulum ini telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak yang tersebar di 111 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia.

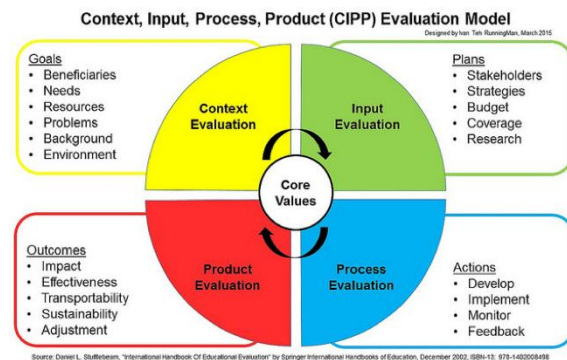
Kurikulum prototipe erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek. *Project Based Learning* (PBL) adalah metode pengajaran di mana siswa belajar dengan secara aktif terlibat dalam dunia nyata dan proyek yang bermakna secara pribadi (DeFillippi, 2001) namun teori lain menyatakan organisasi serta administrasi pembelajaran berbasis

proyek dapat memakan waktu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks (Helle, Tynjälä, & Olkinuora, 2006). Dari kesenjangan empiris, fenomena capaian pendidikan, dan kesenjangan teori di atas mengarahkan peneliti untuk menelaah implementasi kurikulum prototipe di tingkat Sekolah Menengah Pertama pada salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Batubara. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum prototipe di tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan harapan hasil evaluasi dari studi ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam implementasi kurikulum prototipe di masa yang akan datang.

3. METODE

Penelitian ini dilakukan di UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara selama bulan April 2022 dengan melibatkan 21 orang guru dan 205 peserta didik sebagai responden. Sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Output*) oleh *Stufflebeam* seperti pada Gambar 3.

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator (*Stufflebeam*, 2000), hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya (*Tazkiah*, 2021). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* atau evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* atau evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* atau evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation* atau evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.



Gambar 3. Model Evaluasi CIPP

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket yang disebar kepada guru dan peserta didik. Angket ini disusun berdasarkan aspek CIPP dan kemudian dirumuskan sejumlah pertanyaan yang mengacu kepada beberapa indikator-indikator sebagaimana yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Aspek dan Indikator Instrumen Penelitian

Aspek	Indikator
Context	Sarpras
	Pemahaman guru dan siswa
	Pelibatan orangtua
Input	Pengadaan buku
	Coaching kepada guru
Process	Proses pembelajaran
	Proses penilaian
Product	Proyek PPP

Data yang terkumpul dari responden kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana dengan cara menghitung persentase dari jumlah responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Tabel 2 Deskripsi Hasil Persentase Penelitian

No	Persentase (%)	Deskripsi
1	76-100	Sangat Baik
2	51-75	Baik
3	26-50	Kurang Baik
4	1-25	Tidak Baik

Hasil dari persentase ini kemudian dikategorikan ke dalam deskripsi Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik seperti yang tercantum pada Tabel 2 di atas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

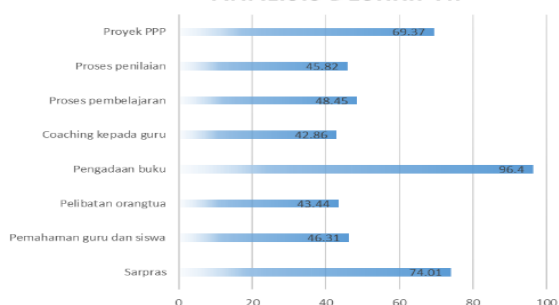
Hasil penelitian mengenai evaluasi implementasi Kurikulum Prototipe di UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh, Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Tabel ini, hasil penelitian diringkas dalam bentuk persentase terhadap indikator-indikator yang dijabarkan dari aspek *context evaluation*, *input evaluation*, *process evaluation*, *product evaluation* (CIPP).

Tabel 3 Hasil Penelitian

Aspek	Indikator	Persentase	Deskripsi
Context	Sarpras	74,01%	Baik
	Pemahaman guru dan siswa	46,31%	Kurang Baik
	Pelibatan orangtua	43,44%	Kurang baik
Input	Pengadaan buku	96,40%	Sangat Baik
	Coaching kepada guru	42,86%	Kurang Baik
Process	Proses pembelajaran	48,45%	Kurang Baik
	Proses penilaian	45,82%	Kurang Baik
Product	Proyek PPP	69,37%	Baik

Dari Tabel 3, berdasarkan evaluasi pada aspek *context*, sarana dan prasarana di UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh dianggap baik oleh sebanyak 74,01% guru dan peserta didik. Sedangkan pemahaman guru dan peserta didik serta pelibatan orangtua berada pada kategori kurang baik dengan persentase kurang dari 47%. Selain itu, dari aspek *input*, pengadaan buku yang sesuai dengan kurikulum prototipe selalu tersedia tepat waktu dan hal ini menjadi indikasi bahwa pengadaan buku mendapat respon sangat baik dari para responden yakni sebesar 96,40%. Meskipun demikian, kurang 43% responden menganggap bahwa *coaching* yang dilakukan kepada guru dalam kategori kurang baik.

ANALISIS DESKRIPTIF



Gambar 4. Hasil Analisis Data

Hasil analisis data pada aspek *process* terdiri dari dua indikator yakni proses pembelajaran dan

proses penilaian. Kedua indikator tersebut memperoleh respon kurang baik dari responden yakni kurang dari 49%. Aspek terakhir yang dianalisis adalah aspek *product* di mana sebanyak 69,37% responden memberikan tanggapan dengan kategori baik Hasil dari penelitian mengenai produk Profil Pelajar Pancasila ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan produk dari kurikulum prototipe mencakup penguatan Profil Pelajar Pancasila (Rachmawati, Marini, Nafiah, & Nurasih, 2022).

Arah pengembangan kurikulum prototipe memiliki khas yang menjadi pendukung dalam upaya pemulihan belajar. Kurikulum Prototipe yang diterapkan oleh Kemendikbud-Ristek pada tahun ajaran 2022/2023 memiliki tujuan yang sangat baik yaitu menginginkan pembelajaran lebih aktif dan adaptif dengan memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada proyek pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut maka dukungan dan kerja keras dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi (Sadewa, 2022). Hal ini tentu saja bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada aspek *input* di mana *coaching* yang dilakukan kepada guru cenderung berdurasi tidak singkat dan dilakukan secara daring yang mengakibatkan peserta *coaching* harus mengalokasikan sebagian besar waktu mereka pada kegiatan ini.

Kurikulum prototipe diberlakukan agar lulusan di Indonesia mempunyai jiwa yang adaptif dan transformatif terhadap perkembangan zaman. Perencanaan kurikulum baru diharapkan mampu mengembalikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan tetap mengembangkan potensi peserta didik yang berwawasan luas dan dapat membangun jiwa yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. (Suryadien, Dini, & Dewi, 2022). Hanya saja hasil evaluasi dari aspek *process* menemukan bahwa proses pembelajaran dan proses penilaian masih dilakukan belum optimal karena standar yang baku masih belum ditentukan sehingga guru masih berusaha keras untuk menemukan standar baku tersebut untuk menentukan capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan fase yang tercantum pada kurikulum prototipe. Selain itu, pelibatan orangtua dalam aspek *context* yang dianggap kurang baik oleh responden perlu mendapat perhatian khusus ketika perencanaan awal implementasi kurikulum prototipe.

5. KESIMPULAN

Implementasi kurikulum prototipe di UPTD SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh berada pada kategori sangat baik dari sisi aspek *input* pada indikator pengadaan buku dan respon baik pada aspek *input* yakni sarana dan prasarana serta aspek *product* pada Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan pemahaman guru dan siswa, pelibatan orangtua (aspek *context*),

penilaian dan proses pembelajaran (aspek *process*) berada pada kategori kurang baik. Oleh karena itu, implementasi kurikulum prototipe perlu memperhatikan kesiapan dan kualitas guru, sekolah, serta aspek-aspek lainnya. Selain itu, tingkatan kelas (seperti kelas VII, VIII, dan IX) pada kurikulum prototipe disubstitusi dengan “Fase” sebab capaian pembelajaran berada pada level fase dan bukan pada tingkatan kelas. Untuk mengatasi respon kurang baik pada aspek proses input dapat dilakukan dengan mendatangkan pelatih ahli langsung ke sekolah dan penekanan perbaikan pada aspek process dapat dilakukan dengan membuat *role* atau peran yang jelas dalam hal kebijakan.

6. REFERENSI

- Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). *Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Annisa, N., Nurfadilah, A., & Maharani, C. (2022). Kesiapan Sekolah Dasar Dalam Menerapkan Kurikulum Prototipe Untuk Menciptakan Generasi Yang Kreatif dan Inovatif. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 175-184. doi:https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i2.7262
- Basuki. (2022). Identifikasi Materi Pembelajaran Akhlak pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Prototipe 2022. *DUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3896-3915. doi:https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2784
- Bima, L. (2021). *Tiga Capaian Buruk Pendidikan di Indonesia sejak Tahun 2000*.
- DeFillippi, R. J. (2001). Introduction: Project-Based Learning, Reflective Practices and Learning. *Management Learning*, 32(1), 5-10. doi:https://doi.org/10.1177/1350507601321001
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544-1550. doi:https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar* (pp. 68-74). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, Practice and Rubber Sling Shots. *Higher Education*, 51, 287–314.
- Isnarofik, M. B. (2022). Merefresh Pendidikan Dengan Iplementasi Kurikulum Prototipe. *Primary*, 86-89.
- Kisno, C., Tampubolon, M. R., Manalu, T. S., Berlien, R., Gulo, K. N., & Kešner, A. (2021). Teachers’ Learning Loss Diminution Through Self-Phased Learning with Guru Binar. *Indonesian Journal of Educational Studies*, 24(1), 17-26. doi:https://doi.org/10.26858/ijes.v24i1.19473
- BIBLIOGRAPHY Kisno, Rokhyati, U., Fatimah, F. N., & Siregar, R. M. (2021). Teachers’ Misconception about National Assessment and National Examination. *ADJES (Ahmad Dahlan Journal of English Studies)*, 8(1), 46-58. doi:https://doi.org/10.26555/adjes.v8i1.20081
- Kisno, K., Anggraeni, C. T., Siregar, R. M., & Nainggolan, L. A. (2021). Self-Phased Learning for Reducing Teachers’ Learning Loss with Guru Binar. *Tarling: Journal of Language Education*, 5(2), 149-169. doi:https://doi.org/10.24090/tarling.v5i2.5241
- Mendikbudristek. (2021). Kepmendikbud Ristek No. 162 tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Kemdikbudristek .
- Novianti, D. E. (2020). Kurikulum dan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 Apa dan Bagaimana? *Prosiding Nasional Pendidikan* (pp. 70-75). Bojonegoro: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro.
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai Kearifan Lokal: Proyek Paradigma Baru Program Sekolah Penggerak untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal BasicEdu*, 6(3), 3639 - 3648. doi:https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727
- Pritchett, L., & Beatty, A. (2012). *The negative consequences of overambitious curricula in developing countries*. Harvard: Center for Global Development Working Paper.
- Puslitjak, & INOVASI. (2021). *Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurashiah, I. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*(6), 3613-3625. doi:https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714
- Ramadhayanti, D., Siregar, M. H., & Elyza, N. (2022). Persepsi Mahasiswa Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Terkait Kurikulum 2022. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 6(1), 13-22. doi:https://doi.org/10.37012/jipmht.v6i1.776

- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fatimah, F. S., Aprillionita, R., Arfaiza, S. A., & Hamidah, W. (2022). Penerapan Kurikulum Prototype pada Masa Pandemi Covid-19. *FONDATIA*, 6(1), 62-75. doi:<https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1706>
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fauziah, H., Azzifah, N., & Khamelia, W. (2022). Kebebasan dalam Kurikulum Prototype. *AS-SABIQUN*, 4(1), 115-131. doi:<https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i1.1683>
- Rozady, M. P., & Koten, Y. P. (2022). Scratch sebagai Problem Solving Computational Thinking dalam Kurikulum Prototipe. *Increate-Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi*, 8(1), 11-17.
- Sadewa, M. A. (2022). Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Prof M Amin Abdullah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 266-280. doi:<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>
- Sanjaya, J. B., & Rastini, R. (2020). Implementasi Kurikulum Darurat di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 1(2), 161-174. doi:10.18326/jil.v1i2.161-174
- Solikhah, P. I., & Purnomo, P. (2022). The Opportunity and Challenges of Implementing a Prototype Curriculum. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 407-421. doi:<https://doi.org/10.31538/nzh.v5i2.2130>
- BIBLIOGRAPHY Stufflebeam, D. (2000). The CIPP Model for Evaluation. In D. Stufflebeam, G. Madaus, & T. Kellaghan, *Evaluation Models: Evaluation in Education and Human Services* (pp. 279-317). Dordrecht: Springer.
- Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan Tantangan Kurikulum Baru: Analisis Peran Guru dalam Kebijakan Kurikulum Baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6001-6010. doi:<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3172>
- Suryadien, D., Dini, R., & Dewi, A. A. (2022). Rencana Implementasi Kurikulum Prototipe Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal PGMI UNIGA*, 1(1), 27-34.
- Tazkiah, L. (2021, November 19). *Mengenal Lebih Dekat Model Evaluasi CIPP*. Retrieved from Topsatu: <https://www.topsatu.com/mengenal-lebih-dekat-model-evaluasi-cipp/>

PENGARUH PEMANFAATAN E-LEARNING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PASTORAL DIAN MANDALA GUNUNGSITOLI

Oleh:

Sitepanus Zebua¹⁾, Rosmala Dewi²⁾, Yuniarto Mudjisusatyo³⁾, Eka Daryanto⁴⁾

¹Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala

^{2,3,4}Universitas Negeri Medan

¹Email : sitepzebua@gmail.com,

²Email : ros_dw@unimed.ac.id,

³Email : yuniarto@unimed.ac.id,

⁴Email : ekadaryanto@unimed.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manfaat sistem e-learning kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini ialah mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh (1). pemanfaatan e-learning dirasakan oleh mahasiswa kecenderungan mempersingkat waktu dan membantu secara ekonomis. (2). Manfaat e-learning semakin membantu mahasiswa dalam hal interaksi baik antara dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa dengan mahasiswa. (3). Dengan memanfaatkan sistem e-learning mahasiswa terbantu dalam berbagai informasi yang terkait dengan materi-materi kuliah dan referensi-referensi dalam perkuliahan. (4). Dengan sistem e-learning mahasiswa tidak lagi hanya belajar dalam ruangan kelas tetapi mereka dapat belajar di luar kelas, artinya mahasiswa sangat terbantu untuk berbagai aktivitas lainnya yang memberi dukungan pada perkuliahan mereka.

Kata Kunci: Manfaat *e-learning*, Hasil belajar Mahasiswa.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi sangat diharapkan agar mampu menyampaikan perkuliahan yang bermakna, berguna serta meningkatkan kemampuan mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa sebagai output dari Perguruan tinggi dapat masuk ke dalam dunia nyata yakni, dunia kerja, masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu segala daya upaya dalam kaitannya dengan proses perkuliahan mahasiswa perlu difokuskan agar mencapai hasil perkuliahan yang optimal. Untuk mencapai harapan itu maka perlu dioptimalkan adanya sarana, strategi dan teknologi yang terbaik untuk dapat menunjang hal tersebut. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal itu ialah upaya mengaktifkan penggunaan teknologi informasi oleh dunia pendidikan pada perguruan tinggi untuk memberi dukungan pada proses perkuliahan mahasiswa.

Perkembangan teknologi pada saat ini dapat dikatakan bahwa sangat pesat dan terus mengalami perkembangannya. Itu artinya bahwa dunia pendidikan mau tidak mau harus masuk dalam dunia tersebut dengan mengikuti gaya dan pola perkembangan teknologi itu sendiri. Pandemi covid 19 yang telah merubah pola kehidupan manusia seolah-olah manusia dan tata kehidupannya dipaksakan masuk dalam dunia perkembangan itu

sendiri. Sistem kehidupan manusia dalam serba sistem. Demikian juga di lembaga pendidikan, menghadirkan sistem belajar e-learning. Sistem ini memberi harapan bahwa untuk dapat mengatasi kesulitan mahasiswa dalam pembelajarannya dan terwujudnya pemerataan untuk belajar adalah melalui jaringan internet. Dalam e-learning ada banyak hal ditampilkan untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan pengetahuan sehingga dengan mudah mahasiswa dapat dengan mudah mengerjakan berbagai tugas-tugas perkuliahan, inilah suatu terobosan yang sangat strategis dalam menerapkan teknologi baru pada kegiatan sistem informasi pada lingkup dunia pendidikan. Dengan adanya E-learning untuk pendidikan ini maka kebutuhan akan informasi selalu tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah dan cepat. E-learning untuk pendidikan akan menjadikan pelayanan terhadap mahasiswa menjadi lebih baik.

Departemen Pendidikan Nasional sebagai organisasi yang berfungsi mengelola pendidikan di Indonesia menyambut baik perkembangan Information and Communication Technology (ICT) dengan memasukkan kurikulum yang bernuansa pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya bahwa Pemerintah merekomendasikan secara kekeluargaan kepada setiap elemen untuk penggunaan media internet dalam berbagai kegiatan pengelolaan

kegiatan lembaga termasuk lembaga pendidikan tentu dengan pengawasan ekstra ketat. Artinya bahwa penggunaan media internet memiliki norma dan aturannya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaannya dengan baik dan tepat guna.

Penggunaan media internet melalui e-learning memiliki pengaruh untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penggunaan media internet dalam proses belajar, I Wayan Kayun Suwastika (2018), Pengaruh E-Learning Sebagai Salah Satu Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan regresi hipotesis H1 dengan nilai signifikansi 0.000 dan t hitung 4,015 terbukti, sehingga disimpulkan menurut mahasiswa STIKOM Bali e-learning mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Peneliti lainnya Fazar Nuriyansyah (2020), Efektifitas Penggunaan Media Online Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi COVID-19 menyimpulkan Hasil temuan ini mengharuskan dosen untuk lebih giat lagi memperbaharui atau meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media online. Tidak hanya aplikasi tatap muka seperti zoom meeting, atau google meet saja, tetapi media pembelajaran lainnya pun harus dikuasai. Penelitian yang relevan yang dilakukan Meliyani, dkk (2019), menyimpulkan bahwa pemanfaatan SIMARI sebagai implementasi pembelajaran berbasis e-learning secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Manfaat dari implementasi teknologi internet diantaranya adalah berbagai informasi serta ilmu pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga, setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik.

Sistem pembelajarn dengan e-learning dengan menggunakan jaringan internet, sesuai dengan defenisinya ialah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet lahir pada masa perang dingin pada tahun 1969 dan digunakan pertama kali untuk keperluan militer Amerika Serikat. Penemuan internet ini dianggap sebagai penemuan besar yang mengubah citra dunia dan bersifat lokal menjadi global. Melalui internet, faktor jarak dan waktu sudah tidak menjadi masalah, komunikasi dan penyebaran informasi pun

semakin cepat. Sumber-sumber informasi dunia dapat segera diakses oleh siapapun dan dimanapun berada melalui jaringan internet.

Konsep dan pengertian pemahaman terkait dengan e-learning ada beberapa pendapat para ahli tentang hal tersebut, William Horton (2003:3) menjelaskan e-Learning merupakan pembelajaran berbasis WEB yang bisa diakses dari internet. Jaya Kumar C. (2002:1) mendefinisikan e-Learning sembarang pembelajaran sebagai yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi interaksi pembelajaran, atau bimbingan. Dong (Kamarga, 2000:20) mendefinisikan e-Learning sebagai kegiatan belajar yang disampaikan melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran e-learning dengan menggunakan jaringan internet merupakan salah satu upaya dari jasa teknologi untuk membantu setiap penggunaannya di dalam memperoleh berbagai informasi, dalam konteks ini upaya penggunaan e-learning dalam proses perkuliahan mahasiswa, dimanapun kapanpun dan waktu kapanpun dapat digunakan, sehingga manfaat dari teknologi sangat besar dan dapat memperlancar semua kegiatan-kegiatan manusia. Mahasiswa tidak perlu lagi mencari buku-buku teks untuk tugas-tugasnya, hanya dengan menggunakan situs internet semua dapat ditemukan tugas dalam mendukung proses kegiatan perkuliahannya.

Sebagaimana sudah diuraikan bahwa e-learning sendiri merupakan salah satu bentuk distance learning. Bentuk e-Learning sendiri cukup luas, sebuah portal yang berisi informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai situs e-Learning (Jo Hamilton Jones, 2001:5), maka e-learning adalah perpaduan antara pembelajaran dan sarana prasarana pembelajaran. Maka Menurut Vaughan Waller, 2001:10), e-Learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar.

Lebih jauh lagi disampaikan oleh Rosenberg (2001:3) mengkategorikan e-Learning dalam tiga kriteria dasar yaitu: pertama : e-Learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta informasi. Kriteria ini sangatlah penting dalam e-learning, sehingga Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan absolute, kedua E-Learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet, ketiga e-Learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengguguli paradigma tradisional dalam pembelajaran.

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran e-learning adalah proses pembelajaran yang memadukan antara pengajaran dan sarana prasarana dengan melibatkan para penggunanya melalui sarana elektronik untuk mencapai hasil yang dikehendaki secara efektif dan efisien yang dapat digunakan pada waktu apapun, kapan dan dimanapun.

Selanjutnya dapat diuraikan perihal manfaat E-learning menurut Pranoto, dkk (2009:309) adalah : 1). Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan, 2). Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa, 3). Meningkatkan kemampuan belajar mandiri pendidik dan pelatihan, 4). Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, dengan perangkat biasa sulit dilakukan.

Penelitian yang relevan oleh Budi, dkk Metode e-learning (Online course content) memberikan kemudahan dan kelancaran proses belajar-mengajar baik bagi mahasiswa maupun dosen (Wiliam, 2007). Dengan metode e-learning, dosen dapat meningkatkan intensitas komunikasi interaktif dengan mahasiswa di luar jam kuliah resmi. Metode e-learning memberikan keleluasaan pada dosen untuk memberikan akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan referensi ilmiah terkait dengan mata kuliah tersebut yang mungkin tidak didapat selama jam kuliah maupun praktikum. Referensi-referensi tersebut dapat berupa tulisan ilmiah, artikel populer atau jurnal-jurnal elektronik. Hal ini akan sangat berguna bagi mahasiswa, karena selain dapat memperkuat pemahaman mahasiswa untuk tiap pokok bahasan perkuliahan, referensi dari jurnal-jurnal internasional akan sangat membantu memperluas wawasan mahasiswa sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Pada penelitian ini disimpulkan Metode pembelajaran e-learning telah dapat menjadi media informasi yang dapat diakses oleh civitas akademika direktorat program diploma tanpa batas waktu, jarak dan wilayah geografis. Pengembangan metode pembelajaran berbasis e-learning dapat dengan baik dilaksanakan jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana jaringan yang menunjang serta sosialisasi metode tersebut kepada seluruh civitas akademika di Direktorat Program Diploma – IPB.

Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang ada di Kota Gunungsitoli, dalam penggunaan media pembelajaran e-learning melalui jaringan internet, telah dikembangkan sejak berkembangnya jaringan internet dalam proses perkuliahan baik para mahasiswa maupun para dosen dalam pengajarannya. Tetapi tidak hanya cukup puas dengan hasil yang sudah dilakukan secara terus menerus dapat diuji kemanfaatan dari metode e-

learnig ini dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

2. METODE

Tempat penelitian ini adalah di Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli, yaitu salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli yang memiliki prodi Pendidikan Kegamaan Katolik, dimana outputnya menjadi tenaga pengajar pendidikan agama katolik di sekolah, menjadi katekis dan petugas pastoral. Penelitian ini dilaksanakan mulai 18 April 2022 sampai 22 April 2022. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala yang berjumlah 30 orang. Dari permasalahan yang diteliti, maka desain dari peneliti yang dipergunakan ialah menggunakan metode penelitian deskriptif yakni dengan pendekatan kualitatif. Metod kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Liamputtong (2009), terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis data kualitatif yakni analisis tematik (*thematic analysis*), analisis naratif (*narrative analysis*), analisis percakapan atau ujaran (*discourse analysis*), dan analisis semiotik (*semiotic analysis*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-learning dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa berkembang seiring waktu dan hal tersebut memberi dampak positif bagi manusia. Dari hasil wawancara kepada mahasiswa mengungkapkan bahwa dari segi manfaat dari e-learning sangat memberi manfaat yang signifikan, dan biaya studi yang dikeluarkan lebih ekonomis dan mudah, karena dapat memotong beberapa hal, misalnya tidak perlu datang ke kampus dan itu sudah mengurangi pembiayaan terutama pada transportasi. Namun juga sekaligus ada tantangan, misalnya kalau jaringan internet terganggu dan biaya untuk membeli paket internet. Tetapi pada umumnya dengan sistem belajar e-learning memberi manfaat dan mempersingkat waktu pembelajaran.

E-learning mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan materi kuliah. Sebelum Pandemi Covid 19, sistem perkuliahan yang dilakukan antara mahasiswa dengan dosen dapat dikatakan bahwa berjalan dengan normal-normal saja. Penggunaan media pembelajaran melalui jaringan internet, apakah melalui zoom, googleclassroom, geoglemeet dan lain-lain penggunaannya dapat dikatakan sangat

minim sekali, sehingga interaksi mahasiswa dengan mata kuliah yang diterima tergantung saja pada saat tatap muka saja. Dari hasil wawancara dengan para mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran sebelum covid 19, dianggap sebagai pelengkap saja dalam mencari referensi dari mata kuliah.

E-learning membantu mahasiswa/peserta didik untuk saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Media sosial melalui jaringan internet saat ini membantu mahasiswa atau peserta didik untuk memberi informasi-informasi terkait dengan materi-materi kuliah. Hasil wawancara dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala menyatakan bahwa salah satu manfaat dari e-learning bagi mereka ialah mereka dapat berkomunikasi satu sama lain di tempat yang berbeda sekaligus memberi informasi tentang kuliah atau tugas-tugas perkuliahan.

E-learning membantu proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar-mengajar. Proses belajar mengajar baik pada tingkat pendidikan yang paling rendah maupun perguruan tinggi, sebelum covid 19 yang meluluhlantakkan kehidupan manusia, ada suatu pesergeseran dalam penggunaan media informasi dalam proses belajar. Dalam wawancara dengan mahasiswa menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar selama ini hanya terlaksana dalam ruangan kelas, yang sangat terbatas tetapi dengan kehadiran teknologi melalui jaringan internet seketak-seketak tersebut menjadi lebih dekat. Menurut mahasiswa pengetahuan semakin bertambah dan teknik penggunaan peralatan komputer atau android semakin memudahkan dalam sistem belajar dan juga dalam usaha mencari sumber-sumber belajar yang lain.

Pelaksanaan e-learning memberi kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi dalam perkuliahan hal ini dirasakan bahwa adanya dampak yang signifikan dalam pengeluaran secara ekonomis dan juga memotong beberapa hal yang dalam kuliah tatap muka seharusnya datang di kampus namun dengan belajar e-learning lebih dapat bervariasi. Senada apa yang disampaikan oleh (Michael, 2013) pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Pendapat diatas menjelaskan dan memberi pemahaman bahwa setiap mata kuliah atau materi pembelajaran seorang dosen dan tau guru menyusun materi perkuliahan dan atau materi pelajarannya sesuai dengan struktur yang ada di dalam dan melalui sistem elektronik.

Belajar dengan sistem e-learning memberi manfaat kepada mahasiswa dalam proses belajarnya dengan penggunaan dan penerapan e-learning bagi

mahasiswa di Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli dirasakan bahwa interaksi antara mahasiswa dan dosen semakin baik dalam kaitannya dengan materi-materi perkuliahan. Hal ini senada apa yang disampaikan Garrison dan Shale (1990) menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah bentuk interaksi antara guru, siswa dan konten. Tidak mungkin terjadi pembelajaran bila tidak ada interaksi antara guru, siswa dan konten. Level interaksi antara guru dan siswa adalah faktor yang penting untuk menentukan keefektifan pembelajaran. Saat siswa aktif, materi pembelajaran/perkuliahan menjadi lebih relevan dan signifikan buat mereka. Mereka dapat memahami, mengingat apa yang dipelajari dan pada akhirnya meningkatkan prestasi. Pembelajaran yang efektif harus melibatkan pertanyaan, dan dengan itu mewajibkan guru untuk menstimulus siswa mengajukan pertanyaan.

Dalam setiap proses belajar mengajar atau perkuliahan tatap muka yang dilakukan oleh guru dan dosen, komunikasi adalah sangat penting. Dengan komunikasi yang baik dan efektif akan memberi informasi yang tepat antara komunikator dan penerima pesan. Muhammad (1994: 4) mengemukakan komunikasi adalah pembicaraan pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah tingkah laku. Hardjana (2003), komunikasi dianggap efektif jika penerima pesan mampu memahami dan melakukan apa yang disampaikan oleh pengirim pesan tanpa kendala apapun. Maka pendapat di atas menjelaskan bahwa dengan komunikasi yang efektif dalam proses perkuliahan dan atau pembelajaran akan dapat tercapai tujuannya apabila disampaikan dengan benar dan tepat.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih lewat dan melalui jaringan internet proses kegiatan pembelajaran tidak seperti dulu lagi tetapi semua dapat terjangkau. Sistem pembelajaran e-learning bahwa kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi di dalam kelas tetapi dapat terjadi di luar kelas. Metode mengajar diluar kelas secara khusus adalah kegiatan belajar-mengajar antara guru dan murid, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi dilakukan di luar kelas atau alam terbuka, sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Misalnya, bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian, nelayan, berkemah dan kegiatan yang bersifat petualang, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan". Dadang M dan Rizal (dalam Erwin, 2017: 80) diartikan sebagai aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/ sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian/ nelayan, berkemah dan kegiatan yang bersifat kepetualangan serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Belajar di luar kelas dengan sistem daring. Patria dan Yulianto (2011) mengemukakan ada beberapa

metode belajar yang dilakukan saat pembelajaran dari rumah, yaitu diantaranya pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dan jaringan internet mulai dari penggunaan Whatsapp, Google Classroom, Zoom atau aplikasi lainnya. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dengan sistem belajar jarak jauh, sehingga kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio atau video), komputer atau internet, siaran radio dan televisi.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada analisis tentang Pengaruh Pemanfaatan E-learning terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli sebagaimana yang ditemukan di lapangan dengan relevansi pada teori-teori dengan fokus penelitian pada manfaat penggunaan e-learning dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa merasakan bahwa dalam proses perkuliahan mereka sangat terbantu dengan adanya relasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa, mempermudah dan menambah wawasan pengetahuan mahasiswa pada berbagai sarana media sosial yang dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan. Proses belajar mahasiswa yang dilakukan mahasiswa mendapatkan dampak terkait dengan informasi-informasi tentang perkuliahan. Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk menggunakan sistem pembelajaran e-learning, karena mendapat berbagai kemudahan-kemudahan dalam mencari referensi-referensi yang terkait dengan perkuliahan mereka.
2. Dengan memanfaatkan sistem e-learning bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli, memberi manfaat pada hasil belajar mereka, artinya ada kecenderungan peningkatan hasil belajar yang semakin baik.

5. REFERENSI

- Allen, Michael. (2013). *Michael Allen's Guide to E-learning*. Canada : John Wiley & Sons.
- Desi Pebriana, dkk, (2017). Analisis Pengaruh Internet Terhadap Minat Belajar Mahasiswa, *Jurnal Jatisi*, Vol.3 No. 2 Maret 2017
- Daniati, dkk, (2020). Upaya Peningkatan Motivasi Hasil Belajar Mahasiswa dengan Penerapan Model Pembelajaran E- Learning Berbasis Goole Classroom pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Kependidikan*: Vol 6. No.3.
- Fajar Nuriansyah, (2020). Efektifitas Penggunaan Media Oneline Dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi Covid 19. *Jurnal*

Pendidikan Ekonomi Indonesia, Vol 1 No. 2, Hal. 61-65.

- I Wayan Kayun Suwastika. (2018). Pengaruh E-Learning Sebagai Satu Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa, *Jurnal Sistem dan Informatika*, Vol. 13, No.1.
- Maria Agatha Hertiavi. (2020). Penerapan E-Learning dengan Platform Edmodo untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa, *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol.4. No.1., pp1-8.
- Muhammad Ragil Kurniawan. (2020). Pola Penggunaan Internet Di Lingkungan Sekolah Dasar Se-Kota Yogyakarta, *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, Volume, 02 (02).
- Nike Septaningtyas, (2018). Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Aplikasi Google Class Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa, Vol.2, No2, Juli-Desember 2018.
- Siti Azizah, dkk. (2017). Penggunaan Media Internet eXe-Learning Berbasis Masalah Pada: Materi Perubahan Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa, *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains*, Vol.6. No. 2, hal. 197-213
- Erwin Widiasworo. (2017). Strategi dan Metode Mengajar Siswa di Luar Kelas (OUTDOOR LEARNING) secara Aktif, Kreatif, Inspiratif, dan Komunikatif. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.
- Garrison, D. R., & Shale, D. (1990). A New Framework and Perspective. In D. R. Garrison and D. Shale (Eds.), *Education at a Distance: From Issues to Practice*. Malabar, FL.: Krieger.
- Hardjana, A. M. (2003). *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lexy J. Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Liamputtong, Pranee. (2009). Qualitative data analysis: conceptual and practical considerations. *Health Promotion Journal of Australia*, Vol. 20, No. 2, Hal. 133.
- Patria, L., dan Yulianto, K. (2011). Pemanfaatan Facebook Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Online Secara Mandiri. *Prosiding Seminar Nasional FMIPA-UT 2011*. <http://repository.ut.ac.id/eprint/2305>
- Vera. A. (2012). *Metode mengajar anak di luar kelas*. Jogjakarta: Diva press.

ANALYSIS OF CHARACTER EDUCATION POLICY IMPLEMENTATION IN JUNIOR HIGH SCHOOLS MEDAN

by:
Nurshabrina Hasan¹⁾, Rosmala Dewi²⁾, Yuniarto Mudjisusatyo³⁾, Eka Daryanto⁴⁾
¹SMA Islam Plus Adzka
^{2,3,4}Universitas Negeri Medan
Email¹n.shabrinahasan@gmail.com,
²ros_dw@unimed.ac.id,
³yuniarto@unimed.ac.id,
⁴ekadaryanto@unimed.ac.id

Abstract

The success of character education is part of the policy, program planning system and internal quality assurance. In practice, these policies often require further action to address the problem. The quality assurance of character education has not been able to be implemented optimally due to weak budget adequacy, not yet optimal practice of research and development, information systems, and teacher human resources. The aims of this study were to (1) describe and analyze the implementation of character education policies, (2) develop a hypothetical model of the internal quality assurance system for character education at SMP Riad Madani, SMP Baitul Aziz, and SMP Pusaka. The research method used is descriptive qualitative with case studies. Data were collected using purposive sampling technique and data were analyzed using constructionist analysis. The results of the study show that education policies are prepared based on the vision and goals of schools with different characteristics and programs. SMP Riad Madani prioritizes independence and personality, SMP Pusaka prioritizes tolerance, and SMP Baitul Aziz prioritizes religious values.

Keywords: Policy, Program, Character Education, Internal Quality Assurance

1. INTRODUCTION

Application Character education that focuses on guaranteed quality is quite complete. Schools experience obstacles both at the system level and policy implementation. The problem that usually occurs in the implementation of character education is the weakness of the internal quality assurance system for character education. General requirements such as the identification of a detailed process from the principal's policies, planning, program and implementation as well as program constraints have not been used as a necessity to ensure quality in character education. The activities of the process are not documented. This is due to the weak determination of the criteria and methods needed to ensure that policies, planning, implementation and constraints will be effective by controlling and reviewing for continuous improvement.

Most schools are not able to meet the general requirements, documentation, and quality manuals that cover the scope of the character education quality assurance system in particular. Written procedures and descriptions of policy, planning, program and implementation interaction sequences and constraints are not documented. The establishment and maintenance of written procedures in the implementation of character education is not a primary requirement for schools. Only a small number of schools have guaranteed availability of resources and information to support the

operationalization of quality assurance in character education. The actions and revisions to character education activities have not been documented and it has not been reviewed how the revisions that have been made are operationalized.

In terms of quality policies for every activity in schools, not all of them are supported by control programs well as its application. Most schools do not yet have an internal structure that guarantees quality in the application of character education. The existing organizational structure has not explained the roles and responsibilities of organizational members in quality assurance of character education.

The success of character education lies in the quality of its implementation, meaning that the quality assurance system in character education is a major need considering the character problems that are quite apprehensive and have not been resolved to date. The results of Klaus and Kriegsman's research (Megawangi, 2004, p.6) show that Indonesia has low credibility in terms of character.

The results of this study are considered still relevant to current conditions. The quality of character education has practical implications for people's lives. Megawangi (2004, p. 1) asserts that: "The moral values that are instilled will form character (noble morality) which is an important foundation for the formation of a civilized and prosperous society". According to Budimansyah (2010, p.2) that:

After observations and experiences of researchers as educators, it is shown that only a small number of schools have an organizational structure that places one member of the organization as the person in charge of character education or the internal quality system. There are no parties who have formally 1) prepared plans in accordance with the results of the identification of internal and external resources, 2) organized resources and shared roles and responsibilities, 3) implemented and monitored the character education sub-system in schools. Schools generally have limitations in implementing a character education management system as a system that has a clear plan, organization, implementation and evaluation.

One application of character education activities that have quality assurance is in schools Riad Madani. The school has an organizational structure that positions the internal guarantor of character education. Its duties and functions are as a planner, organizer, implementation and monitoring and evaluation of character education. The existence of an internal quality assurance system for character education provides a higher quality process in learning. The character education process is planned, organised, implemented and evaluated by the school's character education quality assurance system.

Unlike SMP Pusaka, the character education activities have not been supported by the availability of guaranteed resources. Communication and detailed description of activities have not been documented. There is no structure in the school organization that is responsible for the implementation of character education. As a result, it is difficult for activities in the management of character education and policies in schools to monitor their success, efficiency and effectiveness. At the school there is no structural management responsibility for character education or the development of the concept of internal quality assurance of education character. The success implementation of character education due to ethical factors and habits of tolerance owned by the school as well as a strong doctrine of students about diversity and tolerance.

SMP Baitul Aziz has implemented character education practices through religious activities and has succeeded in increasing students' knowledge, awareness and character behavior. There is no quality assurance system in the provision of education and the division of tasks and coordination in quality assurance is less structured. SMP Baitul Aziz has no guarantee that human resources or budget for character education is available. The school cooperates with other parties for the implementation of character education. The documents needed to support the effectiveness of policies, plans, programs and identification of barriers are not yet available. Formally, the quality assurance system in character education is not yet available.

Research on the character education system is very important, especially at the school level. The results of the research are references and applicable concepts at the system level that can be implemented in an effort to build a quality character education system. The analysis and synthesis in this study uses a rational and empirical approach to the practices of the education system character. System analysis in a critical perspective is used to describe problems in the implementation of character education management systems and policies. From this research, we get an applicative concept to build a quality system in character education in elementary schools. Research on character education focuses more on the character education learning process, not on the internal quality system. Research on systems that describe documentation of interactions and activity processes, studies on resource assurance, process analysis and documents to ensure that policies, planning, implementation and programs and documentation of barriers are still limited. The purpose of this study is to obtain an overview and analyze:

1. Character education policies at SMP Riad Adani, SMP Pusaka and SMP SMP Baitul Aziz.
2. Program and implementation of character education at SMP Riad Madani, SMP Pusaka and SMP Baitul Aziz.
3. Problems in character education at SMPS Riad Madani, SMP Pusaka and SMP Baitul Aziz
4. Quality assurance of character education at SMP Riad Madani, SMP Pusaka and SMP Baitul Aziz.

2. METHOD

This type of research is qualitative to understand the phenomenon of the principal's policy of character education, program and implementation of character education, problems in character education and quality assurance of character education in each school that is the object of research. The qualitative approach chosen is a case study. Case study emphasis is on maximizing understanding of the case studied and not on generalizing.

The research locations are SMP Riad Madani, SMP Pusaka and SMP Baitul Aziz. The selection of research subjects was based on the reasons for the problem phenomenon regarding the analysis of the implementation of policies and systems in the management of character education in junior high schools. Source the research data were selected based on the experience and knowledge of the informants/related to the implementation of character education policies, namely (1) principals, (2) deputy principals, (3) civic education teachers and religious teachers, (4) teachers. The technique of taking participants as a source of data using purposive sampling technique. The technique for determining the data source is the snowball technique. Information collection techniques (data) are: (1)

observation, (2) interviews, (3) documents, audiovisual tools as a data collection tool. The data analysis procedure was carried out with steps of data reduction, data display, data validation, conclusion and verification. The data analysis technique used the spiral data technique.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Character Education Policy

The school's vision at SMP Riad Madani is an illustration of the role of the institution in the future and a form of shared commitment. The school's vision is based on three things, namely the environment as a whole, the teachings of the nature of the *Prophet Shiqqid, Amanah, Tabligh, Fathanah* with the aim of leading to national education. The formulation of the vision and mission describes the role of the school in all aspects of the situation. The vision of SMP Pusaka is simple, clear and reflects the empirical conditions of the school and the character of the school is easy to understand. The teachers are used to the conditions of diversity. and encourage engagement because it is more realistic. The vision at SMP Baitul Aziz focuses on morality and religious aspects. Problem formulation in character education policies at SMP Riad Madani involves internal parties and parents/guardians who volunteer or want to participate in the implementation of character education in schools. The determination of policies in character education is adjusted to the vision and mission, the foundation and the head office have designed a school management system and signs in character education policies.

Alternative character education policies are arranged in a simple manner based on a priority scale, analysis of relevance to the main activity, namely character education that reflects identity as students who have understanding, attitude to life and behavior such as the teachings of the Prophet with a global perspective. Activities as the realization of character education policies are quite diverse, including routine, spontaneous, and social activities exemplary both inside and outside the classroom. The success of policy implementation cannot be separated from the role of teachers and a system that encourages teacher motivation and commitment. The available resources determine how the character education program is implemented.

Monitoring of policy results is not only carried out by school principals with teachers, as well as parents who become school volunteers. Monitoring the results of the principal's policy is carried out by representatives from the head office, especially related to the humanist culture that is indoctrinated, socialized to students, teachers and parents. Monitoring is carried out on the actions or behavior of teachers in implementing policies, teacher responses to policies, parental support, student behavior and support from the central office for policy implementation. The implementation of

the evaluation of character education policies is aimed at obtaining special attention from the head office, foundations and parents and is supported by an established character education system. The evaluation results are submitted informally to the foundation.

Problems in policy Character education at SMP Pusaka is analyzed and found out together through formal meetings held by the school. The meeting involved the principal, several senior teachers within the foundation from the kindergarten to junior high school levels and the foundation. For policy education each level is compiled based on the results of joint meetings. The policy formula in character education is formulated jointly between school principals, senior teachers. Estimates of policy alternatives are not carried out using a number of methods good argument.

Rational or based on certain analytical techniques in an effort to obtain something confidence that choice policies are better than others (reasons for rational choice). Estimation is only done using a simple approach, namely brainstorming techniques and group discussion forums. Character education activities as a realization of character education policies include providing character lessons in class according to the theme of the month by telling stories before the lesson begins, celebrating religious holidays, decorating rooms according to religious holidays and religious lectures as a form of tolerance.

Basically, every activity addressed for develop tolerance for religious differences and mutual respect. There is nothing special about character education activities held in class, except for sticking writings made by first and second graders on the walls of the classroom or for older children, the theme month of character is delivered 15 minutes before the lesson begins.

SMP Pusaka does not have a unit, work team or institution that monitors the principal's policies in character education. Monitoring of the results of character education policies is carried out jointly but the results of the monitoring are not formally documented. From the monitoring carried out by both teachers and principals at SMP Pusaka on the performance of character education policies, including the relevance of monitoring to policy, monitoring focused on goals, namely students who have character, monitoring focused on changes after policy implementation. Monitoring is carried out using a social inspection approach. Principals, teachers, foundations explicitly monitor the relationship between input, process and output as well as the impact of character education policies. Monitoring is carried out from the beginning until the acceptance of the policy by students (felt by students).

Evaluation is carried out based on the results of monitoring changes that occur with policies such

as character month, celebration of religious events as well as development in teaching and learning to instill a sense of tolerance for differences and diversity. The nature of the evaluation carried out by principals and teachers of policies in character education focuses on the value of policies and programs. celebration of religious events as well as the development of teaching and learning to instill a sense of tolerance for difference and diversity. The nature of the evaluation carried out by principals and teachers of policies in character education focuses on the value of policies and programs. celebration of religious events as well as the development of teaching and learning to instill a sense of tolerance for difference and diversity. The nature of the evaluation carried out by principals and teachers of policies in character education focuses on the value of policies and programs.

Although it is not formally stated in written form the evaluation criteria for policies, basically all agree that one of the evaluation criteria for character education policies and programs is the effectiveness of policies in solving character education problems. Effective character education policies can influence the formation of junior high school graduates who have a high tolerance for diversity and have character.

The evaluation approach carried out by school principals and teachers can be grouped based on the underlying assumption, namely the size of the benefit or value will prove itself if the policies implemented by the school are effective. One of the ways to ascertain how the policy is performing is to use a social examination with a focus on social life in schools, especially how the behavior of students in schools and how the teacher responds in implementing the principal's policies. The quasi-evaluation conducted by the principal is quite limited. This is due to business and activities related to curriculum development. Information on the results of policy evaluations is only disseminated and communicated in a limited way in oral form.

Problem solving search is carried out together with the dominant role of the principal. Problem identification and search are carried out so that character education policies can run effectively at SMP Baitul Aziz. Estimates are estimates based on the results of problem formulation and identification of the needs of students. The estimation of the policy formula is prepared based on information on the results of the formulation of the relevant problem.

Supporting activities as a realization of the principal's policy are scouts and *marawis* extracurricular activities. The implementation of the policy receives direct supervision and supervision from the school. Activities that serve as facilities for character education are scouts and *marawis* and *tausiyah* activities by inviting clerics to give lectures regularly at school. At Baitul Aziz Middle School there is no quality assurance institution or unit in

character education. Each individual such as a teacher or school principal acts as a guarantor for the implementation of character education. The principal stated that there was no special institution to guarantee education, teachers and school principals only optimize scouting and *marawis* activities which are held after class hours are over as well as assistance for free character education programs held in Deli Serdang. The principal's policy to optimize learning both in class and outside class hours has received positive responses from both teachers and parents.

Monitoring of policy results regarding extracurricular activities as one of character education activities, routine *tausiyah* and religious celebration activities has not been fully carried out as a formal activity that is documented as written information for policy evaluation. The monitoring results show that from the aspect of budget input, the information system is still weak being an optimized resource, social resources such as partnerships and participation still need to be improved.

At the process level the teachers have shown compliance and the process is in accordance with the objectives although it needs improvement, especially from the implementation time which is hampered by problems such as flooding. Goal setting is considered rational, specific with a clear time target. The evaluation is carried out based on information on the results of non-formal monitoring carried out by the school principal and supervisory teacher. Like other schools that conduct evaluations, the principal at SMP Baitul Aziz focuses on evaluating values, namely how the benefits of education are experienced by students with the principal's policy in character education.

Some of the criteria set by schools to describe the performance of the principal's policies are how effective the policies are and how efficient they are. Viewed from the aspect of policy effectiveness, both principals and teachers consider that the current achievements are quite satisfactory, such as an increase in student participation in extracurricular activities, an increase in the number of training participants organized by the foundation, and better *tausiyah* routines. The result of this policy is a decrease in the number of students' delinquency in schools. There are no students who have been returned to their parents for the last four years due to delinquency or other violations that are considered quite serious, such as brawls.

The approaches taken by teachers and principals in evaluating policy outcomes are quite diverse. The school principal conducts a quasi-evaluation of the performance of character education policies. Information on the results of the evaluation of policy performance is not disseminated either to the relevant agencies or to parents. The principal only communicates the results of the evaluation with the teachers at the school. The purpose of disseminating

information is to improve policies and increase teachers' commitment and responsibility to the implementation of policies that are formulated together.

3.2 Program and Implementation

SMP Riad Madani is a school for the upper middle class. Budget is not an obstacle in the implementation of character education. One of the obstacles in human resources is the quality of the teacher's personality as educators. Schools must ensure that students learn with the right teachers and according to expectations. Therefore, to ensure the quality of teachers, schools only accept teachers who have met the qualifications, especially in terms of language and understanding of education. Implementation of character education programs at Riad Madani School, apart from having special lesson hours in each class every week, there are also activities that are spontaneous and the result of teacher creativity.

The success of character education programs and supporting activities will be successful if there are adequate resources in terms of budget, human resources, systems, cooperation between teachers and school principals, cooperation between teachers and quality assurance units. One of the resources optimized by the school is the collaboration between the school and parents. Structure organization in the implementation of character education at Riad Madani Junior High School shows that the organizational structure is more established. This can be seen from the framework in the organizational structure. The functions of school principals, teachers, humanist culture coordinators, quality assurance units formed and responsible for implementing character education to the center are clearly stated in the structure. Work plan to organize character education and emphasis on humanist culture in accordance with the teachings of the Prophet Muhammad. The division of tasks and authority in implementing policies, especially in programs that have been scheduled, such as humanist cultural education activities which include *tahfidz* classes, *liqo* classes, calligraphy classes and reflection word learning classes by bringing in expert resource persons.

It is recognized that the policy information system is still not optimally used as an effort to build understanding in policy. All matters concerning internal and external aspects in the form of information and data have not been presented in the information system. The school is equipped with a wide area network, namely a network of connections between various schools that are members of the foundation and the head office.

Success in implementing character education in Pusaka schools is influenced by various factors such as human resources for character education managers, implementers and resource support, both budget and parental involvement. The budget for

school needs has been prepared before the start of the new school year. Proposals for budget procurement or improvements to learning facilities including character education are submitted in the new school year. Until now, schools have not had a special budget for character education.

The implementation of education such as celebration of holidays, month of character followed by the delivery of stories about characters, training for teachers and staff does not yet have a documentation system. The communication process that occurs in the implementation of character education between teachers and principals is more non-formal. The support facilities according to the principal are quite adequate. It was further explained that the available budget was sufficient to meet the budget requirements for the implementation of character education.

The process of implementing character education does not require complicated procedures. The principal carries out a supervisory function on the implementation of policies. The foundation supervises from the budget side even though it is not routinely carried out. The budget is quite large only from the training held by the school. The process of organizing work has become routine. The division of labor is only done between teachers and homeroom teachers. Teachers are responsible for their respective activities and convey accountability to the principal orally. There is no organizational structure support that explains the accountability procedures, as well as the division of tasks and jobs in the management of character education.

Information system support in policy as an effort to build understanding on policies, especially at the operational level, is very much needed. Information is not only necessary but needs to be controlled. In practice, the information control system has not been implemented at SMP Pusaka. There is no information system support in the implementation of systematic character education. Usually teachers get information from meetings or meetings at school.

There is no budget in Baitul Aziz for the management of character education in particular. As a public school that does not charge fees or is free, there is no budget support to support main activities get a budget. This is as stated by the principal that the school does not charge fees to students, including in the implementation of character education. The budget for character education such as *tausiyah* comes from the principal's personal pocket. For training, participants are free of charge and all costs are borne by the foundation. The school has 12 teachers and eight of them have certificates as professional teachers. Teachers in schools have the competence and ability to deal with problematic students. Schools do not have special preparations to organize character education or manage activities related to scouts and *marawis*. This year, *marawis*

activities continue to be encouraged because the students who take part in these activities have good temperaments. Parents generally provide support for activities that have a positive impact on the development of children's behavior. Teachers work with parents to solve children's problems such as skipping or not doing assignments in a row.

The implementation of the character education program will be successful with the support of human resources, budget, character education management system, organizational structure support that describes how work is organized and its distribution, infrastructure facilities and conducive environmental conditions. The organization of activities is not supported by the availability of financial resources, systems, technology and information. Schools only have resources such as human resources and cooperation with character education providers such as foundations. Schools get support from community participation. Schools do not receive special budget support in program implementation. The results of observations and documentation studies show that for the implementation of the character education management system, the school does not have a separate organizational structure or is integrated with the existing structure by adding individual duties and responsibilities in the character management system. This shows that there is no structural division of labor yet. The school principal as the person in charge only divides the work between the activity supervisors and the principal as supervisor. There is no detailed division of work, let alone the division of resources. Teacher for extracurricular activities has full responsibility for planning up to the evaluation of activities. The accountability process has not been carried out formally, the evaluation of each activity is conveyed orally by the teacher to the principal. The activity document only shows the number of students who participate, who is the coach and what activities are being held.

In the implementation of the character education program, there is no organizational structure support, which means: (1) there is no formal division of labor to achieve goals, the division of labor is carried out informally, (2) the work grouping is carried out in a simple way where the work is grouped as management and coaching/supervising activities. The management function is carried out by the teacher and the supervisory and coaching function is carried out by the principal, (3) the relationship between sections that explains the chain of command only from the principal to the teacher including the manager of extracurricular activities and the teacher's responsibility is only to the principal, (4) Coordination after the work is distributed is carried out by the principal. The principal integrates character education activities so that the goals are achieved.

3.3. Problems in the Character Education System

At SMP Riad Madani, the budget, human resources and the system do not become obstacles in the implementation of character education. The support of parents of students is quite high for the implementation of learning activities. Information systems are used for communication sharing experiences best practices for implementing character education, problem solving and how teachers educate and conduct self-assessment for improvement. The school continues to implement and support information systems. At SMP Riad Madani, the function of research and development is still limited as a reference for teachers to improve practice. Regarding character education, research and development of character education in the perspective of science has not been done much.

The limited quality of human resources in conducting research does not only occur in other schools. SMP Pusaka is one of the schools that has limitations in conducting research and development in the implementation of character education. There has been no research conducted on the implementation of character education in the school. Research orientation is not yet supported development of character education practices in schools. Budget is one of the obstacles faced by SMP Baitul Aziz. Weak budget support does not necessarily hinder the implementation of character education. This is as conveyed by one teacher that the character learning process can be created with extracurricular activities and its implementation does require commitment. Schools actually experience budget difficulties in implementing character education development efforts because there is no special allocation drawn up.

At SMP Baitul Aziz, the information system is not yet running. Schools have so far only relied on data such as the number of delinquency participants, the number of students, the results of an analysis of environmental conditions, the number of teachers, data on facilities in the implementation of character education. There is no data management that is intended for the purposes of planning a character education management system. Considerations such as relevant data sources, parts in charge of and processing data, technology or tools for processing data into information have not been the concern of schools. For research and development, not many teachers do. Most of the CAR conducted by teachers has not been aimed at improving the practices of character education in schools. This is due to the low quality of human resources/teachers who are able to conduct research on character education.

3.4. Internal Quality Assurance System in Character Education

Based on the results of a documentary study on educational programs and the education agenda of Riad Madani Junior High School, it is known that the program changes every year. The decision on

program proposals rests with the principal and program decisions rest with the head office. So far, as long as the activity or program has relevance to character education and as part of the development of a humanist culture, the program is approved. Judging from the number and objectives, the program in 2015 was more specific and had clearer objectives (Clarity Program), encouraging parental involvement and a more varied program. Program development is followed by the development of quality assurance by the school's quality assurance team. Schools develop quality programs starting from inputs such as budgets, support from parents and foundations, attention and motivation of students. Implementation of activities such as quality in program organization, increasing commitment to active teacher participation in the process, increasing student interest and involvement and how parents are involved in the process.

Quality assurance is imported directly from the head office in Taiwan and cooperates with the principal for quality assurance. The quality assurance unit is responsible to the head office and is the quality assurance unit for the Jakarta branch. The quality assurance unit consists of human resources who really understand how the quality and teachings of *Rasulullah Swt.* Coordination and communication between policy makers and the quality assurance unit is carried out formally. The results of the audit are submitted to the principal for corrective action and for findings that are principled and can hinder the process of providing education, usually in consultation with the office and foundation for further action. The quality assurance unit at the Riad madani school has the function and authority to keep the implementation of character education on track and within the tolerance limits of the established criteria and submit recommendations for corrective action. The quality assurance unit formulates the concept of character education quality assurance, improvement and ensures that each activity has a predetermined quality standard. The quality assurance unit is a functional institution whose job is to support character education activities in schools in providing quality assurance to customers. The quality assurance unit at Riad Madani Junior High School has the task of assisting school principals in developing the concept of quality assurance as well as a documentation system for character education activities, both main activities and supporting activities.

The character education quality assurance unit uses the results of the internal audit of character education to implement an early alert system and provide supervision and training related to quality assurance for teachers and staff. Activities and programs related to character education are the task of the quality assurance unit in schools.

In SMP Pusaka and Baitul Aziz Middle School, no internal quality assurance unit was

conducted. Quality assurance only refers to the quality standards of graduates issued by government. Neither SMP Pusaka nor SMP Baitul Aziz have a formal internal quality assurance system. Teachers, principals, staff and school credibility are variables that ensure that schools have different characteristics, especially from the aspect of character education which is very tolerant of diversity. General requirements and documentation requirements that describe statements about quality policies in character education have not been supported by quality guidelines, written procedures for the implementation of character education or the documents required to ensure quality. Documents that state the results of character education are still general in nature.

3.5 Discussion

Vision is a picture of the role of the institution or organization in the future. Judging from the school's vision and mission, the three schools formulated the vision correctly. This vision becomes the main basis in formulating character education policies. SMP Pusaka's vision is to create intelligent, creative, independent and wise students. The vision of SMP Baitul Aziz is to be honest, disciplined, pious and accomplished, while the vision of SMP Riad Madani is the realization of students who are faithful, intelligent, skilled and have a global perspective. The similarity of the three visions is about how the role of the institution is to produce students and how to carry out activities to realize students in accordance with expectations. The vision and mission of the school's identity and its understanding of the future.

As an open social system, the vision statements of the three schools clearly show the characteristics of the institution. The vision is quite clear and easy to understand. The vision statement is in line with what was conveyed by Blanchard and Stoner (2004, p. 21) that a clear vision is one indicator of the success of an institution. The vision statement will have implications for the governance system for achieving goals and how the behavior of organizational members is directed. The vision statement is in line with what was conveyed by Sallis (2005, p.119) that the vision will direct the institution and give meaning to what role the institution wants in the future. Judging from the role of the institution, the vision of the three junior high schools does not explicitly state the role of the institution. However, from the point of view of the existence of the institution, the school's vision is quite clear, namely to produce students who meet expectations. The focus of the vision is students.

The principal's policy process in relation to character education, one of the main factors in policy formulation is the identification of problems in focus. The policies include the problems of the policy support sub system, namely 1) there is no work team tasked with formulating policies, 2) there is no institution or system that guarantees that policies are

implemented in accordance with the objectives. This is in line with the opinion of Paudel (2009, p.39) which explains that two important factors in policy implementation are the capacity and political will contained in the policy to solve problems. Capacity can be seen from the ability to carry out the stages in policy formulation and willingness can be seen from how the policy is implemented.

The activities held in schools are the implications of the principal's policy to realize an effective character education process. The success of activities as the realization of character education policies cannot be separated from the existence of political will and capacity to realize policies. Activities are arranged based on the results of internal and external identification of the school including how parents support programs that aim to provide education to students. These activities require the budgetary support as well as the necessary social resources to support the organization and division of labor.

One important factor that supports as well as becomes an obstacle in the implementation of character education policies is culture. Culture can hinder and at the same time encourage increased commitment and build social system stability in the implementation of character education. The sub culture in each work unit at the sixth or first grade level is different. Different sub-cultures between levels in the implementation of character education can hinder how an activity is carried out. Schools need to optimize how ideas, beliefs or shared thoughts grow in the implementation of character education. The similarity of ideas or thoughts in organizing programs that support activities that provide a sense of social stability for both individuals in the organization.

Weak research and development of character education concepts in schools makes it difficult to develop practices. The results of research and development of concepts on character education in the three schools have not been optimal. This condition hinders the development of character education practices in schools. Teachers rarely reflect critically on the achievement of character education and on the process by means of scientific work. The limitations of teachers in understanding the concepts in character education or the lack of understanding of models of developing activities related to character education will hinder the development of practice.

Research that is directed and developed both by schools and at the initiative of teachers will encourage increased understanding of teachers about how character education is and how it is implemented. The importance of research and development is stated by Berkowitz and Bustamante (2013, p.7) that educators and decision makers must understand theory and have access to knowledge resources related to student development and learning, including character education. The research

results can be used to support character education policies in schools and their impact on the success of character education. 7) that educators and decision makers must understand theory and have access to knowledge resources related to student development and learning, including character education. The research results can be used to support character education policies in schools and their impact on the success of character education. 7) that educators and decision makers must understand theory and have access to knowledge resources related to student development and learning, including character education. The research results can be used to support character education policies in schools and their impact on the success of character education.

Information systems need to be optimized by schools in the implementation of character education. Information systems functions can be used to encourage research and development. The ease of teachers in accessing learning resources can provide motivation and wider opportunities for teachers to develop their abilities both in terms of theory and best practice of character education as well as benchmarking. The information available on the internet can be used as a reference for developing character education practices.

Development and evolution of communication technology has made it easy organizing information systems to be more effective and efficient. The process of sending information quickly, including in the world of education, can be done only by setting up a local area network or obtaining information by accessing the internet. Easily accessible and quality information is a means to support institutional structure in ensuring the quality system. Information about quality in the implementation of character education as well as documentation of best character education practices can be collected, stored, processed and exchanged information so as to allow for common perceptions and or actions that are in accordance with the objectives for the implementation of quality character education.

The quality assurance system in character education is a system composed of the arguments as an integrated circuit in the character education system. Assurance of the quality of character education in accordance with the results of research affects success in the implementation of character education can be seen from the practice of quality assurance at SMP Riad Madani.

The importance of a quality standard in the implementation of character education has been stated by experts including Williams (2010) who emphasized the need for a curriculum standard in the implementation of integrated character education. These standards include values and characters that are formulated based on an agreement and show how well these values are the basis for policy making. This means that the school has a mutually agreed

value base and functions as a quality guarantor in character education activities.

The existence of an internal quality assurance system will direct continuous improvement both organizationally and individually. The institution will be directed in conducting self-evaluation and reflection on the quality of the implementation of character education. The function of quality assurance presented by Yonezawa (2002) is still relevant to current conditions, that the existence of a quality assurance system will direct success in competing in the midst of global competition, including in education. The existence of a quality assurance system will ensure the occurrence of self-assessment and reflection as an activity to make improvements to each quality achievement. The quality assurance system will increase the involvement of organizational members, participation in organizing quality character education learning activities.

The existence of a quality assurance system has a positive impact as found in SMP Riad Madani. This condition is in line with Pitt's statement (2014, p. 3) that: 'its purpose is a desire to support management to improve operational, and ultimately organizational, outcomes'. The purpose of a quality assurance system is to ensure that every process conforms to standards and objectives. The same thing was conveyed by Purushothama (2010, p. 59) that the internal quality assurance system is a process to ensure conformity of specifications with quality standards. The absence of a quality assurance system as evidenced by the existence of a guarantee institution, human resources, products such as quality manuals containing the concept of quality reduces quality in achieving goals. A quality system is in place to ensure that the implementation of character education is in accordance with the expectations of its customers. Conditions and realities in the implementation of character education are counter-productive to expectations. Only a small number of schools have an internal quality assurance system in the implementation of character education.

Quality assurance as an influencing system how policy implemented as well as how organizing programs or activities in character education. Every activity in the implementation of character education has a quality standard. Based on the results of the study, it can be formulated that the argument about the quality assurance of character education is that the higher the quality assurance in character education, the higher the level of quality in the implementation of character education. Without an internal quality assurance system, it is difficult to state that a school has measurable and quality character education activities. It is like delivered by Ng (2007, p.237) which explains quality assurance related to accountability, performance standards and schools.

The success of implementing character education as stated by Bahm (2012, p.7) can not only be seen from the involvement of schools but all school stakeholders. This means that character education is guaranteed when the education system involves all stakeholders in preparing a systematic and planned process. This involvement will be realized with a system that guarantees it resulting from the involvement of stakeholders. The same thing was conveyed by Berkowit and Bustamante (2013, p. 9) who provided an overview of the character education model based on best practices, namely the PRIME model. One of the core elements in the model is the positive development of good relations among stakeholders. This relationship leads to full involvement and commitment to support the existence of character education.

The success of schools in providing a system that can ensure the fulfillment of customer needs for character education is a must. Reichenbacher and Einax (2011, p.2) explain that quality assurance includes all activities focused on meeting quality in accordance with needs that provide a sense of satisfaction. In order to provide satisfaction, it is necessary to support and involve in (1) the design of an internal quality assurance system in character education. (2) explaining that quality assurance includes all activities focused on fulfilling quality in accordance with needs that provide a sense of satisfaction. In order to provide satisfaction, it is necessary to support and involve in the design of an internal quality assurance system in character education. (3) explains that quality assurance includes all activities focused on fulfilling quality in accordance with needs that provide a sense of satisfaction. In order to provide satisfaction, it is necessary to support and involve in the design of an internal quality assurance system in character education.

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Each school has a distinctive character that is expressed in its vision. A good vision statement that better describes the religious, national side with diversity as well as with universal values affects how the practices in the implementation of character education are carried out. The vision formulation is carried out without involving external parties such as school committees or parents. The vision is formulated based on the characteristics of the school and displays the characteristics of the character to be realized through students who graduate from the school.

Problems in character education and the needs of students for character education become the basis for formulating character education policy formulas. Policy estimation and selection is carried out limited by the involvement of teachers and principals. Policy recommendations proposed through limited meetings and discussions are policies that are relevant to

efforts to educate students in accordance with the values that characterize the school.

Policies issued by school principals regarding quality policies are more operational in nature or focus on aspects that can be implemented ensure continuity maintenance education character. Monitoring of policy performance is carried out through social examinations, especially on teacher responses and changes in student behavior.

The program and implementation of character education is adjusted to the ability of the school and the distinctive characteristics inherent in the school. Programs and implementation character education for schools that do not yet have a quality assurance system is more non-formal in nature, there are no standards made in character education and it is not structured.

The main obstacle faced by schools in character education is the weakness of the quality assurance system for character education, and the weak support for information systems to support quality character education activities. The limited budget and the non-functioning quality culture as a differentiator for schools that focus on character education from schools that do not have an orientation on character education.

The quality assurance system in the implementation of character education is still informal except for the SMP Riad Madani which do not yet have a quality assurance system in character education. This condition causes the process of implementing character education programs to be more routine in nature without any evaluation and control through the system. The implementation of character education in schools requires policies and support for a quality assurance system that can provide certainty that every program, the implementation of education is carried out with quality standards in accordance with the school's vision and mission.

5. REFERENCES

- Arthur, J. (2011). Personal character and tomorrow's citizens: Student expectations of their teachers. *International Journal of Educational Research*, 50(3), 184-189. doi:10.1016/j.ijer.2011.07.001
- Dyson, B. (2001). Cooperative learning in an elementary physical education program. *Journal of Teaching in Physical Education*, 20(3), 264-281. doi:10.1123/jtpe.20.3.264
- Hasanah, Aan. 2009. Pendidikan Berbasis Karakter. <http://www.mediaindonesia.com/cetak/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter.html>. Accessed on 10 June 2010
- Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter: Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama [Concepts and Guidelines for Strengthening Character Education: Elementary and Junior Secondary School Levels]*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2011) *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter [Guide to the Implementation of Character Education]*. 1st edn. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Available at: http://repository.unand.ac.id/22742/1/4_PAN_DUAN_PELAKS_PENDIDIKAN_KARAKTER.pdf.
- Kohn, A. (1997). How not to teach values: A critical look at character education. *Phi Delta Kappan*, 78(6), 428-439. <https://www.jstor.org/stable/i20405812>
- Lie, A. (2014) 'Religious Education and Character Formation: An Indonesian Context', *Journal of Interdisciplinary Studies*, 26(1/2), pp.73-94.
- Lumpkin, A. (2008). Teachers as role models teaching character and moral virtues. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79(2), 45-50. doi:10.1080/07303084.2008.10598134
- Muhtar, T. (2014) 'Analisis Kurikulum 2013 Ditinjau dari Aspek Nilai Karakter Bangsa [Analysis of 2013 Curriculum from the Aspects of Nation-Character Values]', *Jurnal UPI Mimbar Sekolah Dasar*, pp.168-175. doi: <http://dx.doi.org/10.17509/mimbar-sd.v1i2.879>.
- Nash, J. B. (1933) The rôle of physical education in character education. *The Journal of Health and Physical Education*, 4(3), 28-69. doi:10.1080/23267240.1933.10625629
- Suryanto, E., Suhita, R., & Mujiyanto, Y. (2017). Pendidikan budi pekerti berbasis cerita anak melalui penanaman nilai etis-spiritual di SD. [Character education based on fairy tales through internalization ethic-spiritual values in elementary school]. *Sekolah Dasar: Kajian teori dan praktik pendidikan*, 24(1), 57-68. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/1357>.

KEBIJAKAN REVISI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:

Alif Fajar¹⁾, Farid Setiawan²⁾, Mirna Fadila³⁾.

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

¹e-mail: alif1900031119@webmail.uad.ac.id

²e-mail: farid.setiawan@pai.uad.ac.id

³e-mail: mirna2000031190@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Perkembangan pendidikan Indonesia terhambat oleh isu-isu moral anak-anak negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan hasil positif bagi sistem pendidikan nasional di bidang pendidikan karakter nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan informasi terperinci yang menguraikan gejala saat ini, mengidentifikasi kesulitan, dan membuat perbedaan dan penilaian

KataKunci: Pengembangan, moral, pendidikan, masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses seorang guru mewariskanilmunya kepada murid-muridnya.Ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Secara formal, seperti di sekolah, atau secara informal, seperti melalui kursus. Setiap level memiliki tujuan yang berbeda. Jelas ada peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam pendidikan yang dibuat dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu pendidikan terbaiknya. Pendidikan adalah tempat di mana orang dapat tumbuh dan meningkatkan kemampuan mereka dalam individu dan transformasi manusia menjadi kamil. Pendidikan dan pembelajaran akan selalu dikaitkan.dengan diri sendiri.Pendidikan itu seperti cahaya yang membimbing seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak. Peta jalur pendidikan dibuat untuk dapat mengarahkan setiap prosedur pendidikan. Peta jalan pendidikan akan membantu penyedia pendidikan dalam menavigasi semua kebijakan yang ada, seseorang yang menghasilkan kebijakan harus dapat menetapkan tujuan yang harus dipenuhi, karena jika kebijakan dibuat tanpa tujuan, itu tidak memiliki nilai dan kemungkinan akan menyebabkan masalah baru. Misalnya, jika ada kebijakan yang memiliki tujuan yang tidak jelas, proses mengadopsinya akan kurang optimal, dan publik serta analis pendidikan pada akhirnya dapat mengkritik kebijakan tersebut, mengklaim bahwa kebijakan tersebut harus segera dilaksanakan. (Bakry, 2010)

Sebelum merumuskan kebijakan, penilaian akan dilakukan dan kemudian dipertimbangkan dengan matang sehingga kebijakan tersebut sepenuhnya siap untuk dilaksanakan. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan sering dijadikan tolok ukur untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Kualitas sistem pendidikan yang dijalankan oleh bangsa yang dianggap maju dapat dilihat. Jika tingkat pendidikan masih dianggap rendah, suatu negara akan dianggap

kurang berkembang dan tertinggal. (Kadi, 2017) Untuk itu, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memajukan bangsa dan negara tercinta. Pemimpin akan dihasilkan sebagai hasil dari pendidikan, dan mereka akan dapat membuat perubahan positif. Manusia memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk mempelajari, mengkaji, dan memahami semua fakta yang ada dalam kehidupan. Akibatnya, pendidikan sangat penting bagi semua orang.

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analitis dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah yang terdapat dalam artikel jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan analisis peta jalan pendidikan nasional kebijakan 2020-2035 akan diperiksa secara menyeluruh. Setelah itu, setelah peneliti menyelesaikan prosedur pengumpulan dan analisis data, peneliti akan mempresentasikan kesimpulan untuk menyelesaikan temuan penelitian. Untuk memverifikasi kebenaran data, dua metode digunakan: triangulasi dan diskusi sejawat. Peneliti menjelaskan salah satu strategi tersebut sebagai berikut:

- Sebuah. kumpulan informasi dari berbagai sumber tentang topik yang sedang dibahas.
- Data tersebut kemudian dimasukkan dan didiskusikan.
- Setelah percakapan, data yang dikumpulkan sebelumnya diperiksa secara menyeluruh.
- Ketika penyelidikan proses berakhir, peneliti menyajikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan di Indonesia

Sebagai ciri hidup di Indonesia telah mendarah daging prinsip-prinsip filosofis dan nilai-

nilai pendidikan yang menyatu. Sementara itu, nilai nilai digunakan sebagai seorang filsuf dalam persiapan filsuf. Proses transisi kehidupan berjalan cepat, berteknologi maju, dan pengetahuan yang tersedia berkembang pesat. Pendidikan adalah wadah yang tidak dapat diisolasi dari tindakan manusia, karena mencakup agama, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mendukung. Akibatnya, sistem pendidikan dapat dipahami sebagai desain untuk penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa aktif yang mampu mengembangkan kemampuan, kecerdasan, keterampilan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara

Harus ada komponen dalam kegiatan pendidikan yang diarahkan untuk membangun pola pikir yang memajukan pendidikan. Ada berbagai komponen pendidikan, antara lain

- 1) Memahami tujuan pendidikan
- 2) Pendidik
- 3) Siswa yang akan menerima pendidikan
- 4) Media/audio
- 5) Metode pembelajaran,
- 6) Prosedur dan kegiatan

Pendidikan Nasional setiap negara memiliki karakter budaya yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat, pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem pendidikan di Indonesia telah berubah sebagai akibat dari pembaruan undang-undang pendidikan pada saat itu. Proses pendidikan merupakan prioritas tinggi dalam hal bagaimana mengembangkan peserta didik agar bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih besar. Untuk menarik belas kasih siswa dalam proses pendidikan, berbagai strategi harus digunakan. Akibatnya, siswa akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Terkadang seorang pendidik harus mengikuti jejak murid-muridnya. (E, 2014). Hal itu di upayakan agar pendidik ikut masuk ke dalam dunia anak didiknya sehingga hubungan pendidik dan peserta didik sangat erat. Pendidik bertanggung jawab untuk tidak hanya mengajarkan kurikulum tetapi juga untuk membebaskan siswa dari perilaku yang tidak diinginkan, tidak peduli seberapa kecil. (Rahmadani, 2019). Saat ini, negara Indonesia sedang berhadapan dengan banyak persoalan, baik di dalam negeri maupun internasional. Isu-isu yang muncul adalah hasil dari perubahan zaman; misalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih maju, mengurangi rasa kekeluargaan di sekitarnya. Karena pergeseran tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan. Manusia membutuhkan banyak pendidikan untuk menjalani hidup. Desain pendidikan, seperti dapat dilihat, dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan proses multi tahapan yang bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan individu sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Secara umum, baik filosofis maupun praktis, pendidikan Indonesia belum sepenuhnya menyadari potensi penuhnya sebagai pendidikan sejati. Namun, sepanjang sejarah, penyelenggaraan pendidikan telah berusaha berjalan tepat sesuai dengan hukum, mengarahkan masyarakat untuk menjadi manusia dengan pikiran, otoritas, dan karakter yang cemerlang. Manusia diharapkan menjadi pembelajar seumur hidup, menurut UU No. 20 Tahun 2003, karena diperlukan pendidikan seumur hidup. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, setiap penduduk negara memiliki hak atas pendidikan yang baik dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Tentu saja, ada sekolah-sekolah di Indonesia yang mahal, murah, atau bahkan gratis, tetapi ini tidak menjamin kualitas pendidikan yang diberikan. (Primadata, 2014). Merupakan tanggung jawab pemerintah, sekaligus tanggung jawab mereka yang berpotensi menerima pendidikan tinggi, untuk berkontribusi pada dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Prosedur pendidikan di pedesaan berbeda secara relevan dari yang ada di kota. Pendidikan di kota akan memberikan kemudahan akses pengetahuan, internet cepat, dan adanya peralatan pendukung di setiap lingkungan belajar. Berbeda dengan di kota, pendidikan di desa menghadapi lebih banyak tantangan, seperti kesulitan mengakses internet, fasilitas yang kurang kondusif untuk belajar, jarak jauh antar sekolah, dan sebagainya, yang menyebabkan banyak orang di desa memiliki keinginan yang kuat untuk belajar sampai mereka menanamkan dalam diri sendiri keinginan kuat untuk belajar sangat penting. Belajar akan lebih menyenangkan dan kurang dari tugas dengan semangat dan bersedia melakukan perjalanan ke kota untuk melanjutkan pendidikan mereka.

b. Tantangan dalam Dunia Pendidikan

Di bidang pendidikan, ada banyak tantangan dan masalah. Kesulitan itu bisa disebabkan oleh siswa, sekitarnya, atau bahkan guru. Ada banyak masalah dalam pendidikan Indonesia, termasuk kurangnya kemampuan untuk berkembang, masalah kurikulum, dan kekurangan guru. Banyaknya keluhan yang sering ditemui dalam proses pendidikan, baik dari siswa maupun dari sekolah terkait. Segala kesulitan dapat diselesaikan apabila semua pihak bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika pendidikan meningkat, akan lahir lebih banyak orang yang berpengetahuan yang dapat berbagi pengetahuan untuk membantu Indonesia tumbuh. Setiap tahun, masalah di bidang pendidikan muncul. Bergantian kurikulum biasanya merupakan masalah yang paling signifikan. Prosedur input, proses, dan output pendidikan adalah contoh masalah lain yang muncul. Ketiga hal ini saling terkait. Proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh masukan. Prosedur input, proses, dan output pendidikan adalah

contoh masalah lain yang muncul. Ketiga hal ini saling terkait. Proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh masukan. Proses pembelajaran berdampak pada output. Selanjutnya, output akan kembali ke input di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau ke tempat kerja, di mana semua yang dipelajari akan diimplementasikan atau diterapkan. (Megawati, 2012). Isu-isu yang muncul selama proses input, seperti ketika siswa diterima. Peserta didik harus dipilih untuk memastikan bahwa individu yang benar-benar mampu mengikuti semua proses pendidikan dipilih.

Selama proses pembelajaran, guru harus menilai secara kasar apa masalahnya, dengan fokus hanya pada masalah-masalah yang dapat menghambat pembelajaran. Akibatnya, guru akan lebih siap untuk menangani masalah apa pun yang muncul. Peserta didik akan dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan instruksional yang tepat. Siswa akan dengan mudah memahami mata pelajaran yang disajikan oleh guru jika cara yang tepat digunakan. Guru juga berfungsi sebagai motivator, mendorong siswa untuk menikmati pembelajaran. Siswa sering menjadi bosan ketika belajar dan gagal fokus pada pelajaran, atau mereka mungkin merasa tertekan oleh tuntutan orang tua yang ingin anak mereka mencapai prestasi akademik yang sangat baik.

Dalam pendidikan Islam dijelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang unggul, serta kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai yang relevan (dalam ilmu pengetahuan), yaitu sebagai umat Islam yang dapat mencontoh dan menanamkan pengetahuan dan cita-cita pendidikan Islam. Namun, lebih banyak istilah diperlukan untuk menjadi pendidik profesional. (Mudzakir, 2008). Pendidik harus memiliki shidiq, amanah, tabligh, dan fatonah, selain pengetahuan. Pendidik adalah pemain penting dalam pendidikan.

Pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia untuk menghadapi tantangan hidup. Kehadiran intensitas dalam konten pendidikan seharusnya menghasilkan solusi untuk kesulitan hidup yang beragam. Pendidikan selalu berubah untuk mengikuti tren, kebutuhan, dan tuntutan terbaru. Peran pemerintah dan komponen lainnya dalam ranah pendidikan, seperti guru, terkait erat dengan pencapaian pendidikan berkualitas tinggi. Karena itu, pemerintah dan seluruh komponen pendidikan harus segera belajar tentang permasalahan yang ada di bidang pendidikan, serta apa peran pemerintah dalam menghidupkan kembali pendidikan di Indonesia. Sebisa mungkin kita menyikapi dengan bijak perkembangan teknologi yang terjadi di bidang pendidikan saat ini, khususnya pada period Revolusi 4.0. Segala perubahan yang terjadi harus menjadi inspirasi bagi pendidikan dunia untuk dapat menumbuhkan kreativitas dalam rangka menghasilkan guru yang berkualitas, profesional, dan

berkarakter (calon). Akibatnya, dalam periode revolusi 4.0 ini, kesulitan harus dihadapi dan solusi yang dicari, terutama oleh pemerintah.

Semua masalah yang dihadapi pendidik seharusnya tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar. Justru karena kesulitan inilah instruksi yang dijanjikan dapat diwujudkan. Menurut Syamsuar dan Reflianto, ketepatan dalam memilih dan menerapkan inovasi pendidikan sangat memperluas kemungkinan terciptanya berbagai lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, memungkinkan siswa untuk mengakses komponen-komponen yang menentukan terciptanya kondisi pembelajaran yang baik. (Syamsuar, 2018)

c. Peta Jalan Pendidikan Nasional Indonesia

Peta jalan pendidikan nasional adalah mengembangkan sumber daya manusia yang luar biasa yang berkualitas dan kompeten (Kemendikbud, 2020: 1-75). "Membangun masyarakat Indonesia yang berhasil, terus maju, sejahtera, dan memiliki karakter yang mulia melalui pembinaan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila," merupakan tujuan pendidikan Indonesia tahun 2035. Dengan visi ini, dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga akan berlangsung sepanjang hidup seseorang, karena manusia membutuhkan informasi untuk hidup setiap hari. SDM yang unggul tidak hanya harus menjadi pembelajar seumur hidup, tetapi juga harus menunjukkan karakteristik Pancasila seperti iman dan dedikasi kepada Tuhan, kemandirian, keinginan untuk berkolaborasi, menghargai keberagaman, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kebijakan pembelajaran otonom juga termasuk dalam rencana pendidikan, dengan tujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjadi agen perubahan dan memberikan dampak dan dukungan penuh, kebijakan ini membutuhkan dukungan dari semua pembuat kebijakan (termasuk mahasiswa). Kebebasan belajar mengharuskan semua anak bersekolah dan tidak ada anak yang tertinggal. Infrastruktur dan teknologi, uang, kepemimpinan, serta kurikulum dan penilaian nasional semuanya dapat membantu. Sistem pendidikan kebebasan belajar dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi kritis.

Perkembangan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional ditekankan dalam tingkat pendidikan prasekolah. Keterampilan dasar, informasi umum, dan pembentukan sikap dan nilai-nilai kemudian diprioritaskan di sekolah dasar dan menengah. Keterampilan dasar, informasi umum, dan pembentukan sikap dan nilai-nilai kemudian diprioritaskan di sekolah dasar dan menengah. Kemampuan teknis tingkat tinggi, praktis, dan kognitif adalah beberapa hal yang dikembangkan dalam pendidikan. Selanjutnya, diperlukan pengetahuan terkait industri, seperti halnya keterampilan penelitian.

Rencana utama untuk meningkatkan pendidikan pada tahun 2035 adalah kebijakan pembelajaran mandiri. Berikut ini adalah beberapa strategi yang digunakan:

- 1) Menjalinkan komunikasi dan koordinasi sekolah-ke-sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan Informal).
- 2) Pendidik dan kepala sekolah harus berkualitas lebih tinggi.
- 3) Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan kurikulum nasional, pedagogi, dan evaluasi.
- 5) Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penyalurannya adil.
- 6) Mengembangkan sekolah masa depan atau lingkungan belajar yang aman, berteknologi maju, dan inovatif

Untuk melakukan pendekatan merdeka belajar, sebuah sekolah harus didirikan sebagai penggerak, sekolah yang akan merintis eksistensi. Merdeka Belajar melalui bimbingan, dukungan dari rekan kerja, dan pengembangan teknologi adanya di sekolah. Sekolah yang bertindak sebagai penggerak tidak diragukan lagi akan bertindak sebagai penghubung dan penyalur, mengubah sekolah di sekitar mereka dan melayani sebagai pusat pelatihan guru. Program pendidikan guru ini seharusnya menghasilkan pendidik yang berkualitas. Guru yang kompeten atau berkinerja baik dihargai dengan baik, memungkinkan mereka untuk mencari nafkah yang masuk akal. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan diprediksi akan meningkatkan pembelajaran di masa depan. Tentu saja, pendidikan berbasis teknologi memerlukan bantuan sumber daya dan infrastruktur masing-masing sekolah. Dalam hal bantuan pemerintah untuk rencana tersebut dalam hal sarana dan prasarana teknologi, khususnya melakukan proses negosiasi untuk mendapatkan harga kuota yang hemat biaya. Telekomunikasi adalah perusahaan tempat diskusi ini diadakan.

Untuk memastikan bahwa strategi Merdeka Belajar terus berlanjut dan memenuhi semua target untuk 15 tahun ke depan, pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti:

- 1) Mencapai massa kritis sebesar 20% pada semua perubahan kebijakan (misalnya, 20% sekolah akan mendorong sekolah) dan memastikan bahwa pendidikan sistem dapat beroperasi secara mandiri.
- 2) Transformasi kepemimpinan internal di dalam Kementerian dan di tingkat wilayah
- 3) Merevisi peraturan perundang-undangan yang berbeda (yang terbaru adalah UU Pendidikan Nasional) sehingga pemangku kepentingan pendidikan dapat terus melaksanakan kebijakan ini.
- 4) Memasukkan fungsi pihak ketiga dalam sistem pendidikan, seperti dunia usaha di perguruan tinggi

Tindakan berikut diperlukan untuk mengatasi periode revolusi 4.0 seperti yang ada saat ini:

- 1) Pengembangan sistem pembelajaran perguruan tinggi yang lebih inventif yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing atau berdaya saing.
- 2) Kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif di perguruan tinggi.
- 3) Luangkan waktu satu jam untuk mempersiapkannya.
- 4) Membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Meningkatkan produktivitas melalui inovasi

Tidak ada makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa melalui suatu proses. Demikian pula, pendidikan adalah proses yang terarah dengan tujuan membimbing siswa (manusia) ke potensi maksimalnya. Tujuannya adalah untuk menjadi manusia seutuhnya yang berbakti kepada-Nya. Karena semua ilmu pengetahuan saat ini terkait erat dengan pendidik, pendidik memegang posisi yang menonjol dalam Islam. (Mukhorji, 2014)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan diskusi sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa: (1) pendidikan di Indonesia mengalami perubahan, dan potret pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan berbeda-beda. Guru dan siswa memiliki akses yang lebih mudah ke informasi dan fasilitas pembelajaran di kota. Berbeda dengan desa, banyak sekolah masih memiliki fasilitas pengajaran yang tidak memadai. (2) Tantangan dalam pendidikan dunia yang berkaitan dengan pemanfaatan kurikulum dan cara mengajar guru sehingga dihasilkan output yang baik dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas (3) Administrasi

Pada tahun 2035, strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pembelajaran mandiri. Kebijakan ini berlaku di semua tingkat pendidikan: taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan pendidikan informal. Pemerintah juga akan membangun sekolah masa depan yang akan aman dan memanfaatkan teknologi sepenuhnya

5. REFERENSI

- Arman, Y. (2017). Perkembangan Pendidikan di Indonesia . *Jurnal Pendidikan* .
- Bakry, A. R. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik . *Jurnal MEDTEK*, 2-3.
- E, N. (2014). Problematika pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah* , 1-10.
- Kadi, T. d. (2017). Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia . *Jurnal Islam Nusantara* , 145 .
- Megawati, P. (2012). Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia. 228.

- Mudzakir, A. M. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam* . Jakarta : Kencana .
- Mukhorji, E. (2014). Hakekat Pendidik Dalam Pandangan Islam . *Jurnal Kependidikan* , 16-17.
- Nasution, S. (2001). *Sejarah Pendidikan* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Primadata, A. P. (2014). Modernisasi Pendidikan di Indonesia sebuah Prespektif Sosiologis terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi* , 29.
- Rahmadani. (2019). Pendidikan Dalam Perspektif Al-qur'an . *Jurnal Sains Riset* , 20 .
- S., A. L. (2012). *Sejarah Pendidikan* . Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Syamsuar, R. d. (2018). Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran . *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* , 4.

EVALUASI MODEL CIPP TERHADAP MANAJEMEN PELATIHAN PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA K3 ANGGOTA SAFETY COMMITTEE PABRIK CPODI SUMATERA UTARA

Oleh:

Sumaryanto¹⁾, Eka Daryanto²⁾, Kisno³⁾

¹PT. EMCOTAMA

²Universitas Negeri Medan

³Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia (STAMI)

email: ¹sumaryantogiri54@gmail.com,

²ekadaryanto@unimed.ac.id,

³d.shinoda85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masalah manajemen pelatihan pengawasannorma K3 dianggap kurang efektif untuk dapat memutuskan kebijakan yang tepat mengenai tindak lanjutpelatihan ini. 30 anggota *Safety Committee* dari 16 pabrik CPO pada delapan kabupaten di wilayah Sumatera Utara sebagai peserta pelatihan dan LLKS-K3 serta pimpinan masing-masing menjadi objek penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelatihan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi telah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dengan capaian nilai postes peserta berada pada kriteria cukup atau nilai antara 41 sampai 60. Namun, seluruh nilai praktik peserta pelatihan mengenai pemeriksaan penerapan norma K3 untuk menemukan masalah K3 dan pemecahan masalahnya di pabrik CPO sangat kurang yakni antara 21 sampai 40. Hasil evaluasi instruktur berada pada kriteria baik atau nilainya antara 61-80. Hasil evaluasi seluruh peserta pelatihan terhadap instruktur, tim pelaksana pelatihan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran dinilai baik. Meskipun demikian, peserta menilai bahwa durasi yang tersedia untuk pembelajaran teori tergolong cukup, tetapi untuk praktikum sangat kurang dan perlu dievaluasi lagi. Walaupun manajemen pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, hasilnya sisi pengetahuan cukup efektif tetapi sisi keterampilan praktik kurang efektif. Kurikulum pelatihan perlu ditinjau kembali dan waktunya ditambah sesuai dengan kebutuhan. Peserta pelatihan pengawasan norma K3 berjumlah 30 orang anggota *Safety Committee* pada 16 pabrik CPO di lingkungan PTPN-IV tersebut perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal pemeriksaan penerapan K3 di pabrik CPO guna menemukan masalah K3 beserta saran pemecahan masalahnya.

Kata Kunci: Manajemen Pelatihan, Pengawasan Norma K3, *Safety Committee*, CPO, CIPP

1. PENDAHULUAN

Kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 114.000 kasus dan tahun 2020 sebanyak 117.000 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020). Sepanjang bulan Januari 2021, di Sumatera Utara terjadi 12.272 kasus kecelakaan kerja, dimana jumlah tersebut klaim sebesar lebih dari delapan milyar rupiah telah dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir sebelum adanya pandemi Covid-19 terdapat pada Tabel 1.

Tabel.1. Jumlah perusahaan di Indonesia Badan Pusat Statistik, 2020

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan yang tergolong Micro	Jumlah yang tergolong Perusahaan kecil
1.	2017	145.716	6.750
2.	2018	133.211	7.397
3.	2019	122.524	4.620

Sebenarnya dari sejak jaman penjajahan Belanda, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di

Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah kolonial, yang antara lain dibuktikan dengan adanya Peraturan Keselamatan Kerja (*Veiligheids Reglemene*) tahun 1910 dan Undang-Undang Uap (*Stoom Ordonantie*) tahun 1930. *Veiligheid Reglemene* tahun 1910 sudah ketinggalan dengan perkembangan teknik dan teknologi, bersifat represif, ruang lingkupnya terlalu sempit, maka pada tahun 1970 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan *Stoom Ordonantie* 1930 masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Wirawan (2015:543), keselamatan Kerja adalah kondisi dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan kesehatan kerja adalah penerapan ilmu kesehatan/kedokteran di bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerja mereka.

Menurut Tarwaka (2008:2), secara keilmuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dari sudut pandang ilmu hukum, K3 didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat serta agar sumber-sumber produksi proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif.

Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia. Jumlah pabrik CPO di Indonesia seluruhnya 391 unit (Sawit, 2013). Menurut hasil observasi di lapangan, setiap pabrik CPO menggunakan peralatan produksi yang sangat dibutuhkan dalam proses produksinya yaitu: (1) Pesawat Uap, (2) Bejana Tekanan, (3) Tangki Timbun, (4) Pesawat angkat, (5) Pesawat angkut, (6) Pesawat Tenaga, (7) Pesawat Produksi. Selain itu juga menggunakan generator listrik dan Instalasi listrik serta memakai bahan yang mudah terbakar dan bahan mudah meledak, sehingga dapat tembul kecelakaan kerja di tempat kerja apabila di perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan perundangan K3 yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, pernah terjadi peristiwa kecelakaan kerja yaitu meledaknya Pesawat Uap pada pabrik CPO di Kota Pinang dan salah satu pabrik CPO di Perlabian, Sumatera Utara. Sedangkan peristiwa kebakaran di salah satu pabrik CPO dalam bulan Januari 2022 terjadi di Simalungun (Sumatera Bisnis, 2022).

Menurut Tarwaka (2008:5), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dihindaki dan seringkali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), setiap perusahaan yang mengandung risiko bahaya tinggi wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pada lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa "P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Keanggotaan K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. P2K3 mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3. Sebagai Sekretaris P2K3 (*Safety Officer*) harus Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) yang

memiliki sertifikat pelatihan calon AK3 yang diselenggarakan oleh Kemnaker atau Lembaga pelatihan yang diakui Kemnaker. Pada peraturan pelaksanaan pasal 10 Undang-undang Keselamatan Kerja, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1992 tentang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja disebutkan bahwa Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3), berkewajiban sebagai berikut: (1) Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya, (2) Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Untuk AK3 di tempat kerja satu kali dalam tiga bulan, (b) Untuk AK3 di perusahaan yang memberikan jasa dibidang K3 setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya, (c) Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.

Adapun wewenangnya yaitu sebagai berikut: (1) Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan, (2) Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 sesuai dengan keputusan penunjukannya, (3) Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 meliputi: (1) Keadaan dan fasilitas tenaga kerja, (2) Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya, (3) Penanganan bahan-bahan, (4) Proses produksi, (5) Sifat pekerjaan, (6) Lingkungan Kerja.

Menurut data yang ada, setiap pabrik CPO di Sumatera Utara telah terbentuk *Safety Commitee* dan sudah memiliki seorang AK3 yang merangkap jabatan sebagai Sekretaris P2K3 (*Safety Officer*) masing-masing AK3 telah memiliki sertifikat calon AK3 dan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terkait dengan kinerja P2K3 termasuk AK3, sebagian pabrik CPO di Sumatera Utara ada yang telah berhasil memperoleh piagam penghargaan *Zero Accident* dan Sertifikat Bendera Emas SMK3 dari Pemerintah Republik Indonesia (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provsu, 2021). Hal ini memungkinkan adanya dampak positif terhadap kelancaran ekspor CPO ke negara-negara eropa terkait dengan sebagian persyaratan dalam RSPO.

Dari informasi yang didapat dari pimpinan beberapa pabrik CPO di Sumatera Utara, bahwa penerapan norma K3 di unit perusahaan yang dipimpinnya masih belum optimal sebab audit internal maupun eksternal kadangkala masih ditemukan ketentuan di dalam peraturan-perundangan bidang K3 yang belum dilaksanakan. Mengingat cakupan tugas seorang AK3 yang demikian luas itu, pimpinan perusahaan memutuskan kebijakan bahwa anggota P2K3 yang dipilih pimpinan harus mampu membantu AK3 mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 di tempat kerja. Oleh karena itu,

kepada mereka perlu dibekali pengetahuan K3 khususnya pengawasan norma K3 dengan harapan mampu mengidentifikasi pelanggaran norma K3 yang terjadi dan menginformasikannya kepada AK3 guna tindak lanjutnya. Terdapat kesenjangan antara tugas dan kompetensi yang terjadi tersebut dimana kompetensi anggota P2K3 belum memadai dibandingkan tugas yang diembannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut pimpinan perusahaan pabrik CPO mengambil kebijakan bahwa setiap anggota P2K3 harus dibekali pengetahuan norma K3 melalui pelatihan.

Penyelenggaraan pelatihan norma K3 bagi anggota P2K3 dilakukan dengan kerjasama antara pimpinan perusahaan pabrik CPO dengan LLKS-K3 Emcotama yang merupakan salah satu Lembaga Latihan Kerja Swasta bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LLKS-K3) di Sumatera Utara dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor Ketenagakerjaan, dan Permenaker No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Menurut Kamil dalam Rusman (2021:32) didefinisikan bahwa pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, keahlian ataupun perubahan sikap dari individu dalam waktu yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktik dari pada teori. Namun, teori lain oleh Zhao, McCoy, Kleiner & Feng (2016) menyatakan pelatihan menjadi efektif apabila melalui pendekatan langsung untuk memecahkan masalah. Tetapi dalam situasi kehidupan nyata, program pelatihan K3 ternyata tidak efektif mungkin. Kurangnya efektivitas ini dapat dikaitkan dengan konten pelatihan K3 sertasifat industri itu sendiri.

Penelitian oleh Frick, Jensen, Quinlan, dkk. (2000), Nichols dan Tucker (2000) menemukan bahwa Program K3 sangat dibutuhkan di beberapa bidang untuk menginformasikan praktik dan pengembangan kebijakan dengan lebih baik. Menurut Terry (1977), Kebijakan dapat diartikan sebagai area dimana suatu keputusan dibuat yang arahnya bersifat umum. Sejalan dengan pendapat tersebut Robbin dan Coulier (2016), kebijakan merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Di sisi lain, penelitian oleh Podgórski (2021) menemukan bahwa pemangku kepentingan masih memiliki harapan pada pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja yang lebih baik, dan pada peningkatan kondisi kerja, ini menunjukkan bahwa pendekatan baru sekarang diperlukan untuk memastikan efektivitas K3, termasuk pengembangan metode baru yang akan memfasilitasi pengukuran status operasional K3 yang

ditujukan pada peningkatan nyata dari praktik manajemen K3.

Sehubungan dengan adanya kesenjangan fenomena, kesenjangan teori, dan kesenjangan studi tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian untuk memastikan apa yang menjadi masalah pelatihan dianggap kurang efektif dengan harapan dapat sebagai masukan bagi para pimpinan perusahaan pengirim peserta pelatihan untuk dapat memutuskan "kebijakan" yang tepat mengenai bagaimana tindak lanjutnya.

2. METODE

Penelitian dilakukan terhadap 30 orang anggota *Safety Committee* dari 16 pabrik CPO pada delapan kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Objek penelitiannya adalah peserta pelatihan dan LLKS-K3 serta pimpinan masing-masing peserta pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model CIPP. Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi komprehensif yang memiliki fungsi formatif dan fungsi normatif.

CIPP adalah singkatan dari *Context, Input, Proses, Product*. Keempat komponen evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh, dalam pelaksanaannya evaluator dapat menggunakan satu atau kombinasi dari dua atau lebih komponen evaluasi (Stufflebeam and G. Zhang, 2017). *Context Evaluation* bertolak dari pertanyaan apa yang dibutuhkan? Tujuan evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sesuatu yang dievaluasi (Doyok, 2021).

Komponen berikutnya dalam model CIPP adalah evaluasi masukan (*Input Evaluation*). Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan yang berkaitan dengan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Fokus kajian evaluasi masukan seperti: (1) sumber daya manusia, (2) sarana dan peralatan pendukung, (3) dana anggaran, dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Djuanda, 2020).

Komponen berikutnya dalam model CIPP adalah evaluasi proses (*Process Evaluation*) dilakukan untuk memantau, mengumpulkan informasi dan menyusun laporan mengenai implementasi perencanaan program. Evaluasi ini menyediakan *feedback* atau masukan kepada *stakeholder* untuk menilai perkembangan program. *Stakeholder* dapat menggunakan informasi hasil evaluasi ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, baik strategi maupun capaian program (Stufflebeam and G. Zhang, 2017).

Komponen berikutnya model CIPP adalah evaluasi produk (*product evaluation*). Pada komponen ini evaluator mengidentifikasi hasil pelaksanaan program, baik hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi ini mengukur keberhasilan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil

evaluasi produk akan menjadi masukan bagi *stakeholders* untuk menentukan keberlanjutan program (Anisaturrahmi, 2021). Berpedoman kepada peraturan perundangan K3 yang berlaku, evaluator dapat merumuskan objek yang menjadi target evaluasi pada setiap komponen evaluasi model CIPP. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang holistik, evaluator perlu mengidentifikasi berbagai pihak *stakeholder* yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan Norma K3 tersebut.

Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penetapan kriteria evaluasi, dan target keputusan juga tidak boleh diabaikan oleh evaluator. Terkait dengan penetapan kriteria evaluasi, penentuan kriteria tergantung pada sudut pandang evaluator dan kesepakatan bersama antara evaluator dan *stakeholder* (Minsih, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat observasi yang digunakan berbentuk catatan lapangan dan wawancara. Data dokumentasi berupa foto untuk memperkuat hasil penelitian. Data dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen konteks terdiri dari analisis kebutuhan calon peserta pelatihan dan instruktur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komponen *input* terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan dan lokasi pelatihan. Komponen proses berupa rancangan desain model pelatihan, pengembangan model, pelaksanaan pelatihan. Komponen proses berupa rancangan desain model pelatihan, pengembangan model, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan dan tindak lanjutnya. Komponen produk adalah tingkat ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan.

Dari fakta yang diperoleh dari Tim pelaksana berupa jadwal pelatihan, mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta pelatihan selama 2 hari atau 20 jam pelajaran (JP) sebagai berikut:

- (1) Mata pelajaran Norma K3 meliputi: (a) Norma K3 bidang Pesawat Uap, 2 JP, (b) Norma K3 bidang Bejana Tekanan & Tangki Timbun, 2 JP, (c) Norma K3 bidang Mekanik, 2 JP, (d) Norma K3 bidang Lisrik, 2 JP, (e) Norma K3 bidang Penanggulangan kebakaran, 2 JP, (f) Norma K3 pada kegiatan konstruksi bangunan, 2 JP, (g) Norma K3 bidang Lingkungan Kerja, 2 JP, (h) Norma K3 bidang Kesehatan Kerja, 2 JP.
- (2) Praktikum pemeriksaan (identifikasi dan pemecahan masalah) penerapan Norma K3 di sebuah pabrik CPO, 2 JP
- (3) Waktu untuk Pretes dan Postes: 2 JP.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu responden tentang kriteria peserta yang akan mengikuti pelatihan dan instruktur, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-01) bahwa: "Peserta pelatihan adalah harus memenuhi kriteria

yaitu karyawan dari pabrik CPO, pendidikan minimal D3, sedangkan instruktur harus memenuhi kriteria pendidikan minimal S1, memiliki sertifikat calon AK3 dari Kemnaker RI, memiliki SKP sebagai AK3 yang diterbitkan Kemnaker RI, memiliki Sertifikat TOT dari Kemnaker RI, pengalaman sebagai AK3 dan Instruktur K3 minimal 5 tahun"

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-02) mengemukakan bahwa: "Peserta pelatihan memenuhi kriteria karyawan dari pabrik CPO, pendidikan minimal D3, sedangkan instruktur harus memenuhi kriteria pendidikan minimal S1, bersertifikat calon AK3 dari Kemnaker RI, memiliki SKP sebagai AK3 yang diterbitkan Kemnaker RI, memiliki Sertifikat TOT dari Kemnaker RI, pengalaman sebagai AK3 dan instruktur K3 minimal 5 tahun"

Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua (WWCR-03) bahwa: "Peserta pelatihan adalah harus memenuhi kriteria karyawan dari pabrik CPO, pendidikan minimal D3, sedangkan instruktur harus memenuhi kriteria pendidikan minimal S1, bersertifikat calon AK3 dari Kemnaker RI, memiliki SKP sebagai AK3 yang diterbitkan Kemnaker RI, memiliki Sertifikat TOT dari Kemnaker RI, pengalaman sebagai AK3 dan Instruktur K3 minimal 5 tahun".

Berdasarkan isi wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria peserta pelatihan dan kriteria instruktur telah direncanakan dengan matang.

Dari hasil wawancara kepada salah satu responden tentang sumber daya program pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-04) bahwa: "Telah ada perencanaan yang konkrit mengenai tim pelaksana adalah gabungan yang terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang dari unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta yang masing-masing telah dibagi deskripsi pekerjaannya, biaya pelatihan disediakan oleh perusahaan pengirim peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama, sarana prasarana yang disediakan berupa: ruang belajar, LCD, layar dan white board, bahan ajar, note book, pena, stabilo, lembar pretes, pabrik CPO sebagai tempat praktik dan ujian praktik. dan lembar postes".

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-05) mengemukakan bahwa: "Telah ada perencanaan yang konkrit mengenai tim pelaksana gabungan yang terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang dari unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta yang masing-masing telah dibagi *job description* nya, biaya pelatihan disediakan oleh perusahaan pengirim peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama, sarana prasarana yang disediakan berupa: ruang belajar, LCD, layar dan *whiteboard*, bahan ajar, *note book*, pulpen, stabilo, lembar pretes, pabrik CPO sebagai tempat praktik dan ujian praktik dan lembar postes".

Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua (WWCR-06) bahwa: “Telah ada perencanaan yang konkrit mengenai tim pelaksana gabungan yang terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang dari unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta yang masing-masing telah diberikan *job description*, biaya pelatihan disediakan oleh perusahaan pengirim peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama, sarana prasarana yang disediakan berupa: ruang belajar, LCD, layar dan *whiteboard*, bahan ajar, *note book*, pulpen, stabilo, lembar pree test, pabrik CPO sebagai tempat praktik dan ujian praktik dan lembar postes”.

Berdasarkan isi wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya telah disusun secara konkrit.

Dari hasil wawancara dengan salah satu responden tentang Model pelatihan program pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-07) bahwa desain model pelatihan yang ditetapkan bersama adalah model pelatihan berbasis kompetensi. Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-08) mengemukakan bahwa desain model pelatihan yang ditetapkan bersama dalam model pelatihan berbasis kompetensi”.

Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua (WWCR-09) bahwa: “Desain model pelatihan yang ditetapkan bersama adalah model pelatihan berbasis kompetensi”.

Berdasarkan uraian isi wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa model pelatihan telah ditentukan bersama yaitu pelatihan berbasis kompetensi.

Dari hasil wawancara kepada salah satu responden tentang rencana pelaksanaan program pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-10) bahwa “Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Meret 2022 (20 JP)”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-11) mengemukakan bahwa: “Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 jam pelajaran)”. Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-12) mengemukakan bahwa: “Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 JP)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa waktu pelatihan telah direncanakan dengan matang, yaitu pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 JP). Dari wawancara kepada salah satu responden tentang rencana evaluasi pelatihan dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-13) bahwa: “Ujian teori berupa pretes, praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari peserta pelatihan terhadap Pelaksanaan program pelatihan akan dilaksanakan”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-14)

mengemukakan bahwa: “Ujian teori berupa pretes, praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari peserta pelatihan terhadap Pelaksanaan program pelatihan juga harus dilaksanakan”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-15) mengemukakan bahwa: “Ujian teori berupa pretes, praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari peserta pelatihan terhadap Pelaksanaan program pelatihan juga harus dilaksanakan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa “Ujian teori berupa pretes, praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari peserta pelatihan terhadap pelaksanaan program pelatihan direncanakan harus dilaksanakan.

Tabel 2. Analisis Perencanaan Program Pelatihan K3

No.	Aspek	R	TR	Keterangan
1	Kriteria peserta	✓	x	Pend. Minimal D3
2	Kriteria instruktur	✓	x	Pendidikan Minimal S1, bersertifikat AK3, bersertifikat TOT, pengalaman minimal 5 tahun
3	Sumber Daya Manusia	✓	x	(1) Tujuan pelatihan: jelas, (2) Kurikulum telah siap. (3) Tim pelaksana pelatihan terdiri dari unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta dan manajer LLKS-K3. (4) Biaya pelatihan perusahaan pengirim peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama. (5) Sarana prasarana yang disediakan berupa: (a) Ruang belajar, (b) LCD dan White board, (c) Bahan ajar, ATK, (d) Lembar Pretes (6) Pabrik CPO sebagai tempat praktik dan ujian praktik. (7) Lembar postes
4	Model Pelatihan	✓	x	Model pelatihan berbasis kompetensi.
5	Pelaksanaan	✓	x	Direncanakan dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 JP).
6	Evaluasi	✓	x	Ujian teori berupa Postes, Ujian Praktik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.

(Ket: R direncanakan, TR tidak direncanakan)

Pelaksanaan pelatihan semestinya berpedoman kepada perencanaan yang telah disusun. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan, kemudian dilakukan wawancara dengan beberapa pihak. Dari wawancara kepada salah satu responden tentang kriteria peserta pelatihan yang hadir, seperti yang diungkapkan oleh Manajer LLKS-K3 (WWCR-16) bahwa: “Seluruh peserta pelatihan berlatar belakang pendidikan D3 dan S1, serta merupakan karyawan dari pabrik CPO”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-17) mengemukakan bahwa: “Seluruh peserta pelatihan berlatar belakang pendidikan D3 dan S1, serta merupakan karyawan dari pabrik CPO”. Salah satu anggota lainnya di tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-18) mengemukakan bahwa: “Seluruh peserta pelatihan

berlatar belakang pendidikan D3 dan S1, serta merupakan karyawan dari pabrik CPO”.

Mengenai instruktur, dari hasil wawancara dengan Ketua tim pelaksana (WWCR-19 dikatakan bahwa “Instruktur yang mengajar di kelas maupun di ppraktik, telah bersertifikat dan ber SKP AK3 dari Kemnaker RI, memiliki sertifikat TOT dari Kemnaker dan pengalaman kerja sebagai AK3 sudah lebih dari 5 tahun”. Salah satu anggota tim pelaksana yang mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-20) mengemukakan bahwa: “Instruktur yang mengajar di kelas maupun di praktik, telah bersertifikat dan ber SKP AK3 dari Kemnaker RI, memiliki sertifikat TOT dari Kemnaker dan pengalaman kerja sebagai AK3 sudah lebih dari 5 tahun sesuai rencana yang telah ditetapkan”. Dari lembar angket yang diisi oleh peserta pelatihan (WWCR-21) menyatakan bahwa “Instruktur yang mengajar di kelas maupun di praktik Instrukturnya dinilai baik dalam hal penguasaan materi, sistematika penyajian, sikap dan perilaku, penggunaan bahasa, pemberian motivasi belajar kepada peserta, daya simpati, gaya dan sikap terhadap peserta, dan cara berpakaian. Hanya saja, jam pelajaran untuk praktik pemeriksaan penerapan norma K3 di pabrik CPO tempat praktikum waktunya sangat singkat, hanya sekitar 120 menit sehingga peserta belum mampu menemukan pasal-pasal dalam peraturan perundangan K3 yang belum dilaksanakan sehingga pada akhirnya belum mampu memberikan saran-saran perbaikannya”.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa instruktur pada pelatihan ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi pada saat membimbing praktik pemeriksaan penerapan norma K3 di pabrik CPO tempat praktikum belum tuntas akibat waktunya yang terlalu singkat.

Mengenai sarana dan prasarana pelatihan, manajer LLKS-K3 (WWCR-22) menyatakan bahwa “Sarana dan prasarana berupa ruang kelas, bahan ajar, media pembelajaran dan sarana praktikum telah memadai sesuai dengan yang direncanakan”. Ketua tim pelaksana pelatihan (WWCR-23) mengemukakan bahwa “Sarana dan prasarana berupa ruang kelas, bahan ajar, media pembelajaran dan sarana praktikum telah memadai sesuai dengan yang direncanakan”. Salah satu anggota Tim pelaksana kegiatan yang mewakili unsur perusahaan pengirim peserta pelatihan (WWCR-24) mengatakan bahwa “Sarana dan prasarana pelatihan berupa ruang kelas, bahan ajar, media pembelajaran dan sarana praktikum telah memadai sesuai dengan yang direncanakan”. Mengenai peserta, manajer LLKS-K3 (WWCR-25) mengatakan bahwa “dari dari aspek sikap dan perilaku sangat baik, dari aspek pengetahuan disimpulkan bahwa semuanya mendapat nilai cukup (41-60), tetapi dari aspek keterampilan, seluruhnya (100 %) dinilai kurang atau nilainya antara 21 sampai 40”. Instruktur (WWCR-27) juga mengemukakan bahwa “dari dari aspek

sikap dan perilaku sangat baik, dari aspek pengetahuan disimpulkan bahwa semuanya mendapat nilai cukup (41-60), tetapi dari aspek keterampilan, seluruhnya (100 %) dinilai sangat kurang atau nilainya antara 21-40”. Asesor (WWCR-28) menyatakan bahwa “dari dari aspek sikap dan perilaku sangat baik, dari aspek pengetahuan disimpulkan bahwa semuanya mendapat nilai cukup (41-60), tetapi dari aspek keterampilan, seluruhnya (100 %) dinilai sangat kurang atau nilainya antara 21-40”.

5. KESIMPULAN

Dari sisi manajemen pelatihan, perencanaan telah dipersiapkan dengan baik, pengorganisasian juga baik dimana tim pelaksana pelatihan merupakan Tim Gabungan yang terdiri dari unsur LLKS-K3 yang diatur dengan jelas *job description* nya. Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, dan evaluasi terhadap peserta pelatihan oleh asesor dan tim pelaksana dilakukan, demikian pula evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan oleh peserta pelatihan juga dilakukan.

Dari evaluasi asesor terhadap lembar postes dan praktik peserta pelatihan hasilnya sebagai berikut: (a) Nilai postes dari 30 orang peserta pelatihan (100 %) cukup atau nilainya antara 41 sampai 60, (b) Seluruh peserta pelatihan (100%), nilai praktik pemeriksaan penerapan norma K3 untuk menemukan masalah K3 dan pemecahan masalahnya di pabrik CPO tempat praktikum nilainya sangat kurang atau nilainya antara 21 sampai 40.

Dari hasil evaluasi instruktur dan tim pelaksana terhadap sikap dan perilaku peserta pelatihan, seluruh peserta pelatihan (100 %) dinilai baik atau nilainya antara 61-80.

Dari hasil evaluasi seluruh (100%) peserta pelatihan terhadap instruktur, tim pelaksana pelatihan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran dinilai baik. Tetapi peserta menilai bahwa jam pelajaran yang tersedia untuk pembelajaran di kelas masih kurang dan jam pelajarannya untuk praktikum sangat kurang dan perlu dievaluasi lagi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun manajemen pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tetapi ternyata hasilnya dari sisi pengetahuan cukup efektif tetapi dari sisi keterampilan praktik kurang efektif.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Tim pelaksana pelatihan adalah untuk pelatihan anggota *Safety Committee* di pabrik CPO dimasa-masa yang akan datang, hendaknya kurikulum pelatihan tersebut ditinjau kembali agar waktunya ditambah sesuai dengan kebutuhan. Peserta pelatihan Norma K3 berjumlah 30 orang anggota *Safety Committee* pada 16 pabrik CPO dilingkungan PTPN-IV tersebut ditingkatkan keterampilannya dalam hal pemeriksaan penerapan K3 di pabrik CPO guna menemukan masalah K3 beserta saran pemecahan masalahnya.

6. REFERENSI

- Anisaturrahmi,A, (2021), Evaluasi Program Pendidikan No Formal pad Rumah Baca Hasan-Savvas di Kota Lhoksmawe “PIONER J.Pendidik, Vol.10.No.2. 2010.
- Amstrong Michael and Angela Baron, (1988), Performance Management, London: Institute Of Personnel and Development.
- Atmowiloto, Subagio, (1993), Manejemen Training, Pedoman Praktis Bagi Penyelenggara Training, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bangun Wilson, (2012), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Erlangga.
- Basri Hasan dan A.Rusdiana, (2015), Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, Bandung: Pustaka Setia.
- Badruddin (2014), Dasar-dasar Manajemen, Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Djuanda, (2010), Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP (Context, Input, Process dan Output), Al Amin J.Kaji Ilmu dan Budaya Islam, Vol.3, No.1, pp.37-52.2020.
- Dong Zhao, Andrew McCoy, Brian Kleiner & Yingbin Feng (2016) Integrating safety culture into OSH risk mitigation: a pilot study on the electrical safety, *Journal of Civil Engineering and Management*, 22:6, 800-807, DOI: 10.3846/13923730.2014.914099
- Doyok,R,(2021), Model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program Tahfiz selama Daring di SMP Islam Al-Ishlah Bukittinggi, *Ideas J.Pendidikan, Sos dan Budaya, Vo.7 , No.3, pp-73-82, 2021.*
- Frick K , Jensen P, Quinlan M, et al. (2000). Systematic occupational health and safety management—an introduction to a new strategy for occupational safety, health and well-being. In: Frick K, Jensen P, Quinlan M, Wilthagen T, eds. Systematic occupational health and safety management—perspectives on an international development. Amsterdam: Pergamon Press, pp. 1–14.
- George R.Terry, (1993), The Principles Of Management, New York: American Council on Education.
- Hadipoerwono, (1999), Tata Personalia, Bandung: Jambatan.
- James A.F. Stoner, (1982), Management, New York: Prentice Hall International Inc, Anglewood Cliffs.
- Minsih, and A.G.D, (2018), Peran Guru dalam Pengelolaan Kelas, *Profesi Pendidik Dasar*, 2018, doi: 10.23917 ppdvllil.6144
- Muhammad Cirzin, (2015), Model Pengembangan Pesantren untuk Pengasuh Pesantren, Yogyakarta: Puskadiabuna.
- Namawi, H.H, (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ngalim Purwanto, (2012), Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nichols T, Tucker E. (2000). OHS management systems in the UK and Ontario, Canada: a political economy perspective. In: Frick K, Jensen P, Quinlan M, Wilthagen T, eds. Systematic occupational health and safety management; perspectives on an international development. Amsterdam: Pergamon Press, pp. 285–309.
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
- Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Podgórski, D. (2021). Measuring operational performance of OSH management system – A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. *Safety Science*, 73,146–166. doi:10.1016/j.ssci.2014.11.018
- Robbin, Stephen,P. and Mary Coulter (2010), Manajemen, Jakarta : Erlangga.
- Rivai, Veithzal, (2004), Manajemen Perusahaan untuk SDM, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Spencer, Lyle,M.Jr, and Signe M.Spencer,(1993), Competence Of Work, New York: John Wiley & Sons Inc.
- Stoom Ordonantie 1930
- Stoom Verordening 1930
- Stuffelebeam,D.L and Zhang.G, (2017), The CIPP Evaluation Model How to Evaluate for Improvement and accountability, Guilford Publication.
- Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R &D, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tarwaka, (2008), Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Implementasi di Tempat Kerja, Surakarta: Harapan Press.
- Terry, G.R, (1977), Principles Of Management, Illionis: Homewood.
- Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Widodo Suparno Eko, (2015), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wibowo, (2017), *Manajemen Kinerja*, Edisi ke-5, Depok: Raja Grafindo Perkasa.
- Wirawan, (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Zhao, D., McCoy, A., Kleiner, B., & Feng, Y. (2016). Integrating Safety Culture into OSH Risk Mitigation: A Pilot Study on The Electrical Safety. *Journal of Civil Engineering and Management*, 22(6), 800–807. doi:10.3846/13923730.2014.914099

RESOLUSI KONFLIK KEPERCAYAAN DALAM TOLERANSI BERAGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Oleh:

Andi Muhammad Arief Malleang¹⁾, I Gede Sumertha KY²⁾, Puguh Santoso³⁾
^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: andiariefm@gmail.com

²email: gedesu16@yahoo.co.id

³email: puguh28838@yahoo.com

Abstrak

Menjadi masyarakat multikultural merupakan suatu tantangan bagi Indonesia. Beragamnya budaya dan keyakinan kian menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik Kepercayaan kerap kali menjadi permasalahan, terlebih konflik agama. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Dari segi agama, Indonesia mengenal beberapa agama, yaitu Islam, Katolik Roma, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda. Kurangnya tatanan sosial untuk mengelola dengan baik perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa konflik antar agama bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian. Penanganan konflik sosial seperti ini harus didasari dengan penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama pada masyarakat multi-kultural. Resolusi konflik kepercayaan dalam toleransi beragama dapat dilakukan dengan internalisasi Pendidikan, mencegah politik identitas pada demokrasi dan pemimpin yang inklusif dalam merajut nilai multikultural di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data maupun literatur terkait resolusi konflik kepercayaan pada masyarakat multikultural di Indonesia.

Kata Kunci: Resolusi Konflik Kepercayaan, Toleransi Beragama, Multi-Kultural

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang lahir dengan memiliki keberagaman budaya dan kepercayaan yang terhimpun sebagai masyarakat multikultural. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mempresentasikan bermacam-macamnya kebudayaan yang ada di Negeri ini. Tetapi hal tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan nilai-nilai toleransi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyat agar dapat terhindar dari ancaman maupun konflik sosial seperti konflik kepercayaan.

Konflik kepercayaan berkaitan erat dengan konflik sosial. Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali dikonotasikan secara negatif. Terlepas dari asumsi yang muncul hanya sebagai hipotesis dalam menganalisis fenomena sosial, tetap saja keberadaan konflik merupakan entitas yang memilukan bagi individu yang menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Bahkan para ahli konflik juga mengakui hal ini.

Konflik sosial berpotensi terjadi dalam masyarakat multi-agama, terutama dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah terjadinya *human error* dalam memahami teks-teks agama. Beberapa teks agama dimaknai secara “sembarangan” tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, psikologi, sosial, budaya, dan kondisi situasional keadaan sekitar. Sehingga berpotensi

menimbulkan intoleransi terkait perbedaan ras, budaya, dan agama (Ferdinand et al., 2018).

Hal ini kemudian membuat seluruh lapisan masyarakat, khususnya ilmuwan sosial, bekerja ekstra keras untuk mencari dan mengusulkan solusi. Salah satu solusi yang saat ini sedang dibahas adalah penanaman nilai-nilai toleransi dan pendidikan multikultural. Gerakan wacana dan dialog antar pemeluk agama mengalami kemajuan yang signifikan. Berawal dari kesadaran bahwa semua umat beragama pada dasarnya mengejar perdamaian, kasih sayang, dan cinta serta hidup bahagia dengan orang yang mereka cintai. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, diperlukan sikap saling menghormati dan pelaksanaan yang seimbang antara hak dan kewajiban antar anggota masyarakat untuk mencegah akar intoleransi sehingga menjelma menjadi konflik.

Misalnya, pada pagelaran Moto GP Maret 2022 lalu, terdapat aksi seorang pawang hujan oleh Rara Istiani Wulandari yang akrab disapa Mba Rara. Ritual yang dilakukan oleh Mba Rara banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia, apalagi saat ini topik tersebut sedang trending #1 di media sosial. Menurut beberapa pihak, ritual tersebut justru memberikan kesan negatif bagi Indonesia, karena Indonesia baru saja menjadi tuan rumah pada agenda bergengsi tersebut. Sementara yang lain percaya bahwa tindakan pawang hujan mewakili Indonesia

yang berbeda keyakinannya sesuai dengan budaya dominan di masing-masing daerah.

Fenomena tersebut merupakan satu dari beberapa konflik kepercayaan yang terjadi di Indonesia. Menjadi masyarakat multikultural dapat menjadi nilai tambah untuk Indonesia, sebab dapat memberi poin keberagaman dalam kehidupan bernegara maupun beragama sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Tetapi, disisi lain Multikultural juga dapat menjadi bumerang pada ketentraman masyarakat. Terdapat potensi kultural yang lebih dominan akan menguasai kultural yang dinilai lebih sedikit pada suatu daerah. Dinding antara kaum minoritas dan kaum mayoritas akan selalu menjadi persoalan hangat.

Kepercayaan dan toleransi orang Indonesia satu sama lain adalah komponen penting dari keragaman negara. Bendera merah putih sebagai bendera nasional Indonesia menggambarkan merah sebagai keberanian dan putih sebagai wujud kesucian masyarakat maupun Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merangkum konsep ini, yang meskipun beragam, tetap merupakan organisme yang bersatu. Toleransi dapat menjadi kunci utama dalam menjadi sumber daya yang paling penting untuk mencapai harmoni terhadap masyarakat yang pluralistik. Dengan mengadopsi perspektif ini, maka mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghapus perilaku intoleran. Banyak kejadian baru-baru ini diperburuk oleh kurangnya informasi, terutama tentang konsep-konsep penting toleransi, yang meliputi demokrasi, humanisme, dan pluralisme.

Melihat fenomena konflik kepercayaan yang terjadi, diperlukan suatu studi maupun formula dalam penyelesaian konflik toleransi beragama dalam masyarakat Multikultural Indonesia yang didasari oleh analisis teori resolusi konflik untuk memahami dinamika konflik kepercayaan pada masyarakat multikultural di Indonesia demi menumbuhkan pendidikan toleransi sebagai resolusi penyelesaian konflik.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini berargumen akan pentingnya penyelesaian masalah sosial melalui pemajuan cita-cita toleransi dalam masyarakat multikultural yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode berbasis filosofi untuk mengkaji keadaan objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013).

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Laporan penelitian, e-book, buku perpustakaan, jurnal, majalah, dan sumber elektronik (internet) semuanya digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian penulis, yang meliputi pengumpulan data dan pemilihan sumber. Wawancara juga digunakan untuk melengkapi

pengumpulan data dan memberikan informasi tentang topik diskusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teori Resolusi Konflik

Pada panduan dasar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konflik sebagai pertengkaran, perselisihan, dan pertikaian, namun dalam arti kata lainnya, konflik juga didefinisikan sebagai ketegangan atau kontradiksi dalam cerita atau drama fiktif (kontradiksi antara dua kekuatan, konflik dalam satu karakter, konflik) antara dua karakter, dan seterusnya). Konflik juga didefinisikan sebagai berikut oleh Lewis A. Coser:

"Conflict within and between groups in a society can prevent accommodations and habitual relations from progressively impoverishing creativity. The clash of values and interests, the tension between what is and what some groups feel ought to be, the conflict between vested interests and new strata and groups demanding their share of power, wealth, and status, have been productive of vitality"(Coser, 1957).

Menurut definisi di atas, konflik adalah perjuangan dan usaha atas tuntutan dan nilai untuk memperoleh kekuasaan, status, dan sumber daya tertentu, dengan tuntutan atau nilai yang dimaksudkan untuk merugikan, menetralkan, atau menghancurkan pihak lawan. Konflik mengacu pada ketidaksepakatan tentang bagaimana mencapai tujuan tertentu, yang disertai dengan nilai-nilai yang harus ditangani oleh kelompok atau individu tertentu.

Sebelum menerapkan strategi resolusi konflik, perlu dipahami bagaimana proses konflik dimulai. Johan Galtung berpendapat dalam hal ini konflik atau ketidaksepakatan sering diproyeksikan sebagai segitiga ABC, yaitu aksi, perilaku serta kontradiksi. Ketiga aspek saling memiliki keterkaitan yang kuat, dan salah satu dari mereka dapat menjadi katalisator bagi perkembangan konflik. Misalnya, ketidakselarasan tujuan regional dapat mengakibatkan konflik. Kemudian pada bagian perilaku adalah sikap saat bertikai antara pihak satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan respons emosional dan menghasilkan pengembangan tujuan yang berbeda sehingga menghasilkan dinamika konflik (Galtung, 2007).

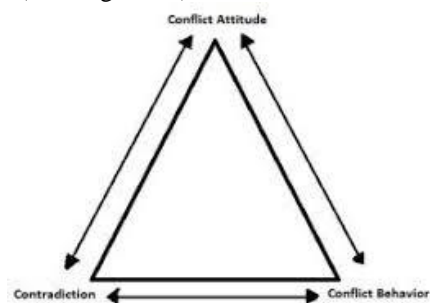


Figure 1. Segitiga ABC Johan Galtung

Untuk memulai, perlu untuk mengenali bahwa proposisi yang tampaknya langsung bahwa konflik dapat dimulai pada salah satu dari tiga poin (tetapi harus melibatkan ketiganya) menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan apa sikap, perilaku, dan kontradiksi itu dan bagaimana ketiga komponen ini benar-benar berhubungan satu sama lain. Segitiga ABC adalah model terbaik untuk pemula maupun ahli untuk digunakan ketika mencoba memahami konflik karena membuatnya lebih mudah untuk memahami kontradiksi yang mendasarinya, sikap aktor terhadap satu sama lain, dan perilaku yang dihasilkan dari kontradiksi dan sikap konflik. Karena analisis mungkin dimulai dengan satu masalah, penulis dapat memastikan apa yang mendasari konflik dan bagaimana hal itu dapat dideskripsikan.

Teori ini didasarkan pada kepemilikan fasilitas produksi sebagai sumber utama pembagian kelas sosial. Teori konflik adalah kebalikan dari teori struktural-fungsional, yang mengutamakan tatanan sosial. Teori konflik mengkaji konflik dan manifestasinya dalam sistem sosial. Menurut teori konflik, masyarakat tidak akan selalu tertib. Setiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Teori konflik kemudian mengakui adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Teori ini berusaha untuk memahami sumber pelanggaran aturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menantang. Konflik di sini menunjukkan sifat pluralistik masyarakat dan distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara berbagai kelompok; karena kekuasaannya, kelompok elit juga dapat membuat peraturan, terutama yang menguntungkan kepentingan mereka.

Konflik muncul karena adanya perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Karakteristik fisik, kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, dan kepercayaan hanyalah beberapa perbedaan. Karena adanya karakteristik individu dalam interaksi sosial, konflik merupakan kejadian yang wajar dalam setiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang pernah bebas dari konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik ini akan berhenti ada hanya ketika masyarakat itu sendiri tidak ada lagi.

Dalam ilmu sosiologi, teori fungsional oleh varian pemikiran Parsons, dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya realitas alam konflik dalam realitas sosial. Seperti yang dijelaskan Turner, David Lockwood juga menjelaskan poin ini, menyatakan bahwa perspektif Parsons yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial menghasilkan permusuhan konseptual di dunia sosial (Turner, 1975).

Pemikiran Parsons tentang keseimbangan sosial didasarkan pada beberapa prinsip teoretis mendasar. Pada tataran metateori, pemikiran Parsons, menurut Giddens dan Turner, adalah integrasi metodologi ideografis, tipe ideal, nomologis, dan

konstruktivis (Giddens & Turner, 2015). Cita-cita model integrasi teoretis Parsons, sampai taraf tertentu, bertentangan dengan keberadaan Marx. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat adalah hasil dari revolusi pribadi. Fakta ini menguatkan pernyataan Nisbet dalam Ekeh bahwa reaksi yang cukup mendesak terhadap realitas individualistis Eropa terjadi pada abad kesembilan belas. Sosiolog Eropa umumnya percaya bahwa subjek pengetahuan yang dapat diterapkan pertanyaan tentang kepentingan ketertiban dimulai dengan runtuhnya rezim lama dan semangat revolusioner revolusi demokratik. Perubahan radikal yang terjadi adalah lahirnya gerakan revolusi industri Perancis.

Penyelesaian konflik didasarkan pada manifestasi kontradiktif di bidang sosial pada tingkat yang paling mendasar. Dalam pandangan Martono, Kontradiksi adalah fakta sentral dari segala sesuatu yang ada. Kontradiksi ini menghasilkan rumusan hukum dialektika. Menurut hukum disiplin, kontradiksi melekat dalam segala hal, baik di alam maupun dalam kehidupan manusia. Hukum dialektika, yang mengatur pembangunan masyarakat, terdiri dari tiga komponen: tesis, antitesis, dan sintesis. (Martono, 2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"

Pasal tersebut juga mengatur bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Setiap orang tunduk pada pembatasan hukum ketika menjalankan hak dan kebebasan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hal kegiatan keagamaan, negara menjamin hak individu untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya.

Dinamika Konflik Kepercayaan Pada Masyarakat Multikultural di Indonesia

Kehidupan manusia selalu penuh dengan konflik, yang dapat berkisar dari etnis hingga agama. Beberapa diantaranya berlangsung lama, misalnya konflik antara Islam dan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib adalah perang terbesar dalam sejarah Muslim dan Kristen. Permusuhan antara penganut kedua agama ini seringkali dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah. Terlepas dari perbedaan dengan partai-partai sebelumnya, Paus Urbanus II melancarkan Perang Salib pada 1095, mengirimkan pasukan besar untuk mendirikan kerajaan Latin di Tanah Suci dan mendukung kaum Muslim sebagai kekuatan politik dan militer.

Kekuatan sangat penting. Setiap saat, cukup besar untuk Muslim dan Kristen (Yunus, 2014).

Pluralisme yang melahirkan perbedaan, menambah dimensi unik dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan harus dipandang sebagai aset yang mampu mengubah Indonesia menjadi negara besar. Di antara perbedaannya adalah kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Tentang agama, Nasution dalam Syihab (2010) memberikan daftar definisi agama sebagai berikut:

- a. Mengenali kondisi manusia yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang harus dihadapi.
- b. Pengakuan adanya entitas supernatural yang berkuasa atas manusia.
- c. Berkomitmen pada cara hidup yang mencakup pengakuan terhadap sumber yang tidak bergantung pada diri manusia dan tindakan manusia.
- d. Kepercayaan pada kekuatan supranatural mengakibatkan mengadopsi cara hidup tertentu.
- e. Kode etik yang diumumkan oleh kekuatan supernatural.
- f. Penerimaan kewajiban yang dianggap berasal dari entitas supernatural.
- g. Manusia mengelilingi diri mereka dengan pemujaan kekuatan supernatural karena sentimen kelemahan dan ketakutan mereka terhadap kekuatan misterius.
- h. Wahyu Tuhan kepada manusia melalui Rasul

Agama dan kepercayaan memiliki arti yang berbeda tetapi sering digunakan secara bergantian. Faktanya adalah bahwa suatu agama selalu didasarkan pada keyakinan terhadap ajaran agama. Darraz (2010) mengidentifikasi lima elemen penting yang membedakan agama/keyakinan dari perilaku yang mungkin atau tidak dianggap religius:

- a. Dalam agama, pemurnian dilakukan pada Dhat yang memiliki sifat unik, seperti tidak terlihat dan tidak terlihat oleh indera.
- b. Dalam agama, dhat gaib bukanlah bagian dari alam semesta ini, tetapi memiliki daya, pengaruh, dan kekuatan positif sesuai dengan kehendak dan iradah.
- c. Meskipun kekuatan tidak melekat pada alam, ia memiliki hubungan yang berarti dengan alam dan manusia. Ia mendengar semua doa dan keluhan manusia, memperhatikan kesedihan dan harapan manusia, dan dapat memberikan maupun menjawab doa terhadap harapan manusia sesuai dengan kehendaknya.
- d. Agama-agama percaya bahwa kekuasaan tertinggi dan tersuci itu ada, bahwa ia maha kuasa dan tidak dapat dikendalikan, bahwa ia tidak tunduk pada siapa pun dan segala sesuatu.
- e. Dalam agama, ketundukan diartikan sebagai kesediaan dan kesadaran untuk bersujud dan menyembah apa yang diyakini secara bebas.

Agama menuntut ketaatan dari pemeluknya, dan tentunya setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menjadi baik. Artinya, meskipun ada

keberagaman agama di negeri ini, menjadi pemeluk agama tertentu tidak serta merta membuat seseorang menjadi sombong dan egois, tanpa memandang agama lain, karena tidak ada agama yang mengajarkan hal seperti itu. Beberapa faktor yang menjadi penyebab persatuan Indonesia adalah manifestasi dari heterogenitas ekonomi, budaya, dan agama.

Rakyat Indonesia telah mencapai tingkat tertentu persatuan antar umat agama dalam beberapa tahun terakhir. Islam, sebagai agama resmi mayoritas Indonesia, juga telah membantu dalam pembentukan kesatuan budaya. Namun, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pola dasar nenek moyang Indonesia bertumpu pada kepercayaan dan mistik pada zaman dahulu yang memberikan konteks sama untuk pengalaman keagamaan, termasuk daerah-daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam. Selain itu, pengaruh Hindu dan Budha di luar Bali, pengaruhnya masih terlihat jelas dalam kehidupan budaya dan agama Jawa. Kepercayaan Islam, seperti yang dipraktikkan di kerajaan-kerajaan pesisir Jawa Tengah memasukkan banyak unsur Hindu dan animisme. Agama sinkretis kadang-kadang disebut secara khusus sebagai agama Jawa (Wertheim, 1999).

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Dari segi agama, Indonesia mengenal beberapa agama, yaitu Islam, Katolik Roma, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda. Kurangnya tatanan sosial untuk mengelola dengan baik perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa konflik antar agama bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian (Ulya & Anshori, 2016).

Konflik yang saling bertentangan akan semakin menjadi tantangan, terutama bagi Pemerintah maupun tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Terlebih di era yang semakin modern, dan juga ditambah dengan masuknya era *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) World*, dimana perubahan serasa semakin cepat meluas, sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat tidak dapat diatur dengan maksimal. Selain itu, kehidupan teknologi semakin menjadikan beban yang tidak menentu untuk masyarakat multikultural.

Kemudian, pemerintah maupun masyarakat semakin rumit ketika dihadapkan dengan persoalan dinamis disebabkan permasalahan yang begitu kompleks. Hal ini menjadikan keambiguan informasi yang bersifat fana dan mengambang begitu saja. Masyarakat multikultural terutama akan semakin sulit memilah informasi yang diberikan terhadap isu-isu sensitif pada media sosial.

Era VUCA World membuat dinamika pada masyarakat terkait konflik antar agama terus terjadi,

pada tahun 2021 lalu, konflik warga terkait rumah ibadah bermunculan saat natal. Tercatat setidaknya telah terjadi tiga kejadian yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Di Tulang Bawang contohnya, sekelompok warga bergerombol untuk mengunjungi gereja yang dibuka untuk Ibadah Natal. Warga tersebut beranggapan bahwa gereja tersebut belum mendapatkan izin, padahal perijinan pembangunan tempat ibadah tersebut belum selesai. Selain itu, di Jambi juga terjadi konflik agama dimana umat kristiani terpaksa beribadah diluar gereja karena rumah ibadah mereka belum mendapatkan izin resmi. Sehingga ketika hujan turun, mereka kesusahan untuk menjalani ibadah dengan khusus. Sementara di Lakarsantri Surabaya, sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah kristiani, Gereja GKI Citraland, meskipun RT setempat sudah menyatakan tidak keberatan dengan proyek ini (Fahlevi, 2021).

Menanggapi kejadian-kejadian konflik agama, perlulah ditanam nilai-nilai toleransi agama. Dalam memahami toleransi beragama, perlu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang tepat. Untuk artikel ini telah dikutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pelaksanaannya serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah dan para pemuka agama berusaha menjunjung tinggi toleransi beragama untuk menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis antar umat beragama. Bahkan, masih sering terjadi konflik dan perselisihan yang menggunakan "label agama", seperti saling curiga antara Muslim dan Kristen serta agama lain, yang cukup membuktikan kegagalan para pendukung perdamaian.

Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi sosial, budaya, suku, ras, sektarian, dan agama, serta dari segi politik maupun ekonomi. Akibat dari ciri-ciri inilah masyarakat Indonesia digambarkan sebagai masyarakat multikultural. Menghadapi keadaan tersebut, bangsa Indonesia harus mampu merekonstruksi budaya nasional yang dapat menjadi kekuatan pengintegrasikan keberagaman dan heterogenitas sosial budaya, khususnya dalam kehidupan beragama (Prasetyawati, 2017).

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan bahwa keragaman pola dalam masyarakat Indonesia dimaksudkan untuk mencerminkan tidak hanya keragaman etnis tetapi juga keragaman budaya. Saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar budaya menunjukkan adanya keragaman budaya ini. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita

berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila (Prasetyawati, 2017).

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang beragam secara etnis, bahasa, agama, dan budaya. Menurut Ekstrand, masyarakat multikultural adalah masyarakat di mana dua atau lebih elemen yang berbeda hidup berdampingan tanpa membentuk satu kesatuan politik. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sosial, komunitas, atau kelompok yang secara budaya, ekonomi, dan politik berbeda (terisolasi), memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, dan secara institusional juga berbeda satu sama lainnya (Suradi, 2018).

Rujukan utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah multikulturalisme, yaitu pandangan yang menghargai dan mengakui keragaman dalam satu kesatuan, baik secara individu maupun secara kultural. Ketika toleransi dan keinginan untuk saling menghormati dipupuk, multikulturalisme dapat tumbuh subur.

Upaya mewujudkan Indonesia yang multikultural hanya akan berhasil jika konsep multikulturalisme dipahami sebagai keharusan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup. Kedua, adanya pemahaman bersama tentang apa arti multikulturalisme bagi kehidupan bangsa. Ketiga, multikulturalisme adalah studi yang mencakup berbagai isu, termasuk politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja, bisnis, hak budaya, dan prinsip-prinsip etika maupun moral (Prasetyawati, 2017).

Multikulturalisme bukan hanya sebuah titik diskusi, melainkan juga ideologi yang harus dipertahankan. Sangat diperlukan sebagai landasan untuk menegakkan demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat majemuk. Multikulturalisme bukanlah ideologi yang berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan konsep lain untuk dijadikan sebagai lensa untuk melihat kehidupan sosial.

Van Den Berghe mengklasifikasikan masyarakat multikultural menurut enam karakteristik:

- a. Terjadinya segmentasi kelompok sosial. Diversifikasi dalam suatu komunitas dapat menyebabkan orang membentuk kelompok yang berbeda berdasarkan identitas bersama dalam menghasilkan pembentukan subkultur yang berbeda. Di pulau Kalimantan misalnya, terdapat suku Melayu, Kutai, Banjar, dan Dayak yang masing-masing memiliki budaya maupun tradisi tersendiri.
- b. Pembagian struktur sosial menjadi institusi yang saling eksklusif. Komunitas yang beragam menyebabkan struktur sosial menunjukkan perbedaan antar komunitas. Perbedaan struktur masyarakat terlihat dari tidak adanya pranata sosial yang saling melengkapi. Misalnya, lembaga

- keagamaan di Indonesia yang menaungi perwakilan beberapa agama memiliki struktur yang unik. Lembaga-lembaga keagamaan tersebut tidak saling melengkapi karena perbedaan karakteristik masyarakat (agama) yang berbeda.
- c. Adanya kelangkaan mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama). Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma yang berbeda-beda, kemudian diwujudkan dalam perilaku mereka. Hal ini karena karakteristik masyarakat yang beragam disesuaikan dengan lingkungan dan sosialnya. Kesepakatan bersama sangat sulit untuk dikembangkan karena keragaman keadaan masyarakat.
 - d. Konflik terjadi secara cukup teratur. Kesenjangan dalam masyarakat menjadi sumber pertengkar. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antarpribadi hingga konflik kelompok. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk saling bertoleransi, baik antar individu maupun kelompok.
 - e. Integrasi sosial tumbuh secara relatif sebagai akibat dari paksaan ekonomi dan saling ketergantungan. Integrasi sosial sangat mungkin terjadi dalam masyarakat multikultural yang terkoordinasi dengan baik. Akan tetapi, integrasi sosial terjadi dalam masyarakat bukan sebagai akibat dari kesadaran, tetapi sebagai akibat paksaan dari luar terhadap diri sendiri atau kelompok. Selain itu, masyarakat bergantung pada sektor ekonomi, yang dapat mendorong integrasi sebagai hasil dari kebutuhan mereka. Contohnya adalah individu yang bekerja untuk individu atau perusahaan lain untuk memastikan bahwa dia mengikuti semua aturan yang ditetapkan.
 - f. Adanya hegemoni politik. Dalam masyarakat multikultural, kelompok tertentu dapat menggunakan kekuatan politik atas orang lain. Hal ini mengakibatkan suatu bentuk dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok non-politik (Banton, 1983).

Keanekaragaman sosial budaya adalah definisi masyarakat multikultural. Hal ini ditunjukkan dengan adanya banyak budaya yang berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri yang dapat dibedakan dari yang lain. Multikulturalisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai keberagaman dalam suatu masyarakat berdasarkan kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda latar belakang etnis, gender, dan agama. Sejak dahulu kala, setiap agama telah mengajarkan nilai-nilai menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, apapun perbedaan yang ada di muka bumi ini.

Dengan demikian, dinamika pada masyarakat multikulturalisme mencakup berbagai konsep, antara lain demokrasi, keadilan, hukum, nilai etos budaya, kebersamaan dalam menghadapi persamaan, budaya

etnis, keyakinan agama, dan hak budaya masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural sangatlah kompleks, terlebih menghadapi era VUCA world yang semakin menjadi ancaman bagi Indonesia apabila tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam menanggapi dinamika Konflik Kepercayaan Pada Masyarakat Multikultural di Indonesia.

Menumbuhkan Pendidikan Toleransi Sebagai Resolusi Konflik

Terjadinya konflik sosial yang mengatasnamakan agama bukanlah ajaran agama, karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk toleran dan menghargai orang lain. Umat beragama pada umumnya diharapkan mampu mengembangkan tradisi wacana keagamaan yang toleran terhadap keberadaan agama lain dan mampu menghadirkan wacana keagamaan yang toleran dan transformatif (Madjid, 2001).

Keberagaman etnis di Indonesia adalah kekuatan dan sumber daya selama kita tetap berakar pada perwujudan Wawasan Nusantara sebagai perspektif sosial dan budaya yang holistik. Keragaman gaya dan keragaman budaya adalah aset tak ternilai yang berkontribusi pada pengembangan kepribadian kita dan daya tarik bangsa di panggung internasional. Indonesia harus melestarikan keragaman gaya dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Setiap konflik, sekecil apa pun, akan merugikan bangsa. Fakta ini menunjukkan sifat kritis dari keragaman etnis yang diwujudkan sebagai aset nasional. Kesalahpahaman tentang hubungan antara identitas etnis, ekspresi budaya, dan kontrol sumber daya, terutama dalam lingkungan sosial yang heterogen, berpotensi memperburuk ketegangan etnis. Upaya pencegahan konflik, seperti pendidikan multikultural sangatlah diperlukan.

Apabila mengacu pada konflik kepercayaan di Indonesia dan juga menghubungkan dengan segitiga ABC oleh Johan Galtung, maka dapat dijabarkan bahwa seluruh komponen mengarah terhadap pertikaian. Aksi dilakukan oleh masyarakat antar budaya, dimana kaum mayoritas ingin menguasai kaum minoritas. Kemudian untuk perilaku oleh masyarakat di Indonesia ditandai dengan adanya asumsi secara cepat meluas di sosial media yang menjadikan konflik ini semakin meningkat serta memanas pada kepercayaan tertentu. Pada tahapan akhir yaitu kontradiksi menjadikan kesalahpahaman serta ketidakcocokan untuk hidup bersama, tentu perbedaan pendapat inilah yang menjadikan isu konflik kepercayaan melesat jauh. Dari pernyataan tersebut, tentu dibutuhkannya pendidikan toleransi beragama pada masyarakat multikultural untuk mencapai perdamaian positif bagi kesatuan negara Indonesia.

Multikulturalisme adalah istilah yang mengacu pada sebuah konsep, paradigma, dan

pengalaman tentang bagaimana keragaman dimaknai. Meskipun multikulturalisme memiliki banyak interpretasi, pemahaman normatif tentang bagaimana kita melihat perbedaan dan bekerja sama untuk bertahan hidup merupakan isu kritis yang dibahas dan tersebar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kita semua harus hidup dan mengalami apa artinya menjadi beragam dalam masyarakat. Sayangnya, makna positif hidup dalam keberagaman tidak tersebar luas seperti pengetahuan normatif kolektif (Wahid, 2009).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jerome C. Glenn, dkk (2009), disebutkan bahwa elemen Ekonomi Masa Depan untuk Meningkatkan Kondisi masyarakat. Dalam arti kata lain, dalam kehidupan multikultural. kemajemukan merupakan suatu nilai tambah terhadap peningkatan kualitas, baik secara ekonomi maupun sosial. Maka dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam multikultural, tentu saja dibutuhkan penanaman nilai melalui pendidikan.

Bahkan pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2050 cukup banyak orang memahami bahwa keragaman etnis adalah keunggulan komparatif dalam ekonomi masyarakat global dan telah membuat dunia kita jauh lebih damai saat ini daripada di masa lalu. Pandangan yang beragam dari banyak budaya memberikan wawasan untuk mengelola dunia yang semakin kompleks dan nilai-nilai etis bersama mempromosikan kerja sama dan stabilitas (Glenn et al., 2009).

Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap pertumbuhan keragaman penduduk sekolah yang menuntut persamaan hak bagi semua kelompok. Pendidikan multikultural dimulai dengan pengembangan konsep dan kesadaran multikultural. Ini terkait dengan peristiwa politik dan sosial saat ini. Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah dengan alasan mengagungkan keragaman dan mempromosikan pluralisme budaya sebagai cara hidup.

Penjelasan di atas merupakan argumentasi yang kuat bagi perkembangan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 UUD 1945, "setiap warga negara berhak atas pendidikan". Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), menetapkan empat pilar pendidikan pada masa ini, besok, dan seterusnya: (1) belajar untuk mengetahui, (2) belajar untuk melakukan, (3) belajar untuk menjadi, dan (4) belajar untuk hidup bersama.

Empat pilar tersebut, dengan *learning to know*, UNESCO menekankan pentingnya anak memperoleh pengetahuan yang benar sebanyak mungkin. Arah pilar kedua pada kemampuan bertindak dan bekerja didefinisikan sebagai "belajar melakukan". Pengetahuan yang luas harus

dimanfaatkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan baik. Belajar menjadi berarti mengembangkan sikap toleransi atau perasaan terhadap orang lain. Belajar untuk hidup berdampingan sangat penting bagi individu untuk belajar bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain atau bersosialisasi dalam komunitas mereka. Memahami peran diri sendiri dan peran orang lain dalam kelompok belajar diperlukan untuk bersosialisasi di masyarakat (*learning to live together*).

Bila diterapkan dengan benar, keempat pilar tersebut telah sesuai dengan apa yang dicapai pada masa kemerdekaan, yaitu pemersatuan bangsa Indonesia melalui proses pembentukan bangsa dan karakter sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti saling menghormati, keterbukaan, saling memberi dan menerima harus dibudayakan di sekolah. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pemahaman antar ras, etnis, dan agama. Pendidikan di sekolah juga harus menumbuhkan *soft skill* siswa, mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan orang lain di masa depan. Memang, mereka diajarkan untuk peka terhadap suka dan duka orang lain.

Selain itu, perlunya untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dengan menggunakan konsep Trihayu yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu *Mengayu hayuning saliro* (bahagiakan diri sendiri), *Memayu hayuning bongso* (membahagiakan bangsa), dan *Memayu hayuning menungso* (membahagiakan manusia pada umumnya). Dalam hidup ini, kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya tentang kita tetapi juga tentang komunitas maupun seluruh kemajemukan budaya yang ada di Indonesia. Konsep kebahagiaan yang pertama adalah mensyukuri setiap nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha secara positif untuk mencapai suatu tujuan dalam kesejahteraan. Selain itu, kebahagiaan bangsa dalam hubungannya dengan sesama, serta kebahagiaan manusia yang lebih luas pada umumnya, di mana pun mereka berada. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, mereka menerima kebahagiaan tertinggi. Seseorang yang berkarakter baik tidak hanya akan mempertimbangkan kesejahteraannya tetapi juga kesejahteraan orang lain dengan menjunjung tinggi nilai toleransi (Wijayanti, 2018).

Pendidikan multikultural merupakan mata pelajaran baru dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap gejala dan masalah sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap gejala dan masalah sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Studi yang dibawa oleh Zamroni (2011) menegaskan bahwa pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, sekolah

harus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran multikulturalisme di kalangan siswa. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa mengembangkan sikap yang lebih menerima orang lain dengan mengajari mereka tentang pentingnya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, kebijakan, regulasi, dan model pembelajaran harus dipertimbangkan semuanya. Kurikulum sekolah harus dirancang untuk mempromosikan toleransi dan meminimalkan penghinaan terhadap kelompok etnis, agama, sosial, dan budaya. Sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, peserta didik berkesempatan untuk merayakan hari besar keagamaan dan memperingati hari-hari penting menurut keyakinan agamanya. Nilai dasar pendidikan didasarkan pada toleransi bagi orang-orang dari budaya yang berbeda. Toleransi seorang siswa harus diajarkan dan mendarah daging di dalamnya. Memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sebagai sarana untuk mempromosikan pluralisme dan memerangi segala bentuk diskriminasi.

Isu mengenai pendidikan multikultural di Indonesia menjadi topik menarik untuk dibahas maupun dikembangkan. Dalam konteks pendidikan nonformal, sekolah merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjawab persoalan menjaga kerukunan dalam roda kehidupan yang multikultural. Dalam konteks pendidikan formal di semua tingkat sekolah, penelitian tambahan diperlukan, mirip dengan bagaimana Amerika mengubah kurikulumnya atau menemukan solusi lain.

Keberanian mengajak masyarakat untuk mempelajari atau memahami keragaman agama sangat diperlukan untuk keberhasilan mewujudkan cita-cita luhur peradamaian abadi dan persaudaraan antar umat yang pada kenyataannya berbeda agama dan keyakinan. Penanaman nilai-nilai toleransi merupakan konsep yang agung dan mulia yang merupakan bagian integral dari ajaran semua agama, termasuk Islam. Toleransi antar umat beragama sangat penting bagi fungsi masyarakat sehari-hari. Toleransi berfungsi sebagai penjaga, pelindung, pembawa damai, dan pemersatu dalam komunikasi maupun interaksi, memastikan kelestarian lingkungan serta pengembangan hubungan positif antar anggota masyarakat (Suradi et al., 2020).

Toleransi diterapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dinamis, yaitu kesadaran akan hidup berdampingan secara damai dan serasi di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesinambungan Bhinneka Tunggal Ika dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan dalam masyarakat.

Toleransi adalah sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan kerja

sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, secara etnis, bahasa, budaya, politik, atau agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk Islam. Agama yang telah memasuki masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama dapat memiliki banyak versi, terutama dalam aspek implementasinya.

Dalam mengimplementasikan Pendidikan untuk masyarakat multikultural di Indonesia juga dibutuhkan tiga hal yang memiliki keterkaitan guna meredam resolusi konflik di Indonesia. Pertama adalah internalisasi pendidikan. Internalisasi adalah proses mendalam untuk menghayati nilai-nilai yang dipelajari siswa beserta nilai-nilai pendidikan secara utuh, dengan tujuan untuk mengintegrasikannya ke dalam kepribadian siswa sehingga tercipta satu karakter atau karakter bagi siswa. Kedua, pencegahan politik identitas pada demokrasi. Secara nasional, peningkatan tingkat pendidikan pemilih merupakan salah satu pendekatan untuk mengantisipasi pengaruh buruk politik identitas; mayoritas pemilih adalah lulusan SD-SMP, yang signifikan mengingat konsekuensinya terhadap literasi sosial dan politik. Kebangsaan yang komprehensif dan non-selektif dalam hal pendirian, dan publik yang memahami operasi teknologi saat ini dan mampu memverifikasi banyak informasi yang tersebar. Ketiga adalah pemimpin yang inklusif. Kata kepemimpinan inklusif mengacu pada posisi seseorang atau individu yang menjalankan tugas yang telah ditetapkan, tetapi sebagai proses kolektif yang ada pada setiap individu atau yang mewakilinya. Pemimpin yang inklusif akan dapat merajut nilai-nilai multikultural pada suatu negara yang dipimpinnya serta dapat menyinkronisasi kemajemukan yang mengikat pada bangsa.

Nilai toleransi dalam masyarakat multikultural tercermin dari sikap saling menghormati antara mayoritas dan minoritas. Misalnya, Muslim dan non-Muslim menjaga kerukunan dan kedamaian di mana tempat ibadah mereka terletak berdekatan satu sama lain.

Untuk membangun hubungan yang toleran dan berbudaya dalam masyarakat multikultural, setidaknya diperlukan empat hal sebagai berikut:

Pertama, re-formulasi budaya dan re-interpretasi doktrin agama ortodoks dijadikan alasan untuk menjadi eksklusif dan komprehensif. Re-formulasi dan re-interpretasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga budaya dan agama tidak hanya menerima kearifan tradisi lokal tetapi juga menjadi garda depan untuk mewujudkan demokrasi yang tertanam dalam masyarakat multikultural.

Kedua, dialog antara tradisi dan agama dengan ide-ide modern. Saat ini, masyarakat memasuki fase sejarah baru dimana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban besar yang tidak bertumpu pada tradisi dan agama, seperti

budaya Barat modern. Kita tidak bisa menghindari ide dan teori sekuler, dan ini bersinggungan dengan ide-ide non-agama yang merupakan tugas paling menantang yang dihadapi umat Islam di zaman modern.

Ketiga, agama yang menekankan ajaran cinta kasih mendorong manusia untuk saling menghormati, mencintai, dan membantu melalui lembaganya masing-masing, yang biasanya diungkapkan melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Keempat, agama secara tidak langsung mendorong berkembangnya masyarakat majemuk di muka bumi melalui ajaran-ajaran tersebut (Haba, 2008).

Konsep toleransi terhadap masyarakat multikultural tergolong multikulturalisme yang akomodatif, sebagaimana dikemukakan oleh Parekh Azra, yaitu masyarakat pluralistik yang memiliki budaya dominan, yang mengakomodasi kebutuhan tertentu akan budaya minoritas. Maka hal-hal inilah yang kemudian dapat menjadi modal awal dalam penanaman nilai toleransi sebagai resolusi konflik.

Maka, dalam menumbuhkan pendidikan toleransi dalam rangka resolusi konflik kepercayaan di Indonesia, perlu adanya penjiwaan terhadap ajaran-ajaran para leluhur terdahulu seperti yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara mengenai konsep Trihahyu. Selain itu, penanaman nilai toleransi juga perlu untuk diberi kepada masyarakat Indonesia. Sikap saling menghormati antara mayoritas dan minoritas merupakan contoh nilai toleransi dalam masyarakat multikultural yang perlu dilestarikan.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Multikultural yang ada di Indonesia tentu saja menjadi kelebihan serta kekurangan disaat yang bersamaan. Terjadinya konflik sosial seringkali dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam ranah masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan mulia perdamaian abadi serta pencegahan konflik sosial di antara orang-orang yang pada kenyataannya memang berbeda agama dan budaya, juga saling menghormati dan bekerja sama di antara berbagai kelompok orang, etnis, bahasa, budaya, politik, atau agama. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari pondasi negara kita. Toleransi berfungsi sebagai penjaga, pengayom, pembawa damai, dan pemersatu dalam komunikasi dan interaksi sehingga terwujud hubungan yang baik antar anggota masyarakat.

Dinamika masyarakat multikultural mencakup berbagai konsep, antara lain demokrasi, keadilan, hukum, etos budaya, kebersamaan dalam menghadapi ketimpangan, budaya etnis, keyakinan agama, dan hak budaya masyarakat. Kesulitan-kesulitan yang melekat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural sangatlah kompleks, terlebih lagi mengingat era dunia VUCA yang semakin mengancam Indonesia jika tidak

mampu beradaptasi dengan dinamika Konflik Kepercayaan dalam Komunitas Multikultural di Indonesia. Indonesia.

Untuk membudayakan pendidikan toleransi dalam konteks penyelesaian konflik agama di Indonesia, diperlukan inspirasi dari ajaran nenek moyang kita, seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep Trihahyu. Selain itu, masyarakat Indonesia harus diajarkan nilai toleransi. Saling menghormati antara mayoritas dan minoritas merupakan contoh nilai toleransi yang harus dilestarikan dalam masyarakat multikultural. Maka resolusi konflik kepercayaan dalam toleransi beragama dapat dilakukan dengan internalisasi Pendidikan, mencegah politik identitas pada demokrasi dan pemimpin yang inklusif dalam merajut nilai multikultural di Indonesia.

Pendidikan multikultural digunakan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang keragaman budaya, hak asasi manusia, dan pengurangan atau penghapusan bias atau prasangka yang menghambat kemajuan masyarakat yang adil dan terbuka. Pendidikan multikultural diajarkan, disosialisasikan, dan ditanamkan kepada peserta didik dan masyarakat di Indonesia dengan tujuan meminimalkan dan mencegah konflik antar kelompok. Setiap lembaga pendidikan harus menjadikan pendidikan multikultural sebagai prioritas karena diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi konflik.

5. REFERENSI

- Banton, M. (1983). *Racial and Ethnic Competition*. Cambridge University Press.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197–207. <https://doi.org/10.2307/586859>
- Fahlevi, F. (2021). *Konflik Warga soal Rumah Ibadah Muncul Saat Natal, Menteri Agama Prihatin*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/29/konflik-warga-soal-rumah-ibadah-muncul-saat-natal-menteri-agama-prihatin>
- Ferdi Ferdian, Afrizal, & Elfitra. (2018). Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 4(2), 136–147.
- Galtung, J. (2007). *Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation - the TRANSCEND Approach (in) Handbook of peace and conflict studies* (J. Webel, Charles ; Galtung (ed.)). Routledge.
- Giddens, A., & Turner, J. (2015). *Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial (Social Theory Today)* (Y. Santoso (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Glenn, J. C., Gordon, T. J., & Florescu, E. (2009).

- 2009 *State of the Future (The Millennium Project)* (1st ed.). The Millennium Project.
- Haba, J. (2008). Revitalisasi Sikap Toleransi: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. In I. Abdullah (Ed.), *Agama dan Sikap toleransi dalam Tantangan Global*. Pustaka Pelajar.
- Madjid, N. (2001). *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keagamaan*. Kompas Nusantara.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, H. (2010). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (1st ed.). University of Indonesia Press.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultural Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 1(2), 32–48.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta.
- Suradi, A. (2018). The Challenges of Education Based on Multicultural in National Local Culture Conservation in Globalization Era. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v16i1.1156>
- Suradi, A., Kenedi, J., & Surahman, B. (2020). Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 229–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p06>
- Turner, J. H. (1975). *The Structure of Sociological Theory*. Illinois: The Dorsey Pers.
- Ulya, I., & Anshori, A. A. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 20–35. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam Ekspansi Negara Islam Transnasional di Indonesia* (1st ed.). Desantara Utama Media.
- Wertheim, W. F. (1999). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. (1st ed.). Tiara Wacana.
- Wijayanti, D. (2018). Character Education Designed By Ki Hadjar Dewantara. *EduHumaniora / Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 10(2), 85. <https://doi.org/10.17509/eh.v10i2.10865>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia Journal*, 16(2), 217–228. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/4930/3255>
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (1st ed.). Gavin

Kalam Utama.

PEMBELAJARAN IPS MENUJU ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI ERA *NEW NORMAL* PANDEMI COVID-19

Oleh :

Yuli Wiluya^{1)*}, Rida Oktorida Khastini²⁾

¹SMP Negeri 3 Cilegon.

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

¹*email: wiluyayuli@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19 untuk memutus persebaran Covid-19. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran IPS, tantangan, dan solusinya berdasarkan studi literatur. Berbagai *platform* dapat digunakan sebagai fasilitas dalam pembelajaran daring dan pelaksanaannya memiliki banyak tantangan dan kendala baik dari aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan teknis implementasi. Sebagai solusi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkelanjutan agar keberhasilan pembelajaran daring ini dapat dirasakan manfaatnya bagi siswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di era *new normal* Pandemi Covid-19

Kata kunci: Mata pelajaran IPS, revolusi industri 4.0, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Sebelum menjadi kasus Pandemi di lebih dari 200 negara di dunia yang menyebabkan banyak korban, Wuhan, sebuah kota di Cina merupakan daerah awal penyebaran virus Corona virus (Covid-19) pertama kali pada Desember 2019. Covid-19 adalah infeksi virus yang sangat mudah menular menyebabkan gangguan sindrom pernapasan akut parah (Shereen *et al* 2020). Jumlah pasien dengan COVID-19 meningkat sangat pesat dan tidak terkendali yang menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Virus ini ditularkan terutama melalui tetesan pernapasan yang terinfeksi dan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Masa inkubasi bisa selama 2 minggu atau bahkan lebih lama, dan ini sangat menular.

Pandemi ini harus segera diatasi dan pemutusan rantai penularan virus Covid-19 bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. diantaranya dengan adanya pembatasan fisik dan sosial. Pemerintah membuat kebijakan bekerja belajar di rumah, dan melakukan kegiatan agama di rumah, dan meniadakan pertemuan massal. Hal ini tertuang dalam surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid, menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran siswa dilakukan di rumah melalui metode daring atau pembelajaran jarak jauh (Makarim, 2020). Semua kegiatan tetap berjalan akan tetapi tidak secara langsung, dengan bantuan internet. Internet menjadi penghubung orang satu dengan lainnya, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan. Hal tersebut sebagai pendukung dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Sebagai imbas dari adanya era ini, setiap orang perlu menguasai keterampilan baru..

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap inovasi pendidikan (Sharoom & Hussin 2018). Era revolusi industri 4.0 dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan kerangka fisik digital yang membuat manusia-mesin menjadi lebih universal, dan tentunya ditekankan pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Nagy *et al* (2018) menambahkan aspek lainnya terkait revolusi industri 4.0 yaitu *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia Oleh karena itu siswa perlu dibekali berbagai kecakapan dan kemampuan yaitu memecahkan masalah (*problem solving*), berpikir kritis (*critical thinking*), kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi (Redhana 2019). Selain itu penguasaan *soft skill* atau kemampuan yang bersifat afektif dan psikomotorik juga memiliki peran yang sangat penting. Kemampuan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Dalam hal ini, sistem sekolah memiliki peran vital dalam mempersiapkan individu global dan mencetak tenaga kerja berkualitas untuk masa mendatang

Segala aspek kehidupan harus terus berjalan walaupun dalam masa pandemi termasuk dalam bidang pendidikan. *New normal* merupakan tatanan kehidupan babak baru dalam masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi *New Normal* terjadi perubahan perilaku yaitu dengan adanya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19. Pembelajaran daring merupakan solusi efektif selama menghadapi pandemic Covid-19 dalam masa *New Normal*. Siswa dan guru dapat melakukan pembelajaran pada semua mata pelajaran (mapel) di rumah saja tidak terkecuali pembelajaran

pada mapel IPS. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan pembelajaran daring murni. Pembelajaran kegiatan secara daring dan berbasis internet. Konten materi, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilakukan langsung secara daring. Model lainnya adalah daring kombinasi. Pada pembelajaran ini konten materi disampaikan baik secara tatap muka. Guru dapat melakukan home visit kepada siswanya untuk menyampaikan materi atau melalui daring namun proporsi lebih besar dilakukan secara daring, termasuk forum diskusi antar peserta (Kementerian Pendidikan Nasional, 2016).

Guru memiliki peran besar dalam perubahan pola belajar dan mengajar dalam bentuk daring (Zacharo *et al.*, 2018) dan tentunya guru harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran dan kondisi siswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat (Zein 2016). Kajian ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan, sebagai upayaantisipasi dunia pendidikan-terlebih sekolah dan guru, dan sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan .

2. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan dengan pendekatan kualitatif analisis isi. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran pustaka secara daring berupa artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang memiliki reputasi yang baik. Menurut Zed (2003), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengumpulan data pustaka. Langkah selanjutnya adalah membaca dan menelaah, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional maupun nasional digunakan sebagai pustaka primer yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Analisis dilakukan terhadap isi (*content*) artikel sebagai sumber data utama (Mayring, 2000). Pengelompokan informasi terhadap artikel yang akan ditelaah dilakukan sebagai langkah awal sebelum analisis isi untuk dijadikan unit amatan dalam penelitian ini.

Penelusuran pustaka dilakukan melalui mesin pencari google menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci yang digunakan diantaranya adalah Covid 19, pandemi, pendidikan, revolusi industri 4.0. IPS.

Hasil analisis penelusuran dideskripsikan dalam kutipan langsung sesuai dengan apa yang tertulis di sumber pustaka, atau mengolah kalimat dengan cara membuat kalimat baru tanpa mengurangi arti dan informasi yang ada. Bentuk lainnya adalah berupa ringkasan berupa inti dari informasi yang ada. Semua hasil deskripsi hasil penelaahan disertai dengan sumber pustaka tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembelajaran IPS di Era New Normal Pandemi Covid 19

Pembelajaran daring dilakukan oleh sekolah sebagai solusi selama menghadapi era *New Normal* Pandemi Covid 19. Hal ini sangat penting karena pembelajaran harus tetap berlangsung dan siswa dilibatkan pada tingkat apapun sehingga tetap mempertahankan rasa normal walaupun berada pada masa krisis pandemi. Kelangsungan pembelajaran daring ini harus didukung oleh persiapan sekolah, kesiapan orang tua/keluarga, serta kesiapan guru. Pertimbangan harus diberikan pada kebutuhan semua siswa untuk terus memberikan pendidikan selama berlangsungnya pandemi. Bahan ajar seperti buku dan dokumen lain dapat dikirim secara online kepada siswa dalam bentuk *soft file*.

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai bahan kajian merupakan dapat dikemas menjadi satu, dapat pula diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan bahan kajian lain sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Menurut Sapriya (2011), penyusunan mapel IPS secara sistematis komprehensif dan terpadu dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. serta memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini diperkuat dengan adanya Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa substansi mata pelajaran IPS pada SMP/MTs merupakan IPS Terpadu, maka pada pelaksanaannya pembelajaran terpadu melibatkan peserta didik memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari.

Mata pelajaran IPS untuk SMP memiliki muatan keterampilan berpikir lebih menonjol daripada keterampilan teknis dan praktis sehingga jika dilaksanakan dengan moda daring tidak akan berdampak terhadap capaian hasil belajar. Kondisi ini menurut Senn (2008) dapat diatasi dengan menggunakan pembelajaran dengan model daring kombinasi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Selama proses pembelajaran, berkesempatan untuk berkomunikasi secara lebih cepat dan efisien ketika bertemu langsung dengan guru untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Pada moda daring kombinasi, pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang belum tuntas dalam sesi tatap muka dapat dilanjutkan secara daring (Collopy & Arnold, 2009) .

Selama pembelajaran daring, penggunaan media media diharapkan dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa memusatkan pikirannya dan terdorong untuk terlibat secara aktif. Guru dan siswa

semakin mengenal teknologi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Aplikasi yang umum digunakan, yaitu *Google Classroom WhatsApp Group, Zoom Cloud Meeting, dan e-mail*. Guru dan siswa menggunakan berbagai lokasi tersebut sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing.

Google classroom adalah metode pembelajaran online yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan untuk mengatasi proses pembelajaran yang dibatasi oleh ketersediaan ruang kelas (Blundo, 2011). Banyak fitur yang tersedia di dalam *Google classroom*. Pembuatan dan pemberian tugas dapat dilakukan melalui aplikasi gmail kemudian diteruskan ke ruang google classroom. Peserta didik dapat diundang ke sebuah ruang kelas dengan beberapa cara yakni melalui basis data lembaga, melalui sebuah kode pribadi yang kemudian dapat ditambahkan di antara peserta didik dan pendidik. Melalui *google classroom*, guru dapat berdiskusi dengan peserta didik selama proses pembelajaran online berlangsung. Materi pembelajaran IPS dapat diberikan dalam bentuk PowerPoint, video, flash, textbook, sekaligus mengirimkan soal untuk evaluasi pembelajaran kepada siswa.

Aplikasi *WhatsApp (WA)* sangat familiar di masyarakat. Hampir semua orang yang mempunyai handphone android menggunakan aplikasi WA. Sama halnya seperti SMS, WA merupakan teknologi berbantuan internet dan memiliki banyak fitur pendukung dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Fitur-fitur yang terdapat dalam WA yaitu *Gallery* untuk menambahkan foto, *Contact* untuk menyisipkan kontak, *Camera* untuk mengambil gambar, Audio untuk mengirim pesan suara, Maps untuk mengirimkan berbagai koordinat peta, bahkan *Document* untuk menyisipkan file berupa dokumen. Foto, gambar, peta dan pesan suara dapat dijadikan media pembelajaran pendukung dalam mapel IPS, dapat dikirimkan dengan cepat oleh guru melalui WA dan diterima siswa untuk dipelajari. Diskusi kelompok siswa dapat terfasilitasi dengan adanya fitur *Group Discussion* yang mampu menampung hingga 256 peserta.. Para anggotanya dapat saling berbagi diskusi dan informasi secara online (Susilo 2014). Siswa dapat aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat temannya bahkan menyanggah pendapat temannya jika setuju.

Zoom Meeting sendiri merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Platform ini gratis jadi dapat digunakan oleh siapapun dengan batas waktu empat puluh menit dan tidak ada batasan waktu jika akun kita berbayar. Penggunaan aplikasi *Zoom Meeting* ini dapat mempermudah untuk berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. Penelitian yang dilakukan oleh Denissa (2016) mengenai media pembelajaran menggunakan video sangat membantu dalam proses pembelajaran baik formal maupun non formal, dengan demikian hal ini

mendukung penggunaan *Zoom Meeting* sebagai fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran IPS menjadi lebih efektif dan efisien. Ketersediaan video konferensi yang dapat dijangkau oleh seluruh siswa merupakan keunggulan *Zoom Meeting*. Selain itu, rekaman video pun terjaga keamanannya dan memiliki fitur chatting sehingga jika ada yang mendapatkan pendengaran dengan baik pada saat video konferensi maka dapat berbicara melalui chatting. *Zoom* dapat pula dilakukan penjadwalan pertemuan berikutnya yang akan dilakukan.

Asesmen atau penilaian hasil belajar siswa diperlukan pula selama proses pembelajaran IPS secara daring. Berbagai aplikasi assessment diantaranya *quizizz.com*. *Quizizz* adalah aplikasi pendidikan berbasis game, yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuatnya di kelas latihan interaktif dan menyenangkan (Purba, 2019). *Quizizz.com* dipilih sebagai media untuk evaluasi pembelajaran siswa karena dapat dilakukan secara daring, dan terdapat pengaturan waktunya ketika mengerjakan soal. Tampilan *quizizz.com* berkarakter game seperti avatar, meme, tema, dan ada musiknya. *Quizizz.com* juga langsung dapat memberikan data statistik kinerja siswa. Data statistik tersebut menjadi bahan evaluasi pembelajaran, apakah siswa memahami materi-materi IPS. Kelebihan-kelebihan *quizizz.com* dapat meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan motivasi belajar siswa.

Aplikasi penilaian belajar lainnya adalah *Kahoot!* dalam bentuk kuis online berisi soal atau tes yang ditampilkan dalam bentuk permainan. Menurut Sutirna (2018) media *Kahoot!* merupakan webtool untuk membuat kuis, diskusi, dan survey. secara menarik. *Kahoot!* bisa digunakan di kelas untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan siswa termotivasi untuk belajar. *Kahoot!* juga membantu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Pada penelitian menurut Kocakoyun (2017) membuktikan bahwa *Kahoot!* merupakan aplikasi yang paling digemari sebagai media pembelajaran, selain itu hasil penelitian Irwan (2019) menunjukkan bahwa *Kahoot!* dapat menjadi alternatif media evaluasi pembelajaran interaktif di sekolah.

Tantangan pembelajaran mata pelajaran IPS secara daring dan solusi mengatasinya

Pembelajaran daring sebenarnya dapat dikatakan bukan teknologi baru karena proses ini sudah berlangsung selama beberapa dekade kebelakang. Akan tetapi urgensinya belum dirasakan sehingga banyak yang merasa kesulitan dan menghadapi berbagai masalah. Jaringan, kurangnya pelatihan, dan kurangnya kesadaran diidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh guru. Kurangnya kesadaran diikuti oleh kurangnya minat dan keraguan tentang kegunaan pembelajaran daring menjadi penghambat utama. Hal ini didukung oleh pendapat

Arora & Srinivasan (2020) yang menyatakan bahwa kurang kehadiran, kurangnya sentuhan pribadi, dan kurangnya interaksi karena masalah konektivitas ditemukan menjadi kelemahan signifikan dari pembelajaran daring. Hasil penelitian Purwanto *et al* (2020) menunjukkan bahwa beberapa kendala juga dialami oleh murid, guru dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar daring yaitu penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya kuota internet, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi antar siswa, guru, dan orang tua menjadi berkurang dan Jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Selain itu, Anugrah menambahkan (2020) seiring perjalanan waktu muncul banyak permasalahan dalam implementasi pembelajaran daring. Di antara permasalahan itu adalah tugas guru yang terlalu banyak dan keluhan soal kuota dan jaringan internet yang serba terbatas

Faktor penyebabnya adalah peserta menganggap bahwa komunikasi dengan teman menjadi terbatas, mereka mengalami keterbatasan teknologi: berupa fasilitas internet, gawai, dan buku elektronik. Mereka juga menganggap bahwa sekolah tidak memiliki program yang baik untuk sistem belajar di rumah. Sekolah dan guru hanya memberi tugas secara beruntun sesuai rencana pelajaran dan materi pelajaran dalam kondisi non-pandemi/kondisi biasa (Satriawan, 2020).

Penghargaan perlu diberikan kepada guru, sekolah, peserta didik, dan bahkan orang tua/wali murid karena mampu beradaptasi dalam konteks pembelajaran daring selama menghadapi pandemic Covid 19. Namun, seiring berjalannya waktu semua pihak perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuannya bisa tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik harus logis dan terukur. Banyaknya tugas atau tagihan yang diberikan guru menjadi keluhan umum dalam pembelajaran daring. Beban belajar siswa tentunya harus diperhitungkan, terukur, baik secara materi maupun waktu. Guru dapat memberikan yang lebih menantang dan menarik, misalnya mengamati, mencoba, dan menganalisis. Dalam pembelajaran daring meskipun dilakukan secara jarak jauh, respon, umpan balik, penghargaan terhadap hasil pekerjaan peserta tidak boleh terlupakan. Anggapan bahwa siswa seakan diperdaya karena tugas yang sangat banyak, tidak logis, dan tanpa umpan balik tidak boleh ada di kalangan masyarakat. Anugrah (2020) juga menegaskan bahwa tugas yang sudah dilakukan maksimal oleh siswa jangan sampai tidak dinilai dan dihargai oleh guru.

Salah satu tujuan pembelajaran yang perlu dicapai dalam mata pelajaran IPS adalah adalah pencapaian kompetensi siswa berupa kemampuan berpikir kritis sehingga dapat mengarahkan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Berpikir kreatif

perlu juga dikuasai siswa agar mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi. Kemampuan bekerja sama perlu dibekali sehingga siswa mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya di masa depan. Kemampuan berkomunikasi diperlukan oleh siswa agar mampu menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif.

Pembelajaran daring dikembangkan untuk mewujudkan sistem pendidikan terpadu yang dapat membangun konektivitas antar komponen yang ada. Oleh karenanya pendidikan menjadi lebih dinamis dan fleksibel bergerak untuk pengembangan pendidikan. Sudah barang tentu semua ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh komponen sumber daya

4. KESIMPULAN

Pembelajaran daring mata pelajaran IPS dalam menyambut era revolusi industri 4.0 di masa new normal Pandemi covid-19 dapat dilakukan melalui penggunaan media Pembelajaran daring memiliki keunggulan dan kelemahan. Kelemahan pembelajaran daring diatasi dengan penggunaan media yang bervariasi. Penggunaan media pembelajaran daring yang bervariasi dan inovatif diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa di pandemic Covid-19.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Susilo . A. (2014) Exploring Facebook and Whatsapp As Supporting Social Network Applications For English Learning In Higher Education. Bandung: Widyatama, hlm.10
- Anugrah, D. (2020). Dinamika pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19. Berita Magelang.
- Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching – learning process: A study of higher education teachers. Prabadhan: Indian Journal of Management, 13(4). <https://doi.org/10.17010/pijom/2020/v13i4/151825>
- Blundo, D. a. (2011). E-learning Methodologies. A Guide for Designing and Developing elearning Courses. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Collopy, R. M., & Arnold, J. M. (2009). To blend or not to blend: online and blended learning environments in undergraduate teacher education. Issues in Teacher Education, 18(2).
- Denissa A. (2016). Pembelajaran Berbasis Video Untuk Anak Generasi Z.Prosiding Inovasi Pendidikan di Era Big Data dan Aspek Psikologinya .ISSN: 2548-5407. PascaSarjana Universitas Negeri Malang. hal 85-92
- Irwan. (2019). Efektifitas Penggunaan Kahoot untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan. Vol. 8 No. 1.

- Kementerian Pendidikan Nasional. (2016). Pedoman Umum Guru Pembelajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- Kocakoyun. (2017). Determination of University Students' Most Preferred Mobile Application for Gamification. *World. Educ. Technol. Curr. Issue.* 9.
- Makarim, N. A. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus D/Sease (COVID- 19). Jakarta. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaankebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>
- Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 1 (2), Art. 20, <http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204>
- Shereen M. A, Khana S, Kazmic A, Bashira N, Siddique R. (2020) COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses *Journal of Advanced Research* 24:s 91-98
- Nagy, J., Oláh, J., Erdei, E., Máté, D. & Popp, J. (2018). The role and impact of industry 4.0 and the internet of things on the business strategy of the value chain-the case of Hungary. *Sustainability (Switzerland)* 10.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Budi Santoso, P., Mayesti Wijayanti, L., Chi Hyun, C., Setyowati P, R. (2020). Studi eksploratif dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1–12.
- Redhana I. W. (2019). Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia* 13(1) : 2239 – 2253
- Sapriya, (2011). Pendidikan ips, konsep dan pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Satriawan, Y. (2020). Hardiknas: Belajar di rumah, berdamai dengan teknologi di tengah pandemi. *VOA Indonesia*.
- Senn, G. J. (2008). Comparison of face-to-face and hybrid delivery of a course that requires technology skills development. *Journal of Information Technology Education*, 7, 267-283.
- Shahroom, A. A., Hussin, N. (2018). Industrial Revolution 4.0 and Education. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 314–319.
- Sutirna. 2018. Game Education: Aplikasi Program Kahoot dalam Tahap Aplikasi Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Semanasriatek.sakaintek.org*.
- Zacharo, K., Marios, K., Dimitra, P. (2018). Connection of teachers' organizational commitment and transformational leadership. A case study from Greece. *International Journal of Learning, Teaching and Ed*
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN SISWA/I SMA/ SEDERAJAT TERHADAP SISTEM ONLINE LEARNING DI INDONESIA

Oleh :

Heruna Tanty¹⁾, Briana Febriani²⁾, Fedora Tanuwijaya³⁾, Inas Safira⁴⁾.

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik, Universitas Bina Nusantara

¹email: herunatanty@yahoo.com

²email: briana.febriani@binus.ac.id

³email: fedora.tanuwijaya@binus.ac.id

⁴email: inas.safira@binus.ac.id

Abstrak

Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa yang diharapkan melalui suatu layanan terhadap apa yang didapatkannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengamati seberapa penting dan puas siswa/i SMA di Indonesia terkait dengan pembelajaran yang dilakukan secara online learning semenjak adanya COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut dari pembelajaran online learning untuk tingkat SMA/ sederajat dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangibles, Reliability, Assurance, Empathy, dan Access. Berdasarkan hasil Importance Performance Analysis disimpulkan bahwa atribut yang menjadi agenda prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya adalah atribut yang berada di kuadran A. Atribut yang menjadi prioritas kedua untuk diperbaiki adalah atribut di kuadran C. Atribut yang berada di kuadran B dianggap penting dan telah memenuhi kepuasan para pelajar sehingga bisa menjadi aset untuk dikembangkan. Atribut dengan tingkat kepuasan tinggi namun dianggap kurang penting dapat ditemui di kuadran D. Terdapat hasil kuesioner sebanyak 143 responden dengan hasil akhir keseluruhan data bahwa kepuasan siswa/i terhadap pembelajaran online learning sudah mencapai 79% yang menunjukkan bahwa siswa/i sudah cukup puas.

Kata Kunci: Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, Customer Satisfaction Index, Importance Performance Analysis, dan Online Learning.

1. PENDAHULUAN

Kasus COVID-19 yang terus meningkat dan keluhan masyarakat terhadap gejala yang cukup serius dari infeksi virus tersebut menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dalam pengendalian sistem pendidikan dan kegiatan kerja masyarakat Indonesia. Pemerintah meliburkan seluruh aktivitas pendidikan selama beberapa pekan di masa awal penyebaran COVID-19. Namun, peningkatan kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan menyebabkan kegiatan pembelajaran terhambat dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga memaksa seluruh lembaga pendidikan di Indonesia menggunakan alternatif lain agar pendidikan dapat terus berlangsung. Online learning atau pembelajaran daring menjadi alternatif dan solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah terhambatnya kegiatan pembelajaran baik di Indonesia maupun di seluruh bagian dunia. Online learning atau pembelajaran dalam jaringan merupakan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberlakuan sistem pembelajaran online mendapat beragam tanggapan dari siswa. Walaupun siswa memiliki perilaku yang baik dalam menghadapi sistem online, namun mereka tetap lebih memilih belajar secara tatap muka (Padli and Rusdi 2020). Siswa banyak mengalami kesulitan selama

pembelajaran online, baik terkait teknologi, signal jaringan, kemampuan siswa dalam mengoperasikan aplikasi pembelajaran daring, komunikasi, ataupun permintaan bantuan (Klara and Ristono 2021). Siswa cenderung menganggap pembelajaran daring sebagai sesuatu yang membosankan dan memberatkan sehingga dapat menurunkan motivasi belajar mereka (Pavlovic, Vugdelija and Kojic 2015). Penurunan motivasi belajar ini dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran dan menurunkan hasil belajar kognitif peserta didik sehingga dapat memengaruhi kualitas tenaga kerja Indonesia kedepannya. Kepuasan siswa dalam pembelajaran secara daring mampu tercapai dengan adanya motivasi dan kompetensi yang sebanding. Motivasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh kepuasan siswa terhadap kualitas pembelajaran (Harahap, et al. 2021). Hal inilah yang membuat penulis membuat penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa SMA/ sederajat terhadap sistem pembelajaran daring di Indonesia apabila diukur menggunakan CSI. Setelah mengetahui tingkat kepuasan siswa, penulis juga akan meneliti terkait dengan ada atau tidaknya pengaruh antara tingkat kepentingan terhadap tingkat kepuasan siswa terhadap sistem pembelajaran daring. Kepuasan pembelajaran akan diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu tangible, reliability, assurance, empathy, dan access. Korelasi antar kelima dimensi ini akan juga

akan diuji untuk mengetahui apakah kelima dimensi saling memengaruhi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepuasan belajar siswa SMA dan menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem pembelajaran online di Indonesia sehingga dapat menjadi lebih baik dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasinya. Sampel yang digunakan adalah 143 siswa/i SMA/ sederajat di Indonesia.

Kuesioner berisi 15 pertanyaan yang terbagi ke dalam 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, assurance, empathy, dan access. Analisis data akan dilakukan menggunakan CSI, t-test, dan correlation test. Metode Customer Satisfaction Index atau CSI digunakan untuk mengukur persentase tingkat kepuasan siswa/i terhadap sistem pembelajaran online learning, t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata importance score dan satisfaction score, dan correlation test digunakan untuk melihat korelasi antar dimensi. Kuesioner dibagikan dan pada akhirnya mendapatkan sejumlah 143 responden.

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk mendukung proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari Maret 2022 hingga Juni 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kepuasan Siswa SMA terhadap Sistem Pembelajaran Daring di Indonesia

Tingkat kepuasan diukur menggunakan kelima dimensi yang dijadikan dasar dalam standar kepuasan yang terdiri dari tangible, reliability, assurance, empathy, dan access (Stefano, et al. 2015). Tingkat kepuasan siswa/i SMA/ sederajat terhadap sistem pembelajaran daring diukur dengan menggunakan dimensi dan atribut seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1 Dimensi dan Atribut Penelitian

No	Dimension	Attribute	Code
1	Tangible	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai dengan Jadwal	T1
2		Kejelasan Guru dalam Menyampaikan Materi	T2
3		Guru Memberikan Kesempatan Siswa/i untuk Saling Berinteraksi (Diskusi kelompok, project, dll)	T3
4	Reliability	Kejelasan Tujuan Pembelajaran setiap Mata Pelajaran	R1
5		Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Silabus	R2
6		Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Ujian	R3
7	Assurance	Layanan Kesiswaan yang Informatif	A1
8		Layanan Kesiswaan bersikap Sopan dan Ramah	A2
9		Layanan Kesiswaan Solutif terhadap Permasalahan Siswa	A3
10	Empathy	Jaminan Keamanan Data	E1
11		Hasil Belajar yang didapatkan bersifat Objektif dan Transparan	E2
12		Terjalinnya Pencapaian Belajar yang Maksimal	E3
13	Access	Kemudahan Akses Materi Pembelajaran	AC1
14		Kemudahan Akses Kelas Online	AC2
15		Kemudahan dalam Mengumpulkan Tugas	AC3

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Sebelum diolah lebih lanjut, data akan terlebih dahulu diuji tingkat reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas menggunakan software SPSS dapat dilihat pada Tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability		
	Cronbach's Alpha	N of Items
Importance Score	0,745	5
Satisfaction Score	0,817	5

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Data kuesioner tingkat kepentingan dan kepuasan layanan online learning tingkat SMA/ sederajat dapat dikatakan reliable apabila Cronbach's alpha keseluruhan yang didapatkan dari software SPSS lebih besar dari 0,6. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Cronbach's alpha keseluruhan dari kuesioner tingkat kepuasan siswa terhadap layanan online learning tingkat SMA/ sederajat adalah 0,817, sedangkan Cronbach's alpha keseluruhan dari kuesioner tingkat kepentingan pada layanan online learning tingkat SMA/ sederajat adalah 0,745. Hal ini berarti bahwa Cronbach's alpha keseluruhan dari kuesioner tingkat kepuasan dan kepentingan dalam layanan online learning tingkat SMA/ sederajat sudah lebih besar dari 0,6 sehingga data dari seluruh atribut kuesioner tingkat kepentingan dan kepuasan pelayanan online learning tingkat SMA/ sederajat sudah reliable.

Validitas dari data kuesioner tingkat kepentingan dan kepuasan layanan online learning tingkat SMA/ sederajat ditentukan dengan membandingkan total variabel matriks korelasi dengan nilai pada tabel R.

Total variabel matriks korelasi untuk importance score dapat dilihat pada Tabel 3.1.3.

Tabel 3.1.3 Tabel Matriks Korelasi Importance Score

Correlations							
		T	R	A	E	AC	TOTAL
T	Pearson Correlation	1	.381 ^{**}	.384 ^{**}	.464 ^{**}	.355 ^{**}	.676 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
R	Pearson Correlation	.381 ^{**}	1	.361 ^{**}	.291 ^{**}	.211 ^{**}	.588 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,012	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
A	Pearson Correlation	.384 ^{**}	.361 ^{**}	1	.559 ^{**}	.328 ^{**}	.755 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
E	Pearson Correlation	.464 ^{**}	.291 ^{**}	.559 ^{**}	1	.385 ^{**}	.732 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
AC	Pearson Correlation	.355 ^{**}	.211 ^{**}	.328 ^{**}	.385 ^{**}	1	.633 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,012	0,000	0,000		0,000
	N	143	143	143	143	143	143
TOTAL	Pearson Correlation	.676 ^{**}	.588 ^{**}	.755 ^{**}	.732 ^{**}	.633 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	143	143	143	143	143	143

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Total variabel matriks korelasi untuk satisfaction score dapat dilihat pada Tabel 3.1.4.

Tabel 3.1.4 Tabel Matriks Korelasi Satisfaction Score

Correlations							
	T	R	A	E	AC	TOTAL	
T	Pearson Correlation	1	.575*	.518*	.517*	.304*	.756*
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
R	Pearson Correlation	.575*	1	.475*	.508*	.332*	.721*
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
A	Pearson Correlation	.518*	.475*	1	.643*	.412*	.782*
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
E	Pearson Correlation	.517*	.508*	.643*	1	.403*	.783*
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	143	143	143	143	143	143
AC	Pearson Correlation	.304*	.332*	.412*	.403*	1	.662*
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	143	143	143	143	143	143
TOTAL	Pearson Correlation	.756*	.721*	.782*	.783*	.662*	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	143	143	143	143	143	143

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Suatu variabel akan dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila total masing-masing variabel pada matriks korelasi lebih besar dari nilai tabel R untuk level of significance 5% dan dapat disimbolkan dengan satu asterik (*). Data yang dimiliki memiliki degree of freedom sebesar 141, sehingga nilai pada R tabelnya adalah 0,162. Jika dibandingkan dengan total masing-masing variabel pada matriks korelasi dapat dikatakan bahwa seluruh data telah memiliki validitas yang tinggi. Data yang memiliki validitas sangat tinggi apabila total masing-masing variabel pada matriks korelasi lebih besar dari nilai tabel R untuk level of significance 1% dan dapat disimbolkan dengan dua asterik (**), yaitu sebesar 0,2148. Jika dibandingkan dengan total masing-masing variabel pada matriks korelasi dapat dikatakan bahwa seluruh data juga telah memiliki validitas yang sangat tinggi atau nilai totalnya di atas Rtabel 1%.

Kuesioner yang diisi oleh 143 responden ini memiliki mean, median, modus, varians, dan standar deviasi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5 Data Mean, Median, Modus, Varians, dan Standar Deviasi

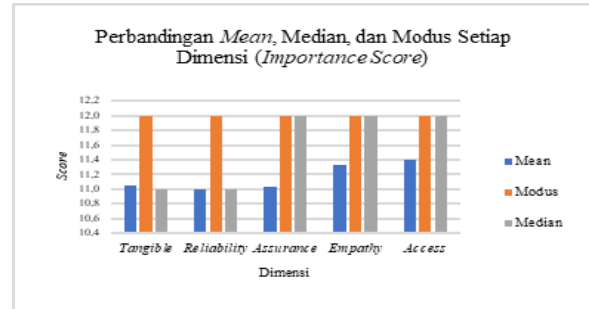
Importance Score					
Σ Resp.	Tangible	Reliability	Assurance	Empathy	Access
143	1580	1572	1577	1620	1629
\bar{x}	11,04895	10,99301	11,02797	11,32867	11,39161
Median	11	11	12	12	12
Mode	12	12	12	12	12
Variance	1,49759	1,62671	2,42175	1,48981	1,57796
St. Deviation	1,22376	1,27543	1,55620	1,22058	1,25617
Satisfaction Score					
Σ Resp.	Tangible	Reliability	Assurance	Empathy	Access
143	1354	1349	1336	1367	1408
\bar{x}	9,46853	9,43357	9,34266	9,55944	9,84615
Median	10	9	9	10	10
Mode	12	12	9	12	12
Variance	3,96907	3,57126	4,26908	4,07919	3,60997
St. Deviation	1,99225	1,88978	2,06618	2,01970	1,89999

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa dimensi tangible, reliability, assurance, empathy, dan access yang diajukan memiliki mean, median, dan modus yang cukup tinggi pada tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Sebaran data terlihat sempit karena nilai

standar deviasi yang diperoleh lebih kecil dari mean dan mendekati 0 sehingga dapat dikatakan data bersifat homogen dan cukup akurat.

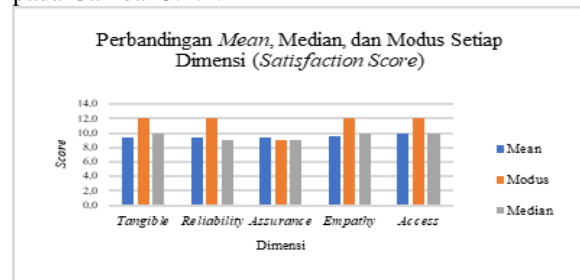
Apabila ditampilkan dalam tabel, maka perbandingan mean, median, dan modus importance score dari setiap dimensi dapat dilihat pada Gambar 3.1.1.



Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Gambar 3.1.1 Grafik Perbandingan Mean, Median, dan Modus Setiap Dimensi Importance Score

Perbandingan mean, median, dan modus satisfaction score dari setiap dimensi dapat dilihat pada Gambar 3.1.2.



Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Mean, Median, dan Modus Setiap Dimensi Satisfaction Score

Dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi pada importance score adalah access dengan nilai rata-rata sebesar 11,39161, sedangkan dimensi yang memiliki rata-rata terendah adalah reliability dengan nilai rata-rata sebesar 10,99301. Dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi pada satisfaction score adalah access dengan nilai rata-ratanya adalah 9,84615, sedangkan dimensi yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah assurance dengan nilai rata-ratanya adalah 9,34266. Hal ini berarti, siswa menganggap dimensi access adalah dimensi yang paling penting dan sudah dirasa paling puas dengan layanan yang diberikan oleh dimensi tersebut.

Dimensi yang memiliki nilai tengah atau median tertinggi pada importance score adalah dimensi assurance, empathy, dan access dengan median 12, sedangkan dimensi yang memiliki median terendah adalah tangible dan reliability dengan median 11. Dimensi yang memiliki nilai tengah atau median tertinggi pada satisfaction score adalah dimensi tangible, empathy, dan access dengan median 10, sedangkan dimensi yang memiliki median terendah adalah reliability dan assurance dengan median 9.

Kelima dimensi pada importance score memiliki modulus yang sama, yaitu 12. Dimensi yang memiliki nilai modulus tertinggi pada satisfaction score adalah tangible, reliability, empathy, dan access dengan nilai modulus 12, sedangkan dimensi yang memiliki modulus terendah adalah assurance dengan nilai modulus 9. Hal ini berarti, sebagian besar siswa menganggap kelima dimensi sangat penting sedangkan siswa/i paling banyak merasakan kepuasan terhadap layanan pada dimensi tangible, reliability, empathy, dan access.

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan dari suatu jasa atau institusi. Nilai perhitungan dijadikan indikator dalam penilaian tingkat kepuasan (Kartikasari, Irham and Mulyo 2018). Perhitungan CSI dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai Mean Importance Score (MIS), Mean Satisfaction Score (MSS), Weight Factors (WF), dan Weight Score (WS). Nilai MIS bisa didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata dari importance level score setiap atribut atau pertanyaan seperti rumus yang dijabarkan (Handriati, Sunaryo and Helia 2015):

$$MIS_i = \frac{\sum_{n=1}^{30} Y_i}{n}$$

Keterangan:

MIS_i = Mean Importance Score untuk pertanyaan ke-i

Y_i = Importance level score pertanyaan ke-i menggunakan Skala Likert

n = Jumlah responden

Nilai MSS bisa didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata dari satisfaction level score setiap atribut seperti rumus yang dijabarkan:

$$MSS_i = \frac{\sum_{n=1}^{30} X_i}{n}$$

Keterangan:

MSS_i = Mean Satisfaction Score untuk pertanyaan ke-i

X_i = Satisfaction level score pertanyaan ke-i menggunakan Skala Likert

n = Jumlah responden

Nilai Weight Factors (WF) dari setiap atribut bisa didapatkan dengan membagi nilai MIS atribut tersebut dengan MIS totalnya, kemudian mengalikannya dengan 100% seperti rumus yang dijabarkan:

$$WF_i = \frac{MIS_i}{\sum_{n=1}^{30} MIS_i} \times 100\%$$

Keterangan:

WF_i = Weight Factors untuk pertanyaan ke-i

MIS_i = Mean Importance Score untuk pertanyaan ke-i

Nilai Weight Score (WS) dari setiap atribut bisa didapatkan dengan mengalikan nilai WF dan MSS atribut tersebut seperti rumus yang dijabarkan:

$$WS_i = WF_i \times MSS_i$$

Keterangan:

WS_i = Weight Score untuk pertanyaan ke-i

WF_i = Weight Factors untuk pertanyaan ke-i

MSS_i = Mean Satisfaction Score untuk pertanyaan ke-i

Nilai CSI dapat dihitung dengan membagi nilai total WS dengan nilai maksimum dari Skala Likert yang digunakan, kemudian mengalikannya dengan 100% seperti rumus yang dijabarkan:

$$CSI = \frac{\sum_{n=1}^{30} WS_i}{HS} \times 100\%$$

Keterangan:

CSI = Customer Satisfaction Index

WS_i = Weight Score untuk pertanyaan ke-i

HS = Nilai maksimum dari Skala Likert yang digunakan

Penilaian Customer Satisfaction Index (CSI) terbagi menjadi beberapa kriteria dari sangat buruk hingga sangat baik dan kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.6.

Tabel 3.1.6 Kriteria Penilaian Customer Satisfaction Index (CSI)

Index Range	Interpretation
X ≤ 64%	Very Poor
64% < X ≤ 71%	Poor
71% < X ≤ 77%	Cause of Concern
77% < X ≤ 80%	Borderline
80% < X ≤ 84%	Good
84% < X ≤ 87%	Very Good
87% < X	Excellent

Sumber: (Justitia, Semiati and Ayuwindi 2019)

Perhitungan CSI untuk mengetahui persentase tingkat kepuasan siswa/i SMA/ sederajat terhadap sistem pembelajaran daring dapat dilihat pada Tabel 3.1.7.

Tabel 3.1.7 Tabel Perhitungan CSI

No	Atribut	Tingkat Kinerja (X)	Tingkat Kepentingan (Y)	MIS (Y)	MSS (X)	WF	WS	CSI
1	T1	471	541	3,783	3,294	6,8%	0,223	79%
2	T2	425	532	3,720	2,972	6,7%	0,198	
3	T3	458	507	3,545	3,203	6,4%	0,204	
4	R1	457	523	3,657	3,196	6,6%	0,210	
5	R2	453	511	3,573	3,168	6,4%	0,203	
6	R3	439	538	3,762	3,070	6,7%	0,207	
7	A1	439	516	3,608	3,070	6,5%	0,199	
8	A2	468	539	3,769	3,273	6,8%	0,221	
9	A3	429	522	3,650	3,000	6,5%	0,196	
10	E1	492	555	3,881	3,441	7,0%	0,239	
11	E2	446	519	3,629	3,119	6,5%	0,203	
12	E3	429	546	3,818	3,000	6,8%	0,205	
13	AC1	470	547	3,825	3,287	6,9%	0,225	
14	AC2	466	541	3,783	3,259	6,8%	0,221	
15	AC3	472	541	3,783	3,301	6,8%	0,224	
Total				55,790	47,650	100,0%	3,18	
Rata-rata				3,719	3,177			

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Hasil perhitungan dengan Metode CSI menunjukkan bahwa nilai CSI kepuasan siswa/i SMA/ sederajat terhadap sistem pembelajaran daring sudah mencapai 79%. Hal ini berarti tingkat kepuasan siswa terhadap sistem pembelajaran daring sudah termasuk ke dalam kategori borderline. Penilaian dari CSI sendiri terbagi menjadi 7 kategori dan borderline berada pada urutan keempat yang menjadikan nilai tersebut nilai tengah sehingga

kepuasan siswa terhadap sistem pembelajaran daring sudah tercukupi tetapi perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan nilai Mean Satisfaction Score (MSS) yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa paling puas dengan jaminan keamanan data (E1) dan merasa paling tidak puas dengan kejelasan guru dalam menjelaskan materi (T2). Hal ini dapat dilihat dari atribut E1 yang memiliki nilai MSS tertinggi, yaitu sebesar 3,441 dan atribut T2 yang memiliki nilai MSS terendah, yaitu sebesar 2,972. Kebanyakan responden merasa puas dengan jaminan keamanan data yang diberikan oleh sekolah mereka. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kasus kebocoran data siswa dari sekolah masih cukup jarang terjadi di Indonesia. Akun yang digunakan juga umumnya dilengkapi dengan kata sandi. Sebagian besar responden merasa kurang puas dengan kejelasan guru dalam menyampaikan materi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh guru ketika mengajar secara online. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan sarana yang dapat digunakan oleh para guru, misalnya papan tulis atau tablet yang dapat digunakan sebagai penggantinya. Salah satu solusi yang dapat dicoba untuk diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah penyediaan papan tulis atau tablet dari pihak sekolah. Keterbatasan lain yang dapat memengaruhi kejelasan materi yang disampaikan oleh guru adalah keterbatasan jaringan. Koneksi jaringan yang kurang baik seringkali membuat kegiatan belajar mengajar secara online menjadi terhambat dan bahkan tidak jarang membuat siswa menjadi tertinggal pelajaran.

Berdasarkan nilai Mean Importance Score (MIS) yang telah diperoleh dapat diketahui juga bahwa sebagian besar responden merasa bahwa jaminan keamanan data (E1) merupakan aspek yang paling penting, sedangkan kesempatan untuk saling berinteraksi (diskusi kelompok, project, dll) (T3) merupakan aspek yang paling tidak penting. Hal ini dapat dilihat dari atribut E1 yang memiliki nilai MIS tertinggi, yaitu sebesar 3,881 dan atribut T3 yang memiliki nilai MIS terendah, yaitu 3,545. Jaminan keamanan data sangat penting untuk melindungi siswa dari ancaman tindakan-tindakan kriminal. Kebocoran data pribadi, seperti alamat dan kontak pribadi dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal seperti penculikan, perampokan, dan sebagainya. Kesempatan untuk saling berinteraksi antar siswa dalam bentuk kerja kelompok atau diskusi kemungkinan besar dinilai kurang penting karena cenderung akan menyulitkan siswa yang tidak dapat bertemu secara langsung.

Setelah mendapatkan nilai MSS dan MIS, perlu dicari nilai WF yang akan menunjukkan seberapa penting suatu atribut apabila dibandingkan dengan keseluruhan atribut. Semakin besar nilai WF suatu atribut, maka akan semakin penting atribut tersebut dan akan semakin besar pengaruhnya

terhadap nilai CSI yang didapatkan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa beberapa atribut yang memiliki nilai WF tertinggi adalah jaminan keamanan data (E1) dengan nilai WF 7,0%, kemudahan akses materi pembelajaran (AC1) dengan nilai WF 6,9%, serta kesesuaian KBM dengan jadwal (T1), layanan kesiswaan yang sopan dan ramah (A2), terjaminnya pencapaian belajar yang maksimal (E3), kemudahan akses kelas online (AC2), dan kemudahan dalam mengumpulkan tugas (AC3) dengan nilai WF 6,8%. Hal-hal ini penting karena dapat membantu memastikan peserta didik mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang harus dimilikinya. Layanan kesiswaan yang sopan dan ramah pun sangat diperlukan di era online learning ini karena banyak informasi-informasi terkait kegiatan belajar mengajar yang perlu didapatkan siswa dari layanan kesiswaan tersebut. Layanan yang ramah dan sopan tidak hanya akan memberikan teladan yang baik bagi siswa, namun juga membuat siswa tidak malas bertanya terkait informasi-informasi sekolah yang tidak mereka pahami. Setelah didapatkan nilai WF, maka selanjutnya dapat dicari nilai WS. Nilai WS akan menunjukkan hasil perkalian antara MSS dengan WF.

Atribut yang memiliki nilai WS tertinggi adalah jaminan keamanan data (E1) dengan nilai 0,24 dan atribut yang memiliki nilai terendah adalah layanan kesiswaan solutif terhadap permasalahan siswa (A3) dengan nilai 0,196. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keamanan data SMA di Indonesia dinilai penting dan telah memberikan kepuasan yang diharapkan oleh siswa, sedangkan layanan kesiswaan yang solutif cukup penting, namun masih belum memberikan kepuasan yang diharapkan oleh siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan layanan kesiswaan yang dimilikinya agar dapat memberikan informasi yang lebih solutif terhadap masalah-masalah yang dialami siswa.

Setelah mendapatkan nilai WS selanjutnya dapat dicari nilai CSI dengan menjumlahkan nilai WS seluruh atribut dan membaginya dengan nilai maksimal skala Likert yang digunakan. Nilai maksimal skala Likert yang digunakan dalam kuesioner ini adalah 4, sehingga akan didapatkan nilai CSI sebesar 79%. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan siswa terhadap layanan yang disediakan oleh SMA/ sederajat di Indonesia termasuk ke dalam kategori borderline. Oleh karena itu, layanan online learning ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang menjadi penyebab utama ketidakpuasan siswa terhadap layanan pembelajaran online dan memperbaikinya.

Hubungan antara kepentingan dan kepuasan dari para responden terhadap pembelajaran daring dianalisis berdasarkan Importance Performance Analysis (IPA). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kepentingan dan

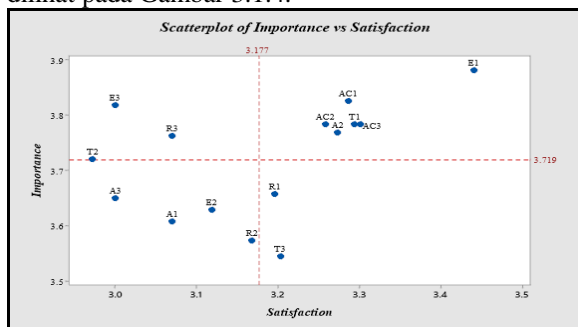
kepuasan yang digambarkan dalam bentuk diagram scatter yang terdiri dari 4 kuadran. Diagram Importance Performance Analysis (IPA) dapat dilihat pada Gambar 3.1.3.



Sumber: (Riyanto and Putera 2022)

Gambar 3.1.3 Diagram Scatter IPA

Hubungan antara kepentingan dan kepuasan dari responden terhadap pembelajaran daring telah dipetakan dalam bentuk Diagram scatter yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.4.



Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Gambar 3.1.4 Diagram Scatter Analisis Kepentingan dan Kepuasan terhadap Pembelajaran Daring

Diagram tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 atribut yang tersebar pada Kuadran A yang terdiri dari T2 atau kejelasan guru dalam menyampaikan materi, E3 atau terjaminnya pencapaian belajar yang maksimal, dan R3 atau kesesuaian materi pembelajaran dengan ujian. Kuadran B terdapat 6 atribut yang terdiri dari T1 atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan jadwal, A2 atau layanan kesiswaan bersikap sopan dan ramah, E1 atau jaminan keamanan data, AC1 atau kemudahan akses materi pembelajaran, AC2 atau kemudahan akses kelas online, dan AC3 atau kemudahan dalam mengumpulkan tugas. Kuadran C terdapat 4 atribut yang terdiri dari A1 atau kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan jadwal, A3 atau guru memberikan kesempatan siswa/i untuk saling berinteraksi, E2 atau hasil belajar yang didapatkan bersifat objektif dan transparan, dan R2 atau kesesuaian materi dengan silabus. Kuadran D terdapat 2 atribut yang terdiri dari T3 atau guru memberikan kesempatan siswa/i untuk saling berinteraksi (diskusi kelompok) dan R1 atau kejelasan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Diketahui 40% dari total atribut yang tersedia telah memiliki tingkat kepuasan yang sangat baik dengan tingkat kepentingan yang tinggi. Atribut yang

termasuk dalam kategori tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sudah sesuai jadwal dan kemudahan dalam mengakses layanan siswa.

Kuadran A menjadi kuadran terpenting yang perlu diperhatikan karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi kepuasan yang dihasilkan masih rendah. Atribut yang termasuk pada kategori tersebut menunjukkan bahwa kejelasan guru dalam penyampaian materi belum jelas dan materi pembelajaran dengan soal ujian belum sesuai sehingga pencapaian belajar para pelajar belum maksimal. Atribut yang terdapat pada Kuadran C tetap harus ditingkatkan kualitas kepuasannya walaupun dengan tingkat kepentingan yang rendah agar kualitas pembelajaran para pelajar tetap terjamin. Selain itu, atribut yang terdapat pada Kuadran D menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran yang diberikan oleh sekolah-sekolah tidak berfokus pada atribut yang penting, walaupun begitu atribut yang terdapat pada kuadran tersebut juga tidak banyak sehingga tergolong cukup baik.

3.2. Pengaruh Tingkat Kepentingan terhadap Tingkat Kepuasan Siswa terhadap Sistem Pembelajaran Daring

Perbedaan rata-rata antara nilai pada atribut tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan dapat dilihat menggunakan uji T value seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1 Hasil Statistik Uji T Value

	TOTAL Importance	TOTAL Satisfaction
Mean	55,79020979	47,65034965
Variance	22,84300207	61,45434847
Observations	143	143
Hypothesized Mean Difference	0	
df	141	
t Stat	10,60176075	
P(T<=t) one-tail	5,12343E-22	
t Critical one-tail	1,651363544	
P(T<=t) two-tail	1,02469E-21	
t Critical two-tail	1,970110062	

Sumber: (Diolah oleh Penulis)

Uji T value juga dilakukan untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah nilainya akan berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Pada kasus ini, nilai rata-rata yang dibandingkan adalah variabel dari tingkat kepuasan setiap atribut dengan tingkat kepentingan setiap atribut dari kuesioner yang telah disebar. Hipotesis yang ditentukan penulis terdiri dari H0 yaitu rata-rata antara tingkat kepuasan dan kepentingan terhadap sistem pembelajaran daring bernilai sama sama, sedangkan H1 yaitu nilai rata-rata antara tingkat kepuasan dan kepentingan terhadap sistem pembelajaran daring tidak sama. Nilai T value didapatkan untuk keseluruhan data baik setiap atribut maupun secara total memiliki nilai T hitung yang nilainya lebih besar daripada T tabel

sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh dari kepentingan para siswa terhadap kepuasan siswa terhadap pembelajaran selama online. Hasil akhir didapatkan T hitung yaitu 10,61 dan T tabel yaitu 1,97 sehingga hasil H1 diterima.

Rata-rata variabel tingkat kepentingan lebih tinggi dibanding rata-rata variabel tingkat kepuasan. Hal ini berarti hal-hal yang dianggap penting belum diikuti oleh performa yang bagus. Siswa masih kurang merasakan kepuasan yang seimbang dengan tingkat kepentingannya.

3.3 Korelasi antar Dimensi pada Importance Score dan Satisfaction Score

Selain dapat digunakan untuk uji validitas, Tabel 3.1.3 dan Tabel 3.1.4 yang didapatkan dari SPSS juga dapat digunakan untuk melihat korelasi antar dimensi yang dimiliki. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ada atribut yang saling berkorelasi satu sama lain dan ada atribut yang tidak berkorelasi satu sama lain. Apabila nilai Pearson Correlation Sig. yang yang didapatkan memiliki satu asterik, maka hal tersebut berarti bahwa kedua dimensi memiliki korelasi yang signifikan pada alpha 5%, sedangkan apabila nilai Pearson Correlation Sig. yang didapatkan memiliki dua asterik, maka hal tersebut berarti bahwa kedua dimensi memiliki korelasi yang signifikan pada alpha 0,01. Apabila tidak terdapat tanda asterik pada nilai Pearson Correlation Sig. yang diperoleh, maka hal tersebut berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara kedua dimensi tersebut.

Atribut yang memiliki korelasi terkuat pada importance score adalah assurance dan empathy, sedangkan atribut yang hanya berkorelasi secara signifikan pada alpha 5% dan memiliki nilai korelasi paling rendah adalah reliability dan access. Atribut yang memiliki korelasi terkuat pada satisfaction score adalah assurance dan empathy, sedangkan atribut yang memiliki nilai korelasi paling rendah adalah reliability dan access. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kemampuan sekolah untuk memberikan informasi yang mudah dimengerti dapat menunjukkan perhatian yang diberikan sekolah kepada siswa, sedangkan usaha sekolah untuk memenuhi janji pada siswa tidak terlalu memengaruhi kemudahan sekolah untuk dijangkau atau dihubungi.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa SMA terhadap sistem pembelajaran online di Indonesia berdasarkan Metode CSI adalah 79% sehingga masih termasuk ke dalam kategori borderline dan perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, rata-rata nilai kepentingan memiliki perbedaan yang signifikan dengan rata-rata nilai kepuasan sehingga kepuasan siswa masih belum seimbang dengan tingkat kepentingannya. Korelasi yang signifikan juga dapat

ditemukan pada setiap variabel apabila alpha yang digunakan 5%.

5. REFERENSI

- Handriati, Annisa Azzahra, Sunaryo, and Vembri Noor Helia. 2015. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Konsumen dengan Menggunakan Metode SERVPERF-IPA-CSI." *Teknoin* 21 (4).
- Harahap, Mahzura, Pristiyo, Junita Lubis, Muhammad Ikhlas, and Agus Anjar. 2021. "Level of Satisfaction of Online Learning in Mediation Lecturer Competence on Learning Motivation." *Budapest International Research and Critics Institute Journal (Budapest Institute)* 4 (3).
- Justitia, Army, Rini Semiati, and Nadhila Ramadhini Ayuwindi. 2019. "Customer Satisfaction Analysis of Online Taxi Mobile Apps." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 5 (1): 85-92.
- Kartikasari, Ratih Dwi, Irham, and Jangkung Handoyo Mulyo. 2018. "Level of Customer Satisfaction Towards Marketing Mix in Indonesia Traditional Market." *Agro Ekonomi* 29 (2).
- Klara, Feni, and Ristiono. 2021. "Identifikasi Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Siswa yang Pembelajarannya dalam Jaringan (Daring) Kelas XI." *Journal for Lesson and Learning Studies* 4 (3).
- Padli, Feri, and Rusdi. 2020. "Respon Siswa dalam Pembelajaran Online Selama Pandemi." *Social Landscape Journal* 1 (3).
- Pavlovic, Milan, Natalija Vugdelija, and Radica Kojic. 2015. "The Use of Social Networks for elearning Improvement." *Hellenic Journal of Music, Education, and Culture (Greek Association of Primary Music Education Teachers)* 6 (3).
- Riyanto, Slamet, and Andi Rahman Putera. 2022. *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*. Sleman: Deepublish.
- Stefano, N. M., N. Casarotto Filho, R. Barichello, and A. P. Sohn. 2015. "A Fuzzy SERVQUAL based Method for Evaluated of Service Quality in the Hotel Industry." *Procedia CIRP* 30 (1).

EXPLORING LEARNERS' SPEAKING APPREHENSION IN AN ENGLISH CLASSROOM AT SMPN 5 LANGSA

oleh:

Shafrida Wati¹⁾, Zahratul Idami²⁾, Anita³⁾

^{1,2,3}Faculty of Education and Teacher Training, IAIN Langsa

¹shafridawaty@iainlangsa.ac.id

²zahra@iainlangsa.ac.id

³Anita@gmail.com

Abstract

This study explores language apprehension in speaking experienced by learners in a foreign language setting. It further investigates factors contributing to the anxiety and types of anxiety they experienced in practicing English. This research deployed qualitative research with a case study type of research. The subject of this study was 25 students in the ninth grade of SMPN5 Langsa. Observation and interviews were used to collect the data. To analyze the data the researchers used an interactive model of analyses suggested by Miles and Huberman (1994) consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings showed that factors that trigger language apprehension among the learners are low self-efficacy, lack of vocabulary and grammar mastery, de-motivated in learning English, and unsupportive language learning environment. Most of the learners experience state anxiety particularly when they are asked to share their thoughts in English spontaneously and to practice the target language in front of the class.

Keywords: *speaking, apprehension, speaking anxiety*

1. INTRODUCTION

Speaking is an activity to express ideas and receive information. In the context of English language learning, acquiring speaking skills allow learners to express themselves and it enables them to practice using language elements such as grammar, pronunciation, and vocabulary. However, most students in a foreign language setting face challenges in speaking due to language inhibition.

One of the language barriers most students encountered in speaking deals with language apprehension. There has been many research conducted about this issue in various aspects (Awan, Azher, & Anwar, 2010; Isnaini, 2018; Mesri, 2012). Anxiety considers a normal experience that reflects anticipation about events that might have negative outcomes for someone (Killu, Marc, & Crundwell, 2016). It is a feeling of anxiety when someone does something. In the context of speaking in the target language, language anxiety indicates an experience that leads to the negative building of emotion and low self-esteem as well as negative self-confidence by the learner at the time of speaking in a target language (He, 2018).

In such a situation, the learners may experience mental blocka, which made them unwilling to speak. Research conducted by (Lathifah, (2015) in the context of Pakistan examines that most the students experience anxiety in English language learning even though they find learning English engaging. In the Indonesian context, the majority of learners also experience foreign language apprehension. Junior high school students, in particular, tend to experience greater anxiety than

those who study at further education levels. The researchers consider that it is due to they start learning English at that level.

A preliminary observation conducted at SMPN 5 Langsa showed that the students exposed are anxious when a teacher asked them to practice English in front of the class during English subjects. Some of them hindered when they were asked to speak, they seemed worried, and being passive. Such phenomena are considered to happen in many English-speaking classes. Speaking is believed as a skill that most frequently evokes anxiety among students. Anxiety in speaking English is one of the highest problems in speaking class. This problem is considered important to be identified to help the learners learn the foreign language effectively, encourage their self-confidence as well as promote communicative competence. Therefore, this study seeks to investigate factors contributing to anxiety in speaking English of the students at SMPN 5 Langsa and the types of anxiety they experience in speaking.

Speaking is a productive aural skill that consists of generating a systematic verbal utterance to convey meaning. It includes aspects such as accuracy, vocabulary, grammar, and pronunciation. All of them are used through controlled and guided activities (Mart, 2012). Speaking also represents the ability to process information that is accepted and responded to through verbal language. This ability is often interpreted as oral communication skills, where the speaker expresses himself through spoken words (Ayu & Ayu, 2016). Moreover, Nation & Newton, (2009) mention that speaking is a part of work or academic study and may engage in presenting reports

or presenting a perspective on a specific matter. Thus, speaking is the basic skill that is significant to learn in a foreign language.

Speaking functions to deliver messages or ideas of formal and sustained transactional and interpersonal conversation in daily life from the speaker to the listener. Richards (2008) made a helpful dissimilarity between the interactional functions of speaking, in which it serves to establish and maintain social relations, and the transactional functions, which focus on the exchange of information. It can use an expanded three-part version; talks as interaction, talk transaction, and talk performance.

Anxiety is a term used to describe an emotion of being panic or worried. Maina, Mauri, & Rossi (2016) define anxiety as fear of failure in certain situations and then being tried, ridiculed, or criticized by others. For this reason, those who experience anxiety often avoid contact with social situations. Furthermore, anxiety is placed among the outcome, negative, activating emotions. In other words, when an individual focuses, a negative emotion that may occur is anxiety (Szyszka, 2017) Anxiety is classified into two kinds: state anxiety and trait anxiety.

State anxiety can be defined as an immediate, subjective emotional state, related to the arousal reaction of the autonomic nervous system in response to certain stimuli such as feelings of conscious tension, fear, nervousness, and worry for example when someone gives a speech or takes an exam (He, 2018). It indicates an anxious reaction or feeling arouse in someone when he faces a particular situation. While trait anxiety is a relatively stable tendency to become anxious in a broad spectrum of situations that are considered threatening or dangerous. In a situation where learners require to use a foreign language, common symptoms they may experience when they are anxious include shaky hands, wobbly legs, stuttering, headache, and a sense of dread (Wati & Afrida, 2022).

Among factors that trigger anxiety is low self-efficacy, unmotivated to learn a foreign language, and lack of knowledge of vocabulary and grammar. Gender could also be a factor that leads to anxiety in using foreign language learners (Herwanto, 2013). as some students may feel anxious to practice English with the opposite sex.

2. METHOD

This study used a qualitative research method with a case study approach. Ardianto, (2011) describes a case study as a type of approach in research that examines one case in-depth, in detail, and comprehensively. This research was conducted at SMP N 5 Langsa in July 2020. The subject of the research was the ninth-grade students of SMPN 5 Langsa which consisted of 25 students.

To collect the data, the researcher used observation and interview. The observation was used to find out factors that trigger anxiety in speaking English. Observation is a data collection method that uses direct or indirect surveillance (Adi, 2010). In this study, the researcher used a non-systematic observation. The use of non-systematic observation aims to prevent the researcher from limiting the framework to be observed.

Meanwhile, an interview was conducted to find out the types of anxiety faced by the students during the speaking activity.

The researchers used a semi-structured interview. The purpose is to allow students to express their opinions and their feeling freely The researcher used an interactive model of analysis that consists of three steps as proposed by Miles & Huberman, (1994) they are reduction of the data, display of the data, and conclusion drawing.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Results of the observation showed that many students were inhibited to practice English during English lessons. When a teacher asked them to describe their colleagues, some of them kept silent and some others tend to use their native language. When the teacher spontaneously called their names to speak in front of the class, they were panic. They could not control their tone of voice and gestures when standing in front of their classmates. They scratched their heads repeatedly and some others tend to cover their face with a book they were holding when speaking.

Moreover, the learners produce many words unclearly. They tend to produce a word and correct its pronunciation repeatedly. The learners also faced difficulties in expressing their thought in the foreign language. There were many hesitations during the speaking uttered. The classroom situation was also unsupportive. When a learner practiced speaking in front of the class, he was being laughed at and mocked anytime he made mistakes and pronounce words unclearly. Obtaining an unsupportive response leads the learners to feel shy and inhibit speaking in the target language.

The result of the interview indicated that most of the students feel anxious to speak in the target language during the English subject. This is due to they had lack of idea on what and how to convey verbal messages in English due inadequate vocabulary. Another reason was that they were afraid of making mistakes while conveying their thought and considered the interlocutors may find it difficult to comprehend their ideas.

Fear of making mistakes is a factor that causes anxiety. Most of the students reluctant to speak as they were afraid of being mocked by friends in the class when they speak English incorrectly. This factor is also called language ego. Brown (2000) explains the language ego become part of self-

identity. Moreover, the problem of recognizing language patterns or grammar is another issue. The learners consider English is a difficult subject as it has typical language rules, which are different from their native language. A learner stated:

" I feel not confident to speak in English because I do not understand how to use the grammar and tenses rules. Those are so difficult."

Another reason was that they did not have an idea when they speak. One of the students said, " I do not know what to say when I have to speak in English, I have no idea." They could not come up with their ideas when they had to say something in English. Research conducted by Hosni (2014) mentioned that most students face speaking difficulties as oral development has largely been neglected in the language classroom.

The researchers also consider that their self beliefs were lacking. One of the students noted, "I often practice speaking English but I still cannot speak spontaneously."

Furthermore, another reason was they were afraid of making mistakes in speaking. A student proposed "I feel shy when making mistakes in speaking because my friends will laugh at me. So I chose not to practice". Being laughed at by friends is a serious threat for students. This often triggers language anxiety. Students assumed that when they were laughed at, they were judged as low achiever students. Moreover, some students also had a lack of opportunity to practice English in the classroom as teachers often ask smarter students. Low achiever students assumed that many other students were more proficient than them in English so they were reluctant to get involved in classroom activities. Students felt they did not have enough opportunity to express their opinions because their speaking skills were not as fluent as other high achiever students were. Besides that, the social environment factor also did not support students in speaking English. Students proposed they did not have friends to practice speaking English. "I cannot speak English because and rarely practice the language as don't have a partner to practice with." Such a situation leads some students to feel demoted in practicing the language as they did not possess supportive environments to practice the target language.

4. CONCLUSIONS

a. Conclusion

Language apprehension is one of the challenges in learning English, especially speaking. Students at junior high school, especially those who learn at SMPN 5 Langsa face several challenges in speaking. Among the factors that trigger the problems are the first is they have low self-efficacy. They assumed to have lower abilities than their classmates. The second is a lack of vocabulary and grammar mastery. The students are reluctant to speak as they find speaking in the target language is

complicated as they have to deal with the language rules. The third is de-motivated in learning English. The students often laughed when they made mistakes. This led the students a lack of self-confidence and inhibit speaking. The fourth is an unsupportive language learning environment. The students often found classroom learning not motivating, as they felt insecure to practice English. Students often tease those who pronounce English unclearly and incorrectly. They also find it difficult to find friends to practice the foreign language to develop their skills.

b. Suggestion

The learners have to allocate particular time to practice English to develop their confidence in speaking English. They also have to be encouraged not to feel afraid of making mistakes and willing to get involved in classroom activities.

The teachers are also required to maintain a supportive language classroom environment. It is also important to facilitate an anxiety free language learning environment and to provide engaging activities to encourage and motivate the students to speak.

5. BIBLIOGRAPHY

- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rekatama Media.
- Awan, R.-U.-N., Azher, M., & Anwar, M. N. (2010). An Investigation Of Foreign Language Classroom Anxiety And Its Relationship With Students' Achievement. *Journal of College Teaching and Learning*, 7(11), 33–40. <https://doi.org/DOI:10.19030/tlc.v7i11.249>
- Ayu, D., & Ayu, P. (2016). Pengaruh Anxiety dalam Speaking Activities. *Bakti Saraswati*, 5(2), 122–132.
- Brown, H.D. (2000) *Principles of Language Learning & Teaching (4th ed.)*, New York: Longman.
- He, D. (2018). *Foreign Language Learning Anxiety in China Theories and Applications in English Language Teaching*. Gateway East, Singapore: Springer Nature Pte Ltd.
- Herwanto, R. (2013). *Factors that Cause Language Anxiety in the English Classroom Speaking Performance in Smp Negeri 4 Pakem Yogyakarta*. Yogyakarta State University.
- Hosni, S. Al. (2014). Speaking Difficulties Encountered by Young EFL Learners. *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)*, 2(6). <https://doi.org/22-30>
- Isnaini, N. (2018). *An Analysis Of Students' Speaking Anxiety Students Of English Foreign Language (Efl) At The Fifth Semester English Department Of Uin Raden Intan Lampung*.

- Raden Intan State Islamic University Lampung.
- Killu, K., Marc, R., & Crundwell, A. (2016). Students with anxiety in the classroom: Educational Accommodations and intervention. *Beyond Behavior*, 25(2), 30–40.
- Lathifah, S. (2015). *Affective Issues in Speaking Faced by English and Accounting Department Students*. Semarang State University.
- Maina, G., Mauri, M., & Rossi, A. (2016). Anxiety and depression. *Journal of Psychopathology*, 22, 236–250.
- Mart, C. T. (2012). Developing Speaking Skills through Reading. *International Journal of English Linguistics*, 2(6), 91–96. <https://doi.org/DOI:10.5539/ijel.v2n6p91>
- Mesri, F. (2012). The Relationship between Gender and Iranian EFL Learners' Foreign Language Classroom Anxiety (FLCA). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(6).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage Publications.
- Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). *Teaching ESL/EFL: Listening and Speaking*. New York: Routledge.
- Richards, J. C. (2008). *Teaching Listening and Speaking*. New York: Cambridge University Press.
- Szyszkka, M. (2017). *Pronunciation Learning Strategies and Language Anxiety: In Search of an Interplay*. Cham: Springer International Publishing AG.
- Wati, S., & Afrida, N. (2022). Higher Education Students' Foreign Language Anxiety: A Case Study at English Education Departement of IAIN Langsa. *Journal Education and Development*, 10(1), 37–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i1>

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL *HYBRID LEARNING* TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MTSN 9 MADIUN

Oleh :

Yeyen Afista¹⁾, Rofiatul Hosna²⁾

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

¹email: yeynafista224@gmail.com

²email: rofiatulhosna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan model hybrid learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen bentuk *Two Group pretest-posttest design*. Rancangan eksperimen yang dilakukan pada dua kelompok berbeda yang mendapatkan latihan yang berbeda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) lembar Observasi; digunakan dalam mengukur keterlaksanaan proses pembelajaran selama penerapan model Hybrid Learning pada mata pelajaran fiqih; dan (2) Butir Tes high order thinking skills (HOTS); digunakan dalam mengukur hasil belajar pada mata pelajaran fiqih. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 9 Madiun sebanyak 185 siswa. Stratified random sampling digunakan dalam penelitian ini karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan memperhatikan strata VIII-1 dan VIII-2 masing-masing 36 siswa. Teknik analisis data menggunakan independent sample t test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model *Hybrid Learning* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTsN 9 Madiun. Siswa yang belajar menggunakan model *hybrid learning* (83,750) memperoleh skor hasil belajar yang lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional (79,766).

Kata kunci: hybrid, learning, model

1. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan tanggap terhadap lingkungan serta perubahan yang terjadi. Pendidikan pada umumnya dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru. Peran guru dalam pendidikan ialah membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang berwawasan luas dan memiliki kualitas dalam menghadapi pendidikan di abad 21 (Laura Greenstein, 2012).

Pendidikan pada saat ini dihadapkan pada tantangan pembelajaran abad 21. Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah (MA) mempunyai peran penting untuk membekali peserta didik agar dapat hidup di era abad 21. Pendidikan abad 21 menekankan pada kecakapan hidup (life skills), keterampilan belajar dan berpikir (learning and thinking skills) dan literasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT literacy) (Bernie Trilling & Charles Fadel, 2009). Beberapa keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai peserta didik yaitu Keterampilan Teknologi Dan Media Informasi.

Keterampilan pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran PAI yang sangat erat berhubungan dengan permasalahan di masyarakat.

Namun, dengan melihat perolehan hasil dari studi PISA (Programme for International Student Assessment) dan hasil UN menunjukkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia masih cukup rendah. Perolehan hasil studi tahun 2018 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke 36 dari 39 negara (ke 4 dari bawah) dengan skor yang diperoleh sebesar 397.

Perkembangan teknologi yang dinamis harus diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai. Pada era digital dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang positif terhadap dunia pendidikan, sebagai contoh munculnya alternatif-alternatif sumber belajar, munculnya berbagai media pembelajaran yang mendukung materi yang diajarkan dan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet dapat mengubah pembelajaran yang dulunya hanya dilakukan di dalam kelas saja, sekarang sudah mulai dapat digantikan dengan pembelajaran online (Shofiyani, 2020). Pembelajaran online merupakan pelaksanaan belajar mengajar yang sepenuhnya dengan bantuan teknologi informasi dan internet serta tidak membutuhkan adanya pembelajaran tatap muka (face to face). Namun, secara umum pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaan pembelajarannya masih mengandalkan pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

MTsN 9 Madiun merupakan sekolah MTs yang teretak di Kabupaten Madiun, berada di lereng pegunungan Wilis bagian utara, Madrasah ini semula bernama MTs GUPPI (Gabungan Usaha Peningkatan Pendidikan Islam). Madrasah ini berangkat dari ide dan pendapat para tokoh di wilayah Kecamatan Kare Kab. Madiun. Ide ini dicetuskan mengingat situasi dan kondisi wilayah Kec. Kare pada waktu itu. Setiap pagi MTsN 9 Madiun diadakan sholat dhuha dan juga pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum memulai pelajaran. Meskipun begitu, tetap saja ada sebagian siswa yang nakal dan kurang termotivasi dalam mengikuti mata pelajaran. Berdasarkan observasi penelitian, masih ada beberapa siswa yang bolos sekolah, berangkat terlambat, pergi ke kantin pada jam pelajaran. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru, beliau mengatakan bahwa terdapat siswa yang memiliki motivasi rendah dalam mengikuti materi pelajaran. Rendahnya motivasi ini tampak dari kebiasaan sering bolos sekolah, berangkat terlambat, pergi ke kantin pada jam pelajaran. Untuk menyadarkan siswa seperti itu, pihak sekolah telah melakukan beberapa tindakan seperti memberikan hukuman ataupun koordinasi dengan guru BP supaya diberikan penyesuaian.

Di MTsN 9 Madiun sebagian guru masih mempertahankan kebiasaan mengajar secara konvensional. Jarang ada guru yang kreatif dalam mengajar. Terbukti tidak ada teknik atau model pembelajaran lain yang diterapkan, kecuali pembelajaran model konvensional. Hal ini berhubungan dengan kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti setiap mata pelajaran, seperti mata pelajaran fiqh. Seharusnya, jika siswa mempunyai motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran, mereka tidak akan membolos, berangkat terlambat atau pergi ke kantin pada jam pelajaran. Kurangnya motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, lama kelamaan menyebabkan terbentuknya sikap dan perilaku negatif pada diri remaja. Mereka akan menjadi remaja nakal yang sulit dinasehati dan memiliki perilaku tidak baik.

Berdasarkan hasil pilot survei di MTsN 9 Madiun, bahwa fenomena yang terjadi pada proses pembelajaran daring tidak diimbangi dengan keterampilan siswa dalam mengakses internet, menguasai media, dan keluwesan dalam pencarian informasi tentang materi pembelajaran. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam suasana pembelajaran daring. Kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah adalah membagi dua sesi pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Sehingga model Hybrid Learning dipandang sebagai alternatif yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran siswa di MTsN 9 Madiun.

Model Hybrid Learning merupakan model pembelajaran dengan mengombinasikan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring (Ariel Ora et al., 2018). Model pembelajaran ini memiliki

berbagai sub-jenis model antara lain model hybrid-creative problem solving dan Hybrid Learning-problem based learning. Model Hybrid-Creative Problem Solving adalah suatu model pembelajaran dengan memusatkan suatu keterampilan yang dimiliki siswa untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ide gagasan dalam pembelajaran daring (Zega, 2019). Penerapan model ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa sehingga hasil belajar siswa dapat diraih secara optimal (Ishak Abdulhak et al., 2018). Tahapan yang perlu dilakukan dalam penerapan model ini ialah dengan memberikan suatu permasalahan kepada siswa, kemudian siswa didorong untuk menemukan fakta dan gagasan yang terdapat dalam masalah tersebut untuk dicari solusi pemecahan secara kreatif selama pembelajaran daring.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan di lapangan yang telah ditemukan dalam pilot survei. Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas disertai dengan hasil penelitian terdahulu, maka dipandang perlu untuk dapat dilaksanakan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Penggunaan Model Hybrid Learning terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh Di MTsN 9 Madiun"

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen bentuk *Two Group pretest-posttest design*. Rancangan eksperimen yang dilakukan pada dua kelompok berbeda yang mendapatkan latihan yang berbeda (Tuckman et al., 1999). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) lembar Observasi; digunakan dalam mengukur keterlaksanaan proses pembelajaran selama penerapan model Hybrid Learning pada mata pelajaran fiqh; dan (2) Butir Tes high order thinking skills (HOTS); digunakan dalam mengukur hasil belajar pada mata pelajaran fiqh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 9 Madiun sebanyak 185 siswa. Stratified random sampling digunakan dalam penelitian ini karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan memperhatikan strata VIII-1 dan VIII-2 masing-masing 36 siswa. Teknik analisis data menggunakan independent sample t test.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang terkumpul diperoleh melalui hasil instrumen tes dan lembar pengamatan selanjutnya dijadikan sebagai data dalam penelitian ini. Hasil pengumpulan data diperoleh dari skor siswa yang menggunakan model Hybrid learning dan skor siswa yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional. Data kemampuan awal diperoleh dari skor pretest kedua kelompok belajar. Perbedaan skor rerata kemampuan awal siswa antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol terlebih dahulu diuji normalitas distribusi dan homogenitas variansi kemudian dianalisis dengan uji independent sample t test melalui software statistik sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Independent Sample T Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig.
Skor pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol	Equal variances assumed	0,709	0,403	1,789	70	0,078
	Equal variances not assumed			1,789	69,55	0,078

Tabel 1. menunjukkan bahwa hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0789, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Deskripsi data dilakukan untuk menganalisis hasil belajar siswa.

• **Data Skor Hasil Belajar**

Hasil belajar diperoleh dari nilai *posttest* kelas eksperimen dan kelas kontrol. *Pretest* dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal kedua kelompok belajar. *Posttest* dilakukan setelah siswa diberikan sebanyak lima pertemuan perlakuan model *hybrid learning* pada kelas eksperimen dan model pembelajaran secara konvensional pada kelas kontrol.

• **Kelas eksperimen**

Data hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen menggunakan instrumen *pretest-posttest* sebanyak 20 butir soal. Skor hasil belajar siswa kelas eksperimen menunjukkan skor terendah untuk pretest sebesar 30, skor tertinggi sebesar 60 dan skor rerata *pretest* kelas eksperimen sebesar 45,278. Skor hasil belajar menunjukkan skor terendah *posttest* sebesar 65, skor *posttest* tertinggi sebesar 100 dan skor rerata *posttest* kelas eksperimen sebesar 82,361. Data yang diperoleh berdasarkan skor *pretest* dan *posttest* kemudian dianalisis melalui *software* statistik sebagaimana Tabel 2.

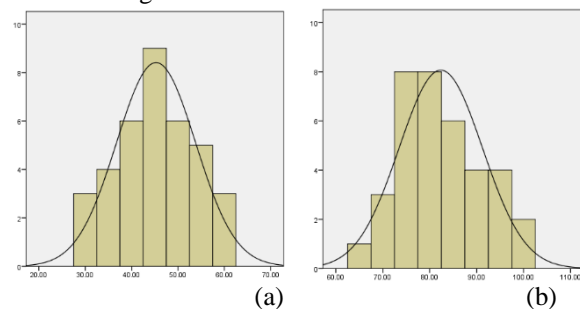
Tabel 2. Tendensi Sentral dan Dispersi *Pretest-Posttest* Kelas Eksperimen

Parameter	Skor Pretest	Skor Posttest
Mean	45,2778	82,3611
Std, Error of Mean	1,42183	1,48386
Median	45,0000	80,0000
Mode	45,00	75,00
Std, Deviation	8,53099	8,90314
Variance	72,778	79,266
Skewness	-0,055	0,289
Std, Error of Skewness	0,393	0,393
Kurtosis	-0,705	-0,607
Std, Error of Kurtosis	0,768	0,768
Range	30,00	35,00

Parameter	Skor Pretest	Skor Posttest
Minimum	30,00	65,00
Maximum	60,00	100,00

Ukuran pemusatan dan skor *pretest* dan *posttest* berupa skor rerata berbeda, untuk skor *pretest* adalah 45,278 dan untuk skor *posttest* adalah 82,361. Ukuran sebaran data ditunjukkan melalui nilai standar deviasi, varians, *skewness* (kemiringan), dan kurtosis (keruncingan). Nilai standar deviasi, varians, *skewness* (kemiringan), dan *kurtosis* (keruncingan) data pretest berturut-turut adalah 8,531, 72,778, -0,055 dan -0,705, sedangkan untuk skor *posttest* berturut-turut adalah 8,903, 79,266, 0,289, dan -0,607.

Skor *pretest* kecenderungan data menuju nilai tinggi karena kemiringan kurva condong ke kanan yang ditunjukkan dengan *skewness* bernilai negatif yaitu -0,055 sedangkan skor *posttest* mempunyai kecenderungan data menuju nilai rendah karena kemiringan kurva condong ke kanan yang ditunjukkan dengan *skewness* bernilai positif yaitu 0,289. Skor *pretest* maupun *posttest* memiliki nilai *kurtosis* di bawah 0,263 maka kurva berbentuk platikurtik/landai, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *pretest* dan *posttest* memiliki sebaran yang tinggi. Distribusi frekuensi berdasarkan *software* statistik disajikan dalam histogram dengan kurva normal sebagaimana Gambar 1.

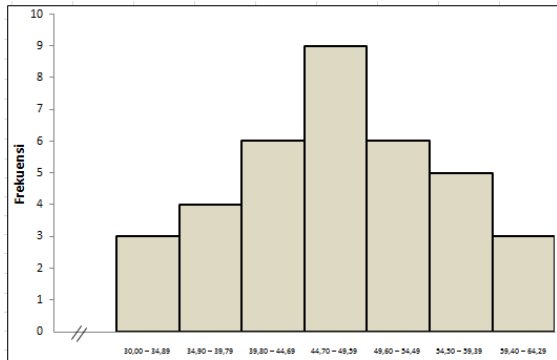


Gambar 1. Histogram dan Kurva Normal Kelas Eksperimen (a) Skor *Pretest*; dan (b) Skor *Posttest*

Tabel distribusi frekuensi data berkelompok skor *pretest* kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 3., sedangkan histogram data berkelompok skor *pretest* kelas eksperimen dapat disajikan pada Gambar 2.

Tabel 3. Frekuensi Skor *Pretest* Kelas Eksperimen

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	30,00 – 34,89	3	8,33 %
2	34,90 – 39,79	4	11,11 %
3	39,80 – 44,69	6	16,67 %
4	44,70 – 49,59	9	25,00 %
5	49,60 – 54,49	6	16,67 %
6	54,50 – 59,39	5	13,89 %
7	59,40 – 64,29	3	8,33 %
Total		36	100 %

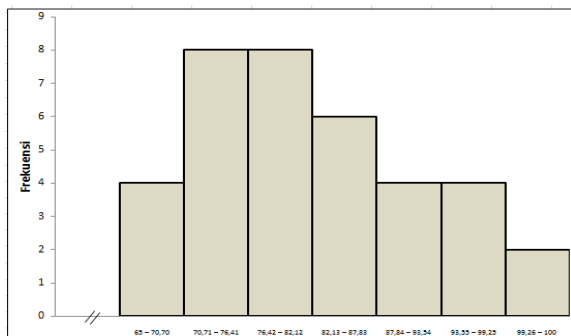


Gambar 2. Histogram Data Berkelompok Skor *Pretest* Kelas Eksperimen

Tabel distribusi frekuensi skor *posttest* kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4., sedangkan histogram data berkelompok skor *pretest* kelas eksperimen dapat disajikan pada Gambar 3.

Tabel 4. Frekuensi Skor *Posttest* Kelas Eksperimen

No	Skor	rekuens	Prosentase (%)
1	65,00 – 70,70		11,11 %
2	70,71 – 76,41		22,22 %
3	76,42 – 82,12		22,22 %
4	82,13 – 87,83		16,67 %
5	87,84 – 93,54		11,11 %
6	93,55 – 99,25		11,11 %
7	99,26 – 100		5,56 %
Total		6	100 %



Gambar 3. Histogram Data Berkelompok Skor *Posttest* Kelas Eksperimen

• **Kelas Kontrol**

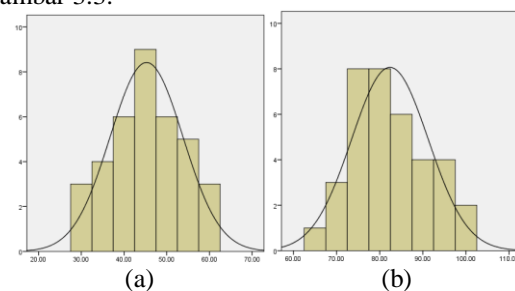
Data hasil belajar yang diperoleh dari kelas kontrol menggunakan instrumen *pretest-posttest* sebanyak 20 butir soal. Skor hasil belajar siswa kelas kontrol menunjukkan skor terendah untuk *pretest* sebesar 25, skor tertinggi sebesar 60 dan skor rerata *pretest* kelas kontrol sebesar 41,528. Skor hasil belajar menunjukkan skor terendah *posttest* sebesar 65, skor *posttest* tertinggi sebesar 95 dan skor rerata *posttest* kelas kontrol sebesar 80,556. Data yang diperoleh berdasarkan skor *pretest* dan *posttest* kemudian dianalisis melalui *software* statistik sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Tendensi Sentral dan Dispersi Skor *Pretest-Posttest* Kelas Kontrol

Parameter	Nilai <i>Pretest</i>	Nilai <i>Posttest</i>
Mean	41,52	80,55
Std. Error of Mean	1,540	1,302
Median	40,0	80,00
Mode	50,	75,
Std. Deviation	9,244	7,817
Variance	85,4	61,1
Skewness	0,0	0,0
Std. Error of Skewness	0,3	0,3
Kurtosis	-0,6	-0,8
Std. Error of Kurtosis	0,7	0,7
Range	35,	30,
Minimum	25,	65,
Maximum	60,	95,

Ukuran pemusatan dan skor *pretest* dan *posttest* berupa skor rerata berbeda, untuk skor *pretest* adalah 41,528 dan untuk skor *posttest* adalah 80,556. Ukuran sebaran data ditunjukkan melalui nilai standar deviasi, varians, *skewness* (kemiringan), dan *kurtosis* (keruncingan). Nilai standar deviasi, varians, *skewness* (kemiringan), dan *kurtosis* (keruncingan) data *pretest* berturut-turut adalah 9,244, 85,456, 0,068 dan -0,691, sedangkan untuk skor *posttest* berturut-turut adalah 7,817, 61,111, 0,043, dan -0,861.

Skor *pretest* dan *posttest* kecenderungan data menuju nilai rendah karena kemiringan kurva condong ke kanan yang ditunjukkan dengan *skewness* bernilai positif yaitu 0,068 dan 0,043. Skor *pretest* maupun *posttest* memiliki nilai *kurtosis* di bawah 0.263 maka kurva berbentuk platikurtik/landai sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *pretest* dan *posttest* memiliki sebaran yang tinggi. Distribusi frekuensi berdasarkan *software* statistik disajikan dalam histogram dengan kurva normal sebagaimana Gambar 3.3.

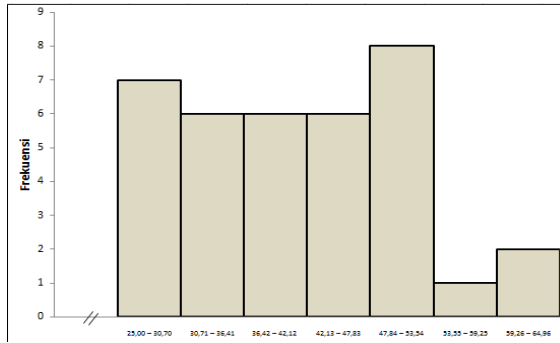


Gambar 3.3. Histogram dan Kurva Normal Kelas Kontrol (a) Skor *Pretest*; dan (b) Skor *Posttest*

Tabel distribusi frekuensi skor *pretest* kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 6., sedangkan histogram data berkelompok skor *pretest* kelas kontrol disajikan pada Gambar 4.

Tabel 6. Frekuensi Skor *Pretest* Kelas Kontrol

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	25,00 – 30,70	7	19,44 %
2	30,71 – 36,41	6	16,67 %
3	36,42 – 42,12	6	16,67 %
4	42,13 – 47,83	6	16,67 %
5	47,84 – 53,54	8	22,22 %
6	53,55 – 59,25	1	2,78 %
7	59,26 – 64,96	2	5,56 %
Total		36	100 %

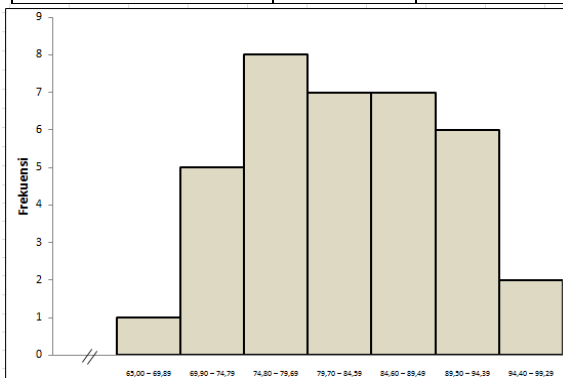


Gambar 4. Histogram Data Berkelompok Skor Pretest Kelas Kontrol

Tabel distribusi frekuensi skor *posttest* kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 7., sedangkan histogram data berkelompok skor *pretest* kelas kontrol disajikan pada Gambar 5.

Tabel 7. Frekuensi Skor *Posttest* Kelas Kontrol

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	65,00 – 69,89	1	2,78 %
2	69,90 – 74,79	5	13,89 %
3	74,80 – 79,69	8	22,22 %
4	79,70 – 84,59	7	19,44 %
5	84,60 – 89,49	7	19,44 %
6	89,50 – 94,39	6	16,67 %
7	94,40 – 99,29	2	5,56 %
Total		36	100 %



Gambar 5. Histogram Data Berkelompok Skor Posttest Kelas Kontrol

• Uji Normalitas Distribusi

Uji normalitas distribusi bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh dari sampel berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji normalitas distribusi meliputi data nilai *pretest* dari kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai syarat uji *independent sample t test*, serta data hasil belajar baik pada siswa.

• Normalitas Distribusi Skor Pretest

Uji normalitas distribusi skor *pretest* dianalisis dengan uji *kolmogorof smirnov* dan *shapiro wilk* melalui *software* statistik. Hasil pengujian normalitas distribusi disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Distribusi Skor Pretest Kelas Eksperimen

Data skor *pretest* kelas eksperimen dan kelas kontrol dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian normalitas distribusi > 0,05. Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas distribusi skor *pretest*

kelas eksperimen yaitu nilai signifikansi pada pengujian *kolmogorof smirnov* adalah 0,161 dan nilai

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Skor Pretest Kelas Eksperimen	,126	36	,161	,951	36	,115
Skor Pretest Kelas Kontrol	,126	36	,162	,954	36	,143

signifikansi pada pengujian *shapiro wilk* adalah 0,115. Hasil uji normalitas distribusi skor *pretest* kelas kontrol yaitu nilai signifikansi pada pengujian *kolmogorof smirnov* adalah 0,162 dan nilai signifikansi pada pengujian *shapiro wilk* adalah 0,143. Hasil uji normalitas distribusi menyimpulkan bahwa skor *pretest* kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.

• Normalitas Distribusi Skor Hasil Belajar Kelas Eksperimen

Uji normalitas distribusi skor hasil belajar kelas eksperimen dianalisis dengan uji *kolmogorof smirnov* dan *shapiro wilk* melalui *software* statistik. Hasil pengujian normalitas distribusi disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Distribusi Skor Hasil Belajar Kelas Eksperimen

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Skor Hasil Belajar Kelas Eksperimen	0,181	36	0,200	0,938	36	0,399

Data skor hasil belajar kelas eksperimen dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian normalitas distribusi > 0,05. Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas distribusi skor hasil belajar kelas eksperimen yaitu nilai signifikansi pada pengujian *kolmogorof smirnov* adalah 0,200 dan nilai signifikansi pada pengujian *shapiro wilk* adalah 0,399. Hasil uji normalitas distribusi menyimpulkan bahwa skor hasil belajar kelas eksperimen berdistribusi normal.

• Normalitas Distribusi Skor Hasil Belajar Kelas Kontrol

Uji normalitas distribusi skor hasil belajar kelas kontrol dianalisis dengan uji *kolmogorof smirnov* dan *shapiro wilk* melalui *software* statistik. Hasil pengujian normalitas distribusi disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Distribusi Skor Hasil Belajar Kelas Kontrol

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Skor Hasil Belajar Kelas Kontrol	0,213	36	0,110	0,924	36	0,286

Data skor hasil belajar kelas kontrol dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian normalitas distribusi > 0,05. Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas distribusi skor hasil belajar kelas kontrol yaitu nilai signifikansi pada pengujian *kolmogorof smirnov* adalah 0,110 dan nilai signifikansi pada

pengujian *shapiro wilk* adalah 0,286. Hasil uji normalitas distribusi menyimpulkan bahwa skor hasil belajar kelas kontrol berdistribusi normal.

• **Pengujian Hipotesis**

Pengujian nilai hipotesis adalah langkah terakhir yang digunakan untuk memutuskan apakah jawaban sementara dari rumusan masalah yang disebutkan pada hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Uji hipotesis statistik yang digunakan adalah berdasarkan uji t independent sample. Kelompok belajar di kelas eksperimen menggunakan model *Hybrid learning*, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran secara konvensional. Bunyi hipotesisnya adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model *Hybrid Learning* terhadap hasil belajar siswa.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model *Hybrid Learning* terhadap hasil belajar siswa.

Hipotesis statistik,

$H_0 : \mu_{HL} = \mu_K$

$H_1 : \mu_{HL} \neq \mu_K$

Keterangan :

μ_{HL} = rerata skor hasil belajar siswa yang menggunakan model *Hybrid learning*

μ_K = rerata skor hasil belajar siswa yang menggunakan model Pembelajaran konvensional

Skor hasil belajar yang diperoleh berdasarkan perlakuan model pembelajaran dianalisis menggunakan *software* statistik. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Uji hipotesis Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig.
Skor Hasil Belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol	Equal variances assumed	0,614	1,579	1,916	70	0,022
	Equal variances not assumed			1,916	69,55	0,022

Tabel 11 tampak bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi 0,022 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model *Hybrid Learning* terhadap hasil belajar siswa. Hasil *mean* sebagai pendukung hipotesis disajikan pada Tabel 12.

Tabel12. *Mean* Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar

Model Pembelajaran	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
Hybrid learning	83,750	1,192	81,371	86,129
Model konvensional	79,766	1,210	77,351	82,181

Tabel 12 tampak bahwa skor *mean* hasil belajar bagi siswa yang menggunakan model *hybrid learning* adalah sebesar 83,750, lebih tinggi

dibanding dengan hasil belajar yang menggunakan model konvensional yaitu sebesar 79,766. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hasil belajar bagi siswa yang menggunakan model *hybrid learning* lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang menggunakan model konvensional.

Pembahasan

Analisis Pembahasan dalam penelitian ini mengulas temuan-temuan dari hasil kajian terkait dengan penelitian yang relevan sebelumnya tentang pengaruh penggunaan model *Hybrid Learning* terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menemukan bahwa Hasil belajar (rerata skor=83,750) siswa yang menggunakan model *hybrid learning* lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang menggunakan model konvensional (rerata skor=79,766). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Kanyarat Cojorn et al., 2014)dalam penelitiannya juga menemukan bahwa model *creative problem solving* memberikan dampak terhadap keefektifan dalam pembelajaran sains siswa tingkat VII.

(Ridong Hu et al., 2017) turut mendukung dari hasil temuannya yang menyimpulkan bahwa penerapan model *creative problem solving* berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dan hasil belajar siswa pada pembelajaran statistika. Sejalan dengan diskusi penelitian di atas, (Asmidar, 2019) menjabarkan temuannya bahwa model *creative problem solving* memberikan hasil belajar siswa yang lebih baik daripada pembelajaran yang diajarkan dengan model konvensional ($t = 9,92 > t_{tabel} = 1,67$).

(Ummah Irma Khoirul & Yuliati Nanik, 2020) dalam risetnya juga menunjukkan bahwa hasil belajar menggunakan model *creative problem solving* lebih tinggi secara signifikan dibanding model pembelajaran konvensional. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Wulandari, 2021) yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran *hybrid learning creative problem solving* lebih efektif diterapkan daripada PBI untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa minat belajar merupakan salah satu faktor intrinsik yang mempengaruhi hasil belajar, minat belajar ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya penerapan model pembelajaran.

Model *hybrid learning* dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran dengan memusatkan keterampilan yang dimiliki siswa untuk memecahkan suatu persoalan dan mengembangkan ide gagasannya melalui pembelajaran daring dan luring sehingga Hasil belajar bagi siswa yang menggunakan model *hybrid learning* lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional.

4. KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model

Hybrid Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqh di MTsN 9 Madiun. Siswa yang belajar menggunakan model hybrid learning (83,750) memperoleh skor hasil belajar yang lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional (79,766).

6. REFRENSI

- Ariel Ora, Roland Sahatcija, & Anxhela Ferhataj. (2018). Learning Styles and the Hybrid Learning: An Empirical Study about the Impact of Learning Styles on the Perception of the Hybrid Learning. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(1), 137–140.
- Asmidar. (2019). The Effect of Creative Problem Solving Model toward Students Learning Activities and Learning Outcomes of Science Learning. *Atlantis Press*, 92–94.
- Bernie Trilling, & Charles Fadel. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times* (1st ed.). In Wiley.
- Ishak Abdulkhak, As'ari Djohar, & Dinn Wahyudin. (2018). The Development of Hybrid Learning Curriculum Model for Improving Teachers Competencies in Teacher Education Institutions in Indonesia and South Korea. *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 3(1), 31–35.
- Kanyarat Cojorn, Numphon Koocharoenpisa, I. Sunee Haemaprasith, & Pramuan Siripankaew. (2014). Effects of the Creative Problem Solving (CPS) learning model on matter and properties of matter for seventh grade students. *วารสาร ศึกษา ศาสตร์*, 35(1), 18–30.
- Laura Greenstein. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning* (1st ed.). Corwin, A SAGE Publications Company.
- Ridong Hu, Su Xiaohui, & Chich-Jen Shieh. (2017). A study on the application of creative problem solving teaching to statistics teaching. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(17), 3139–3149.
- Shofiyani, A. (2020). Peningkatan hasil belajar melalui media blended learning berbasis edmodo. *Jurnal education and development*, 8(1), 45–45. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1446>
- Tuckman, B. W., Worth, F., San, P., New, D., Orlando, Y., San, A., Toronto, A., London, M., & Tokyo, S. (1999). *Conducting Educational Research Fifth Edition*. www.hbcollege.com
- Ummah Irma Khoirul, & Yuliati Nanik. (2020). The Effect of Jumping Task Based on Creative Problem Solving on Students' Problem Solving Ability. *International Journal of Instruction*, 13(1), 387–406.

Wulandari. (2021). The Effectiveness of the Application of Learning Models Creative Problem Solving and Problem Based Instruction: The Impact on Students Mathematics Learning Interest. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 540, 150–155.

Zega, Y. (2019). Model blended learning dalam pembelajaran simulasi digital di SMK negeri 1 Tuhemberua. *Jurnal education and development*, 7(4), 310–310. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1432>

PENGARUH PANDEMI COVID-19 PADA UMKM DI INDONESIA

Oleh :

HerunaTanty¹⁾, Andres²⁾, CorneliusChandraTjhindrawan³⁾, Richardkumoro⁴⁾

¹Fakultas Matematika dan Statistik, Universitas Bina Nusantara

^{2,3,4}Fakultas Teknik, Universitas Bina Nusantara

¹email: herunatanty@yahoo.com

²email: andresvp2134@gmail.com

³email: chandracornelius78@gmail.com

⁴email: Richard.kumoro2@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang sudah melebar luas memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik bukan hanya dari negara-negara besar akan tetapi hampir seluruh negara yang ada di dunia. Negara Indonesia yang didominasi oleh para pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah terhadap sektor yang satu ini karena kontribusi dan dampak para pelaku UMKM terhadap tingkat perekonomian nasional yang cukup besar. Dalam penulisan menggunakan analisis penelitian deskriptif dan inferensial yaitu dalam proses pengambilan datanya yang memerlukan tanggapan dari para pelaku UMKM untuk mengetahui validitas mana saja yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM dan juga mengambil dari berbagai sumber referensi yang berguna untuk bisa mendukung penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian jurnal ini berguna untuk dapat mengetahui bagaimana tantangan ekonomi dan bisnis yang dihadapi oleh para pelaku UMKM akibat pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi untuk membantu para pelaku UMKM dapat bertahan dimasa pandemi COVID-19. Akibat dari pandemic Covid-19 tersebut memberikan dampak yang merugikan cukup besar pada perekonomian yang ada di Indonesia terutama pada para pelaku UMKM.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, UMKM, Solusi Terhadap UMKM

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi secara global mulai dari tahun 2019 akhir dan mulai masuk ke Indonesia pada maret tahun 2020 telah membuat dampak buruk yang begitu besar bagi semua kalangan masyarakat. Pada awal masuknya virus Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, kalangan masyarakat yang terdampak cukup besar khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kurangnya pembeli (customer) yang beraktifitas diluar rumah dan membeli produk yang para pelaku UMKM dagangkan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan para pelaku UMKM. Banyaknya dampak yang tidak baik dari adanya pandemi Covid-19 kepada para pelaku UMKM menjadi dasar penelitian untuk bisa memberikan berbagai macam masukan dan juga strategi-strategi yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Mulai dari [1] pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sosial distancing dari pemerintah pusat sejak Maret 2020 dengan tujuan untuk membatasi pergerakan orang dan atau barang sehingga mengharuskan masyarakat untuk berdiam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Sementara [2] pemerintah Kota melaksanakan PPKM Mikro dan mendorong seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan kesehatan dengan mengikuti aturan lima menit (aturan 5M),

sejumlah jalan diblokir untuk membatasi pergerakan masyarakat selama periode PPKM Mikro. Dan juga Indonesia [3] yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Berdasarkan data dari kementerian koperasi [4] pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak ada di sektor makanan dan minuman. Sektor UMKM yang [5] terdampak selama pandemi COVID-19 ini selain daripada industri makanan dan minuman, ada juga yang terdampak adalah dari sektor industri kreatif dan pertanian. Untuk itu diperlukan strategi [6] bertahan untuk UMKM dengan berupa melakukan perdagangan melalui digital, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan mulai dari kualitas produk [7] dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Strategi lainnya yang [8] bisa membuat para pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan meningkatkan kembali pendapatan para pelaku UMKM adalah dengan melakukan usaha yang direncanakan oleh individu atau kelompok untuk dapat memperoleh tujuan yang diinginkannya dan untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Penggunaan digital juga semakin marak digunakan oleh para pelaku UMKM yang mana [9] selama pandemi Covid-19 para pelaku UMKM telah mendorong diri mereka untuk menggunakan media sosial yang lebih tinggi yang tentunya untuk berkorelasi pada meningkatnya transaksi penjualan para UMKM. Setelah strategi, perlu juga ada usaha untuk membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM dengan cara [10] menganalisis apa saja alat yang dapat diberikan pengetahuan untuk bisa memenuhi kebutuhan bisnis, memberikan perencanaan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelatihan membangkitkan semangat membuka usaha kembali, dan melakukan pelaksanaan untuk mengoptimalkan branding dan juga inovasi produk yang dijual agar dapat bertahan di masa pandemi serta cara melakukan packing yang menarik. Inovasi yang didapatkan juga dapat untuk [11] memotivasi dan kreativitas apa saja yang dapat dilakukan untuk bisa membantu membuka pikiran para pelaku UMKM lebih luas di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal-hal yang sudah dijabarkan diatas tentunya harus ada kebijakan dari pemerintah karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah juga. Masalah pandemi Covid-19 ini [12] pemerintah harus dapat mengambil kebijakan yang tegas dalam hal pemberian bantuan sosial kepada para pelaku UMKM, memperluas pembiayaan modal kerja, diberikannya insentif pajak, dan membuat pemerintah daerah sebagai alat untuk menyangga produk-produk yang dijual oleh para pelaku UMKM dan mengajari cara menggunakan aplikasi digital. Dan juga kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk sebagai sebuah implementasi untuk daya tarik industri sehingga para pelaku UMKM dapat bangkit dan berkembang lagi.

Tujuan dari penelitian tentang pengaruh pandemi COVID-19 pada UMKM Indonesia antara lain:

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada UMKM.
2. Mengetahui program apa yang dapat UMKM lakukan untuk bertahan.
3. Menganalisis pola UMKM yang dapat bertahan pada era COVID-19.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif dan inferensial, yang dimana metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menunjukkan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini berfokus pada penjelasan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan penelitian yang didasarkan pada data sampel dengan jumlah yang lebih sedikit agar kesimpulan yang didapat bersifat lebih umum untuk sebuah populasi. Dikarenakan kami menggunakan kuesioner metode

yg paling cocok adalah metode deskriptif dan inferensial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa pandemi ini yang dirasakan oleh para pelaku UMKM mengalami penurunan drastis sejak kemunculan di tahun 2019, virus COVID 19 ini menyebar sangat cepat di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan tersebarnya virus ini di Indonesia dampaknya adalah perlambatan ekonomi di berbagai sektor yang dirasakan dalam negeri. mulai dari harga bahan baku, hingga harga pangan pun terkena imbasnya. selain itu imbasnya juga terkena pada industri pariwisata di Indonesia yang dimana industri ini merupakan industri yang memiliki efek domino terhadap UMKM. Berdasarkan data yang diolah oleh P2E LIPI, hal ini berdampak pada UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27% sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 1,77%. padahal, UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dimana UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja.

Perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi termasuk pasar ritel. dengan menghadirkan kemudahan berbelanja pada kenyataannya di era digital membuat orang lebih suka menggunakan aplikasi atau aktivitas belanja online. berikut beberapa alasan yang kami dapatkan orang melakukan belanja online:

a. Meminimalkan biaya

Efisiensi dari biaya dan waktu menjadi faktor pertimbangan orang untuk melakukan belanja online. selain lebih murah dari segi biaya, belanja online juga lebih menghemat dari biaya lain seperti parkir, dan biaya akomodasi lainnya.

b. Kurangi kelelahan

Orang atau pelanggan yang melakukan belanja online, orang tidak perlu harus pergi masuk ke dalam mall. tidak perlu macet di jalan dan bisa berbelanja sambil melakukan aktivitas dirumah.

c. Harga bersaing

Berbelanja online membantu orang untuk membandingkan harga lebih gampang dan lebih cepat. tidak perlu membandingkan antara satu dengan toko yang lain yang sangat memakan waktu.

d. Banyak potongan harga/ harga spesial

Sistem berbelanja online merancang sebuah sistem seperti tabungan, dimana apabila kita sering berbelanja maka kita akan makin sering mendapatkan kupon berbelanja berikutnya dengan potongan harga. berbeda dengan konvensional yang hanya memberikan potongan harga pada saat tertentu atau kepada member saja. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan dengan berbelanja online membuat orang lebih memilih untuk berbelanja online dibandingkan harus berbelanja secara konvensional seperti dulu.

namun adanya era baru seperti ini juga menimbulkan banyaknya persaingan sehingga harus ada beberapa langkah yang disiapkan UMKM untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar digital:

- a. Melakukan strategi digital dengan penetrasi terhadap pasar baru seperti Facebook, Google, Youtube, DLL. pentingnya memanfaatkan media sosial merupakan salah satu cara untuk bertahan di pasar digital.
- b. Dapat memindahkan pelanggan lama ke pasar baru secara online sehingga customer lama tidak hilang.
- c. Memiliki strategi yang tepat untuk menanggapi pelanggan digital karena terdapat perbedaan yang sangat jelas dari pasar konvensional dengan pasar digital. Kehadiran pasar online ini tidak hanya membawa dampak buruk. tetapi, juga membawa banyak sisi positif lainnya seperti lebih dekat dengan pelanggan, promosi dapat dilakukan dengan cepat dan murah, dan menjangkau segala pelosok dunia yang terhubung di internet. untuk membantu UMKM dapat terus bertahan hingga bertumbuh di era COVID ini caranya hanya dengan melakukan digitalisasi produk mereka yang disebut sebagai reformasi bisnis era digital.

4. KESIMPULAN

Pada awal masuknya virus Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, kalangan masyarakat yang terdampak cukup besar khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kurangnya pembeli (customer) yang beraktifitas diluar rumah dan membeli produk yang para pelaku UMKM dagangkan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan para pelaku UMKM.

Banyaknya dampak yang tidak baik dari adanya pandemi Covid-19 kepada para pelaku UMKM menjadi dasar penelitian untuk bisa memberikan berbagai macam masukan dan juga strategi-strategi yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dan juga Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.

Strategi lainnya yang bisa membuat para pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan meningkatkan kembali pendapatan para pelaku UMKM adalah dengan melakukan usaha yang direncanakan oleh individu atau kelompok untuk dapat memperoleh tujuan yang diinginkannya dan untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Penggunaan digital juga semakin marak digunakan oleh para pelaku UMKM yang mana selama pandemi Covid-19 para pelaku UMKM telah mendorong diri mereka untuk menggunakan media sosial yang lebih tinggi yang tentunya untuk

berkorelasi pada meningkatnya transaksi penjualan para UMKM.

Setelah strategi, perlu juga ada usaha untuk membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM dengan cara menganalisis apa saja alat yang dapat diberikan pengetahuan untuk bisa memenuhi kebutuhan bisnis, memberikan perencanaan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelatihan membangkitkan semangat membuka usaha kembali, dan melakukan pelaksanaan untuk mengoptimalkan branding dan juga inovasi produk yang dijual agar dapat bertahan di masa pandemi serta cara melakukan packing yang menarik. Inovasi yang didapatkan juga dapat untuk memotivasi dan kreativitas apa saja yang dapat dilakukan untuk bisa membantu membuka pikiran para pelaku UMKM lebih luas di masa pandemi Covid-19 ini.

Masalah pandemi Covid-19 ini pemerintah harus dapat mengambil kebijakan yang tegas dalam hal pemberian bantuan sosial kepada para pelaku UMKM, memperluas pembiayaan modal kerja, diberikannya insentif pajak, dan membuat pemerintah daerah sebagai alat untuk menyangga produk-produk yang dijual oleh para pelaku UMKM dan mengajari cara menggunakan aplikasi digital. Berdasarkan data yang diolah oleh P2E LIPI, hal ini berdampak pada UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27% sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 1,77%.

5. REFERENSI

- Alfin, A. (2021). Analisis strategi UMKM dalam menghadapi krisis di era pandemi COVID-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1543-1552.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRA B I S : Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233-247.
- Azizah, F. N., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A. D., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5.
- Laura Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *jurnal akuntansi dan ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662-669.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan pemerintah sebagai solusi meningkatkan pengembangan UMKM di masa pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141-148.

- Nasution, W. S. L., Nusa, P., & Putra, S. D. (2021). MEMBANGKITKAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta*, 1(1), 9-18.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Windi, W. S. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Kota Bandung. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 9(1), 28-29.

ENGLISH FUN WITH ARDUINO UNO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS ANAK USIA DINI

Oleh :

Ihtiari Prastyaningrum¹⁾, Dian Ratnaningtyas Afifah²⁾, Rengganis Siwi Amumpuni³⁾

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun

¹ihitari.prastya@unipma.ac.id,

²dian.afifah@unipma.ac.id,

³rengganissiwi@unipma.ac.id

Abstrak

Perkembangan era globalisasi menuntut manusia menguasai bahasa asing terutama bahasa inggris. Karena hal ini pembelajaran bahasa inggris sudah dilakukan sejak dini. Pembelajaran bahasa inggris juga dilakukan di lembaga PAUD. Dimana bahasa inggris menjadi muatan lokal. TKIT Nur Mujahidin sebagai salah satu lembaga PAUD juga menerapkan hal yang sama. Namun ada beberapa kesulitan terkait media yang dapat menkolaborasikan antara audio dan visual. Berdasarkan hal ini kami mencoba mengembangkan media pembelajaran *English Fun*. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana data kami peroleh dari observasi dan angket. Proses validasi media juga kami lakukan dengan ahli media, ahli materi dan guru di TK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media *English Fun* cukup valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran di PAUD. Hasil penerapan media *English Fun* menunjukkan bahwa penguasaan materi anak mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: English Fun, Arduino Uno, Kemampuan Bahasa Usia Dini

1. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi saat ini menuntut kita untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai Bahasa komunikasi di seluruh dunia. Pentingnya penguasaan bahasa inggris memunculkan berbagai upaya untuk menguasai Bahasa asing ini lebih awal (Khairani, 2016). Banyak orang tua yang memasukkan anak mereka ke Lembaga kursus Bahasa inggris atau ke sekolah bertaraf internasional dengan harapan anak-anak mereka mampu menguasai Bahasa inggris dengan baik.

Pendidikan formal bagi anak diawali dengan PAUD, dalam hal ini stimulasi dan pendidikan Bahasa inggris tepat bagi anak dilakukan dari sejak dini (Zahroh & Na'imah, 2020). Proses pembelajaran Bahasa inggris di lingkungan pendidikan anak usia dini akan berjalan efektif jika didukung tenaga pendidik (guru) yang mumpuni. Guru harus memiliki kemampuan mengemas pelajaran Bahasa inggris dalam bentuk permainan yang menyenangkan (Sopya, 2018). Karena pada dasarnya anak usia dini lebih menyukai permainan (Krisnawan, 2015). Beberapa guru menerapkan metode menyanyi dan bermain peran dengan kosakata ringan dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa inggris. Metode ini cukup diminati oleh siswa karena bersifat interaktif (Andini, dkk. 2017).

Beberapa penelitian terkait pembelajaran Bahasa inggris pada anak usia dini telah dilakukan. Berbagai media dan metode pembelajaran juga telah

dikembangkan. *Speaking Pyramid*, salah satu media pembelajaran Bahasa inggris anak usia dini yang berisi materi kosakata dalam Bahasa inggris untuk anak usia dini juga cukup efektif digunakan dalam pembelajaran (Astien dan Mozes, 2019). Selain itu metode fonik juga banyak diterapkan dalam proses pembelajaran Bahasa inggris anak usia dini. Metode fonik di lingkungan PAUD digunakan untuk mengenalkan bunyi huruf dan hasilnya cukup efektif (Sharina, 2019).

Salah satu Lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Madun adalah TKIT Nur Mujahidin. Sebagai lembaga PAUD Swasta TKIT memiliki jumlah anak didik yang relatif banyak, kelompok A dan B yang terbagi dalam empat rombongan belajar, masing-masing rombongan belajar sebanyak 15-16 anak sehingga total anak didik kurang lebih 120 anak.

Meskipun TKIT Nur Mujahidin sebagai lembaga pendidikan anak usia yang berbasis agama islam, namun juga tetap melakukan pembelajaran umum. Hal ini dimaksudkan agar murid memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah formal (sekolah dasar). Selain menerapkan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, juga memiliki muatan lokal, yang salah satunya adalah Bahasa Inggris.

Sejauh ini proses pembelajaran bahasa inggris di sekolah ini dilaksanakan dengan berbantuan media gambar. Hal itu membuat seringkali merasa kesulitan untuk mengulangi informasi dari guru karena dari bahasa dan pelafalan yang berbeda. Para

guru belum mampu merancang media yang mampu mengintegrasikan antara visual dan audio dengan jelas.

Berdasarkan kondisi ini, kami mencoba merancang sebuah media pembelajaran yang mampu mengintegrasikan antara visual dan audio dengan jelas. Sehingga mampu meminimalkan kesalahan pelafalan. Media yang kami kembangkan memanfaatkan teknologi Arduino Uno. Dimana kami mendesain media pembelajaran ini dengan menggunakan modul running text. Melalui media ini diharapkan para guru dapat lebih mudah dalam menyampaikan materi pada para siswa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana proses pengambilan data kami lakukan dengan menggunakan angket dan lembar observasi. Observasi kami lakukan dengan melakukan wawancara kepada para guru di TKIT terkait media pembelajaran Bahasa Inggris yang selama ini digunakan di sekolah. Jenis kesulitan yang dihadapi dalam mengajarkan materi Bahasa Inggris, serta antusiasme siswa terhadap pelajaran Bahasa Inggris. Dari hasil observasi dan angket nantinya dapat ditarik kesimpulan apakah media yang kami beri nama *English Fun*, dapat diterima masyarakat dengan baik, serta dimanfaatkan untuk kepentingan Bersama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran *English Fun* berbasis Arduino Uno kami lakukan di TKIT Nur Mujahidin. Materi yang kami ambil untuk media *English Fun* adalah tentang Body dan Number.

Observasi yang kami lakukan di TKIT Nur Mujahidin menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris anak masih sangat kurang. Selain itu media pembelajaran juga belum memadai. Para guru berharap ada media pembelajaran yang interaktif dan mampu mengkolaborasi antara audio dan visual, sehingga anak tidak kebingungan dengan pronunciation yang dilafalkan.

Selanjutnya adalah proses pembuatan media, dimana media kami buat di Laboratorium Pendidikan Teknik Elektro UNIPMA. Media yang telah kami buat kemudian dilakukan validasi oleh tim ahli. Setelah dilakukan validasi oleh tim ahli yaitu ahli media (dari Teknik dan PAUD), ahli materi (dari B. Inggris dan PAUD) serta dari Guru TK, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Validator	Hasil
1.	Ahli Media	
	Validator 1	Valid Media <i>English Fun</i> cukup komunikatif dan sederhana namun berdaya guna tinggi
	Validator 2	Valid Media <i>English Fun</i> layak digunakan di sekolah anak usia dini. Medianya cukup interaktif.
2.	Ahli Materi	
	Validator 1	Valid

		Pemilihan materi tepat dan sesuai dengan porsi anak usia dini
	Validator 2	Valid Pronunciation yang digunakan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak usia dini.
3.	Guru TK	
	Guru 1	Valid Media sangat mudah digunakan
	Guru 2	Valid Media cukup interaktif, apalagi isi materi dalam media dapat kita set sesuai keinginan kita
	Guru 3	Valid Materi sangat sesuai untuk anak usia dini. Pembelajaran didukung media <i>English Fun</i> menjadi lebih menyenangkan karena ada kolaborasi antara visual dan audio

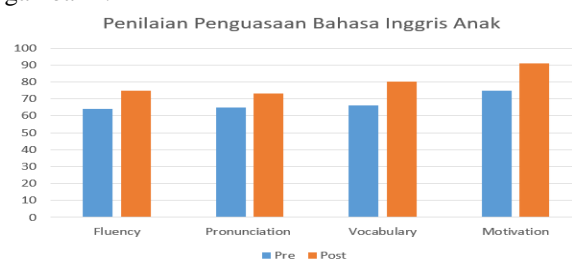
Tabel 1. Hasil validasi media *English Fun*

Berdasarkan hasil validasi baik dari tim ahli maupun pengguna, diperoleh hasil bahwa media *English Fun* valid dan layak digunakan. Kolaborasi antara audio dan visual pada media merupakan kesatuan yang lengkap. Hal ini menjadikan anak tidak rancu atau bingung saat mendengar pelafalan dari sebuah kata dalam Bahasa Inggris. Selain itu media yang menggunakan layar cukup besar menjadikan media ini dapat menjangkau hingga kursi paling belakang siswa, sehingga media dapat digunakan oleh semua siswa baik yang didepan maupun di belakang.

Pengenalan media kepada para guru kami lakukan dengan terlebih dahulu melakukan workshop tentang *English for Young Learner* dan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi Arduino. Selanjutnya guru menerapkan hasil dari workshop dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya berkaitan dengan materi pengenalan bahasa Inggris.

Jika awalnya bahasa Inggris hanya dijadikan sebagai ice breaking, setelah dilaksanakan workshop guru mulai memberikan pada kegiatan pembiasaan pagi. Hal dikarenakan untuk mengenalkan bahasa asing sebaiknya sejak usia dini dan dilakukan melalui proses pembiasaan, sehingga kemampuan anak benar-benar menguasai karena terbiasa bukan terkesan "karbitan" karena terpaksa (Khairani, 2016). Lebih lanjut (Khairani, 2016) menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini sebaiknya dengan menggunakan ilustrasi, model, gambar dan kegiatan lainnya.

Setelah dilakukan workshop dan pelatihan pada guru TKIT, para guru diminta mengajar dan melakukan penilaian terhadap anak. Hasil penilaian penguasaan Bahasa Inggris pada anak dengan menggunakan media *English Fun* ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Penguasaan Bahasa Inggris anak

Aspek yang dinilai adalah fluency yaitu kelancaran dalam mengucapkan bahasa Inggris, pronunciation yaitu ketepatan dalam pelafalan bahasa Inggris, vocabulary yaitu perolehan kosakata yang dimiliki serta motivation yaitu dorongan atau kemauan untuk mengucapkan bahasa Inggris. Dari hasil penilaian di atas diperoleh informasi bahwa secara umum terjadi peningkatan penguasaan bahasa Inggris pada peserta didik TKIT Nur Mujahidin yaitu 11% untuk aspek fluency, 8% untuk aspek pronunciation, 14% untuk aspek vocabulary serta 16% untuk aspek motivation. Memang belum terlihat peningkatan yang signifikan, namun demikian anak-anak ketika proses pembelajaran terlihat sangat antusias, ditunjukkan dengan langsung menebak kata dari gambar yang disajikan pada media kemudian guru mengucapkan bahasa Inggris dari kata tersebut dan dengan bersemangat anak-anak mengulangi kembali kata yang disampaikan oleh guru. Sementara itu, untuk pronunciation anak-anak masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena anak-anak masih dalam taraf perkembangan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah media *English Fun* dinyatakan valid dan dapat digunakan di lingkup sekolah anak usia dini. Penerapan media *English Fun* ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris anak, meskipun peningkatannya belum begitu signifikan.

5. REFERENSI

- Andini Dwi Arumsari, Bustomi Arifin dan Zulidyana Dwi Rusnalasari. 2017. Pembelajaran Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini di kecamatan Sukolilo Surabaya. *Jurnal PG - PAUD Trunojoyo*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, hal 82-170
- Astien Liyana dan Mozes Kurniawan. 2019. Speaking Pyramid sebagai Media Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Anak Usia 5–6 Tahun. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 3 Issue 1 (2019) Pages 225 – 232. DOI: 10.31004/obsesi.v3i1.178
- Khairani, A. I. (2016). Pendidikan Bahasa Inggris untuk Anak Usia Dini. *Digital Repository Universitas Negeri Medan*, 1-12.
- Krisnawan, G. N. A. (2015). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Bahasa Inggris Untuk Anak Berbasis Android. *Konferensi Nasional Sistem Dan Informatika (KNS&I)*, (86), 955–960.
- Sharina Munggaraning Westhisi. 2019. Metode Fonk dalam Pembelajaran Membaca Permulaan Bahasa Inggris Anak Usia Dini. *Jurnal Tunas Siliwangi*. Vol.5 No.1.
- Sopya, I. V. (2018). Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Lagu Pada Anak Usia Dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul*

- Athfal*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.21043/thufula.v1i1.4236>
- Zahroh, S., & Na'imah, N. (2020). Peran Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Jogja Green School. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(1). <https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v7i1>

IMPLEMENTASI *PROBLEM BASED LEARNING* DAN LATIHAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FISIKA

Oleh:

Refka Alian¹⁾, Stepanus Sahala Sitompul²⁾, Muhammad Musa Syarif H³⁾

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

¹Email: refkaalian12@student.untan.ac.id

²Email: Stepanus.sahala.sitompul@fkip.untan.ac.id

³Email: musasyarif@untan.ac.id

Abstract

Survei pendahuluan yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Pontianak menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik tidak memenuhi kriteria ketuntasan dasar sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah model *problem based learning* dan latihan terbimbing dapat membantu peserta didik jurusan teknik las di SMK Negeri 7 Pontianak meningkatkan hasil belajar mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen semu. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X.A dan X.B jurusan teknik las di SMK Negeri 7 Pontianak tahun pelajaran 2021/2022 dengan teknik pengambilan sampel adalah *intact group*. Data penelitian diperoleh melalui data soal *pretest* dan *posttest* dan diolah secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terjadi peningkatan hasil belajar. Hasil belajar pada kelas eksperimen meningkat dari rata-rata kelas 24,86 menjadi 82,40, dengan nilai N-gain sebesar 0,76 berkategori tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol terjadi peningkatan dari nilai rata-rata kelas 26,31 menjadi 77,97 dengan nilai N gain sebesar 0,69 berkategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar lebih efektif dengan implementasi *problem based learning* dan latihan terbimbing.

Kata Kunci: Problem Based Learning, Latihan Terbimbing, Hasil Belajar

1. PENDAHULUAN

Mata pelajaran yang wajib untuk dikuasai salah satunya adalah fisika. Dalam pelajaran fisika peserta didik akan belajar mulai dari hal-hal yang tampak oleh mata (benda makro) sampai dengan hal yang tidak tampak oleh mata secara langsung (benda mikro). Untuk mengerjakan soal-soal fisika maka peserta didik harus menguasai beberapa materi penting dalam ilmu matematika. Oleh karena itu fisika dinilai sulit oleh para peserta didik sehingga banyak yang memperoleh hasil belajar rendah.

Perbedaan tindakan pada peserta didik disebut sebagai hasil belajar (Hamalik, 2007 : 30). Kondisi lingkungan peserta didik dan diri individu tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perolehan belajar peserta didik. Dari perolehan belajar peserta didik dapat ditinjau sejauh mana pemahaman yang diperoleh pada pembelajaran yang telah diikuti.

Rerata perolehan belajarsfisika peserta didik berkategori rendah. Hal ini juga terjadi di SMK Negeri 7 Pontianak. Rendahnya pengetahuan konseptual fisika serta keterampilan matematika merupakan faktor penyebab rendahnya perolehan belajar peserta didik berdasarkan pada temuan pra riset yang telah dilakukan. Kondisi ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang masih monoton. Berdasarkan pada hasil pra riset menunjukkan nilai rerata peserta didik tertinggi sebesar 51,3. Hasil rerata tersebut berada dibawah kriteria ketuntasan minimum. Aspek lain yang berkontribusi terhadap perolehan belajar yang kurang memuaskan adalah

kurangnya bakat matematika peserta didik (Nabillah & Abadi, 2020). Kemampuan matematika yang merupakan kendala peserta didik dalam menyelesaikan soal seperti menyelesaikan perhitungan matematika, mengubah satuan, menggunakan rumus dan menurunkan persamaan.

Pengetahuan konseptual individu dapat ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis masalah (Rizqi et al., 2020; Kawuri et al., 2019). Hal ini telah dibuktikan pada temuan penelitian Rizqi et al (2020) yang menunjukkan bahwa model *problem based learning* mampu meningkatkan pengetahuan konseptual peserta didik dan implementasi *problem based learning* lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan konseptual peserta didik dibandingkan metode ceramah. Pembelajaran yang melibatkan permasalahan kontekstual merupakan karakteristik dari *problem based learning* (Wiley, 2019 : 32). John Dewey yang dikutip dalam Trianto juga menjelaskan *problem based learning* merupakan hubungan dua arah yang disebut interaksi stimulus-respon antara lingkungan dan pembelajaran. *Problem based learning* memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu proses belajar dimulai dari masalah, masalah yang digunakan merupakan masalah yang autentik, dan pembelajaran menggunakan kelompok kecil (Fathurrohman, 2015). Sintaks pembelajaran berbasis masalah diantaranya yaitu mengorganisasikan peserta didik pada persoalan, megorganisasikan pembelajaran peserta didik, menuntun penelitian, menyajikan hasil karya,

dan menganalisis serta melakukan evaluasi penyelesaian masalah (Arends, 2012).

Meningkatkan kemampuan matematis peserta didik dapat dilakukan dengan menggunakan metode latihan terbimbing (Usman, 2022). Hal ini dibuktikan dengan hasil temuan pada penelitian Yasmita (2020) yang menunjukkan bahwa melalui proses latihan secara terbimbing dapat melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan aturan-aturan matematika dalam pengerjaan soal dan melatih keterampilan peserta didik dalam melakukan operasi hitung. Menurut Agus Rianto (dalam Yasmita, 2020 : 164) metode latihan terbimbing adalah metode belajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu kepada peserta didik. Metode ini baik untuk merefleksikan materi pembelajaran (Sarnita, 2018). Metode pembelajaran ini baik diterapkan apabila peserta didik masih belum bisa menemukan sendiri cara dari penyelesaian permasalahan tersebut atau belum terbiasa dengan menggunakan tahap penyelesaian masalah.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi *problem based learning* dan latihan terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik jurusan teknik pengelasan di SMK Negeri 7 Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui efektifitas peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan *problem based learning* dan latihan terbimbing.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan non-equivalent control group design dan pendekatan penelitian quasi-experimental design seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Kelompok	Pretest	Perlakuan	Posttest
KE	O ₁	X ₁	O ₂
KK	O ₃	X ₂	O ₄

Keterangan:

KE = kelompok percobaan (kelompok menggunakan *problem based learning* dan latihan terbimbing).

KK = kelompok pembanding (kelompok menggunakan *discovery learning* (sesuai RPP sekolah)).

O₁ = pretest kelompok percobaan.

O₂ = posttest kelompok percobaan.

O₃ = pretest kelompok pembanding.

O₄ = posttest kelompok pembanding.

X₁ = Perlakuan Pembelajaran Menggunakan *problem based learning* dan latihan terbimbing.

X₂ = Perlakuan pembelajaran menggunakan *discovery learning* (sesuai RPP sekolah).

Kegiatan penelitian berlangsung pada semester gasal tahun ajaran 2021/2022 di SMK Negeri 7 Pontianak. Penelitian ini berlangsung empat pertemuan, dengan setiap pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran. Kumpulan orang-orang dengan ciri-ciri tertentu yang telah diidentifikasi oleh para ahli

sebagai sesuatu yang berharga untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya disebut populasi (Sugiyono, 2012). Kriteria populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu peserta didik belum pernah mendapat pembelajaran pada materi usaha dan energi serta kelas yang digunakan diajar oleh guru yang sama. Berdasarkan kriteria tersebut, peserta didik kelas X jurusan teknik pengelasan serta jurusan teknik komputer dan jaringan merupakan populasi yang terpilih. Jumlah populasi dalam penelitian adalah 145 orang. Setelah mendapatkan populasi dalam penelitian maka selanjutnya adalah menentukan sampel yang akan digunakan. Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan adalah *intact group*. Pada *intact group*, seluruh peserta didik yang menjadi anggota dalam kelas tersebut dijadikan sampel (Sutrisno, 2011). Sementara itu penentuan kelas sebagai sampel dipakai teknik *purposive sampling* dengan syarat kelas dengan rata-rata terendah digunakan sebagai kelas percobaan sedangkan kelas dengan rata-rata tertinggi digunakan sebagai kelas pembanding dan terpilih kelas X. A teknik pengelasan dengan jumlah peserta didik sebanyak 37 orang untuk kelas percobaan dan kelas X.B dengan jumlah peserta didik sebanyak 35 orang untuk kelas pembanding. Sehingga jumlah total sampel dalam penelitian adalah 72 orang. Cara perolehan data yang digunakan adalah cara pengukuran menggunakan soal tes *pretest* dan *posttest* berjumlah empat soal esai. Namun sebelum digunakan maka soal *pretest* dan *posttest* terlebih dahulu dilakukan uji validitas menggunakan validitas Aiken dan reliabelitas soal menggunakan uji *alpha cronbach* dengan hasil uji soal dinyatakan valid dan reliabel.

Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 26. Analisis awal data dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *shapiro wilk*. Sementara itu uji homogenitas dilakukan dengan uji *levene*.

Rumus N-gain dengan persamaan seperti dibawah ini digunakan untuk menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik:

$$g = \frac{S_{posttest} - S_{pretest}}{S_{maksimal} - S_{pretest}}$$

Keterangan:

< g > = nilai n-gain

S_{posttest} = nilai *post-test*

S_{pretest} = nilai *pre-test*

S_{maksimal} = nilai maksimal

Sementara itu, digunakan persamaan uji t untuk menghitung perbedaan peningkatan hasil belajar dengan rumus :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad (\text{Sugiyono, 2019})$$

Keterangan :

\bar{X}_1 = rerata nilai gain kelas percobaan

\bar{X}_2 = rerata nilai gain kelas pembanding
 n_1 = kuantitas peserta didik kelas percobaan
 n_2 = kuantitas peserta didik kelas pembanding
 s_1^2 = varians skor kelompok percobaan
 s_2^2 = varians skor kelompok pembanding

Dengan menggunakan ukuran efek Cohend ditentukan pengaruh pembelajaran berbasis masalah dan latihan terbimbing dengan rumus:

$$d = \frac{\bar{X}_t - \bar{X}_c}{s_{pooled}}$$

(Sugiyono, 2017)

keterangan :

\bar{X}_t = rerata nilai *posttest*

\bar{X}_c = rerata nilai *pretest*

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil

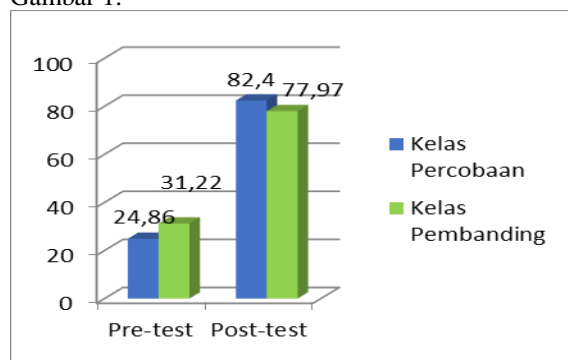
Data perolehan nilai tes awal dan tes akhir digunakan dalam penelitian ini. Memanfaatkan SPSS versi 26 dengan uji shapiro wilk diuji normalitas data serta uji levne di uji homogenitas data yang kemudian dilakukan uji t data hasil *pretest* dan *posttest* untuk perbedaan dan hasil ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Data tes awal dan tes akhir

Uji	Kelompok Percobaan		Kelompok Pembanding	
	Pre	Post	Pre	Post
Normalitas	0,430	0,439	0,528	0,613
Homogenitas	0,209	0,123	0,209	0,123
Uji t	0,348	0,015	0,348	0,015

Sumber: Olahan Data SPSS Versi 26

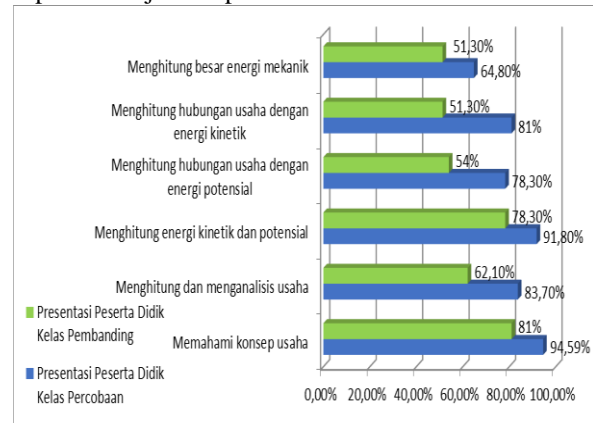
Peserta didik pada kelas percobaan mempunyai rerata nilai *pre-test* sebesar 24,86, sedangkan pada kelas pembanding mempunyai rerata nilai *pre-test* sebesar 31,22. Setelah masing-masing kelas mendapat perlakuan, kelas percobaan dan pembanding mengikuti *posttest*. Kelas percobaan mendapat rerata nilai sebesar 82,40 dan kelas pembanding memperoleh rerata nilai 77,97. Perolehan rerata tes awal dan tes akhir kelas percobaan dan kelas pembanding ditunjukkan Gambar 1.



Gambar 1. Perolehan Rerata Tes Awal dan Tes Akhir.

Sumber: Olahan Data Microsoft Excel

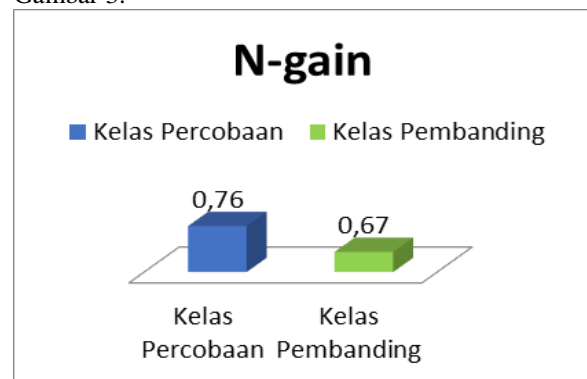
Dalam menyelesaikan soal *posttest* pada kelas percobaan hasil yang diperoleh peserta didik sudah lebih baik dibandingkan dengan kelas pembanding. Hal ini dibuktikan tingginya tingkat persentase peserta didik yang menjawab soal dengan benar seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Representasi Profil Hasil Belajar

Sumber: Olahan Data Microsoft Excel Berdasarkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa persentase hasil belajar tertinggi adalah pada indikator memahami konsep usaha sedangkan persentase hasil belajar terendah adalah pada indikator menghitung energi mekanik.

Hasil analisis data dengan menggunakan rumus N-gain diperoleh hasil peningkatan perolehan belajar di kelas percobaan yaitu sebesar 0,76 dengan kategori tinggi sedangkan peningkatan perolehan belajar kelas pembanding yaitu sebesar 0,69 dalam golongan sedang. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kelas percobaan memperoleh perolehan belajar lebih besar dari pada kelas pembanding. Hasil peningkatan perolehan belajar berdasarkan perhitungan N-gain ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Nilai N-gain

Sumber: Olahan Data Microsoft Excel

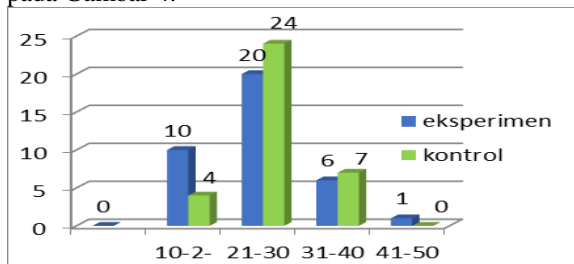
Setelah mengetahui besar nilai peningkatan perolehan belajar peserta didik kelas percobaan dan kelas pembanding maka selanjutnya dilakukan uji t untuk mendapatkan apakah terdapat perbedaan yang substansial pada peningkatan perolehan belajar peserta didik kelas percobaan dan kelas pembanding. Nilai signifikansi didapatkan > 0,05 sebesar 0,296 sehingga ditarik kesimpulan adanya perbedaan

perolehan belajar peserta didik yang substansial antara kelompok percobaan dan pembandingan.

Setelah ditemukan besarnya kenaikan perolehan belajar dan perbedaan antara peningkatan hasil belajar ke dua kelas maka selanjutnya adalah menghitung besarnya pengaruh yang diberikan *problem based learning* dan latihan terbimbing terhadap kenaikan perolehan belajar. Untuk menghitung besarnya pengaruh yang diberikan digunakan perhitungan effect size cohen's. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh pengaruh sebesar 0,74 berkategori tinggi. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil tersebut yaitu *problem based learning* dan latihan terbimbing lebih efektif untuk meningkatkan hasilbelajar peserta didik.

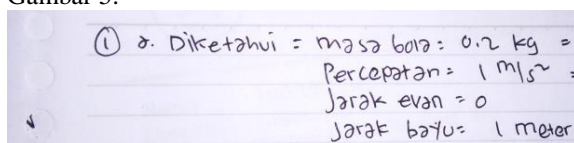
PEMBAHASAN

Data perolehan belajar kognitif peserta didik diperoleh berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 7 Pontianak. Data perolehan belajar ini diperoleh dari nilai tes awal dan tes akhir. *Pretest* merupakan tes awal yang diikuti peserta didik sebelum mendapat perlakuan untuk menemukan kecakapan awal peserta didik. Dari nilai *pretest* yang telah diberikan, sebanyak 100% peserta didik tidak mengalami ketuntasan nilai dimana kriteria ketuntasan minimum yang digunakan sebesar 75. Hal ini dikarenakan peserta didik kelas percobaan maupun kelas pembandingan belum pernah mendapatkan materi pembelajaran tentang usaha dan energi. Pada saat mengerjakan *pretest*, hasil yang diperoleh peserta didik sangat rendah baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol seperti ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Representasi Nilai *Pretest*.
Sumber: Olahan Data Microsoft Excel

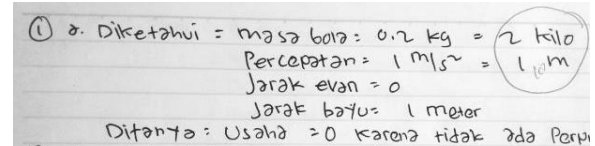
Rendahnya hasil *pretest* dikarenakan dalam menjawab soal *pretest*, peserta didik masih belum mengenal simbol-simbol yang digunakan misalnya massa benda disimbolkan dengan m dan jarak disimbolkan dengan s seperti ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Lembar Hasil Jawaban Nomor 1
Sumber: Jawaban Peserta Didik

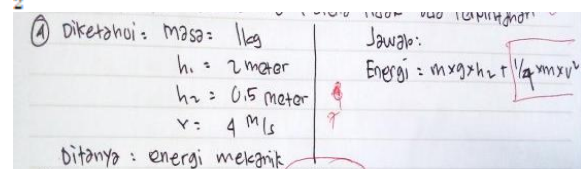
Selain dari pada itu dalam menuliskan yang diketahui masih terdapat besaran yang tidak dituliskan satuannya serta besaran yang satuannya

sudah benar diubah kedalam satuan lain walaupun dalam soal sudah menggunakan satuan internasional dikarenakan peserta didik masih belum memahami satuan yang tepat yang harus digunakan untuk besaran tersebut misalnya pada soal diketahui massa bola sebesar 0,2 kg. Satuan kg merupakan satuan baku untuk besaran massa namun masih terdapat beberapa peserta didik yang mengubah satuan tersebut kedalam satuan lain seperti ditunjukkan pada Gambar 6.



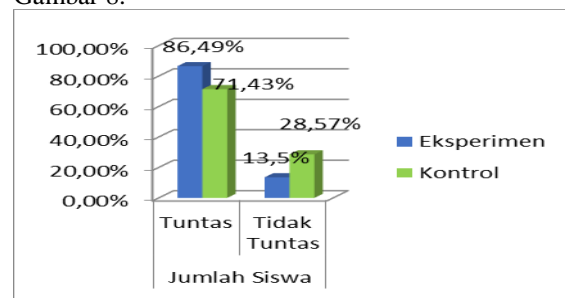
Gambar 6. Lembar Jawaban Nomor 1
Sumber: Jawaban Peserta Didik

Kemudian peserta didik hanya dapat menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dikarenakan peserta didik masih belum mengetahui rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Terdapat beberapa peserta didik yang menuliskan rumus dalam penyelesaian soal namun rumus yang digunakan kurang tepat contohnya pada soal menuliskan rumus energi kinetik peserta didik menuliskan persamaan $\frac{1}{4}mv^2$ yang dimana rumus energi kinetik yang benar adalah $\frac{1}{2}mv^2$ seperti ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Lembar Hasil Jawaban Nomor 4
Sumber: Jawaban Peserta Didik

Setelah peserta didik diberikan *pretest* maka selanjutnya dilakukan proses pembelajaran di masing-masing kelas. Setelah dilakukan tahap pembelajaran maka selanjutnya peserta didik kelas percobaan dan kelas pembandingan mengikuti tes akhir. Dari nilai *post-test* yang telah diberikan terdapat 86,49% peserta didik kelas percobaan yang memperoleh nilai diatas KKM dan 71,43% peserta didik kelas pembandingan yang memperoleh nilai diatas KKM dengan jumlah peserta didik seperti pada Gambar 8.



Gambar 8. Persentase Nilai *Posttest*.
Sumber: Olahan Data Microsoft Excel

Dalam menjawab soal *posttest* peserta didik sudah mulai dapat menyelesaikan soal-soal tersebut secara baik dengan hasil seperti ditunjukkan pada Gambar 8 dan presentasi hasil belajar peserta didik berdasarkan indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Hasil Belajar

No	Indikator Hasil Belajar	Presentasi Peserta Didik Menjawab Benar	
		Kelas Percobaan	Kelas Pembanding
1	Memahami konsep usaha	94,59%	81%
2	Menghitung dan menganalisis usaha	83,7%	62,1%
3	Menghitung energi kinetik dan potensial	91,8%	78,3%
4	Menghitung hubungan usaha dengan energi potensial	78,3%	54%
5	Menghitung hubungan usaha dengan energi kinetik	81%	51,3%
6	Menghitung besar energi mekanik	64,8%	51,3%

Sumber: Olahan Data Microsoft Excel

Meningkatnya nilai *posttest* dikarenakan peserta didik sudah mulai dapat menggunakan satuan. Peserta didik sudah dapat mengetahui satuan apa yang tepat untuk digunakan. Misalnya pada soal diketahui massa bola 0,2 kg. Peserta didik sudah mengetahui bahwa satuan kg merupakan satuan yang tepat untuk besaran massa sehingga tidak terdapat peserta didik yang mengubah satuan tersebut kedalam satuan lainnya. Selain itu peserta didik sudah dapat menuliskan besaran dengan menggunakan simbol besaran, contohnya besaran massa disimbolkan dengan m. Dalam menyelesaikan soal, peserta didik sudah dapat menentukan rumus yang digunakan dengan tepat. Contohnya dalam mengerjakan *pretest* peserta didik kurang tepat dalam menuliskan rumus energi kinetik namun dalam menyelesaikan soal *posttest* peserta didik dapat menuliskan dengan benar rumus dari energi kinetik pada soal.

Indikator tertinggi yang dikuasai peserta didik adalah indikator memahami konsep usaha. Peserta didik dapat dengan baik memahami konsep usaha dikarenakan pada proses pembelajaran, peserta didik melakukan secara langsung percobaan usaha pada bidang miring dan disimulasikan melalui simulasi PhET sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik kapan usaha bernilai nol dan tidak bernilai nol. (Rasyidah et al., 2018)

Indikator kedua dengan persentase tertinggi yaitu pada indikator menghitung energi kinetik dan energi potensial. Dalam proses pembelajaran peserta didik mensimulasikan percobaan energi kinetik dan energi potensial melalui PhET. Kemudian dari hasil yang diperoleh pada simulasi tersebut, peserta didik selanjutnya dibimbing oleh guru untuk membuktikan hasil yang telah didapatkan dengan melakukan perhitungan secara manual. Dengan demikian peserta

didik mengetahui bagaimana cara untuk menghitung besarnya energi kinetik dan potensial secara langsung sehingga dalam pengerjaan soal dapat dikerjakan dengan baik. Jadi dengan diberikannya bimbingan berupa latihan soal dengan menggunakan data dari simulasi PhET dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik (Pane et al., 2022).

Presetase indikator menghitung dan menganalisis usaha adalah sebesar 83,7%. Dalam pengerjaan soal tes, percepatan benda yang sama namun dengan jarak tempuh yang berbeda pada kedua benda membuat peserta didik mengalami kendala dalam menyelesaikan soal (Zafitri et al., 2018). Dalam proses pembelajaran peserta didik telah dibimbing untuk menyelesaikan soal fisika dengan gaya dan massa benda yang berbeda namun jarak tempuh sama. Namun dalam penyelesaian soal peserta didik mengalami kesulitan dalam menggunakan rumus jika divariasikan jarak namun diketahui percepatan benda (Asnawi et al., 2020).

Presentase hasil belajar pada indikator menghitung usaha berdasarkan hubungannya dengan perubahan energi potensial adalah sebesar 78,3%. Dalam proses pembelajaran peserta didik diberikan latihan terbimbing dengan beberapa soal yang divariasikan oleh guru sehingga peserta didik menjadi terlatih dalam penyelesaian soal yang sejenis sehingga peserta didik tidak mengalami kendala dalam penyelesaian tes yang serupa (Pusparini, 2020). Bimbingan yang dilakukan secara bertahap akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan (Sulistyaningsih, 2020). Namun dalam pengerjaan soal tes terdapat beberapa peserta didik yang masih salah dalam menjawab soal dikarenakan peserta didik salah memahami konsep ketinggian dalam soal (Alamsyah et al., 2018).

Presentase hasil belajar pada indikator menghitung usaha berdasarkan perubahan energi kinetik adalah sebesar 81%. Dalam pembelajaran peserta didik diberikan latihan terbimbing dengan menggunakan data dari hasil simulasi pada PhET. Misalkan pada PhET diperoleh hasil energi potensial sebesar 12 Joule maka guru memberikan soal latihan terbimbing berapa usaha yang bekerja pada benda. Guru membimbing bertahap proses penyelesaian soal secara manual sehingga peserta didik mengetahui proses penyelesaiannya (Suardana et al., 2020).

Indikator dengan persentase terendah yang dikuasai peserta didik adalah pada indikator menghitung besar energi mekanik. Hal ini dikarenakan dalam proses pengerjaan soal terdapat banyak peserta didik yang kurang tepat dalam menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Selain itu peserta didik salah dalam mengukur tinggi benda pada benda yang berada dipermukaan tanah dengan benda yang berada pada titik tertentu sebelum sampai kepermukaan tanah (Rahmatina et al., 2018).

Rata-rata presentase hasil belajar peserta didik berdasarkan indikator hasil belajar pada kelas

percobaan sebesar 82,3% sedangkan pada kelas pembandingan sebesar 63%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata presentasi hasil belajar kelas percobaan lebih besar. Hal ini sebagai akibat dari penerapan *problem based learning* dan latihan terbimbing. Pada tahap orientasi peserta didik pada masalah dalam *problem based learning*, guru memberikan fenomena atau masalah yang dijadikan konteks pembelajaran kepada peserta didik misalnya bagaimana memindahkan beban yang beratnya 100 kg ke atas sebuah truk?. Kemudian peserta didik akan memberikan alternatif jawaban masing-masing. Kemudian untuk membuktikan jawaban peserta didik, guru membimbing mereka melakukan percobaan bidang miring dan kemudian simulasi melalui PhET. Guru membimbing tahap-tahap percobaan dan simulasi, membimbing proses pengolahan data yang diperoleh, serta membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja yang diberikan. Kemudian setelah itu peserta didik akan menyampaikan hasil yang telah diperoleh. Setelah itu melalui tahap evaluasi pemecahan masalah, guru kembali memberikan latihan terbimbing dengan menggunakan data pada hasil simulasi. Misalnya pada hasil simulasi diperoleh usaha sebuah benda sebesar 10 Joule kemudian dari data tersebut akan dibuktikan secara perhitungan manual dengan dibimbing secara bertahap oleh guru. Dengan demikian peserta didik akan semakin dapat memahami materi yang diberikan dengan adanya suatu pembuktian (Ramadoan et al., 2019).

Setelah diperoleh hasil *pretest* dan *posttest* maka selanjutnya dapat ditentukan berapa besar kenaikan perolehan belajar pada kelas percobaan dan kelas pembandingan. Rumus *Ngain* digunakan untuk menghitung besarnya kenaikan perolehan belajar peserta didik. Kenaikan perolehan belajar pada kelas percobaan sebesar 0,76 berkategori tinggi, sedangkan nilai *N-gain* yang diperoleh pada kelas pembandingan sebesar 0,69 berkategori sedang, sesuai dengan hasil perhitungan *N-gain*. Pembelajaran usaha dan energi di kelas eksperimen dengan memanfaatkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian dilanjutkan dengan percobaan menggunakan *PhET simulation* telah menghasilkan kenaikan perolehan belajar. Temuan ini sesuai dengan perolehan riset Helyandari dkk (2020) mengenai pengaruh PBL terhadap hasil belajar. Penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan eksperimen melalui PhET dalam tahapan kegiatan pembelajaran akan mempermudah peserta didik untuk mengerti materi yang diajarkan sehingga menyebabkan peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, penyajian situasi kehidupan nyata di kelas memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan memperbanyak pengetahuan dalam kelompok dan individu untuk memecahkan permasalahan

Pada kelas percobaan kenaikan perolehan belajar lebih tinggi dibandingkan pada kelas

pembandingan sehingga sangat penting untuk menentukan ada tidaknya perbedaan perolehan belajar peserta didik kelompok percobaan dan kelompok pembandingan yang substansial atau tidak menggunakan uji t. Berdasarkan analisis uji terdapat perbedaan yang substansial dalam kenaikan perolehan belajar kelas percobaan dan kelas pembandingan berdasarkan hasil uji t melalui aplikasi SPSS versi 26. Adanya keterlibatan peserta didik secara aktif dan dilakukannya latihan secara terbimbing untuk mengasah kemampuan motorik dalam menyelesaikan berbagai kasus atau masalah yang terkait dengan matematika merupakan faktor adanya peningkatan yang signifikan. Hasil ini seperti hasil penelitian Yasmitha (2020) tentang penggunaan metode latihan terbimbing. Dari hasil penelitiannya, peserta didik yang menggunakan lembar latihan terbimbing hasil belajarnya lebih meningkat dikarenakan metode ini dapat mendorong peserta didik untuk mewujudkan kemampuannya dalam bentuk aktivitas nyata serta metode ini mampu melatih kemampuan motorik peserta didik untuk menyelesaikan kasus terkait matematika. Selain itu, penelitian Rais (2020) tentang penggunaan PhET menyatakan bahwa peserta didik kelas percobaan memiliki pengetahuan konseptual yang lebih baik daripada kelas pembandingan sebab peserta didik terlibat langsung dengan penerapan simulasi melalui *phet simulation*.

Penelitian lainnya yang sejalan dengan temuan ini yaitu penelitian Nurvianita et al (2020) yang menyatakan melalui PhET peserta didik dapat meningkatkan kegiatan peserta didik sehingga melalui pengalamannya tersebut akan meningkatkan pengetahuan dalam dirinya.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan dapat dihitung dengan *effect size cohend's*. dari hasil perhitungan *effect size cohend's* diperoleh bahwa besarnya dampak yang disebabkan oleh penerapan *problem based learning* dan latihan terbimbing terhadap kenaikan perolehan belajar adalah sebesar 0,74 berkategori tinggi. Penggunaan pembelajaran berbasis masalah dan latihan terbimbing berdampak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar karena peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam menemukan pengetahuannya sendiri dalam tahapan kegiatan pembelajaran melalui tahapan eksperimen dalam model pembelajaran dengan masalah, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik. Temuan ini konsisten dengan Muliana dkk (2018), yang menemukan bahwa informasi yang diperoleh melalui penemuan diri berdampak positif pada peserta didik, salah satunya adalah pengetahuan itu akan bertahan lama sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak yang baik pula bagi perolehan belajar peserta didik. Selain dari pada itu, peserta didik diberikan latihan bimbingan untuk mengerjakan soal-soal tentang usaha dan energi untuk melatih dan

membiasakan mereka dalam menggunakan rumus-rumus yang tepat, melakukan operasi hitung yang tepat, menggunakan satuan dengan benar dan membiasakan peserta didik dalam langkah-langkah penyelesaian soal. Temuan ini konsisten dengan Pusparini (2020) bahwa dengan diberikannya bimbingan kepada peserta didik untuk mengerjakan tes yang bersifat matematis maka akan membiasakan peserta didik terhadap tahapan penyelesaian soal serta dapat melatih kemampuan peserta didik dalam proses operasi hitung dengan baik. Sehingga disimpulkan bahwa *problem based learning* dan latihan terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan perolehan belajar peserta didik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah diterapkan pembelajaran dengan *problem based learning* dan latihan terbimbing, terdapat peningkatan perolehan belajar pada peserta didik yang belajar memanfaatkan *problem based learning* dan latihan terbimbing (kelas eksperimen) dari rata-rata kelas 24,86 menjadi 82,40 dan peserta didik yang tidak belajar menggunakan *problem based learning* dan latihan terbimbing (kelas Kontrol) dari rata-rata kelas 26,31 menjadi 77,97. Terdapat peningkatan yang cukup besar pada peningkatan perolehan belajar antara kelas percobaan dan kelas pembanding. Penerapan *problem based learning* dan latihan terbimbing lebih efektif dalam menaikkan perolehan (hasil) belajar.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya mengenai implementasi *problem based learning* dan latihan terbimbing dapat memperluas cakupan penelitian, tidak hanya meneliti tentang perolehan belajar namun dapat meneliti tentang berpikir kritis atau yang lainnya.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, A., Mansyur, J., & Kade, A. (2018). Analisis Kesulitan Peserta didik Dalam Memecahkan Soal Fisika Smp Pada Materi Usaha Dan Energi. *JPFT (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online)*, 6(1), 40-43.
- Arends, R. I. 2012. *Learn ing to Teach: 9th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Asnawi, N., Seprapti, A. I., Haqqo, A., Fitriyah, A. L., Kusairi, S., & Parno, P. (2020). PEMAHAMAN KONSEP DAN KESULITAN BELAJAR MAHAPESERTA DIDIK: STUDI LINTAS SEMESTER PADA MATERI USAHA ENERGI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 21(01), 18-29.
- Fathurrohman, Muhammad. (2015). Model-Model Pembelajaran Inovatif; Alternatif Desain Pembelajaran Yang Menyenangkan . : Ar-Ruzz Media.
- Hamalik, Oemar. (2007). *Proses Belajar Mengajar*, Cet. 6. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Helyandari, Baiq Henny., Hairunnisyah S., & Hikmawati. (2020). Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Ma Darul Hikmah Darek Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika*, 5, 10-17
- Jaedun, Amat. (2011). *Metodologi Penelitian Eksperimen*. Makalah Diseminarkan pada Kegiatan In Service I, Yogyakarta.
- Kawuri, M. Y. R. T., Ishafit, I., & Fayanto, S. (2019). Efforts To Improve The Learning Activity And Learning Outcomes Of Physics Students With Using 71 A Problem-Based Learning Model. *IJIS Edu: Indonesian Journal of Integrated Science Education*, 1(2), 105-114.
- Muliana., S Salmiah S., & Jarak P. (2018). Pengaruh Metode Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Sma Negeri 3 Polewali. *Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika*, 36-43
- Nabillah, T., & Abadi, A. P. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Peserta didik. *Prosiding Sesiomadika*, 2(1c).
- Nurvianita, T. (2020). *Penerapan Model Problem Orientation, Observation, Explanation, Elaboraton, and Write Report (PO2E2W) berbantu PhET untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada materi usaha dan energi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pane, J., Nainggolan, A., Nainggolan, J., Silaban, B., & Tumanggor, R. M. (2022). Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Fisika Peserta didik melalui Bimbingan Belajar Menggunakan Alat Peraga Rangkaian Listrik. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 70-77.
- Pusparini, Ni Nyoman. (2020). Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation dengan Metode Latihan Terbimbing untuk Meningkatkan Prestasi Belajar, 4(2), 232-239.
- Rais, A A., L Hakim., & Sulistiawati. (2020). Pemahaman Konsep Peserta didik melalui Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan Simulasi PhET. *Physics Education Research Journal*, 2, 1-8
- Rahmatina, D. I., Sutopo, S., & Wartono, W. (2018). Identifikasi kesulitan peserta didik SMA pada materi usaha-energi. *Momentum: Physics Education Journal*, 8-14.
- Ramadoan, N., Suisworo, D., & Jauhari, I. (2019). Strategi Berpikir Hipotetikal Deduktif Dengan Phet Simulations Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Pada Pembelajaran Fisika Materi Usaha Dan Energi Kelas X Sma. In *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)* (Vol. 3, pp. 206-215).

- Rasyidah, K., Supeno, S., & Maryani, M. (2018). Pengaruh guided inquiry berbantuan phet simulations terhadap hasil belajar peserta didik sma pada pokok bahasan usaha dan energi. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 7(2), 129-134.
- Rizqi, M., Yulianawati, D., & Nurjali. (2020). Efektifitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Fisika Peserta didik. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains (JPFS)*, 3(2), 43-47.
<https://doi.org/10.52188/jpfs.v3i2.80>
- Sarnita, F. (2018). PENERAPAN METODE LATIHAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK SMAN 1 AMBALAWI TAHUN PELAJARAN 2017/2018. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 4(1), 281-284.
- Suardana, I. W. (2020). Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Intruccion Dengan Metode Latihan Terbimbing Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Seni Rupa Peserta didik Kelas Viii A Semester Ii Smp Negeri 1 Tampaksiring Tahun Pelajaran 2018/2019. *Widyadari*, 27(27), 1-19.
- Sudjana, Nana. 2005. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdikarya.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, M. (2020). Penerapan Pengajaran Langsung Berbasis Behaviorisme Melalui Latihan Terbimbing Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika. *Dinamika Pembelajaran*, 2(2).
- Trianto. (2009). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Surabaya : Pt Fajar Interpratama Mandiri.
- Usman, U. (2022). Penerapan Model Discovery Learning Melalui Latihan Soal Terbimbing Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik pada Pokok Bahasan FBB dan KPK di Kelas IV SDN 03/X Tanjung Solok Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022. *Journal on Education*, 4(2), 580-591.
- Yasmita, D. (2020). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian dan Pembagian Bilangan dengan Menggunakan Lembaran Latihan Terbimbing. *Suara Guru*, 4(1), 159-172.
- Wiley Handbooks in Education. (n.d.).
- Zafitri, R. E., Fitriyanto, S., & Yahya, F. (2018). Pengembangan tes diagnostik untuk miskonsepsi pada materi usaha dan energi berbasis adobe flash kelas XI di MA NW Samawa Sumbawa Besar Tahun Ajaran 2017/2018.

ANALISIS PENGEMBANGAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh:

Muhamad Alfi Khoiruman^{1*}, Galih Satriyo²⁾

^{1,2} Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Akademi Kelautan Banyuwangi

¹E-mail: malfikhoiruman@gmail.com

²E-mail: g.satriyoakaba@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kondisi eksisting, faktor penghambat serta mengidentifikasi model yang tepat guna mendukung pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, Guru Pembimbing Khusus, Pengawas PLB dan Pelaku Usaha Mikro. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hambatan sekolah inklusi yaitu sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja, karena sekolah inklusi cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus cenderung di Sekolah Luar Biasa. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif serta pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan. Model yang tepat digunakan dalam implementasi pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan merintis sekolah inklusi *double track* yang memadukan kegiatan akademik dan vokasi serta melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha mikro mengingat pelaku usaha mikro Banyuwangi memiliki berbagai jenis bidang usaha seperti batik, souvenir dan kuliner.

Kata kunci : pendidikan inklusif, ekonomi kreatif

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan dalam pasal 32 bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus karena memberikan landasan yang kuat bahwa mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama pada bidang Pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berusaha memfasilitasi pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan diselenggarakannya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Munculnya pendidikan inklusi diperlukan dengan harapan dapat mendukung siswa-siswi layanan khusus dalam menyalurkan bakat beraneka ragam yang dimiliki oleh siswa-siswi layanan khusus tersebut seperti rekan-rekan umum sebaya mereka. Hal ini sebagai upaya implementasi Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kustawan dalam Wardah (2019) menyatakan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem Pendidikan yang terbuka bagi semua anak serta mengakomodasi kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh anak.

Sebagian orang tua siswa anak berkebutuhan khusus ingin menyekolahkan putra/putrinya di sekolah umum dengan asumsi menyalurkan minat dan bakat di sekolah formal. Praktis pihak sekolah umum tersebut merasa tidak mampu karena belum memiliki persiapan sebagai sekolah inklusif yang harus menyesuaikan diri dan bertindak fleksibel terhadap kebutuhan khusus siswanya. Selain mempersiapkan tenaga pendidik profesional dengan lulusan pendidikan luar biasa yang terdaftar sebagai guru untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif yang memungkinkan juga perlu kerja sama dengan para pelaku usaha mikro. Tujuan diadakannya pelaku usaha mikro untuk turut mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus adalah untuk menyalurkan bakat dan minat serta

kemampuan dan kebutuhan siswa bersangkutan yang kemudian dapat disalurkan kemudian saat praktik lapangan kepada para pelaku usaha mikro. Mengingat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi berkembang semakin pesat yang diiringi dengan semakin pesat pula perkembangan dunia pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.

Delphie dalam Hasyim (2013) menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif dilapangan tidak se-mudah teorinya, banyak kendala dan tantangan yang membutuhkan adaptasi kedua belah pihak antara peserta didik inklusif dengan guru regulernya serta teman regulernya, hal itu biasanya bersumber dari ketidak pahaman pada perilaku peserta didik inklusif yang mempunyai keterbatasan, kemudian guru reguler jika tidak bisa bersikap sabar maka akan berakibat pada kegiatan belajar yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebaiknya setiap guru reguler yang akan dilibatkan dalam pengajaran di kelas inklusif maka harus dibekali tentang psikologi kepribadian peserta didik inklusif.

Menurut Mohammad Takdir Ilahi (2013), tujuan pendidikan inklusi ada dua macam, yakni:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Peran sekolah inklusif diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap capaian pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran yang dimaksud perlu keterlibatan sekolah sumber dan *stakeholders* seperti pelaku usaha mikro guna turut berkontribusi menciptakan sumber daya manusia dari kalangan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan bakat yang dimiliki, tanpa melihat status peserta didik sebagai anak berkebutuhan khusus. Sehingga kelak anak berkebutuhan khusus dapat mandiri dan mampu memberikan kontribusi kepada keluarga kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Lolacono dan Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah regular memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Irvine dan Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka.

Urgensi penelitian ini yaitu selain dapat menambah khasanah kajian ilmu khususnya bagi pendidikan inklusif serta sebagai acuan bagi penelitian yang sejenis diwaktu yang akan datang. Secara terapan penelitian ini memberikan manfaat untuk memberikan referensi model aktivitas pendukung bagi pendidikan inklusi yang sesuai

dengan bakat dan minat khususnya bidang ekonomi kreatif. Sehingga seiring bertambahnya jumlah event Banyuwangi Festival serta bertambahnya pelaku usaha mikro, maka anak berkebutuhan khusus dapat dilibatkan pada fenomena dan momen tersebut.

Tujuan khusus penelitian ini adalah

- a. Mengidentifikasi kondisi eksisting Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi
- b. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implimentasi Pendidikan inklusif berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi
- c. Mengidentifikasi model yang tepat guna mendukung implimentasi Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2012). Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap kondisi eksisting dan fenomena yang muncul berdasar berbagai sumber atau disebut juga sebagai jenis penelitian fenomenologis.

Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekolah Inklusif Kabupaten Banyuwangi dan Sekolah Luar Biasa Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan cara mengambil subjek berdasarkan adanya tujuan tertentu. Informan penelitian ini terdiri dari Pegawai Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Pegawai Bagian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusif, Pengawas PLB Kabupaten Banyuwangi dan Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 salah satunya adalah "Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan lainnya".

Banyuwangi pernah mencanangkan program "Agage Pintar" sejak Agustus 2014, tepatnya tahun ajaran 2014-2015. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Agage pintar merupakan program inovasi pemerintah Banyuwangi dengan mendidik anak berkebutuhan khusus dengan mudah dan merata. Sehingga Bupati Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

menginstruksikan seluruh sekolah segala jenjang pendidikan diharapkan menerima anak berkebutuhan khusus atau menyelenggarakan sekolah inklusif, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi dengan harapan tiap sekolah di Banyuwangi memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagai wujud ramah anak, peduli sesama dan tidak diskriminatif serta pendidikan untuk semua.

Lembaga pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi per tahun 2021 yaitu sejumlah 187 lembaga mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMLB. Jumlah GPK (Guru Pembimbing Khusus) yaitu sejumlah 250 orang, namun sebagian besar berlatar belakang pendidikan non pendidikan luar biasa. Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 1.843 siswa/siswi. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan inklusif jenjang SMA/MA/SMK hanya sekitar 10 lembaga.

Para UMKM Banyuwangi telah tergabung dalam Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik (AKRAB) dan terbagi dalam beberapa kelompok, sehingga para anak berkebutuhan khusus dapat praktik sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan. Beberapa kelompok Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik (AKRAB) tersebut diantaranya:

- 1) ASAWANGI (Kelompok kerajinan bros dan tas)
- 2) PAKARWANGI (Kelompok kerajinan bambu)
- 3) BANYUWANGI CRAFT (Kelompok kerajinan batok kelapa dan kayu)
- 4) ASPOBA (Kelompok makanan olahan)
- 5) PLASMA (Kelompok makanan olahan)
- 6) UMAMI (Kelompok makanan olahan)
- 7) KULKAS (Kelompok Kuliner Khas Banyuwangi)
- 8) KOKAWANGI (Kelompok Kopi Kakao Banyuwangi)
- 9) SEKARJAGAD (Kelompok kerajinan batik)
- 10) AKAWANGI (Kelompok kerajinan kaos)

Anak berkebutuhan khusus di Banyuwangi yang ingin melanjutkan ke sekolah vokasi diarahkan ke Sekolah Luar Biasa karena sudah mengarah ke pembelajaran ketrampilan seperti SMALB Jajag Banyuwangi, SMALB PGRI Banyuwangi. Bila peserta didik berkebutuhan khusus diarahkan melanjutkan ke SMK, maka belum dapat dilakukan karena peserta didik tersebut belum bisa untuk mencapai standar kompetensi dibidang vokasi karena mulai awal peserta didik tersebut belum mendapat persiapan lebih awal di jenjang pendidikan sebelumnya (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB). Sedangkan sekolah inklusif cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menuju perguruan tinggi. Untuk

mengimplimentasikan Permendikbud No. 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik, maka PLB di Banyuwangi sedang merancang sekolah luar biasa vokasi dengan mengadopsi SMK, namun terkendala ketidaksiapan SDM vokasi PLB, sarana prasarana dan biaya. (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB).

Pembahasan

Mengidentifikasi kondisi eksisting Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi

A. Kurikulum dan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum nasional yang digunakan pada satuan pendidikan tersebut yang berlaku secara nasional. Namun implimentasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengingat hambatan peserta didik difabel sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat.

Model kurikulum beberapa sekolah inklusif di Banyuwangi menerapkan kurikulum umum (regular) dan kurikulum modifikasi yaitu perpaduan antara kurikulum umum (regular) dengan kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual), model tersebut diperkuat dengan penelitian Sopandi (2013) bahwa ada 3 (tiga) model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu model kurikulum reguler, model kurikulum akomodatif/adaptif, dan model kurikulum individual atau Program Pendidikan Individual (PPI). Implimentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga disusun dengan menyesuaikan perkembangan anak dengan menambahkan catatan khusus sesuai perkembangan dan kompetensi anak. Dengan demikian, para peserta didik yang berkebutuhan khusus akan sangat terbantu dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar.

Kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual) disusun sesuai dengan perkembangan/kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus masing-masing. Sehingga dapat membantu para peserta didik atau anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi serta menguraikan hambatan belajarnya. Praktis akan berdampak membantu orang tua dan para guru dalam mengembangkan program pendidikan di sekolah maupun di rumah guna kesempurnaan pelaksanaan pendidikan inklusi. Jauhari (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan inklusif perlu menerapkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kurikulum yang Fleksibel
- b) Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel
- c) Sistem Evaluasi yang Fleksibel
- d) Pembelajaran yang Ramah

Berdasar Prosedur Operasional Standar Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,

adaptasi kurikulum dilakukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif didasarkan hasil pada hasil *assesmen* dengan tahapan:

- 1) Guru melakukan identifikasi untuk menemukan anak berkebutuhan khusus
- 2) Guru melakukan asesmen terkait potensi dan hambatan yang dimiliki peserta didik terkait akademik, non akademik dan kondisi lingkungan anak.
- 3) Melakukan adaptasi kurikulum, beberapa kemungkinan yang akan dilakukan dalam proses adaptasi kurikulum
 - a. Penyesuaian pada segi alat, bahan, maupun media pembelajaran. Misal peserta didik pada umumnya menggunakan media visual pada pembelajaran tertentu, maka untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan menggunakan media yang dapat diraba buka visual lagi
 - b. Penambahan atau pengayaan kurikulum
 - c. Penyesuaian dengan menyederhanakan kurikulum yang telah ada, diperuntukkan misal bagi peserta didik dengan hambatan kecerdasan.
 - d. Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan kompetensi yang setara
 - e. Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusif di Banyuwangi didampingi GPK (Guru Pembimbing Khusus) telah mengimplimentasikan salah satu model pendidikan inklusi menurut Vaughn, Bos dan Schumn dalam efendi (yaitu Kelas Reguler dengan Pull Out yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu dikumpulkan ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Teknis pembelajaran sekolah inklusi jenjang SMP di Banyuwangi, pada saat tertentu anak berkebutuhan khusus dikumpulkan di ruang sumber melalui guru pengajar SLB dengan harapan guru sekolah pusat sumber (SLB) berkolaborasi dengan Guru mata pelajaran dapat memberikan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai hambatannya (Wawancara dengan Ketua KKG GPK Bapak Suyanto, S.Pd)

B) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah inklusif di Banyuwangi telah mendapat pendampingan dari Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar jumlah Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif berlatar belakang pendidikan non pendidikan layanan khusus dengan jumlah sebesar 250 GPK.

Untuk memfasilitasi GPK yang berlatar pendidikan non pendidikan layanan khusus, maka Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan rutin mengadakan pelatihan setiap tahunnya seperti Pelatihan proses pembelajaran bagi GPK yaitu pembuatan RPP, Pengembangan Pembelajaran Individual (PPI). Namun ada juga pelatihan bagi

calon guru GPK dengan jangka waktu 80 jam (Wawancara dengan Bapak Misnanto selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Banyuwangi). Guru pendamping khusus selain diberi pelatihan proses pembelajaran juga diberi pelatihan vokasional berupa pelatihan *life skill* bagi GPK seperti *cooking class*, souvenir hantaran pernikahan dan pelatihan-pelatihan bernilai ekonomis yang harapannya dapat menyalurkan pelatihan tersebut kepada anak didiknya, sehingga kedepannya anak berkebutuhan tersebut dapat mandiri dan mampu menciptakan produk bernilai ekonomi. Sedangkan pelatihan assesment digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak. (Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.Pd selaku Ketua KKG GPK)

Pelatihan dan workshop tersebut dilakukan agar sekolah mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan peserta didik siswa difabel dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik di sekolahnya. Selain pelatihan atau workshop, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan insentif bagi Guru Pendamping Khusus tersebut sesuai Perbup no 68 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi bahwa pemerintah kabupaten sesuai kemampuan anggaran dapat memberikan insentif kepada Guru Pendamping Khusus. Hal ini dilakukan guna memotivasi semangat guru menyusun program dan pelayanan kepada siswa (Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.Pd selaku Ketua KKG GPK)

Pelaksanaan sekolah inklusif tidak hanya mengandalkan peran dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberhasilan sekolah inklusif dalam mendidik anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan interaksi kolaborasi dengan pihak orang tua. Kolaborasi ini diperlukan guna mengelola keberagaman kebutuhan peserta didik, mengingat beberapa Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif juga merupakan tenaga pendidik yang bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) bahwa sekolah juga harus bekerja sama dengan komunitas sekolah seperti Guru, Guru pendamping kelas, orang tua, siswa, tim administartif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.

C) Peserta Didik

Proses seleksi saat penerimaan peserta didik baru, sekolah inklusif menerapkan beberapa jalur baik melalui jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur inklusif. Namun untuk anak berkebutuhan tersebut melalui jalur inklusif.

Menurut Kadir (2015), peserta didik dalam sekolah inklusif dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pendidikan Khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual
- 2) Pendidikan Khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual

Sebagian besar peserta didik sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi adalah Anak Berkebutuhan Khusus disertai hambatan kognitif dan intelektual.

Sistem penilaian anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan format penilaian yang dimodifikasi. Proses modifikasi diperlukan supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil dan kondisi belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan *assesment* pada akhir jenjang pendidikan guna mendapat penilaian akademik dari guru maupun non akademik dengan tujuan mempersiapkan anak berkebutuhan tersebut ke jenjang pendidikan berikutnya. (Wawancara dengan Bapak Misnanto, S.Pd selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Banyuwangi)

Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

1. Semua mata pelajaran dan program kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif dilakukan penilaian secara autentik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Lingkup penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan
 - a. Penilaian sikap menggunakan alat evaluasi : observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal
 - b. Penilaian pengetahuan menggunakan : tes tulis, tes lisan, portopolio dan penugasan
 - c. Penilaian ketrampilan menggunakan : performance, produk, proyek dan portopolio
3. Kondisi tertentu, pelaksanaan penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif harus mengalami modifikasi. Proses modifikasi diperlukan supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Berikut beberapa petunjuk umum pelaksanaan modifikasi penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif, terkait dengan 5 aspek utama yaitu:
 - a) Isi

Isi atau materi soal-soal penilaian yang diujikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus pada dasarnya sama dengan soal-soal yang digunakan oleh peserta didik reguler. Namun pada kondisi tertentu dimungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti substansi ujian yang berbeda

Contoh : Ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus mengalami dengan hambatan pendengaran mengalami gangguan komunikasi mengikuti ujian menyanyi sebaiknya parameternya diganti dengan membuat syair atau puisi atau ujian seni pertunjukkan.

b) Cara

Modifikasi dalam cara pelaksanaan penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga proses penilaian mudah diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus

Contoh : Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan lamban belajar membutuhkan soal-soal ujian yang menggunakan kalimat sederhana (maksimal 8 kata). Peserta didik dengan hambatan penglihatan mengikuti ujian lari jarak pendek, maka mereka tetap berlari, tetapi dibantu dengan tali sebagai pengarah supaya menuju garis finish secara tepat, dengan standar penilaian yang berbeda

c) Alat

Beberapa peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan peralatan khusus untuk mendukung kemudahan dan kelangsungan penilaian

Contoh : Peserta didik dengan hambatan penglihatan membutuhkan peralatan bacat tulis *braille* ketika penilaian. Soal-soal dan jawaban akan disajikan dalam tulisan *braille*

d) Waktu

Konsekuensi modifikasi penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka memerlukan waktu tambahan dalam mengerjakan soal-soal ujian

Contoh : Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan waktu tambahan untuk mengerjakan soal-soal ujian dari pada peserta didik reguler

e) Tempat

Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan bersama dengan peserta didik pada umumnya atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus Contoh : misal di kelas tidak tersedia komputer padahal peserta didik membutuhkannya, maka kegiatan penilaian dapat dilaksanakan di tempat di mana tersedia peralatan komputer

D) Sarana dan Prasarana

Penyelenggaran sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braile untuk anak tuna netra, dan sebagainya (Yusraini, 2013).

Keberadaan sarana dan prasarana bagi sekolah inklusif khususnya bagi anak berkebutuhan khusus sangat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pemkab Banyuwangi pernah memberi dana bagi sekolah inklusif yang dikhususkan untuk aksesibilitas untuk pembangunan jalur kursi roda dan pembangunan toilet khusus anak berkebutuhan khusus. Namun bila sarana dan prasarana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tidak dimiliki oleh pihak sekolah inklusi, maka akan bekerjasama dengan pihak pusat sumber (SLB). Idealnya aksesibilitas sekolah inklusi perlu menyesuaikan dengan keterbatasan anak

berkebutuhan khusus (Wawancara dengan Bapak Misnanto, S.Pd selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Bayuwangi)

Faktor penghambat dalam implimentasi Pendidikan inklusif berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan birokrasi pemerintahan, dunia usaha dunia industri (DUDI), swalayan serta pelaku usaha mikro telah melibatkan masyarakat difabel sebagai pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, namun realitanya ada beberapa hambatan, diantaranya:

- a. Sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik, melatih bina diri masih dalam hal kemandirian dirumah belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja.
- b. Alokasi biaya dari pemerintah masih berupa pemberian insentif bagi Guru Pembimbing Khusus, namun belum ada alokasi pembiayaan berupa sarana prasarana yang mendukung bina diri berbasis ekonomi kreatif.
- c. Sulitnya menyatukan kesepahaman menerima anak berkebutuhan khusus kepada keluarga besar sekolah inklusi
- d. Sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Banyuwangi belum *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi.
- e. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif.
- f. Mayoritas peserta didik berkebutuhan khusus sekolah inklusif jenjang SMP dan SMA/MA/SMK mengalami hambatan lamban belajar, sehingga kegiatan berbasis ekonomi kreatif sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan proses inovasi dan kreatifitas.
- g. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan

Identifikasi model yang tepat guna mendukung implimentasi Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan pariwisata di Banyuwangi telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Pemkab Banyuwangi beberapa tahun terakhir sukses mengelola pariwisata melalui destinasi alam dan budayanya. Sehingga baik Desa maupun Banyuwangi sendiri sukses mendapatkan beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional bahkan mampu unggul dari beberapa negara lainnya.

Kesuksesan Banyuwangi dalam bidang pariwisata banyak berdampak positif bagi masyarakat, bahkan banyak bermunculan mata pencaharian baru masyarakat pedesaan. Dampak positif lainnya juga banyak pelaku usaha mikro yang menjadikan UMKM menjadi penghasilan utama.

Peningkatan pengembangan anak berkebutuhan khusus yang belum didukung dengan sarana prasarana bina diri dibidang ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan kerjasama antara seluruh pihak sekolah inklusi dengan para pelaku usaha mikro di Banyuwangi. Mengingat pelaku usaha mikro sudah ada yang membina anak berkebutuhan

dibidang batik dan sablon, serta memberdayakan saat agenda festival produk ekonomi kreatif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pelaku usaha mikro dan pengawas PLB di Kabupaten Banyuwangi. (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB dan anggota Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik)

Merintis sekolah inklusi *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi (Wawancara dengan Bapak Cahyo Minardi, S.Pd selaku koordinator Sekolah Inklusif Jawa Timur sekaligus Guru Pendamping Khusus SMAN 1 Glagah Banyuwangi) serta kerjasama dengan pelaku usaha mikro perlu dilakukan untuk memfasilitasi bagi sekolah inklusif yang tidak mempunyai tenaga pendidik dibidang ekonomi kreatif. Praktis diharapkan pasca lulus sekolah, para siswa difabel mendapat bekal ketrampilan berbasis ekonomi kreatif.

4. KESIMPULAN

Implimentasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengingat hambatan peserta didik difabel sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat. Pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusi selama proses kegiatan belajar mengajar didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Untuk mendukung proses pembelajaran, GPK rutin dibekali pelatihan proses pembelajaran seperti pembuatan RPP, pengembangan Pembelajaran Individual (PPI). Namun ada juga pelatihan bagi calon guru GPK dengan jangka waktu 80 jam. Selain itu guru pendamping khusus diberi pelatihan vokasional berupa pelatihan *life skill*.

Hambatan sekolah inklusi yaitu sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja, karena sekolah inklusi cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan menuju perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus cenderung di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Banyuwangi belum *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif. Mayoritas peserta didik berkebutuhan khusus sekolah inklusif jenjang SMP dan SMA/MA/SMK mengalami hambatan lamban belajar, sehingga kegiatan berbasis ekonomi kreatif sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan proses inovasi dan kreatifitas serta pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan.

Model yang tepat digunakan dalam implementasi pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha

mikro untuk memfasilitasi bagi sekolah inklusif yang tidak mempunyai tenaga pendidik dibidang ekonomi kreatif.

Rekomendasi bagi penelitian ini yaitu para pelaku usaha mikro apabila mengadakan pelatihan ,seyogyanya tidak ganti-ganti peserta dan jenis ketrampilan serta perlu dilaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan tersebut pada masing-masing peserta. Seyogyanya pemerintah perlu mencari guru pendamping khusus (GPK) bagi sekolah inklusi yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, mengingat sebagian besar GPK di sekolah inklusif Banyuwangi sebagian besar berlatar belakang pendidikan umum.

5. REFERENSI

- Angela Irvine & Judy Lupart. 2006. Social supports in inclusive settings: An essential component to community living. *Developmental Disabilities Bulletin*, 2006, Vol. 34, No. 1 & 2, pp. 107- 126
- Anggun Dyah Anjarsari, Mohammad Efendy, Sulthoni. 2018 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi* Volume 1 Nomor 2 : Halaman: 091-104
- Giangreco, M.F. (2013). Teacher Assistant Supports in Inclusive Scholls: Research, Practices and Alternatives. *Australasian Journal of Special Education*.Vol 37.Issue 2 : 93-106.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif* .Jogjakarta: Ar- Ruzz MediaPurwanta (2002). Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional
- Jauhari Auhad. 2017. Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ijtimaiya* Vol. 1 No. 1 : Halaman 23-38
- Kadir Abdul. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 : Halaman 8-22
- Lolacoco Dan Valenti. 2010. General Education Teachers Need to be Prepared to Co-Teach The Increasing Number Of Children With Autism In Inclusive Settings. *International Journal Of Special Education* Vol 25 No 3 2010. pp 24-32
- Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi
- Perbup no 68 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi
- Permendikbud No. 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik
- Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
- Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di PAUD/ TK/ SD/ SMP
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021
- Sopandi, Asep Ahmad. 2013. Pengembangan Kurikulum Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Setting Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume XIII No.1 : Halaman 1-9
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:ALFABETA
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Wardah, Erika Yunia. 2019. Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 : Halaman 93-108
- Yachya Hasyim. 2013. Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 1, Nomor 2 : Halaman 112-121
- Yusraini. 2013. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusi*. *Jurnal Media Akademika*. Vol 28 No 1 : Halaman 237-242

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN *CHEMISTRY DOMINO* (*CHEMINO*) CARD PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR

Oleh:

Fithri Anggraini¹⁾, Rachmat Sahputra²⁾, Husna Amalya Melati³⁾, Hairida⁴⁾, Masriani⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Pendidikan kimia Universitas Tanjungpura Pontianak

¹email: h.a.melati@chem.edu.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran *chemistry domino card* (*chemino card*) dan menentukan kelayakan media tersebut berdasarkan penilaian para ahli dan respon guru. Bentuk penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* (R & D) dengan model pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, & Evaluation*). Kelayakan media ini dilihat dari lembar penilaian kelayakan materi, bahasa, dan media serta angket respon guru. Kelayakan media divalidasi oleh sembilan ahli yang masing-masing terdiri dari tiga ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Hasil penelitian uji kelayakan materi, bahasa, dan media secara berturut-turut diperoleh rata-rata persentase sebesar 97%, 94%, dan 93% yang menunjukkan bahwa media pembelajaran *Chemino Card* sangat layak untuk digunakan. Subjek dari penelitian ini adalah media *chemino card* pada materi sistem periodik unsur yang akan diuji cobakan kepada empat orang responden untuk mengisi angket respon guru, yaitu guru kimia dari sekolah yang berbeda-beda. Hasil penelitian angket respon guru diperoleh rata-rata persentase sebesar 90% yang menunjukkan bahwa media *Chemino Card* sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian ahli dan respon guru, media *Chemino Card* layak dan siap digunakan sebagai media pembelajaran untuk pendukung proses pembelajaran kimia pada materi sistem periodik unsur.

Kata Kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, *Chemistry Domino Card*, Sistem Periodik Unsur

1. PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (*life skills*) (Kemdikbud, 2013). Idealnya pembelajaran harus dapat membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal serta mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saat ini sudah banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan berbagai strategi dan metode pembelajaran. Pembelajaran abad ke-21 ini harus dilakukan dengan sengaja oleh pendidik kimia agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Materi pelajaran kimia pada saat ini masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit dipelajari oleh peserta didik dijenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu penyebabnya yaitu konsep yang disajikan dalam ilmu kimia memiliki sifat abstrak hal ini berarti inti yang dipelajari tidak tampak secara nyata (konkret). Hal ini sesuai dengan karakteristik ilmu kimia itu sendiri, yaitu (1) bersifat abstrak, (2) penyederhanaan dari keadaan sebenarnya, (3) berurutan dan berjenjang. Karakteristik dari ilmu kimia inilah yang membuat kimia ini sulit untuk dipelajari oleh peserta didik (Erlina, 2011). Menurut Middlecamp dan Kean (1985:9) Ilmu kimia

mencakup materi yang sangat luas terdiri dari fakta, konsep, aturan, hukum, prinsip, teori, dan soal-soal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada mata kuliah kimia SMA di sekolah MAN 2 Pontianak didapatkan informasi bahwa materi Sistem Periodik Unsur (SPU) sub-bab konfigurasi unsur, serta golongan dan periode unsur merupakan materi yang dianggap sulit bagi peserta didik. Hal ini dikarenakan materi SPU ini memiliki pokok bahasan yang banyak sehingga seringkali membuat peserta didik bingung dan membuat siswa lupa dengan susunan tingkatan energi dalam konfigurasi elektron dan cara menentukan golongan serta periode suatu unsur. Selain itu dilihat bahwa pemahaman peserta didik yang rendah, hal ini terlihat dari rendahnya hasil belajar atau ulangan harian yang diperoleh peserta didik yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang berlaku di sekolah tersebut.

Tabel 1 Data Hasil Ulangan Harian Materi Sistem Periodik Unsur Tahun Ajaran 2019/2020 Kelas X
MAN 2 Pontianak

Kelas	Tuntas	Tidak Tuntas	Jumlah Siswa	Persentase Ketuntasan (%)
X MIPA 1	8	30	38	21
X MIPA 2	8	30	38	21
X MIPA 3	4	34	38	11
X MIPA 4	11	29	38	29

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia diempat sekolah, ditemukan kenyataan bahwa proses pembelajaran kimia masih menggunakan metode konvensional yang lebih berpusat kepada guru. Metode konvensional yang digunakan berupa ceramah di depan kelas dan peserta didik berdiskusi secara kelompok. Penggunaan media

belajar disekolah masih berupa papan tulis, *powerpoint*, dan, lembaran tabel periodik. Media pembelajaran yang monoton ini dapat membuat peserta didik menjadi bosan dalam belajar, apalagi jika penyampaian hanya berupa uraian materi sehingga kurang menarik untuk diserap oleh peserta didik. Tidak jarang peserta didik di kelas hanya paham materi ketika baru disampaikan oleh gurunya atau hanya bertahan untuk sementara waktu. Jika peserta didik diminta untuk mengulang materi yang sudah diajarkan sebelumnya, peserta didik kebanyakan lupa materi tersebut.

Kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan ini berdampak pada kurangnya pemahaman dan dapat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Kondisi seperti ini juga menyebabkan minat belajar dan motivasi belajar peserta didik rendah. Peserta didik menjadi cenderung pasif dan sedikit sekali yang bertanya meskipun belum paham dengan materi yang sedang dipelajari serta kurang mampu membangun konsep tersendiri melalui pembelajaran dikarenakan yang lebih dominan berperan di kelas adalah gurunya. Hal ini akan berdampak pada ketidak tercapaian tujuan pembelajaran kimia yang telah ditetapkan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang ditulis oleh (Erlina et al., 2013) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi (hasil belajar) yang dicapai oleh seorang siswa di lingkungan sekolah tergantung kepada cara mengajar guru, kurikulum yang diterapkan, hubungan antara guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, kedisiplinan siswa di sekolah, kelengkapan fasilitas di sekolah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti sebelumnya tentang materi kimia, menunjukkan bahwa kimia mencakup konsep partikel dasar suatu materi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik (sub-mikroskopik) sehingga banyak peserta didik menganggap kimia itu abstrak atau sulit (Talanquer, 2014). Sistem periodik unsur merupakan salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh siswa. Materi ini dianggap sulit karena materi ini lebih banyak hafalan yang membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami materi sistem periodik unsur. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menentukan dasar pengelompokkan dan kelemahan dari teori yang ada. Kesulitan siswa dalam memahami materi sistem periodik unsur dapat diatasi dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang dapat memperkaya pemahaman siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar (Hairida, 2014).

Salah satu upaya untuk membuat peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak dengan jumlah materi yang banyak, tentu akan menuntut guru untuk menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran dalam membantu proses belajar

mengajar (Priatmoko et al., 2008). Media pembelajaran adalah salah satu contoh faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi peserta didik dalam belajar. Hal itu dapat tercapai karena media pembelajaran dapat mengatasi berbagai hambatan, antara lain: hambatan komunikasi, keterbatasan ruang kelas, sikap siswa yang pasif, pengamatan siswa yang kurang seragam, sifat objek belajar yang kurang khusus sehingga tidak memungkinkan dipelajari tanpa media, tempat belajar yang terpencil dan sebagainya (Waryanto, 2007).

Penggunaan media pembelajaran ini memiliki banyak manfaat terhadap keberlangsungan belajar peserta didik. Sudjana & Rivai mengemukakan manfaat media antara lain: menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dan menjadi metode alternatif dalam belajar karena siswa tidak semata-mata mendapatkan pembelajaran dari satu sumber. Menurut Hamalik, manfaat media pembelajaran antara lain: meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir, memperbesar perhatian siswa, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu terutama melalui gambar hidup, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar (Suherman, 2008). Pembelajaran kartu domino adalah salah satu media yang dapat membantu siswa dalam memahami materi, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan menarik minat siswa untuk belajar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media permainan kartu domino dapat memotivasi dan meningkatkan hasil belajar. Menurut penelitian Lucky Dwi Larasati tentang penggunaan kartu domino kimia untuk meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan unsur di SMALB Tuna Rungu menunjukkan peningkatan hasil belajar dimana diperoleh rentang skor gain 0,2 – 0,6 dan ketuntasan klasikan *pre-test* sebesar 20% sedangkan pada *post-test* 80%. (Larasati, Dwi., Poedjiastoeti, 2016). Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Mimilaida pada “Pengembangan Media Kartu Domino Pada Materi Sistem Periodik Unsur Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X di SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media kartu domino mendapatkan presentase kelayakan media sebesar 96,40%. Hasil belajar peserta didik dari ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara berurutan diperoleh sebesar 86,23%, 80,95% dan 85,94% (Mimilaida, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu solusi untuk menunjang proses pembelajaran. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan satu di antara cara untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Media adalah sesuatu yang bertindak sebagai alat untuk melaksanakan komunikasi dalam interaksi belajar mengajar, media dapat berupa manusia, benda ataupun peristiwa yang membuat kondisi tertentu

bagi siswa sehingga memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap tertentu (Syamsiana, 2014). Satu diantara media yang dapat digunakan, yaitu media pembelajaran *Chemistry Domino Card (Chemino Card)*.

Media permainan *Chemistry Domino Card (Chemino Card)* merupakan modifikasi dari permainan kartu domino. Media *Chemino card* ini dikembangkan untuk materi sistem periodik unsur sub-bab penentuan golongan dan periode unsur. Media ini umumnya dimainkan 4-6 orang, sedangkan dalam media *chemino card* ini dimainkan oleh 6 orang yang terdiri dari 2 tim, Media ini digunakan dalam materi tersebut karena peserta didik cenderung bingung dan kesulitan dalam menentukan golongan dan periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron Aufbau. Kelebihan dari media ini, yaitu dapat membuat peserta didik menentukan golongan dan periode suatu unsur dengan mudah dan menyenangkan. Selain itu, media ini juga membuat peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran dan membuat peserta didik mengetahui kegunaan dari setiap unsur.

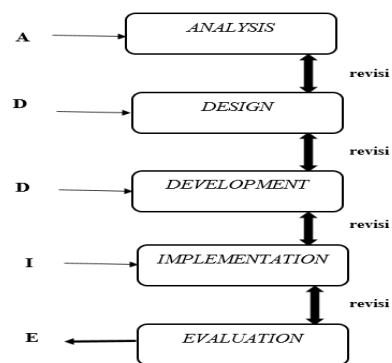
Media yang dapat mengeksplorasi kemampuan akan membuat peserta didik merasa tertantang memahami materi. Media ini juga memiliki komponen dasar sebagai pembangkit motivasi peserta didik dan dapat melatih kemandirian dalam menemukan konsep mengenai materi golongan dan periode dengan cara menyusun kartu *chemino card* sesuai dengan aturan permainan. Media kartu domino memiliki kelebihan untuk membuat siswa lebih aktif semangat belajarnya dengan media pembelajarannya yang seperti permainan daripada media pembelajaran gambar diam yang masih bersifat monoton (Hestuaji & WA, 2013).

Berdasarkan uraian yang disajikan dan mempertimbangkan manfaat dari aspek media dari *Chemino Card*, maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran *Chemistry Domino (Chemino) Card* pada Materi Sistem Periodik Unsur. Pemilihan *media chemistry domino card* dalam materi sistem periodik unsur ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik sehingga lebih mudah menangkap materi pembelajaran dibandingkan hanya dengan penyampaian melalui guru saja. Tujuan penelitian pada Pengembangan Media *Chemino Card* pada Materi Sistem Periodik Unsur ini adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan media, materi, dan bahasa pada media *chemino card* dan respon guru terhadap media *chemino card* pada materi sistem periodik unsur. Manfaat dari dikembangkannya media *chemino card* pada penelitian ini bagi guru dan peserta didik yaitu meningkatkan atensi dan antusias peserta didik pada pembelajaran, membantu peserta didik memahami materi, dan alternatif pada proses pembelajaran bagi guru, serta mendukung

pembelajaran yang lebih variatif, menarik, dan menyenangkan dalam pembelajaran di ruang kelas.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*Research & Development*). Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) yang dikembangkan oleh Dick and Carry (Sugiyono, 2016). Penerapan model ADDIE dalam media pembelajaran digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram model ADDIE

Sumber : (Praradilaga, 2019)

Tahapan model ADDIE yang digunakan dalam penelitian ini hanya sampai pada langkah ADD (*analysis, design, development*). Tahapan pengembangan yang dilakukan pertama kali yaitu *analysis* (analisis) dengan melakukan pengumpulan informasi dari observasi, studi lapangan dan literatur dari berbagai sumber. Pada tahap ini, dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, analisis peserta didik dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan melakukan observasi dan studi lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap proses pembelajaran kimia dan penggunaan sumber belajar di MAN 1 Pontianak, MAN 2 Pontianak, MAS Bawari, dan MAS Al-Mustaqim Kuburaya kelas X. Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai empat guru kimia mengenai kegiatan pembelajaran kimia pada materi sistem periodik unsur dengan sub-bab konfigurasi elektron serta penentuan golongan dan periode suatu unsur. Analisis peserta didik dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik sehingga dapat dibuat suatu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui karakteristik kurikulum yang sedang digunakan sehingga media yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pada tahap ini peneliti mengkaji kompetensi dasar (KD) dan kemudian merumuskan indikator pencapaian pembelajaran.

Tahap kedua yaitu *design* (perancangan), dimana peneliti merancang produk yang dikembangkan yang disesuaikan dengan hasil analisis dalam bentuk *story board* dan membuat instrumen penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap desain ini, yaitu menentukan KD dan indikator pencapaian kompetensi, merancang kerangka desain, dan merancang strategi pengujian. *Storyboard* berupa rancangan visual media dan keterangannya. Instrumen penelitian dibuat untuk menilai kelayakan dari media kartu oleh ahli media, bahasa, dan materi serta respon guru. Lembar validasi instrumen akan divalidasi oleh dua orang ahli untuk mengetahui lembar validasi tersebut layak diujicobakan atau tidak.

Tahap ketiga yaitu *development* (pengembangan). Pada tahap pengembangan ini merupakan realisasi media *chemino card* sesuai rancangan yang telah dibuat pada tahap desain, hal ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu (a) validasi media kartu oleh ahli, (b) revisi desain media, (c) uji respon guru, dan (d) penyempurnaan produk akhir.

Subjek penelitian ini adalah media *chemino card* pada materi sistem periodik unsur. Subjek responden adalah masing-masing satu orang guru kimia dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Pontianak, MAN 2 Pontianak, MAS Bawari Pontianak, dan MAS Al-Mustaqim Kuburaya.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi tidak langsung (*daring*). Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket (*kuisisioner*) yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu angket kelayakan media *chemino card* dan angket respon guru dengan menggunakan skala *Likert*.

Teknik pengolahan data yang digunakan penelitian ini adalah pengumpulan data dengan lembar penilaian kelayakan media dan angket respon guru yang dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian dan pengembangan. Angket tersebut divalidasi terlebih dahulu untuk mengetahui realibilitas dari suatu angket, agar layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Guttman. Data hasil validasi dan respon guru yang telah dikumpulkan diolah dengan cara merata-ratakan jumlah perolehan skor/nilai dengan menggunakan rumus persentase berikut:

$$P = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase kelayakan

$\sum x$ = jumlah perolehan skor

(skor total) tiap pernyataan

$\sum y$ = jumlah skor maksimal

Menghitung persentase rata-rata kelayakan media *chemino card* secara keseluruhan yaitu dengan rumus: $V = \frac{\sum P}{n}$

Keterangan :

V = persentase rata-rata kelayakan

$\sum P$ = jumlah rata-rata persentase skor tiap aspek

n = jumlah aspek yang dinilai

Angket uji respon dalam penelitian ini ditunjukkan kepada guru pada ujicoba lapangan. Kriteria pada lembar respon guru di penelitian ini menggunakan skala Likert yang diadopsi dengan empat skala penilaian (kriteria), yaitu SS (Sangat Setuju) untuk skor 4, S (Setuju) untuk skor 3, TS (Tidak Setuju) untuk skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) untuk skor 1. Hasil penilaian kelayakan ini kemudian di analisis dengan tahapan berikut: menghitung frekuensi skor penilaian dari setiap pernyataan, menghitung skor total dari setiap pernyataan dan menghitung persentase rata-rata kelayakan secara keseluruhan. Rumus untuk menghitung persentase dari pernyataan yang ada pada angket respon guru terhadap media *Chemino Card* yaitu :

$$P = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100\%$$

Keterangan: P = persentase perolehan skor responden

$\sum x$ = jumlah keseluruhan jawaban responden

$\sum y$ = jumlah skor maksimal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berupa penelitian dan pengembangan media *Chemistry Domino (Chemino) Card* dengan menggunakan model pengembangan ADDIE. Prosedur penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap pengembangan, yaitu uji coba produk melalui respon guru. Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian pengembangan ini.

Pada tahap analisis (*analysis*), dilakukan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi dan studi lapangan. Tujuan dilakukannya studi lapangan, yaitu untuk mengumpulkan data terkait masalah yang dihadapi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada empat guru kimia, yaitu masing-masing satu orang guru kimia MAN 1 Pontianak, MAN 2 Pontianak, MAS Bawari, dan MAS Al-Mustaqim. Berdasarkan hasil studi lapangan, diperoleh bahwa proses pembelajaran kimia masih dengan metode konvensional tanpa adanya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.

Analisis peserta didik dilakukan melalui observasi di sekolah. Umumnya peserta didik masih

kesulitan dalam memahami pembelajaran yang bersifat abstrak, peserta didik lebih senang jika pembelajaran dikaitkan dengan permainan melalui media pembelajaran. Analisis kurikulum dilakukan dengan wawancara mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013.

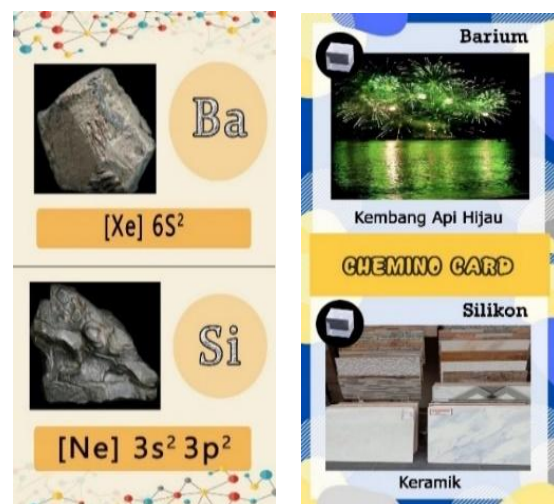
Tahap desain (*design*), adalah menentukan KD dan indikator pencapaian kompetensi, merancang kerangka desain, dan merancang strategi pengujian. Pertama-tama ditentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan yang digunakan di sekolah sebagai acuan dalam merancang media yang akan dikembangkan. Berdasarkan kurikulum 2013, maka komponen-komponen pada media *Chemino Card* mengacu kepada Kompetensi Dasar 3.2, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola-pola konfigurasi untuk setiap golongan dalam tabel periodik dan Kompetensi Dasar 4.2, yaitu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Indikator capaian yang dibuat, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan golongan A suatu unsur berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum (*Aufbau*), menentukan golongan B suatu unsur berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum (*Aufbau*), dan mengetahui contoh kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah menentukan KD dan indikator capaian kompetensi, peneliti merancang kerangka desain media yang akan dikembangkan, yaitu dengan menentukan judul media pembelajaran, muatan materi di dalam media, dan komponen-komponen pada media *Chemino Card*. Judul media dalam penelitian ini adalah "Media *Chemistry Domino*". Materi yang termuat di dalam media, yaitu materi sistem periodik unsur sub-bab penentuan golongan dan periode unsur yang dipelajari oleh peserta didik kelas X SMA di semester ganjil. Komponen-komponen dari media permainan *Chemino Card*, yaitu terdiri dari map penyimpanan kartu, kotak kartu utama, kotak kartu transisi, lembar kerja peserta didik (LKPD), lembar petunjuk permainan kartu utama maupun kartu transisi, dan lembar rangkuman materi (ikhtisar). Media *Chemino Card* ini berjumlah 30 kartu utama dan 24 kartu transisi. Kartu ini memiliki dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan memuat unsur kimia, nomor unsur, lambang kimia, dan konfigurasi unsur, sementara sisi belakang memuat kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah selanjutnya adalah merancang strategi pengujian. Pengujian kelayakan dilakukan melalui penilaian para ahli dan uji coba pengembangan. Sebelum dilakukan pengujian, perlu dibuat instrumen penelitian berupa lembar penilaian kelayakan materi, bahasa, dan media serta angket respon guru. Instrumen tersebut menggunakan skala *Likert* dan dilakukan validasi terlebih dahulu agar instrumen yang disusun dapat digunakan sebagai

lembar penilaian nantinya. Validator instrumen dalam penelitian ini sebanyak dua orang.

Tahap *development* (pengembangan), dilakukan realisasi media *Chemino Card* sesuai rancangan yang telah dibuat pada tahap desain. *Chemino Card* ini merupakan modifikasi dari permainan kartu domino (kartu gapek) yang berasal dari China. Cara bermainnya hampir sama dengan permainan domino biasanya tetapi ada beberapa langkah dalam permainan yang dimodifikasi. Pembuatan media *Chemino Card* dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan. Pertama-tama, yaitu membuat desain kartu utama (kartu A) dan kartu transisi (kartu B). Desain kartu menggunakan aplikasi *Photoshop CS6* dan *chanva* dengan ukuran lebar x panjang, yaitu 7cm x 12cm sebanyak 30 kartu untuk kartu utama (kartu A) dan 24 kartu untuk kartu transisi (kartu B). Kartu utama (kartu A) memiliki *background* kartu berwarna kuning, sedangkan untuk kartu transisi (kartu B) memiliki *background* berwarna biru. Pada satu kartu memiliki dua sisi yaitu bagian sisi depan dan bagian sisi belakang. Kartu utama (kartu A) bagian sisi depan terdiri dari gambar fisik suatu unsur, simbol unsur, dan konfigurasi dari unsur tersebut. Kartu utama (kartu A) bagian belakang terdiri dari wujud unsur, nama unsur, gambar kegunaan unsur dan keterangan dari gambar kegunaan unsur.



(a) Sisi depan kartu (b) sisi belakang kartu

Gambar 2. Bagian sisi depan kartu dan bagian sisi belakang kartu utama (kartu A)

Kartu utama ini terdiri dari unsur-unsur yang ada digolongan A. Sedangkan, kartu transisi terdiri dari 24 kartu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang ada digolongan B. Pada kartu transisi memiliki dua sisi yang sama seperti kartu utama, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Kartu transisi (kartu B) bagian sisi depan terdiri dari gambar fisik dari unsur, nama unsur, nomor atom, simbol unsur, dan konfigurasi dari unsur. Kartu transisi (kartu B) bagian belakang terdiri dari wujud unsur, nama unsur,

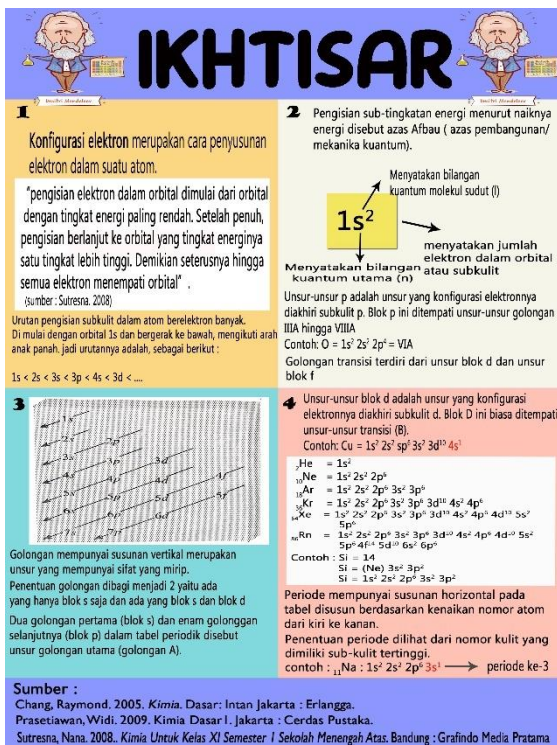
gambar kegunaan unsur serta keterangan dari gambar kegunaan unsur.



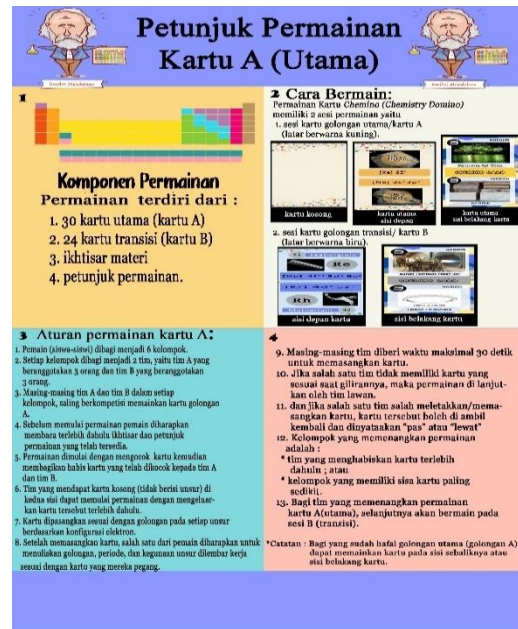
(a) Sisi depan kartu (b) Sisi belakang kartu

Gambar 3. Bagian sisi depan kartu dan bagian sisi belakang kartu transisi (kartu B)

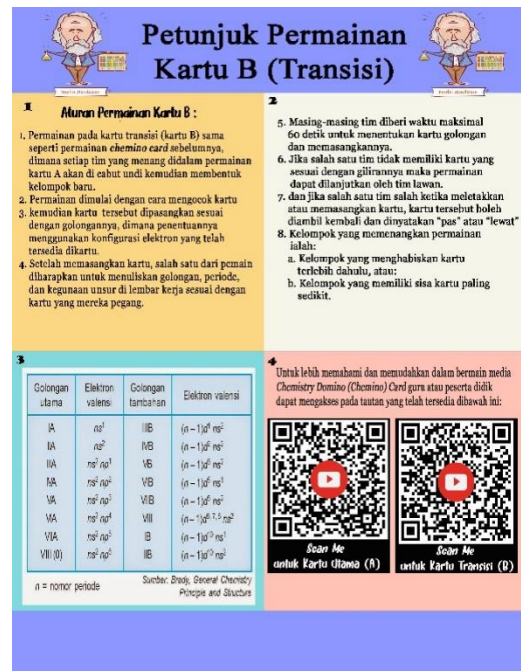
Komponen lain yang dibuat dari *Chemino Card* ini adalah ikhtisar materi sistem periodik unsur yang berukuran A4. Ada pula lembar petunjuk permainan untuk kartu utama (kartu A) dan petunjuk permainan kartu transisi (kartu B).



(a)



(b)



(c)

Gambar 4. Lembar ikhtisar (rangkuman) (i), petunjuk permainan kartu utama (ii), dan petunjuk permainan kartu transisi (iii)

Selanjutnya, adalah membuat kotak untuk menyimpan kartu utama dan kartu transisi *Chemino Card*. Kotak *Chemino Card* didesain dengan menggunakan aplikasi *Photoshop CS6* dan *Chanva*. Ukuran dari kotak *Chemino Card* yaitu $13,5 \times 8 \times 2$ cm. Komponen yang terdapat pada kotak tersebut terdapat nama dari media yaitu *Chemino Card*, identitas peneliti, serta nama instansi beserta logo instansi. Warna dasar dari kedua kotak *Chemino Card* yaitu warna biru tua dan kuning. Pada kotak digunakan empat jenis huruf yang berbeda



(a)



(b)

Gambar 5. Kotak Chemino Card kartu utama (a), kotak Chemino Card kartu transisi (b)

Langkah selanjutnya, adalah membuat lembar kerja sederhana yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, menjelaskan konfigurasi elektron dan pola-pola konfigurasi untuk setiap golongan dalam tabel periodik dan kompetensi dasar 4.2, menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Lembar kerja ini dibuat untuk membuat permainan berjalan teratur dengan mencatat unsur-unsur yang didapat pada setiap tim pemain. Lembar kerja ini mempunyai dua bagian yaitu sisi depan dan sisi belakang yang berukuran A4. Gambar lembar kerja Chemino Card dapat



(i)



(ii)

Gambar 6. Lembar kerja bagian depan Chemino Card kartu utama (i), lembar kerja bagian belakang Chemino Card kartu transisi (ii)

Tahapan selanjutnya, yaitu membuat desain stiker untuk map plastik A5 tempat penyimpanan semua komponen media Chemino Card. Stiker ini didesain menggunakan *canva* dan *photoshop CS6* dengan ukuran stiker lebar×tingginya 23,5cm×18cm, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



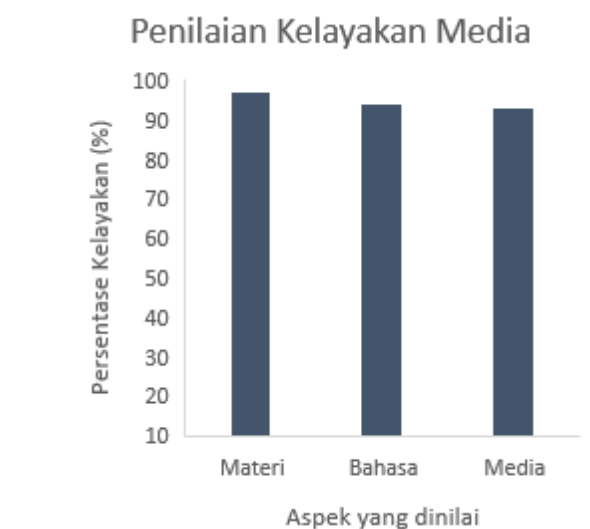
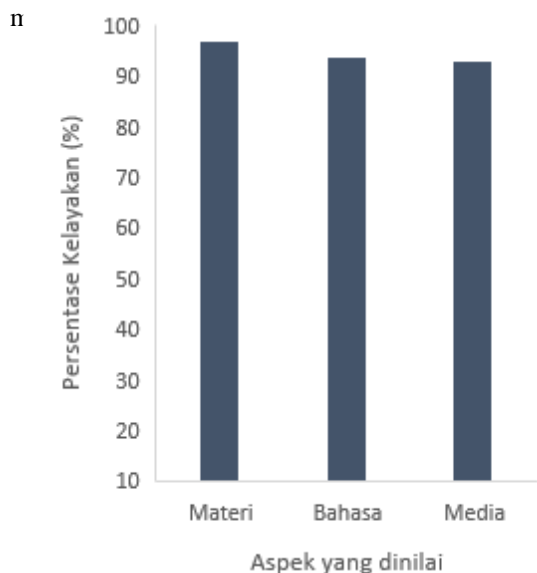
(i) Stiker bagian depan



(ii) Stiker bagian depan

Gambar 7. Desain stiker bagian depan (i), desain stiker bagian belakang(ii)

Setelah media *Chemino Card* dibuat, peneliti melakukan penilaian kelayakan produk oleh ahli yang sesuai dengan bidangnya. Penilaian kelayakan dilakukan dengan mengisi lembar penilaian kelayakan secara daring (dalam jaringan) dan tatap luring (luar jaringan). Uji ahli ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan media *Chemino Card* pada materi sistem periodik unsur. Uji kelayakan pengembangan ini dilakukan oleh masing-masing 3 validator ahli bahasa, 3 validator ahli materi, dan 3 validator ahli media. Persentase hasil penilaian kelayakan media oleh validator ahli bahasa, validator ahli materi, dan validator ahli media dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. Berikut ini merupakan rata-rata persentase penilaian kelayakan



Gambar 8. Persentase kelayakan dari aspek materi, bahasa, dan media pada media *Chemino Card*
Rincian untuk indikator yang terdapat pada grafik di atas dapat dilihat pada Tabel 5. dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Penilaian Uji Kelayakan Media Permainan *Chemino Card* pada Materi Sistem Periodik Unsur

No.	Aspek validasi	Hasil Skor (%)	Penilaian Total Kriteria
1.	Materi	97	Sangat Layak
2.	Media	93	Sangat Layak
3.	Bahasa	94	Sangat Layak
Rata-rata Keseluruhan		95	Sangat Layak

Berdasarkan data hasil penelitian kelayakan media *chemino card* dilihat dari hasil rata-rata keseluruhan bahwa media termasuk dalam kategori sangat layak dengan perolehan persentase sebesar 95%.

Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Bahasa, kelayakan bahasa pada *chemino card* ini dinilai oleh 3 dosen, yaitu 2 dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tanjungpura dan 1 guru Bahasa Indonesia MAS Bawari Pontianak yang ahli pada bidang bahasa.

Berikut ini adalah persentase hasil dari validasi aspek bahasa oleh ahli pada setiap indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Penilaian Kelayakan oleh Ahli Bahasa pada media *chemino card*

No.	Butir Penilaian	\sum	P%	Kriteria
1.	Ketepatan struktur kalimat.	11	92	Sangat Layak
2.	Kebakuan istilah.	12	100	Sangat Layak
3.	Bahasa yang digunakan komunikatif	12	100	Sangat Layak
4.	Ketepatan tata bahasa.	10	83	Sangat Layak
Rata-rata		94		Sangat Layak

Berdasarkan kelayakan oleh para ahli bahasa, menunjukkan semua indikator kelayakan media oleh validator bahasa memperoleh kriteria sangat layak. Hal ini berarti media *Chemino Card* ini memiliki ketepatan struktur kalimat yang jelas, mudah dibaca dan dipahami, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata-kata yang digunakan mudah dimengerti oleh peserta didik, dan memenuhi ketepatan bahasa yaitu Subjek, Predikat, Objek, Keterangan (SPOK). Pada ahli bahasa ini terdapat beberapa saran dari validator, yaitu sebagai berikut. Saran pada bagian ikhtisar (rangkuman materi) memperbaiki tanda baca, seperti tanda titik, tanda koma, dan lain-lain.

Penilaian kelayakan media pada aspek materi ini dinilai oleh 3 ahli materi, yaitu 3 Dosen dari Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura yang ahli dibidang materi kimia.

Tabel 7. Hasil Penilaian kelayakan media dari aspek materi pada media *chemino card*

No	Butir Penilaian	$\sum x$	$\sum y$	P%	Kriteria
1.	Materi pada media permainan Chemistry Domino Card (Chemino Card) yang disajikan dengan kompetensi dasar.	12	12	100	Sangat Layak
2.	Materi yang dimuat pada media permainan Chemistry Domino Card (Chemino Card) yang disajikan dengan indikator capaian.	12	12	100	Sangat Layak
3.	Konsep yang disajikan sesuai dengan konsep para ahli.	11	12	92	Sangat Layak
Rata-rata				97	Sangat Layak

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan media pada aspek materi menunjukkan bahwa dari rata-rata yang ada, yaitu 97% yang menunjukkan bahwa hasil penilaian termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Hal ini berarti komponen-komponen yang ada pada media *Chemino Card* sudah relevan dan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator capaian yang telah dibuat, hanya saja ada beberapa saran oleh ahli materi agar lebih merapikan susunan materi yang terdapat di dalam rangkuman materi (ikhtisar) pada lembar ikhtisar.

Penilaian Kelayakan oleh Ahli Media, kelayakan media *Chemino Card* ini dinilai oleh 3 dosen dari beberapa instansi, yaitu 2 dosen dari pendidikan kimia Universitas Tanjungpura dan 1 dosen dari pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak yang ahli dibidang media

Tabel 8. Hasil Penilaian kelayakan dari aspek media pada medua *chemino card*

No	Butir Penilaian	$\sum x$	$\sum y$	P%	Kriteria
1.	Kemudahan penggunaan media.	12	12	100	Sangat Layak
2.	Ketepatan jarak teks dengan gambar.	11	12	92	Sangat Layak
3.	Layout dan tata letak	11	12	92	Sangat Layak
4.	Gambar sesuai dengan konteks materi.	12	12	100	Sangat Layak
5.	Kemenari-Kan komposisi warna.	11	12	92	Sangat Layak
6.	Desain kotak menarik.	10	12	83	Sangat Layak
Rata-rata				93	Sangat Layak

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dari aspek media menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian memiliki rata-rata yaitu sebesar 93% dengan kriteria sangat layak. Hal ini berarti media *Chemino Card* ini mudah digunakan, mudah dilihat dan dibaca, gambar yang tertera di kartu sesuai dengan materi, warna, gambar, dan tulisan sesuai dengan ukuran kartu, dan desain kotak menarik. Pada media *Chemino Card* ini terdapat beberapa saran yang diberikan oleh ahli media, yaitu pada ukuran kartu pada media *Chemino Card* lebih diperbesar ukurannya dari yang awalnya hanya 5 × 8 cm (1 × p), diubah ukurannya menjadi 7 × 12 cm setiap kartu utama maupun kartu transisi. Kartu utama pada gambar dibelakang simbol sebaiknya digeser menjadi di sebelah kiri dan simbolnya di sebelah kanan kartu agar tidak bertumpuk. Ukuran tulisan pada konfigurasi dan simbol unsur diperbesar. Ukuran tulisan konfigurasi di awal menggunakan Nirmala UI ukuran 11pt menjadi Nirmala UI ukuran 17 pt, untuk

Uji respon guru ini dilakukan oleh 4 orang guru di sekolah MAN 1, MAN 2, MAS Bawari, dan MAS Al-Mustaqim. Uji respon guru ini dilakukan secara daring (dalam jaringan) menggunakan angket respon guru melalui *google form*.

Berdasarkan hasil data angket respon guru diperoleh rata-rata sebesar 90% dan termasuk kriteria sangat baik. Menurut tabel tersebut, pernyataan yang memiliki persentase skor terendah yaitu dengan skor 81% dan termasuk dalam kriteria baik untuk pernyataan nomor 3 yaitu tata bahasa dan penyusunan kalimat dalam Media *Chemistry Domino Card (chemino card)* yang digunakan tidak mudah dipahami dan untuk pernyataan nomor 6 yaitu petunjuk permainan *Chemistry Domino (Chemino) Card* dan ikhtisar membantu pengguna untuk memainkan kartunya. Sedangkan untuk persentase skor yang tertinggi, yaitu pada pernyataan nomor 5, media pembelajaran *Chemistry Domino (chemino) Card* mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan untuk pernyataan nomor 7 adalah media permainan *Chemistry Domino (chemino) Card* dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dengan persentase sebesar 100%. Hasil persentasi ini membuktikan bahwa media permainan *Chemino Card* ini sangat menarik karena mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan dapat mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran di kelas. Hal ini selaras dengan penelitian Hairida (2014) dimana di dalam proses pembelajaran yang disisipi dengan kegiatan permainan, dapat membuat peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan menjadikan proses pembelajaran tersebut terasa lebih menyenangkan.

Kemudian pada respon guru ini dilakukan analisis pada setiap pernyataan yang ada. Pernyataan positif yang pertama adalah "Penyajian materi dalam Media *Chemistry Domino Card* tersusun secara sistematis". Diperoleh data bahwa 2 dari 4 guru menyatakan sangat setuju dan 2 orang guru lainnya

menyatakan setuju dengan skor sebesar 88 % dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat mengerti dan dapat membuat anak untuk memanggil kembali ingatan tentang materi sistem periodik unsur dengan cara membaca rangkuman yang ada di media *Chemino Card*. Pernyataan kedua, yaitu pernyataan positif “Penampilan Media Pembelajaran *Chemistry Domino Card (Chemino Card)* secara keseluruhan menarik”. Pemilihan warna dan tulisan pada media yang kontras dan sesuai dapat membuat peserta didik tertarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan permainan domino pernah dikaji, dimana permainan domino dapat membuat siswa aktif, dapat mengisi waktu, mengubah tekanan tinggi, menimbulkan minat, sehingga memunculkan ketertarikan bagi siswa (Ismail, 2008). Penggunaan permainan dengan domino dapat meningkatkan kecerdasan spasial visual, dan kecerdasan interpersonal dengan teman sebayanya. Prinsipnya adalah penggunaan permainan harus menarik, dikenal dekat dan disukai oleh siswa (Hapsari, 2016).

Pernyataan ketiga yaitu pernyataan negatif “Tata bahasa dan penyusunan kalimat dalam Media *Chemistry Domino Card (Chemino Card)* yang digunakan tidak mudah dipahami”. Tiga guru menyatakan tidak setuju dan satu guru menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dengan persentase 81% termasuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada media *Chemino Card* tersebut mudah dipahami oleh peserta didik dan memudahkan dalam bermainnya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan keenam yaitu pernyataan positif yang menyatakan bahwa petunjuk penggunaan media dan ikhtisar membantu peserta didik dalam penggunaan media mendapat persentase sebesar 81% yang mana termasuk dalam kategori sangat baik.

Pernyataan keempat, yaitu “materi media pembelajaran *Chemistry Domino (chemino) Card* sesuai dengan kompetensi dasar (KD)”. Pernyataan ini memperoleh skor sangat setuju dari dua guru dan setuju dari dua guru dengan persentase 88% dan termasuk kriteria sangat baik. Hal ini berarti bahwa materi atau tantangan yang terdapat pada media *Chemino Card* relevan dengan indikator capaian dan kompetensi dasar yang telah dibuat dan dipilih.

Pernyataan 5 dan 7 memperoleh persentase tertinggi yaitu 100% dan termasuk dalam kriteria sangat layak, karena media permainan dengan menggunakan media kartu secara berkelompok, sikap peserta didik tidak lagi pasif. Para peserta didik tidak hanya duduk diam mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Mereka terlibat langsung dalam serangkaian kegiatan di LKPD (lembar kegiatan peserta didik) menggunakan media kartu (*flash card*) untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan.

Pemahaman materi diperoleh dari apa yang mereka lihat, mereka lakukan dan yang mereka temukan. Pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan ini akan memiliki daya ingat lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar menghafal saja. Selain itu, melalui pemanfaatan media kartu (*Flash Card*) secara berkelompok dapat menumbuhkan semangat kerja sama yang baik dengan teman sesama anggota kelompok dan tutor sebaya.

Tabel 8. Respon guru terhadap media *Chemistry Domino Card* pada materi sistem periodik unsur.

No.	Butir Pernyataan	Hasil Skor (%)	Respon Kriteria
1.	Penyajian materi dalam Media <i>Chemistry Domino Card</i> tersusun secara sistematis.	88	Sangat Baik
2.	Penampilan Media Pembelajaran <i>Chemistry Domino Card (chemino card)</i> secara keseluruhan menarik.	94	Sangat Baik
3.	Tata bahasa dan penyusunan kalimat dalam Media <i>Chemistry Domino Card (chemino card)</i> yang digunakan tidak mudah dipahami.	81	Baik
4.	Materi media permainan <i>Chemistry Domino Card (chemino card)</i> sesuai dengan kompetensi dasar (KD)	88	Sangat Baik
5.	Media pembelajaran <i>Chemistry Domino (chemino) Card</i> mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.	100	Sangat Baik
6.	Petunjuk permainan <i>Chemistry Domino (Chemino) Card</i> dan ikhtisar membantu pengguna untuk memainkan kartunya.	81	Baik
7.	Media permainan <i>Chemistry Domino (chemino) Card</i> dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran	100	Sangat Baik
8.	Tuliskan (ukuran dan jenis font) pada media pembelajaran <i>Chemistry Domino (chemino) Card</i> dapat dibaca dengan mudah.	88	Sangat Baik
Rata-rata		90	Sangat Baik

Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan adanya kegiatan belajar secara berkelompok mulai dari proses membentuk kartu, merangkai dan menganalisis hasilnya dapat meningkatkan kreativitas para peserta didik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya (Mulyani, 2017). Pernyataan kedelapan, yaitu “Tulisan (ukuran dan jenis font) pada media pembelajaran *Chemistry Domino Card (Chemino Card)* dapat dibaca dengan mudah” ini memperoleh persentase sebesar 87,5% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini terbukti dari dua orang guru yang memilih sangat setuju dan 2 orang lainnya setuju dengan pernyataan ini, karena pada revisi kartu yang sudah peneliti lakukan. Peneliti memilih menggunakan *font* yang standar dan memilih ukuran yang bisa dilihat dengan jelas ketika kartu sedang dimainkan. Media *Chemino Card* ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran agar guru dapat mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah disampaikan melalui pengaplikasian dengan media *Chemino Card* ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu berupa media pembelajaran *Chemistry Domino Card (Chemino Card)* pada materi sistem periodik unsur yang ditinjau sebagai berikut:

1. Tingkat kelayakan dan hasil respon guru yaitu Hasil penilaian kelayakan Media *Chemino Card* pada materi sistem periodik termasuk kategori sangat layak dengan persentase penilaian yaitu ahli materi sebesar 97%, kelayakan media sebesar 93%, dan kelayakan bahasa sebesar 94%.

2. Penilaian respon guru terhadap Media *Chemino Card* pada materi sistem periodik unsur yaitu sebesar 90% yang termasuk dalam kriteria sangat baik yang ditinjau dari tampilan, isi, dan penggunaan, maka dapat disimpulkan media *Chemino Card* ini sangat baik digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dikemukakan saran yaitu media pembelajaran *chemistry domino card* dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan mengenai efektifitas penggunaan media *Chemino Card* dalam proses pembelajaran.

5. REFERENSI

Akdon, dan R. (2013). Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika. Alfabeta.

Asyhar, R. (2012). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Referensi Gaung Persada Press Group).

Erlina. (2011). Deskripsi Kemampuan Berpikir Formal Mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura. *Visi Ilmu Pendidikan*, 6(3), 631–640.

Erlina, Hairida, & Majidah. (2013). Korelasi antara self-efficacy dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran kimia di sma. *Pendidikan dan Pembelajaran Untan*, 2, 1–10.

Hairida, H., Ira Lestari dan Wahyu Arif Murtandho. (2014). Pengaruh Pembelajaran Learning Cycle Pada Materi Sistem Periodik Unsur Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3, 0–10.

Hapsari, P. A. dan H. T. (2016). Validitas Kartu Permainan Domino Invertebrata Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Untuk Siswa Kelas X Sma Development. 3(3), 571–579.

Hestuaji, Y., & WA, S. (2013). Pengaruh Media Kartu Domino Terhadap Pemahaman Konsep Pecahan. *Jurnal Didaktika Dwija Indria*, 3(1), 1–6.

Ismail, D. (2008). *Kapita Selekda Pembelajaran Matematika*. Universitas Terbuka.

Keenan, Kleinfelter, dan W. (2017). *Kimia Untuk Universitas*. Erlangga.

Kemdikbud, L. (2013). Kurikulum 2013: Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21. 20 Juni 2013. <http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/index-berita-kurikulum/243-kurikulum-2013-pergeseran-paradigma-belajar-abad-21>

Larasati, Dwi., Poedjiastoeti, S. (2016). Pengembangan Permainan Kartu Domino Kimia Sebagai Media Development Of Domino Chemistry Card Games On The Subject. Penelitian ini dibatasi hanya sampai pada tahap studi pengembangan yaitu uji The aim of this research is to determine the eligibility of Domi. *Journal of Chemical Education*, 5(1), 115–119.

Middlecamp, C, 7 Kean, E. 1985. *Panduan Belajar Kimia Dasar*. Jakarta:PT. Gramedia.

Mimilaida. (2016). Pengembangan Media Kartu Domino Pada Materi Sistem Periodik Unsur Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X di SMA 1 Krueng Barona Jaya. *Skripsi. Universitas Syiah Kuala*.

Mulyani, S. (2017). Penggunaan Media Kartu Flashcard dalam Meningkatkan Hasil Belajar Konsep Mutasi bagi Peserta Didik Kelas XII. *Jurnal Profesi Keguruan*, 3(2), 143–148.

Prawiradilaga, D. S. (2019). *Wawasan Teknologi Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.

Priatmoko, S., Prasetya, A. T., & Hartati, S. (2008). Komparasi Hasil Belajar Siswa Dengan Media Macromedia Flash Dan Microsoft Powerpoint Yang Disampaikan Melalui Pendekatan Chemo-Edutainment. 2, 299–304.

Riduwan. (2017). *Pengantar Statistik untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi*. Bandung: PT Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suherman, Y. (2008). Pengembangan Media Pembelajaran Bagi ABK. Makalah Disampaikan pada Diklat Profesi Guru PLB Wilayah X Jawa Barat Bumi Makmur.

Syamsiana, F. dan A. L. (2014). Struktur Atom Pada Siswa Sma Negeri Ploso Jombang The Traditional Games Selibur As A Medium Of Atomic Structure. *Prosiding Seminar Nasional Kimia, September*, 48–52.

Talanquer, D. C. & B. S. S. &. (2014). Students' Perceptions of Academic Dishonesty in the Chemistry Classroom Laboratory. *Journal of Research in Science Teaching*, 41. <https://doi.org/10.1002/tea.10124>.

Waryanto, N. H. (2007). Penggunaan Media Audio Visual dalam Menunjang Pembelajaran. 1.

MORPHOLOGICAL ERROR ANALYSIS ON WORD CLASSES FOUND IN STUDENTS' DESCRIPTIVE WRITING OF THE FIFTH SEMESTER ENGLISH DEPARTMENT AT NOMMENSEN HKBP UNIVERSITY (NHU) MEDAN

Oleh:

Sondang Manik¹⁾, Poster Sagala²⁾

^{1,2}English Department, Nommensen HKBP University Medan, Indonesia

¹sondang.manik@uhn.ac.id

²postersagala@gmail.com

Abstract

The writer did a research of fifth semester English department students at Faculty of Art and Nommensen HKBP University Medan. This research entitled : Morphological Error Analysis on Word Classes Found in Students' Descriptive Writing of The Fifth Semester English Department at Nommensen HKBP University (NHU)- Medan The writer asked the students to write a descriptive text. When they did the test, they felt confuse to write words with correct morphology. The result of the analysis was found that they knew about morphology, but they are confused to apply that. After they finished to write a descriptive text, the writer analyzed them. The writer underlined and classified the errors into four word classes on Morphological error. There are four word classes of morphological Errors, they are noun morphological errors, verb morphological errors, adjective morphological errors and adverb morphological errors . The result of the analysis, the writer concluded that there are four word classes was found by the writer, namely noun morphological errors, verb morphological errors, adjective morphological errors, and adverb morphological error. The data of morphological errors are found 154 errors. The percentage of errors in noun morphological was 52 errors i.e, 33,8%, errors of verb morphological was 91 errors or, 59,0%, errors of adjective morphological was 7 errors i.e, 4.6%, and error of adverb morphological was 4 errors i.e, 2.6%. The result of the analysis was found that the students knew about morphology but they are still confused to write words based on the correct morphology, so they made the errors. Looking at the percentage it shows verb morphological was 91 errors or 59,0%, of 154 errors, it means that verb is mostly used in a text, to express the ideas or activities .

Key words : Morphological Error , Word Classes , Descriptive Writing

1. INTRODUCTION

Linguistics may be defined as the scientific study of of language. Linguistics is concerned with the nature of language and communication. There are many courses provided such as syntax, sociolinguistics, semantics, pragmatics, psycholinguistics and others. one of them is morphology, the writer taught this subject last semester in odd semester of 2021-2022 academic. It deals both with the study of particular languages, and the search for general properties common to all languages or large groups of languages.

Morphology is the study of words, how they are formed, and their relationship to other words in the same language. It analyzes the structure of words and parts of words, such as stems, root words, prefixes, and suffixes. Morphology can be needed in all four skills. one of them is writing skills.

Based on the writer's experience, the writer face some problems with her students on Morphology course The writer did not understand how students write and formed sentences and face difficulties in writing sentences with correct grammar. Sometimes words written in excessive letters, sometimes words that are written incorrect

letter. misslaying out their sentence arrangements also did not understand. Finally when the writer commanded the students in writing paragraphs, the sentence was not in coherence with the correct grammar.

According to James (1998:154) as a morphology error one which involves a failure to comply with the norm in supplying any part of any instance of these word classes: ... are noun morphology errors; ... are verb morphology errors; ... adverb morphology error; and ... an adjective morphology error. Prepositions happen to have no morphology.

The Objectives of this study was to identify the word classes of morphological errors found on students' descriptive text writing of fifth semester of English Department Medan and to find out the dominant word classes of morphological errors found on students' descriptive text writing of fifth semester of English Department Medan

In this study, writer learn grammar errors, morphological errors and syntax errors but writer would focused on morphological errors found on descriptive text writing of the fifth semester of English Department Students of NHU Medan. There

are four word classes of morphological errors, they are: noun morphology errors, verb morphology errors, adverb morphology errors, and an adjective morphology errors.

There are two kinds of significances in this research. The two theoretically, the result of the research can become a new perspective in morphology research specifically in the research of errors analysis in morphological proses and as a new model in studying error analysis on morphology . Practically this research give beneficial enrichment in morphology for readers, and further research by researcher

In conducting a study, there are some theories are needed to explain some concept and terms applied in the research concerned. This study also uses some concerns and terms that need to the refresh the theoretical review about Morphological process, about error analysis and other clarification of term used this research . The theoretical elaboration on the concepts and terms used in Linguistics Morphology and Word classes

According to Lyons (1995:1) Linguistics can be broadly broken into three categories or subfields of study: language in context, language meaning, and language form. Linguistics can be broadly broken into three categories or subfields of study: langu.ge in context, language meaning, and language form. Language in its broader context includes: language acquisition, neurolinguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, historical linguistics,

According to Carnie (2002:4) Linguistics is also a branch of cognitive science. Cognitive science is a term for a group of disciplines that have the same goal: defining and analyzing human being`s ability to think. Some scholars emphasize that ``the discipline of linguistics, along with psychology, philosophy, and computer science thus forms an important subdiscipline within cognitive science.

The study of language meaning is concerned with how languages employ logical structure and real-world references to convey, process and assign meaning, as well as to manage and resolve ambiguity. A lot of writers emphasize that ``by scientific study of language is meant its investigation by means of controlled and empirically verifiable observations.

English has four skills, they are listening, speaking, reading, and writing skills. All the skills should be simultaneously achieved by the students. Next just focus on morphology and error analysis

In writing each genre or type of text, surely cannot be passed with the term generic structure. This term is used to show how the writer of the text composes his writing so that the message and its meaning are more easily conveyed to the reader. The following is a generic structure of descriptive text in English.

1) Identification

Identification identifies certain phenomena or objects or objects that want to be described paragraph.

2) Description

Description describes the appearance and characteristics of the things previously explained. In general, what is a benchmark for the description of this type of text is the parts of the object (part), the object quality (quality), or the characteristics of the characteristics (characteristics).

Table 1. Example of Descriptive Text

<i>Title</i>	<i>My Cat Gregory</i>
Identification	Gregory is my beautiful gray Persian cat. He walks with pride and grace, performing a dance of disdain as he slowly lifts and lowers each paw with the delicacy of a ballet dancer. His pride, however, does not extend to his appearance, for he spends most of his time indoors watching television and growing fat.
Description	He enjoys TV commercials, especially those for Meow Mix and 9 Lives. His familiarity with cat food commercials has led him to reject generic brands of cat food in favor of only the most expensive brands. Gregory is as finicky about visitors as he is about what he eats, befriendng some and repelling others. He may snuggle up against your ankle, begging to be petted, or he may imitate a skunk and stain your favorite trousers. Gregory does not do this to establish his territory, as many cat experts think, but to humiliate me because he is jealous of my friends. After my guests have fled, I look at the old fleabag snoozing and smiling to himself in front of the television set, and I have to forgive him for his obnoxious, but endearing, habits.

Language features literary means analyzing language. Language feature helps you to understand what the writer is saying. Descriptive text has some language future, they are:

- 1) Using specific nouns, such as my cat, my girlfriend, National Monument, besides, often using adjectives (adjectives) to clarify the use of nouns or nouns, such as big houses, smart students, independent women.
- 2) Simple present tense: uses a basic verb or first form (verb 1) and uses a verb that can indicate ownership or state of an object. Descriptive text uses the present present tense because descriptive text explains a fact from the object described. As an office I have 22 floors, beautiful Azka, and others.
- 3) Action verbs: Use verbs that show activities or activities that can be seen. For example, sleeping, walking, singing, dancing, etc.
- 4) Figurative language: Using language that describes something, uses language to give a picture to the reader.

For example:

- My love for you is as big as the ocean.

According to Aronoff Mark (2011:11) Morphology is a distinct component of languages or grammars. If there are languages that don't have morphology, then morphology is not a property of all languages and of Language, and morphological phenomena should be treated in syntax or phonology.

One piece of evidence that morphology is separate from syntax, phonology, and other branches of linguistics is that words in some languages are grouped into largely arbitrary classes that determine their forms in different environments. Latin nouns fall into five distinct classes, called declensions, which have little or nothing to do with syntax or phonology and cannot be explained by either. They are purely morphological in their significance. The uniquely morphological nature of these classes is truly brought home by the fact that Latin nouns also fall into syntactic agreement classes (usually called genders), and the two systems cross-cut one another: two nouns may belong to the same gender but to different declensions and vice versa. Morphology must be given some independent status in linguistics. Morphology, probably more than any other component of language, interacts with all the rest, but it still has properties of its own. Morphologies are systems, this is a very old observation. Because of it, it is impossible to talk about isolated facts in a language – everything holds together.

Errors happens because the use of the incorrect system. In learning language, the learners often make error in writing, speaking, listening and etc. According to Corder (1981:36) “Errors are described by the application of linguistic theory to the data of erroneous utterances produced by a learner or a group of learners. According to Edge in James (1998:80), “Errors are wrong forms that the pupil could not correct even if their wrongness were to be pointed out. However we can recognise what the students wanted to produce and the class is familiar with that form”.

The appearance of such errors can be detected. It means that the errors arise because each learner has different motivation, social background, and intelligence. It is a relationship with the learner’s language competence. Error is the flawed side of the learner speech or writing. It is a part of conversation or composition that deviates from some selected norms of nature language performance. As a matter of fact, errors are different from mistake as explained by (Corder in James 1998:78).

Based on the explanations above, the writer concludes that errors are something wrong that have been done by the learners in learning language, especially in learning the second language, or English as a foreign language

Following are types of errors according to linguists: according to Dulay, Burt and Krashen’s

1) Omission

The omission errors are characterized by the absence of an item that must appear in a well-formed utterance and the content of morphemes (nominal, verb, adjectives, adverbs) which should be in the correct expressions.

Ex: *He born in England for He was born in England*

To be is omitted in passive sentence form.

2) Addition (Overinclusion)

Addition errors are characterized by the presence of an item that must not appear in a well-formed utterance. According to Dulay, Burt and Krashen in James (1998:107), addition usually occurs in later stage of second language acquisition or when the learner has acquitted some target language rule. There are three subtypes of addition as follows:

(1) Regularization

Regularization errors that fall under the addition category are those in which a marker that is typically added to a linguistic item is erroneously added to exceptions that can be found in English. Regularization which involves overlooking exceptions and spreading rules to domains where they do not apply.

Ex: *The book was readed by Mira.*

The verb read in past form is read not readed.

(2) Double Marking

An error in which a concept is expressed twice when the language requires its expression only once. The failure to delete certain items which are required in some linguistics contraction but not in others.

Ex: *He does loves his girlfriend*

The auxiliary “does” is unnecessary

(3) Simple Addition

Simple addition error is an error that does not belong to double marking or regularization. Simple addition is the subcategory of addition. It is called simple addition, if an error is neither a double marking nor regularization. According to Dulay in James (1998:107), no particular features characterize simple additions other than those that characterize all addition errors. The use of an item which should not appear in a well-formed utterance.

Ex: *In over there*

The preposition in is never used while we say over there.

3) Misformation (Misselection)

Misformation error is a type of error that is characterized by the use of incorrect morpheme or structure. Misformation error is characterized by the use of the wrong form of the morpheme or structure. There are three types of misformation error :

(1) Regularization

Regularization is an item in which a regular marker is used in an irregular one.

Ex: *Womans for women*

(2) Archie-Form

The selection of one member of a class of forms to represent others in the class is a common characteristic of all stages of second language acquisition.

Ex: *That dogs for those dogs*

That instead of those

(3) Alternating Form

In this type of error, the students know a lot more about various members of a class of words and

the different usages among them. However this fact sometimes confuses him to which one to use.

Ex: *He has saw them.*

Saw instead of *seen*.

4) Misordering

Misordering error is error that is characterized by the incorrect placement of a morpheme or group of morphemes in an utterance. Misordering error is characterized by the incorrect placement of a morpheme or group of morphemes in an utterance. The students often do misaddressing on the group of morphemes.

Ex: *What Daddy is doing?*

The word order is confusing. It should be *what is Daddy doing?*

Errors Classification

According to James (1998:142), errors in language writing are divided into lexical errors and grammar error.

1) Lexical Errors

James classifies lexical errors into two categories: formal errors and semantic errors: formal error, for example: a misselection occurs when the lexeme is confusable, and if these are pairs (or triples) of words that look and sound similar, like: *considerable/ considerate, competition/ competitiveness, reserve/preserve, consumption/resumption/assumption* (when some lexemes have the same root but different suffixes and prefixes). Semantic errors, for example: a more general term is used where a specific one is needed, such as the flower had a special **smell (scent/perfume)*.

2) Grammar Errors

James classifies grammar errors into two categories: morphology errors and syntax errors. Morphology errors, for example: *six book**, (plural-s is needed in the sentence). Syntax errors, for example: (*He is*) **a cleverest boy in the class* (misselection of the article at position modifier in noun phrase). In this study, the writer takes the errors classification from James (1998) as his framework and limits his study only in term of morphological errors. Therefore, if it is found syntax errors, it will be neglected.

errors and grammar error.

Table 2. Classification of Morphological Errors based on James (1998) Taxonomy

Noun Morphology Errors	Verb Morphological Errors	Adverb Morphological Errors	Adjective Morphological Errors
a. Omission	a. Omission	a. Omission	a. Omission
b. Addition	b. Addition	b. Addition	b. Addition
c. Misselection	c. Misselection	c. Misselection	c. Misselection
d. Misplacement	d. Misplacement	d. Misplacement	d. Misplacement

Morphological Errors

The following are morphological errors

1. Noun Morphological Errors

1) Omission

Omission is indicated by the absence of certain item that must appear in sentences. In noun morphological error, omission is in noun.

For example: *There are some lake*

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "s" in noun "lake" was omitted. Alphabet "s" in noun "lake" must be added. Because in this sentence there are many lakes. The sentence must be "There are some lakes".

2) Addition

Addition is indicated by the presence of an 'unwanted' item in sentences. The unwanted items do not appear in a well-formed utterance. This happens when the learners overuse certain grammatical rules of the target language. In noun morphological error, Addition was in noun. For example: *It only cost seventy five thousand rupiahs*

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "s" in noun "feets" was overincluded. Alphabet "s" in noun "feet" must be deleted. The sentence should be "It only cost seventy five thousand rupiah"

3) Misselection

It is a use of the wrong form of a structure of morpheme. It could be caused by the difficulties of specific characteristic of the English words which were significantly different with the first language of the agents. In noun morphological error, Misselection is in noun. For example: *I think she is one of the most beautiful girl in my classmate*

This sentence was uncomplete. In this sentence, Noun "classmate" was misselected. This sentence didn't has meaning. Noun "classmate" must be changed with noun "class". This sentence should be "I think she is one of the most beautiful girl in my class".

4) Misplacement

Misplacement/misordering is in addition to selecting the right forms to use in the right context, is to arrange them in the right order. In noun morphological error, Misplacement was in noun. For example: *It's only cost seventy five thousand rupiahs*

This sentence was uncomplete. In this sentence, "it only cost" was misplacement. The position of Noun "cost" must be changed after subject pronoun "it". The sentence should be "It's cost only seventy five thousand rupiahs".

2. Verb Morphological Errors

1) Omission

Omission is indicated by the absence of certain item that must appear in sentences. In verb morphological error, omission is in verb. For example: *She always give her advice for me*. This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "s" in verb "give" was omitted. Alphabet "s" must be added. Because in simple present, es/s must be added in last verb based on the subject. Because the subject was singular and the last alphabet in verb "give" was "e", alphabet "s" must be added. The sentence should be "She always gives her advice for me"

2) Addition

Addition is indicated by the presence of an 'unwanted' item in sentences. The unwanted items do not appear in a well-formed utterance. This happens when the learners overuse certain grammatical rules of the target language. In verb morphological error, Addition was in verb. For example: Every two days in a week, He buyes some shoes This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "e" in verb "buyes" was overincluded. Alphabet "e" in verb "buyes" was unnecessary. Alphabet "e" must be deleted. The sentence should be "Every two days in a week, He buys some shoes"

3) Misselection

It is a use of the wrong from of a structure of morpheme. It could be caused by the difficulties os spesific characteristic of the English words which were significantly different with the first language of the agents. Misselection was in noun. In verb morphological error, misselection is in verb. For example: He is someone who can made me to think

This sentence was uncomplete. In this sentence verb "made" was misselected. because there was modal, modal was followed by V-1. Verb "made" must be changed with "make". The sentence should be "He is someone who can make me to think"

4) Misplacement

Misplacement/misordering is in addition to selecting the right forms to use in the right context, is to arrange them in the right order. In verb morphological error, misplacement was in verb. For example: She always hard work for our

This sentence was uncomplete. "hard work" was misplacement. This sentence didn't has good meaning. "hard work" must changed in to "work hard". The sentence should be "She always work hard for our"

3.Adverb Morphological Errors

1) Omission

Omission is indicated by the absence of certain item that must appear in sentences. In adverb morphological error, omission is in adverb.

For example: My desk actualy light brown

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "l" in adverb "actualy" was omitted. This sentence didn't has meaning. Alphabet "l" in adverb "actualy" must be added. The sentence should be "My desk actually light brown"

2) Addition

Addition is indicated by the presence of an 'unwanted' item in sentences. The unwanted items do not appear in a well-formed utterance. This happens when the learners overuse certain grammatical rules of the target language. In adverb morphological error, Addition was in adverb.

For example: Manybe all people want to go to Paris to see Eiffel Tower.

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "n" in adverb "manybe" was

overincluded. This sentence didn't has meaning. Alphabet "n" in adverb "manybe" must be deleted. The sentence should be "Maybe all people want to go to Paris to see Eiffel Tower"

3) Misselection

It is a use of the wrong from of a structure of morpheme. It could be caused by the difficulties os spesific characteristic of the English words which were significantly different with the first language of the agents. In adverb morphological error, misselection is in adverb. For example: My village in the most beautiful place for me

This sentence was uncomplete. In this sentence preposition "in" was misselected. Preposition "in" was unnecessary. Preposition in must be changed with to be "is". The sentence should be "My village is the most beautiful place for me"

4.Adjective Morphological Errors

1) Omission

Omission is indicated by the absence of certain item that must appear in sentences. In adjective morphological error, omission is in adjective.

For example: Susi is my beatiful gray persian cat

This sentence was uncomplete. In this sentence alphabet "u" in adjective "beatiful" was omitted. This sentence didn't has meaning. Alphabet "u" must be added in adjective "beatiful". This sentence should be "Zedua is my beautiful gray persian cat"

2) Addition

Addition is indicated by the presence of an 'unwanted' item in sentences. The unwanted items do not appear in a well-formed utterance. This happens when the learners overuse certain grammatical rules of the target language. In adjective morphological error, Addition was in adjective.

For example: They are handsomes

This sentence was uncomplete. In this sentence alphabet "s" in adjective "handsomes" was overincluded. This sentence didn't has meaning. Alphabet "s" must be deleted in adjective "handsomes". This sentence should be "They are handsome"

3) Misselection

It is a use of the wrong from of a structure of morpheme. It could be caused by the difficulties os spesific characteristic of the English words which were significantly different with the first language of the agents. In adjective morphological error, misselection is in adjective. For example: She is very lovely

This sentence was uncomplete. In this sentence adjective "lovely" was misselected. This sentence didn't has good meaning. Adjective "lovely" must be changed with adjective "loving". The sentence should be "She is very loving"

4) Misplacement.

misordering is in addition to selecting the right forms to use in the right context, is to arrange them in the right order. In adjective morphological error, misplacement was in adjective.

For example: *It is animal cute* This sentence was uncomplete. In this sentence adjective “animal cute” was misplacement”. This sentence didn’t has good meaning. Adjective “animal cute” must be changed in to position “cute animal”. The sentence should be “It is cute animal”.

Conceptual Framework

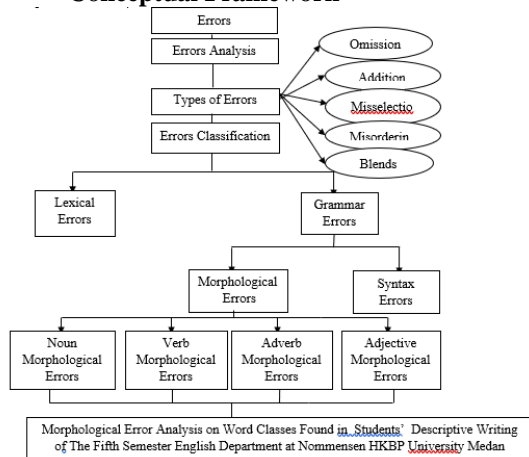


Figure 1. Conceptual Framework (Manik, Sondang :2022)2. Research Design

Research design is a plan and the procedure for research that span the decisions from broad assumptions to detailed methods of data collection and analysis. There are three types of research design, they are; qualitative, quantitative, and mixed methods. The research designed of this study is qualitative method. According to Creswel (2009:193) a qualitative study is to develop descriptions to present these descriptions and themes tat convey multiple perspectives from participants and detailed descriptions of the setting or individuals. This study would be applied with qualitative method.

The subject of this study would be the fifth semester English Department Students of Universitas HKBP Nommensen in Medan. The students consists of 31 students.

After collecting the data from the students, the writer analyzes the students’ errors as following :

1. Classified the errors based on noun morphological errors, verb morphological errors, adjective morphological errors, and adverb morphological errors.
2. Described of the data what data includes part of the four parts of morphological errors, of which noun morphological errors consist of plural-s (omission, redundant, addition), and misselection. verb morphological error consists of singular third person (omission, misplacement), past tense-ed (omission, addition), progresive -ing (omission, addition), and misselection. morphological adverb consists of omission,

addition, andd misselection. adjective morphological errors consist of past tense-ed (omission, addition), progressive (omission, addition) and misselection.

3.Made the percentage each types of morphological errors, in orders to know the most frequent.

4.Made conclusion

The writer would use methodological triangulation to get validity of data. Methodological triangulation refers to the writer used more than one method in the research. According to Cohen (2000:113) methodological triangulation is using the same method on different occassions or different methods on the same object of the study. Thus, methodological triangulation is made different method to get validity of data. Besides, the writer collects the data by using observation which is supported by documentation which can give evidence if the participants are people that is proper to used as subject of researcher.

The data was analyzed by applying qualitative method. The students’ errors on morphological in descriptive writing would be qualitative data. The total number of all errors were 154 errors. The qualitative data can be seen below.

Table 3. The Qualitative Data

1. The cat is a pet animal
2. It is animal cute
3. because it’s always look so clean
4. My desk actualy light brown
5. Her name is Anggi. She come from Ledong
6. I promising not to did it again
7. He always took care on me
8. He is someone who can made me to think
9. She always give her advice for me
10. Her voice is very big if she get angry
11. She do everything to make her children happy
12. She do everything to make her children happy
13. I was very proud because I’m buying it with my own money last week
14. My handphone is white gold colour, 4 gb ram, also have camera
15. In my handphone you can see a lot of application like, facebook, line, whatsapp, instagram.
16. I’m set the application
17. I buying it at Sun Plaza last month
18. After we together eat ramen
19. It’s the first time I buying a handphone with my own money last month
20. She has a black eyes
21. Every two days in a week, He buyes some shoes
22. Even people saying that he is a baby boy
23. In my bedroom many book
24. May bedroom have many things
25. May bedroom have many things
26. Many people said is my bedroom very clean and so beautiful
27. I can see my bedroom friends is so different with

- my bedroom because his bedroom is very dirty.
28. Her name Anggi
 29. And now she lived at bridgen katamso
 30. She has a big eyes
 31. She always make us happy
 32. I think she is a my bestfriend in word
 33. I think she is a my bestfriend in word
 34. Cat are carnivora
 35. Their have a good instings
 36. Cats has a beautiful fur
 37. at why all peoples love cat
 38. Because their is animal
 39. My village is very beautiful and have many animals
 40. My village also have many beautiful school
 41. My village also have many inhabitants
 42. There are some lake
 43. She is fat and skin white
 44. She always teach me etc
 - 45.

The writer classified the students morphological errors based on classifying types of morphological errors, namely noun morphological errors verb morphological errors, adjective morphological errors, and adverb morphological errors. The data was showed below.

Qualitative data analysis is an effort made by working with data, organizing data, sorting it into units that can be managed, synthesizing, searching and finding patterns, finding what is important and what is learned and deciding what can be told to others

Noun morphological errors are errors in noun. For example, the selection of noun is not correct. Because noun is not always a subjeck. Can be like possessive promos and pronoun objects. Besides the lack of letters in writing noun. Which causes the sentence to have no meaning or even to have a confusing meaning. Noun morphological errors are obtained from omission, addition, misselection and misplacement.

1) Omission DATA 1

In my handphone you can see a lot of application like, facebook, line, whatsapp, instagram.

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "s" in noun "aplication" was omitted. Alphabet "s" in noun "alphabet must be added. Because in this sentence there are many applications. The sentence must be "In my handphone you can see a lot of applications like, facebook, line, whatsapp, instagram".

Verb Morphological Errors

Verb morphological errors are errors in verbs. for example, selection of verbs is not correct, placement of verbs that does not fit into place. Besides the lack of letters in the verb writing. which causes the sentence to have no meaning or even to have a confusing meaning. Verb morphological

errors are obtained from omissions, additions, selection errors and misplacement errors.

Omission DATA 2

She always give her advice for me

This sentence was uncomplete. In this sentence, alphabet "s" in verb "give" was omitted. Alphabet "s" must be added. Because in simple present, es/s must be added in last verb based on the subject. Because the subject was singular and the last alphabet in verb "give" was "e", alphabet "s" must be added. The sentence should be "She always gives her advice for me"

Adjective Morphological Errors

Adjective morphological errors are errors in adjective. for example, selection of adjective is not correct, placement of adjective that does not fit into place. Besides the lack of letters in the adjective writing. which causes the sentence to have no meaning or even to have a confusing meaning. Adjective morphological errors are obtained from omissions, additions, selection errors and misplacement errors.

1) Omission DATA 3

Zedua is my beatiful gray persian cat

This sentence was uncomplete. In this sentence alphabet "u" in adjective "beatiful" was omitted. This sentence didn't has meaning. Alphabet "u" must be added in adjective "beatiful". This sentence should be "Zedua is my beautiful gray persian cat"

verb Morphological Errors

Adverb morphological errors are errors in verbs. For example, selection of adverb is not correct, placement of adverb that does not fit into place. Besides the lack of letters in the adverb writing. Which causes the sentence to have no meaning or even to have a confusing meaning. Adverb morphological errors are obtained from omissions, additions, selection errors and misplacement errors.

3) Misselection

My bedroom in the most beautiful place for me

This sentence was uncomplete. In this sentence preposition "in" was misselected. Preposition "in" was unnecessary. Preposition in must be changed with to be "is". The sentence should be "My bedroom is the most beautiful place for me"

Table 4. Morphological Errors' Percentage

NO	Category	Number of Errors	Frequency
1.	Noun Morphological Errors	52	33,8 %
2.	Verb Morphological Errors	91	59,0 %
3.	Adjective Morphological Errors	7	4,6 %
4.	Adverb Morphological Errors	4	2,6 %
Total		154	100%

3. RESEARCH FINDINGS

The result of the analysis, the writer concluded that there are four word classes was found by the writer, namely noun morphological errors, verb morphological errors, adjective morphological errors, and adverb morphological error. The data of morphological errors are found 154 errors. The percentage of errors in noun morphological was 52 errors i.e, 33,8%, errors of verb morphological was 91 errors i.e, 59,0%, errors of adjective morphological was 7 errors i.e, 4,6%, and error of adverb morphological was 4 errors i.e, 2,6%. The result of the analysis was found that the students knew about morphology but they are still confused to write words based on the correct morphology, so they made the errors.

4. CONCLUSIONS

After analyzing the data, the writer makes the conclusions as follows:

1. Morphological is word form and word changes to the group and the meaning of the word.
2. Based on research finding of qualitative data, there were 154 errors are made by the students.
3. There are four word classes of morphological errors is made by students in descriptive writing namely, noun morphological errors, verb morphological errors, adjective morphological errors and adverb morphological errors.
4. The percentage of errors in noun morphological are 52 errors i.e, 33,8%, errors of verb morphological are 91 errors i.e, 59%, errors of adjective morphological are 7 errors i.e, 4,6%, and errors of adverb morphological 4 are errors i.e, 2,6%.
5. The dominant of morphological error is verb morphological errors.

5. REFERENCES

- Arikunto, Suharsimi.(2017).*Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.2017
- Brown, H.D.2000. *Teaching By Principles An Interactive Approach To Language Pedagogy. Second Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Carnie, Andrew. 2002. *Syntax – A Generative Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Cohen.L. 2000. *Research Methods in Education*. London and New York.
- Corder, S.P.1981. *Error Analysis and Interlanguage*. Walton Street: Oxford University Press.
- Creswell, W.John.2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.
- Denzil. K. Norman. 2009. *Qualitative Inquiry Under Fire: Toward a New Paradigma Dialogue*.walnut Creek. California.

- Dulay, et.al. 1982. *Language Two*. Oxford: University Press.
- Harmer, Jeremy. 2004. *How to Teach Writing*. New York: Longman.
- Imam, S. 2015. *Analysing Morphological Errors On Students' Composition At Centre Of Learning Lingua (Coll) In Mamuju*".
- James, Carl.1998. *Error in Language Learning and Use*. New York: Longman.
- Knapp Peter, Watkins Megan. 2005. *Grammar, Text and Grammar. Tecnologies for Teaching and Assessing Writing*. Australia: University of New South Wales Press Ltd.
- Lyons, John. 2002. *Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mark, Aronoff. 2011. *What is Morphology?*. India: SPi Publisher Services
- Michael, Allen. 2003. *The Truth about Writing*. Eastbourn: Kingsfield Publication.
- Ramadan, S. 2015. *Morphological Errors Made By Jordanian University Students*.
- Siahaan, Sanggam. 2014. *The English Paragraph*. Medan: Nommensen HKBP University.
- Siahaan, Sanggam. 2007. *Generic Text Structure*. Pematangsiantar: Graha Ilmu.
- Wierzbicka, Anna.2014. *Imprisoned in English*. Oxford University: Press.

PENGARUH PANDEMI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM BELAJAR MAHASISWA DI INDONESIA

Oleh :

Heruna Tanty¹⁾, Bertlung Saputra²⁾, Jane Audrey Quinn³⁾, Nadya Cio Cionta⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik Industri, BINUS University

²email: saputrabertlung@yahoo.co.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, tentunya membawa dampak yang besar di berbagai bidang seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, termasuk pada bidang pendidikan. Salah satu dampak dari pandemi ini terhadap aspek pendidikan adalah perubahan sistem pembelajaran di Indonesia yang terbagi menjadi tiga yaitu *online*, *offline*, dan *hybrid*. Perubahan sistem pembelajaran ini tentunya berdampak kepada kualitas pembelajaran yang diterima para mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pandemi terhadap efektivitas sistem belajar mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada target populasi yaitu mahasiswa di Indonesia sebanyak 100 orang. Data yang telah didapat melalui kuesioner akan dianalisis secara deskriptif dan juga inferensial. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh data yang telah dikumpulkan adalah *valid* dan *reliable*, serta sistem pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran secara *offline*, diikuti dengan pembelajaran secara *online*, dan pembelajaran secara *hybrid*.

Kata Kunci: Efektivitas Sistem Belajar, Pandemi COVID-19, Analisis Deskriptif, Analisa Inferensial

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi masalah bagi seluruh dunia selama 2 tahun terakhir dan membuat masyarakat dunia menjalani pola hidup yang berbeda dari sebelum pandemi seperti membatasi aktivitas luar, bepergian menggunakan masker, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan dan lain-lain. COVID-19 juga telah memberikan dampak ke semua bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan (Aji, 2020). Pelajar dan mahasiswa yang biasanya melakukan pembelajaran secara tatap muka menjadi harus beradaptasi dengan pembelajaran secara daring akibat aturan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah (Mar'ah, Rusilowati, & Sumarni, 2020). Sekolah dan universitas tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya dan bahkan staf serta dosen tidak diperbolehkan untuk datang sehingga mempengaruhi sistem belajar mengajar.

Sistem belajar di Indonesia umumnya dilakukan secara tatap muka di ruang kelas yang biasanya berkisar dari lima hingga enam jam untuk pelajar. Sistem belajar yang diterapkan di Indonesia meliputi sistem pendidikan berorientasi pada nilai, sistem pendidikan terbuka, serta sistem pendidikan secara beragam. Mahasiswa diharapkan dapat bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, berpikiran kreatif dan inovatif, serta bermotivasi tinggi dalam mencapai cita-cita (Dr. H.A. Rusdiana, 2018). Mahasiswa biasanya dibimbing oleh beberapa dosen pengampu yang disertai modul pembelajaran. Tidak sedikit juga penerapan pembelajaran secara praktik di laboratorium maupun lainnya sesuai dengan jurusan serta mata kuliah yang diambil.

Pembelajaran secara daring membawa banyak perubahan dalam sistem pendidikan, materi belajar, hingga hambatan yang dihadapi baik oleh guru, siswa serta penyelenggara pendidikan. Pembelajaran daring diharapkan mampu menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tatap muka dengan memungkinkan siswa untuk mempelajari materi dari internet sehingga tingkat pengetahuan siswa dapat meningkat menjadi lebih luas. (Irinna Aulia Nafrin, 2021) Sistem pembelajaran di masa pandemi yang harus dilakukan secara daring membuat perlunya penerapan metode baru. Beberapa contoh dari penerapan metode baru yaitu, penggunaan aplikasi kuis, forum diskusi, dan pembuatan proyek kelompok. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga memanfaatkan berbagai media yang mendukung perkuliahan seperti Zoom Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom, dsb. Sistem yang diterapkan tersebut memberikan beberapa dampak positif dan negatif dalam aktivitas belajar-mengajar. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilatarbelakangi oleh masalah tersebut (Nurina Kurniasari, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh objek yang akan ada di dalam penelitian. Sampel yang diambil harus bisa mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, oleh itu pemilihan sampel harus diusahakan sedemikian rupa sehingga sampel itu bisa menunjukkan gambaran keadaan keseluruhan populasi, jumlah sampel jangan

terlalu sedikit dan menentukannya secara *random* atau sembarang. Populasi dan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa di Indonesia sebanyak 100 orang (Nasution, 2017).

- Mengumpulkan data

Pengumpulan data pada penelitian ini merupakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Pengumpulan data ini akan menggunakan kuesioner tertutup (Singestecia, Handoyo, & Isdaryanto, 2018).

- Menentukan pendekatan metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. metode kuantitatif adalah suatu proses penelitian dengan menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis hal yang ingin penulis ketahui (Millena & Jesi, 2021).

- Menganalisis data

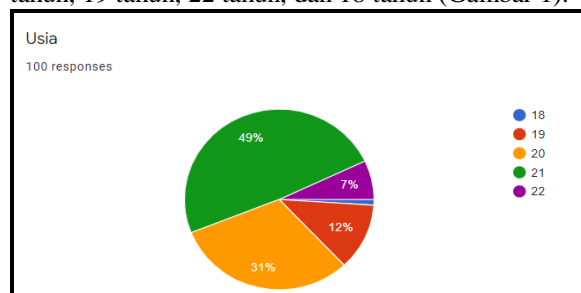
Data yang didapatkan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami yang berbentuk informasi yang lebih ringkas (Ashari, Wibawa, & Persada, 2017). Statistik inferensial adalah teknik atau alat yang dipakai dalam membuktikan kebenaran teori probabilitas yang dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Susilawati, Dharmawansyah, & Sumaedi, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian survei efektivitas sistem belajar mahasiswa menyebarkan kuesioner yang diisi oleh 100 orang dengan skala Likert 1 sampai 4 dimana 1 berarti sangat tidak setuju dan 4 berarti sangat setuju. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan beberapa metode:

- Analisis deskriptif

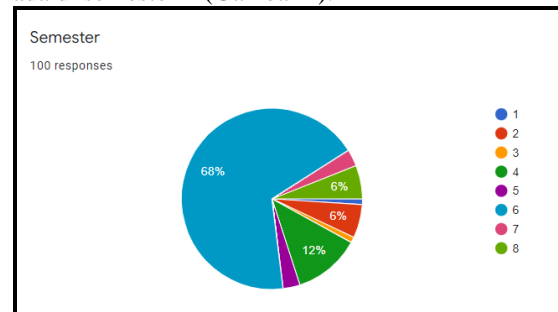
Analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan Google Form dimana dapat dilihat data identitas responden yang didapatkan dari kuesioner dalam bentuk *chart* dan Microsoft Excel dimana dilakukan analisis deskriptif data seperti rata-rata, standard error, *skewness*, kurtosis, dan lain-lain. Kuesioner survei efektivitas sistem belajar mahasiswa diisi oleh 100 orang responden mahasiswa dengan berbagai rentang usia dimana mayoritas responden berusia 21 tahun atau sebanyak 49 responden, diikuti dengan 20 tahun, 19 tahun, 22 tahun, dan 18 tahun (Gambar 1).



Gambar 1 *Chart* Umur Responden

Sumber: Diolah melalui Google Form

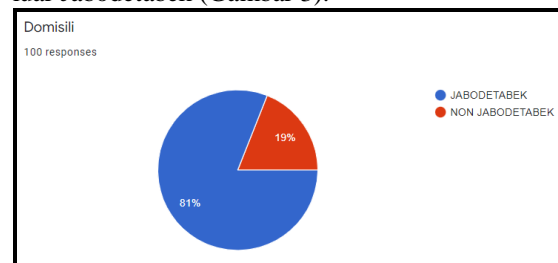
Selanjutnya didatakan juga mengenai semester perkuliahan dimana kebanyakan responden sedang menjalani semester 6 atau sebanyak 68 orang, diikuti dengan semester 4, semester 8 dan semester 2, semester 5, semester 7, dan data yang paling sedikit ada di semester 1 (Gambar 2).



Gambar 2 *Chart* Semester Responden

Sumber: Diolah melalui Google Form

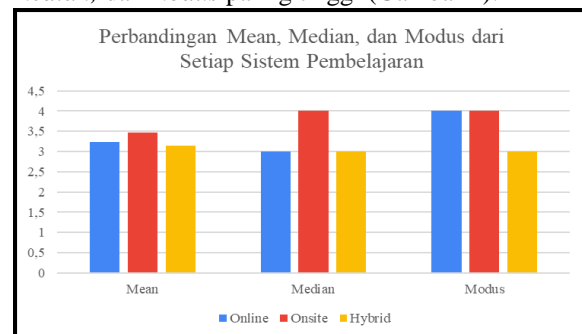
Didatakan juga lokasi dari responden yang hasilnya dimana 81 orang responden berdomisili di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sementara 19 orang lainnya berdomisili di luar Jabodetabek (Gambar 3).



Gambar 3 *Chart* Semester Responden

Sumber: Diolah melalui Google Form

Nilai *mean*, *median*, dan *modus* dari masing-masing sistem pembelajaran dicari dengan bantuan Microsoft Excel. Hasil pencarian rata-rata, nilai tengah, dan nilai paling sering muncul menunjukkan bahwa sistem pembelajaran *onsite* memiliki *mean*, *median*, dan *modus* paling tinggi (Gambar 4).



Gambar 4 Grafik *Mean*, *Median*, dan *Modus*

Sumber: Diolah melalui Microsoft Excel 365

Dilakukan perhitungan analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah hasil histogram dari data efektivitas sistem pembelajaran secara *online*. Hasil perhitungan analisis deskriptif untuk tiga jenis tipe pembelajaran, yakni *online*, *offline*, dan *hybrid* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Analisis Deskriptif Sistem Pembelajaran *Online, Offline, dan Hybrid*

	Online	Offline	Hybrid
Mean	3,231429	Mean 3,472857	Mean 3,15
Standard Error	0,029868	Standard Error 0,025989	Standard Error 0,02784
Median	3	Median 4	Median 3
Mode	4	Mode 4	Mode 3
Standard Deviation	0,790238	Standard Deviation 0,687602	Standard Deviation 0,736587
Sample Variance	0,624476	Sample Variance 0,472796	Sample Variance 0,542561
Kurtosis	-0,75299	Kurtosis 0,834836	Kurtosis 0,170601
Skewness	-0,57489	Skewness -1,14666	Skewness -0,61039
Range	3	Range 3	Range 3
Minimum	1	Minimum 1	Minimum 1
Maximum	4	Maximum 4	Maximum 4
Sum	2262	Sum 2431	Sum 2205
Count	700	Count 700	Count 700
Confidence Level(95,0%)	0,058642	Confidence Level(95,0%) 0,051026	Confidence Level(95,0%) 0,054661

Sumber: Olahan data melalui Microsoft Excel 365

Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa responden memiliki rata-rata atau nilai tengah dalam kisaran 3 yang berarti setuju baik untuk sistem pembelajaran *online, offline, dan hybrid*. Nilai rata-rata efektivitas yang paling kecil adalah *hybrid* dengan hasil 3,15, lalu sistem belajar *online* dengan hasil 3,23, dan yang memiliki nilai efektivitas terbesar adalah sistem belajar *offline* dengan hasil 3,47. Hasil tersebut dapat digunakan untuk mewakili hasil dari masing-masing kuesioner sistem pembelajaran sehingga didapatkan bahwa responden lebih memilih untuk melakukan sistem pembelajaran *offline*. Setelah itu diketahui juga nilai standard error yang mencerminkan keakuratan sample yang dipilih terhadap populasinya. Semakin kecil nilai standard error, semakin mengindikasikan bahwa sampling yang diambil bagus, atau cukup mewakili populasi yang sedang diteliti. Pada data kuesioner, diketahui bahwa nilai standard error untuk masing-masing sistem pembelajaran adalah 0,0298, 0,0259, dan 0,0278 yang berturut-turut untuk *online, offline, dan hybrid*. Nilai standard error yang kecil dapat mencerminkan bahwa data cukup mewakili populasi mahasiswa di Indonesia dengan nilai *standard error* terbaik pada sistem pembelajaran *offline*.

Selanjutnya adalah analisis nilai tengah atau median yang merupakan suatu nilai yang menempati posisi tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Median dari sistem pembelajaran *online* dan *hybrid* adalah 3, sementara untuk *offline* adalah 4. Dihitung juga data yang paling banyak muncul dalam sample yang ada dalam statistika disebut dengan mode ataupun modus dimana *online* dan *hybrid* memiliki nilai 3 sementara *offline* memiliki nilai modus 4. Selanjutnya adalah data simpangan baku (standar deviasi) yang menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Simpangan baku merupakan akar pangkat dua dari variansi atau angka yang menunjukkan keberagaman data. Simpangan baku dalam data efektivitas sistem pembelajaran adalah 0,79 untuk *online*, 0,68 untuk *offline*, dan 0,73 untuk *hybrid* sementara nilai variansi adalah 0,62 untuk *online*, 0,47 untuk *offline*, dan 0,54 untuk *hybrid*. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa data *offline* memiliki penyimpangan yang paling kecil.

Terdapat juga data mengenai kurtosis atau derajat keruncingan suatu distribusi dengan nilai -0,75 untuk *online*, 0,83 untuk *offline*, dan 0,17 untuk *hybrid* dimana semua data merupakan *platykurtic* karena memiliki nilai kurtosis di bawah 3. Untuk nilai *skewness* atau derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari nilai rata-rata) maka dikatakan bernilai positif (*skewed to the right*) dan jika sebaliknya maka bernilai negatif (*skewed to the left*). Nilai *skewness* yang mendekati 0 berarti data berdistribusi normal. Nilai *skewness* data untuk *online* adalah sebesar -0,57, *offline* sebesar -1,14, dan *hybrid* sebesar -0,61 yang menunjukkan bahwa ketiga data memiliki distribusi yang normal dan tidak terdapat banyak kesenjangan antara data.

Perhitungan selanjutnya adalah mengenai nilai minimum dan maksimum dari masing-masing sistem pembelajaran dimana semua memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Dari data tersebut, dapat diketahui *range* atau selisih antara nilai maksimum dan minimum dimana semua sistem pembelajaran memiliki nilai *range* 3. Jumlah dari data atau sum dari masing-masing sistem pembelajaran adalah 2.262 untuk *online*, 2.431 untuk *offline*, dan 2.205 untuk *hybrid*. Hasil penjumlahan tertinggi adalah *offline*, diikuti dengan *offline*, serta *hybrid*. Skala yang digunakan adalah skala Likert 1 hingga 4 dengan 4 sangat setuju sehingga semakin besar hasil penjumlahannya, maka sistem pembelajaran akan semakin bagus. Banyaknya data yang diolah untuk penelitian ini adalah 700 data untuk masing-masing sistem pembelajaran yang dianalisis. Angka tersebut berasal dari 7 pertanyaan terkait yang diisi oleh 100 orang responden.

- Analisis inferensial

Analisis inferensial menguji data berdasarkan tes statistik mengenai uji beda ANOVA, reliabilitas, dan validitas. Uji beda dilakukan dengan bantuan *software* statistik Minitab dimana dilakukan uji beda hasil penyebaran kuesioner sistem efektivitas pembelajaran antara *online, onsite, dan hybrid*. Hipotesis yang ingin diuji yaitu:

$$H_0: L = S = H$$

Tidak ada perbedaan antara sistem belajar *online, onsite, hybrid*

$$H_1: L \neq S \neq H$$

Ada perbedaan antara sistem belajar *online, onsite, hybrid*

Level signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan *degree of freedom* (df) penelitian adalah k-1, n-k sehingga dengan k=3 dan n=100, df dari data adalah 2;97. Digunakan tabel f untuk uji beda dan f tabel data bernilai 3,09. Kemudian diuji data tersebut dengan Minitab ANOVA uji f (Gambar 5).

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Factor	2	39,47	19,7348	36,10	0,000
Error	2097	1146,24	0,5466		
Total	2099	1185,71			

Gambar 5 Hasil Uji Beda F

Sumber: Diolah melalui Minitab 19

Hasil Minitab menunjukkan bahwa P-value data adalah 0 atau lebih kecil dari level signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Daerah penolakan H₀ dilakukan jika P-value lebih kecil dari level signifikansi sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran *online*, *onsite*, dan *hybrid* berbeda. Kemudian dicari perbedaan antara ketiganya apakah signifikan atau tidak dengan hipotesis yang ingin diuji yaitu:

Onsite dan online

H₀: Perbedaan antara sistem pembelajaran *onsite* dan *online* tidak signifikan

H₁: Perbedaan antara sistem pembelajaran *onsite* dan *online* signifikan

Hybrid dan online

H₀: Perbedaan antara sistem pembelajaran hybrid dan online tidak signifikan

H₁: Perbedaan antara sistem pembelajaran hybrid dan online signifikan

Hybrid dan onsite

H₀: Perbedaan antara sistem pembelajaran hybrid dan onsite tidak signifikan

H₁: Perbedaan antara sistem pembelajaran hybrid dan *onsite* signifikan

Level signifikansi yang digunakan adalah 5% dan dilakukan uji ANOVA Tukey untuk mengetahui perbedaan yang terjadi signifikan atau tidak (Gambar 6).

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means

Difference of Levels	Difference of Means	SE of Difference	95% CI	T-Value	Adjusted P-Value
Onsite - Online	0,2414	0,0395	(0,1489; 0,3339)	6,11	0,000
Hybrid - Online	-0,0814	0,0395	(-0,1739; 0,0111)	-2,06	0,098
Hybrid - Onsite	-0,3229	0,0395	(-0,4154; -0,2304)	-8,17	0,000

Individual confidence level = 98,06%

Gambar 6 Hasil Uji ANOVA Tukey

Sumber: Diolah melalui Minitab 19

Diketahui bahwa P-value dari *onsite* dan *online* adalah 0 atau lebih kecil dari level signifikansi sehingga H₀ *onsite* dan *online* ditolak atau perbedaan hasil kuesioner antara *onsite* dan *online* signifikan. P-value dari *hybrid* dan *online* adalah 0,098 atau lebih besar dari level signifikansi sehingga H₀ *hybrid* dan *online* diterima atau perbedaan hasil kuesioner antara *hybrid* dan *online* tidak signifikan. Sementara P-value dari *hybrid* dan *onsite* memiliki nilai 0 atau lebih kecil dari level signifikansi sehingga H₀ *hybrid* dan *onsite* ditolak atau perbedaan hasil kuesioner antara *hybrid* dan *onsite* signifikan. Selanjutnya

dilakukan juga uji reliabilitas dan validitas data untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah kredibel.

Pengujian reliabilitas dan validitas data sistem pembelajaran *online* dengan bantuan *software* SPSS dapat dilihat di bawah ini.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	5

Gambar 7 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Cronbach's Alpha Online)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,41	5,093	.747	.691
VAR00002	12,32	6,078	.596	.748
VAR00005	12,20	6,485	.407	.804
VAR00007	12,17	6,284	.453	.791
VAR00003	12,42	5,418	.680	.717

Gambar 8 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Online)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00005	VAR00007	Total
VAR00001	Pearson Correlation	1	.655**	.738**	.369**	.394**	.861**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00002	Pearson Correlation	.655**	1	.545**	.213*	.365**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.034	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00003	Pearson Correlation	.738**	.545**	1	.369**	.335**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00005	Pearson Correlation	.369**	.213*	.369**	1	.328**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.000	.034	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00007	Pearson Correlation	.394**	.365**	.335**	.328**	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.861**	.742**	.816**	.616**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 9 Hasil Uji Validitas SPSS (Online)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, data sistem perkuliahan *online* menggunakan aplikasi SPSS, dapat diketahui bahwa terdapat nilai *Cronbach's Alpha* maksimum yaitu 0.7930 setelah menghilangkan dua buah *item*, yaitu *item* 4 dan *item* 6. Nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel di atas (*perkuliahan online*) bernilai lebih dari 0,7, maka dapat dinyatakan bahwa kuesioner untuk sistem perkuliahan *online* ini dinyatakan *reliable* atau konsisten. Pengujian data selanjutnya adalah melakukan uji validitas pada *item test* sisa dengan nilai *alpha* yang dipakai adalah 0,05 dan 0,01. Nilai r hitung perlu dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menentukan tingkat validitas dari setiap *item test*. Nilai r tabel didapatkan dengan cara menghitung nilai dF terlebih dahulu dengan rumus N-2. Jumlah responden atau adalah 100, sehingga nilai dF dari data yang dianalisis adalah 98.

Nilai r tabel yang didapatkan untuk tingkat signifikansi 95% adalah 0,1654 dan nilai r tabel untuk tingkat signifikansi 99% adalah 0,2565. Apabila nilai r hitung yang terdapat pada Tabel *Correlation* lebih besar dibandingkan nilai r tabel *alpha* 95% dan 99%, maka akan ditandai dengan 2 bintang (**). Apabila nilai r hitung hanya lebih besar dibandingkan nilai r tabel *alpha* 95%, maka akan ditandai dengan 1 bintang (*). Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa semua *item test* yang tersisa adalah valid dan memiliki tingkat validitas sebesar 99% yang ditandai dengan adanya 2 bintang (**). Artinya, peluang *error* setiap data yang ada pada *item test* adalah sebesar 1%.

Hasil pengujian reliabilitas dan validitas data sistem pembelajaran *offline* dengan bantuan *software* SPSS dapat dilihat di bawah ini.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.805	6

Gambar 10 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Cronbach's Alpha Offline)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	17.82	4.553	.624	.761
VAR00002	17.65	5.341	.492	.790
VAR00003	17.85	4.735	.613	.763
VAR00004	17.78	5.022	.557	.776
VAR00005	17.69	5.085	.650	.759
VAR00007	17.71	5.218	.464	.797

Gambar 11 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Offline)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Correlations								
		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00007	Total
VAR00001	Pearson Correlation	1	.536**	.577**	.354**	.453**	.316**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00002	Pearson Correlation	.536**	1	.379**	.243**	.457**	.194	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.015	.000	.053	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00003	Pearson Correlation	.577**	.379**	1	.443**	.451**	.333**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00004	Pearson Correlation	.354**	.243**	.443**	1	.539**	.461**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00005	Pearson Correlation	.453**	.457**	.451**	.539**	1	.430**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00007	Pearson Correlation	.316**	.194	.333**	.461**	.430**	1	.639**
	Sig. (2-tailed)	.001	.053	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.773**	.644**	.757**	.706**	.759**	.639**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

Gambar 12 Hasil Uji Validitas SPSS (Offline)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Hasil pengolahan data secara inferensial untuk hasil *offline* dilakukan dengan cara uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan aplikasi IBM SPSS. Pada

uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach's *Alpha* maksimal adalah 0,805 dengan menghilangkan *item test* nomor 6. Hasil Cronbach's *Alpha* tersebut dapat diandalkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil data yang didapatkan konsisten atau *reliable* dan dapat digunakan. Pengujian data selanjutnya adalah melakukan uji validitas pada *item test* sisa dengan nilai *alpha* yang dipakai adalah 0,05 dan 0,01. Nilai r hitung perlu dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menentukan tingkat validitas dari setiap *item test*. Nilai r tabel didapatkan dengan cara menghitung nilai dF terlebih dahulu dengan rumus N-2. Jumlah responden atau adalah 100, sehingga nilai dF dari data yang dianalisis adalah 98.

Nilai r tabel yang didapatkan untuk tingkat signifikansi 95% adalah 0,1654 dan nilai r tabel untuk tingkat signifikansi 99% adalah 0,2565. Apabila nilai r hitung yang terdapat pada Tabel *Correlation* lebih besar dibandingkan nilai r tabel *alpha* 95% dan 99%, maka akan ditandai dengan 2 bintang (**). Apabila nilai r hitung hanya lebih besar dibandingkan nilai r tabel *alpha* 95%, maka akan ditandai dengan 1 bintang (*). Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa semua *item test* yang tersisa adalah valid dan memiliki tingkat validitas sebesar 99% yang ditandai dengan adanya 2 bintang (**). Artinya, peluang *error* setiap data yang ada pada *item test* adalah sebesar 1%.

Terakhir, hasil pengujian reliabilitas dan validitas data sistem pembelajaran *hybrid* dengan bantuan *software* SPSS dapat dilihat di bawah ini.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Gambar 13 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Cronbach's Alpha Hybrid)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12.13	5.932	.773	.878
VAR00002	12.23	6.058	.756	.882
VAR00003	12.24	5.901	.800	.872
VAR00005	12.20	6.242	.747	.884
VAR00006	12.20	6.283	.712	.891

Gambar 14 Hasil Uji Reliabilitas SPSS (Hybrid)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

		Correlations					
		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00005	VAR00006	Total
VAR00001	Pearson Correlation	1	.728**	.686**	.642**	.589**	.862**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00002	Pearson Correlation	.728**	1	.609**	.607**	.654**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00003	Pearson Correlation	.686**	.609**	1	.762**	.668**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00005	Pearson Correlation	.642**	.607**	.762**	1	.560**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
VAR00006	Pearson Correlation	.589**	.654**	.668**	.560**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.862**	.849**	.878**	.838**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Gambar 15 Hasil Uji Validitas SPSS (Offline)

Sumber: Diolah melalui IBM SPSS 26

Berdasarkan hasil perhitungan data sistem perkuliahan *hybrid* menggunakan aplikasi SPSS, dapat diketahui bahwa terdapat nilai *Cronbach's Alpha* maksimum yaitu 0.903 setelah menghilangkan satu buah *item*, yaitu *item*. Nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel diatas (perkuliahan *hybrid*) bernilai lebih dari 0,7, maka dapat dinyatakan bahwa kuisioner untuk sistem perkuliahan *hybrid* ini dinyatakan *reliable* atau konsisten. Pengujian data selanjutnya adalah melakukan uji validitas pada *item test* sisa dengan nilai *alpha* yang dipakai adalah 0,05 dan 0,01. Nilai *r* hitung perlu dibandingkan dengan nilai *r* tabel untuk menentukan tingkat validitas dari setiap *item test*. Nilai *r* tabel didapatkan dengan cara menghitung nilai *dF* terlebih dahulu dengan rumus $N-2$. Jumlah responden atau adalah 100, sehingga nilai *dF* dari data yang dianalisis adalah 98.

Nilai *r* tabel yang didapatkan untuk tingkat signifikansi 95% adalah 0,1654 dan nilai *r* tabel untuk tingkat signifikansi 99% adalah 0,2565. Apabila nilai *r* hitung yang terdapat pada Tabel *Correlation* lebih besar dibandingkan nilai *r* tabel *alpha* 95% dan 99%, maka akan ditandai dengan 2 bintang (**). Apabila nilai *r* hitung hanya lebih besar dibandingkan nilai *r* tabel *alpha* 95%, maka akan ditandai dengan 1 bintang (*). Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa semua *item test* yang tersisa adalah valid dan memiliki tingkat validitas sebesar 99% yang ditandai dengan adanya 2 bintang (**). Artinya, peluang *error* setiap data yang ada pada *item test* adalah sebesar 1%.

4. KESIMPULAN

Diketahui bahwa seluruh data yang dikumpulkan adalah valid berdasarkan uji validitas dan memiliki nilai *Cronbach's alpha* yang dapat diandalkan atau *reliable*. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran yang paling efektif menurut responden adalah pembelajaran secara *offline*, diikuti dengan pembelajaran secara *online*, dan pembelajaran secara *hybrid*.

5. REFERENSI

- Aji, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(5), 395-402. doi:10.15408/sjsbs.v7i5.15314
- Ashari, B. H., Wibawa, B. M., & Persada, S. F. (2017). Analisis Deskriptif dan Tabulasi Silang pada Konsumen Online shop di Instagram (Studi Kasus 6 Universitas di Kota Surabaya). *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 6(1), 17-21.
- Dr. H.A. Rusdiana, D. M. (2018). *Kewirausahaan Teori dan Praktik* (2 ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irinna Aulia Nafrin, H. (2021). Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 456-462.
- Mar'ah, N. K., Rusilowati, A., & Sumarni, W. (2020). Perubahan Proses Pembelajaran Daring Pada Siswa Sekolah Dasar Di Tengah Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Pascasarjana*, 445-452.
- Millena, R., & Jesi, T. (2021). Analisis Pendapatan Negara Indonesia Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Metode Kuantitatif. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 1004-1009.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49-55.
- Nurina Kurniasari, A. P. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru Menggunakan Media Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Form Dan Kahoo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27-33.
- Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63-72.
- Susilawati, T., Dharmawansyah, D., & Sumaedi. (2019). Gas, Metode Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Sumbawa). *Jurnal Tambora*, 3(3), 107-114.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE ATAS BARANG TIDAK SESUAI

Oleh:

Rahadian Irhamil Haqqi Al Irsyad¹, Anang Dony Irawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹e-mail:rahadian.hamil.haqqi-2018@fh.um-surabaya.ac.id

²e-mail:anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Dalam dunia jual beli online sering kali terjadi perselisihan antara konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Kemajuan teknologi internet tidak dipungkiri adanya wadah untuk perdagangan secara online. Jual beli online adalah wadah untuk sistem transaksi online untuk menjual berbagai produk yang diperdagangkan. Saat ini sangat mudah mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bentuk-bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang yang tidak sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang tidak sesuai yang merupakan aturan hak bagi konsumen dan pelaku usaha dengan adanya *wanprestasi*. Selain itu juga mengkaji tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas barang tidak sesuai dan bagaimana terjadinya upaya hukumnya. Hasil dari kajian diperoleh bahwa upaya hukum dapat dilakukan secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara non litigasi oleh badan yang dapat menyelesaikan sengketa seperti badan penyelesaian sengketa konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli, Konsumen, Usaha, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pengguna internet ini memang banyak memberikan dampak baik dan menunjukkan jika pada era saat ini internet sangat dibutuhkan khususnya pada saat COVID-19 yang aman segala serba online (Nurcahyani n.d.). Kemajuan teknologi internet tidak dipungkiri adanya wadah untuk perdagangan secara online, jual beli online adalah wadah untuk sistem transaksi online untuk menjual berbagai produk yang di perdagangkan. Saat ini sangat mudah mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat, selain itu ada kesenjangan ketimpangan antara barang, jasa, hukum dan peluang yang diterima setiap individu (Dony Irawan n.d.). Terdapat gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam jual beli online tidak sesuai dengan barang sampai ke tangan konsumen, ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum bagi pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dilihatkan di dalam media social. Hak untuk konsumen atas informasi tersebut berguna bagi para konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan gambar yang diharapkan suatu produk, sehingga konsumen dapat membeli suatu produk sesuai dengan yang diharapkan dalam suatu barang yang dibeli serta mencegah kerugian akibat ketidaksesuaian informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha.

Masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu

barang yang dibutuhkan akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online (Hakiki 2017). Untuk itu informasi yang lengkap dan sesuai akan suatu produk merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting bagi konsumen sebelum mereka membeli suatu produk. Untuk itu adanya upaya perlindungan hukum sehingga para konsumen dengan aman untuk membeli suatu produk di perdagangan *online*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan metode penelitian doktrinal. Perolehan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik mengolah dari hasil pengumpulan bahan primer dan juga bahan sekunder, yaitu melalui peraturan perundang-

undangan, data, literatur-literatur terkait, dan beberapa dokumen yang terkait dengan permasalahan ini, serta bahan hukum tersier untuk membantu memperjelas dalam menganalisis data tersebut di atas yang memiliki kesesuaian dengan tema yang akan diangkat (Supriyono & Irawan, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang yang tidak sesuai

Menurut KBBI Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Konsumen adalah suatu orang yang menggunakan barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Karena itu dalam transaksi jual beli secara *online*, adanya media sosial seorang pembeli online tidak membeli secara langsung untuk itu konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum memuat tentang hak-hak konsumen, yang menyebutkan bahwa (UUPK 1999) :

1. Konsumen berhak atas rasa aman, nyaman, dan tentram dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa
2. Kepemilikan produk atau jasa dengan harga yang disepakati dan dibawah kondisi dan jaminan yang ditentukan, terlepas dari berapa banyak uang yang dipertukarkan.
3. Konsumen berhak atas informasi yang benar, tidak ambigu dan jujur mengenai syarat dan keadaan pembeli produk dan layanan.
4. Untuk mendapatkan suara mereka didengar tentang produk atau layanan yang mereka gunakan
5. Hak-hak dasar mencakup kemampuan untuk mengadvokasikan dan melindungi kepentingan konsumen, serta bekerja menuju penyelesaian masalah perlindungan konsumen yang cepat dan adil.
6. Hak untuk mendapatkan nasehat dan Pendidikan dari para ahli
7. Individu memiliki hak untuk dilayani atau diperlakukan secara adil tanpa bias
8. Hak konsumen atas pergantian, kompensasi, dan/atau penggantian jika produk atau layanan yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan perjanjian
9. Hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya

Pelaku Usaha adalah seseorang yang mendistribusikan suatu barang dan pemasaran barang kepada masyarakat luas. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Pelaku usaha

adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menciptakan dan berkedudukan atau melakukan suatu kegiatan area hukum negara Republik Indonesia, baik perorangan maupun Bersama melalui perjanjian menyelenggarakan badan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak atas pelaku usaha, menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan
5. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bagi konsumen maupun pelaku usaha penyedia onlineshop untuk memenuhi ketentuan dalam setiap awal melakukan kegiatan jual beli online, harus disepakati yang menjadi aturan. Tujuan pengaturan kegiatan jual beli *online* adalah selain memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap informasi pribadi yang telah diketahui dan/atau preferensi yang dilakukan dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya, untuk itu selain berkaitan dengan hak asasi konsumen, juga berkaitan dengan upaya dari penyedia *e-commerce* maupun menyediakan onlineshop untuk menghindari pelanggaran atas rasa aman dan nyaman serta harga diri dari konsumen itu sendiri (Mashitoh 2017). Untuk itu perlu adanya perlindungan konsumen yang menjadi landasan hukum untuk mengatur jalannya transaksi jual beli online, bagi pelaku usaha yang pemilik toko online juga diberlakukan dua larangan pokok yaitu bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan syarat dan standar yang layak untuk di pergunakan oleh konsumen dan keharusan untuk memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan (Studi Hukum 2019). Perlu adanya bentuk perlindungan seperti apa yang harus menjadikan landasan hukum yang kuat sehingga konsumen merasa aman terkait membeli barang secara online di suatu toko online, untuk itu perlu kekuatan hukum yang kuat didalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi kebanyakan barang yang tidak sesuai di jual beli online, banyak yang pelaku usaha memanfaatkan media sosial hanya untuk mencari keuntungan sepihak tanpa memikirkan pihak yang dirugikan yaitu konsumen. Perlindungan hukum bagi

konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum anatar pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah (Afidah 2019). Barang yang ditawarkan melalui online gambarnya terlalu mewah dan bagus sesuai yang dikategorikan oleh konsumen, bahkan barang yang ketidaksesuaian seperti gambar, ukuran, dan warna tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen bukan hanya sebagai upaya pencegahan (*preventif*) saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai aturan represif dalam berbagai kegiatan terkait perlindungan hukum, hak konsumen atas informasi ini berguna untuk mendapatkan kejelasan terkait barang dan hak tersebut berguna agar para konsumen memperoleh gambaran suatu produk yang diinginkannya dan sehingga konsumen dapat membeli suatu produk sesuai dengan yang diinginkannya serta mencegah kerugian akibat ketidaksesuaian informasi (Pratama 2017).

Pada transaksi perdagangan melalui *e-commerce* kesepakatan antara para pihak terluang dalam suatu kontrak perjanjian (dyah 2018). Transaksi yang dilakukan melalui internet seringkali tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian oleh konsumen dan pelaku usaha, pelaku yang menjual barang yang tidak sesuai pesanan, cacat, dan tidak sesuai dengan kualiat yang diiklankan di situs web bertanggungjawab atas sebagian besar kerugian yang diterima oleh konsumen. Perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya tidak sesuai untuk menjadikan pelaku usaha tidak ada yang curang dalam memperdagangkan suatu produk dalam jual beli online.

3.2. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang tidak sesuai

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perikatan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendahan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Online diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Permasalahan yang terkait antara pelaku usaha dan konsumen adanya *Wanprestasi* dari pelaku usaha, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan. Pelaku usaha sering mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen dan setelah melakukan transaksi yang telah disepakati kedua belah pihak dan sudah menerima haknya sebagai konsumen, pelaku usahannya tidak bertanggungjawab dan

menghilang untuk dihubungi Kembali sedangkan konsumen tidak puas dengan barang yang sudah dijanjikan oleh pelaku usaha karena barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari media social tersebut.

Dalam Hal ini Upaya yang Dapat Melindungi Konsumen dari jual beli online atas barang tidak sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar (Perdagangan 2014).

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal 65 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu persyaratan teknis barang yang ditawarkan. Apabila pelaku usaha yang memepdagangkan barang kepada jual beli online tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen yang dirugikan akibat menerima barang tidak sesuai gambar tersebut memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, gantirugi dan/atau penggantian dan Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, landasan hukum bagi perdagangan elektronik dapat ditemukan dalam peraturan ini. Pelaku usaha wajib menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen terkait, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 ayat 13 peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Informasi yang sesuai dengan iklan mengenai identitas subjek hukum harus diberikan.
2. Didukung oleh bukti atau data yang kredibel.
3. Menggunakan fungsi dan peran sistem elektronik dalam suatu transaksi untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang syarat

dan jaminan barang dan/atau jasa yang dialihkan, serta sistem elektronik itu sendiri.

4. Patuhi aturan etika periklanan sesuai dengan hukum negara.

Berdasarkan keterangan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menyatakan (M. M. (n.d.). 2019):

1. Keaslian dan ketepatan informasi.
2. konsistensi antara informasi yang disajikan dalam iklan dan produk itu sendiri.
3. Persyaratan kelayakan untuk pembelian barang atau jasa.
4. Keabsahan suatu produk atau layanan
5. Aksesibilitas, harga, dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.

Jika ada masalah dengan barang atau jasa yang disediakan, konsumen memiliki pilihan untuk mengembalikan barang atau membatalkan pesanan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Pasal 69 Ayat 2 menyatakan konsumen dapat melakukan penukaran atau pembatalan pembelian suatu barang apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim. Pelaku usaha dapat diminta untuk membayar biaya pengiriman jika juga melakukan kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini karena konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala biaya yang timbul, termasuk biaya pengiriman.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan/atau ke pengadilan umum untuk memperoleh upaya hukum atas pengaduannya. Undang-undang ini diundangkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran sejumlah konsumen. Penyelesaian sengketa ada dua yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan) penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilaksanakan dengan cara mediasi, konsolidasi atau arbitrase (Pasal 39 UU ITE).

Kemampuan konsumen untuk mengatasi masalah mereka tanpa menempuh jalur litigasi diatur oleh Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang ditempuh oleh para pihak. Contoh kelompok non-pemerintah yang mengabdikan diri untuk membela konsumen Indonesia termasuk Yayasan Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Nusantara Lembaga, dan

Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah. Pengaruh besar yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendahnya Pendidikan konsumen (Pasal 4 huruf f UUPK).

Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen (Setiani 2018). Dengan demikian, untuk memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas dan untuk menawarkan informasi tentang pembelian online, ada hak dan kewajiban untuk transaksi, sehingga kesepakatan dapat dibuat kedua belah pihak telah sepakat untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang tidak sesuai diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Jo KUHPerdato Jo. UU No 7 Tahun 2014 Jo. UU No 7 Tahun 2008 Jo. PP No 80 Tahun 2019. UU No 8 Tahun 1999 mengatur hak informasi yang benar dan jelas (Pasal 4 UUPK). UU No 8 Tahun 1999 mengatur tentang *wanprestasi* (Pasal 1243 KUHperdata). UU No 7 Tahun 2014 mengatur tentang memperdagangkan barang menggunakan sistem elektronik (Pasal 65). PP No 80 Tahun 2019 mengatur tentang kesesuaian informasi yang diterima (Pasal 13 PPMSE). Sedangkan Upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang tidak sesuai terdiri atas litigasi dan non litigasi. Upaya hukum secara litigasi adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 69 PPMSE). Upaya perlindungan hukum secara non litigasi badan yang dapat penyelesaian sengketa seperti badan penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 45 UUPK).

5. REFERENSI

- Afidah, W., n.d. *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA* Anang Dony Irawan.
- Dony Irawan, A., Qodar, A., Sulisty, P., n.d. *Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat*. Jurnal Citizenship Virtues 2022, 251–262.
- F. H_Jurnal_Dyah Ochtorina *PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA*, n.d.
- Hakiki, Aditya, Ayu. Asri, Wijayanti. & Rizania, Kharismasari. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. Justitia, 1(1).

- Indriyani, Masintoh., Andaria Kusma Sari, Nilam & Unggul W.P, Satria, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.2 Oktober 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Menimbang Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.
- Muhammadiyah Surabaya, U., Artikel, S., 2021. *Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik* Meiliana Nurcahyani, Anang Dony Irawan.
- Pratama, S.A., n.d. Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG TIDAK SESUAI GAMBAR PADA TRANSAKSI DI MARKETPLACE* Legal Protection for Consumers for Goods Does Not Match The Picture in The Transaction on The Marketplace.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.
- Setiani, H., al *Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai*, et, Setiani dan Muhammad Taufiq, H., 2018. CONSUMER PROTECTION OF INVALID GOODS WITH THE AGREEMENTS OF ELECTRONIC TRADING RELATED TO CONSTITUTION OF ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION, *Jurnal Living Law*.
- Supriyono, & Irawan, A. D. (2020). *Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi*. JURIDIKSIAM.
- Studi Hukum, P., Doktor, P., Dewi Sanjoto, L., 2019. Penerbit: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace*.
- UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN JASA E-COMMERCE, n.d.
- UU Nomor 07 Tahun 2014, n.d.

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS *DISCOVERY LEARNING* PADA TEKNIK PEMISAHAN CAMPURAN DENGAN KROMATOGRAFI KERTAS

Oleh:

Anastasia Ilin¹, Masriani², Rody Putra Sartika³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura Pontianak

¹Email: anastasiailinn@gmail.com

²Email: masriani@fkip.untan.ac.id

³Email: rodyputrasartika@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat validitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis *Discovery Learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas yang dikembangkan berdasarkan hasil uji ahli (expert judgement). Bentuk Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Subjek penelitian ini adalah LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Alat pengumpul data yang digunakan adalah Angket uji kelayakan. Berdasarkan hasil uji ahli, menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan isi 86,68%, kelayakan penyajian memiliki persentase 91,37%, kelayakan bahasa memiliki persentase 93 dan kelayakan grafika memiliki persentase 88,9.

Kata Kunci: LKPD, *Discovery Learning*, Kromatografi Kertas.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa (*National Science Educational Standart* dalam Purwanti Widhy H, (2013:1). Trianto (2007:103) menyatakan bahwa pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan “membuat”. Mengacu pada pedoman pengembangan kurikulum 2013 disebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Pembelajaran IPA di tingkat SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative science*.

Mengacu pada Kompetensi Dasar 3.3. Memahami konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan Kompetensi Dasar 4.3 (KD): menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran maka dalam pembelajaran IPA SMP peserta didik dituntut mampu memahami konsep dan mampu menyajikan hasil karya penyelidikan atau karya setelah mempelajari materi yang guru sampaikan. Dalam hal ini, guru dituntut harus mampu membimbing dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA SMP Negeri 8 Pontianak, selama ini peserta didik belum pernah menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan langsung oleh pendidik yang disesuaikan dengan

mempertimbangkan kebutuhan siswa yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa dalam pembelajaran IPA. Pada saat melakukan praktikum siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) berupa kertas selebaran yang berisi materi yang akan dipraktikumkan. Materi pada Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan pada saat praktikum diambil dari buku paket yang digunakan. Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan lembaran yang harus dikerjakan oleh siswa. Menurut Prastowo (2011, 204) LKS atau LKPD adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi aja secara mandiri dan dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. LKPD dapat meminimalkan kerja siswa, lebih mengaktifkan siswa, dan dapat melatih kemandirian siswa (Prastowo, 2011:205). LKS atau LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh peserta didik (Prastowo, 2012: 204).

Penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran dinilai memiliki beberapa kelebihan, antara lain Meningkatkan aktivitas belajar, mendorong peserta didik mampu bekerja secara mandiri, membimbing peserta didik secara baik ke arah pengembangan konsep (Hamdani, 2011). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Elna Nisrina, 2018) dengan judul Keefektifan Lembar Kegiatan Siswa Berbasis Model *Discovery Learning* Untuk Melatih Keterampilan Proses Sains menunjukkan bahwa ketuntasan nilai postest yang dicapai siswa sebesar 83%.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, seperti kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang memperhatikan penjelasan yang guru sampaikan, metode yang digunakan berupa metode konvensional, dan media yang digunakan masih sederhana belum dilengkapi dengan aktivitas khusus yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi secara mandiri, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan suatu media pembelajaran berupa **Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Discovery Learning Pada Teknik Pemisahan Campuran Dengan Kromatografi Kertas**. Dalam penelitian ini Lembar Kerja Peserta Didik digunakan sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yakni *Discovery Learning*. Model *Discovery Learning* dipercaya dapat mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran, model ini menuntut siswa untuk terlibat langsung kedalam pengalaman dan eksperimen dimana nantinya mereka dapat menemukan pengetahuan dan konsepnya sendiri sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) merupakan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiono, 2011: 297). Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan *4D-Model(Define, Design, Develop, and Disseminate)* ke *3D-Model(Define, Design, and Develop)*. Dalam penelitian ini tidak dilakukan tahap disseminate, hanya sampai pada tahap pengembangan karena tujuan penelitian ini adalah mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas.

Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini berupa LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pengembangan LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas di kelas VII SMP Negeri 8 Pontianak disesuaikan dengan model yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974), *dkk* sebagai berikut:

1. *Define*, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan analisis kurikulum, lima poin analisis yaitu: analisis awal-akhir, analisis peserta didik, analisis konsep, analisis tugas dan merumuskan tujuan. Analisis awal-akhir dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran. Analisis peserta didik dilakukan untuk

mengetahui karakteristik peserta didik yang dilihat dari tingkat kemampuan atau perkembangan intelektual, kemampuan bekerjasama, dan perkembangan kognitif siswa. Analisis konsep dilakukan dengan menyusun peta konsep pada materi yang akan dikembangkan dalam LKPD. Analisis tugas dilakukan dengan menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada materi yang akan dikembangkan. Perumusan tujuan dilakukan dengan menyusun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan analisis tugas.

2. *Design*, mendesain LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Tahap *design* dalam penelitian ini meliputi: penyusunan tes kriteria, pemilihan media, dan pemilihan format produk yang dikembangkan. Isi LKPD disesuaikan dengan materi kromatografi kertas yang disusun berdasarkan langkah-langkah model *discovery learning*.
3. *Develop*, dilakukan terhadap LKPD berbasis *discovery learning* materi kromatografi kertas yang telah dirancang. Sebelum diuji cobakan, LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas terlebih dahulu divalidasi sebelum dievaluasi. Kegiatan validasi dilakukan untuk menentukan kelayakan terhadap LKPD berbasis *discovery learning* pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Validasi dilakukan oleh validator ahli isi, kegrafikan dan bahasa. Analisis validitas data ahli isi, kegrafikan dan kebahasaan menggunakan skala likert.

Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik komunikasi langsung merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik komunikasi langsung yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini adalah angket kelayakan. Angket kelayakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Komponen standar kelayakan LKPD dalam penelitian ini yaitu kelayakan isi, kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikan.

Teknik Pengolah Data

Pengolahan data angket kelayakan dengan persentase rata-rata kelayakan.

- 1) Menghitung frekuensi skor penilaian tiap-tiap pertanyaan
- 2) Menghitung skor total tiap-tiap pernyataan
- 3) Menghitung persentase perolehan skor tiap pertanyaan dengan rumus :

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100 \%$$

Dengan: P=Persentase perolehan skor
 $\sum X$ =Jumlah perolehan skor (skor total) tiap pernyataan
 $\sum Xi$ = Jumlah skor ideal (skor tertinggi)

- 4) Menghitung persentase rata-rata kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik secara keseluruhan dengan rumus :

$$V = \frac{\sum P}{n}$$

Dengan: V=Persentase rata-rata kevalidan
 $\sum P$ = Jumlah rata-rata persentase skor tiap aspek
n = Jumlah aspek yang dinilai

- 5) Menentukan kriteria kelayakan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah LKPD berbasis discovery learning pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Berdasarkan perhitungan validasi ahli, rata-rata keseluruhan indikator diperoleh skor 89,9% dengan kriteria "sangat layak".

Pembahasan

Penelitian pengembangan ini dilakukan dalam tiga tahap. Berikut merupakan ketiga tahap tersebut:

1) *Define*

Tahap define dilakukan dengan analisis awal-akhir, analisis peserta didik, analisis konsep, analisis tugas dan merumuskan tujuan. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi, proses pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional menyebabkan peserta didik menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran, media yang digunakan belum cukup memadai dalam mendukung proses pembelajaran dan guru belum pernah melakukan praktikum dalam proses pembelajaran. Analisis peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik individu, motivasi belajar dan pengalaman belajar sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi dalam proses pembelajaran sebagian peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa sulit dalam memahami materi adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru, sebagian siswa tidak menyimak apa yang guru sampaikan karena guru menggunakan metode ceramah.

Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi isi materi utama yang akan dimuat dalam LKPD dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan model pembelajaran yang digunakan, kemudahan dalam mendapatkan alat dan bahan, mudah dilakukan oleh siswa dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan praktikum. Analisis tugas dilakukan dengan menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar terkait materi yang akan dikembangkan.

Analisis KI dan KD ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun LKPD pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas, sehingga materi yang disajikan dalam LKPD sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Dalam mencapai KD yang telah ditetapkan, peserta didik

perlu melakukan pengamatan langsung agar peserta didik dapat melihat dan mengamati sendiri sehingga menimbulkan rasa keingintahuan tentang objek yang diamati sehingga akan muncul pertanyaan pada peserta didik. Dengan rasa keingintahuan tersebut, maka peserta didik akan mencari informasi dari berbagai sumber dan dapat dari proses praktikum/percobaan. Setelah diperoleh informasi atau data, selanjutnya dikaitkan setiap informasi tersebut dan dinalar sehingga muncul suatu jawaban dan kesimpulan.

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan pada hasil analisis tugas. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai berikut ini.

1. Melalui praktikum, peserta didik dapat menjelaskan teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas.
2. Melalui praktikum, peserta didik dapat melakukan pemisahan komponen zat warna pada spidol menggunakan teknik pemisahan kromatografi kertas.
3. Melalui praktikum, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan pada teknik pemisahan campuran dengan kromatografi kertas.
4. Melalui praktikum, peserta didik dapat menghitung nilai R_f setiap zat warna yang dihasilkan.

2) *Design*

Pada tahap perancangan dilakukan 3 jenis kegiatan yaitu penyusunan kriteria tes, pemilihan media dan pemilihan format LKPD yang akan digunakan. Berdasarkan hasil analisis pada tahap pendefinisian (analisis kurikulum, karakteristik peserta didik, materi dan merumuskan tujuan) kemudian dilakukan pemilihan media yang sesuai dengan materi yang akan dikembangkan. Penyusunan kriteria tes dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kriteria tes yang dibuat berupa kumpulan soal esai yang akan menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik selama dan setelah kegiatan pembelajaran. Jenis tes yang dibuat berupa tes tertulis yang harus dikerjakan oleh peserta didik setelah melakukan praktikum.

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan tuntutan kurikulum, karakteristik materi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan. Media yang digunakan dalam penelitian ini berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Pemilihan LKPD sebagai media yang akan dikembangkan pada proses pembelajaran dilakukan dengan menganalisis LKS yang digunakan oleh peserta didik sebelumnya yang terdapat pada Tabel 1.






Tabel 1. Analisis Komponen LKS yang Digunakan

Kriteria	Ya	Tidak
a. Judul	√	√
b. Petunjuk belajar	√	-
c. Kompetensi dasar atau materi pokok	-	√
d. Informasi pendukung	-	√
e. Tugas atau langkah kerja	-	√
f. Penilaian	√	-
	√	-

Berdasarkan hasil analisis LKS yang digunakan sangat sederhana, Berdasarkan hasil analisis LKS yang digunakan sangat sederhana, berupa selembaran kertas berisi judul percobaan, tujuan, petunjuk, alat dan bahan, langkah kerja, tabel pengamatan dan pertanyaan, sehingga perlu pengembangan LKPD dengan menambahkan komponen utama dalam LKPD. Kelebihan dalam menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran adalah meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, mendorong peserta didik agar mampu bekerja sendiri, dan membimbing secara baik kearah pengembangan konsep. LKPD yang dikembangkan berbasis *Discovery Learning* Pada Teknik Pemisahan Campuran Dengan Kromatografi Kertas. Desain LKPD disusun sebagai storyboard.

3) Develop

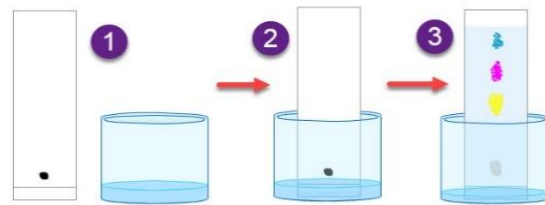
Sebelum media pembelajaran hasil desain diuji coba ke sekolah, terlebih dahulu media yang telah didesain tersebut divalidasi oleh para ahli isi, kegrafikan, dan kebahasaan untuk memberi penilaian terhadap LKPD agar layak digunakan sebagai media pembelajaran. LKPD kemudian direvisi berdasarkan saran dari ahli sebagai evaluasi. Berdasarkan saran dari ahli materi terhadap aspek isi dan penyajian terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Pengenalan alat-alat praktikum dapat dilihat pada gambar 1.

No	Alat	Kegunaan Alat
1		Gelas Kimia Fungsi: untuk menyimpan atau mengukur senyawa kimia. Dapat digunakan untuk mengukur bahan kimia berupa larutan dengan ketelitian yang tidak tinggi.
2		Kertas Saring Fungsi: sebagai alat penyaring zat kimia yang bertujuan untuk memisahkan filtrat dengan residunya.
3		Kaca Arloji Fungsi: untuk meletakkan bahan kimia dalam bentuk serbuk atau kristal pada saat proses penimbangan
4		Chamber Fungsi: wadah yang digunakan dalam kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis (KLT)
5		Pinset Fungsi: untuk menjepit kertas saring pada saat dimasukkan atau pun dikeluarkan dari chamber.

Gambar 1. Desain tabel pengamatan

Bagian pertama yaitu pada tabel pengenalan alat-alat praktikum, sesuai saran dari ahli materi cukup menampilkan alat yang akan digunakan pada proses praktikum, nama alat menggunakan font bold.

Bagian kedua yaitu pada materi kromatografi kertas, gambar yang disajikan harus disertai keterangan.



Sumber: <https://belajarmipa.com>

Gambar 2. Langkah Pemisahan Campuran Dengan Teknik Kromatografi Kertas.

Keterangan: Gambar 1. tinta mula-mula ditotolkan pada kertas saring; Gambar 2. kertas saring dimasukkan kedalam bejana; dan Gambar 3. elusi yang terjadi pada tinta.

Revisiprodukberdasarkansarandankomentarya ngdiberikanolehahli bahasaadalahperludiperhat ikanketepatanajaan, tanda baca dan diperhatikan kembali penulisan dalam LKPD. Berdasarkan saran dari ahli grafika tentang aspek kegrafikan, terdapat beberapa bagian yang harus diperbaiki.

Bagian-bagian yang perlu diperbaiki pertama pada bagian cover LKPD yaitu penulisan pada cover, tata letak gambar, dan warna gambar pada cover. Bagian kedua yaitu pada kata pengantar, gambar pada latar jangan sampai menutupi tulisan. Bagian ketiga yaitu pada daftar isi, poin-poin pada daftar isi sebaiknya menggunakan angka. Setelah dilakukan penilaian oleh ahli terhadap aspek isi, penyajian, kebahasaan dan kegrafikan diperoleh hasil perhitungan rata-rata tiap aspek seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Penilaian Kelayakan LKPD Berbasis *Discovery Learning* Pada Teknik Pemisahan Campuran Dengan Kromatografi Kertas oleh Validator.

No	Aspek Kelayakan	Rata-rata (%)	Kriteria
1	Isi	86,68	Sangat tinggi
2	Penyajian	91,37	Sangat tinggi
3	Kebahasaan	93	Sangat tinggi
4	Kegrafikan	88,9	Sangat tinggi
	Rata-rata keseluruhan	89,99	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian kelayakan LKPD yang terdapat pada tabel 3 diperoleh nilai rata-rata 89,99 dengan kriteria “sangat tinggi”, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD yang dikembangkan “layak” untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

4. KESIMPULANDANSARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis *Discovery Learning* Pada Teknik Pemisahan Campuran dengan Kromatografi Kertas sangat layak digunakan sebagai bahan ajar pada

proses pembelajaran dengan skor 89,99% memiliki kriteria sangat tinggi.

Saran

Dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam mengembangkan penelitian hingga tahap yang lebih lanjut. Dalam penelitian ini, hanya dilakukan sampai pada tahap develop terbatas pada uji ahli maka perlu dilakukan hingga ke tahap uji coba produk dalam mengembangkan media pembelajaran pada materi yang lainnya.

5. REFERENSI

- Hamdani, 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia.
<https://belajarmipa.com>, Diakses tanggal 5 juli 2020. Jam 10.20
- Nisrina E, 2018. Keefektifan LKS Berbasis Model *Discovery Learning* untuk Melatih Keterampilan Proses Sains. Jurnal Pendidikan Sains. Vol 06 (02).
- Prastowo, 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Purwanti Widhy H, 2013. *Integrative Science* untuk Mewujudkan *Skill* dalam Pembelajaran IPA SMP, MAkalah Seminar MIPA: UNY.
- Sugiona, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Alfabeta.
- Thiagarajan, dkk. 1974. *Intructional Development for Training Teacher of Exceptional Childern. Washinton DC: National Center for Improvement Educational System.*
- Tim Puslitjaknov. 2008. Metode Penelitian Pengembangan. Jakarta: Balitbang Diknas.
- Trianto, 2010. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka.

EFFECTIVENESS OF ENGLISH LEARNING BASED ON ONLINE / E-LEARNING IN STUDENT'S VIEW OF THE UNIVERSITY OF LABUHANBATU

Oleh:

Nova Jayanti Harahap
Universitas Labuhanbatu
novazhrp@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of E-Learning-based English learning. E-learning is an educational system or concept that utilizes information technology in the teaching and learning process. This study uses a qualitative description of research and data analysis. Data was collected using the participant interview method directly by the lecturer to class A students of Labuhanbatu University 2 semester, as many as 38 people. The results of this study can be seen directly how the effectiveness of E-Learning-based in learning English. In fact, the results obtained from the study showed that 18 respondents stated that online learning was less effective, 14 respondents stated that learning was effective, and 6 respondents stated that it was very ineffective. Most students feel that online learning is less effective due to several reasons such as poor network, traffic jams, network errors, when asking students to ask lecturers is less effective. Utilization of E-learning by using teaching strategies, using videos and social media applications such as Instagram and Facebook is considered to be able to foster student interest in learning English.

Keywords: Online/E-Learning-Based Learning and English Learning.

1. PRELIMINARY

Technological developments in the current era of industry 4.0 have a major impact on the world of education, both for students and lecturers. students and lecturers are required to master how to use technology in increasingly sophisticated teaching and learning processes by using various kinds of teaching applications. There are several teaching applications that are made as good as possible so that students and lecturers do not feel bored and monotonous when the learning and teaching process is ongoing.

The online application used today does not require students and lecturers to learn to teach face to face. The application can be used when we are at home, out of town, in the vehicle or anywhere. During this pandemic, all levels of education are required to study at home, in other words, face-to-face meetings are not recommended in the university environment. This application makes it easier for lecturers to teach and the teaching and learning process is not constrained if there is something very important to follow that requires us not to be able to come to campus. E-learning or also known as online learning is learning that uses electronic services as learning aids.

According to (Ramadhayanti, 2018) in his research based online learning pronunciation in the field of English studies, there is a positive influence between the use of online English pronunciation media and increasing students' English pronunciation skills. From this research (Keengwe & Georgina, 2012) also describes the results of his research using online technology stating that technological

developments provide changes to the implementation of teaching and learning. Technology is a medium that educators can use to replace the face-to-face that was used before the Covid-19 period, and it is also explained by information technology that it can be accepted as a medium in carrying out the educational process, including helping the teaching and learning process, which also involves finding references and sources of information. (Wekke & Hamid, 2013).

2. METHOD

This study uses a qualitative description of research and data analysis in depth. Sources of data in this study were students of class A Labuhanbatu University semester 2, as many as 38 people. Data were collected by participant interview method.

3. RESULT AND DISCUSSION

Data analysis a. Online Effectiveness Based on Student Experience Researchers collected data through interviews with research subjects related to student experiences about the effectiveness of online learning. The results of the interview that:

No	Number of Students	Less Effective	EFfektive	Very Effective
1.	18	√		
2.	14		√	
3.	6			√

b. Advantages and Disadvantages of Online Based on Student

Experience This research was conducted by interviewing students or research subjects related to the respondents' experiences about the advantages

and disadvantages of online-based learning. The results of these interviews are very varied, including:

Advantages of Online Learning

1. Students feel unlimited distance.
2. Students feel they can prevent the transmission of the covid-19 virus
3. Students feel no need to bother to meet in person.
4. Students feel they can speed up the learning process, such as sending files, googling and so on.
5. Students feel they can simplify the process of interaction between teachers and students.
6. Students feel that they are continuously developing
7. Students Feel Easily Accessible
8. Students feel that the fees are more affordable
9. Students feel that study time is more flexible

Disadvantages of Online Learning

1. Requires a fairly fast and stable internet connection.
2. Requires a smart device such as an android or an adequate laptop.
3. For some students, online learning is difficult and difficult to understand.
4. Can be misused for identity fraud.
5. There is no direct interaction that can hinder the learning process.

c. Online Learning Atmosphere of English Courses Based on Student Experience

The results of 38 respondents, 18 respondents stated that online learning was less effective, 14 respondents stated that learning was effective, and 6 respondents stated that it was very ineffective. Most students feel that online learning is less effective due to several reasons such as poor network, traffic jams, network errors, when asking students to ask lecturers is less effective and time feels short due to fluctuating signals. During English class hours, students also find it very difficult to understand the explanation from the lecturer because they use English, the pronunciation is not clear when explaining the powerpoint displayed on the laptop or cellphone screen, students also feel that they do not understand.

It should be realized that online learning of English courses for semester 2A is a problem. But all of this must still be carried out so that the learning process can run smoothly and students actively participate, even in the conditions of the Covid-19 pandemic. Very important components of the online learning process need to be improved and improved. First and foremost is a stable internet network, then a capable device or computer, applications with user friendly platforms, efficient, effective, continuous, and integrative online socialization to all education stakeholders.

In the online learning process, it is important to add educational messages to parents and students about the Covid-19 pandemic outbreak. Thus we find the same learning with face-to-face but online-based.

The effect is very good, the program is right on target, and the learning outcomes are achieved.

There is a lesson learned from the world of education in the midst of the Covid-19 pandemic, namely that face-to-face learning activities with teachers have proven to be more effective than online. This was explained by Universitas Brawijaya (UB) education expert Aulia Luqman Aziz to coincide with National Education Day 2020. "The teaching profession will never be replaced by technology," said Luqman in his statement on UB's official website, Saturday (2/5/2020). According to him, full online learning has recently caused a lot of complaints from students and parents.

Several teachers and lecturers admitted that online learning is not as effective as conventional learning activities (face to face), because some materials must be explained directly and more fully. In addition, the material delivered online may not necessarily be understood by all students. Based on online teaching experience, this system is only effective for giving assignments, and it is possible that the results of working on these assignments are given when students are about to enter, so it is likely to accumulate.

d. Student Expectations Regarding Things That Should Be Improved in Online Applications

Observing the experience of some of these teachers and lecturers, the teacher must also be ready to use technology in accordance with the times. Teachers must be able to make models and learning strategies that are in accordance with the character of students in their schools. The use of several applications in online learning is very helpful for teachers in this learning process. Teachers must be accustomed to teaching by utilizing complex online media that must be packaged effectively, easily accessible, and understood by students.

Thus, teachers are required to be more able to design and design online learning that is light and effective, by utilizing appropriate online devices or media and in accordance with the material being taught. Although online learning will provide wider opportunities to explore the material to be taught, the teacher must be able to choose and limit the extent of the scope of the material and the application that is suitable for the material and learning methods used.

The simplest thing that can be done by teachers can be by using Whats App Groups. The Whats App application is suitable for novice online students, because the operation is very simple and easy for students to access. As for online teachers who have more enthusiasm, they can improve their abilities by using various online learning applications.

The solution to this problem can be solved if the government has to provide a policy by opening free online application services in collaboration with internet and application providers to help this online learning process. The government must also prepare

an online-based learning curriculum and syllabus. For schools, it is necessary to conduct online technical guidance on the online implementation process

In addition, the success of online learning during the Covid-19 period depends on the discipline of all parties.

Therefore, the schools/madrasas and campuses here need to make a scheme by developing good management in regulating the online learning system. This is done by making a systematic, structured and simple schedule to facilitate student communication with the campus so that those who study at home can be monitored effectively.

Thus, online learning as an effective solution in learning at home to break the chain of the spread of Covid-19, physical distancing (maintaining a safe distance) is also a consideration in choosing this learning. Good cooperation between teachers, students, parents and the school/madrasah is a determining factor for more effective online learning.

From the description above, it can be concluded about the experience of students when learning English. There are several improvements that must be made when studying online, including:

1. Explanation of learning materials: Students expect Lecturers to provide teaching materials clearly, provide videos on power point slides and provide time to ask questions about materials that are not understood.
2. Following the trend of technological progress: Students hope that lecturers also follow technological advances by using and utilizing applications that are currently in demand such as Facebook and Instagram to foster enthusiasm, enthusiasm and not be bored in the teaching and learning process.
3. Data packages: Students also hope that free data packages will continue to be provided by the government during the online teaching and learning process.

4. CONCLUSION

Technological developments in the industrial era 4.0 currently have a major impact on the world of education, both for students and lecturers. students and lecturers are required to master how to use technology in increasingly sophisticated teaching and learning processes with the use of various kinds of teaching applications. From the data that has been collected, the researcher can conclude that the majority of students feel that online learning is not effective because in practice the teacher gives assignments more often than explanations. Students explain some of the advantages and disadvantages of online implementation, such as:

Advantages of Online Learning

- 1) Students feel unlimited distance.
- 2) Students feel they can prevent the transmission of the covid-19 virus

- 3) Students feel no need to bother to meet in person.
- 4) Students feel they can speed up the learning process, such as sending files, googling and so on.
- 5) Students feel they can simplify the process of interaction between teachers and students.
- 6) Students feel that they are continuously developing
- 7) Students Feel Easily Accessible
- 8) Students feel that the fees are more affordable
- 9) Students feel that study time is more flexible

Disadvantages of Online Learning

1. Requires a fairly fast and stable internet connection.
2. Requires a smart device such as an android or an adequate laptop.
3. For some students, online learning is difficult and difficult to understand.
4. Can be misused for identity fraud.
5. There is no direct interaction that can hinder the learning process.

The majority of students feel that online learning is less effective, but if when learning uses video learning strategies and uses fun applications accompanied by data quotas provided by the government, it is likely that students will find teaching and learning more effective, relaxed and fun.

5. REFERENCES

- Amin, hasan. 2017. Bekasi. <http://www.smkbkujkt.sch.id/read/16/pengertian-karakteristik-dan-manfaat-eLearning>. accessed in April 2022
- Admin semesta, 2020. Semarang. <https://semestashool.sch.id/content-id/artikel-content-id/mentimeter-solusi-pembelajaran-daring-kreatif-dan-interaktif-di-masa-pandemi-refleksi-pembelajaran-daring-bahasa-inggris-di-sma-semesta-semarang/>. accessed in April 2022
- Choiroh , Nisaul. 2021. Surakarta. Efektifitas Pembelajaran Berbasis Daring/ E-Learning Dalam Pandangan Siswa. <https://iain-surakarta.ac.id/%EF%BB%BFefektifitas-pembelajaran-berbasis-daring-e-learning-dalam-pandangan-siswa/>. accessed in June 2022
- Harnani,Sri. 2020. Cilegon. *efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi covid-19*. <https://bdjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19>. accessed in December 2021
- Keengwe, J., & Georgina, D. (2012). The digital course training workshop for online learning and teaching. *Education and Information Technologies*, 17(4), 365- 379. <https://doi.org/10.1007/s10639-011-9164-> accessed in March 2022

PENGARUH INTELLIGENCE QUOTIENT (IQ) DAN EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) TERHADAP KINERJA FRESH GRADUATE

Oleh:

Heruna Tanty¹⁾, Calvin Hartono²⁾, Clarence Caitlin³⁾, William Wijaya⁴⁾

¹Mathematics Department, School of Computer Science, Bina Nusantara University

^{2,3,4}Industrial Engineering Department, Bina Nusantara University

¹heruna@binus.ac.id

²calvin.hartono8@gmail.com,

³caitlin.clarence@gmail.com,

⁴william.wijaya020@binus.ac.id

Abstrak

Freshgraduate merupakan individu yang baru saja menyelesaikan studi sarjana dengan pengalaman yang tidak banyak dalam kaitannya pada dunia kerja. Oleh karena itu, salah satu hal yang seringkali menjadi perhatian perusahaan dalam menerima seorang *freshgraduate* adalah kinerja kerja ke depannya. Kinerja kerja *freshgraduate* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual (IQ) dapat didefinisikan kemampuan seseorang dalam menalar, merencanakan, memecahkan suatu masalah, berpikir abstrak, memahami suatu gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap dan belajar. Sedangkan, kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan individu untuk merespons secara tepat dan berhasil berbagai rangsangan emosional yang timbul dari dalam diri dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual seseorang dapat meningkatkan kinerja kerja seorang *freshgraduate* dalam pekerjaannya. Populasi dari penelitian adalah *freshgraduate* angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 dari universitas yang berlokasi di Jakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual seseorang berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja *freshgraduate* dengan nilai R2 sebesar 55,74% dengan nilai signifikan kedua variabel bernilai 0.00 < 0.05. Model regresi yang terbentuk adalah "Kinerja kerja = 6,46 + 0,3204 * EQ + 0,3511 * IQ".

Kata Kunci: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kinerja Kerja, *FreshGraduate*.

1. PENDAHULUAN

Kinerja pada dasarnya merupakan tolak ukur terhadap hasil kerja seorang karyawan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik besar maupun kecil ditentukan oleh sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi dan bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya (Utami & Rosita, 2019). Suatu perusahaan dengan sumber daya yang unggul akan memiliki kinerja yang baik dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sumber daya manusia yang unggul bukan hanya seseorang yang memiliki tingkat *IntelligenceQuotient* (IQ) yang tinggi, tetapi juga sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan untuk merespons setiap kondisi yang dihadapi dengan kebijaksanaan atau *EmotionalQuotient* (EQ). Hal tersebut sesuai dengan (Widyati & Karwini, 2019) dan (Mujayana, 2020) yang berpendapat bahwa seorang karyawan dengan performa yang bagus dan kompetensi yang tinggi membutuhkan IQ dan EQ yang baik. Menurut (WIBOWO, 2017), emosi adalah suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespons atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Dengan itu, kecerdasan intelektual (IQ) dapat didefinisikan kemampuan seseorang dalam menalar, merencanakan, memecahkan suatu masalah, berpikir abstrak, memahami suatu gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap dan belajar. Sedangkan, kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan individu untuk merespons secara tepat dan berhasil berbagai rangsangan emosional yang timbul dari dalam diri dan lingkungan, dengan indikator kompetensi emosional (EQ1), kematangan emosi (EQ2), kepekaan emosional (EQ3) (Puspitacandri et al., 2020). Faktor ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain (Dewi et al., 2022). Kecerdasan emosional (EQ) juga berperan membantu kecerdasan intelektual (IQ) ketika seseorang perlu memecahkan masalah-masalah penting atau membuat keputusan penting dan memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal tersebut dalam waktu singkat (Muttaqiyathun, 2010).

Berdasarkan (Chand et al., 2019), perusahaan pada umumnya merekrut individu yang mampu mengakomodasikan dirinya dalam budaya kerja, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta mampu berkontribusi dengan ide-ide inovatif. Hal ini menjadi tantangan bagi *freshgraduate* untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan mampu

meningkatkan kinerja kerja seiring dengan berjalannya waktu. *Freshgraduate* merupakan individu yang baru saja menyelesaikan studi sarjana dengan pengalaman yang tidak banyak dalam kaitannya pada dunia kerja (Nindytasari, Sidiq, & Santosa, 2020). Proses untuk masuk dan bertahan dalam dunia kerja merupakan suatu tantangan dan pengalaman baru yang harus dihadapi oleh *freshgraduate*. Setelah lulus dari studi maka *freshgraduate* diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan yang diharapkan melalui keterampilan dan *softskill* yang dimilikinya (Rizkyta Hariyati & Kusuma Dewi, 2021). Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mamangkey et al., 2018). Baik atau buruknya kinerja *freshgraduate* dalam pekerjaan pertamanya sangat krusial dalam karier kedepannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional terhadap kinerja *freshgraduate* dalam pekerjaan pertama.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditentukan didasarkan pada latar belakang penelitian, antara lain:

- Bagaimana pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) secara parsial terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta?
- Bagaimana pengaruh *EmotionalQuotient* (EQ) secara parsial terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta?
- Bagaimana pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) dan *EmotionalQuotient* (EQ) secara bersama-sama terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diperoleh didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan, antara lain:

- Menganalisis pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) secara parsial terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta.
- Menganalisis pengaruh *EmotionalQuotient* (EQ) secara parsial terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta.
- Menganalisis pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) dan *EmotionalQuotient* (EQ) secara bersama-sama terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditentukan, antara lain:

- Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) dan *EmotionalQuotient* (EQ) terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta.

- Bagi pembaca, penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengaruh *IntelligenceQuotient* (IQ) dan *EmotionalQuotient* (EQ) terhadap kinerja *freshgraduate* di Jakarta.
- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai *IntelligenceQuotient* (IQ) dan *EmotionalQuotient* (EQ) yang mempengaruhi kinerja *freshgraduate* di Jakarta, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah proses meneliti secara sistematis terhadap fenomena atau bagian-bagian serta hubungan-hubungan yang terjadi (kausalitas). Penelitian ini dimulai dengan kajian teori dan hipotesis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang disebarakan kepada target sampel. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik sebagai instrumen utama penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu *freshgraduate* angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 dari universitas yang berlokasi di Jakarta. Sampel yang digunakan adalah 102 mahasiswa dari berbagai universitas yang berlokasi di Jakarta. Data yang digunakan merupakan data primer dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa survei kuesioner. Penelitian ini menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda dengan menggunakan formula sebagai berikut: $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat analisis yang dilakukan untuk menguji penelitian adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis inferensial yang digunakan berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Hasil analisis deskripsi pada penelitian ditampilkan pada tabel di bawah ini.

TABEL1. Analisis Deskriptif

Indikator	Kecerdasan Emosional	Kecerdasan Intelektual	Kinerja Kerja
Mean	43,402	41,784	35,029
Standard Error	0,422	0,489	0,382
Median	44	41,5	36
Mode	40	38	37
Standard Deviation	4,257	4,940	3,860
Sample Variance	18,124	24,408	14,900
Kurtosis	-0,811	-0,772	0,324
Skewness	-0,249	-0,033	-0,781
Range	18	20	17
Minimum	32	30	23

Maximum	50	50	40
Sum	4427	4262	3573
Count	102	102	102

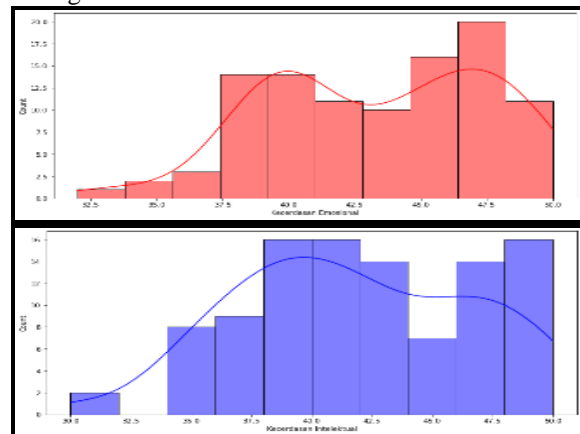
Tabel di atas merupakan hasil perhitungan analisis deskriptif. Terdapat beberapa variabel yang diketahui yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kinerja kerja. Setiap variabel akan diukur dengan menggunakan nilai *mean*, standar deviasi, nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum. Nilai *mean* atau rata-rata pada variabel-variabel di atas merupakan nilai pembagian jumlah data pada variabel dengan banyaknya data. Standar deviasi atau biasanya disebut juga dengan simpangan baku adalah ukuran sebaran data secara umum. Nilai minimum merupakan nilai paling kecil dari sekumpulan data pada masing-masing variabel. Nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari sekumpulan data pada masing-masing variabel. Kuartil atas/akhir atau disebut juga kuartil ketiga, adalah 25% bilangan teratas dari sekumpulan data, atau bagian ke-75 dari perseratus. Kuartil bawah/awal adalah 25% bilangan terbawah dari kumpulan data, atau bagian ke-25 dari perseratus. *Skewness* dan kurtosis menunjukkan tingkat kenormalan data.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa *count* atau jumlah data pada setiap variabel yang valid adalah 102 data. Dari 102 sampel data kecerdasan emosional, nilai *mean* dari data adalah sebesar 43,402, standar deviasi sebesar 4,257, nilai minimum sebesar 32, dan nilai maksimum sebesar 50. Melalui data tersebut, terlihat bahwa sebaran data tidak terlalu luas dan berpusat pada interval 39 - 46. Nilai kuartil atas, kuartil bawah, dan median juga menunjukkan bahwa ketiga data memiliki sebaran yang konsisten dan tidak terdapat *outlier* yang sangat mempengaruhi data. Apabila dilihat dari kurtosis yang bernilai negatif, maka data cukup menyebar dan tidak homogen. *Skewness* yang bernilai negatif juga menunjukkan bahwa data miring ke kanan dan tidak berdistribusi normal.

Dari 102 sampel data kecerdasan intelektual, rata-rata dari data adalah 41,784 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,940, nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 50, kuartal bawah sebesar 38, kuartal atas sebesar 46, dan median sebesar 41,5. Terlihat bahwa rata-rata responden memiliki kecerdasan intelektual yang lebih rendah daripada kecerdasan emosional. Namun, sebaran data dari kedua jenis kecerdasan cukup mirip. Apabila dilihat dari kurtosis yang bernilai negatif, maka data juga cukup menyebar dan tidak homogen. Namun, nilai *skewness* bernilai mendekati nol menunjukkan bahwa data hampir berdistribusi normal.

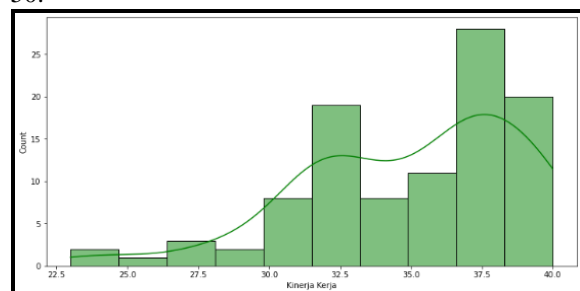
Dari 102 sampel data kinerja kerja, dapat dilihat bahwa pada sebaran data memiliki sebaran data yang berbeda dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dimana nilai *mean* dari data tersebut adalah sebesar 35,029, standar deviasi sebesar 3,860, nilai minimum sebesar 23, nilai kuartil

bawah 32, nilai kuartil median 36, nilai kuartil atas 30, dan nilai maksimum sebesar 40. Melalui data tersebut, terlihat bahwa sebaran data juga tidak terlalu luas dan berpusat pada interval 31 -39. Nilai kuartil atas, kuartil bawah, dan median juga menunjukkan bahwa ketiga data memiliki sebaran yang konsisten dan tidak terdapat *outlier* yang sangat mempengaruhi data. Apabila dilihat dari kurtosis yang bernilai positif, maka data juga cukup menyebar dan tidak homogen, serta nilai *skewness* yang bernilai negatif dan cukup besar menunjukkan bahwa data miring ke kanan dan tidak berdistribusi normal.



GAMBAR 1. Distribusi Hasil Kuesioner Kecerdasan Emosional dan Intelektual

Grafik diatas merupakan grafik distribusi hasil kuesioner kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dari 102 responden. Melalui histogram tersebut, terlihat bahwa data tidak terdistribusi normal, namun data lebih berpusat pada interval sekitar 37,5 hingga 42 dan pada interval 46 hingga 48. Data yang berpusat pada sebelah kanan menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Melalui histogram tersebut juga, terlihat bahwa hasil kuesioner kecerdasan intelektual memiliki sebaran data yang mirip dengan sebaran data hasil kuesioner kecerdasan emosional. Data tidak terdistribusi normal, namun data lebih berpusat pada interval sekitar 37,5 hingga 42 dan pada interval 46 hingga 50.



GAMBAR 2. Distribusi Hasil Kuesioner Kinerja Kerja

Grafik di atas merupakan grafik distribusi hasil kuesioner kinerja kerja dari 102 responden. Terlihat bahwa rata-rata responden memiliki kinerja yang bagus dengan nilai yang berinterval dari 30 hingga 40, sedangkan terdapat beberapa responden

yang merasa kurang dalam kinerja kerjanya. Sama halnya dengan distribusi-distribusi sebelumnya, data kinerja kerja lebih berpusat pada sebelah kanan.

Analisis Inferensial

Uji Korelasi

Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya, dimana apabila hasil korelasi bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa kenaikan variabel X juga akan meningkatkan nilai dari variabel Y. Sebaliknya, apabila hasil korelasi bernilai negatif, maka dapat diartikan bahwa kenaikan variabel X akan menurunkan nilai dari variabel Y. Apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilai korelasi akan bernilai 0. Apabila r hitung > r tabel atau p-value < nilai signifikansi, maka H₀ ditolak artinya kedua variabel memiliki hubungan. Hipotesis yang dirumuskan untuk pengujian validitas ini adalah:

- H₀: Tidak terdapat korelasi antara EQ (IQ) dengan kinerja kerja.
- H₁: Terdapat korelasi antara EQ (IQ) dengan kinerja kerja.

Hasil *output* dari pengujian korelasi variabel dengan Minitab dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

TABEL 2. Uji Korelasi Variabel

Sample 1	Sample 2	Correlation	95% CI for p	P-Value
Kecerdasan Intelektual	Kecerdasan Emosional	0,754	(0,656; 0,827)	0
Kinerja Kerja	Kecerdasan Emosional	0,692	(0,575; 0,781)	0
Kinerja Kerja	Kecerdasan Intelektual	0,716	(0,606; 0,799)	0

Melalui uji korelasi, terlihat bahwa variabel dependen pertama yaitu kecerdasan emosional dan variabel independen berupa kinerja kerja memiliki nilai korelasi sebesar 0,692. Korelasinya bersifat korelasi positif, dimana semakin tinggi nilai kinerja kerja, maka semakin tinggi juga nilai dari kinerja kerja. Nilai korelasi 0,692 juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat antara satu sama lain. Variabel dependen kedua yaitu kecerdasan intelektual dan variabel independen berupa kinerja kerja memiliki nilai korelasi sebesar 0,716. Korelasi antara kedua variabel tersebut juga merupakan korelasi positif dan memiliki korelasi yang kuat. Apabila dilihat dari nilai p-value, terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel dependen terhadap variabel independen sama-sama memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu 0,05. Dengan itu, dapat diambil kesimpulan berupa penolakan H₀, yaitu terdapat korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen.

Uji Regresi

Uji regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual terhadap variabel dependen berupa kinerja kerja. Uji regresi dilakukan dengan

menggunakan aplikasi Minitab dengan menguji ANOVA dan T-test. Hasil koefisien dari uji regresi dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.

Coefficients					
Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	6,46	2,63	2,45	0,016	
Kecerdasan Emosional	0,3204	0,0914	3,51	0,001	2,32
Kecerdasan Intelektual	0,3511	0,0787	4,46	0,000	2,32

GAMBAR 3. Koefisien Uji Regresi

Model regresi yang didapatkan, antara lain:

Kinerja kerja = 6,46 + 0,3204 * EQ + 0,3511 * IQ

Artinya:

- Konstanta menunjukkan bahwa tanpa kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, maka skor untuk kinerja kerja seseorang hanya sebesar 6,46.
- Koefisien regresi kecerdasan emosional sebesar 0,3204 menunjukkan bahwa setiap skor untuk kecerdasan emosional akan meningkatkan skor kinerja kerja seseorang sebesar 0,3204.
- Koefisien regresi kecerdasan intelektual sebesar 0,3511 menunjukkan bahwa setiap skor untuk kecerdasan intelektual akan meningkatkan skor kinerja kerja seseorang sebesar 0,3511.

Hipotesis pengujian t-test:

- Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan
- Hi = Koefisien Regresi Signifikan

Hasil pengujian:

- T-tabel untuk variabel kecerdasan emosional adalah 1,984 bernilai lebih kecil dari T-hitung sebesar 3,51, sehingga koefisien regresi untuk kecerdasan emosional signifikan berpengaruh terhadap kinerja kerja *freshgraduate*.
- T-tabel untuk variabel kecerdasan intelektual adalah 1,984 bernilai lebih kecil dari T-hitung sebesar 4,46, sehingga koefisien regresi untuk kecerdasan intelektual signifikan berpengaruh terhadap kinerja kerja *freshgraduate*.
- Berdasarkan uji T-test, dapat disimpulkan bahwa kedua koefisien regresi faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja kerja dari *freshgraduate*.

Hasil uji ANOVA dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.

Analysis of Variance					
Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	2	852,03	426,017	64,60	0,000
Kecerdasan Emosional	1	81,05	81,051	12,29	0,001
Kecerdasan Intelektual	1	131,08	131,076	19,88	0,000
Error	99	652,88	6,595		
Lack-of-Fit	72	579,13	8,043	2,94	0,001
Pure Error	27	73,75	2,731		
Total	101	1504,91			

GAMBAR 4. Analysis of Variance

Hipotesis pengujian F-test:

- Ho = Faktor independen tidak berpengaruh berpengaruh terhadap kinerja *freshgraduate*

- H_i = Faktor independen berpengaruh berpengaruh terhadap kinerja *freshgraduate*.

Hasil pengujian:

- F-tabel untuk variabel kecerdasan emosional adalah 2,699 bernilai lebih kecil dari F-hitung sebesar 12,29, sehingga faktor kecerdasan emosional signifikan berpengaruh terhadap kinerja kerja *freshgraduate*.
- F-tabel untuk variabel kecerdasan intelektual adalah 2,699 bernilai lebih kecil dari F-hitung sebesar 19,88, sehingga faktor kecerdasan intelektual signifikan berpengaruh terhadap kinerja kerja *freshgraduate*.
- Dari uji ANOVA atau F-test, didapat F-hitung 64.60 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas (tingkat signifikansi) ini lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi tingkat kinerja kerja seorang *freshgraduate*. Dengan kata lain, tingkat kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kinerja kerja.

Hasil *model summary* dari hasil uji regresi dapat dilihat pada Gambar 8.

Model Summary			
S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
2,56802	56,62%	55,74%	52,19%

GAMBAR 5. Model Summary Uji Regresi

Pada *model summary* ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antarvariabel. Nilai R pada *model summary* memiliki nilai lebih dari 0,5 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara kinerja kerja dan kedua variabel independennya yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Nilai *R-square* (*R-sq*) atau koefisien determinasi adalah sebesar 55,74% atau 0,557. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% dari variasi kinerja kerja mempengaruhi variasi dari kedua variabel independen. Sedangkan untuk nilai sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4. KESIMPULAN

Seluruh rangkaian penelitian mengenai hubungan tingkat kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual bagi kinerja kerja seorang *freshgraduate* memperoleh kesimpulan, antara lain: 1. Tingkat kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja kerja seorang *freshgraduate* dalam pekerjaannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa, seorang *freshgraduate* dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung akan memiliki kinerja yang bagus dalam pekerjaannya. 2. Tingkat kecerdasan intelektual juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja kerja seorang *freshgraduate* dalam pekerjaannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa, seorang *freshgraduate* dengan

kecerdasan intelektual yang tinggi cenderung akan memiliki kinerja yang bagus dalam pekerjaannya.

5. REFERENSI

- Chand, P. K., Kumar, A. S., & Mittal, A. (2019). Emotional Intelligence and Its Relationship to Employability Skills and Employer Satisfaction With Fresh Engineering Graduates. *International Journal for Quality Research*, 13(3), 735–752. <https://doi.org/10.24874/IJQR13.03-15>
- Dewi, D. K., Wijaya, P. N., & Puteri, A. P. (2022). The Relationship Between Psychological Well-Being and Adversity Quotient on Fresh Graduates During Coronavirus Pandemic. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 618, 1076–1080. <https://doi.org/10.1201/9781003265061-16>
- Mamangkey, L. A. G., Tewal, B., & Trang, I. (2018). Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ), Dan Kecerdasan Sosial (SQ) Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Wilayah Bank Bri Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 3208–3217.
- Mujayana, M. (2020). Pengaruh Hardskill Dan Softskill Terhadap Kinerja Karyawan. *Majalah Ekonomi*, 25(2), 1–12.
- Muttaqiyathun, A. (2010). Hubungan Emotional Quotient, Intellectual Quotient dan Spiritual Quotient dengan Entrepreneur's Performance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(3), 221–234. <http://www.irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/view/42/42>
- Puspitacandri, A., Warsono, Soesatyo, Y., Roesminingsih, E., & Susanto, H. (2020). The Effects of Intelligence, Emotional, Spiritual and Adversity Quotient on the Graduates Quality in Surabaya Shipping Polytechnic. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1075–1087. <https://doi.org/10.12973/EU-JER.9.3.1075>
- Rizkyta Hariyati, D., & Kusuma Dewi, D. (2021). Hubungan antara Optimisme dengan Adversity Quotient pada Fresh Graduate Universitas Negeri Surabaya Hubungan antara Optimisme dengan Adversity Quotient pada Fresh Graduate Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(8), 153–164.
- Utami, R. T., & Rosita, R. (2019). Keberhasilan Penempatan Kerja Berdasarkan pada Kecerdasan Intelektual (IQ) Dan Motivasi Diri Di Politeknik LP3I Jakarta. *Jurnal Lentera Bisnis*, 8(1), 50–64. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v8i1.264>
- WIBOWO, C. T. (2017). Analisis Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) pada Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.20961/jbm.v15i1.4108>

Widyati, S. R., & Karwini, N. K. (2019). The Effect of Intelligence Quotient and Emotional Quotient on Employee Performance at PT. Karna Titian Sejahtera Denpasar. *Manuscript Central*, 10(02), 21401–21407.

Heruna Tanty, Department of Mathematics Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia, heruna@binus.ac.id

Calvin Hartono, Department of Industrial Engineering Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia calvin.hartono@binus.ac.id

Clarence Caitlin, *Department of Industrial Engineering* Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia clarence.caitlin@binus.ac.id

William Wijaya, *Department of Industrial Engineering* Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia william.wijaya020@binus.ac.id

PENGARUH TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP PERILAKU MEMILIH BURUH PEREMPUAN PLASMA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PURBALINGGA 2020

Oleh :

Alberto Noviano Patty²⁾, Rina Martini²⁾, Nur Hidayat³⁾

^{1,2,3}Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

¹Email: alberto.noviano15@gmail.com

²Email: rinamartini13@gmail.com

³Email: nhsardini@live.undip.ac.id

Abstrak

Pemahaman transformasi peran perempuan dan sensitivitas gender menjadi hal penting dalam menjelaskan masalah peran perempuan pada ranah domestik dan publik. Peralihan peran baru perempuan dikaitkan dengan aktivitas politik, menjadikan isu perempuan merupakan hal penting dalam menjelaskan arah politik perempuan itu sendiri. Artikel ini berfokus menjelaskan perilaku memilih buruh perempuan plasma pada pemilihan kepala daerah Purbalingga 2020. Dalam menjawab masalah, digunakan acuan teori dari John Rawls (2019: 657) *Theory of Justice*, perilaku memilih secara rasional dapat berasal dari pribadi bermoral yang berhak atas kesetaraan, artinya pribadi yang mempunyai konsepsi rencana hidup rasional yang menginginkan keadilan. Data-data dikumpulkan melalui metode penelitian survey eksplanasi, dengan penggunaan data primer kuisisioner berdasar jawaban 100 responden, dianalisis secara kuantitatif menggunakan *statistical package for the social science* (SPSS). Kajian ini menyimpulkan menerima hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif $Y = 1,700 + 0,037$ variabel transformasi peran perempuan terhadap perilaku memilih, dengan besaran pengaruh 86,4%. Menerima hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif $Y = 6,898 + 0,142$ variabel sensitivitas gender terhadap perilaku memilih, dengan besaran pengaruh 50,5%. Menerima hipotesis ketiga, terdapat pengaruh sebesar 89,9% secara simultan, pada variabel transformasi peran perempuan dan variabel sensitivitas gender, terhadap perilaku memilih buruh perempuan plasma, pemilihan kepala daerah Purbalingga 2020. Mengartikan perilaku memilih buruh perempuan secara positif dipengaruhi oleh transformasi peran perempuan dan sensitivitas gender sebesar 89,9%. Sedangkan untuk sisanya adalah yakni sebesar 10,1% perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata Kunci: Transformasi peran perempuan, Sensitivitas Gender, Perilaku Memilih

1. PENDAHULUAN

Perilaku memilih adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku memilih, dapat dipengaruhi oleh beberapa pendekatan diantaranya pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

Intensitas perilaku memilih dalam pagelaran pemilihan kepala daerah dapat dilihat, melalui penggunaan hak pilih dalam daftar pemilihan tetap (DPT), di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga penyelenggara pemilu. Menurut KPU RI (2021) terdapat peningkatan rata-rata penggunaan hak pilih pada pemilihan kepala daerah sebesar 7,03%, di mana Rata-rata nasional penggunaan hak pilih pada Pemilihan 2020 mencapai 76,09% dibandingkan dengan rata-rata penggunaan hak pilih nasional tahun 2015 yang hanya 69,06%

Adapun penggunaan hak pilih terbanyak menurut KPU RI (2021) di dominasi oleh perempuan sebanyak 50.194.726 pemilih 50,2% dan pemilih laki-laki sebanyak 50.164.426 atau 49,98%. Asumsi peningkatan perilaku memilih perempuan di kaitkan dengan partisipasi kandidat perempuan dalam proses

politik elektoral pada pilkada 2020. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI 2021) setidaknya partisipasi calon kandidat perempuan pada pilkada 2020 mengalami kenaikan 1,75% menjadi 10,6% atau sebanyak 157 calon perempuan, dibandingkan pilkada 2015 sebesar 8,85% atau sebanyak 101 calon perempuan.

Peningkatan penggunaan hak pilih juga terjadi di Kabupaten Purbalingga, data KPU Purbalingga (2021) Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah 2020 mencapai 72,74% meningkat sebesar 10,79%, di mana pada pilkada 2015 hanya 69,79. Adapun perilaku perempuan sebagai pemilih pada pilkada 2020 sebesar 80,58% mengalami peningkatan dibanding pilkada 2015 yang hanya 69,79%. Peningkatan perilaku perempuan pemilih, pada akhirnya mengantarkan calon kandidat perempuan ke kursi bupati Purbalingga saat ini.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, mengutip Mujani (2012:262) penyebaran isu kesetaraan gender dan pandangan konservatif tentang perempuan, dianggap mampu menjadi landasan perilaku memilih perempuan. Asumsi ; pertama. perempuan dalam

memilih lebih memfokuskan pada pemahaman pribadi secara mandiri terhadap isu yang ditawarkan kandidat/ partai politik berkaitan dengan kebutuhan jangka pendek kehidupannya sebagai perempuan. Kedua, perempuan dalam memilih dapat dikaitkan atas dorongan lingkungan sosial dan sosialisasi awal yang perempuan terima.

Perilaku memilih perempuan Purbalingga, dihubungkan dengan superioritas ranah publik peran perempuan di Purbalingga. Mengingat kebutuhan lapangan pekerjaan banyak diarahkan pada perempuan. Disnaker Purbalingga (2019) menunjukkan adanya penempatan kerja buruh harian lepas menurut jenis kelamin untuk tenaga kerja perempuan sebanyak 7.417 orang atau sebesar 94,80% sedangkan laki-laki hanya sebanyak 407 orang atau 5,2% saja. Menurut Karl M. (Priyono dan Pranaka, 1996: 63) pengupayaan pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu upaya kesadaran dan pembentukan kapasitas awal transformasi peran perempuan, agar menghasilkan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki.

Kembali pada argument pertama, mengarah pada keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik berarti membukakan akses bagi dirinya sebagai perempuan untuk ikut menentukan keputusan atas persepsi pribadi bukan atas dorongan laki-laki/suami/dan kelompok sosial. Pemahaman feminis kontemporer Patricia Hill Collins (Ritzer, 2012: 775-776), perwujudan komitmen transformasi peran perempuan adalah upaya/tindakan oleh perempuan dalam memperbaiki kehidupan sehari-hari perempuan yang mereka pelajari. Mengartikan wacana dan isu didasarkan pada pengarusutamaan gender merupakan ciri khas pemahaman feminis kontemporer, dasar komitmen transformasi peran perempuan ke arah yang lebih berdaya.

Dieter (2009: 24-25). Pendekatan psikologis perilaku memilih dapat dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan pengaruh jangka pendek dari visi misi calon yang dapat diterima oleh pemilih. Ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis yaitu : (1) Persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, (2) Persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat dan (3) Identifikasi Partai (partisanship)

Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dyah Hayuning Pratiwi dan H. Sudono, mengupayakan perhatian dilema hak buruh plasma dan kesetaraan gender, yang kerap terjadi di Purbalingga. Adapun pemecahan masalah mengarah pada pemahaman pengarusutamaan gender mengacu pada indikator salah satu program SDGs (Sustainable development goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, Adapun indikator yang dimaksud (Laila, 2018). A) Penghapusan diskriminasi perempuan dan B) Kesempatan yang sama bagi semua perempuan terhadap semua level pengambilan keputusan, akses universal dan kesehatan seksual.

Hal tersebut dibuktikan melalui data, Komisi pemilihan Umum Purbalingga (KPU, 2020), perilaku memilih perempuan pada pilkada 2020 mengalami peningkatan, sebanyak 369.736 jiwa. Persentase pengguna hak pilih perempuan terbanyak terdapat di Kecamatan Kutasari mencapai 84,32%. Menurut badan pusat statistik Kabupaten Purbalingga (BPS, 2020) kecamatan Kutasari merupakan pemasok buruh harian lepas terbanyak mencapai 5.558, dengan 1.732 buruh perempuan.

Namun mengutip pemikiran Cornwall (Laila, 2018), pembuatan keputusan oleh perempuan merupakan hal baru bagi perempuan. Penciptaan ruang adaptasi bagi perempuan secara terpisah oleh pengaruh laki laki agar pemahaman anak gender dan keterlibatan bersama (saling memahami dan berperan aktif) bagi perempuan dan laki-laki perlu di wujudkan. Hal ini di wujudkan dengan pemahaman sensitivitas gender (pola hubungan kekuasaan dalam kaitan gender di masyarakat), yang kerap mengalami bias pemahaman.

Sensitivitas gender, berbicara bagaimana kepekaan gender masyarakat dalam proses sosial masyarakat yang selalu memiliki bias pemahaman makna gender. Fakhri (2013: 7-11). Sensitivitas gender merupakan pemahaman mendalam dari konsep gender, di prakasai Teori Nurture dan Nature. Mansour (2013:13-23) Unit analisis operasional dalam mengukur rendahnya sensitiv gender dapat melalui, Stereotipe, Subordinasi, Marjinalisasi, Beban ganda, dan Kekerasan.

Paling tidak perempuan sebagai pekerja industri di Purbalingga dalam menjalankan peran publiknya masih dihadapkan pada situasi, 1) Kesenjangan penyerapan tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki, berdampak pada permasalahan pengasuhan anak, disharmonisasi keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan. 2) perempuan dalam dunia pekerjaan dihadapkan pada persoalan feminisasi pekerjaan, menghendaki perempuan sebagai tenaga kerja murah, karena dianggap berbeda dengan pekerja laki-laki 3) legalitas hukum keberadaan buruh plasma. 4) pada ranah internal keluarga seorang buruh perempuan mendapat perlakuan didominasi oleh suaminya walaupun istri adalah pencari nafkah, 5) buruh perempuan memiliki harapan bahwa dunia kerja akan meningkatkan status ekonomi dan perubahan status sosial di masyarakat. (Tobirin et al 2018).

Adapun data empiris pola kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Purbalingga seperti berikut; Pada bulan Juli 2018, kasus perceraian di Kabupaten Purbalingga akibat tanggung jawab suami tidak menafkahi sebanyak 588 kasus, untuk faktor perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga sebanyak 480 kasus., Radar Banyumas, (2018). Adapun faktor perselisihan dan ketidak harmonisan yang kerap terjadi, adalah pelabelan negatif oleh orang tua

pasangan dan asumsi perselingkuhan terhadap perempuan pekerja (Tobirin, 2018).

Permasalahan bias gender di kecamatan Kutasari menurut data (DinsosdaldukKBP3A, 2019), dalam kasus perceraian, 2014-2015 (74%), mengalami penurunan (36%) di tahun 2015-2016, pada tahun 2016-2017 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jumlah perceraian menjadikan Kutasari sebagai kecamatan dengan persentase 0 kasus perceraian pada tahun tersebut, dan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 11% kenaikan terbesar no 2 setelah Kecamatan Padamara.(DinsosdaldukKBP3A, 2019), Kasus kekerasan terhadap gender dan anak di Kecamatan Kutasari sebanyak 68 kasus, adapun jenis kasus yang di tangani seperti berikut; Seksual 37 kasus, Fisik 10 kasus, Psikis 2 kasus, Penelantaran 5 kasus, dan lainnya sebanyak 14 kasus.

Kembali pada asumsi kedua, perempuan dalam memilih dapat dikaitkan atas dorongan lingkungan sosial dan sosialisasi awal yang perempuan terima. Gerald Pomper dan Lipset, Menurutnya predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, di mana preferensi politik suami akan berpengaruh pada preferensi politik Istri (Johny Lengkong et al 2019).

Menurut Bone dan Ranney dalam (Firmansyah: 2008;83), perilaku politik dapat di faktori dengan adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya. Bias pemahaman gender akibat ketidaksiapan pada realitas peran baru buruh perempuan, dianggap menjadi manifestasi konflik gender di Purbalingga. Pada sisi bersamaan dalam meminimalisir potensi konflik itu, buruh perempuan plasma membuat keputusan pilihannya atas tekanan dari suami/laki-laki, dan lingkungan sosial upaya menghindari konflik yang kerap dialami.

Adapun pada sisi simultan perilaku memilih diindikasikan berkaitan dengan masalah sensitivitas gender di mana berjalan bersamaan dengan proses transformasi peran perempuan Purbalingga. Studi Inglehart&Pippa Norris, Faktor dominan perilaku memilih perempuan dalam masyarakat berkembang terdapat pada kaitannya penyebaran isu gender, janji kesetaraan dan budaya patriarki yang superior, (Ronald Inglehart dan Pippa Norris,2000).

John Rawls (2019: 657) pada karyanya A Theory of Justice, menjelaskan, perilaku memilih dapat berasal dari pribadi bermoral yang berhak atas kesetaraan, artinya pribadi yang mempunyai konsepsi rencana hidup yang menginginkan keadilan. Aspek sosiologis dan psikologis sebagai dasar tercetusnya keputusan individu pemilih, dan menjadikan individu pemilih memiliki konsensus kuat akan keadilan, baik

secara mandiri ataupun secara tekanan sosial buruh plasma.

Maka dari itu peneliti mengasumsikan, perilaku memilih buruh perempuan plasma pada pemilihan kepala daerah Purbalingga 2020 dapat dipengaruhi pada faktor psikologis dan sosiologis perilaku pemilih. Adapun variabel yang akan menjadi dasar pengukuran ialah, sensitivitas gender dan transformasi peran buruh perempuan plasma Purbalingga

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menganalisis pengaruh transformasi peran perempuan dan sensitivitas gender terhadap perilaku memilih buruh perempuan plasma pada pemilihan kepala daerah Purbalingga 2020, penulis menggunakan tipe penelitian survei eksplanatif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan survei eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian - kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel. Penelitian menggunakan data primer kuisioner berdasar jawaban 100 responden. Adapun populasi dalam penelitian ini menggunakan data Jumlah buruh perempuan harian lepas di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, sumber BPS 2020, sebanyak 1.732 jiwa.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistical package for the social science (SPSS) dengan metode uji validitas/ uji keabsahan data, uji reliabilitas/ kelayakan kuisioner. Uji normalitas dan uji linearitas sebagai upaya memberi pemahaman kelayakan pengujian data regresi dan analisis korelasi. Terakhir analisis hipotesis asosiatif (analisis korelasi pearson)/ mengetahui derajat hubungan, dan analisis regresi linear berganda/ memahami besaran pengaruh.

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah mengukur derajat pengaruh dan hubungan variabel bebas pertama transformasi peran perempuan dan variabel bebas kedua sensitivitas gender terhadap variabel terikat perilaku memilih buruh perempuan plasma, pada momentum Pilkada Purbalingga 2020. Pengukuran derajat pengaruh dimaksudkan untuk memberi jawaban penerimaan atau penolakan terhadap Hipotesis penelitian.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Transformasi Peran Perempuan Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma

Pengoperasionalan konsep penelitian berfokus pada, penguatan kebijakan Bupati perempuan terpilih didasari pengaruh utamaan gender mengacu pada indikator salah satu program SDGs (Sustainable development goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, Adapun indikator yang dimaksud; 1)

Penghapusan diskriminasi perempuan, 2) Kesempatan yang sama bagi semua perempuan terhadap semua level pengambilan keputusan, akses universal dan kesehatan seksual

Pengaruh Sensitivitas Gender Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma

Menjadi unit analisis operasional sensitivitas gender hasil sosialisasi awal pemahaman patriarki yang berlebihan. Menurut Mansour (2013:13-23) rendahnya sensitivitas gender dapat diukur melalui, Stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan KDRT)

Pengaruh Transformasi Peran Perempuan Dan Sensitivitas Gender Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma.

Studi Inglehart & Pippa Norris, Faktor dominan perilaku memilih perempuan dalam masyarakat berkembang terdapat pada kaitannya penyebaran isu gender, janji kesetaraan dan budaya patriarki yang superior, (Ronald Inglehart dan Pippa Norris, 2000).

John Rawls (2019: 657) pada karyanya A Theory of Justice, menjelaskan, perilaku memilih dapat berasal dari pribadi bermoral yang berhak atas kesetaraan, artinya pribadi yang mempunyai konsepsi rencana hidup yang menginginkan keadilan. Aspek sosiologis dan psikologis sebagai dasar terwujudnya keputusan individu pemilih, dan menjadikan individu pemilih memiliki konsensus kuat akan keadilan, baik secara mandiri ataupun secara tekanan sosial buruh plasma.

Hipotesis

H1: Transformasi peran Perempuan Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

H2: Sensitivitas Gender Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Perempuan Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

H3: Transformasi peran perempuan Dan Sensitivitas Gender Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 untuk uji coba instrumen dengan 9 butir pertanyaan terkait Transformasi Peran Perempuan terhadap 100 responden, diketahui nilai $\alpha = 0,05$ sehingga didapatkan nilai r-tabel adalah 0,195. Kriteria penerimaan atau penolakan koefisien korelasi butir instrumen adalah: dasar keputusan Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ untuk nilai $\alpha = 0,05$, maka butir instrumen dinyatakan valid (diterima).

Validitas Variabel Transformasi Peran Perempuan

No	Pernyataan	r-hitung	Dimensi
1	Valid	0,836	Penghapusan Diskriminasi Perempuan
2	Valid	0,645	Penghapusan Diskriminasi Perempuan
3	Valid	0,718	Penghapusan Diskriminasi Perempuan
4	Valid	0,624	Penghapusan Diskriminasi Perempuan
5	Valid	0,702	Pemberian Akses Terhadap Perempuan

6	Valid	0,823	Pemberian Akses Terhadap Perempuan
7	Valid	0,645	Pemberian Akses Terhadap Perempuan
8	Valid	0,718	Pemberian Akses Terhadap Perempuan
9	Valid	0,710	Pemberian Akses Terhadap Perempuan

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui

SPSS 21

Dapat dilihat dari 9 butir soal transformasi peran perempuan yang diuji validitasnya dapat dikatakan valid/ benar. Adapun uji reabilitas variabel transformasi peran perempuan;

Reabilitas Variabel Transformasi Peran Perempuan

Nilai alpha cronbach sebesar 0,880 yang mana nilai tersebut $> 0,60$. Dapat dikatakan keberadaan soal yang berkaitan dengan transformasi peran perempuan reliabel/ dapat diandalkan.

Validitas Variabel Sensitivitas Gender

No	Pernyataan	r-hitung	Dimensi
1	Valid	0,741	Stereotip
2	Valid	0,402	Stereotip
3	Valid	0,783	Beban Ganda
4	Valid	0,533	Beban Ganda
5	Valid	0,720	KDRT

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Dapat dilihat dari 5 butir soal sensitivitas gender yang diuji validitasnya dapat dikatakan valid/ benar. Adapun uji reabilitas variabel sensitivitas gender;

Reabilitas Variabel Sensitivitas Gender

Nilai alpha cronbach sebesar 0,632 yang mana nilai tersebut $> 0,60$. Dapat dikatakan keberadaan soal yang berkaitan dengan sensitivitas gender reliabel/ dapat diandalkan.

Validitas Variabel Perilaku Memilih

No	Pernyataan	r-hitung	Dimensi
1	Valid	0,838	Memberi Suara Terhadap Kandidat
2	Valid	0,773	Memberi Suara Terhadap Kandidat
3	Valid	0,710	Mencari Informasi Kandidat
4	Valid	0,571	Mencari Informasi Kandidat
5	Valid	0,598	Mencari Informasi Kandidat
6	Valid	0,833	Memilih Kandidat/orientasinya
7	Valid	0,820	Memilih Kandidat/orientasinya
8	Valid	0,833	Pengaruh Gender
9	Valid	0,346	Pengaruh Gender

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Dapat dilihat dari 9 butir soal perilaku memilih yang diuji validitasnya dapat dikatakan valid/ benar. Adapun uji reabilitas variabel perilaku memilih;

Reabilitas Variabel Sensitivitas Gender

Nilai alpha cronbach sebesar 0,874 yang mana nilai tersebut $> 0,60$. Dapat dikatakan keberadaan soal yang berkaitan dengan perilaku memilih reliabel/ dapat diandalkan.

Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Variabel yang diuji adalah variabel dependen (Perilaku Memilih) dan independen (Transformasi Peran Perempuan) (Sensitivitas Gender). Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, adapun hasil uji variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nilai signifikansi antara Transformasi peran perempuan dan perilaku memilih adalah 0,064. Artinya dalam hal ini nilai signifikansi hasil tersebut > 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi secara normal

Nilai signifikansi antara Sensitivitas Gender dan perilaku memilih adalah 0,081. Artinya dalam hal ini nilai signifikansi hasil tersebut > 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.

Nilai signifikansi secara simultan Transformasi peran perempuan dan Sensitivitas Gender terhadap perilaku memilih adalah 0,298. Artinya dalam hal ini nilai signifikansi hasil tersebut > 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas (X) dan terikat (Y) mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Uji linearitas merupakan pra syarat penggunaan analisis regresi dan korelasi. Singgih (2002:242) Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan menggunakan perbandingan antara f hitung dan f tabel serta perbandingan signifikansi 0,05. Adapun kaidah yang digunakan untuk menguji linearitas data dalam penelitian ini sebagai berikut; Jika F hitung Deviation from Linearity < F tabel, maka antar variabel mempunyai hubungan linier dan layak dilakukan analisis regresi dan korelasi

Adapun dalam mencari F tabel dengan probabilitas 0,05, ($df_2 = n-k-1$) ($df_2 = 100-2-1=97$) atau ($df_2=97$). Df (derajat bebas) = k (Jumlah Variabel bebas), N (jumlah sampel). Adapun nilai F tabel dalam penelitian ini, F tabel (3,09).

Hasil Uji Linearitas variabel X_1 , diketahui nilai F hitung pada. Deviation from linearity adalah 2,045. Artinya hasil tersebut lebih kecil dari F hitung 3,09 atau $2,04 < 3,09$, dinyatakan kedua variabel ini mempunyai hubungan linier atau dapat disebut variabel Transformasi Peran Perempuan (X_1) dan variabel Perilaku Memilih (Y) mempunyai hubungan linier, dan selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi dan korelasi.

Hasil uji linieritas variabel X_2 , diketahui nilai F hitung pada. Deviation from linearity adalah 2,781. Artinya hasil tersebut lebih kecil dari F hitung 3,09 atau $2,78 < 3,09$, dinyatakan kedua variabel ini mempunyai hubungan linier atau dapat disebut variabel Sensitivitas Gender (X_2) dan variabel Perilaku Memilih (Y) mempunyai hubungan linier, dan selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi dan korelasi.

Uji Korelasi Pearson

Analisis korelasi dimaksudkan untuk mengukur hubungan antar variabel transformasi peran perempuan (x_1) dan variabel perilaku memilih (Y), dianalisis menggunakan korelasi product moment/pearson guna mencari keeratan hubungan Variabel bebas dan terikat. Adapun pengukuran data menggunakan rumus Pearson Corelation. Dasar

pengambilan keputusan, jika nilai koefisien korelasi (r) menyentuh -1 berarti hubungan tersebut dianggap rendah, namun sebaliknya jika nilai koefisien korelasi (r) menyentuh angka +1 maka nilai tersebut dianggap tinggi atau kuat hubungannya. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut;

Adapun hasil Uji korelasi Pearson (X_1) Transformasi Peran Perempuan dengan (Y) Perilaku Memilih, dapat disimpulkan Pearson Corelation dalam kedua variabel ini sebesar 0,930. Artinya nilai r hitung pada variabel ini mendekati angka +1 sehingga hubungan antara variabel X_1 dan Y sangat kuat dan memiliki hubungan, yang selanjutnya dapat di lakukan uji pengaruh (R).

Adapun hasil Uji korelasi Pearson (X_2) Sensitivitas Gender dengan (Y) Perilaku Memilih, dapat disimpulkan Pearson Corelation/ hubungan (r) hitung dalam kedua variabel ini sebesar 0,710. Artinya nilai r hitung pada variabel ini hampir menyentuh angka +1 sehingga hubungan antara variabel X_1 dan Y tergolong kuat dan memiliki hubungan, yang selanjutnya dapat di lakukan uji pengaruh (R).

Uji Regresi Berganda

Teknik analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat yaitu yang menyatakan arah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat ke arah positif atau negatif. Adapun rumus regresi linear berganda; Sugiyono (2014: 110)

$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2$ (Y = Perilaku Memilih, a = Konstanta atau bila harga $X = 0$, b = Koefisien regresi variable independen, X_1 = variabel Sensitivitas gender, X_2 = variabel Transformasi perempuan)

Adapun dasar untuk mengambil keputusan kedua, signifikansi jika nilai sig. < 0,05 maka bisa dinyatakan variabel bebas berpengaruh dengan variabel terikat, tetapi jika nilai sig. > 0,05 maka bisa dinyatakan tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Selain itu dilakukannya analisis ini untuk mengetahui koefisien determinasi variabel bebas dan terikat, untuk mengetahui besaran pengaruh.

Uji Regresi X_1 terhadap Y

Unstandarized Coefficients		
	B	Std. Error
(Constant)	1.700	1.241
T.Peran Perempuan(X_1)	.932	.037

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Dari hasil uji di atas hasil constant (a) sebesar 1,700 sedangkan nilai koefisien variabel transformasi peran perempuan (X_1) adalah 0,037, dan pengaruh mengarah ke arah positif atau $Y = 1,700 + 0,037$. Dapat diartikan, apabila terjadi perubahan transformasi peran perempuan sebesar 0,037, maka akan diikuti dengan penambahan perilaku memilih sebesar 1,700.

Uji Regresi X_2 terhadap Y

Unstandarized Coefficients		
	B	Std. Error
(Constant)	8.898	2.568
S. Gender(X_2)	1.416	.142

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Dari hasil uji di atas hasil constant (a) sebesar 6,898 sedangkan nilai koefisien variabel sensitivitas gender (X2) adalah 0,142, dan pengaruh mengarah ke arah positif atau $Y = 6,898 + 0,142X$. Dapat diartikan, apabila terjadi perubahan pada variabel sensitivitas gender sebesar 0,142, maka akan diikuti dengan penambahan perilaku memilih sebesar 6,898.

Analisis Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi perlu dilakukan, Analisis Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur besaran pengaruh antara variabel Transformasi peran perempuan (X1), sensitivitas gender (X2) terhadap perilaku memilih (Y) yang diketahui dengan melihat pada koefisien determinasi atau di singkat KD. Adapun perhitungan koefisien determinasi dilakukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, yaitu: $Kd = r^2 \times 100\%$, Atau dalam SPSS melihat pada Nilai R Square. Adapun hasil pengolahan data korelasi determinasi dalam uji regresi linearitas sebagai berikut;

R Square Transformasi Peran Perempuan (x1) terhadap perilaku Memilih (y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 ^a	.864	.863	1.969

a. Predictors: (Constant), Transformasi peran perempuan

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Dalam melihat besar pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas pertama yaitu Transformasi Peran Perempuan terhadap variabel terikat yaitu Perilaku Memilih dalam tabel analisis regresi linear berganda. Diketahui bahwa R Square sebesar 0,864 yang berarti bahwa pengaruh Transformasi Peran Perempuan terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 86,4 %.

R Square sensitivitas gender (x2) terhadap perilaku Memilih (y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 ^a	.505	.500	3.759

a. Predictors: (Constant), Sensitivitas Gender

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Upaya melihat besar pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas kedua yaitu Sensitivitas Gender terhadap variabel terikat yaitu Perilaku Memilih dalam tabel analisis regresi linear berganda. Diketahui bahwa R Square sebesar 0,505 yang berarti bahwa pengaruh Sensitivitas Gender terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 50,5 %.

R Square transformasi peran perempuan (x1), sensitivitas gender (x2) terhadap perilaku Memilih (y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 ^a	.899	.897	1.706

a. Predictors: (Constant), Transformasi Peran Perempuan, Sensitivitas Gender terhadap perilaku memilih

Sumber: Data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 21

Diketahui bahwa R Square sebesar 0,899 yang berarti bahwa pengaruh Transformasi peran perempuan, Sensitivitas Gender terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 89,9 %. Sedangkan untuk sisanya adalah yakni sebesar 10,1% perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Analisis Hipotesis Asosiatif

H1: Transformasi peran Perempuan Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

Berdasarkan hasil pengujian korelasi dan regresi linearitas berganda terhadap variabel transformasi peran perempuan (x1) terhadap variabel perilaku memilih (y), dapat disimpulkan hubungan sebesar 0,930 atau mendekati +1, dan memiliki hubungan.

Adapun pengujian pengaruh mengarah pada pengaruh positif. Perolehan ukuran pengaruh, $Y = 1,700 + 0,037X$, diartikan, apabila terjadi perubahan transformasi peran perempuan sebesar 0,037, maka akan diikuti dengan penambahan perilaku memilih sebesar 1,700. Adapun untuk besaran pengaruh melihat pada R Square sebesar 0,864 yang berarti bahwa pengaruh Transformasi Peran Perempuan terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 86,4 %.

Artinya dapat disimpulkan H1: Transformasi peran Perempuan Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020, Diterima.

H2: Sensitivitas Gender Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

Berdasarkan hasil pengujian korelasi dan regresi linearitas berganda terhadap variabel sensitivitas gender (x2) terhadap variabel perilaku memilih (y), dapat disimpulkan hubungan sebesar 0,710 atau mendekati +1, dan memiliki hubungan.

Adapun pengujian pengaruh mengarah pada pengaruh positif. Perolehan ukuran pengaruh, $Y = 6,898 + 0,142X$, diartikan, apabila terjadi perubahan sensitivitas gender sebesar 0,142, maka akan diikuti dengan penambahan perilaku memilih sebesar 6,898. Adapun untuk besaran pengaruh melihat pada R Square sebesar 0,505 yang berarti bahwa pengaruh Sensitivitas Gender terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 50,5 %.

Artinya dapat disimpulkan H2: Sensitivitas Gender Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020, Diterima.

H3: Transformasi peran perempuan Dan Sensitivitas Gender Berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020.

Berdasar pada kedua pernyataan hipotesis di atas dapat disimpulkan antar variabel transformasi peran perempuan (x1) dan sensitivitas gender (x2)

terhadap perilaku memilih memiliki hubungan yang signifikan. Adapun besaran pengaruh ketiga variabel adalah, R Square sebesar 0,899 yang berarti bahwa pengaruh Transformasi peran perempuan, Sensitivitas Gender terhadap variabel Perilaku Memilih adalah sebesar 89,9 %. Sedangkan untuk sisanya adalah yakni sebesar 10,1% perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Artinya dapat disimpulkan H3: Transformasi peran perempuan Dan Sensitivitas Gender berpengaruh Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020, Diterima.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil korelasi pearson Transformasi peran perempuan (X1) sebesar 0,930 tergolong memiliki hubungan sangat kuat, dan Sensitivitas Gender (X2) sebesar 0,710 tergolong hubungan kuat terhadap Perilaku Memilih (Y). Menandakan bahwa variabel Transformasi peran perempuan (X1) dan Sensitivitas Gender (X2) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Dalam Pilkada Purbalingga 2020

Pada hasil uji Regresi Linear berganda secara parsial R Square Variabel X1 memiliki besaran pengaruh, 86,4% , dan Variabel X2 memiliki besaran pengaruh, 86,4%. Adapun besaran pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y memiliki besaran pengaruh sebesar, 89,9 %. Sedangkan untuk sisanya adalah yakni sebesar 10,1% perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Adapun dalam melihat pengaruh, perilaku memilih buruh plasma lebih di landaskan pada transformasi peran baru mereka dari ranah domestik ke publik. Program dan tujuan calon kandidat pada aspek psikologis perilaku memilih, merupakan hal yang dominan dalam menentukan pilihan perempuan plasma pada momentum pilkada purbalingga tahun 2020. Kemudian disusul hampir setengah perempuan menjawab bahwasannya aspek tekanan sosiologis, dalam hal ini sensitivitas gender juga menjadi dasar perilaku memilih namun bukan yang utama.

Terbukti bahwa isu kesetaraan gender menjadi faktor signifikan dalam perilaku memilih buruh perempuan. Perubahan peran baru perempuan dan budaya patriaki yang kuat, mengisyaratkan pada keinginan buruh perempuan akan penguatan kembali penyalarsan gender, berdampak langsung pada perilaku memilih / keputusan politik buruh perempuan pada momentum elektoral lainnya.

5. REFERENSI

Alfirdaus, Laila Kholid (2018) Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan Dan Mencapai Sustainable

Development Goals (SDGs). Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender: Vol 13 No 1.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. Informasi Kewilayahan dari Keadaan Geografi, Pemerintahan, Kependudukan, hingga Sosial Ekonomi. Purbalingga: Sekretariat Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. 2019

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. Informasi Kewilayahan dari Keadaan Geografi, Pemerintahan, Kependudukan, hingga Sosial Ekonomi. Purbalingga: Sekretariat Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. 2020

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga agustus 2019-2020. Purbalingga: Sekretariat Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga 2020

Creswell, John W & J David Creswell. Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (Los Angeles: SAGE, 2018)

Dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Purbalingga. Buku profil gender purbalingga 2019. (DinsosdaldukKBP3A, 2019)

Dinas ketenagakerjaan Purbalingga. Keadaan Ketenagakerjaan Purbalingga agustus 2019-2020. Purbalingga: Disnaker purbalingga 2019

Fakih, Mansour. "Anallisis Gender Dan Transformasi Sosial". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Firmansyah. 2008. Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Inglehart, Ronald And Pippa Noris(2000) The Development Theory Of The Gender Gap: Women And Men Voting Behavior In Global Perspective. International Political Science Review: Vol 21 No 4, 441-463. [Http://Ips.Sagepub.Com/Content/21/4/441](http://Ips.Sagepub.Com/Content/21/4/441)

Kaucus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Laporan partisipasi memilih perempuan, pilkada 2020. Jakarta. 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Data Rekapitulasi suara pemilihan bupati wakil bupati 2020. : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Data Rekapitulasi suara pemilihan bupati wakil bupati 2015. : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 2015.

Komisi Pemilihan Umum RI "siaran pers, tingkat partisipasi pemilihan 2020 capai 76.09% ; humas Komisi Pemilihan Umum RI 2021

- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar filsafat Politik Mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2019
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012.
- Roth, Dieter *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen, Dan Metode*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Soter Jangkup, Arpi R. Rondonuwu, Johny Lengkong. *Perilaku pemilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2018 (Studi Distrik Tembagapura kabupaten Mimika Papua)*. *Jurnal Politico*, vol 8 No 1. 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tobirin, Muhadjir Darwin, Ambar Widaningrum, "Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga", *Dalam Jurnal Studi Gender*, Vol 10 No 2. September 2018: 25 : <https://www.researchgate.net/publication/340001726>

PENGGUNAAN BAHAN AJAR APLIKASI RUMAH BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI SISTEM TATA SURYA KELAS VI SDN SORONGAN 1 KEC. CIBALIUNG

Oleh :

Jaenudin¹ ,Sholeh Hidayat² , Cucu Atikah³
^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)
¹jaej32243@gmail.com
²sholeh.hidayat@untirta.ac.id,
³cucuatikah@untirta.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Sorongan 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Sorongan 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Sorongan 1. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dan metode yang digunakan proses penelitian tindakan kelas. Hasil temuan dan pembahasan pada siklus 1 yaitu pra siklus ketuntasan hasil belajar siswa sejumlah 16,6%. Pada siklus I terjadi peningkatan kembali menjadi 33,3% dengan kata lain terjadi peningkatan sebanyak 16,7% dari kondisi pra siklus ke siklus I. Pada siklus II terjadi peningkatan kembali sejumlah 90% bagi yang tuntas. Pada siklus II pra siklus ketuntasan hasil belajar siswa sejumlah 13,3%. Pada siklus I terjadi peningkatan kembali menjadi 36,6% dengan kata lain terjadi peningkatan sebanyak 23,3% dari kondisi pra siklus ke siklus I. Pada siklus II terjadi peningkatan kembali sejumlah 93,3% bagi yang tuntas.

Kata Kunci:Bahan Ajar, Rumah Belajar, Motivasi Belajar, Hasil Belajar, IPA Sekolah Dasar

1. PENDAHULUAN

SD Negeri Sorongan 1 adalah forum formal taraf pendidikan dasar. Sistem belajar pada sekolah dasar dengan penggunaan bahan ajar yang dipakai sang pendidik yang memengaruhi motivasi & hasil belajar berdasarkan siswa tersebut, sebagai akibatnya bisa merubah kehidupan berdasarkan individu juga lingkungan yang terdapat disekitarnya. Motivasi & hasil belajar adalah dua hal yang berpengaruh pada peningkatan belajar individu. Bahan ajar memiliki kiprah yang sangat krusial pada proses pembelajaran, hal ini dikarenakan motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan menggunakan tujuan tertentu, sedangkan hasil belajar adalah pencapaian akhir berdasarkan proses belajar.

Berdasarkan pengalaman belajar siswa pada kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1, maka ditemukan rendahnya motivasi belajar & hasil belajar siswa yang masih jauh menurut target, seluruh itu dikarenakan kurangnya motivasi belajar. Hal ini bisa mengakibatkan siswa kurang aktif mengikuti proses pembelajaran pada kelas. Pendidik wajib membelajarkan siswa buat membentuk & menerapkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan.

Rendahnya motivasi belajar & hasil belajar yang ditemukan pada Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1, maka guru/fasilitator wajib melakukan suatu pemugaran pada proses pembelajaran. Salah

satu cara buat menaikkan & memperbaiki praktik pembelajaran pada sekolah, menaikkan relevansi pendidikan, menaikkan mutu pendidikan, & efisiensi pengelolaan pendidikan wajib menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat efektif dilakukan, supaya bisa memperbaiki pembelajaran pada kelas, terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, inovatif & menggembarakan. Pendidik dituntut untuk menaruh perubahan yang lebih baik pada proses pembelajaran. Pendidik bisa menaikkan motivasi & output belajar siswa dalam mata pelajaran IPA materi Sistem Tata Surya. Penelitian ini memakai bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar yang bisa dipakai siswa secara aporisma & salah satu bisnis supaya mutu pendidikan pada Indonesia bisa ditingkatkan dengan memperbaiki proses pembelajaran pada luar kelas. Proses pembelajaran ini bisa diperbaiki salah satunya menggunakan cara mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) memakai pendekatan metode pemecahan masalah. Penelitian tindakan kelas menjadi suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif sang pelaku tindakan yang dilakukan untuk menaikkan kemantapan rasional berdasarkan tindakan mereka pada melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan dan memperbaiki syarat dimana praktek pembelajaran tadi dilakukan. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dilakukan untuk menaikkan motivasi belajar & hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas VI pada Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1 menggunakan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pra daur, anak didik yang mengalami peningkatan motivasi belajar sebesar lima anak didik (16,6%) menurut jumlah 30 anak didik menggunakan nilai homogen-homogen 49,66. Setelah dilaksanakan pemugaran dalam pembelajaran daur I, jumlah anak didik yang mengalami peningkatan motivasi belajar sebagai 10 anak didik (33,3%) menggunakan nilai homogen-homogen 60,66. Dari output ini bisa dikatakan bahwa terjadi peningkatan nilai homogen-homogen menurut pra daur ke daur I yaitu naik 16,7%.

Adapun dalam ketuntasan hasil belajar pra daur sebesar 4 anak didik (13,3%) menggunakan nilai homogen-homogen 51. Setelah dilaksanakan pemugaran pembelajaran dalam daur I, anak didik yang tuntas belajar sebagai 11 anak didik (36,6%) menggunakan nilai homogen-homogen 62. Dari output ini bisa dikatakan bahwa terjadi peningkatan nilai homogen-homogen menurut pra daur ke daur I yaitu naik 23,3%.

Setelah mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam daur I, maka peneliti melakukan pemugaran ulang dalam pembelajaran pada daur II. Pada daur II, diketahui sebagian anak didik berhasil mempertinggi motivasi belajar menggunakan perolehan nilai homogen-homogen 84,33. Mengacu dalam output ini bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar anak didik menurut daur I ke daur II sebanyak 56,7%. Berdasarkan output ini maka dikatakan bahwa pembelajaran memakai bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar bisa mempertinggi motivasi belajar anak didik sinkron menggunakan yang direncanakan.

Ketuntasan hasil belajar anak didik juga berhasil dicapai pada melaksanakan pembelajaran memperoleh nilai homogen-homogen 85,66. Dengan mengacu dalam output ini bisa disimpulkan terjadinya peningkatan output belajar menurut daur I ke daur II sebanyak 56,7%. Berdasarkan output penelitian ini maka bisa dikatakan bahwa pembelajaran memakai bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar bisa mempertinggi output belajar anak didik sinkron menggunakan yang direncanakan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian lainnya pada antaranya Sri Handayati (2020) menggunakan judul Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Dengan Memanfaatkan Fitur Rumah Belajar Pada Mata Pelajaran IPA. Penelitian ini memakai metode R and D (research and

development) output penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan belajar anak didik semakin tinggi menggunakan peningkatan validasi evaluasi pakar materi diperoleh skor homogen-homogen 3,875 yaitu berada dalam kategori "Baik". Hasil validasi pakar media diperoleh skor homogen-homogen 3,75 yaitu dalam kategori "Baik". Sementara Validasi pakar bahasa diperoleh skor homogen-homogen 3,875 yaitu berada dalam kategori "Baik". Untuk output uji coba skala mini respon siswa diperoleh skor 4,25 yaitu dalam kriteria "Sangat Baik", & sedangkan dalam uji coba skala akbar respon siswa memperoleh skor homogen-homogen 4,10 yaitu dalam kriteria "Sangat Baik". Berdasarkan output tadi bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran e-book menggunakan memanfaatkan fitur tempat tinggal belajar berada pada kategori baik & bisa dipakai dalam pembelajaran IPA.

4. KESIMPULAN

Penggunaan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar tepat dipakai pada pembelajaran dalam mata pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1. Penggunaan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar bisa menaikkan motivasi belajar murid dalam mata pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1 dan penggunaan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar bisa menaikkan hasil belajar murid dalam dalam mata pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sorongan 1.

SARAN

Berdasarkan output penelitian yang sudah dilaksanakan, maka saran yang diberikan sang peneliti merupakan menjadi berikut: Dalam proses pembelajaran pada kelas, pendidik usahakan menerapkan materi ajar menggunakan bahan ajar Aplikasi Rumah Belajar supaya bisa menaikkan motivasi belajar & output belajar murid pada kelas lain. Pendidik wajib sebagai fasilitator murid supaya pembelajaran bisa berjalan menggunakan baik & optimal sebagai akibatnya akan ada motivasi buat selalu belajar baik pada sekolah juga pada tempat tinggal & akan menerima output belajar yang optimal. Pendidik usahakan bisa memanfaatkan saat secara optimal supaya aktivitas pembelajaran bisa berjalan sinkron menggunakan apa yang telah direncanakan.

5. REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, B. Uno. (2017). *Teori Motivasi Dan Pengukuran (Analisis di bidang pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunandar. (2013). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Suatu Pendekatan Praktis Disertai Dengan Contoh*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Lestari, Ika. (2013). *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Padang: Akademia Permata.
- Monika, M., & Adman, A. (2017). *Peran Efikasi Diri dan Motivasi Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 110-117.
- Mudlofar, Ali. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muliani, Sumardi, & Munir, A. R. (2015). *Motivasi, Komitmen Dan Budaya Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Peserta Kursus Toefl Preparation Pada Pusat Bahasa Universitas Hasanuddin*. *Jurnal Analisis*, 4(2), 190-195.
- Purwanto. (2010). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, Wina. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Prenada Media.
- Sardiman. (2018). *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjukur, Sulihin B. (2013). *Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Di Tingkat SMK*. *Jurnal Pendidikan Vokasi* 2 (3): 368-78.
- Sudjana, N. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Widiasworo, Erwin. (2015). *Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar Peserta Didik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

ANALISIS SIKAP SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DARING DI KELAS X PH1 DI SMK N 2 BANGLI

Oleh :

Ni Luh Ratna Rapiasih¹⁾, Ni Made Ayu Purnami²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Pendidikan ITP Markandeya Bali

¹email : ratnarapiasih2018@gmail.com

²email : madeayupurnami1995@gmail.com

Abstrak

Penerapan pembelajaran daring tentunya diiringi oleh permasalahan baru dalam proses pembelajaran maupun dalam mengevaluasi peserta didik. Dalam penerapan pembelajaran daring terdapat permasalahan terkait kesulitan guru dalam mengevaluasi sikap peserta didik terutama dalam menilai sikap siswa selama pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner terkait mengenai analisis penilaian sikap siswa selama pembelajaran daring pada masa pandemi yang diisi oleh responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa penilaian sikap dalam pembelajaran daring sulit dilakukan dan hasilnya kurang akurat. Penilaian sikap selama pembelajaran daring masih sebatas guru melihat respon peserta didik dalam hal mengerjakan tugas yang diberikan dan penilaian sikap menjadi hal yang perlu untuk dibenahi selama pembelajaran daring di era new normal dari segi kesiapan guru menyiapkan instrumen dan mengkondisikan siswa agar mengembangkan karakter selama pembelajaran daring.

Kata kunci : penilaian, sikap, pembelajaran daring, karakter, kesiapan.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa untuk melakukan perubahan sikap dan pola pikir siswa ke arah yang lebih baik, untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pada proses ini terdapat aktivitas siswa sebagai pelajar dan terdapat aktivitas guru sebagai pembelajar. Pembelajaran dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh pendidik kemudian diaplikasikan melalui pertemuan yang didukung oleh media, alat, dan bahan yang sesuai. Tugas guru sebagai pembelajar adalah sebagai pengendali atau pengarah keterampilan dan pengetahuan yang akan dikuasai siswa. Sementara itu, siswa sebagai pelajar berperan aktif dalam melaksanakan instruksi guru untuk menuntaskan tujuan pembelajaran (Syarifudin 2020)

Sistem pendidikan di era ini terjadi pergeseran paradigma abad 21 yang membawa perubahan, pada proses belajar mengajar di era ini telah melakukan inovasi-inovasi yang menekankan pada perubahan. Perubahan yang terjadi pada era saat ini mengintegrasikan sistem dan teknik pembelajaran yang berbeda melalui penerapan modernitas dan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan berupa multimedia interaktif atau aplikasi digital yang dapat membantu siswa mempelajari suatu materi. Penggunaan multimedia interaktif dalam proses belajar mengajar di kelas dapat meningkatkan efisiensi motivasi, memfasilitasi pembelajaran aktif, eksperimentasi, dan konsistensi, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain pergeseran paradigma pendidikan saat ini, ada pembelajaran jarak jauh darurat, yang disebabkan

oleh pandemi virus Covid19. Hal ini menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara online dan membutuhkan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar (Wiana dkk, 2018; Kamila, 2021; Santosa, 2021).

Pembelajaran daring sebagai sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan *platform* yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Anon 2021)

Terkait dengan pembelajaran daring, sarana pendukung pembelajaran daring/jarak jauh banyak sekali *platform-platform* bermunculan guna membantu dan menunjang proses pembelajaran daring agar dapat terlaksana dengan baik. Seperti *Google classroom, google meet, zoom dll* yang dapat menyediakan kelas online, sehingga memudahkan bagi siswa untuk mengakses konten pembelajaran dimana saja.

Maka dari itu banyak sekolah-sekolah telah menerapkan pembelajaran daring, salah satunya adalah SMK N 2 Bangli. Di sekolah ini menerapkan pembelajaran daring sebagai alternatif untuk melangsungkan proses kegiatan belajar mengajar, salah satunya menggunakan media pembelajaran *google classroom* untuk menyampaikan materi pembelajaran.

Salah satu alternatif untuk tetap melangsungkan proses pembelajaran di masa pandemi adalah melalui pembelajaran daring, namun

para guru menghadapi kesulitan dalam memantau sikap peserta didik saat melaksanakan pembelajaran daring. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memiliki ide untuk menganalisis sikap siswa kelas X PH1 di SMK N 2 Bangli dalam penerapan pembelajaran daring. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sikap siswa menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan pembelajaran daring, dan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sikap siswa terhadap pembelajaran daring (Anon 2021).

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (dalam Syahwani, 2014:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Syahwani 2015).

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan kuesioner. Observasi dilakukan peneliti untuk menganalisis sikap siswa selama pembelajaran yang berlangsung secara daring di SMK Negeri 2 Bangli dan kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden dengan mengetahui sikap dan keantusiasannya siswa terhadap pembelajaran daring.

Menurut Sugiyono (dalam Syahwani, 2012:310) dalam observasi peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan adanya teknik observasi peneliti lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan siswa, sedangkan kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan pendekatan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Kuesioner dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan untuk mengetahui perbedaan dari hasil kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas X PH1 Di SMK 2 Bangli, sedangkan untuk teknik dokumentasi hanya sebagai pelengkap dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti (Syahwani 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan sasaran kelas X PH1 di SMKN 2 Bangli untuk dijadikan responden sebanyak 22 peserta didik dalam satu kelasnya. Kemudian data yang sudah didapatkan oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif mengenai bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran daring.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh siswa kelas X PH1, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif mengenai bagaimana penilaian sikap siswa selama pembelajaran daring. Dalam menganalisis data peneliti membuat daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner terkait bagaimana penilaian sikap siswa selama pembelajaran daring. Hal ini untuk dapat merangkum bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran daring.

Berdasarkan hasil kuesioner, dari jumlah 22 responden yang mampu menjelaskan dengan baik mengenai pengetahuan peserta didik tentang pembelajaran jarak jauh /daring sejumlah 9 responden menyatakan pembelajaran jarak jauh /daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan platform pembelajaran berbasis digital dengan menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Terkait platform media pembelajaran, 22 responden menyampaikan platform media pembelajaran yang paling sering digunakan yakni google classroom dikarenakan saat ini di sekolah tersebut hanya didominasi oleh penggunaan platform media pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring dilaksanakan via WhatsApp dan berdiskusi melalui aplikasi zoom meeting di setiap mata pelajaran. Sejumlah 14 responden menyatakan bahwa kendala yang sering terjadi saat pembelajaran daring adalah adanya gangguan sinyal dan kouta internet yang tidak memadai. Terkait dengan kendala yang dihadapi peserta didik saat melaksanakan pembelajaran daring diantaranya proses pembelajaran dinilai kurang efektif karena tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman maupun dengan guru-guru yang mengajar dan kurang memahami materi yang diberikan kepada guru, serta tidak bisa mengatur waktu belajar dengan pekerjaan yang ada dirumah dan ini yang menjadi penghambat saat mengikuti pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian, 17 responden menyatakan sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu bisa dari benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Suka atau tidak suka yang muncul karena adanya suatu objek tertentu. Peranan sikap dalam proses pembelajaran sangat penting karena kita perlu kedisiplinan dalam melaksanakan pembelajaran, hal tersebut disampaikan dengan jelas oleh 10 responden. Sejumlah 18 responden menyatakan untuk mengatasi kendala dalam persiapan pembelajaran daring dapat dimulai dengan persiapan awal mencakup segala hal yang akan diperlukan saat pembelajaran, dan menyiapkan kondisi sinyal yang memadai serta kouta internet. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden dengan total 22 responden mengatakan bahwa google classroom adalah platform media pembelajaran daring yang paling disukai karena cara

menggunakan aplikasi tersebut tidak begitu susah. Terkait dengan pembelajaran daring, sejumlah 11 responden menyatakan bahwa mereka menyukai pembelajaran daring ini sebab mendapatkan waktu luang yang banyak untuk melakukan hal-hal yang produktif serta waktu pembuatan tugas yang lumayan lama dan dapat mengerjakannya dengan santai.

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah dilakukan peneliti, dan dari total 22 responden ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa saat pembelajaran daring, dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa tidak selalu lancar seperti apa yang diharapkan. Siswa terkadang mengalami kesulitan dalam proses belajar, dan sangat kesulitan dalam menangkap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru yang mana disebabkan oleh kendala jaringan, disini siswa memiliki kendala dan tidak jarang terlambat saat mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut disebabkan jaringan yang digunakan untuk menyambungkan e-learning ke pembelajaran mengalami gangguan, sehingga jaringan tidak bisa lancar dan mengakibatkan peserta didik keluar masuk ruang virtual saat pembelajaran daring yang berjalan secara langsung. Beberapa responden menyatakan pada saat pembelajaran daring adapun kendala yang dihadapi yaitu jaringan internet, kuota yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh guru, dan kendala pada batas waktu pengumpulan tugas jika ada tugas yang diberikan oleh guru, berdasarkan dari jawaban responden mengatakan bahwa kesulitan belajar yang mereka alami adalah kesulitan jaringan. Jaringan di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya pembelajaran daring. Apabila jaringan mengalami gangguan maka peserta didik akan terkendala dalam proses pembelajaran. Baik guru dan peserta didik sama-sama memiliki kendala dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, terkait kendala memahami materi, kesulitan dalam menyampaikan materi, ketika ingin menjelaskan materi pembelajaran para guru juga mengalami kesulitan, adapun materi yang dikirim dalam bentuk video yang membuat peserta didik kurang paham dan juga kadang mereka kesulitan saat mencari materi atau tugas yang diberikan oleh guru karena kendala di internet. Hal ini menandakan terdapat kendala pada siswa terkait pemahaman materi.

Dari pemahaman siswa, ternyata mereka terkendala saat proses pembelajaran walaupun guru sudah melakukan pembelajaran online dengan baik, seperti menggunakan google classroom, zoom atau media online lainnya, tetapi tetap saja sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran daring kurang bersemangat dan bersikap semena-mena dalam artian peserta didik tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, Untuk mengetahui lebih jelas lagi sikap siswa terhadap pembelajaran daring, peneliti membandingkan responden dengan hasil jawaban yang berbeda-beda, seorang responden menyatakan

bahwa selama pembelajaran daring peserta didik tersebut jarang bisa mengikuti kegiatan online karena terhalang kuota dan kurangnya semangat belajar ditambah tidak mengertinya apa yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran online, sedangkan responden lainnya menyatakan bahwa selama pembelajaran daring peserta didik tersebut sudah berusaha mengikuti pembelajaran daring walaupun dengan kurang semangat dan tidak mengerti. Jadi peneliti menyimpulkan hasil perbandingan dari satu responden dengan responden lainnya kemudian menyatakan bahwa 99,9% peneliti menyatakan sikap siswa terhadap pembelajaran daring kurang disiplin atau kurang baik dalam mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi, peneliti juga menjelaskan kurangnya sikap peserta didik dalam pembelajaran daring karena kurangnya perhatian selama pembelajaran daring, dan guru juga tidak bisa menilai sikap siswa dalam pembelajaran daring dengan seksama, jadi itu bisa menjadi penyebab sikap yang peserta didik tunjukkan dalam pembelajaran daring bisa dikatakan kurang baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu: analisis sikap siswa terhadap pembelajaran daring tidak akurat karena guru tidak bisa melihat secara langsung sikap siswa yang muncul selama proses pembelajaran. Selain itu dari hasil yang didapatkan peneliti menekankan bahwa penilaian sikap menjadi hal perlu dibenahi selama pembelajaran daring di era new normal. Baik dari segi kesiapan guru dalam hal menyiapkan pembelajaran agar peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring maupun luring lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah Beliau peneliti ini dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak-pihak terkait. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepala sekolah dan para guru di SMKN 2 Bangli yang telah memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
2. Siswa kelas X PH1 di SMKN 2 Bangli yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
3. Dosen pembimbing yang telah membimbing serta membantu dalam menyelesaikan artikel ini.
4. Teman-teman PPL di SMKN 2 Bangli yang telah melaksanakan PPL sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Peneliti menyadari artikel penelitian ini masih perlu perbaikan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang

sifatnya membangun agar ke depannya kualitas penelitian menjadi lebih baik.

6. REFERENSI

- Anon. 2021. "Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Daring Menggunakan E-Learning Berbasis Web Mata Pelajaran Al- Qur ' an Hadits Di Ma Rauhdatul Jannah Oleh : Sri Wahyuningsih Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2021 M / 1442 H."
- Syahwani, U. 2015. "STRATEGI COOPERATIVE LEARNING MODEL JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN IPS DI KELAS IX MTs NEGERI KETAPANG." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*.
- Syarifudin, Albitar Septian. 2020. "Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua* 5(1):31–34. doi: 10.21107/metalingua.v5i1.7072.
- Kamila, I., Syahri, I., & Mulyadi. (2021). The Influence Of Using Digital Story Telling And Motivation On Speaking Skill Of Eleventh-Grade Students Of Sma Negeri 1 Simpang. *Exposure Journal* , 10(1), 144. Retrieved from : <https://bit.ly/3pqqJQG>
- Santosa, M. H. (2021). *Teknologi and Pembelajaran Bahasa Inggris*. (G. Jati, & F. Dewi, Eds.) Perkumpulan Pengajar Bahasa Berbasis Teknologi Informasi.
- Wiana, W., Barliana, M. S., & Riyanto, A. A. (2018). The Effectiveness of Using Interactive Multimedia Based on Motion Graphic in Concept Mastering Enhancement and Fashion Designing Skill in Digital Format. *International Journal: Emerging Technologies in Learning*, 13(1), 4. Retrieved from: <https://doi.org/10.3991/ijet.v13i02.7830>

EFEKTIVITAS PENERAPAN *BLENDED LEARNING* PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMKN 2 BANGLI

Oleh.

Ni Putu Sri Galuh Lestari¹⁾, Ni Made Ayu Purnami²⁾, I Ketut Dedi Agung Susanto Putra

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Pendidikan, ITP Markandeya Bali

¹srigaluhlestari@gmail.com

²madeayupurnami1995@gmail.com

³agungdedi04@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi COVID-19 menimbulkan masalah baru bagi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran telah mengalami perubahan yang drastis. Pembelajaran tidak lagi menggunakan pertemuan konvensional tatap muka, tetapi mulai diintegrasikan dengan pembelajaran online. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan penerapan *blended learning* pada pembelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah guru Bahasa Inggris kelas X,XI,XII SMK Negeri 2 Bangli yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode *blended learning*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua dapat mengatasi masalah dalam mengadaptasi metode *blended learning* pada saat pandemi. Penerapan metode *blended learning* dalam pembelajaran Bahasa Inggris menuntut guru untuk kreatif dalam menyediakan platform pembelajaran Bahasa Inggris berupa link *YouTube*, video atau *powerpoint*. Keaktifan siswa di dalam pertemuan via *Google Meet* dan orang tua yang mendukung siswa selama pembelajaran online sangat membantu kemajuan siswa.

Kata kunci: Covid-19, Blended Learning, SMKN 2 Bangli

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai *new normal*, era ini merupakan sebuah babak baru di dunia, dimana pada era ini tumbuh kebiasaan baru untuk melakukan dan menjalankan aktivitas seperti biasa namun selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes). Menghadapi dunia pendidikan yang semakin terpengaruh dalam zaman *new normal* yang mengharuskan pendidik dan tenaga pengajar berada di rumah atau *work from home* (WFH) sehingga diharapkan semua pendidik dapat melek teknologi dan berinovasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih interaktif dalam segala bidang.

Pendidikan merupakan salah satu hal krusial, dalam *new normal*, dikarenakan kegiatan pembelajaran konvensional akan dibatasi, dan timbul kekhawatiran tentang efektivitas kegiatan belajar dengan model yang baru ini. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan tuntutan revolusi 4.0 tersebut membuat lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan berbagai inovasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar, termasuk melaksanakan pembelajaran dengan model *Blended learning*.

Salah satu bentuk dari pengajaran dengan menggunakan sistem *Blended learning* adalah dengan menggunakan aplikasi yang ada di telepon genggam atau mobile-phone. Pada saat ini penggunaan telepon genggam kalangan para pelajar di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Pada umumnya mereka

menggunakan telepon genggam untuk berbagai keperluan, dimanasebagian besar penggunaan telepon genggam kalangan remaja untuk bersenang-senang seperti mengunduh dan mendengarkan lagu, menghubungi teman, menonton film (*streaming*), berfoto dan bermain games. Sudah saatnya bagi para remaja menggunakan telepon genggam untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mencari informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelajaran, membaca berita dan yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana belajar.

Pembelajaran melalui Mobile-Learning (M-Learning) adalah pembelajaran yang cukup efektif dikarenakan peserta didik dapat mengakses materi, mengerjakan latihan dan mengirimkan tugas kapanpun dan dimanapun mereka. Ada beberapa aplikasi yang ada di telepon genggam yang dapat digunakan untuk media pembelajaran, seperti: WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan ada banyak lagi yang lain.

Dampak dari penerapan sistem belajar baru ini menuntut guru dan siswa untuk kreatif dan berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, banyak perbedaan yang dirasakan ketika pembelajaran berbasis online. Pembelajaran ini berfokus pada ketepatan dan kecermatan siswa dalam menerima dan mengolah informasi pembelajaran. Pembelajaran ini dapat dilakukan kapanpun waktunya dan dimanapun tempat belajarnya, contohnya seperti di kamar, ruang tamu dan sebagainya serta waktu yang disesuaikan

misalnya pagi, siang, sore atau malam. Selain itu *blended learning* juga dapat dijangkau walaupun dengan jarak jauh, seperti halnya siswa tidak harus pergi ke sekolah untuk belajar. Mereka dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Sistem pembelajaran ini juga memiliki beberapa kendala dan kelebihan. Kendala yang dihadapi berupa kendala sinyal internet, guru kurang menguasai IT, seringnya pemberian tugas daripada penjelasan materi pembelajaran, minimnya interaksi langsung antara guru dan siswa, dan ketidakefektifan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang membuat anak lebih leluasa dalam bermain gadget.

Sangat penting peran orang tua dalam pendidikan dan kesadaran pentingnya kolaborasi guru, orang tua, dan siswa akan menciptakan kerja sama yang baik untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Dengan adanya kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa akan membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mempermudah proses pembelajaran daring sehingga apapun bentuk pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru pada saat kondisi pandemi akan tetap dapat diterima dengan baik oleh siswa dengan bantuan kerja sama orang tua. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas strategi pembelajaran bauran atau *blended learning* yang digunakan selama kegiatan belajarmengajar dan menganalisis kendala-kendala yang dialami selama kegiatan belajar mengajar online di era new normal di SMK Negeri 2 Bangli

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan agar mempunyai gambaran yang signifikan tentang pembelajaran Bahasa Inggris di Era New normal saat ini. Pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran *blended learning*, yang memudahkan siswa untuk mengakses dan mempelajari materi yang telah diberikan.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif bertujuan untuk dapat menggambarkan fenomena pembelajaran yang terjadi saat pandemi covid 19 khususnya pada masa Era New Normal saat ini. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli. Para guru mata pelajaran Bahasa Inggris seluruh tingkat menggunakan metode *blended learning* ketika mengajardi mana subyek berjumlah 6 orang.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan secara mendalam yang terkait bersama bagaimana efektivitas pelaksanaan *blended learning* di dalam pembelajaran Bahasa Inggris di kelas X,XI,XII SMK Negeri 2 Bangli, bersama wawancara mendalam ini data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam teknik wawancara ini peneliti memakai tipe wawancara terstruktur, yaitu penulis lakukan wawancara bersama mengacu kepada pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yang meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data (data reduction), display data (data display), dan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, efektivitas pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* di era *new normal* dikatakan sudah terlaksana namun masih kurang maksimal. Hal ini didasarkan pada data-data yang telah didapatkan pada hasil penelitian. Secara umum efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sistem jalinan antar siswa maupun siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk menggapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran mampu dicermati berasal dari kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung, tanggapan siswa pada pembelajaran dan penguasaan materi. Untuk menggapai suatu tujuan pembelajaran yang efisien perlu adanya jalinan timbal balik dari siswa dan guru, selain itu juga perlu disesuaikan dengan situasi lingkungan sekolah, layanan dan prasarana, serta fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal.

Dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif tujuan pembelajaran akan menjadi mudah untuk dapat dicapai. Metode pembelajaran yang tepat tidak hanya memberikan suasana yang nyaman untuk peserta didik namun juga mampu memberikan mereka kesempatan untuk lebih mengembangkan diri dengan sumber belajar yang beranekaragam dan juga bersifat sistematis.

Data menunjukkan bahwa SMK Negeri 2 Bangli dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* sudah terlaksana sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran masih terdapat kendala / hambatan baik dari guru maupun dari siswa pada saat pembelajaran berlangsung sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal.

Dari data wawancara guru Bahasa Inggris kelas X,XI,XII di SMK Negeri 2 Bangli pada tanggal 17-22 Januari 2022 menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* peran perangkat elektronik sangat penting

dan sangat diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris serta sumber belajar yang digunakan oleh guru di SMK Negeri 2 Bangli adalah HP (handphone), laptop, video pembelajaran, dan buku pelajaran. Akses internet dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* di SMK Negeri 2 Bangli sudah cukup memadai, hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kuota internet untuk guru dan siswa, namun terkadang masih mengalami kendala seperti sinyal yang kurang optimal dikarenakan lokasi sekolah berada di daerah pegunungan, dan beberapa siswa mengeluh akibat kesulitan dalam mengirimkan tugas dimana hal ini disebabkan oleh perangkat (handphone) yang mereka miliki belum memadai.

Materi pembelajaran Bahasa Inggris disampaikan menggunakan media Power Point sebagai pengganti papan tulis. Penggunaan Learning Management System (LMS) juga diperlukan dalam pembelajaran daring. Menurut Sudiana (2016), terdapat beberapa macam media LMS atau bentuk media pembelajaran Virtual Class, yaitu Quipper, Edmodo, Schoology, GeSchool, Kelas Kita, dan Learnboost. Adapun media LMS yang digunakan saat pembelajaran online Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli adalah Google Classroom, yang mana media ini berfungsi sebagai wadah pembuatan, pendistribusian dan penilaian tugas. Aplikasi ini menyediakan situs pusat untuk berkomunikasi dengan siswa, mengirim umpan balik dan memberikan pekerjaan rumah. Beberapa kekuatan umum Google Classroom adalah penghematan waktu dan fitur organisasi yang mudah digunakan dan sangat sederhana. Media lain yang digunakan antara lain adalah penayangan video edukasi dari media YouTube. Menurut Sudjana & Rivai (2010), media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai.

Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* guru membuat link pertemuan (link google meet) yang disebar di LMS (google classroom) pranala tersebut juga akan didistribusikan melalui grup WA (whatsapp) ataupun telegram yang bertujuan untuk mempermudah guru dalam penyampaian informasi. Proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* diberikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah namun hal ini dapat disesuaikan kembali dengan siswa dan guru yang bersangkutan. Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* berdasarkan pernyataan dari guru Bahasa Inggris kelas X, XI, XII tujuan pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan *blended learning* dapat tercapai namun masih belum tercapai dengan maksimal, hal ini disebabkan guru tidak bisa memantau proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik secara maksimal.

Proses penilaian yang dilakukan oleh guru di SMK Negeri 2 Bangli ini melalui kerajinan siswa dalam menyetor tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru dan absensi kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning*. Cara guru dalam melakukan interaksi tanya jawab dengan siswa melalui pertemuan online via google meet, sedangkan cara guru untuk mempertahankan konsentrasi siswa selama pembelajaran berlangsung adalah dengan memberikan *warm activity* 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan memberikan *ice breaking* disela-sela pembelajaran. Prilaku belajar siswa selama pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* pada setiap kelas di SMK Negeri 2 Bangli siswa rata-rata sudah bisa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh guru di setiap kelas.

Dalam proses pertemuan online tidak semua siswa dapat berpartisipasi dikarenakan keterbatasan akses internet dan sarana yang dimiliki oleh siswa sehingga berakibat dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa yang tidak berperan aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning*. Pada proses pembelajaran berlangsung hanya beberapa siswa yang berperan aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Data menunjukkan bahwa hanya beberapa guru yang memberikan respon negatif terkait peningkatan hasil belajar siswa selama melaksanakan pembelajaran *blended*. Untuk sebagian guru, media pembelajaran *blended* sangatlah membantu untuk mentransfer ilmu dan meningkatkan hasil belajar siswa serta kreativitas siswa. Hal ini terjadi karena banyak guru yang sudah mulai mengetahui cara menggunakan media pembelajaran online karena sebelumnya mengajar secara penuh di sekolah.

Proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* yang telah dilakukan selama ini belum bisa membuat siswa untuk semangat dalam belajar dikarenakan dampak dari covid-19 terhadap proses pembelajaran siswa seperti tujuan pembelajaran yang tidak bisa tercapai secara optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang tidak tepat waktu dalam menyetor tugas yang telah diberikan oleh guru sehingga proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* kurang optimal dan berdampak pada proses pemahaman siswa tentang materi yang diberikan oleh guru sehingga berdampak dalam proses meningkatkan prestasi belajar siswa.

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran, dimana dalam kegiatan ini guru menyimpulkan, menilai dan menganalisis hasil pembelajaran. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diajarkan sekaligus dapat menjadi umpan balik bagi guru sendiri guna melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya,

guru memberikan penilaian berupa tes, dan juga melalui absensi siswa. Bentuk pelaksanaan tes dapat berupa tes lisan, tugas, dan tes tertulis. Evaluasi yang dilakukan oleh guru Bahasa Inggris X, XI, XII di SMK Negeri 2 Bangli yaitu tes lisan dengan cara memberikan pertanyaan diakhir pembelajaran seputar materi yang telah dipelajari, kemudian tes tertulis yaitu pemberian tugas-tugas yang diberikan pada siswa setiapakhir pertemuan, untuk tugas pembelajaran *blended learning* sendiri dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama sesudah tugas selesai, siswa wajib mengumpulkan tugas melalui google classroom, di SMK Negeri 2 Bangli tetap melakukan tes penilaian tengah semester (PTS) atau penilaian akhir semester (PAS). Sedangkan dari non tes, guru melakukan pengamatan dari seberapa aktif siswa saat pembelajaran berlangsung. Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran *blended* adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya terhadap hal-hal yang terkait proses pembelajaran bauran (*blended*) pada pembelajaran Bahasa Inggris di era *new normal*, evaluasi yang dilakukan dapat mendukung peningkatan terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa kelas X, XI, XII di SMK Negeri 2 Bangli.

Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan media *blended learning* yang ditemukan oleh guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli berdasarkan data wawancara dengan guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli menyatakan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja, memberikan kemudahan kepada guru ataupun siswa sebab dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, Siswa dan guru dapat membuat kesepakatan tentang pembelajaran tanpa harus terikat dengan jadwal yang tersedia.

Disisi lain *blended learning* dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. *US based Partnership for 21st Century Skills (P21)*, mengidentifikasi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang pada abad 21 yaitu "The 4Cs" - *communication, collaboration, critical thinking dan creativity* (Zubaidah, 2016). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S)* mengategorikan keterampilan abad ke- 21 menjadi 4 kategori, yaitu *way of thinking, way of working, tools for working dan skills for living in the world* Griffin, McGaw & Care (dalam Binkley et al, 2014). Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penelitian Majir (2019) mengungkapkan bahwa *blended learning* dapat meningkatkan literasi informasi dan kemampuan memecahkan masalah siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut *blended learning* cukup efektif untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh setiap orang guna menghadapi tuntutan perkembangan zaman.

Kendala yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran *blended learning* adalah tujuan

pembelajaran yang tidak bisa tercapai secara optimal, tidak semua siswa tinggal di daerah dengan akses internet yang baik, siswa tidak tepat waktu dalam menyetor tugas yang telah diberikan, tidak semua siswa aktif dan antusias dalam bertanya dan menjawab selama proses pembelajaran berlangsung. Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bangli menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan system *Blended learning* kurang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.

4. KESIMPULAN

Strategi pembelajaran bauran (*blended learning*) yang digunakan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dinilai cukup efektif karena menggunakan banyak media pembelajaran sebagai pendukung dalam pembelajaran yang membantu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Selain itu, dilakukannya pembelajaran *blended* ini merupakan perwujudan dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Pembelajaran yang beralih dari tatap muka ke daring selama pandemi Covid-19 berlangsung membuat semangat dan motivasi belajar siswa berkurang karena terganggunya aktivitas belajar siswa selama di luar lingkungan sekolah. Namun, hal ini tidak akan menutup kemungkinan bahwa pembelajaran *blended* selamanya akan berdampak kurang efektif. Membuat dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat menjadi PR bagi guru untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan indikator pembelajaran.

Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran *blended* yang ditemukan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a) Kekurangan dalam pembelajaran *blended Learning* berdasarkan data wawancara guru Bahasa Inggris kelas X, XI, XII menyatakan kendala yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* adalah tujuan pembelajaran yang tidak bisa tercapai secara optimal, siswa tidak tepat waktu dalam menyetor tugas yang telah diberikan, tidak semua siswa aktif dan antusias dalam bertanya dan menjawab selama proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* berlangsung.
- b) Kelebihan proses pembelajaran *blended learning* adalah proses pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja, memberikan kemudahan kepada guru ataupun siswa sebab dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Siswa dan guru dapat membuat kesepakatan tentang proses mengirim tugas pembelajaran bahasa Inggris menggunakan *Blended Learning* tanpa harus terikat dengan jadwal yang tersedia. Selain itu dengan adanya *blended learning* dapat meningkatkan kreativitas siswa.

Berdasarkan hasil penelitian terkait saran bagi para gurudan siswa agar proses belajar mengajar

secara *blended learning* menjadi lebih menyenangkan. Guru merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pendidikan, guru perlu lebih memperhatikan lagi siswa agar siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru harus lebih bisa memanfaatkan media pembelajaran lainnya agar siswa tidak mudah bosan pada saat pembelajaran *blended*. Dalam menciptakan pembelajaran, guru perlu mengoptimalkan lagi penggunaan media pembelajaran yang dikemas melalui video pembelajaran.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah Beliau penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak-pihak terkait. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- 1) Ibu Ni Made Ayu Purnami,S.Pd.,M.Pd, yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses penelitian berlangsung
- 2) Kepala sekolah dan para guru Bahasa Inggris Sekolah Menengah kejuruan negeri 2 Bangli yang telah memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian berlangsung
- 3) Semua pihak yang telah membantu peneliti selama proses pelaksanaan penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

Peneliti menyadari artikel penelitian ini masih perlu perbaikan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun agar ke depannya kualitas penelitian menjadi lebih baik.

6. REFERENSI

- Abdullah, W. (2018). Model Blended Learning Dalam Meningkatkan. *Ejournal.Kopertais4*, 7(1), 855–866. ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/3169/2359/
- Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2014). Defining twenty-first century skills. In *Assessment and teaching of 21st century skills*. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2
- El Fauziah, U. N., Suryani, L., & Syahrizal, T. (2019). Penerapan Google Classroom Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Kepada Guru-Guru Bahasa Inggris Smp Di Subang. *Abdimas Siliwangi*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.22460/as.v2i2p183-191.3281>
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2008). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm 6. 54. 54–71.*
- Karyono, H., & Subandowo, M. (2019). Buana

Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya Tahun XV, No. 28. Oktober 2019. *Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya*, 15(27), 35–54.

- Rohana, S., & Syahputra, A. (2021). Model Pembelajaran Blended Learning Pasca New Normal Covid-19. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 48. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.488>
- Saekawati, R., & Nasrudin, H. (2021). Effectiveness of Guided Inquiry-Based on Blended Learning in Improving Critical Thinking Skills. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 14(1), 53–68. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v14i1.36947>
- Sudiana, R. (2016). *Efektifitas Penggunaan Learning Management System Berbasis Online*. 9(2), 201–209.
- Sudjana, N., & Rivai, A. (2010). Media pembelajaran. *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.
- Teknik, J., Politeknik, S., Bali, N., Jimbaran, B., & Bali, B. (2019). *EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING*. 245–254.
- Utari, W., Hikmawati, V. Y., & Gaffar, A. A. (2020). Blended Learning : Strategi Pembelajaran Alternatif Di Era New Normal. *Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA 2020 "Transformasi Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDCs) Di Era Society 5.0,"* 262–269. <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/330/313>
- Zubaidah, S., Universitas, J., & Malang, N. (2018). *MENGENAL 4C: LEARNING AND INNOVATION SKILLS UNTUK MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 I.*